PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto inscribed on the World Heritage List in 2019

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

World Heritage Convention

GEOPARK SAWAHLUNTO

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023
Tentang :

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

R P D

KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024-2026





BARENLIBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2023



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang :

a. bahwa daerah menyusun rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 dan berakhirnya periodesasi dokumen perencanaan menengah daerah, maka diperlukan pengaturan tentang rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah tahun 2024-2026, diperlukan pengaturan tentang rencana pembangunan daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan an pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
9. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Barenlitbangda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
14. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat Kota Sawahlunto.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Pasal 2

(1) RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
(2) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam RKPD.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:
a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040;
b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025;
c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2017-2022;
d. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
e. isu strategis dan kebijakan nasional; dan
f. peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

RPD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi:
a. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama 3 (tiga) tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra PD dan rencana kerja PD.

Pasal 5

RPD Tahun 2024-2026 dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada masa RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 berakhir.

Pasal 6

(1) RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I : Pendahuluan;
    b. bab II : gambaran umum;
    c. bab III : gambaran Keuangan daerah;
    d. bab IV : permasalahan dan isu strategis;
    e. bab V : tujuan dan sasaran;
    f. bab VI : strategi, arah kebijakan dan program prioritas;
    g. bab VII : kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

h. bab VIII : kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
i. Bab IX : Penutup.

(2) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPD Tahun 2024-2026 dituangkan dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 8

(1) Barenlitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 hanya dapat dilakukan apabila :
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan/atau
c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD tahun selanjutnya.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Maret 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DEFI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GRAFIK ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I-3
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-5
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026 ..... I-5
BAB II GAMBARAN UMUM
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-2
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-16
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM II-65
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-197
2.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA II-225
2.2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYEENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN II-225
2.2.2 EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) II-301
2.3 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) II-303
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.2 KINERJA KEUANGAN MASA LALU III-2
3.2.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD III-2
3.2.2 PERMASALAHAN UMUM PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN III-7
3.2.3 KEBIJAKAN TERHADAP PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO III-8
3.2.4 NERACA DAERAH III-10
3.2.5 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN III-12
3.2.6 ANALISIS PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA III-14
3.3 KERANGKA PENDANAAN III-15
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN IV-1
4.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI IV-1
4.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT IV-1
4.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM IV-6
4.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH IV-14
4.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH IV-17
BAB V TUJUAN DAN SASARAN
5.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024-2026 ..... V-3
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MENURUT TUJUAN DAN SASARAN VI-1

6.2 *ROADMAP* INOVASI TAHUN 2024-2026 ..... VI-47

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN VII-1
7.2 KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN VII-2

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO VIII-1
8.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA VIII-2
8.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-6

BAB IX PENUTUP

9.1 KAIDAH PELAKSANAAN IX-1
9.2 TINDAK LANJUT IX-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah RT, RW, Dusun, dan Luas Wilayah Desa serta Kecamatan II-2
Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto II-4
Tabel 2.3 Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto II-5
Tabel 2.4 Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaan per Kecamatan II-9
Tabel 2.5 Luas Lahan Menurut Kepemilikan II-10
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2022 ..... II-12
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022 ..... II-13
Tabel 2.8 Jumlah Kelahiran, Kematian dan Perpindahan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2022 ..... II-14
Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Tahun 2018 – 2022 (jiwa/Km2) II-15
Tabel 2.10 Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2022 ..... II-15
Tabel 2.11 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kota Sawahlunto Tahun 2022 .... II-16
Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022 ..... II-18
Tabel 2.13 Perkembangan Pertumbuhan dan Nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto Dan Kontribusi Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-19
Tabel 2.14 Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Sawahlunto Serta Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB ADHB Kota Tahun 2018 – 2022 ..... II-21
Tabel 2.15 Laju Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 ..... II-26
Tabel 2.16 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Dan Variabel Pembentuknya Tahun 2018 – 2022 ..... II-29
Tabel 2.17 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah/Jiwa) Tahun 2018 – 2022 ..... II-30
Tabel 2.18 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022 ..... II-32
Tabel 2.19 Perkembangan Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-35
Tabel 2.20 Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional Tahun 2017-2022 ..... II-36
Tabel 2.21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 ..... II-37
Tabel 2.22 Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022 ..... II-42
Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan Miskin (Desil 1-4) Menurut Kecamatan Kota Sawahlunto Tahun 2022 ..... II-42
Tabel 2.24 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-43
Tabel 2.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-44
Tabel 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-45
Tabel 2.27 Perbandingan TPT Kota Sawahlunto, TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-45
Tabel 2.28 Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-46
Tabel 2.29 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-46
Tabel 2.30 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-47

Tabel 2.31 Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-47
Tabel 2.32 Opini BPK Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-50
Tabel 2.33 Pola Pangan Harapan Hasil Survei Tahun 2018 – 2022 ..... II-50
Tabel 2.34 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2018-2022 ..... II-53
Tabel 2.35 Produktivitas Padi Tahun 2018-2022 ..... II-54
Tabel 2.36 Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan Tahun 2018-2022..... II-54
Tabel 2.37 Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet Tahun 2018-2022 ..... II-55
Tabel 2.38 Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao Tahun 2018 – 2022..... II-55
Tabel 2.39 Kontribusi Sektor Perdagangan, Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2018-2022 ..... II-56
Tabel 2.40 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2018-2022 ..... II-56
Tabel 2.41 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-57
Tabel 2.42 Kontribusi Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Tahun 2018-2022 ..... II-58
Tabel 2.43 Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021 ..... II-58
Tabel 2.44 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia II-59
Tabel 2.45 Perbandingan IPM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2018-2022..... II-59
Tabel 2.46 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)..... II-60
Tabel 2.47 Peringkat Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022..... II-60
Tabel 2.48 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)..... II-61
Tabel 2.49 Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022..... II-61
Tabel 2.50 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (Satuan Dalam Tahun) II-62
Tabel 2.51 Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-62
Tabel 2.52 Perbandingan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)..... II-63
Tabel 2.53 Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-64
Tabel 2.54 Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-64
Tabel 2.55 Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 .... II-65
Tabel 2.56 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2022..... II-65
Tabel 2.57 Nilai Assesment Kompetensi (Numerasi Minimum) Tahun 2018-2022 .... II-67
Tabel 2.58 Angka Partispasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2018-2022 ..... II-67
Tabel 2.59 Data Kondisi PAUD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 (%) II-67
Tabel 2.60 Angka Partispasi Kasar (APK) Tahun 2018-2022 ..... II-68
Tabel 2.61 Angka Partispasi Murni (APM) Tahun 2018 – 2022 (%) II-68
Tabel 2.62 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto Tahun 2018–2022..... II-69
Tabel 2.63 Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-70
Tabel 2.64 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2018..... II-70
Tabel 2.65 Persentase Sekolah SD/MI Berakreditasi A di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-70

Tabel 2.66 Persentase Sekolah SMP/MTs Berakreditasi A di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-71
Tabel 2.67 Persentase Lembaga PAUD Berakreditasi di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-71
Tabel 2.68 Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-72
Tabel 2.69 Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 (%) II-72
Tabel 2.70 Angka Melanjutkan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-73
Tabel 2.71 Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik II-73
Tabel 2.72 Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam kondisi baik (%) II-74
Tabel 2.73 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-75
Tabel 2.74 Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2022 .... II-75
Tabel 2.75 Guru yang Memenuhi Kualitas S1/ DIV II-76
Tabel 2.76 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (%).... II-76
Tabel 2.77 Persentase Kasus Stunting Balita di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022..... II-78
Tabel 2.78 Jumlah Kematian Balita Tahun 2018-2022..... II-80
Tabel 2.79 Indikator Kinerja Berhubungan dengan RSUD Tahun 2018-2022 ..... II-80
Tabel 2.80 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2018-2022 ..... II-80
Tabel 2.81 Jumlah Kematian Ibu di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022..... II-81
Tabel 2.82 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2022... II-82
Tabel 2.83 Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2022..... II-82
Tabel 2.84 Persentase Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-82
Tabel 2.85 Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto Tahun 2018– 2022 ..... II-83
Tabel 2.86 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-83
Tabel 2.87 Rasio Dokter Per satuan Penduduk Di Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2022 ..... II-84
Tabel 2.88 Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022..... II-84
Tabel 2.89 Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-85
Tabel 2.90 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... II-85
Tabel 2.91 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah..... II-85
Tabel 2.92 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Sawahlunto Tahun 2018– 2022 ..... II-87
Tabel 2.93 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-87
Tabel 2.94 Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-88
Tabel 2.95 Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kota Sawahlunto Tahun 2018– 2022 ..... II-88
Tabel 2.96 Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-89
Tabel 2.97 Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022..... II-89
Tabel 2.98 Rasio Jaringan Irigasi Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-90
Tabel 2.99 Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Tahun 2018- 2022 ..... II-90
Tabel 2.100 Persentase Penduduk berakses Air Minum Tahun 2018- 2022 ..... II-91
Tabel 2.101 Persentase Rumah Tangga Yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 - 2022 .... II-91

Tabel 2.102 Persentase Rumah Tangga dengan SPAL yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 - 2022 ..... II-92
Tabel 2.103 Capain Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-92
Tabel 2.104 Penerima Bantuan RTLH Tahun 2018 -2022 ..... II-93
Tabel 2.105 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah II-93
Tabel 2.106 Data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 – 2022 ..... II-94
Tabel 2.107 Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024..... II-95
Tabel 2.108 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2018- 2022..... II-95
Tabel 2.109 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018- 2022..... II-96
Tabel 2.110 Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2018- 2022 ..... II-96
Tabel 2.111 Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawasan Perkotaan Tahun 2018- 2022 ..... II-97
Tabel 2.112 Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2018 – 2022..... II-97
Tabel 2.113 Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022..... II-98
Tabel 2.114 Indikator pencapaian urusan ketenteraman dan ketertiban pada aspek penanggulangan bencana daerah Urusan Penanggulangan Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022..... II-99
Tabel 2.115 Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-100
Tabel 2.116 Jumlah kasus bencana kebakaran di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-100
Tabel 2.117 Capaian SPM Bidang Sosial Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-101
Tabel 2.118 Program dan Kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kota Sawahlunto..... II-102
Tabel 2.119 Data Penyandang Disabilitas di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 .II-102
Tabel 2.120 Data Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Sosial Tahun 2022... II-102
Tabel 2.121 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto Tahun 2022 ..... II-103
Tabel 2.122 Jenis Bantuan Penanganan Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2022 ..... II-104
Tabel 2.123 Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Sosial Tahun 2022..... II-104
Tabel 2.124 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-105
Tabel 2.125 Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan dan Capaian Indikator Perlindungan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-106
Tabel 2.126 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-107
Tabel 2.127 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kewirausahaan Dan Masyarakat Tahun 2018-2022..... II-108
Tabel 2.128 Jumlah UMKM Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-108
Tabel 2.129 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Di Kota Sawahlunto Tahun 2018..... II-109
Tabel 2.130 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2019 s.d 2022..... II-109
Tabel 2.131 Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022..... II-111
Tabel 2.132 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022..... II-112
Tabel 2.133 Jumlah KDRT Di Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-113

Tabel 2.134 Data Kasus Penyelesaiannya Dibantu Oleh P2TP2A Kota Arang Berdasarkan Perempuan dan Anak sebagai Korban Tahun 2022 ..... II-113
Tabel 2.135 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-114
Tabel 2.136 Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-115
Tabel 2.137 Kasus Kenakalan Remaja 5 Tahun Terakhir Tahun 2018 – 2022 ..... II-115
Tabel 2.138 Predikat Kota Layak Anak Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022 ..... II-115
Tabel 2.139 Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2022 ..... II-116
Tabel 2.140 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Bidang Pangan Tahun 2018 - 2022 ..... II-116
Tabel 2.141 Data Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Sawahlunto II-119
Tabel 2.142 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2017-2022 ..... II-120
Tabel 2.143 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2018-2022 ..... II-121
Tabel 2.144 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 % Tahun 2018-2022 II-122
Tabel 2.145 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) 40,5 % Tahun 2018-2022 ..... II-122
Tabel 2.146 Pengelolaan Persampahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-123
Tabel 2.147 Sarana Dan Prasarana Persampahan Tahun 2018-2022 ..... II-123
Tabel 2.148 Rasio Jumlah TPSS Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-124
Tabel 2.149 Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2018-2022 ..... II-124
Tabel 2.150 Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-125
Tabel 2.151 Rekapitulasi Data Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Kota Sawahlunto Tiap Kecamatan Per 31 Desember 2022 ..... II-125
Tabel 2.152 Rekapitulasi Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Sawahlunto Tiap Kecamatan Per 31 Desember 2022 ..... II-125
Tabel 2.153 Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018-2022 ..... II-126
Tabel 2.154 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan Tahun 2018 - 2022 ..... II-126
Tabel 2.155 Status Desa berdasar Profil Desa Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022 II-127
Tabel 2.156 Status Desa berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022 ..... II-127
Tabel 2.157 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 - 2022 ..... II-127
Tabel 2.158 Capaian Indikator Kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 - 2022 ..... II-128
Tabel 2.159 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Tahun 2018 - 2022 ..... II-129
Tabel 2.160 Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) Tahun 2018-2022 ..... II-129
Tabel 2.161 Angka Kelahiran Total (TFR) Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 ..... II-130
Tabel 2.162 Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 ..... II-130
Tabel 2.163 Rata-rata Jumlah Anak per Rumah Tangga di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-131
Tabel 2.164 Rasio Akseptor KB di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-131
Tabel 2.165 Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-131
Tabel 2.166 Jumlah petugas pembantu Pembina KB/Desa (PPKDB) setiap desa/ kelurahan II-132
Tabel 2.167 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontreasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2018-2022 ..... II-132

Tabel 2.168 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-132
Tabel 2.169 Sarana Perlengkapan Jalan di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022..... II-133
Tabel 2.170 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022..... II-135
Tabel 2.171 Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022..... II-136
Tabel 2.172 Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-136
Tabel 2.173 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2022 ..... II-137
Tabel 2.174 Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018 - 2022 ..... II-137
Tabel 2.175 Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro < 60.000.000 Tahun 2018 - 2022 ..... II-138
Tabel 2.176 Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro > 60.000.000 Tahun 2018 - 2022 ..... II-138
Tabel 2.177 Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-139
Tabel 2.178 Jumlah Realisasi Investasi di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-140
Tabel 2.179 Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022..... II-140
Tabel 2.180 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-141
Tabel 2.181 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2022 ..... II-141
Tabel 2.182 Pelatihan Kewirausahaan Untuk Pemuda Kota Sawahlunto Tahun 2021 ..... II-142
Tabel 2.183 Jumlah Organisasi Kepemudaan Tahun 2018-2022..... II-142
Tabel 2.184 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2018-2022 ..... II-143
Tabel 2.185 Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2018–2022..... II-143
Tabel 2.186 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat Kota Sawahluto Tahun 2018-2022 .... II-143
Tabel 2.187 Cakupan Pembinaan Atlet Pelajar Kota Sawahluto Tahun 2018–2022 . II-144
Tabel 2.188 Prestasi Olahraga Menurut Cabang Tahun 2018 – 2022..... II-144
Tabel 2.189 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-145
Tabel 2.190 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-146
Tabel 2.191 Komunitas Budaya yang ada di Kota Sawahlunto..... II-148
Tabel 2.192 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-149
Tabel 2.193 Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) Tahun 2018 - 2022 .. II-149
Tabel 2.194 Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022 ..... II-150
Tabel 2.195 Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum Tahun 2018-2022..... II-151
Tabel 2.196 Rasio Perpustakaan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-151
Tabel 2.197 Perkembangan Koleksi Buku di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022... II-151
Tabel 2.198 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022 ..... II-152
Tabel 2.199 Perkembangan Arsip Statis yang Diakuisisi Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-153
Tabel 2.200 Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-154
Tabel 2.201 Persentase Kesediaan Arsip Sebagai Bahan AK, ABS dan PN Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-154
Tabel 2.202 SDM Pengelola Kearsipan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022..... II-154
Tabel 2.203 Data Capaian Pembangunan Kota Sawahlunto Bidang Kearsipan Tahun 2022 ..... II-155

Tabel 2.204 Produksi dan Konsumsi Ikan Tahun 2018-2022 ..... II-155
Tabel 2.205 Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha) Tahun 2018-2022 ..... II-156
Tabel 2.206 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata Tahun 2018-2022 ..... II-157
Tabel 2.207 Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Sawahlunto (Berdasarkan Tiket Masuk) Tahun 2018-2022 ..... II-157
Tabel 2.208 Jumlah Pengunjung Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tahun 2018-2022 ..... II-158
Tabel 2.209 Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2018 – 2022 ..... II-159
Tabel 2.210 Capaian Indikator Bidang Perdagangan Realisasi Tahun 2018 -2022 .. II-160
Tabel 2.211 Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 II-161
Tabel 2.212 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2022 ... II-161
Tabel 2.213 Urusan Pemerintahan Sektor Perindustrian RealisasiTahun 2018 – 2022 .... II-163
Tabel 2.214 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesekretariatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-164
Tabel 2.215 Jumlah anggota dewan berdasarkan partai politik dan jenis kelamin .. II-166
Tabel 2.216 Jumlah kegiatan Sidang dan Rapat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2022 ..... II-166
Tabel 2.217 Jumlah Keputusan DPRD menurut Jenis Keputusan di Kota Sawahlunto, Tahun 2017-2022 ..... II-166
Tabel 2.218 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perencanaan Urusan Pemerintahan Tahun 2017 – 2021 ..... II-167
Tabel 2.219 Realisasi APBD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-168
Tabel 2.220 Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-169
Tabel 2.221 Jumlah Bank dan Asuransi Tahun 2018-2022 ..... II-170
Tabel 2.222 Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-171
Tabel 2.223 Persentase IKPAK Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-172
Tabel 2.224 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi Instansi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-172
Tabel 2.225 Jumlah ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-173
Tabel 2.226 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-173
Tabel 2.227 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-174
Tabel 2.228 Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Kepegawaian Tahun 2022 .... II-174
Tabel 2.229 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2017-2022 ..... II-175
Tabel 2.230 Kegiatan Inovasi yang Telah Dilaksanakan Tahun 2020 ..... II-176
Tabel 2.231 Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto II-181
Tabel 2.232 Kegiatan Inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 ..... II-181
Tabel 2.233 Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto II-188
Tabel 2.234 Kegiatan Inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 ..... II-189
Tabel 2.235 Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2022 ..... II-193
Tabel 2.236 Jumlah Auditor dan P2UPD di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 .... II-195
Tabel 2.237 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2018-2022 ..... II-196
Tabel 2.238 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-198
Tabel 2.239 Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-202

Tabel 2.240 Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2022 ..... II-203
Tabel 2.241 Hasil Analisis Shift Share (SS) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-207
Tabel 2.242 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Sawahlunto 2018-2022 ..... II-208
Tabel 2.243 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 .... II-209
Tabel 2.244 Perbandingan Hasil Analisis Shift Share, LQ dan Tipologi Klassen Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-210
Tabel 2.245 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-212
Tabel 2.246 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-212
Tabel 2.247 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2018–2022 ..... II-213
Tabel 2.248 Realisasi Persentase kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang Tahun 2018–2022 ..... II-213
Tabel 2.249 Luas Wilayah Industri Tahun 2018-2022 ..... II-214
Tabel 2.250 Luas Wilayah Kota Sawahlunto II-214
Tabel 2.251 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2017-2021 ..... II-215
Tabel 2.252 Persentase Masyarakat yang Menggunakan Telepon/HP Tahun 2017- 2021 ..... II-215
Tabel 2.253 Angka Kriminalitas di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-216
Tabel 2.254 Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2022 ..... II-218
Tabel 2.255 Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-219
Tabel 2.256 Target dan Realisasi PDRD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022..... II-220
Tabel 2.257 Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 s.d selanjutnya II-222
Tabel 2.258 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Sawahlunto yang Ditetapkan Tahun 2018-2022 ..... II-224
Tabel 2.259 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-224
Tabel 2.260 Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-225
Tabel 2.261 Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelaksanaan Tahun 2018-2023 RPJMD Kota Sawahlunto II-227
Tabel 2.262 Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pelaksanaan Tahun 2018-2023 RPJMD Kota Sawahlunto II-232
Tabel 2.263 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan II-251
Tabel 2.264 Skala Nilai dan Kriteria Penilaian Kinerja II-253
Tabel 2.265 Skala Nilai dan Prediket Pencapaian Kinerja II-254
Tabel 2.266 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2022 ..... II-302
Tabel 3.1 Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022 ..... III-3
Tabel 3.2 Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022 ..... III-4
Tabel 3.3 Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... III-5
Tabel 3.4 Pembiayaan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... III-7
Tabel 3.5 Neraca Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... III-10
Tabel 3.6 Rasio Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2016-2022 ..... III-11
Tabel 3.7 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... III-12
Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... III-13
Tabel 3.9 Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... III-13

Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022. III-14
Tabel 3.11 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... III-15
Tabel 3.12 SILPA Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... III-15
Tabel 3.13 Proyeksi Pendapatan 2024-2026 Kota Sawahlunto III-17
Tabel 3.14 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024-2026 ..... III-25
Tabel 3.15 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... III-26
Tabel 3.16 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... III-26
Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat IV-2
Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat IV-4
Tabel 4.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat IV-4
Tabel 4.4 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat IV-5
Tabel 4.5 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat IV-5
Tabel 4.6 Pengeluaran Perkapita Kota Sawahlunto IV-5
Tabel 4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto IV-14
Tabel 4.8 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Kota Sawahlunto IV-16
Tabel 4.9 Pemetaan Isu Strategis Pembangunan Daerah IV-20
Tabel 5.1 Keselarasan Visi dan Misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Tujuan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... V-3
Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... V-5
Tabel 6.1 Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... VI-2
Tabel 6.2 Arah Kebijakan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... VI-7
Tabel 6.3 Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... VI-28
Tabel 6.4 Jumlah Inovasi Berdasarkan Inisiator VI-47
Tabel 6.5 Target Inovasi Berdasarkan Perangkat Daerah VI-48
Tabel 7.1 Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... VII-1
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... VII-3
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Makro Terhadap Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... VIII-1
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Terhadap Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... VIII-2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... VIII-6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-14
Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022 ..... II-17
Grafik 2.3 Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Berdasarkan PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2022 (Dalam %) II-21
Grafik 2.4 Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang Dan Kota Bukittinggi Tahun 2018-2022 ..... II-27
Grafik 2.5 Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-28
Grafik 2.6 Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022..... II-31
Grafik 2.7 Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2018 – 2022..... II-33
Grafik 2.8 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto (Rupiah/Kapita/ Bulan) Tahun 2018 – 2022..... II-35
Grafik 2.9 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022 ..... II-37
Grafik 2.10 Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ..... II-41
Grafik 2.11 Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2022..... II-51
Grafik 2.12 Persentase Lulusan SD yang Hafiz Alquran juz 30 Tahun 2018 – 2022 ..... II-66
Grafik 2.13 Prevalensi Balita Stunted Berdasarkan Kab/Kota Di Sumatera Barat II-79
Grafik 2.14 Usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2020- 2022 ..... II-195
Grafik 2.15 Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 (Dalam Rp)..... II-200
Grafik 2.16 Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 ..... II-201
Grafik 2.17 Perkembangan Nilai Tukar Petani Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022..... II-205
Grafik 2.18 Perkembangan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) Tahun 2018 – 2022..... II-206
Grafik 3.1 Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022..... III-3
Grafik 3.2 Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022..... III-4
Grafik 3.3 Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022..... III-6
Grafik 4.1 Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022..... IV-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Sawahlunto II-4
Gambar 2.2 Peta Kelerengan Lahan Kota Sawahlunto II-5
Gambar 2.3 Peta Solum Tanah Kota Sawahlunto II-7
Gambar 2.4 Peta Geologi Kota Sawahlunto..... II-8
Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan..... II-10
Gambar 2.6 Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota Sawahlunto..... II-11
Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana II-12
Gambar 2.8 Peta Daerah Rawan Pangan Kota Sawahlunto.....II-52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat (22) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara Nasional pada Tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru Bagi Daerah.

Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023. Menyikapi Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, maka Wali Kota Sawahlunto harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2023;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan Nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku.

RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen peencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85); yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ini tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RPD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan, RPJM Nasional 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Keterkaitan antara dokumen RPJPD dan RPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi sehingga terciptanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah.

1.3.1 Hubungan RPD Kota Sawahlunto dengan RPJMN

RPD Kota Sawahunto Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang wajib mempedomani Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang mempunyai visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengnurangi kesenjangan dan menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

1.3.2 Hubungan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 wajib mengacu pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih maka visi pembangun jangka memengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan". Dalam memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto sangat perlu dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena secara administratif Kota Sawahlunto berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

1.3.3 Hubungan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025

RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 mengacu kepada Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kota Sawahlunto adalah "Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya".

1.3.4 Hubungan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dengan Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 juga memperhatikan hasil evaluasi pada Perubahan RPJMD Kota Sawahunto Tahun 2018-2023, yang mana Tahun 2023

merupakan tahun terakhir masa jabatan Kepala Daerah Kota Sawahunto. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

1.3.5 Hubungan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dengan RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

Dalam penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 memperhatikan RTRW Kota Sawahlunto yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya meliputi: struktur ruang dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya dan pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan secara terpadu.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan kepastian atas sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
2. Merupakan panduan umum bagi perencanaan sektoral dan kewilayahan;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalamrangka pencapaian target Penetapan Kinerja;
4. Menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah Kota Sawahlunto dalam menyusun Rencanastrategis tahun 2024-2026.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dankondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Sebagai rumusan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagaikepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026

Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dasar hukum penyusunan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, hubungan antara dokumen RPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah serta dokumen rencana pembangunan antar daerah, maksud dan tujuan penyusunan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, serta sistematika penulisan dokumen RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah serta aspek pelayanan umum. Evaluasi pelaksanaan program RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2021 sampai tahun 2022 serta evaluasi capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM).

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah serta realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2022 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2024-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan pembangunan daerah berdasakan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada bab II yang mencakup empat aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum termasuk SPM dan isu strategis.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran dari penyusunan dokumen RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 berdasarkan visi misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan analisa kebijakan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan isu strategis aktual serta *cascading* kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *outcome* dan indikator masing-masing.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 serta penentuan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 sesuai cascading di BAB V.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan seluruh program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan daftar program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah (IKD).

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

LAMPIRAN

1. Lampiran I : Penyelarasan target indikator makro pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2023-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024
2. Lampiran II : Penyelarasan Program Prioritas yang termuat dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2023-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang dijuluki sebagai Kota Arang. Julukan tersebut tak lepas dari Tambang Batubara yang aktif semenjak zaman kolonial Belanda, tetapi telah berhenti beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik dan menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Pada Tahun 2001 seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto bersepakat untuk merubah arah dan haluan pembangunan daerah dari Kota Tambang menjadi Kota Wisata. Kesepakatan ini dituangkan kedalam Visi Kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota yaitu "**Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya"**. Sejak saat itulah seluruh arah pembangunan ditujukan terhadap pembangunan wisata di Kota Sawahlunto.

Kerja keras Pemerintah Kota Sawahlunto perlahan menuai hasil. Pada tanggal 6 Juli 2019 *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dengan keputusan Komite Warisan Dunia. Ini merupakan langkah besar Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan mimpi menjadi Kota Wisata. Kawasan WTBOS yang ditetapkan meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu: Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman.

Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) merupakan warisan budaya dunia ke-5 setelah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Situs Purba Sangiran, dan *Cultural Landscape* Subak Bali. Cikal bakal pengajuan ini dimulai sejak Tahun 2009, penggarapan secara intens untuk proses nominasi, evaluasi, hingga penetapan berlangsung cukup cepat, dimana hanya membutuhkan waktu 4 (empat) tahun sejak masuk dalam daftar sementara (*tentative list*) pada 30 Januari 2015. OCMHS ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 12.15 waktu Baku, Azerbaijan (https://whc.unesco.org/en/list/1610) yang dihadiri oleh 22 (dua puluh dua) orang delegasi Republik Indonesia dengan Ketua Delegasi Prof. Rosa Surya Putra selaku Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, dihadiri juga oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc dan Deri Asta, SH selaku Walikota Sawahlunto.

Selain wisata sejarah, Kota Sawahlunto juga fokus pada pengembangan wisata alam. Kota Sawahlunto telah mendapatkan status *Geopark* Nasional untuk Kawasan Wisata Batu Runcing di Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang. Pada tahun 2021, tengah menuju status UNESCO *Global Geopark*. *Geopark* atau Taman Bumi sendiri menjadi salah satu upaya Kota Sawahlunto untuk menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain itu, Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk menjadi salah satu kota di Indonesia yang mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta energi melalui *Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) Asia*.

Konsep pembangunan dan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan daerah Tahun 2024-2026. Melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi,

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, sehingga gambaran umum Kota Sawahlunto dapat memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Sawahlunto.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Aspek Geografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Letak, Luas Dan Batas Wilayah

Secara geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan bukit barisan dengan posisi koordinat antara 100˚41”00’ - 100˚49’60” Bujur Timur dan 00˚33”40’-00˚48”33’ Lintang Selatan sedangkan secara administrasi Kota Sawahlunto berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung

Kota Sawahlunto memiliki luas wilayah 273.45 km^2. Secara administrasi terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, 10 (sepuluh) Kelurahan dan 27 (dua puluh tujuh) Desa. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan wilayah seluas 32.93 km^2 atau sebesar 12.04% dari luas Kota Sawahlunto sedangkan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99.39 km^2 atau sekitar 36.35% dari luas Kota Sawahlunto. Berikut merupakan jumlah RT, RW, Dusun, dan luas wilayah administrasi per-Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto:

Tabel 2.1
Jumlah RT, RW, Dusun, dan Luas Wilayah Desa serta Kecamatan

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun	Luas Wilayah (KM^2)
(1)	**Kecamatan Barangin**	**32**	**13**	**25**	**88,55**
01	Desa Lumindai	-	-	5	20,10
02	Desa Balai Batu Sandaran	-	-	3	12,95
03	Kel. Saringan	11	5	-	0,81
04	Kel. Lubang Panjang	7	2	-	1,00
05	Kel. Durian I	6	2	-	1,17
06	Kel. Durian II	8	4	-	1,25
07	Desa Talago Gunung	-	-	4	17,30
08	Desa Santur	-	-	5	8,69
09	Desa Kolok Mudiak	-	-	3	8,52
10	Desa Kolok Nan Tuo	-	-	5	16,76
(2)	**Kecamatan Lembah Segar**	**32**	**14**	**22**	**52,58**
01	Desa Lunto Barat	-	-	4	5,11
02	Desa Lunto Timur	-	-	4	4,89
03	Desa Pasar Kubang	-	-	3	9,32
04	Desa Kubang Tangah	-	-	5	20,15
05	Desa Kubang Utara Sikabu	-	-	6	11,56
06	Kel. Pasar	6	3	-	0,50
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	8	2	-	0,28
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	4	2	-	0,27

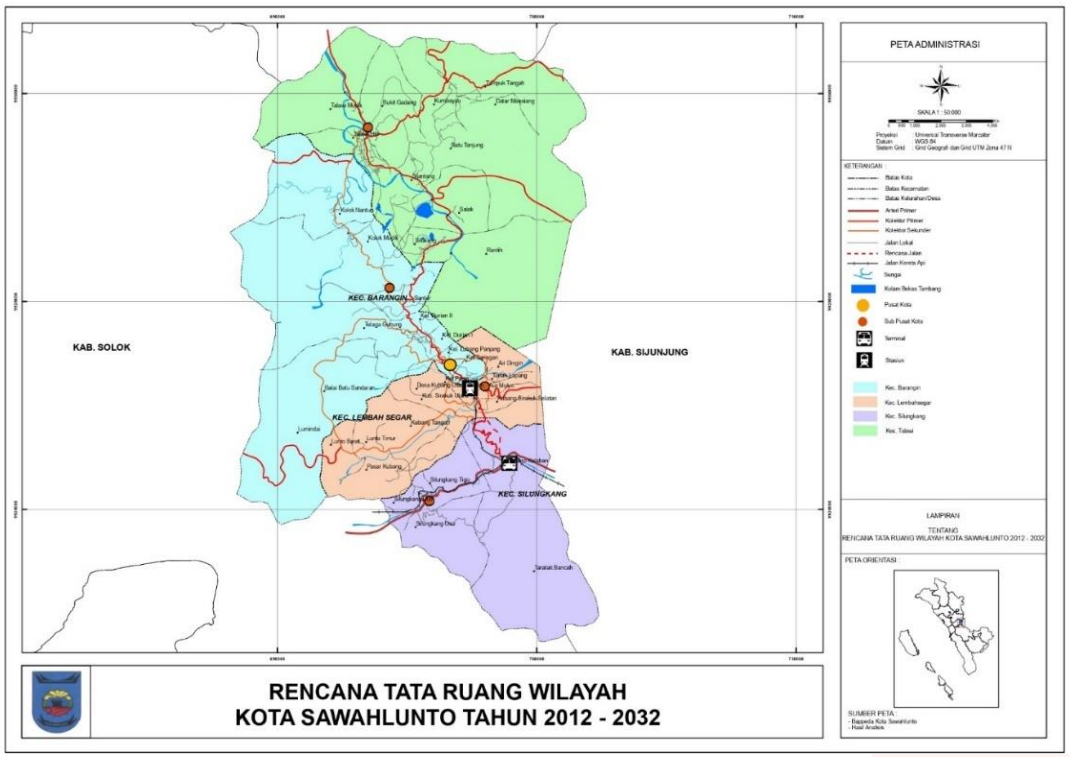
No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun	Luas Wilayah (KM²)
09	Kel. Aur Mulyo	6	3	-	0,20
10	Kel. Tanah Lapang	4	2	-	0,16
11	Kel. Air Dingin	4	2	-	0,14
(3)	**Kecamatan Silungkang**	**-**	**-**	**21**	**32,93**
01	Desa Silungkang Oso	-	-	4	6,57
02	Desa Taratak Bancah	-	-	3	8,43
03	Desa Muaro Kalaban	-	-	6	8,58
04	Desa Silungkang Tigo	-	-	5	5,13
05	Desa Silungkang Duo	-	-	3	4,22
(4)	**Kecamatan Talawi**		**-**	**39**	**99,39**
01	Desa Sikalang	-	-	4	6,59
02	Desa Rantih	-	-	2	6,22
03	Desa Salak	-	-	3	6,60
04	Desa Sijantang Koto	-	-	3	6,40
05	Desa Talawi Hilir	-	-	4	10,21
06	Desa Talawi Mudik	-	-	4	8,76
07	Desa Bukik Gadang	-	-	3	7,74
08	Desa Batu Tanjung	-	-	4	15,90
09	Desa Kumbayau	-	-	4	8,36
10	Desa Data Mansiang	-	-	2	6,29
11	Desa Tumpuak Tangah	-	-	6	16,32
	Jumlah	**64**	**27**	**107**	**273,45**

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Dari tabel diatas, diketahui bahwa Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah kota. Faktanya, Kota Sawahlunto didominasi oleh desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Kondisi tersebut mengakibatkan Kota Sawahlunto juga memperoleh dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi Sawahlunto untuk dapat membangun daerahnya, dengan anggaran dana Desa yang mendekatkan pelaku pembangunan dan objek pembangunan itu sendiri. Daerah yang mempunyai keragaman ini adalah Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa desa terluas adalah Desa Kubang Tangah yang terletak di Kecamatan Lembah Segar yaitu 20,15 km². Sedangkan desa terkecil menurut luasannya adalah Desa Silungkang Duo yang terletak di Kecamatan Silungkang yaitu 4,22 km². Sedangkan untuk Kelurahan Terluas adalah Kelurahan Durian II yang juga terletak di Kecamatan Barangin dengan luas 1,25 km² dan kelurahan terkecil adalah Kelurahan Air Dingin yang terletak di Kecamatan Lembah Segar yaitu 0,14 km².

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Sawahlunto



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

b. Topografi

Kondisi topografi Kota Sawahlunto didominasi daerah perbukitan. Kota Sawahlunto memiliki kemiringan lereng dan morfologi yang begitu beragam, mulai dari dataran sampai dengan perbukitan terjal, dengan rentang lereng 0-8% sampai dengan lebih dari 40%. Namun sebagian besar berada pada kelerengan 25-40 % dengan area seluas 6.768,08 Ha, terletak di bagian selatan Kota Sawahlunto, meliputi Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Silungkang.

- **Ketinggian**

  Ketinggian wilayah Kota Sawahlunto cukup bervariatif mulai dari 175 mdpl sampai dengan > 975 mdpl. Mayoritas terletak pada ketinggian 175–375 mdpl dengan luas sebesar 10.392,39 Ha yang terletak di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi. Sedangkan untuk ketinggian lebih dari 975 meter diatas permukaan laut terletak di Kecamatan Barangin. Ketinggian pusat daerah kecamatan di Kota Sawahlunto lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto

Kecamatan	Tinggi Kecamatan (mdpl)	Ibu Kecamatan
Talawi	650	Talawi Mudik
Barangin	650	Santur
Lembah Segar	785	Aur Mulyo
Silungkang	548	Muaro Kalaban

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022

- **Kelerengan**

  Kota Sawahlunto memiliki kemiringan yang beragam, dari mulai dataran sampai dengan perbukitan terjal. Bentang alam yang landai terletak hampir di tengah daerah Kota Sawahlunto, tetapi umumnya merupakan jalur- jalur sempit sehingga dirasa sulit untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak dikedua sisinya. Dataran yang relatif landai sehingga memungkinkan berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah di Kecamatan Barangin, yang wilayahnya relatif datar sebesar 18 % dari luas wilayah.

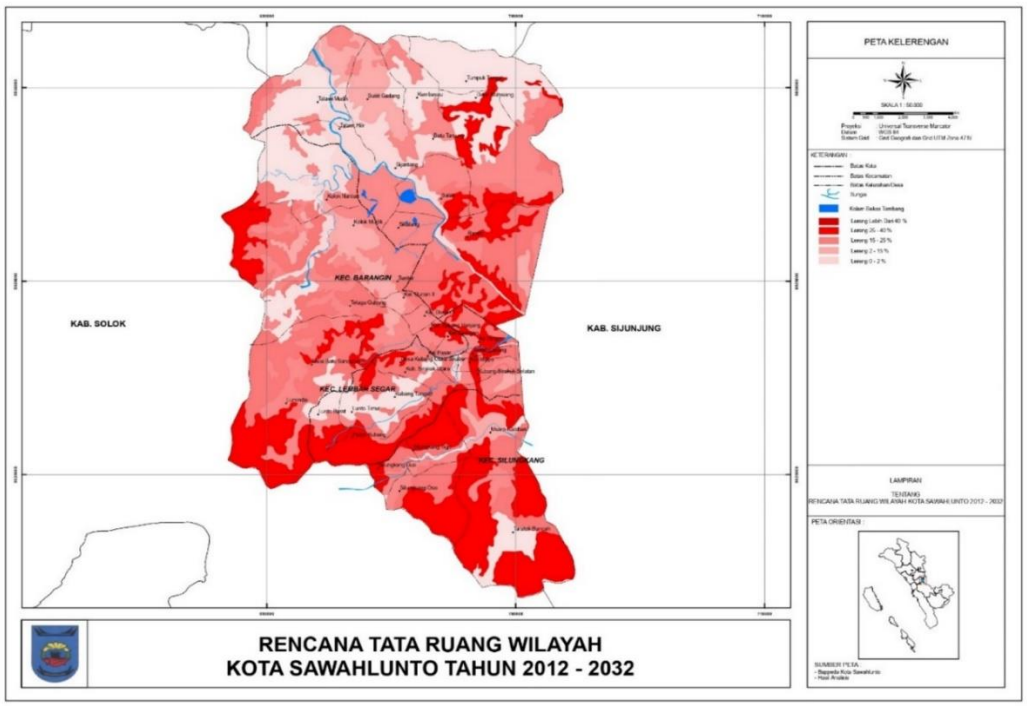
  Untuk kelas kemiringan lahan yang terkategori datar yaitu 0 – 2 % berada di Kecamatan Silungkang seluas 29 Ha dan di Kecamatan Talawi Seluas 991 Ha sementara kelas kemiringan lahan kategori Curam (> 40 %) berada di Kecamatan Silungkang. Selengkapnya Kemiringan lahan di Kota Sawahlunto dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha)					
	0 – 2%	2 – 15%	15 – 5%	25 –40%	> 40%	Jumlah
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653	**9.939**
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136	**8.855**
Lembah Segar	240	358	694	1.836	2.110	**5.258**
Silungkang	29	288	735	340	1.901	**3.293**
Jumlah	**1.603**	**3.580**	**5.541**	**8.821**	**7.800**	**27.345**

Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

Gambar 2.2
Peta Kelerengan Lahan Kota Sawahlunto



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

c. Klimatologi

Kota Sawahlunto memiliki suhu rata – rata 22^{0}C sampai dengan 28 ^{0}C, perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5 ^{0}C sampai dengan 7 ^{0}C. Curah hujan di Kota Sawahlunto berkisar antara 2.200 mm/tahun sampai dengan 2.400 mm/tahun mayoritas terletak di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

d. Solum Tanah

Struktur rupa bumi dalam Geologi terbagi dalam 3 (tiga) jenis yang sering dijumpai pada batuan sebagai produk dari gaya yang bekerja pada batuan, yaitu:

1. Kekar (Fractures)
   Merupakan jenis struktur batuan yang berbentuk bidang pecah, sifat bidang ini memisahkan batuan menjadi bagian-bagian yang terpisah tetapi tidak mengalami perubahan posisinya.
2. Perlipatan (Folding)
   Batuan berlapis pada awalnya berbentuk sedimen yang diendapkan dalam lembaran Horizontal datar
3. Patahan/Sesar (Faulting)
   Fraktur planar atau diskontinuitas dalam volume batuan dimana telah ada perpindahan signifikan sebagai akibat dari gerakan massa batuan. Menurut ilmu fisika, sesar terjadi ketika batuan mengalami tekanan dan suhu yang rendah sehingga sifatnya menjadi rapuh.

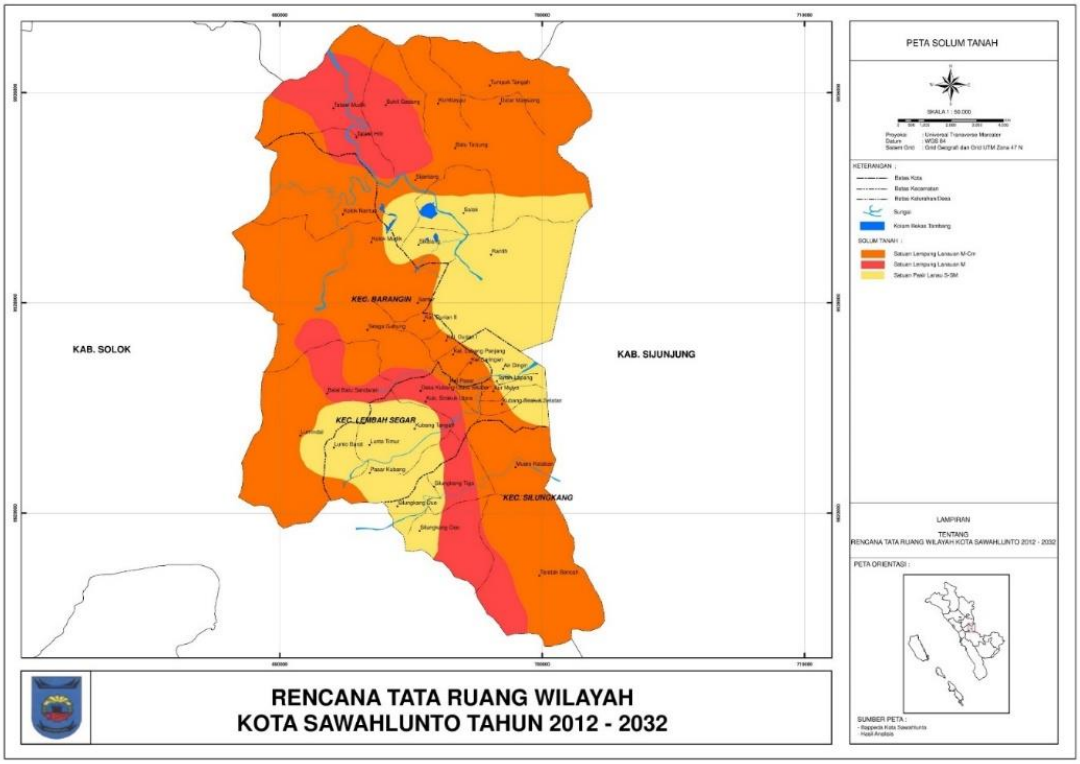
Terdapat 3 (tiga) jenis Solum tanah yang ditemui di Kota Sawahlunto, yaitu:

a. **Satuan Lempung Lanauan (S-sentimeter),** merupakan pelapukan dari F.Sawahlunto dan F.Singkarewang yang berupa lempung lanauan (CH) dan lanau lempungan (MH) dengan sisipan tipis pasir, memiliki ketebalan berkisar antara 0,5 m sampai dengan 2 m. Lempung lanauan, lanau lempungan berwarna coklat, lunak sampai dengan sangat lunak, plastisitas sedang sampai dengan tinggi, kandungan lempung 26 % - 62 %, lanau 25 % - 50 %, pasir 4 % - 8 %, berat isi tanah asli 1.301 - 1.761 gr/cm^3, kohesi 0,10 - 0,12 kg/cm^2, sudut geser dalam 23.44^0 - 28.04^0.

b. **Satuan Pasir Lanauan (S-sentimeter)** merupakan pelapukan dari F.Sawah tambang yang berupa pasir lanauan (SM) dengan sisipan serpih dan lempung lanauan (CH), dengan ketebalan berkisar antara 1 meter sampai dengan 2 m. Pasir lanauan, lempungan lanauan berwarna coklat, agak lunak, kandungan pasir 59 %, lanau 29 %, lempung 12 %, berat isi tanah asli1,579 gr/cm^3, kohesi 0,067 kg/cm^2, sudut geser dalam 24.81^0.

c. **Satuan Lempung Lanauan (M-sentimeter)** merupakan pelapukan dari F.Ranau (tufa) yang berupa lempung lanauan (CH) dengan ketebalan berkisar antara 0,5 m - 2 m. Lempung lanauan, lanau lempungan berwarna coklat, lunak sampai dengan sangat lunak, plastisitas sedang sampai dengan tinggi, kandungan lempung 52 %, lanau 32 %, pasir 16 %, berat isi tanah asli 1,188 gr/cm^3, kohesi, 0,219 kg/cm^2, sudut geser dalam 25.46^0.

Gambar 2.3
Peta Solum Tanah Kota Sawahlunto



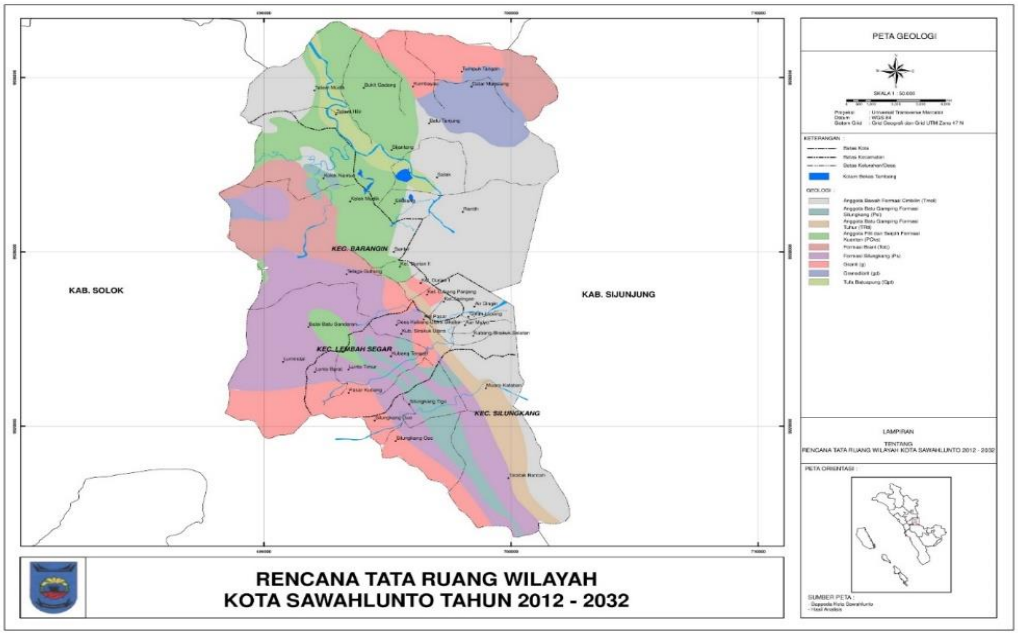
Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

e. Geologi

Kota Sawahlunto terletak pada cekungan pra-tersier Ombilin yang terbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan panjang 47,00 km. Formasi ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun. Kota Sawahlunto terletak diatas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman Kala *Eocen* sekitar 40 - 60 juta tahun yang lalu.

Kota Sawahlunto memiliki dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah Barat Laut sampai dengan Tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera. Jalur kedua sesar tersebut berada di daerah perbukitan sebelah Barat Daya jalan raya Sawahlunto sampai dengan Santur. Secara regional, struktur geologi yang berkembang di cekungan ombilin berarah ke Barat Laut sampai dengan Tenggara dan Timur Laut sampai dengan Barat Daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun lipatan. Cekungan Ombilin ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu/sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian Barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kota Sawahlunto



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

f. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai atau batang utama yaitu:

- **Batang Ombilin**
  Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan, dari Desa Talawi ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari Danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m^3/s.
- **Batang Malakutan**
  Sungai ini mengalir dari barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok ke timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.
- **Batang Lunto**
  Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah barat menuju timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.
- **Batang Sumpahan**
  Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.
- **Batang Lasi**
  Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang dan keluar di perbatasan kota Sawahlunto sampai dengan Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

Air Tanah

Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 400 meter sementara celahan batuan batu pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan

Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku di Kota Sawalunto.

Mata Air

Mata air muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2 liter/s yang terdapat di Sikalang, mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah Tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih dari 5 liter/s, mengalir sepanjang musim, terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih di Kota Sawahlunto.

g. Penggunaan Lahan

Luas Kota Sawahlunto adalah 27.345 Ha. Berdasarkan penggunaan lahan, sebagian besar wilayah di Kecamatan Lembah Segar dan Barangin dimanfaatkan sebaga kebun campuran dengan persentase 36,24% dan 38%. Sedangkan di Kecamatan Talawi sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan dan di Kecamatan Silungkang masih berupa semak alang-alang. Berikut penjabaran penggunaan lahan per-kecamatan di Kota Sawahlunto:

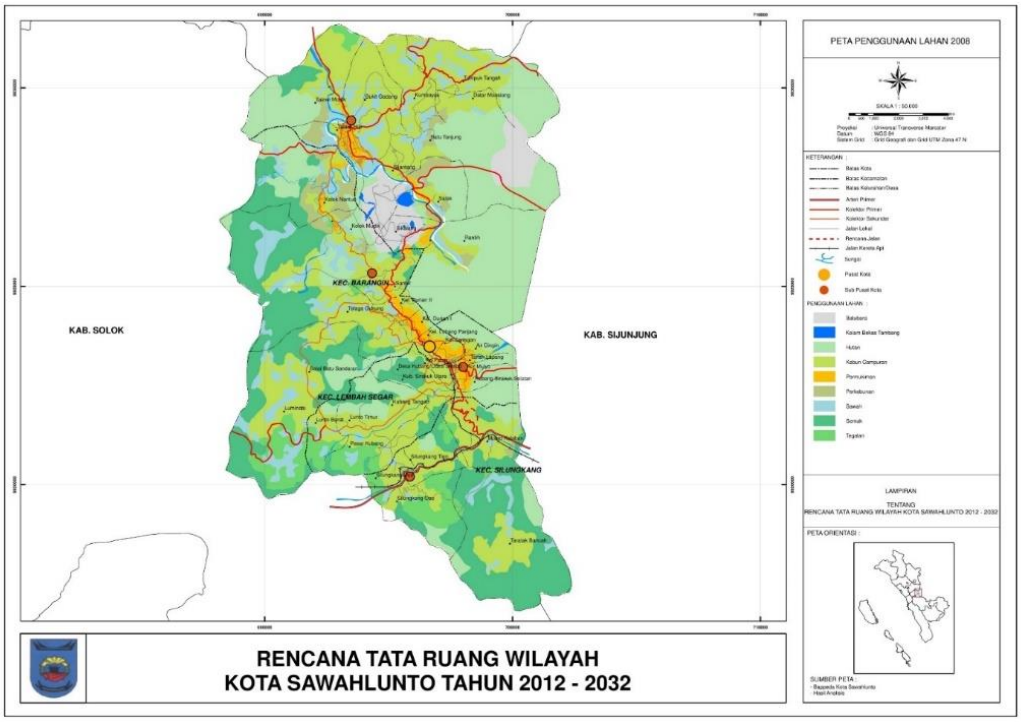
Tabel 2.4
Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaan per Kecamatan

No	Penggunaan	Persentase Luas per Kecamatan (%)			
		Talawi	Silungkang	Lembah Segar	Barangin
1	Permukiman	5,00	5,74	3,17	10,00
2	Kantor dan Industri	18,02	0,48	0,66	2,00
3	Sawah	6,00	3,82	2,95	18,00
4	Tegal,Kebun, Ladang, Huma	0,49	10,00	10,53	7,00
5	Kebun Campuran	23,03	29,92	36,24	38,00
6	Perkebunan	2,91	0,38	-	6,00
7	Hutan	36,00	7,5	32,45	18,00
8	Semak/ Alang-alang	1,00	42,15	13,96	-
9	Kolam/ Empang/ Danau	0,26	-	-	-
10	Tanah Terbuka/ Tandus Rusak	-	-	-	-
11	Taman Rekreasi	0,07	-	-	-
12	Lahan Batu Bara	7,00	-	-	1,00
13	Rumah Sakit	-	-	0,04	-
14	PLTU	0,04	-	-	-
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2023

Berikut merupakan pemetaan penggunaan lahan di Kota Sawahlunto:

Gambar 2.5
Peta Penggunaan Lahan



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

Kepemilikan lahan di Kota Sawahlunto sebagian besar dimiliki oleh ulayat yaitu sebesar 54,18 %, sedangkan lahan yang paling sedikit dimiliki oleh Pemerintah/ Negara yaitu sebesar 1,48 %. Luas lahan menurut kepemilikan di Kota Sawahlunto secara lengkap disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Luas Lahan Menurut Kepemilikan

No	Pemilik	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	PT. BA UPO (KP)	2.950,00	10,79
2	Ulayat	14.816,65	54,18
3	Pemda/ Negara	405,94	1,48
4	PT. KAI	8,40	0,04
5	Pertambangan AIC dan Kampung Swasta Lainnya	1,637,00	5,99
6	Lainnya	7.526,07	27,52
	Jumlah	24.394,06	100

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka,2022

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Sawahlunto di dalam rencana sistem pusat kegiatan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama dengan Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Siberut. Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012–2032 dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto, meliputi:

a. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** ditetapkan di Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang. Desa Muaro Kalaban telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala

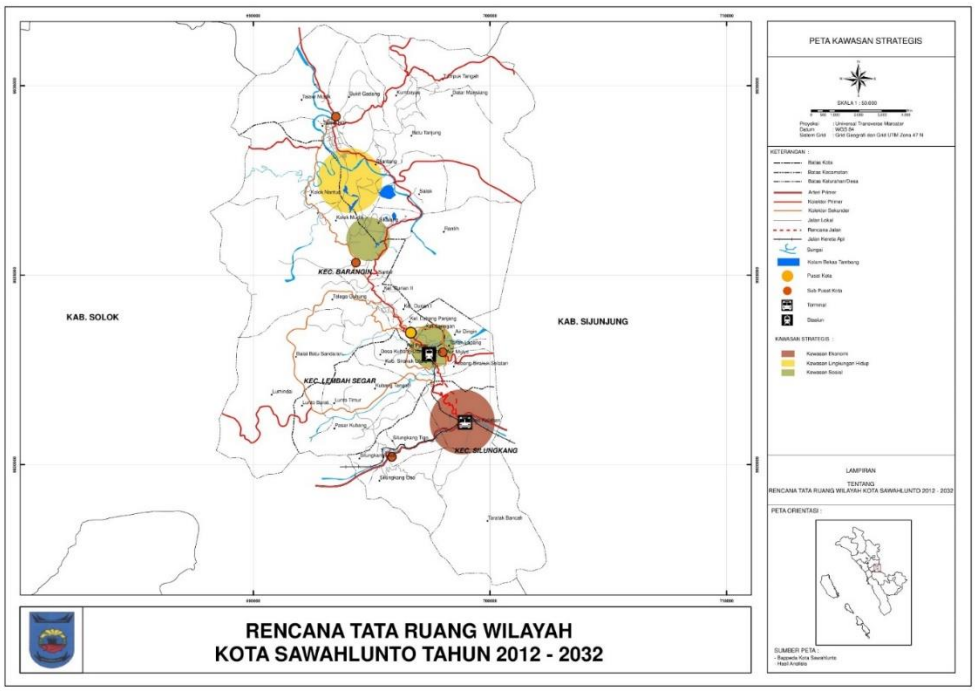
regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang.

b. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya** terdiri dari; (1). Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya; (2). Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kolok dan Sijantang, kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota.

c. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** ditetapkan di Kandih, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi untuk pengembangan wisata

Berikut Peta pengembangan Wilayah Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah :

Gambar 2.6
Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota Sawahlunto



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang terjadi, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah. Berdasarkan data yang diperoleh, bencana yang sering terjadi berupa tanah longsor dan aktivitas sesar (patahan).

a. Gempa Bumi

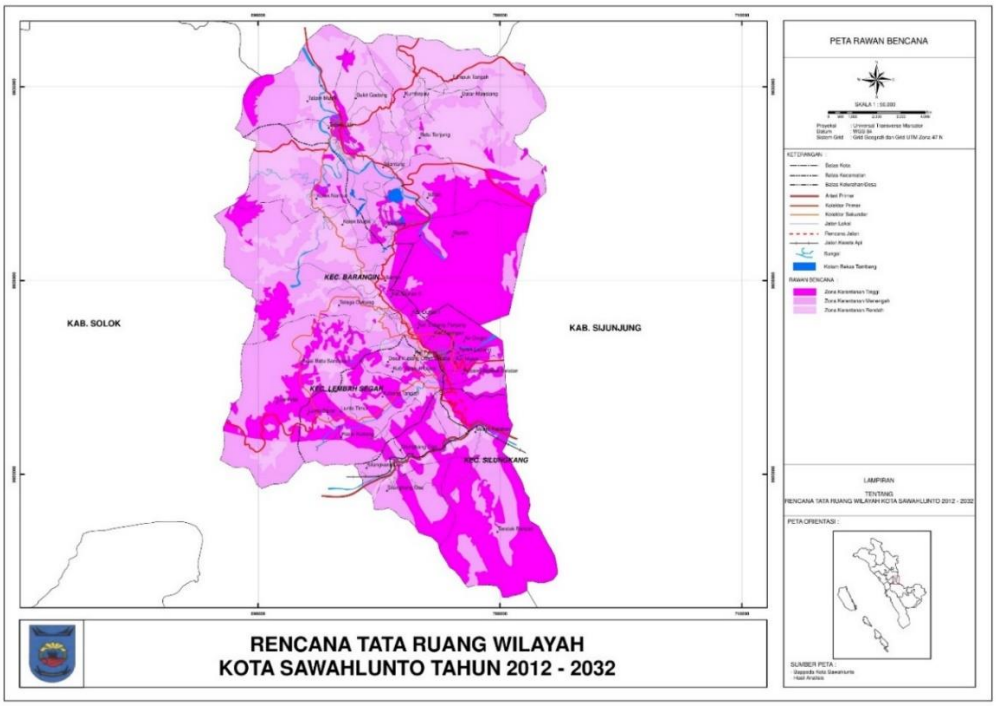
Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi gempa bumi, sedangkan longsoran dan struktur patahan akan cenderung mejadi kendala dalam pembangunan wilayah. Berdasarkan data spasial kerawanan gempa bumi di Kota Sawahlunto dari mulai rendah, sedang dan tinggi, mayoritas kerawanan gempa bumi Kota Sawahlunto berada pada rawan gempa bumi tinggi, dipengaruhi oleh struktur geologi, lereng dan morfologi serta vegetasi yang ada.

b. Gerakan Tanah Atau Rawan Longsor

Kerawanan bencana gerakan tanah atau longsoran di Kota Sawahlunto cukup bervariatif dari mulai kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Kerawan bencana

longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas manusia, keberadaan vegetasi, jenis tanah dan kelerengan. Mayoritas kerawanan bencana longsor di Kota Sawahlunto yaitu sedang dengan luas 15.003,77 Ha.

Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

2.1.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto tahun 2022, jumlah penduduk Sawahlunto sebanyak 66.413 orang. Terdiri dari 33.430 orang laki-laki dan 32.983 orang perempuan, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2022

Klmpk Umur	Jenis Kelamin 2019		Jumlah	Jenis Kelamin 2020		Jumlah	Jenis Kelamin 2021		Jumlah	Jenis Kelamin 2022		Jumlah
	L	P		L	P		L	P		L	P	
0 – 4	3.075	3.008	6.083	2.809	3.011	5.820	3011	2810	5821	3019	2818	5837
5 – 9	3.082	2.897	5.979	2.545	2.624	5.169	2598	2528	5126	2592	2526	5118
10 – 14	2.668	2.712	5.380	2.608	2.837	5.445	2797	2581	5378	2751	2556	5307
15 – 19	2.507	2.344	4.851	2.622	2.867	5.489	2860	2617	5477	2863	2621	5484
20 – 24	2.076	1.945	4.021	2.597	2.721	5.318	2708	2582	5290	2701	2573	5274
25 – 29	2.320	2.361	4.681	2.546	2.620	5.166	2640	2547	5187	2660	2553	5213
30 – 34	2.371	2.330	4.701	2.337	2.422	4.759	2447	2361	4808	2479	2390	4869
35 – 39	2.191	2.304	4.495	2.310	2.396	4.706	2430	2333	4763	2469	2364	4833
40 – 44	2.215	2.239	4.454	2.217	2.260	4.477	2289	2242	4531	2323	2270	4593
45 – 49	2.190	2.069	4.259	2.125	2.138	4.263	2179	2154	4333	2225	2194	4419
50 – 54	1.706	1.750	3.456	1.950	1.907	3.857	1943	1982	3925	1984	2017	4001
55 – 59	1.470	1.616	3.086	1.761	1.753	3.514	1800	1795	3595	1852	1836	3688
60 – 64	1.071	1.243	2.314	1.367	1.246	2.613	1280	1403	2683	1319	1438	2757
65 – 69	904	986	1.890	1.092	942	2.034	986	1140	2126	1030	1186	2216
70 – 74	480	571	1.051	627	743	1.370	545	679	1224	588	726	1314
75 +	494	703	1.197	638	500	1.138	542	878	1420	575	915	1490
Jumlah	30.820	31.078	61.898	32.151	32.987	65.138	33.055	32.632	65.687	**33.430**	**32.983**	**66.413**

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2023

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menggambarkan banyak hal diantaranya tingkat produktivitas serta konsumsi penduduk. Pada kelompok umur 0 sampai dengan 14 tahun membutuhkan pelayanan sosial dan fasilitas umum yang lebih besar seperti pelayanan kesehatan serta pendidikan, namun sisi produktivitas masih rendah, sehingga secara umum tingkat konsumsi akan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi yang mampu dihasilkan. Begitu pula dengan penduduk yang ada pada kelompok umur diatas 65 tahun, dengan produktivitas yang secara umum mulai menurun, mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Penduduk pada kelompok usia 15 sampai dengan 64 tahun produktivitasnya secara rata-rata akan lebih tinggi dibandingkan konsumsinya, sehingga semakin besar jumlah penduduk pada kelompok umur ini terhadap kelompok umur lainnya, berpeluang untuk meningkatkan produktivitas di suatu wilayah.

Penduduk Kota Sawahlunto lebih didominasi oleh penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin penduduk di tahun 2022 adalah sebesar 101,36 artinya secara rata-rata dalam setiap seratus orang penduduk wanita akan terdapat 101 penduduk laki-laki. Secara keseluruhan terdapat tiga kecamatan di Sawahlunto dengan rasio jenis kelamin penduduknya diatas 100 seperti tabel berikut:

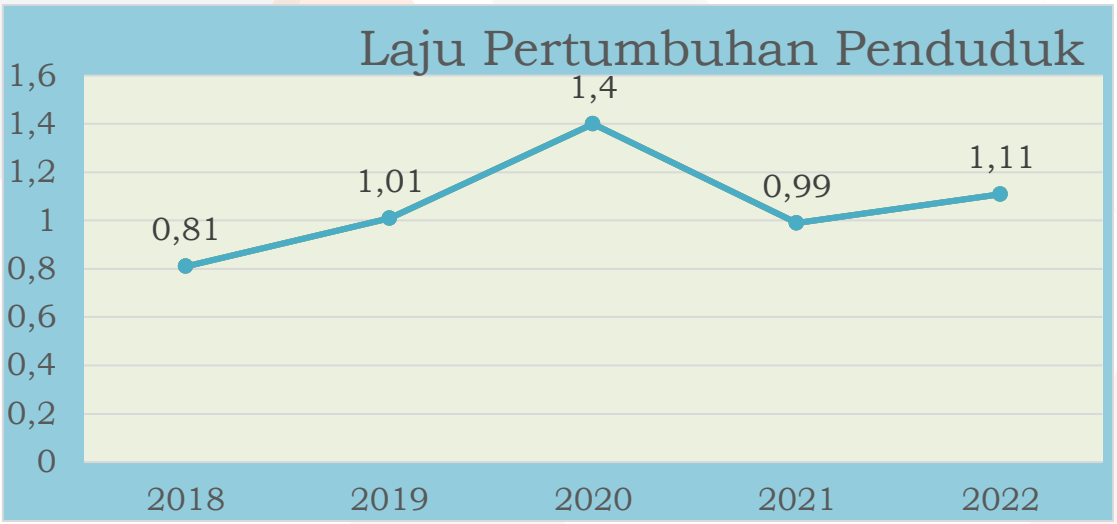
Tabel 2.7
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022

Kecamatan	2021		2022	
	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Lembah Segar	13.410	100,27	13.504	100,62
Barangin	20.546	99,94	20863	99,97
Silungkang	11.486	102,50	11594	102,52
Talawi	20.245	102,69	20452	102,62
Total	65.687	101,30	66413	101,36

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2023

Pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto secara umum di pengaruhi oleh dua komponen yaitu kelahiran dan kematian. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menekan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan mengerakan program KB. Sementara upaya untuk menurunkan kematian dengan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, yang berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2023

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Dari tabel diatas diperoleh laju pertumbuhan penduduk menunjukkan angka positif serta menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,99 meningkat menjadi 1,11 pada tahun 2022. Berdasarkan konsep penduduk dari statistik jika penduduk sudah menempati suatu daerah minimal 6 bulan, maka akan di hitung sebagai penduduk di daerah tersebut, inilah yang menyebabkan jumlah penduduk di kota Sawahlunto tahun 2020 meningkat secara signifikan.

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan pangan, berbagai sarana prasarana dan fasilitas-fasilitas umum, fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan lainnya agar kesejahteraan penduduk terjamin.

Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh penambahan dan pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Untuk Kota Sawahlunto, dinamika penduduk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Jumlah Kelahiran, Kematian dan Perpindahan Penduduk
Kota Sawahlunto Tahun 2022

Kecamatan	Kelahiran	Kematian	Penduduk Datang	Penduduk Pindah
Lembah Segar	415	80	263	337
Barangin	403	107	417	442
Silungkang	274	66	211	247
Talawi	472	109	365	408
Total	1564	362	1256	1434

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2023

Jumlah kelahiran tertinggi terjadi di kecamatan Talawi, tingkat kematian tertinggi juga di kecamatan Talawi. Penduduk datang dan pindah tertinggi terjadi di kecamatan Barangin. Salah satu permasalahan yang dihadapi dengan meningkatnya jumlah penduduk yaitu masalah persebaran penduduk yang tidak merata (data

seperti tabel dibawah) sehingga berdampak pada kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Konsentrasi penduduk yang tinggi pada suatu wilayah di satu sisi dapat memudahkan dalam pelayanan sosial, namun jika telah melebihi kapasitas lingkungan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat meningkatkan kerawanan sosial jika tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi pula. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Kepadatan Penduduk
Tahun 2018 – 2022 (jiwa/Km2)

Kecamatan	Kepadatan Penduduk				
	2018	2019	2020	2021	2022
Silungkang	343,88	344,94	346,46	348,80	352,08
Lembah Segar	237,64	247,98	253,94	255,04	256,83
Barangin	210,88	211,19	229,07	232,03	235,61
Talawi	195,25	195,44	202,16	203,69	205,78
Jumlah	**226,36**	**228,65**	**238,21**	**240,22**	**242,87**

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2023

Dari tabel diatas diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2022 kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Silungkang. Dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Talawi, hal ini dikarenakan wilayah kecamatan Talawi paling luas dibandingkan dengan dari kecamatan lainnya. Namun secara keseluruhan kepadatan penduduk Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun seiiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Sawahlunto.

Untuk tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.10
Data Tingkat Pendidikan Penduduk
Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Tidak/Belum Sekolah	8.931	8.317	17.248	25,45
2	Belum Tamat SD/Sederajat	3.981	3.613	7.594	11,20
3	Tamat SD/Sederajat	5.575	4.846	10.421	15,41
4	SLTP/ Sederajat	4.583	4.248	8.831	13,37
5	SLTA/ Sederajat	8.381	7.908	16.289	24,04
6	Diploma I/II	195	370	565	0,83
7	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	596	1.034	1.630	2,40
8	Diploma IV/Strata-I	1.742	3.131	4.873	7,19
9	Strata-II	141	174	315	0,46
10	Strata-III	2	1	3	0,004
SAWAHLUNTO		34.127	33.642	67.769	100

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2022

Tingkat pendidikan penduduk di Kota Sawahlunto didominasi oleh penduduk yang tidak/belum sekolah (25,45 persen) dan SLTA/sederajat (24,04 persen). Selanjutnya diikuti oleh tingkat tamat SD/sederajat, SLTP/ sederajat, belum tamat SD/sederajat dan sisanya perguruan tinggi. Tabel diatas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kota Sawahlunto didominasi oleh SLTA/sederajat kebawah. Perlu berbagai upaya maksimal oleh semua pihak untuk mendorong dan

memotivasi generasi muda meningkatkan pendidikan melalui jalur formal, sehingga dapat meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah serta peningkatan IPM Kota Sawahlunto.

Tabel 2.11
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Belum/Tidak Bekerja	7.379	6.223	13.602	20,07
2	Aparatur/Pejabat Negara	1.500	1.857	3.357	4,95
3	Tenaga Pengajar	70	323	393	0,58
4	Wiraswasta	12.894	1.921	14.815	21,86
5	Pertanian/Peternakan	3.235	321	3.556	5,25
6	Nelayan	3	0	3	0,004
7	Agama dan kepercayaan	19	0	19	0,028
8	Pelajar/mahasiswa	7.996	7.789	15.785	23,29
9	Tenaga kesehatan	24	129	153	0,22
10	Pensiunan	1.006	574	1.580	2,33
11	Lainnya	1	14.505	14.506	21,40
Kota Sawahlunto		34.127	33.642	67.769	100

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2022

Jenis pekerjaan penduduk Kota Sawahlunto yang terbesar adalah pelajar/mahasiswa (23,29 %), berikutnya wiraswasta (21,86 %), lainnya (21,40 %) dan belum/ tidak bekerja (20,07 %). Hal ini menunjukkan 2 kelompok pekerjaan non produktif (pelajar/mahasiswa dan belum/ tidak bekerja) cukup mendominasi senilai 43,36 % dan di tunjang oleh 9 jenis kelompok pekerjaan lainnya. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu kontribusi berbagai pihak dalam mendorong peningkatan persentase 9 jenis kelompok pekerjaan tersebut.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat, yaitu : Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini, IPM, Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan, Rasio Kesenjangan Kemiskinan. Berikut ini disajikan hasil analisis dari indikator tersebut.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

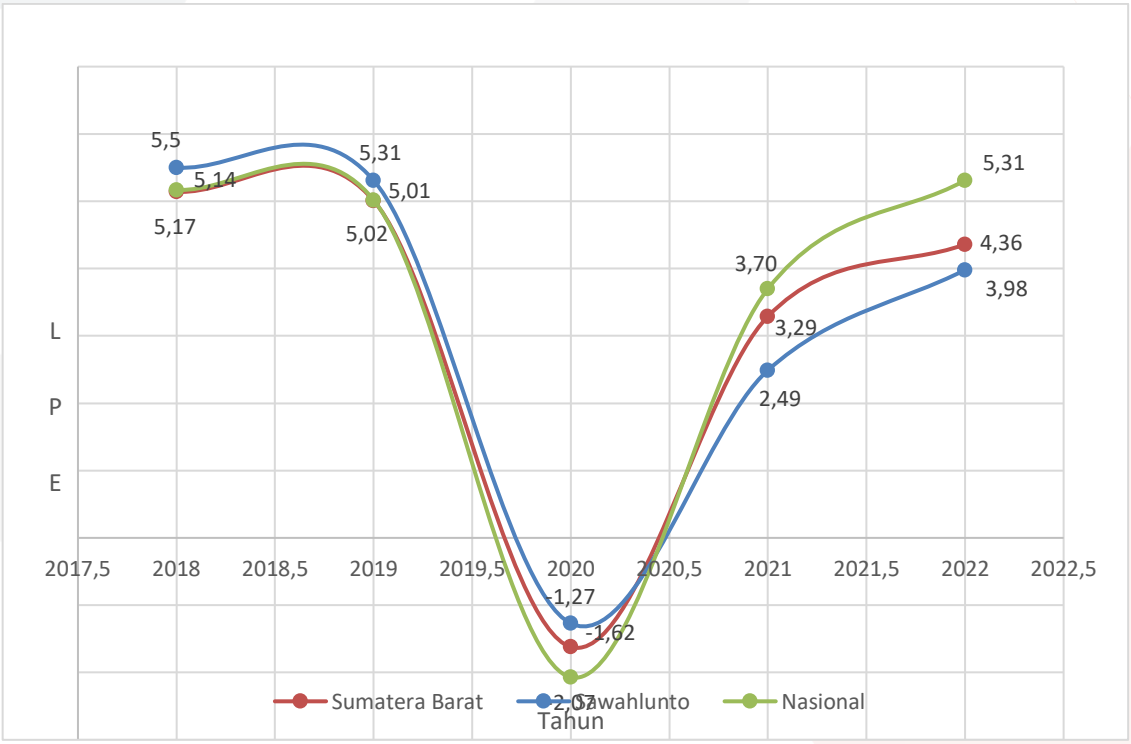
Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diukur berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2010 dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu penggunaan atau pengeluaran (*demand side*) dan sektoral atau lapangan usaha (*supply side*). Pertumbuhan PDRB dihitung dengan rumus sebagai berikut (Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017:200):

$$\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\ \%$$

Dimana :
t + 1 = tahun pengamatan PDRB
t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2018-2022) disandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional :

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023
BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum pandemi covid-19 (tahun 2018 – 2019) berada di atas angka 5,30 % dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat pandemi covid-19 melanda pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 %, kondisi ini juga lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dan 1,62 persen. Namun saat perekonomian mulai menggeliat pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar 2,49 %, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang tumbuh sebesar 3,29 % dan 3,70 %. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar 3,98 %, angka ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang tumbuh sebesar 4,36 % dan 5,31 %.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021 dan 2022 ini disebabkan pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang masih minus (-28,23 % pada tahun 2021 dan -3,04% pada tahun 2022), di samping itu terdapat beberapa lapangan usaha yang produksinya tumbuh belum optimal sebagaimana kondisi sebelum covid 19 melanda, seperti lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, dan Jaminan Sosial Wajib, lapangan usaha Pengadaan listrik dan Gas, lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, dan lainnya dari ***supply side.***

Begitu juga berdasarkan ***demand side***, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebelum covid 19 melanda tumbuh rata-rata di atas 5 %, sedangkan setelah covid 19 tumbuh di bawah 5 % bahkan ada yang minus.

Dan jika pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terlihat bahwa sebelum covid 19 melanda (2018-2019), pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto selalu lebih baik dari pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan berada pada posisi ke 6 pada tingkat kota. Namun setelah terlepas dari Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto **tahun 2021** berada **di posisi terendah kedua** di Provinsi Sumatera Barat **setelah Kabupaten Padang Pariaman.** Sedangkan pada **tahun 2022** tetap berada **di posisi kedua terendah** di Provinsi Sumatera Barat **setelah Kabupaten Sijunjung.**

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022

Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	4,89	4,73	-1,85	2,88	4,94
Pesisir Selatan	5,32	4,78	-1,11	3,37	4,02
Solok	5,19	5,04	-1,14	3,31	4,31
Sijunjung	5,07	4,81	-1,10	3,15	3,95
Tanah Datar	5,04	4,99	-1,12	3,30	4,20
Padang Pariaman	5,44	2,40	-10,46	2,18	6,87
Agam	5,23	4,78	-1,37	3,70	4,21
Lima Puluh Kota	5,23	5,06	-1,16	3,33	4,04
Pasaman	4,97	4,80	-0,87	3,39	4,09
Solok Selatan	5,00	4,86	-1,24	3,35	4,02
Dharmasraya	5,28	4,94	-1,39	3,42	4,28
Pasaman Barat	5,21	4,45	-1,34	3,75	4,17
Kota					
Padang	6,06	5,64	-1,86	3,66	4,33
Solok	5,65	5,49	-1,42	3,56	4,60
Sawahlunto	***5,50***	***5,31***	***-1,27***	***2,49***	***3,98***
Padang Panjang	5,71	5,56	-1,44	3,46	4,39
Bukittinggi	6,00	5,84	-1,74	3,61	4,68
Payakumbuh	6,02	5,89	-1,65	3,59	4,52
Pariaman	5,47	5,30	-1,32	3,53	4,55

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023 Halaman 419

Berfluktuasinya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tidak terlepas dari berfluktuasinya perkembangan nilai-nilai komponen dan lapangan usaha yang menjadi pembentuk nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto baik dari sisi pengeluaran (demand side) maupun dari sisi produksi (supply side).

Komponen pembentuk nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto menurut pengeluaran terdiri dari 6 komponen, berikut urutan komponen pembentuk nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto berdasarkan besarnya kontribusi pada tahun 2022, yaitu : 1). Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 48,51 % ; 2). Investasi (PMTB) dengan kontribusi sebesar 23,66 %; 3). Konsumsi Pemerintah dengan kontribusi sebesar 13,72 %;

4). Net Eksport Barang dan Jasa dengan kontribusi sebesar 12,85 %; 5). Konsumsi LNPRT dengan kontribusi sebesar 1,06 %; dan 6). Perubahan Inventori dengan kontribusi sebesar 0,20 %.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021-2022 setelah wabah covid-19 melanda disebabkan positifnya perkembangan komponen terbesar pembentuk nilai PDRB Kota Sawahlunto tahun 2022 meskipun pertumbuhan komponen-komponen dimaksud belum mencapai pertumbuhan komponen dimaksud sebelum covid 19 mewabah. Berikut disajikan perkembangan pertumbuhan PDRB ADHK dan kontribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (*Demand Side*) periode 2018 – 2022:

Tabel 2.13
Perkembangan Pertumbuhan dan Nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto Dan Kontribusi Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB ADHB Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

Komponen Pengeluaran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1. Konsumsi Rumah Tangga	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	1.324.892,68	1.385.965,11	1.349.753,91	1.378.951,97	1.427.207,91
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,09	4,61	-2,61	2,16	3,5
	Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	55,76%	56,71%	56,32%	55,83%	54,27%
2. Konsumsi LNPRT	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	28.939,63	31.847,73	30.495,43	31.143,04	31.084,24
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	6,00	10,05	-4,25	2,12	-0,19
	Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	1,14%	1,18%	1,15%	1,13%	1,05%
3. Konsumsi Pemerintah	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	429.006,82	448.192,86	406.040,26	406.590,25	403.804,76
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	4,32	4,47	-9,41	0,14	-0,69
	Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	19,55%	19,21%	17,94%	17,42%	15,69%
4. PMTB	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	642.653,32	676.779,05	652.487,60	668.558,13	696.211,31
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	3,58	5,31	-3,59	2,46	4,14
	Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	26,51%	26,60%	26,32%	26,52%	25,51%

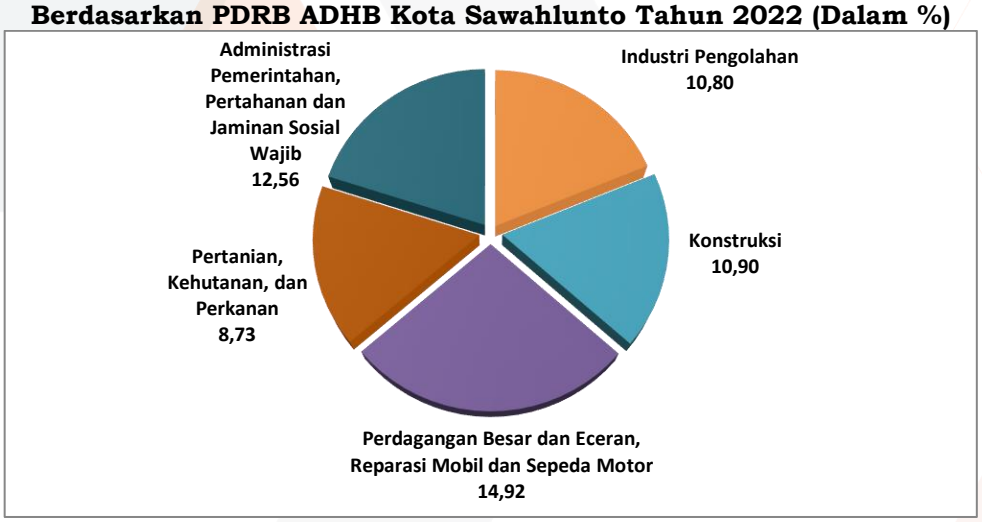
Komponen Pengeluaran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
5. Perubahan Inventori	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	13.135,17	2.064,62	6.368,73	3.241,42	5.743,29
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	16,13%	-84,28%	308,47%	-49,10%	77,18%
	Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	0,56%	0,08%	0,26%	0,13%	0,20%
6. Net Eksport Barang dan Jasa	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	216.992,15	251.687,08	315.778,26	341.105,23	378.155,34
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	16,57%	15,99%	125,46%	8,02%	10,86%
	Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	-	-	-	-	3,28%
PDRB	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	2.655.619,77	2.796.536,45	2.760.924,18	2.829.590,03	2.942.206,85
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,50	5,31	-1,27	2,49	3,98
	Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa komponen Konsumsi Rumah Tangga sebagai pembentuk utama PDRB ADHB menurut Pengeluaran tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 54,27% hanya tumbuh sebesar 3,50%, sebelum covid 19 mewabah komponen ini tumbuh di atas 4,61 %. Komponen berikutnya yang menyokong pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto adalah komponen Investasi (PMTB) dengan kontribusi sebesar 25,51%, tumbuh sebesar 4,14 %. Dan komponen Konsumsi Pemerintah dengan kontribusi sebesar 15,69% mengalami kontraksi sebesar 0,69%.

Selain komponen dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun juga didukung oleh struktur perekonomian dari sisi produksi melalui kontribusi lima lapangan usaha yang dominan terhadap total PDRB ADHB Kota Sawahlunto, yaitu : 1).Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 14,92 %; 2).Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 12,56 %; 3).Konstruksi dengan kontribusi sebesar 10,90 %; 4).Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 10,80 %; dan 5). Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 8,73 % dari total PDRB ADHB Kota Sawahlunto. Berikut disajikan kontribusi lapangan usaha yang dominan berdasarkan PDRB ADHB Kota Sawahlunto tahun 2022 pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.3
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan
Berdasarkan PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2022 (Dalam %)



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023

Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi (berdasarkan nilai PDRB ADHK) dan kontribusi (berdasarkan nilai PDRB ADHB) lima lapangan usaha dominan dan lapangan usaha lainnya pembentuk nilai PDRB Kota Sawahlunto menurut lapangan usaha Tahun 2018 – 2022 :

Tabel 2.14
Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Sawahlunto
Serta Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB ADHB Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

NO	LAPANGAN USAHA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	211.585,43	217.981,59	219.533,32	235.288,04	247.566,33
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	1,89	3,02	0,71	7,18	5,22
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	9,16	8,84	8,92	8,96	8,73
2	Pertambangan dan Penggalian	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	169.660,23	188.594,40	205.352,34	147.378,42	142.891,12
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,14	11,16	8,89	-28,23	-3,04
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	5,03	5,40	4,82	3,79	5,29

NO	LAPANGAN USAHA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
3	Industri Pengolahan	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	323.282,84	313.187,26	303.849,59	318.768,95	326.915,30
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	1,37	-3,12	-2,98	4,91	2,56
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	12,22	10,66	10,82	11,22	10,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	54.651,56	57.970,38	54.396,42	57.240,64	58.405.76
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	9,07	6,07	-6,17	5,23	2,04
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	1,87	1,96	1,88	1,89	1,71
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	9.642,44	10.326,26	10.294,16	10.845,12	10.769,44
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	7,83	7,09	-0,31	5,35	-0,70
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	0,38	0,39	0,39	0,40	0,36
6	Konstruksi	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	283.258,78	302.061,64	286.329,09	295.423,02	304.852,09
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	6,43	6,64	-5,21	3,18	3,19
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	11,21	11,29	11,03	10,98	10,90
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	420.304,73	443.168,27	440.089,10	458.365,75	481.602,28
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,85	5,44	-0,69	4,15	5,07
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	14,99	15,04	14,98	14,67	14,92
8	Transportasi dan Pergudangan	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	241.737,27	262.482,13	233.712,10	243.867,65	252.480,73
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	6,86	8,58	-10,96	4,35	3,53

NO	LAPANGAN USAHA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	8,67	8,88	8,22	8,30	8,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	47.111,15	50.854,36	45.715,95	50.005,43	55.821,86
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	8,53	7,95	-10,10	9,38	11,63
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	2,17	2,24	2,06	2,18	2,22
10	Informasi dan Komunikasi	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	223.761,16	242.274,05	262.117,01	280.666,77	296.858,98
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	10,18	8,27	8,19	7,08	5,77
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	7,10	7,47	8,08	8,37	8,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	83.736,97	85.913,53	86.692,88	94.920,34	100.190,19
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	0,98	2,60	0,91	9,49	5,55
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	3,39	3,29	3,40	3,62	3,53
12	Real Estat	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	44.662,12	47.283,00	47.346,67	49.685,83	52.637,93
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	7,42	5,87	0,13	4,94	5,94
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	1,80	1,76	1,79	1,80	1,74
13	Jasa Perusahaan	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	3.438,59	3.649,43	3.534,17	3.655,43	3.843,33
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,09	6,13	-3,16	3,43	5,14
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	0,14	0,15	0,14	0,14	0,13

NO	LAPANGAN USAHA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	313.643,29	326.390,70	324.352,15	331.138,48	337.940,42
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,78	4,06	-0,62	2,09	2,05
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	11,88	12,06	13,04	13,01	12,56
15	Jasa Pendidikan	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	74.013,47	80.700,00	84.258,65	88.342,02	91.872,52
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	6,26	9,03	4,41	4,85	4,00
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	3,09	3,28	3,47	3,46	3,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	29.463,29	31.118,42	33.066,55	35.496,93	37.086,74
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	6,46	5,62	6,26	7,35	4,48
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	1,15	1,18	1,29	1,35	1,30
17	Jasa Lainnya	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	121.666,45	132.581,00	120.284,03	128.501,21	140.471,82
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	8,03	8,97	-9,28	6,83	9,32
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	5,75	6,09	5,67	5,86	5,97
PDRB Kota Sawahlunto		Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	2.655.619,77	2.796.536,45	2.760.924,18	2.829.590,03	2.942.206,85
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,50	5,31	-1,27	2,49	3,98
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%)	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2022 didukung oleh pertumbuhan lima lapangan usaha dominan dan

lapangan usaha lainnya pembentuk PDRB ADHB Kota Sawahlunto, meskipun pertumbuhan lapangan usaha dimaksud belum mencapai pertumbuhan sebagaimana kondisi sebelum covid 19 mewabah. Hal ini terlihat pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai penyumbang terbesar terhadap nilai PDRB ADHB Kota Sawahlunto tahun 2022 tumbuh sebesar 5,07 %, jauh di bawah pertumbuhan kondisi sebelum covid 19 yang tumbuh berkisar antara 5,44 % sampai 5,85%; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 2,05 %, sedangkan sebelum covid 19 tumbuh berkisar antara 4,06 % sampai 5,78 %; lapangan usaha Industri Pengolahan tumbuh sebesar 2,56 %; lapangan usaha Konstruksi tumbuh sebesar 3,19 %, sedangkan sebelum covid 19 tumbuh berkisar antara 6,43% sampai 6,64 %; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 5,22 %.

Sedangkan lapangan usaha yang bukan merupakan lapangan usaha dominan pada tahun 2022 menunjukkan ada peningkatan pertumbuhan yang signifikan, seperti capaian lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 11,63 %, diikuti oleh lapangan usaha Jasa lainnya yang tumbuh sebesar 9,32 %, lapangan usaha Real Estat tumbuh sebesar 5,94 %, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 5,77 %.

Satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada tahun 2022 adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 3,04 %. Hal inilah yang menyebabkan tertekannya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2022, disamping belum optimalnya pertumbuhan sebagian lapangan usaha sebagaimana kondisi sebelum covid 19 mewabah. Akibatnya pertumbuhan nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto tidak tumbuh sebagaimana daerah lainnya yang tumbuh rata-rata di atas 4 persen, kecuali Kabupaten Sijunjung yang tumbuh sebesar 3,95 %.

2. Laju Inflasi Kota Sawahlunto

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang dan jasa tersebut mengalami kenaikan. Penyebab lain dari inflasi adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, dan lain-lain.

Untuk mengukur laju inflasi Kota Sawahlunto digunakan Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha dan Menurut Pengeluaran. Indeks Implisit adalah suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*). Indeks Implisit digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan yang lebih dikenal dengan tingkat inflasi. Indeks Implisit dihitung dengan rumus sebagai berikut (https://sirusa.bps.go.id):

$$\text{Indeks Implisit PDRB} = \frac{\text{PDRB ADHBn}}{\text{PDRB ADHKn}} \times 100$$

Sedangkan untuk mengukur laju implisit PDRB dilakukan dengan menghitung selisih Indeks Implisit PDRB tahun n dengan n-1, kemudian dibagi dengan Indeks Implisit PDRB tahun n-1. Lebih rinci dapat dilihat pada rumus berikut ini :

$$\text{Laju Implisit PDRB} = \frac{\text{Indeks Implisit PDRB n} - \text{Indeks Implisit PDRB n-1}}{\text{Indeks Implisit PDRB n-1}} \times 100\%$$

Berikut disajikan perkembangan laju inflasi Kota Sawahlunto dengan menggunakan laju implisit PDRB selama kurun waktu 2018-2022 pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Laju Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Menurut Pengeluaran
Tahun 2018 – 2022

Menurut Lapangan Usaha						
No	**Lapangan Usaha**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,02	1,23	-0,44	-1,27	5,50
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,44	4,54	-18,65	15,52	64,07
3	Industri Pengolahan	1,30	-2,62	3,91	4,16	6,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	7,06	1,12	0,69	1,50
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,27	3,15	0,20	1,12	5,59
6	Konstruksi	1,90	2,07	2,42	1,66	9,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,03	2,86	-0,35	-1,00	10,38
8	Transportasi dan Pergudangan	2,79	1,98	3,28	1,83	8,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,30	3,23	1,59	2,07	3,99
10	Informasi dan Komunikasi	2,93	5,09	-0,63	1,91	6,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,45	2,43	1,59	2,52	5,33
12	Real Estat	0,44	0,08	0,81	0,75	4,32
13	Jasa Perusahaan	2,62	3,49	0,84	0,98	2,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,16	5,50	8,12	2,86	7,91
15	Jasa Pendidikan	2,94	5,14	0,52	0,16	6,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,08	4,60	2,42	2,60	4,95
17	Jasa Lainnya	5,45	5,06	2,06	1,74	6,25
Menurut Pengeluaran						
No	**Jenis Pengeluaran**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,11	5,07	1,34	2,17	7,08
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,56	1,71	1,08	1,69	5,59
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,64	1,66	2,45	2,12	3,36
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,72	3,00	1,98	3,55	5,33
Laju Inflasi Kota Sawahlunto		**1,95**	**2,64**	**0,65**	**2,75**	**9,64**

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Halaman 388-389, 405

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2019 (sebelum covid 19 melanda) sebesar 2,64%, cenderung meningkat dari tahun 2018. Sedangkan ketika wabah Covid 19 tahun 2020 melanda, laju inflasi Kota Sawahlunto menurun tajam menjadi 0,65 %. Seiring bangkitnya perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2021 laju inflasi Kota Sawahlunto kembali melonjak menjadi 2,75 %. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022, laju inflasi Kota Sawahlunto meningkat sangat tinggi mencapai 9,64 % dan ini merupakan laju Inflasi tertinggi di Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingginya laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 menjadi salah satu penyebab tertekannya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto yang hanya mencapai 3,98% dan merupakan kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah kedua setelah Kabupaten Sijunjung.

Memperhatikan data laju Implisit PDRB Kota Sawahlunto menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 pada tabel diatas, laju inflasi Kota Sawahlunto didorong oleh tingginya harga komoditas pada bulan Agustus 2022, seperti harga batubara yang mencapai US$

321,59 per ton dan harga emas yang mencapai Rp 962.000 per gram, sehingga lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami inflasi sebesar 64,07%. Di samping lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, hampir semua lapangan usaha mengalami inflasi di atas 4% sebagai ambang batas target inflasi tahun 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah, kecuali lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (1,5%), lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (3,99%) dan lapangan usaha Jasa Perusahaan (2,86%).

Dan berdasarkan data laju Implisit PDRB Kota Sawahlunto menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 pada tabel di atas, laju inflasi Kota Sawahlunto didorong oleh naiknya harga pertalite, pertamax dan solar bersubsidi pada bulan September 2022. Disamping kenaikan harga bahan bakar minyak, juga terjadi kenaikan tarif air dan listrik, harga bahan bakar rumah tangga (gas elpiji), harga barang perlengkapan/peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, harga alat kesehatan, dan biaya transportasi sehingga jenis Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami inflasi sebesar 7,08%. Di samping jenis Pengeluaran konsumsi rumah tangga, hampir semua jenis pengeluaran mengalami inflasi di atas 4% sebagai ambang batas target inflasi tahun 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah, kecuali jenis pengeluaran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3,36%).

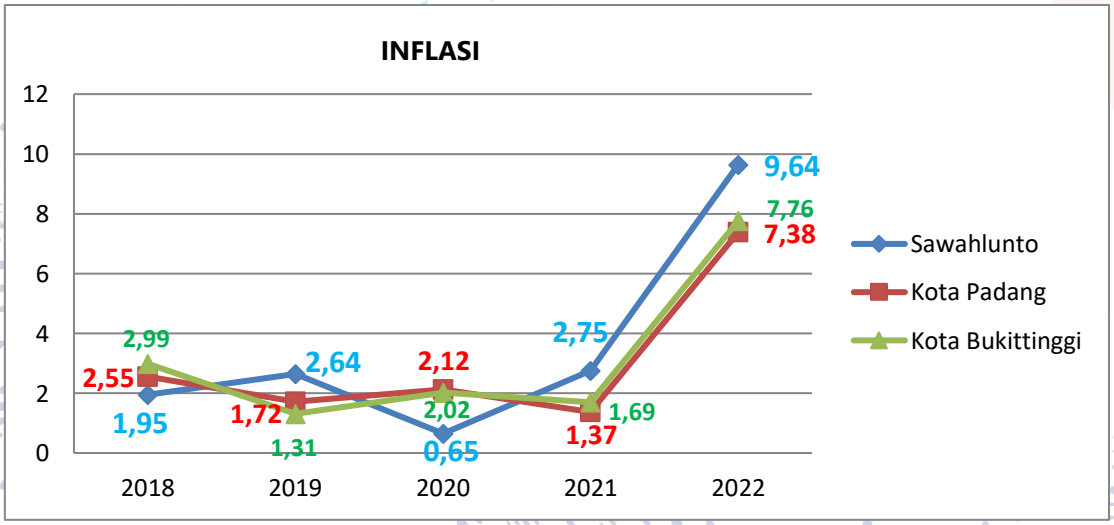
Laju Inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 ini jauh melampaui target inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran laju Inflasi tahun 2022-2024 sebagai berikut :

Tahun	Target Inflasi
2022	3 % ± 1 %
2023	3 % ± 1 %
2024	2,5 % ± 1 %

Sumber : https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/target-inflasi.aspx

Laju Inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi Kota Padang yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat sekaligus kota perdagangan dan Kota Bukittinggi yang juga merupakan kota wisata sekaligus kota perdagangan. Berikut disajikan perbandingan laju inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 2018-2022 pada grafik berikut :

Grafik 2.4
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang Dan Kota Bukittinggi
Tahun 2018-2022

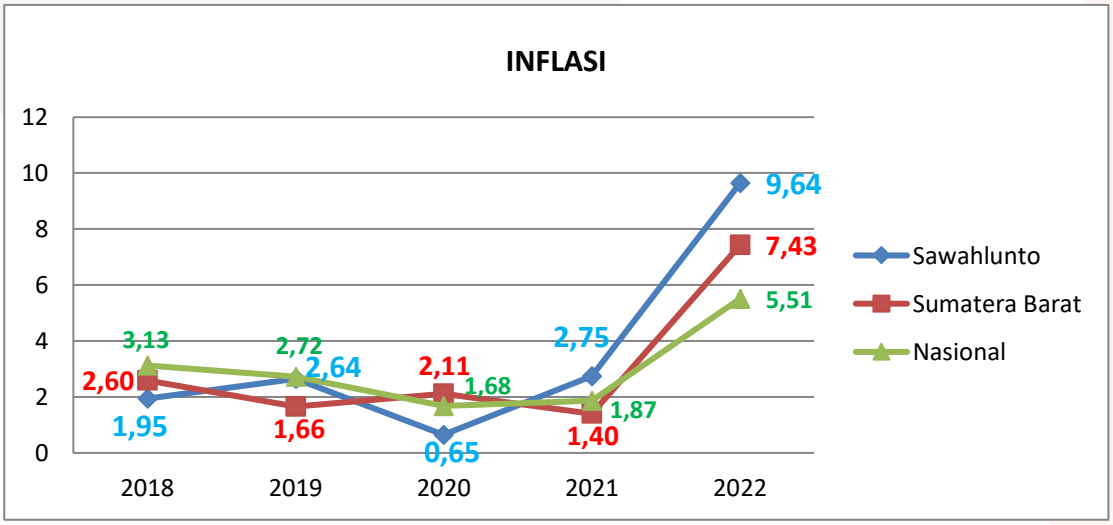


Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa laju inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Bukittinggi selama periode 2018-2022 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi laju inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi **searah** dari tahun ke tahun. Namun fluktuasi laju inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi jika dibandingkan dengan fluktuasi laju inflasi Kota Sawahlunto **berlawanan arah**. Hal ini terlihat ketika laju inflasi Kota Sawahlunto turun dari 2,64% pada tahun 2019 menjadi 0,65% tahun 2020 saat covid 19 melanda, sedangkan laju inflasi Kota Padang justru meningkat dari 1,72% pada tahun 2019 menjadi 2,12% pada tahun 2020, begitu juga dengan laju inflasi Kota Bukittinggi yang meningkat dari 1,31% pada tahun 2019 menjadi 2,02% pada tahun 2020. Sebaliknya, ketika laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2021 meningkat, justru laju inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi menurun. Hal yang sama terjadi selama kurun waktu 2018-2021, namun pada tahun 2022 laju inflasi ketiga kota sama-sama meningkat dari tahun 2021.

Laju Inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 ini juga jauh di atas laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Berikut disajikan perbandingan laju inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu tahun 2018-2022 pada grafik berikut :

Grafik 2.5
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023
BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa laju inflasi Kota Sawahlunto, laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan laju inflasi Nasional selama periode 2018-2022 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kota Sawahlunto mengalami inflasi terendah pada tahun 2020 saat covid 19 melanda dengan laju inflasi sebesar 0,65%. Hal yang sama juga terjadi pada laju inflasi Nasional dengan laju inflasi sebesar 1,68%. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat justru mengalami laju inflasi terendah setelah covid 19 usai pada tahun 2021 dengan laju inflasi sebesar 1,40 %.

Pada tahun 2022 Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sama-sama mengalami laju inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir dengan laju inflasi secara berurutan sebesar 9,64 %, 7,43 % dan 5,51%. Secara nasional pemicu tingginya laju inflasi tahun 2022 disebabkan kenaikan harga komoditas global dan juga ada gangguan pasokan domestik, antara lain masih tingginya harga CPO global yang berdampak masih tingginya harga minyak goreng. Di samping itu tingginya laju inflasi juga didorong oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis pertamax, kenaikan tarif angkutan udara, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 %, melonjaknya harga emas, batubara dan komoditas lainnya.

Tingginya laju inflasi ini tentu saja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Sebagai ilustrasi, dengan tingginya inflasi atau naiknya harga-harga barang secara umum akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, dengan kata lain jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat lebih sedikit karena pendapatan mereka tidak naik. Akibatnya kesejahteraan masyarakat menurun. Dampak selanjutnya, masyarakat akan menurunkan minat menabungnya. Dengan turunnya tingkat tabungan masyarakat pada bank, tentunya berdampak pada berkurang jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada investor. Akibatnya investasi akan berkurang yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan melambat.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu wilayah (daerah). Semakin besar nilai PDRB Per Kapita suatu wilayah semakin makmur wilayah tersebut. PDRB Per Kapita menunjukkan PDRB Per Satu Orang atau PDRB Per Kepala yang diperoleh dengan cara membagi PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut (Sumber : https://sirusa.bps.go.id). Oleh karena itu, meningkat dan menurunnya PDRB Per Kapita ditentukan oleh meningkat dan menurunnya nilai PDRB ADHB serta bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah (daerah) tersebut. PDRB per kapita dihitung dengan rumus sebagai berikut (Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 : 200) :

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$$

Berikut disajikan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dan variabel pembentuknya pada periode 2018-2022 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Dan Variabel Pembentuknya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (Rp. Juta)	3.404.519	3.679.850	3.656.591	3.850.698	4.389.916
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	7,56%	8,09%	-0,63%	5,31%	14%
Jumlah Penduduk (Jiwa)	61.898	62.524	65.138	65.687	66.413
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,81%	1,01%	4,18%	0,84%	1,11%
PDRB Per Kapita (Rp.Juta/Jiwa)	55,00	58,61	56,29	58.62	66,10
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	6.69%	6,56%	-3,96%	4,14%	12,76%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Diolah Tahun 2023

PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebagai salah satu variabel pembentuk PDRB per kapita Kota Sawahlunto senantiasa meningkat setiap tahunnya selama kurun waktu 2018-2019 atau sebelum pandemi covid-19 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 6,63%. Sedangkan pada tahun 2020 dengan mewabahnya covid 19, PDRB ADHB Kota Sawahlunto "mengalami kontraksi pertumbuhan" sebesar 0,63%. Dan pada tahun 2021 dan 2022 setelah wabah Covid 19 melandai, PDRB ADHB Kota Sawahlunto kembali meningkat sebesar 5,31 % dan 14%.

Sedangkan jumlah penduduk Kota Sawahlunto yang menjadi salah satu variabel pembentuk PDRB Per Kapita, dimana sebelum pandemi covid-19 atau selama periode tahun 2018-2019, jumlah penduduk Kota Sawahlunto meningkat rata-rata 563 orang per tahun atau tumbuh rata-rata 0,91 % per tahun dan pada saat pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Sawahlunto meningkat sebanyak 2.614 orang atau tumbuh sebesar 4,18 %. Diperkirakan selisih kenaikan jumlah penduduk sebesar 3,22 % dari rata-rata per tahun sebelumnya karena kepulangan para perantau disebabkan usaha/tempat bekerja mereka tutup sebagai dampak pandemi covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022 laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto kembali ke trend sebelum adanya wabah Covid 19 yang tumbuh sebesar 0,84 dan 1,1%.

Dengan meningkat atau menurunnya nilai PDRB ADHB Kota Sawahlunto dan jumlah penduduk Kota Sawahlunto menyebabkan PDRB Per Kapita juga mengalami peningkatan atau penurunan. Selama kurun waktu tahun 2018 - 2019, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan 6,63 % per tahun. Dimana PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2019 mencapai Rp. 58,61 juta/jiwa atau meningkat 6,56 % dari tahun 2018. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata pendapatan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2019 sebesar Rp. 58,61 juta rupiah per orang per tahun. Sedangkan pada tahun 2020, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto turun menjadi Rp. 56,29 juta/jiwa atau turun sebesar 3,96 % disebabkan turunnya PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebesar 0,63 % sebagai dampak dari wabah covid-19 dan meningkatnya jumlah penduduk Kota Sawahlunto sebesar 4,18 %. Dan tahun 2021, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto kembali meningkat menjadi Rp. 58,62 juta/jiwa atau naik sebesar 4,14 % seiring dengan meningkatnya PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebesar 5,31 % dan jumlah penduduk meningkat sebesar 0,99 %. Begitu juga halnya dengan tahun 2022, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto kembali meningkat menjadi Rp. 66,10 juta/jiwa atau naik sebesar 12,76% seiring dengan meningkatnya PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebesar 14 % dan jumlah penduduk meningkat sebesar 1,11%.

Berikut perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2018-2022 pada tabel berikut :

Tabel 2.17
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah/Jiwa) Tahun 2018 – 2022

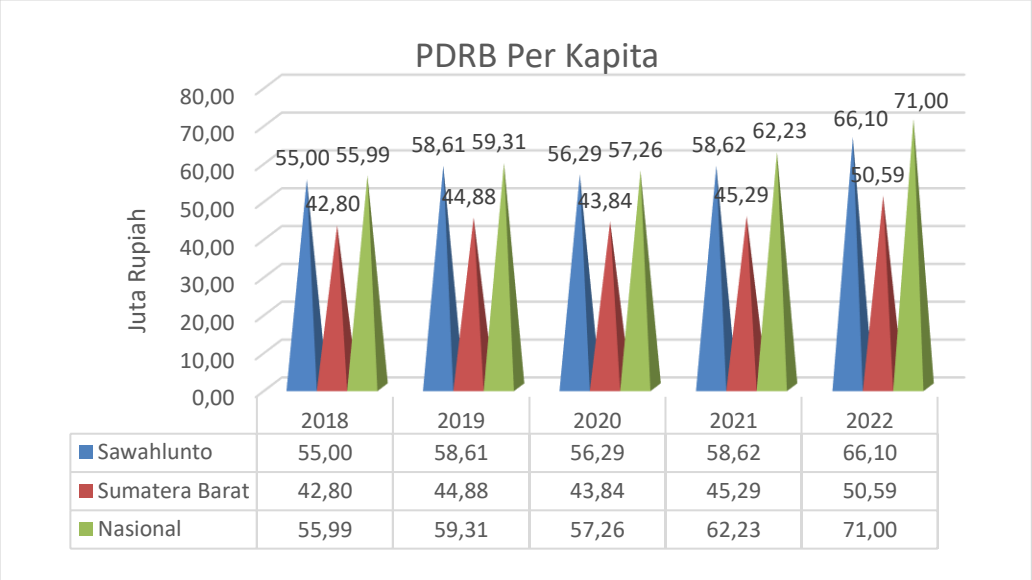
Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	47,06	50,12	53,19	54,80	60,91
Pesisir Selatan	28,32	30,11	28,04	29,29	32,14
Solok	34,10	36,21	34,77	35,96	39,67
Sijunjung	36,31	38,15	38,99	40,31	44,39
Tanah Datar	35,13	37,53	35,10	36,37	40,01
Padang Pariaman	49,45	50,95	41,72	42,62	50,89
Agam	39,24	41,61	38,63	39,97	44,05
Lima Puluh Kota	38,27	40,61	40,59	41,96	46,09
Pasaman	29,87	31,47	30,02	31,12	33,80
Solok Selatan	30,97	32,25	30,54	31,26	34,08
Dharmasraya	40,14	41,18	44,98	46,51	52,12
Pasaman Barat	33,52	34,32	35,46	36,51	40,43
Kota					
Padang	61,24	65,13	68,51	71,36	79,38
Solok	53,43	56,48	55,29	57,10	63,19
Sawahlunto	***55,00***	***58,62***	***56,29***	***58,62***	***66,10***
Padang Panjang	60,35	64,19	61,92	64,09	70,64
Bukit Tinggi	62,21	65,90	71,39	74,24	83,35
Payakumbuh	45,88	49,88	49,10	51,73	57,56
Pariaman	52,68	56,12	53,20	55,18	60,81

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa besaran PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berada di bawah PDRB Per Kapita Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Bahkan dengan adanya wabah Covid-19 tahun 2020 yang telah menurunkan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2020 tidak merubah posisi Kota Sawahlunto pada peringkat keempat PDRB Per Kapita tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat.

Untuk melihat perbandingan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dengan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.6
Perbandingan PDRB Per Kapita
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Sawahlunto	55,00	58,61	56,29	58,62	66,10
Sumatera Barat	42,80	44,88	43,84	45,29	50,59
Nasional	55,99	59,31	57,26	62,23	71,00

Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Memperhatikan grafik di atas terlihat bahwa peningkatan dan penurunan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB Per Kapita Nasional searah selama kurun waktu tahun 2018-2022, dimana PDB (PDRB) Per Kapita ketiga wilayah ini konsisten meningkat dari tahun ke tahun pada periode 2018-2019, dan ketika wadah Covid 19 melanda Indonesia tahun 2020, PDB (PDRB) Per Kapita ketiga wilayah sama-sama turun. Kemudian ketika perekonomian Indonesia mulai bangkit pada tahun 2021, PDB (PDRB) Per Kapita ketiga wilayah ini kembali meningkat. Kondisi ini terlihat dari PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 58,61 juta rupiah/jiwa, kemudian dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 turun menjadi 56,29 juta rupiah/jiwa dan pada tahun 2021 dan 2022 dengan bangkitnya perekonomian meningkat menjadi sebesar 58,62 juta rupiah/jiwa dan 66,10 juta rupiah/jiwa. Kondisi yang sama juga terjadi pada PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat yang meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 44,88 juta rupiah/jiwa, kemudian dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 turun menjadi 43,84 juta rupiah/jiwa dan pada tahun 2021 dan 2022 dengan bangkitnya perekonomian meningkat menjadi sebesar 45,29 juta rupiah/jiwa dan 50,59 juta rupiah/jiwa. Demikian juga halnya dengan PDB Per Kapita Nasional, tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi sebesar 59,31 juta rupiah/jiwa, kemudian dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 turun menjadi 57,26 juta rupiah/jiwa dan pada tahun 2021 dan 2022 dengan bangkitnya perekonomian meningkat menjadi sebesar 62,23 juta rupiah/jiwa dan 71 juta rupiah/jiwa.

Sementara dari besar kecilnya nilai PDB (PDRB) Per Kapita selama kurun waktu 2018- 2022, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto lebih besar dari PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat namun lebih kecil dari PDB Per Kapita Nasional. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2018 dimana PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar 55 juta rupiah/jiwa dan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 42,80 juta rupiah/jiwa serta PDB Per Kapita Nasional sebesar 55,99 juta rupiah/jiwa. Begitu juga pada tahun 2022, dimana PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar 66,10 juta rupiah/jiwa dan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 50,59 juta rupiah/jiwa serta PDB Per Kapita Nasional sebesar 71 juta rupiah/jiwa.

4. Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado Gini, dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya, Variabilita e mutabilita. Indeks Gini atau Rasio Gini (Koefisien Gini) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Indeks Gini merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk (Sumber : https://sirusa.bps.go.id). Jika Indeks Gini menurun berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan, sebaliknya jka Indeks Gini meningkat berarti distribusi pengeluaran penduduk memburuk. Semakin tinggi Indeks Gini, berarti kelompok miskin lebih lambat untuk keluar dari kemisikinannya, sedangkan yang sudah kaya justru lebih cepat untuk bertambah kaya. Indeks Gini dihitung dengan rumus sebagai berikut (Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, 200) :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^{k} P_i \, (Q_i + Q_{i-1})$$

dimana :

Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i

Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, jika :

G < 0,3 = ketimpangan rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan moderat atau sedang

G > 0,5 = ketimpangan tinggi

Berikut disajikan perkembangan Indeks Gini Kota Sawahlunto dan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat periode tahun 2018-2022 :

Tabel 2.18
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022

Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	0,306	0,336	0,273	0,321	0,233
Pesisir Selatan	0,255	0,246	0,264	0,253	0,246
Solok	0,303	0,285	0,277	0,246	0,243
Sijunjung	0,300	0,293	0,269	0,270	0,243
Tanah Datar	0,288	0,278	0,273	0,250	0,251
Padang Pariaman	0,296	0,297	0,257	0,269	0,245

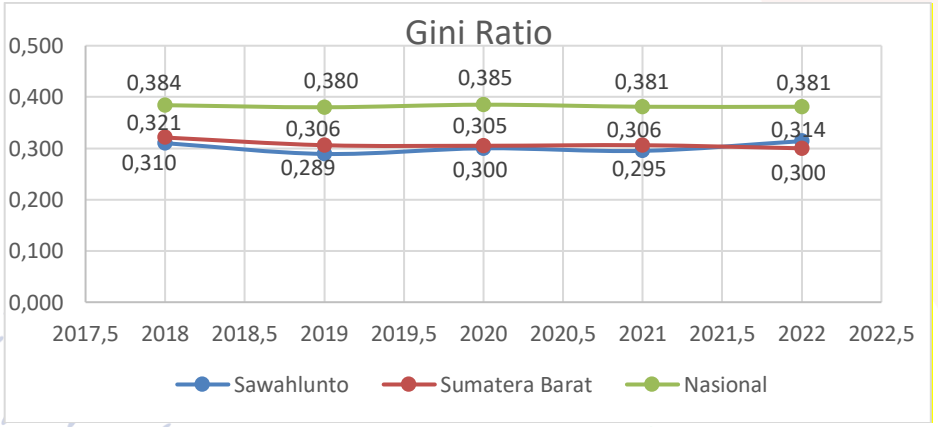
Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Agam	0,257	0,251	0,278	0,272	0,298
Lima Puluh Kota	0,283	0,238	0,222	0,244	0,208
Pasaman	0,266	0,330	0,310	0,248	0,230
Solok Selatan	0,309	0,295	0,307	0,277	0,253
Dharmasraya	0,264	0,278	0,280	0,268	0,287
Pasaman Barat	0,290	0,283	0,258	0,261	0,277
Kota					
Padang	0,344	0,312	0,312	0,343	0,354
Solok	0,296	0,271	0,286	0,277	0,288
Sawahlunto	***0,310***	***0,289***	***0,300***	***0,295***	***0,314***
Padang Panjang	0,290	0,322	0,394	0,306	0,296
Bukittinggi	0,337	0,267	0,265	0,286	0,317
Payakumbuh	0,302	0,276	0,325	0,316	0,311
Pariaman	0,316	0,300	0,310	0,301	0,272
Sumatera Barat	0,321	0,306	0,305	0,306	0,300

Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Ketimpangan Pengeluaran antar penduduk di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi dari tahun ke tahun namun masih tetap berada pada klasifikasi rendah dan sedang. Pada tahun 2018 Indeks Gini Kota Sawahlunto sebesar 0,310, angka ini memposisikan Kota Sawahlunto sebagai kabupaten/kota keempat tertinggi Indeks Gininya setelah Kota Padang (0,344), Kota Bukittinggi (0,337) dan Kota Pariaman (0,316). Dan pada tahun 2022 Indeks Gini Kota Sawahlunto sebesar 0,314, angka ini meningkat 6,44 % dibandingkan tahun 2021 dengan capaian Indeks Gini 0,295. Ketimpangan pengeluaran Kota Sawahlunto tahun 2022 ini adalah yang tertinggi selama lima tahun terakhir dan berada pada posisi tertinggi ketiga di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang (0,354) dan Kota Bukittinggi (0,317).

Berikut disajikan perkembangan Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada grafik berikut ini :

Grafik 2.7
Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik 2023

Berdasarkan grafik di atas, secara umum Indeks Gini Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, kondisi ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk di Kota Sawahlunto cenderung semakin memburuk. Dan jika Indeks Gini Kota Sawahlunto dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Indeks Gini Kota Sawahlunto berada di bawah Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, kecuali pada tahun 2021 dimana Indeks Gini Kota Sawahlunto berada di atas Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat. Artinya ketimpangan pengeluaran antar penduduk di Kota Sawahlunto lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, kecuali tahun 2022.

5. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan adalah **antitesis dari Angka Kemiskinan**. Semakin tinggi Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan suatu daerah, semakin sejahtera daerah tersebut dibandingkan dengan daerah lainnya. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan merupakan salah satu Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan dihitung dengan rumus sebagai berikut (Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, 201) :

Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan = 100 – Angka Kemiskinan

Biasanya yang sering menjadi perhatian dan diekspose oleh pemerintah Pusat dan Daerah dalam melihat capaian kinerja hasil pembangunan suatu daerah atau wilayah adalah Angka Kemiskinan. **Semakin rendah angka kemiskinan suatu daerah**, **semakin baik penilaian terhadap capaian kinerja pemerintah daerah tersebut**. Angka Kemiskinan diukur dengan menggunakan rumus :

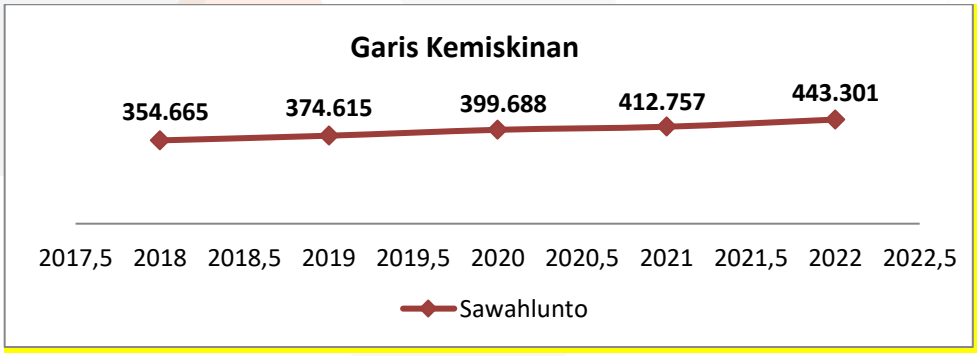
$$\text{Angka Kemiskinan} = \frac{\sum \text{Pgk}}{\sum \text{P}} \times 100\%$$

Keterangan :
∑Pgk = Jumlah Penduduk berada di bawah garis kemiskinan
∑P = Jumlah Total Penduduk
Gk = Garis kemiskinan

Untuk mengukur **Angka Kemiskinan**, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, **Kemiskinan** dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah **Garis Kemiskinan.**

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan (Sumber : https://sawwahluntokota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022 : 212-213).

Grafik 2.8
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto (Rupiah/Kapita/Bulan)
Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023, Halaman 414

Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto berada pada level Rp 354.665,- per kapita per bulan dan pada tahun 2022 sudah jauh meningkat menjadi Rp 443.301,- per kapita per bulan, terjadi peningkatan Garis Kemiskinan rata-rata Rp 22.159 per tahun atau naik rata-rata 5,75 % per tahun.

Berdasarkan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto ini diperoleh jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto dan selanjutnya dapat dihitung Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto dengan cara membandingkan jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto dengan jumlah penduduk Kota Sawahlunto dan dikalikan dengan 100%. Dengan cara yang sama dapat diperoleh Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan dengan cara membandingkan jumlah penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto dengan jumlah penduduk Kota Sawahlunto. Dengan kata lain Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto merupakan komplementer dari Persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto atau Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan diperoleh dengan mengurangkan angka 100 % dengan Persentase Penduduk Miskin. Berikut perkembangan Persentase Penduduk Miskin Dan Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2018 – 2022) :

Tabel 2.19
Perkembangan Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan
Dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto	(Rp/kapita/bulan)	354.665	374.615	399.688	412.757	443.301
Jumlah Penduduk Miskin Kota Sawahlunto	Jiwa (Orang)	1.480	1.350	1.360	1.520	1.470
Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto	Jiwa (Orang)	61.898	62.524	65.138	65.687	66.413
Persentase Penduduk Miskin	%	2,39	2,17	2,16	2,38	2,28
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	%	97,61	97,83	97,84	97,62	97,72

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2019-2023

Persentase penduduk miskin di Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto sebesar 2,39 % dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1480 jiwa. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto turun menjadi 2,17 % seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto menjadi 1350 jiwa. Dan pada tahun 2020 saat terjadi wabah covid 19, jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto terus meningkat menjadi

1360 jiwa, namun persentase penduduk miskin turun menjadi 2,16 %, hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk miskin. Dan pada tahun 2022 persentase penduduk miskin menjadi 2,28 %.

Pada tahun 2021 dan 2022 Kota Sawahlunto merupakan Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional. Masuknya Kota Sawahlunto dalam 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional bukan hanya tahun 2021 dan 2022 saja, berikut posisi Kota Sawahlunto dalam 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional pada beberapa tahun terakhir:

Tabel 2.20
Posisi Kota Sawahlunto Dalam
10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional
Tahun 2017-2022

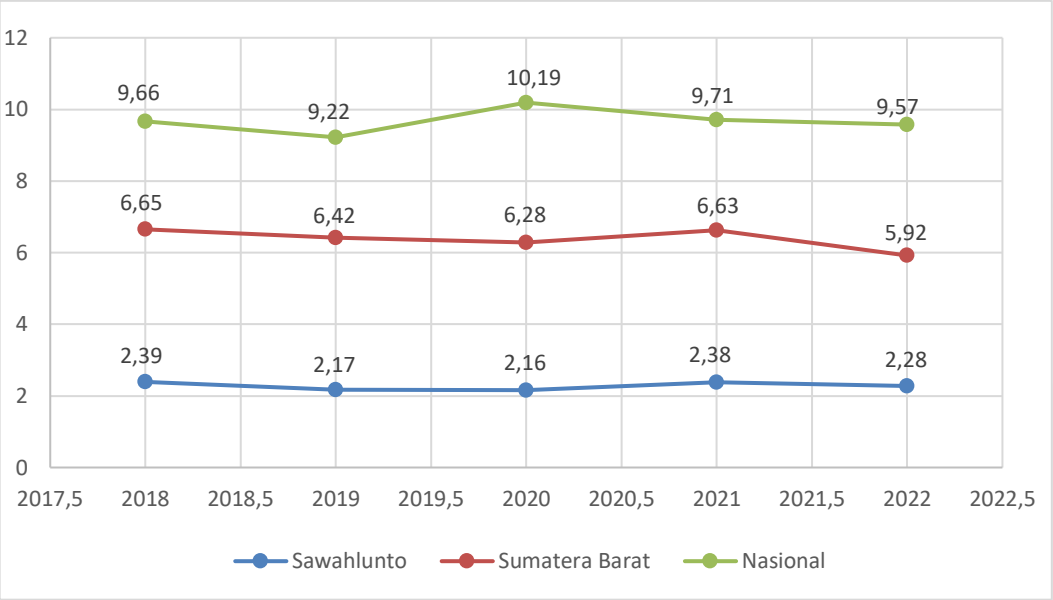
Tahun 2017	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1. Kota Tangerang 1,76 2. Kota Sawahlunto 2,01 3. Kabupaten Badung 2,06 4. Kota Denpasar 2,27 5. Kota Depok 2,34 6. Kota Ternate 2,73 7. Kota Sungai Penuh 2,78 8. Kota Balikpapan 2,82 9. Kabupaten Banjar 2,96 10. Kabupaten Bangka Barat 2,98	1. Kota Tangerang Selatan 2. Kabupaten Badung 3. Kota Depok 4. Kota Denpasar 5. Kota Sawahlunto 6. Kota Balikpapan 7. Kota Pekanbaru 8. Kabupaten Bangka Barat 9. Kabupaten Banjar 10. Kota Jakarta Selatan	1. Kabupaten Badung 2. Kota Denpasar 3. Kota Sawahlunto 4. Kota Tangerang Selatan 5. Kota Depok 6. Kabupaten Banjar 7. Kota Balikpapan 8. Kota Pekanbaru 9. Kabupaten Bangka Barat 10. Kota Kota Solok	1. Kota Sawahlunto 2,38 2. Kota Tangerang Selatan 2,57 3. Kota Depok 2,58 4. Kabupaten Badung 2,62 5. Kabupaten Bangka Barat 2,75 6. Kota Pekanbaru 2,83 7. Kota Balikpapan 2,89 8. Kota Denpasar 2,96 9. Kabupaten Banjar 3,04 10. Kota Solok 3,12	1. Kota Sawahlunto 2,28 2. Kota Balikpapan 2,45 3. Kabupaten Bangka Barat 2,46 4. Kota Tangerang Selatan 2,50 5. Kota Depok 2,53 6. Kabupaten Badung 2,53 7. Kabupaten Banjar 2,79 8. Kota Denpasar 2,97 9. Kota Sungai Penuh 2,97 10. Kota Solok 3,02

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik

Berfluktuasinya persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto tentu saja berlawanan dengan Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto pada periode 2018- 2022. Jika persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto menurun, maka Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto meningkat. Sebaliknya jika persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto meningkat, maka Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto menurun.

Persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2018-2022 sangat jauh di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.9
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Meskipun Persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto jauh di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, namun Pemerintah Kota Sawahlunto senantiasa melakukan berbagai upaya untuk terus menekan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti pemberian Beasiswa dari pemerintah daerah, PKH dari Kementerian Sosial RI, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kementerian Sosial RI, Dana Sharing Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Dana sharing Rehab rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu dan Program Listrik untuk Masyarakat Kurang Mampu.

Selain Persentase penduduk miskin, kondisi kemiskinan suatu daerah juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. **Semakin tinggi** nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, **semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin** dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. **Semakin tinggi** nilai indeks, **semakin tinggi ketimpangan pengeluaran** di antara penduduk miskin.

Berikut perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2018 – 2022) :

Tabel 2.21
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Sawahlunto						
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	0,27	0,23	0,07	0,33	0,34
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,07	0,05	0,00	0,06	0,09
Provinsi Sumatera Barat						
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	1,04	0,94	0,92	1,04	0,80
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,24	0,21	0,20	0,24	0,16

Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2018-2022 berada pada kisaran 0,07 – 0,34. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terendah terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi terjadi pada tahun 2022. Pada dasarnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto ini tergolong rendah, hal ini mengandung arti rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Sawahlunto berada dekat dengan garis kemiskinan atau berada di sekitar garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto jauh berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sumatera Barat, hal ini mengandung makna bahwa rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Kota Sawahlunto lebih tinggi (lebih baik) dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat. Bahkan pada tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto adalah yang terendah dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023 : 423).

Sedangkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2018-2022 berada pada kisaran 0,00 – 0,09. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terendah terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi terjadi pada tahun 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto ini tergolong rendah, hal ini mengandung arti tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kota Sawahlunto ini tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat yang berada jauh di atas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto, mengandung makna penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sawahlunto lebih merata (tidak timpang) dibandingkan dengan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2022 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto adalah yang terendah ketiga dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh (Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023 : 423).

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Sawahlunto sudah dimulai sejak tahun 2003 yang dijadikan sebagai prioritas pembangunan di Kota Sawahlunto. Tahun 2004 sampai dengan 2013 memberikan penguatan modal mellaui BDC, bantuan bibit kakao, karet dan ternak seperti sapi, kambing, itik dan ayam. Tahun 2009 sampai tahun 2012 dilakukan program sapu bersih kemiskinan dengan memberikan intervensi program kepada keluarga miskin sesuai dengan potensinya. Tahun 2014 dilakukan inovasi kampung produktif yang mana intervensi program kemiskinan berdasarkan potensi desa. Dengan adanya dana desa pada tahun 2019 mulai mengoptimalkan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Sawahlunto. Adapun program/kegiatan penanggulangan kemiskinan beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut :

BIDANG EKONOMI

1. Pelatihan berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 6 paket dengan jumlah lulusan 96 peserta, tahun 2020 sebanyak 8 paket dengan jumlah lulusan 128 peserta dan tahun 2021 sebanyak 9 paket dengan jumlah lulusan 144 peserta, tambah 16 peserta pbk;
2. Pelatihan tenaga kerja mandiri (TKM) (APBN), tahun 2019 sebanyak 1 paket dengan lulusan sebanyak 20 orang dan tahun 2020 sebanyak 5 paket dengan jumlah lulusan 100 orang;
3. Pelatihan TKM infrastrukstur tahun 2020 dan 2021 sebanyak 3 paket dengan lulusan 120 orang;
4. Menjahit konveksi berbasis masyarakat (PT. Asiako batamindo). Telah menyerap tenaga kerja penjahit sebanyak 252 orang, tersebar di 26 desa/kelurahan;
5. Pendirian UPTD dana bergulir dan telah menyalurkan sebanyak 2,141 Milyar kepada 138 nasabah berupa UMKM perorangan dan koperasi;
6. Bantuan modal usaha bagi pengusaha pemula sebanyak 123 orang sampai dengan tahun 2020;

7. Bantuan gerobak bagi UMKM yaitu sebanyak 63 unit dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021
8. Bantuan satu set payung dagang (1 payung, 1 meja dan 4 kursi) sebanyak 110 unit dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

BIDANG PENDIDIKAN

1. Program bantuan pakaian seragam untuk siswa baru jenjang SD dan SMP negeri dan swasta dengan total penerima sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 sebanyak 6.327 orang yaitu 1 stel pakaian seragam sekolah senin-selasa, 1 stel pakaian pramuka dan 1 (satu) stel songket silungkang;
2. Program reward dan bantuan kuliah bagi mahasiswa yang lulus di perguruan tinggi dengan akreditasi a dan b negeri dan swasta, dengan total penerima sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 sebanyak sebanyak 737 orang dengan besaran 2 juta per orang;
3. Program reward dan bantuan kuliah bagi mahasiswa dengan nilai ip diatas 3,1 di perguruan tinggi dengan akreditasi a dan b negeri dan swasta, dengan total penerima sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ini sebanyak 2.142 orang mahasiswa dengan besaran 1 juta per orang.

BIDANG KESEHATAN

1. Mempertahankan UHC di kota sawahlunto yaitu sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk dengan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat kota sawahlunto dengan 96,7 persen masyarakat kota sawahlunto sudah terjamin pelayanan kesehatannya;
2. Pembentukan 14 rumah atau pos gizi dari 27 desa yang ada di kota sawahlunto untuk menekan dan mengatasi jumlah anak astunting di kota sawahlunto.

BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
   - Tahun 2019, dengan anggaran 8,277 milyar sebanyak 473 rumah
   - Tahun 2020, dengan anggaran 3,440 milyar sebanyak 172 rumah
   - Tahun 2021, dengan anggaran 1,960 milyar sebanyak 98 rumah
2. Peningkatan kualitas pengelolaan air minum masyarakat (pamsimas) sebesar 1,8 milyar untuk 21 desa/kelurahan;
3. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat khusus kotaku tahun 2020 dan 2021 sebesar 10 milyar ;

BIDANG SOSIAL

1. Program bantuan uang transport bagi anak disabilitas 137.500,- per bulan untuk 74 anak dengan total anggaran total Rp. 122.100.000,-;
2. Program bantuan permakanan (beras, gula pasir, sarden, kacang hijau, susu, minyak goreng) bagi lansia dengan nilai sebesar Rp.350.000,- perpaket dengan realisasi sebanyak 160 paket bagi 160 orang lansia;
3. Penyaluran BPNT sejak tahun 2019 sampai dengan 2022. Untuk tahun 2022 jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 1.465 keluarga;
4. Program bantuan asistensi lanjut usia berupa uang tunai sebesar Rp.150.000,- per bulan x 12 bulan untuk 127 orang lansia. Bantuan ini telah dilakukan sejak tahun 2019 sampai dengan 2022;
5. Bantuan sosial untuk tukang ojek berupa uang sebesar Rp. 150.000,-/bulan x 3 bulan untuk 300 orang dengan total bantuan sebanyak Rp. 135.000.000,-;
6. Program bantuan penyediaan permakanan bagi anak berkebutuhan khusus sebanyak 25 orang.
7. Bantuan Tidak Terencana (BTT) kepada 50 orang penerima manfaat berupa bantuan uang tunai untuk kasus-kasus tidak terencana, seperti : kebakaran, sakit, tambang

meledak (berdasar Perwako nomor 6/2021, bantuan maksimal Rp. 10.000.000,-/orang).

8. Penyediaan alat bantu bagi 10 orang penyandang disabilitas berupa kursi roda dan alat bantu dengar.

6. Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan 1 dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang harus dicapai pada tahun 2030. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan kebijakan baru yang disampaikan oleh Pemerintah pada awal tahun 2020. Tanggal 4 Maret tahun 2020, Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas telah memberikan arahan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem secara Nasional menjadi 0% di akhir RPJMN tahun 2024, sedangkan berdasarkan rilis BPS, kemiskinan ekstrem nasional pada tahun 2022 adalah 2,04%.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran 1,9 USD PPP (Purchasing Power Parity), sebagai standar yang diacu bersama oleh bangsa-bangsa berdasarkan standar World Bank, berdasarkan hitungan World Bank persentase penduduk miskin ekstrem Nasional tahun 2022 adalah 2,04%, sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrem Nasional adalah 5.800.000 jiwa. BPS Pusat melakukan perhitungan untuk standarisasi 1,9 USD PPP untuk di konversikan ke dalam rupiah, berdasarkan perhitungan BPS bahwa 1,9 USD PPP perkapita perhari pada tahun 2022 adalah Rp. 10.379 per kapita perhari, jika dikalikan dengan 30 hari dalam sebulan, maka garis kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 adalah Rp. 322.170/kepala/bulan dan berlaku secara nasional.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah memberikan amanat bagi seluruh lapis pemerintah sampai Pemerintahan Desa untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk dengan meraih dukungan dari unsur non pemerintah untuk terlibat dalam upaya intervensi.
Arahan Presiden tersebut diantaranya :

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

   a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat;
   c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

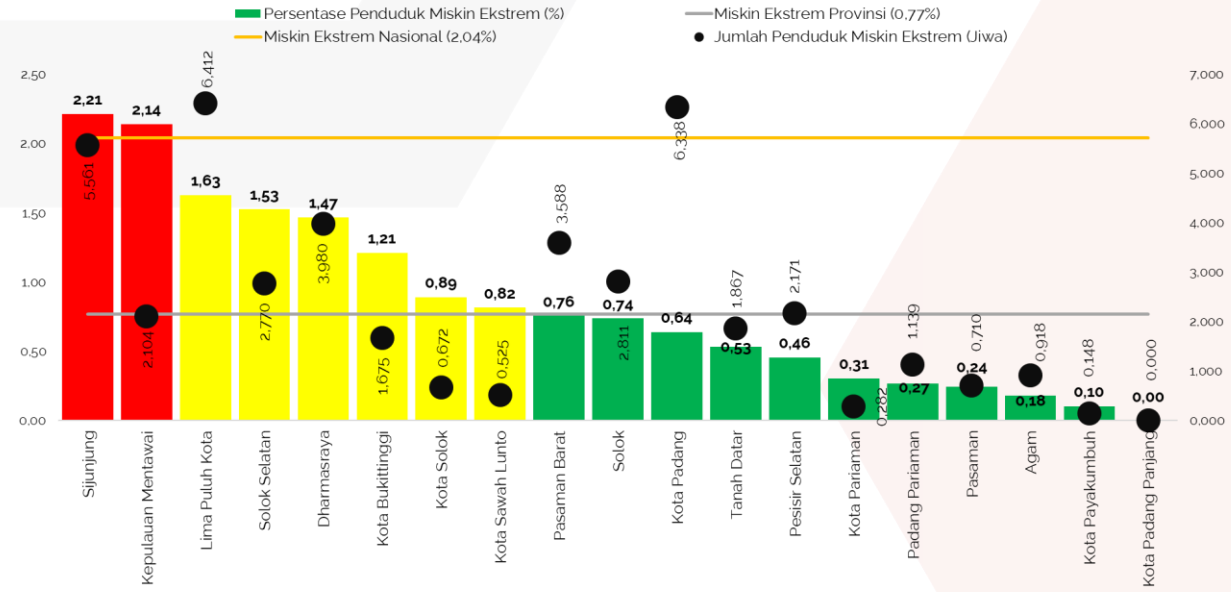
Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ektsrem ini, dilaksanakan dengan prinsip Tepat sasaran : seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini. Pendekatan multidimensi : pelaksanaan program PPKE dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan. Keterpaduan dan sinergi : penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBdes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem. Tersampaikannya dan dipahaminya

inforamsi : penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program PPKE. Koordinasi dan kerjasama multipihak : pelaksanaan program PPKE memerlukan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur non pemerintah, serta Terpadu dan terkendali : pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrument dan indikator yang relevan dan terukur.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh BPS, sebaran persentase penduduk miskin ekstrem berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada periode Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.10

Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2022



Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin ekstrem yang paling tinggi adalah Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar 2,21%, sedangkan persentase penduduk miskin ekstrem yang paling rendah adalah Kota Padang Panjang yaitu 0 persen. Kota Sawahlunto berada pada posisi ke-13 tertinggi, dengan persentase penduduk miskin ekstrem nya adalah 0,82% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 0,525 ribu jiwa. Persentase ini lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat yaitu 0,77%.

Berdasarkan hasil estimasi BPS tahun 2022 dapat dilihat persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut Kabupaten/Kota tahun 2020-2022 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.22
Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sumatera Barat
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (persen)			Estimasi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
13	Sumatera Barat	1,53	0,91	0,77	83,933	50,842	43,671
1301	Kepulauan Mentawai	7,78	3,97	2,14	7,254	3,826	2,104
1302	Pesisir Selatan	1,32	0,37	0,46	6,143	1,731	2,171
1303	Solok	2,47	0,56	0,74	9,256	2,122	2,811
1304	Sijunjung	2,10	0,73	2,21	5,033	1,804	5,561
1305	Tanah Datar	0,81	0,76	0,53	2,824	2,646	1,867
1306	Padang Pariaman	1,14	0,95	0,27	4,740	3,996	1,139
1307	Agam	2,50	1,82	0,18	12,364	9,096	0,918
1308	Lima Puluh Kota	1,72	1,24	1,63	6,634	4,845	6,412
1309	Pasaman	1,33	0,74	0,24	3,775	2,137	0,710
1310	Solok Selatan	1,86	1,80	1,53	3,214	3,204	2,770
1311	Dharmasraya	1,94	0,16	1,47	4,892	0,429	3,980
1312	Pasaman Barat	0,86	1,32	0,76	3,847	6,159	3,588
1371	Kota Padang	0,93	0,45	0,64	8,964	4,383	6,338
1372	Kota Solok	0,40	0,26	0,89	0,287	0,194	0,672
1373	Kota Sawah Lunto	0,00	0,39	0,82	0,000	0,250	0,525
1374	Kota Padang Panjang	0,88	1,03	0,00	0,479	0,572	0,000
1375	Kota Bukittinggi	1,07	1,52	1,21	1,418	2,065	1,675
1376	Kota Payakumbuh	1,55	0,77	0,10	2,124	1,078	0,148
1377	Kota Pariaman	0,77	0,34	0,31	0,685	0,305	0,282

Sumber : https://p3ke.kemenkopmk.go.id/

Berdasarakan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase dan jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat selama 3 tahun terakhir (2020-2022) terdapat 15 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan, dan 4 Kab/Kota yang mengalami kenaikan. Persentase dan jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2022 terus mengalami kenaikan yaitu 0 % pada tahun 2020, naik menjadi 0,39% (0,250 ribu jiwa) pada tahun 2021, dan mengalami kenaikan kembali menjadi 0,82% (0,525 ribu jiwa) tahun 2022. Oleh karena itu diperlukan upaya dan kerja sama serta peran seluruh stakeholder untuk penghapusan kemiskinan ekstrem ini, selain itu juga perlu memaksimalkan peran Baznas untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Sawahlunto.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem, maka data yang dipergunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat Data P3KE. Data P3KE Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan Miskin (Desil 1-4) Menurut Kecamatan Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Kecamatan	Keluarga					Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah
1	Lembah Segar	84	193	373	378	1.028	477	923	1.538	1.441	4.379
2	Barangin	120	294	516	589	1.519	696	1.454	2.306	2.279	6.735

No	Kecamatan	Keluarga					Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah
3	Silungkang	61	205	337	337	940	349	974	1.422	1.301	4.046
4	Talawi	32	155	364	525	1.076	189	805	1.643	2.140	4.777
	Total	**297**	**847**	**1.590**	**1.829**	**4.563**	**1.711**	**4.156**	**6.909**	**7.161**	**19.937**

Sumber Data : P3KE Kemenko PMK Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin keluarga dan individu (desil 1-4) yang paling banyak terdapat di Kecamatan Barangin dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Silungkang. Hal ini disebabkan oleh Kecamatan Barangin mempunyai jumlah penduduk paling banyak dan Kecamatan Silungkang mempunyai jumlah penduduk yang paling sedikit di Kota Sawahlunto.

7. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut. Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan wilayah tersebut dari aspek ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai angka pertisipasi angkatan kerja. Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dengan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Berikut disajikan angka partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

Indikator	2018			2019			2020			2021			2022		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Jumlah Angkatan Kerja 15 tahun ke atas (Jiwa)	18.084	14.087	32.171	18.062	13.187	31.249	18.948	14.071	33.019	18.951	13.292	32.243	19.353	14.620	33.973
Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas (Jiwa)	21.995	22.461	44.456	22.297	22.756	45.053	24.295	24.409	48.704	25.204	25.287	50.491	25.068	25.083	50.151
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	82,22	62,72	72,37	81,01	57,95	69,36	77,99	57,65	67,80	75,19	52,56	63,86	77,20	58,29	67,74

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2023, Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama rentang tahun 2018-2021 angka partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto menunjukkan penurunan dengan angka partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih bersar dari angka partisipasi angkatan kerja perempuan. Pada tahun 2018 angka partisipasi angkatan kerja di Kota Sawahlunto adalah sebesar 72,37%, mengalami penurunan menjadi 69,36% pada tahun 2019, dan mengalami penurunan kembali menjadi 67,80% pada tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi 63,86%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 67,74%. Peningkatan angka partisipasi angkatan kerja ini disebabkan oleh penduduk usia

15 tahun keatas banyak yang bekerja, ditambah dengan lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja semakin meningkat.

8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selain angka partisipasi angkatan kerja, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi juga dapat dihitung dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). Berikut disajikan tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

Indikator	2018			2019			2020			2021			2022		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	18.084	14.087	32.171	18.062	13.187	31.249	18.948	14.071	33.019	18.951	13.292	32.243	19.353	14.620	33.973
Jumlah Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	21.796	22.501	44.297	22.349	22.808	45.157	23.138	23.648	46.786	23.450	23.930	47.380	23.748	24.205	47.953
TPAK (%)	82,97	62,61	72,63	80,82	57,82	69,20	81,89	59,50	70,57	80,81	55,55	68,05	81,49	60,40	70,85

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2023, Data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama rentang tahun 2018-2022, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto berfluktuatif dengan TPAK laki-laki lebih besar dari TPAK perempuan. Pada tahun 2018 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Sawahlunto adalah sebesar 72,63%, pada tahun 2019 menurun menjadi 69,20%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 70,57%, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 68,05%, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 70,85%. Dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambah proporsi penduduk usia kerja yang sedang bekerja. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang ada. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	2018			2019			2020			2021			2022		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)	1.152	699	1.742	1.124	1.008	2.132	1.538	1.171	2.709	1.362	695	2.057	1.073	625	1.698
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	18.084	14.087	30.320	18.062	13.187	31.249	18.948	14.071	33.019	18.951	13.292	32.243	19.353	14.620	33.973
3	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	**6,37**	**4,96**	**5,75**	**6,22**	**7,64**	**6,82**	**8,12**	**8,32**	**8,20**	**7,19**	**5,23**	**6,38**	**5,54**	**4,27**	**5,00**

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2023, Data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir berfluktuatif dengan TPT Perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT Laki-laki, pada tahun 2018 yaitu sebanyak 5,75%, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 6,82%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 8,20%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 6,38%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 5%. Hal ini disebabkan oleh mulai bangkit/membaiknya perekonomian dan aktivitas ekonomi setelah PPKM dilonggarkan dan mulai membaiknya kondisi ketenagakerjaan setelah melandainya pandemi Covid-19.

Dibandingkan 19 Kabupaten/Kota lain pada tahun 2022, TPT Kota Sawahlunto berada pada posisi ke 11 di Provinsi Sumatera Barat. Berikut disajikan data perbandingan antara TPT Kota Sawahlunto, TPT Provinsi Sumatera Barat dan TPT Nasional selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.27
Perbandingan TPT Kota Sawahlunto, TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	TPT Kota Sawahlunto	5,75	6,82	8,20	6,38	5
2	TPT Provinsi Sumatera Barat	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28
3	TPT Nasional	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023
BPS Indonesia, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa TPT Kota Sawahlunto, TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama tahun 2018-2022 berfluktuatif. Pada tahun 2018-2020 TPT Kota Sawahlunto berada diatas TPT Provinsi Sumatera Barat dan nasional, sedangkan pada tahun 2021-2022 TPT Kota Sawahlunto berada dibawah TPT Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upayanya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka

10. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap penciptaan nilai tambah melalui proses produksi barang dan/jasa, menggambarkan *output* yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, menandakan bahwa tenaga kerja semakin produktif. Produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dengan Tenaga Kerja/Angkatan Kerja yang bekerja. Berikut disajikan produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.28
Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB ADHK (juta rupiah)	2.655.619,77	2.796.536,45	2.760.924,18	2.829.590,03	2.942.206,85
2	Tenaga Kerja (orang)	30.320	29.117	30.310	30.186	32.275
3	*Produktivitas Tenaga Kerja (per tenaga kerja/tahun)*	*87,586*	*96,045*	*91,090*	*93,738*	*91,161*

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2023, Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018 adalah sebesar 87,586 juta per tenaga kerja per tahun dan meningkat menjadi 96,045 juta per tenaga kerja tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 91,090 juta per tenaga kerja, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 93,738 juta per tenaga kerja, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 91,161 juta per tenaga kerja.

11. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di suatu wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Perumbuhan rata-rata per tahun (%)
1	**Penduduk yang bekerja :**	**30.320**	**29.117**	**30.310**	**30.186**	**32.275**	**0,07**
	- Laki-laki	16.932	16.938	17.410	17.589	18.280	0,96
	- Perempuan	13.388	12.179	12.900	12.597	13.995	1,36
2	**Angkatan Kerja :**	**32.171**	**31.249**	**33.019**	**32.243**	**33.973**	**0,11**
	- Laki-laki	18.084	18.062	18.948	18.951	19.353	1,20
	- Perempuan	14.087	13.187	14.071	13.292	14.620	1,31
3	***Rasio penduduk yang bekerja :***	***94.24***	***93,18***	***91,80***	***93,62***	***95,00***	***0,16***
	- Laki-laki	*93,63*	*93,78*	*91,88*	*92,81*	*94,46*	*0,21*
	- Perempuan	*95,04*	*92,36*	*91,68*	*94,77*	*95,73*	*0,05*

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2023, Data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja, jumlah angkatan kerja, maupun rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto menunjukkan tren fluktuasi dengan rasio perempuan lebih besar dari rasio laki-laki. Pada tahun 2018 rasio penduduk yang bekerja sebesar 94,24 turun menjadi 93,18 pada tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 91,80, sedangkan pada tahun 2021 rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan menjadi 93,62 dan tahun 2022 mengalami kenaikan Kembali menjadi 95. Hal tersebut berarti 95 % dari total angkatan kerja di Kota Sawahlunto telah memperoleh kesempatan untuk bekerja, sementara untuk 5% yang

lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur. Kemudian dilihat dari tren perkembangannya diketahui bahwa rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto cenderung berfluktuasi, dengan pertumbuhan rata-ratanya 0,16 per tahun.

12. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja adalah persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja terhadap angkatan kerja yang digunakan untuk mengukur besarnya angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi tingkat kesempatan kerja maka kesempatan kerja juga akan semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.30
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (Orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (Orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2018	30.320	44.297	68,45
2	2019	29.117	45.157	64,48
3	2020	30.310	46.786	64,78
4	2021	30.186	47.380	63,71
5	2022	32.275	47.953	67,31

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2023, Data Diolah

Dilihat dari tabel diatas perkembangan rasio kesempatan kerja di Kota Sawahlunto selama empat tahun terakhir (2018-2021) menunjukkan tren yang menurun, hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keuangan perusahaan sehingga terjadi pengurangan pekerja dalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan pada perusahaan yang ada menjadi kecil. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh mulai bangkit/ membaiknya perekonomian dan aktivitas ekonomi setelah PPKM dilonggarkan dan mulai membaiknya kondisi ketenagakerjaan setelah melandainya pandemi Covid 19.

13. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan adalah mengukur seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam memenuhi belanja daerah.

Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perkembangannya selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.31
Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi					Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
		2018	2019	2020	2021	2022	
I	**PENDAPATAN DAERAH**	**586.463.778.018,45**	**638.026.463.488,09**	**576.857.864.031,56**	**598.040.864.187,45**	**619.181.974.790,86**	**1,60**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**47.227.132.335,45**	**57.170.993.865,09**	**59.537.385.897,66**	**51.475.336.271,45**	**65.779.505.807,86**	**9,86**
	Pendapatan Pajak Daerah	5.546.092.124	5.502.589.718	5.602.920.091,75	5.993.540.247	7.434.834.333	
	Pendapatan Retribusi Daerah	3.533.959.570	3.625.062.865	2.788.116.593	2.731.559.922	3.550.241.052	

No	Uraian	Realisasi					Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.983.800.455	10.832.616.199	12.026.462.819	10.806.423.680	13.477.268.009	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.163.280.186,45	37.210.725.083,09	39.119.886.393,91	31.943.812.422,45	41.317.162.413,86	
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**532.012.325.683**	**521.592.899.623**	**468.737.786.340**	**538.147.448.116**	**550.785.091.283**	**1,27**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	458.504.259.105	495.141.841.033	445.561.937.322	509.421.068.591	516.526.120.023	
	Dana Perimbangan	-	-	-	442.021.996.681	491.383.273.023	
	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	-	28.949.393.592	35.571.241.367	
	Dana Bagi Hasil Pajak	9.193.493.607	7.929.496.961	8.109.612.714	-	4.196.019.461	
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	9.950.258.859	17.783.593.665	6.705.943.539	-	21.259.996.181	
	Dana Alokasi Umum (DAU)	374.920.211.899	390.050.861.000	347.498.276.000	341.393.550.000	340.799.183.261	
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	64.440.294.740	79.377.889.407	83.248.105.069	71.679.053.089	115.012.848.395	
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	37.290.036.000	5.044.116.000	
	Dana Desa	-	-	-	30.109.035.910	20.098.731.000	
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	50.969.694.000	-	-	-	-	
	- Dana Penyesuaian	50.969.694.000	-	-	-	-	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.538.372.578	26.451.058.590	23.175.849.018	28.726.379.525	34.258.971.260	
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.538.372.578	26.451.058.590	23.175.849.018	28.726.379.525	34.258.971.260	
	- Pendapata	-	-	-	-	-	

No	Uraian	Realisasi					Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	n Bagi Hasil Lainnya						
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.224.320.000**	**59.262.570.000**	**48.582.691.793,90**	**8.418.079.800**	**2.617.377.700**	**137,68**
	Pendapatan Hibah	7.224.320.000	8.858.200.000	8.148.061.693	-	-	
	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	7.553.170.000	-	
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	11.503.247.000	-	-	
	Pendapatan Lainnya	0	50.404.370.000	28.931.383.100,90	-	-	
	Dana Alokasi Desa	-	-	-	-	-	
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	864.909.800	2.617.377.700	
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	***8,05***	***8,96***	***10,32***	***8,61***	***10,62***	***12,31***
	Persentase Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah (%)	***90,72***	***81,75***	***81,26***	***89,99***	***88,95***	***24,69***

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Sawahlunto selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,60%. Selama tahun 2018 s.d 2022 rata-rata persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah sebesar 5,50% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,31%. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata persentase Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 68,92%, ini menyatakan bahwa ketergantungan Kota Sawahlunto terhadap pendapatan transfer sangat tinggi. Pemerintah Kota Sawahlunto belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat berupa dana transfer/dana perimbangan. Untuk itu perlu peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada di Kota Sawahlunto dengan cara menggali, mengembangkan

dan mengolah potensi sumber daya yang tersedia agar menjadi kota mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

14. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan penilaian profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut diatas. Berikut disajikan Opini BPK terhadap penilaian Laporan Keuangan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.32
Opini BPK Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama rentang tahun 2018-2022, Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan. Atas prestasi tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh reward dari pemerintah pusat berupa penambahan anggaran.

15. Pola Pangan Harapan

Pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilihat dari kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Untuk Kota Sawahlunto pola pangan harapan berdasarkan hasil survei seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.33
Pola Pangan Harapan Hasil Survei
Tahun 2018 - 2022

No	Kelompok Pangan	Survei Analisis Konsumsi Pangan Tahun skor PPH				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Padi-padian	22,7	20,2	20,4	22,5	23,7
2.	Umbi-umbian	1,7	0,8	0,9	0,8	1,5
3.	Pangan hewani	24	21,5	22,7	22,5	23,6
4.	Minyak dan Lemak	5	5,0	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,9	1,0	1,0	0,9	0,8
6.	Kacang-kacangan	9,9	7,5	6,1	6,8	5,1
7.	Gula	0,6	0,9	0,8	0,5	0,6
8.	Sayur dan Buah	22,6	29,5	26,7	25,4	24,9
9.	Lain-lain	0,0	0,0	0	0	0,0
	Total	**87,3**	**86,5**	**83,7**	**84,5**	**85,1**

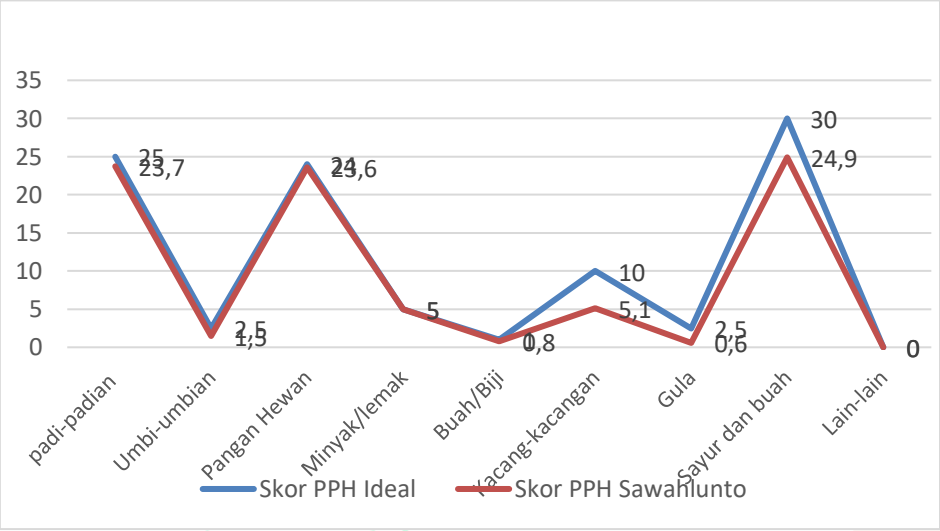
Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2022

Dilihat dari tabel diatas berdasarkan hasil survey, proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi sangat berpengaruh terhadap skor PPH suatu daerah, sehingga untuk mencapai skor PPH yang ideal, masyarakat harus dapat melakukan diversifikasi konsumsi pangan, caranya dengan meningkatkan

konsumsi pangan khususnya umbi-umbian sumber protein, kacang-kacangan, sayur dan biji melalui penerapan pola konsumsi pangan yang beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Selain itu juga telah dilakukan pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk pengembangan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat non beras dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman. Untuk meningkatkan kesadaran dalam penerapan konsumsi pangan yang beragam dan seimbang berbasis pangan lokal secara rutin telah diselenggarakan lomba cipta menu berbasis bahan pangan lokal. Lomba cipta menu kedepannya lebih diarahkan pada olahan pangan lokal bernilai komersil sehingga produksinya dapat lebih dikembangkan. Melalui berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat merubah mindset masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang lebih beragam bergizi seimbang sesuai kebutuhan pangan dan aman.

Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (gram/kap/hari dan kg/kap/hari), konsumsi energi penduduk (kkal/kap/hari) dan konsumsi protein penduduk (gram/kap/hari). Adapun perbandingan untuk penilaian terhadap konsumsi pangan secara kuantitas Kota Sawahlunto dengan skor idealnya adalah sebagai berikut :

Grafik 2.11
Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2022

Dilihat dari grafik diatas untuk kelompok pangan rata-rata berada dibawah kondisi ideal, kecuali pada kelompok pangan minyak/lemak yang mempunyai skor sama dengan idealnya. Ini berarti yang menjadi permasalahan pada konsumsi pangan di Kota Sawahlunto adalah kelompok-kelompok pangan yang jauh dari skor idealnya, sehingga sangat perlu usaha-usaha melalui program/kegiatan dalam meningkatkan konsumsi masing-masing kelompok pangan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan tersebut adalah :

1. Besar anggota keluarga, semua program masyarakat perlu menekan pentingnya keluarga berencana dalam pembatasan penduduk, sehingga dapat menekan cukup pangan guna menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan kesehatan keluarga. Bila Keluarga Berencana terwujud maka ketersedian konsumsi pangan akan terpenuhi sehingga status gizi akan lebih baik sehinggadapat ditunjukkan untuk meningkatkan skor PPH.
2. Pengetahuan Gizi
3. Tingkat Pendidikan

4. Pengeluaran pangan rumah tangga
5. Pantangan makan

16. Penguatan Cadangan Pangan

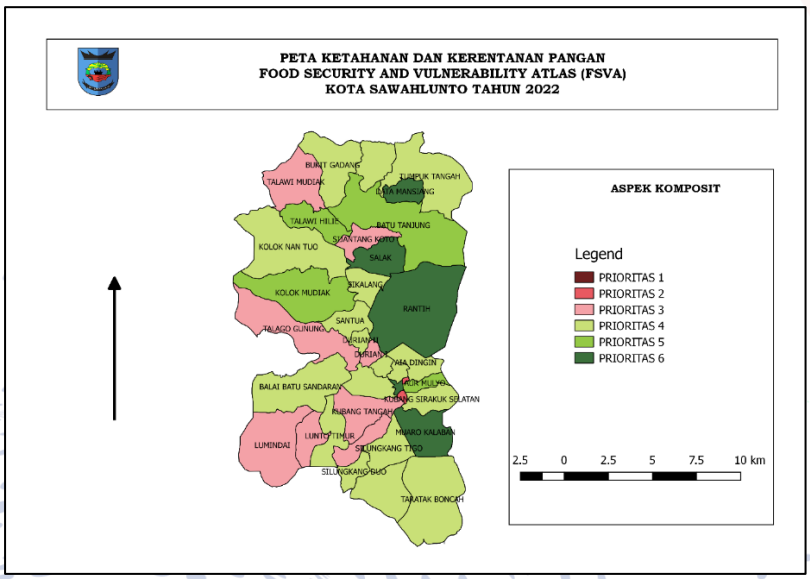
Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan pemerintah menetapkan cadangan pangan Nasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan cadangan pangan Nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Keberadaan cadangan pangan pangan pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, perhitungan cadangan pangan pemerintah daerah pemerintah daerah menggunakan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita per tahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Untuk Kota Sawahlunto pengadaan cadangan pangan dalam bentuk penguatan cadangan pangan pada tahun 2022 sudah dilaksanakan oleh Pemerintah kota Sawahlunto yaitu berupa beras sebanyak 2 Ton, Seharusnya Kota Sawahlunto harus menyediakan Cadangan Pangan sebesar 26,48 ton setiap tahun dilihat dari kriteria dan kondisi Kota Sawahlunto dan baru dapat direalisasikan sebesar 2 Ton dan dalam penggunaan cadangan pangan ini harus diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahunto Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 29 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, hal itu disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga pada tahun 2022 hanya bisa menyediakan sebanyak 2 ton, disamping itu Sawahlunto juga memiliki sawah seluas 1.571 Ha dengan hasil produksi padi 17.733,35 ton.

17. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dalam penanganan dan pencegahan daerah rawan pangan perlu adanya sinergisitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Di Kota Sawahlunto daerah rawan pangan dapat diklasifikasikan berdasarkan peta di bawah ini:

Gambar 2.8
Peta Daerah Rawan Pangan Kota Sawahlunto



Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2022

Berdasarkan peta diatas dapat dilihat bahwa di kota Sawahlunto tidak ada daerah yang sangat rawan pangan (prioritas 1). Namun berdasarkan prioritas penanganannya daerah-daerah rawan pangan adalah sebagai berikut :

1. Desa- Desa prioritas 2, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara dan Kelurahan Tanah Lapang ;
2. Desa- Desa prioritas 3, Desa Lunto Barat, Desa Pasar Kubang,Desa Kubang Tangah, Desa Lumindai, Desa Talago Gunuang, Desa Sijantang Koto, Desa Talawi Mudik dan Kelurahan Durian I.
3. Desa Kelurahan yang termasuk prioritas 4, Desa Silungkang Oso, Desa Taratak Bancah, Desa Silungkang Tigo, DesaSilungkang Duo, Desa Lunto Timur, Desa Kubang Utara Sikabu, Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan, KelurahanAirDingin dan Desa Balai Batu Sandaran.
4. Desa Kelurahan yang termasuk prioritas 5, Kelurahan Aur Mulyo, Desa Kolok Mudik, Desa Talawi Hilie, Desa Batu Tanjung .
5. Desa Kelurahan yang termasuk prioritas 6, Kelurahan Pasar, Desa Muaro Kalaban, Desa Rantih, Desa Salak, dan Desa Datar Mansiang.

18. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Urusan pertanian meliputi Tanaman pangan, Tanaman hortikultura, Tanaman perkebunan, Peternakan dan Jasa pertanian. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu wilayah terhadap sektor pertanian dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. PDRB sektor pertanian ini menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah untuk lapangan usaha pertanian. Adapun perkembangan PDRB sektor pertanian dan kontribusinya terhadap PDRB Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.34
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB
Tahun 2018-2022

KONTRIBUSI	2018	2019	2020	2021	2022
Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	312.007,01	325.395,01	326.254,20	345.211,69	383.196,89
Total PDRB (juta rupiah)	3.404.518,84	3.679,76	3.656.590,97	3.850.697,74	4.389.916,49
Kontribusi (%)	**9,16**	**8,84**	**8,92**	**8,96**	**8,73**

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Dilihat dari tabel diatas Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cendrung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Pandemi Covid 19 pada tahun 2020 tidak begitu berpengaruh pada sektor pertanian terlihat dari kontribusi yang mengalami sedikit peningkatan sebesar 8,92 Tahun 2020 dan 8,96 Tahun 2021, dan pada tahun 2022 ini sedikit mengalami penurunan menjadi 8,73 ini berarti tetap terjadi penambahan nilai di sektor pertanian walaupun pengaruh terhadap PDRB kota menurun, dimana sektor pertanian menjadi urutan ke-5 dalam kontribusi terhadap PDRB kota. Meskipun kontribusi sektor pertanian menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang sudah mulai membaik pada saat pasca pandemi covid sekarang ini.

19. Produksi Sektor Pertanian

Untuk Produksi Sektor Pertanian ini diwakilkan pada perkembangan tanaman padi yang merupakan bahan pangan utama di Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.35
Produktivitas Padi Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi tanaman padi GKG (Ton)	16.108	17.926	17.874,45	16.691,71	17.733,35
Luas panen (ha)	3.433,46	3.476	3.461,84	3.002,50	2.979,85
Produktifitas (ton/ha)	4,69	5,16	5,16	5,56	5,95

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2022

Dilihat dari tabel di atas perkembangan produksi dan produktifitas tanaman padi di Kota Sawahlunto pada tahun 2018-2019 rata-rata mengalami peningkatan, namun tahun 2020-2021 sedikit terjadi penurunan dikarenakan menurunnya luas panen, namun tidak mempengaruhi produktifitasnya dan Pada Tahun 2022. Produksi Tanaman Padi Juga Mengalami Peningkatan dibandingkan Tahun 2021. Selain luas panen, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman padi adalah kuantitas dan kualitas benih, pemeliharaan (pupuk, pengendalian hama, dan lainnya), alsintan, sarana dan prasarana produksi. Adapun perkembangan luas sawah menurut jenis pengairan dari tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36
Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan
Tahun 2018-2022

No	Jenis Pengairan	tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Irigasi sederhana (ha)	762	762	738,5	693	693
2.	Sawah Tadah Hujan (ha)	918	918	941,5	878	878

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2022

Dari tabel diatas Tahun 2022 tidak mengalami penambahan atau penurunan terhadap sawah tadah hujan dan ini juga terjadi terhadap jumlah sawah yang beririgasi sederhana, ini disebabkan karena tahun 2021 dimulai penghitungan secara detail mengenai luas sawah yang ada di Kota Sawahlunto dalam dokumen LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sehingga didapat data untuk tahun 2022 seperti diatas, selain itu juga *recofusing* anggaran untuk covid ini menyebabkan pengurangan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi sederhana di Kota Sawahlunto.

Untuk itu diharapkan tahun ke depannya kegiatan-kegiatan yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan dari kegiatan lainnya, apalagi masa pandemi ini yang bisa berakibat terhadap kehidupan masyarakat terutama petani.

20. Produksi Sektor Perkebunan

Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan. Tanaman perkebunan yang dominan di Kota Sawahlunto adalah tanaman karet dan kakao. Perkebunan karet dan kakao menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kota Sawahlunto terutama pada daerah yang tidak mempunyai lahan persawahan yang tersebar di 4 Kecamatan di Kota Sawahlunto.

a. Perkebunan karet

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Untuk itu Perkembangan perkebunan karet di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.37
Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas areal tanam (ha)	2.451.86	2.446,23	2.420,23	2.389,23	2.393,03
Produksi (ton)	1.262,63	1.540,16	2.012,87	2.223,87	2.230,91
Produktivitas (ton/ha)	0,51	0,63	0,83	0,93	0,93

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka 2023 (data olahan)

Dapat dilihat perkembangan perkebunan karet dari Tahun 2018-2022 relatif mengalami peningkatan baik produksi maupun produktifitas. Secara keseluruhan luas areal tanam mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan yang mana berbanding terbalik dengan jumlah produksi setiap tahunnya. Dari luas areal tanam karet yang ada, perlu revitalisasi terhadap tanaman karet dalam menambah luas area tanam untuk karet. Tahun 2022 belum menghasilkan, sehingga perlu perhatian lebih dimulai dari pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit. Pada pemeliharaan ini sangat diperlukan perhatian dari penyuluh pertanian dalam membimbing petani dalam rangka meningkatkan produksi tanaman karet. Selain itu secara teknis yang mempengaruhi produktivitas karet adalah mutu bahan tanam (benih), pemeliharaan tanaman, proses panen , Pemeliharaan tanaman seperti Sanitasi Lahan dan Pemupukan Tanaman sesuai Anjuran Budidaya Tanaman Karet.

b. Perkebunan Kakao

Selain tanaman karet, tanaman kakao juga merupakan salah satu tanaman perkebunan yang utama di Kota Sawahlunto. Perkebunan kakao yang ada masih perkebunan rakyat, adapun perkembangan perkebunan kakao dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas areal tanam (ha)	597,52	596,22	550,46	523,15	540,31
Produksi (ton)	542,01	565,73	566,11	572,44	588,80
Produktivitas (ton/ha)	**1,02**	**1,08**	**1,14**	**1,09**	**1,08**

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2023 (data olahan)

Dilihat dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan tanaman kakao dari Tahun 2018-2022, dari luas areal tanam untuk perkebunan kakao di Kota Sawahlunto cenderung mengalami penurunan, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan namun untuk produksi mengalami kenaikan produktifitas tanaman kakao pada tahun 2022 ini mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2022 petani tidak menerima bantuan pupuk seperti tahun 2021 dikarenakan anggaran tidak mencukupi. Revitalisasi dan optimalisasi terhadap tanaman kakao sangat dibutuhkan dalam pemupukan. Pemupukan dilaksanakan di empat kecamatan dalam mendukung produksi tanaman kakao. Untuk memberi kemudahan dalam meningkatkan produksi melalui Gerakan masal Pemangkasan dan Pemupukan Tanaman Kakao. Upaya peningkatan produksi dan produktifitas masih perlu dilakukan, karena idealnya produktivitas kakao antara 1,5 sampai dengan 2 ton per hektar, meskipun secara target sudah melebihi target yang ditetapkan. Ini berarti produktivitas kakao Sawahlunto masih jauh dari standar untuk itu sangat perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kakao ini.

21. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap, aktivitas perekonomian di Kota Sawahlunto. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal dan mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB sektor perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB di Kota Sawahlunto sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Kontribusi Sektor Perdagangan, Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2018-2022

KONTRIBUSI	2018	2019	2020	2021	2022
Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	510.433,17	553.593,38	547.822,20	564.865,95	655.119,93
Total PDRB (juta rupiah)	3.404.518,84	3.679,76	3.656.590,97	3.850.697,74	4.389.916,49
Kontribusi (%)	14,99	15,05	14,98	14,67	14,92

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2023 (data olahan)

Pandemi covid yang terjadi selama tahun 2021 berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi khususnya sektor perdagangan, karena PDRB sektor perdagangan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha perdagangan dalam suatu wilayah. Pengaruh pandemi ini terlihat pada penurunan nilai PDRB secara umum dan nilai PDRB sektor perdagangan khususnya. Dari Tahun 2018-2022 kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB kota Sawahlunto. Untuk tahun 2022 kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 14,92 % dengan nilai rupiahnya Rp. 655.119,93 juta rupiah dan ini mengalami kenaikan dari tahun 2021. Penyebab dari naiknya daya beli masyarakat ini karena masyarakat sudah bebas keluar rumah sehingga mempengaruhi jual beli di paar-pasar yang ada, selain itu pada masa pasca pandemi covid ini, pengaruh pasar online juga menjadi salah satu alternatif yang sangat disukai konsumen dalam transaksi jual beli.

22. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan di Kota Sawahlunto merupakan salah satu sektor yang sangat dipertimbangkan dalam kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota. Besarnya nilai kontribusi sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor industri, tingkat inflasi, serta standar kualitas produk industri sehingga memiliki daya saing. Pembangunan industri ini diarahkan untuk mencapai struktur ekonomi yang lebih kuat dan seimbang, adapun perkembangan kontribusi sektor industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.40
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2018-2022

KONTRIBUSI	2018	2019	2020	2021	2022
Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	415.867,46	392.312,53	395.495,23	432.174,39	474.214,96
Total PDRB (juta rupiah)	3.404.518,84	3.679,76	3.656.590,97	3.850.697,74	4.389.916,49
Kontribusi (%)	12,12	10,66	10,82	11,22	10,80

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2023 (data olahan)

Dari tabel diatas terlihat perkembangan kontribusi atas dasar harga berlaku dari sektor industri pengolahan dari tahun 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan seiring dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi dan Nasional. Tahun 2020 sampai tahun 2022 kontribusi atas dasar harga berlaku dari sektor industri pengolahan mulai mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan, namun pada masa pasca

pandemi ini merupakan suatu prestasi untuk industri pengolahan mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2021 sebesar 11,22 persen dengan nilai rupiah Rp. 432.174,39 juta rupiah dan pada tahun 2022 ini mengalami sedikit penurunan menjadi 10,80% dengan nilai rupiahnya RP. 474.214,96 juta rupiah. Perkembangan industri dilihat dari PDRB sektor industri dari tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak mengalami peningkatan yang signifikan hanya rata-rata meningkat secara konstan, dan pada tahun 2021 ada mengalami kenaikan dari tahun 2020, dan pada tahun 2022 ini mengalami sedikit penurunan karena itu sangat perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam mendorong industri pengolahan untuk meningkatkan produksinya. Dengan meningkatkan pembinaan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga Kota Sawahlunto, karena industri kecil dan industri rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan. Meningkatkan peranan industri kecil dan industri rumah tangga dalam rangka keseimbangan dan pemerataan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan industri serta memperluas lapangan kerja. Seperti melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga.

23. Pertumbuhan Industri

Kontribusi sektor perindustrian pada PDRB Kota Sawahlunto salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan industri yang ada di Kota Sawahlunto, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.41
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah unit Usaha	1.254	1.432	1.584	1.703	1.779
2	Nilai produksi	50.480385.000	53.423.210.000	32.215.322.519	35.173.529.700	50.286.890.700
3	Bahan Baku	21.595.549.000	23.466.143.000	14.180.596.950	15.511.583.950	22.817.019.070

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dari tabel pertumbuhan industri diatas maka dapat di simpulkan yaitu Pada jumlah unit Usaha terjadi peningkatan setiap tahunnya, dan untuk jumlah Tenaga Kerja dari Tahun 2018 sampai Tahun 2021 juga mengalami peningkatan, untuk nilai produksi pada tahun 2020 mengalami Penurunan yang mana pada tahun 2019 Nilai Produksi Sebesar 53.423.210.000 sedangkan pada tahun 2020 menjadi 32.215.322.519 yang mana hal ini terjadi karena efek dari Pandemi covid-19 yang dampak terhadap pertumbuhan industri Kota Sawahlunto, sedangkan untuk tahun 2021 Nilai Produksi sedikit lebih meningkat dari tahun 2020, dan pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar RP. 50.286.890.700. Untuk Bahan Baku juga mengalami Penurunan Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 sebesar 23.466.143.000 dan 2020 sebesar 14.180.596.950 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2019. Dan pada tahun 2021 dan 2022 Bahan Baku mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2020. Meningkatnya nilai produksi dan bahan baku pada tahun 2022 ini sangat didukung dengan peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja, ini menandakan bahwa menurunnya permintaan terhadap produk yang sangat berpengaruh terhadap nilai produksi dan bahan baku yang digunakan. Pengaruh pasca covid 19 tidak menganggu pedapatan dan usaha-usaha yang ada di Kota Sawahlunto. Untuk itu sangat perlu kebijakan daerah dalam membangkitkan kembali usaha industri setelah masa pandemi ini. Pembinaan-pembinaan yang intens pada usaha industri salah satu pembangkit semangat pengusaha dalam meningkatkan usahanya.

24. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat dari lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, adapun perkembangan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.42
Kontribusi Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Tahun 2018-2022

KONTRIBUSI	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (juta rupiah)	73. 951,36	82.406,43	75.255,42	84.016,91	97.528,6
Total PDRB (juta rupiah)	3.404.518,84	3.679,76	3.656.590,97	3.850.697,74	4.389.916,49
Kontribusi (%)	2,17	2,24	2,06	2,18	2,22

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2023 (data olahan)

25. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata selama ini ditinjau dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sedangkan pendapatan ditinjau dari pajak hiburan pada tahun 2021 tidak ada tetapi ada penambahan pendapatan ditinjau dari Retribusi Tempat Khusus Parkir, sehingga Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43
Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021

No	NAMA PENDAPATAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pajak Hotel	164.733.362	94.965.756	47.335.931	168.914.129	266.384.955
2	Pajak Restoran	638.615.093	532.945.719	477.464.758	617.303.460	993.108.403
3	Pajak Hiburan	394.309.900	109.485.500	1.650.000		847.974.000
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	411.150.000	682.737.000	516.801.000	436.895.000	
5	PT.WWS	0	0	0		
6	Bagian Laba Hotel Parai	0	0	0		
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0	0	0	1.500.000	3.600.000
	PAD Sektor Pariwisata	1.608.808.355	1.420.133.975	1.043.251.689	814.886.146	2.172.237.359
	Total PAD	62.406.850.149,37	57.171.093.865,09	59.537.385.897,66	51.470.645.905,45	65.778.630.408,26

No	NAMA PENDAPATAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Persentase PAD Sektor Pariwisata	2,578	2,484	1,752	1,583	3,302

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, 2021

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 2.44
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
IPM Kota Sawahlunto	71.72	72.39	72.64	72.88	73.73	
Pertumbuhan		0.93	0.35	0.33	1.17	0.69

sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2023

Pertumbuhan IPM pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 pertumbuhan 0,93 % dan pada tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan IPM menurun menjadi 0,35 %dan 0,33 %. Hal ini disebabkan karena Pandemi COVID 19 sehingga menurunkan pertumbuhan IPM Kota Sawahlunto. Akan tetapi naik kembali menjadi 1,17 % karena telah pulih kembali pada tahun 2022. Secara rata rata pertumbuhan IPM Kota Sawahlunto sebesar 0,69 persen. Dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota lain IPM Kota Sawahlunto berada pada posisi ke-7 di Sumatera Barat.

Tabel 2.45
Perbandingan IPM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2018 – 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
IPM Kota Sawahlunto	71.72	72.39	72.64	72.88	73.73	0.69
IPM Provinsi Sumatera Barat	71.73	72.39	72.38	72.65	73.26	0.53
IPM Nasional	71.39	71.92	71.94	72.29	72.91	0.53

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2019 IPM Kota Sawahlunto sudah dapat menyamai nilai IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 72,39 dan pada tahun 2020 sudah dapat melebihi IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 72,64. Pada tahun 2022 Nilai IPM Kota Sawahlunto lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional yaitu 73,73%. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Sawahlunto ini masuk **kategori tinggi** (70 ≤ IPM < 80).. Hal ini tentunya

merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia masyarakatnya.

2. Angka Rata Rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah Selama periode 2018 hingga 2022, Rata-rata Lama Sekolah meningkat rata-rata 1,21 tahun per tahun.

Tabel 2.46
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (Tahun)

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
RLS Kota Sawahlunto	9.94	9.97	10.17	10.32	10.43	1.21
RLS Provinsi Sumatera Barat	8.76	8.92	8.99	9.07	9.18	1.18
RLS Nasional	8.17	8.34	8.48	8.54	8.69	1.56

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Angka Rata Rata Lama Sekolah 9,94 Tahun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 10,43 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan warga Kota Sawahlunto adalah telah sampai duduk di bangku kelas II SLTA, artinya wajib belajar 9 tahun telah tuntas di Kota Sawahlunto. Dalam perkembangannya Kota Sawahlunto menduduki peringkat ke 7 dari Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.47
Peringkat Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	ARLS (Tahun)	Peringkat
Kab. Kepulauan Mentawai	7,48	19
Kab. Pesisir Selatan	8,43	13
Kab. Solok	7.89	18
Kab. Sijunjung	8,30	14
Kab. Tanah Datar	8,90	9
Kab. Padang Pariaman	8.16	15
Kab. Agam	8,98	8
Kab. Lima Puluh Kota	8,08	17
Kab. Pasaman	8,11	16
Kab. Solok Selatan	8,32	11
Kab. Dharmasraya	8,56	10
Kab. Pasaman Barat	8,55	12
Kota Padang	11,60	3
Kota Solok	11,35	4
Kota Sawahlunto	10,43	7
Kota Padang Panjang	11,92	1
Kota Bukittinggi	11,63	2

Kabupaten/Kota	ARLS (Tahun)	Peringkat
Kota Payakumbuh	10,82	5
Kota Pariaman	10,78	6

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2023

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi ARLS ini, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan siswa, mutu tenaga pendidik, nilai ujian, sarana prasarana sekolah dan sebagainya.

3. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan salah satu indikator penghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHLS ini merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. AHLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas.

Selama periode 2018 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,51 % per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Kota Sawahlunto telah mencapai 13,42 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,17 tahun. Ini berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2022, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,42 tahun atau minimal menamatkan pendidikan mereka hingga lulus jenjang Diploma. Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 lebih rendah dari Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat, namun lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Nasional.

Tabel 2.48
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (Tahun)

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
HLS Kota Sawahlunto	13.15	13.16	13.17	13.18	13.42	0.51
HLS Provinsi Sumatera Barat	13.95	14.01	14.02	14.09	14.1	0.27
HLS Nasional	12.91	12.95	12.98	13.08	13.1	0.37

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka dan Statistik Nasional, 2023

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2022 AHLS Kota Sawahlunto sudah mencapai pada angka 13,42 Angka ini merupakan peringkat ke 11 dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto Sebagaimana yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49
Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	2022*	Peringkat
Kab. Kepulauan Mentawai	12,89	15
Kab. Pesisir Selatan	13,35	12
Kab. Solok	13,30	14

Kabupaten/Kota	2022*	Peringkat
Kab. Sijunjung	12,64	19
Kab. Tanah Datar	14,59	5
Kab. Padang Pariaman	13,68	10
Kab. Agam	13,88	8
Kab. Lima Puluh Kota	13,40	13
Kab. Pasaman	13,05	16
Kab. Solok Selatan	12,73	17
Kab. Dharmasraya	12,51	18
Kab. Pasaman Barat	13,69	9
Kota Padang	16,54	1
Kota Solok	14,34	6
Kota Sawahlunto	13,42	11
Kota Padang Panjang	15,07	2
Kota Bukittinggi	14,99	3
Kota Payakumbuh	14,29	7
Kota Pariaman	14,61	4

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2023

4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2018 hingga 2022, Kota Sawahlunto telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir rata-rata tumbuh sebesar 0,29 persen per tahun. Pada tahun 2018, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Sawahlunto sebesar 69,59 tahun, dan pada tahun 2022 telah mencapai 70,40 tahun. Angka Harapan Hidup ini menunjukkan bayi yang lahir tahun 2022 memiliki angka harapan hidup 70,40 tahun, lebih lama 0,30 tahun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya 70,10 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dari Angka Harapan Hidup Nasional.

Tabel 2.50
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (Satuan Dalam Tahun)

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
AHH Kota Sawahlunto	69.59	69.87	70	70.1	70.40	0.29
AHH Provinsi Sumatera Barat	69.01	69.31	69.47	69.59	69.90	0.32
AHH Nasional	71.2	71.34	71.47	71.57	71.85	0.23

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka dan Statistik Nasional, 2022 (data olahan)

Pada tahun 2018, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Sawahlunto sebesar 69,59 tahun, dan pada tahun 2022 telah mencapai 70,40 tahun. Angka Harapan Hidup ini menunjukkan bayi yang lahir tahun 2022 memiliki angka harapan hidup 70,40 tahun, lebih lama 0,30 tahun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya 70,10 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 lebih tinggi dari Angka

Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dari Angka Harapan Hidup Nasional.

Tabel 2.51
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto Dengan Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2022

Kota/Kab	Tahun 2021	Peringkat
Kab. Kepulauan Mentawai	64,93	19
Kab. Pesisir Selatan	71,25	8
Kab. Solok	69,19	14
Kab. Sijunjung	66,70	18
Kab. Tanah Datar	70,49	10
Kab. Padang Pariaman	69,34	13
Kab. Agam	72,89	6
Kab. Lima Puluh Kota	70,08	12
Kab. Pasaman	67,59	17
Kab. Solok Selatan	68,01	15
Kab. Dharmasraya	71,53	7
Kab. Pasaman Barat	68,25	16
Kota Padang	73,93	4
Kota Solok	74,06	3
Kota Sawahlunto	70,40	11
Kota Padang Panjang	73,02	5
Kota Bukittinggi	74,82	1
Kota Payakumbuh	74,14	2
Kota Pariaman	70,67	9
Provinsi Sumatera Barat	69,59	

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2022 berada pada peringkat 11 (Sebelas), hal ini menggambarkan bahwa Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Sawahlunto masih perlu untuk ditingkatkan sehingga perlu intervensi dari pemerintah dan kerjasama oleh seluruh *stakeholder* di Kota Sawahlunto.

5. Pengeluaran per Kapita

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sawahlunto mencapai Rp.10,537 juta per tahun. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh rata-rata sebesar 1,95 % per tahun, kecuali tahun 2020 yang turun sebesar 56 ribu rupiah. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat, pengeluaran per kapita Kota Sawahlunto adalah yang terendah. Pengeluaran per Kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 cenderung lebih rendah dari Pengeluaran per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Pengeluaran per Kapita Nasional.

Tabel 2.52
Perbandingan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2018 – 2022 (Ribu Rupiah)

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto	9.765	10.238	10.182	10.19	10.537	1.95
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat	10.638	10.925	10.733	10.79	11.130	1.16
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Nasional	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479	0.96

Sumber Data :Sawahlunto Dalam Angka 2022, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022. Statistik Indonesia 2022

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Jumlah Grup Kesenian

Kota Sawahlunto selama ini telah dikenal sebagai Kota Seni dan Budaya yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena masyarakatnya yang heterogen dan multikultural sehingga melahirkan berbagai karakter dan budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kota Sawahlunto. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul dikalangan masyarakat dan Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

Perkembangan kesenian di Kota Sawahlunto dapat dilihat dari perkembangan jumlah group kesenian dan jumlah gedung kesenian yang ada di Kota Sawahlunto setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.53
Group Kesenian Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Grup Kesenian	Unit	45	47	38	38	35
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	61,39	62,52	65,14	65,69	65,69
3.	**Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk**	**Unit**	**0,73**	**0,75**	**0,58**	**0,58**	**0,53**

Sumber Data: Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan group kesenian dari lima tahun terakhir mengalami penurunan yang mana tahun 2022 menjadi 35 group kesenian. Adapun penurunan ini terjadi disebabkan terjadinya penurunan anggaran pada seluruh OPD Pemerintah Kota sehingga kegiatan kegiatan yang menyangkut dengan penampilan serta aktifitas grup kesenian tidak berjalan, padahal grup kesenian ini sangat bergantung dengan kegiatan atau event event yang dilaksanakan kota. Dari 35 group kesenian, yang aktif hanya sebanyak 28 grup dan 7 grup kesenian tidak aktif, sedangkan 25 grup diantaranya sudah berbadan hukum.

2. Jumlah Gedung Kesenian

Untuk mewujudkan Visi Misi Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, sangat perlu melestarikan seni dan budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat, maka keberadaan gedung kesenian merupakan hal yang sangat penting sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anak bangsa, disisi lain pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat suatu daerah. Salah satu bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah, Tabel berikut ini menunjukkan data jumlah gedung kesenian di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.54
Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	10	12	20	20	20
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	61,39	62,52	65,14	65,69	65,69
3.	**Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 penduduk**	**Unit**	**0,16**	**0,19**	**0,30**	**0,30**	**0,30**

Sumber Data: Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2022

Pemerintah Kota Sawahlunto belum memiliki gedung pertunjukan kesenian yang representatif dan memenuhi standar sebuah gedung pertunjukan kesenian. Sehingga pelaku-pelaku seni Kota Sawahlunto masih memanfaatkan aula/ruang pertemuan gedung perkantoran dan sekolah serta ruang-ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk berkumpul atau bersosialisasi dalam melakukan aktivitas seni. Adapun jumlah tempat pertunjukan kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto berjumlah 20 lokasi yang terdiri dari dalam ruangan (*indoor*) sebanyak 8 tempat dan luar ruangan (*outdoor*) 12 tempat.

Namun secara kenyataanya Kota Sawahlunto hanya memiliki 1 Gedung Kesenian yaitu Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) yang merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang dulunya merupakan Gedung Pertemuan Masyarakat, dan berfungsi sebagai tempat hiburan bagi para kolonial Belanda yang saat ini juga tidak bisa digunakan karena musibah kebakaran pada tanggal 03 November 2022 yang lalu. Penyelenggaraan pertunjukkan kesenian tidak harus diadakan didalam gedung kesenian, dapat juga di ruang terbuka publik yang digunakan sebagai tempat berekspresi bagi para seniman. Ruang terbuka publik yang sering digunakan bagi para seniman Kota Sawahlunto untuk menampilkan karya seni dan pertujukan kesenian lainnya adalah Lapangan Segitiga atau lebih dikenal dengan LapSeg, dan panggung terminal di Kota Sawahlunto dan di terminal di Talawi. Hal ini menjadi penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat penambahan jumlah gedung kesenian. Saat ini Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) dikelola oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

3. Jumlah Klub dan Gedung Olahraga

Perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Kota Sawahlunto dalam mendukung prestasi olahraga di Kota Sawahlunto seperti salah satunya gedung olahraga, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.55
Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Klub dan Gedung Olahraga	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Klub Olahraga	70	75	93	93	95
2.	Jumlah Gedung Olahraga	11	11	0	0	0

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah gedung olahraga dari 11 unit menjadi 0, ini disebabkan karena sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Sawahlunto tidak termasuk dalam kategori jenis gedung olahraga. Sedangkan untuk klub olahraga di Kota Sawahlunto terjadi peningkatan yang disebabkan banyaknya minat masyarakat dalam mengikuti setiap cabang olahraga yang ada.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tabel 2.56
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	Indikator	Capaian Tahun			
			2019	2020	2021	2022
A	**Pendidikan**					

No	Uraian	Indikator	Capaian Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	78,76	93,27	100	100
2	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	85,99	92,09	100	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	85,05	56,70	70,64	100

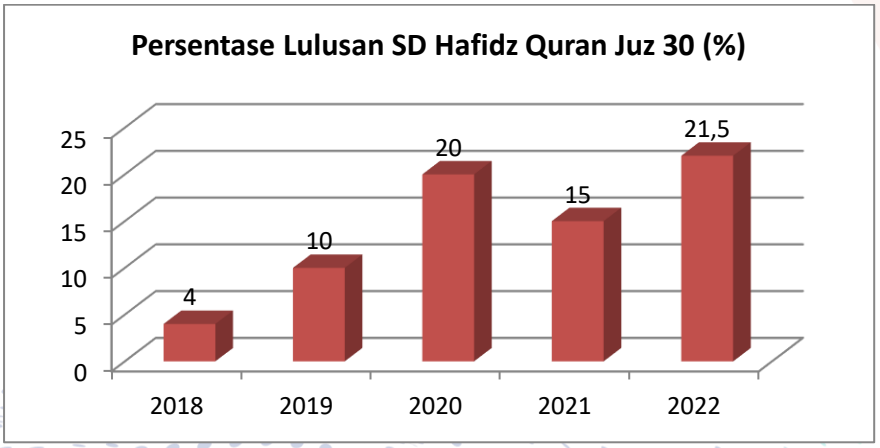
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yaitu Bidang Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2019 realisasinya 78,76 % meningkat pada tahun 2020 menjadi 93,27% serta meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 100%. Pada tahun 2022 capaiannya adalah 100%. Pada Bidang Pendidikan Dasar juga mengalami peningkatan capaian SPM. Pada tahun 2019 capaian SPM sebesar 85,99 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 92,09 % dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 100%. Pada tahun 2022 capaian adalah sebesar 100%. Dari bidang Pendidikan Kesetaraan Pencapaian SPM mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 85,05 % menurun menjadi 56,70 % pada tahun 2020. Hal ini yang disebabkan masih kurangnya kemauan anak anak yang yang putus sekolah ingin melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi melalui SKB, dan dan juga disebabkan kondisi Pandemi Covid 19 sulit untuk menemui anak-anak yang putus sekolah dan keterbatasan untuk melakukan tatap muka dalam belajar. Akan tetapi pada tahun 2022 menjadi 100%.

2. Persentase Lulusan SD Hafidz Quran minimal Juz 30

Salah satu indikator kinerja daerah adalah Persentase lulusan SD Hafidz alquran minimal Juz 30. Adapun perkembangan siswa Sekolah Dasar yang lulus minimal Juz 30 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.12
Persentase Lulusan SD yang Hafiz Alquran juz 30
Tahun 2018 -2022



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2018 persentase lulusan SD Hafidz quran pada tahun 2018 adalah 4 % meningkat pada tahun 2019 menjadi 10 % dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 20 %. Pada tahun 2021 Jumlah persentase menurun menjadi 15 %. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi covid 19 sehingga mempengaruhi jumlah persentase lulusan SD Hafidz quran minimal juz 30. Pada tahun 2022 kembali naik menjadi 21,5 %.

3. Persentase Siswa dengan Nilai *Assesment* Kompetensi (Numerasi Minimum)

Assesment Nasional adalah Program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Ini adalah alat ukur keberhasilan sekolah sebagai pengganti dari Ujian Nasional yang selama beberapa tahun kebelakang ini dilaksanakan. Adapun perkembangan dari Nilai Assesment Kompetensi di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.57
Nilai *Assesment* Kompetensi (Numerasi dan Literasi Minimum)
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata nilai ujian UN SD	7,40	7,41	7,42		
2	Rata rata nilai ujian UN SMP	5,52	5,53	5,55		
3	Persentase siswa dengan nilai *assessment* kompetensi (numerasi minimum) SD				1,61	1,69
4	Persentase siswa dengan nilai *assessment* kompetensi (numerasi minimum) SMP				1,80	1,82
3	Persentase siswa dengan nilai *assessment* kompetensi (Literasi minimum) SD				1,88	1,97
4	Persentase siswa dengan nilai *assessment* kompetensi (Literasi minimum) SMP				2,04	2,06

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2020 indikator kinerja daerah adalah rata rata nilai ujian SD dan UN SMP. Akan tetapi pada tahun 2021 indikator itu tidak digunakan lagi karena tidak adanya ujian nasional pada tingkat SD dan SLTP. Sehingga indikatornya mengalami perubahan menjadi persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi SD dan SMP yang telah dimulai tahun 2021. Pada tahun 2021 persentase siswa dengan nilai assesment kompetensi (numerasi minimum) SD adalah 1,61% dan naik pada tahun 2022 menjadi 1,69%. Sedangkan persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi minimum) SMP dengan nilai 1,80% naik menjadi 1,82%. Pada indikator persentase siswa dengan nilai assesment kompetensi (literasi minimum) SD pada tahun 2021 naik dari 1,88% menjadi 1,97% tahun 2022. Sedangkan tingkat SMP nilai assessment kompetensi (Literasi Minimum) SMP pada tahun 2021 adalah sebesar 2,04% mengalami kenaikan menjadi 2,06% pada tahun 2022.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan APK di Kota Sawahlunto yaitu:

Tabel 2.58
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
	Angka partisipasi kasar (APK)(%)					
1	PAUD	60,52	61,24	59,35	83,47	89,62

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa APK PAUD mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 berada di angka 60,52, 61,24% pada tahun 2019 Tahun 2020 sebesar 59,39%. Menurunnya APK PAUD tahun 2020 disebabkan karena adanya Pandemi covid 19. Pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 83,47% dan pada tahun 2022 menjadi 89,62%. Perbandingan APK PAUD dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59

Data Kondisi PAUD Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022 (%)

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022*
1.	Apk paud nasional	37,92	36,93	37,52	35,59	35,59
2	APK PAUD PROPINSI	30,22	30,39	35,89	40,04	40,04
3	APK PAUD KOTA SAWAHLUNTO	60,52	61,24	59,35	83,47	83,47
4	JUMLAH PENDUDUK UMUR 3-6 TAHUN KOTA SAWAHLUNTO	4.661	4.641	4.618	4.450	4.450
5	JUMLAH SISWA PAUD	2.821	2.842	2.741	2.833	2.833

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel diatas bahwa sejak tahun 2018 sampai 2021 APK PAUD umur 3 sampai dengan 6 tahun mengalami penurunan yang cukup besar, walaupun mengalami penurunan APK PAUD Kota Sawahlunto masih diatas rata-rata Nasional dan Propinsi Sumatera Barat setiap Tahunnya. Tahun 2021 APK PAUD Sawahlunto sebesar 83,47% lebih tinggi jika dibanding dengan Propinsi 40,04% dan Nasional 35,59%.

Tabel 2.60
Angka Partispasi Kasar (APK)
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Angka partisipasi kasar (APK)(%)					
1	SD / MI	111,33	108,96	112,44	108,67	110,24
2	SMP / MTs	96,68	92,57	84,76	93,75	105,42

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka Kota Sawahlunto, 2022

APK SD/MI di Kota Sawahlunto sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 APK SD/MI adalah 111,33 turun pada tahun 2019 menjadi 108,96 % dan naik lagi pada tahun 2020 menjadi 112,44%. Pada tahun 2021 menurun lagi menjadi 108,67% dan naik lagi menjadi 110,24% pada tahun 2022. Adapun penyebab fluktuasi tersebut adalah: rendahnya minat siswa untuk bersekolah, kurangnya pemahaman guru terhadap angka partisipasi dalam Pendidikan, jarak sekolah yang jauh dari rumah, usia kurang/lebih dari usia cukup sekolah dan siswa tidak naik kelas. Beberapa faktor yang menjadi pendorong meningkatnya APK adalah: Pendidikan orang tua yang memberikan pengaruh positif bagi Pendidikan anak, ekonomi keluarga yang cukup/memadai dan kesehatan anak yang baik. APK untuk jenjang SMP/MTs di Kota Sawahlunto mengalami fluktuasi pada tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 dari 96,68% menurun pada tahun 2019 menjadi 92,57%. Pada tahun 2020 menurun menjadi 84,76% dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 105,42%, hal ini menunjukkan mulai meningkatnya anak usia sekolah yang bersekolah di kota Sawahlunto pada jenjang SMP/MTs.

5. Angka Partispasi Murni (APM)

Angka Partisipas Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang Pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perkembangan APM di Kota Sawahlunto dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.61
Angka Partispasi Murni (APM)
Tahun 2018 – 2022 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD / MI	100	99,66	99,38	99,44	99,03
2	SMP / MTs	83,73	82,94	81,46	82,87	82,94

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka Kota Sawahlunto, 2023

APM di Kota Sawahlunto untuk jenjang SD/MI sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 APM turun dari 100% menjadi 99,66% dan kembali turun sampai tahun 2020 sebesar 99,38%. Pada tahun 2021 kembali naik menjadi 99,44%. Pada tahun 2022 kembali turun menjadi 99,03%. Ini berarti pada tahun 2022 menunjukkan penduduk Kota Sawahlunto pada umur 7 sampai dengan 12 tahun telah bersekolah SD/MI tepat waktu sebesar 99,03%. Adapun penyebab fluktuasi tersebut adalah: rendahnya minat siswa untuk bersekolah kurangnya pemahaman guru terhadap angka partisipasi dalam Pendidikan, jarak sekolah yang jauh dari rumah, usia kurang/lebih dari usia cukup sekolah dan siswa tidak naik kelas. Beberapa faktor yang menjadi pendorong meningkatnya APM adalah: Pendidikan orang tua yang memberikan pengaruh positif bagi, Pendidikan anak, ekonomi keluarga yang cukup/memadai dan kesehatan anak yang baik. APM di Kota Sawahlunto untuk jenjang SMP/MTs sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 rata rata mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 APM mencapai 83,73%, sedangkan tahun 2021 APM untuk jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan menjadi 82,87%. ini menunjukkan pada tahun 2022 penduduk Kota Sawahlunto yang berumur 13 sampai dengan 15 tahun telah bersekolah SMP/MTs tepat waktu sebesar 82,94%.

6. Angka Partispasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah ini memperlihatkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS anak usia 7 sampai dengan 12 tahun adalah persentase anak usia 7 sampai dengan 12 tahun yang sedang bersekolah ditingkat SD dan MI serta yang telah bersekolah di SLTP dan MTS dibagi jumlah penduduk usia 7 sampai dengan 12 tahun dikalikan 100%. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat Perkembangan APS Kota Sawahlunto berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2018-2022:

Tabel 2.62
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto
Tahun 2018–2022

No	Tahun	Kelompok Umur		
		7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
1.	2018	100	83,73	71,56
2.	2019	99,66	97,95	81,79
3.	2020	99,73	97,44	82,64
4.	2021	99,94	97,67	82,99
5	2022	99,03	98,03	95,98

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Dilihat dari perkembangan Angka Partipasi Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi pada setiap kelompok umur. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah di setiap kelompok umurnya. Pada tahun 2018 kelompok umur 7 sampai dengan 12 tahun dari 100% turun pada tahun 2022 menjadi 99,03%. Pada kelompok umur 13 sampai dengan 15 dari tahun 2018 meningkat menjadi 98,03 % tahun 2022. Akan tetapi pada kelompok umur 16 sampai dengan 18 pada tahun 2018 naik dari 71,56% pada tahun 2018 menjadi 95,98% pada tahun 2022.

7. Rasio Murid dan Kelas

Rasio Murid dan kelas sangat penting untuk menentukan ketersedian kelas terhadap murid yang ada. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan rasio murid terhadap kelas di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.63
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto
Tahun 2018– 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	TK					
1.1	Jumlah Murid	1.543	1.200	1.335	1.335	898
1.2	Jumlah Kelas	100	99	89	71	63
1.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	15,43:1	12,12:1	18,80:1	18,80:1	14,25:1
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Murid	6.772	6.727	7.247	7.064	6233
2.2	Jumlah Kelas	374	378	400	386	396
2.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	18,19 : 1	18,11 : 1	17,45	18,30:1	15,74:1
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Murid	2.359	2.930	3.527	3.275	2355
3.2	Jumlah Kelas	107	130	130	152	93
3.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	22,04 : 1	22,53:1	22,53:1	21,55:1	25,32:1

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2022 Kota Sawahlunto mengalami penurunan jumlah murid pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa perbadingan jumlah kelas dengan murid untuk tingkat TK satu kelas pada tahun 2021 berisi rata-rata 18 siswa pada tahun, untuk tingkat SD satu kelas berisi rata-rata 18 siswa dan untuk tingkat SMP berisi rata-rata 21 orang siswa. Pada tahun 2022 mengalami penurunan pada TK jumlah rata rata per kelas adalah 14 orang/kelas, tingkat SD menjadi 16 orang/kelas, dan SMP mengalami kenaikan menjadi 25 orang per kelas, akan tetapi semuanya masih sesuai dengan Permendikbud nomor 17 tahun 2018 sebagaimana yang dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.64
Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2018

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH MURID/ KELAS
1	SD	1 : 18 – 28
2	SMP	1 : 20 – 32

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

8. Persentase Sekolah yang Berakreditasi A

Akreditasi adalah proses evaluasi serta penilaian kualitas sebuah institusi yang dilaksanakan oleh tim ahli yang disebut sebagai *assessor* berdasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan. Persentase sekolah berakreditasi di Kota Sawahlunto dibedakan antara sekolah SD dengan SMP.

Tabel 2.65
Persentase Sekolah SD/MI Berakreditasi A di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Jumlah SD/MI Berakreditasi A	37	42	41	41	40
2	Total Jumlah SD/MI	65	65	67	67	67

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
3	Persentase SD/MI Berakreditasi A	56,92	64,62	61,19	61,19	59.70

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Pada tahun 2018 jumlah persentase sekolah SD/MI yang berakreditasi sebanyak 56,92% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 64,62 %. Hal ini disebabkan karena adanya reakreditasi sekolah, sehingga adanya perubahan point penilaian. Pada tahun 2019 kembali naik karena sekolah berusaha memenuhi point tambahan pada akreditasi sehingga kembali naik menjadi A. Pada tahun 2021 persentase sekolah SD berakreditasi A menjadi, 61,19 %. Pada tahun 2022 kembali turun menjadi 59,70 % hal ini dikarenakan ada sekolah yang tidak memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan standar akreditasi.

Tabel 2.66
Persentase Sekolah SMP/MTs Berakreditasi A di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah SMP/MTs Berakreditasi A	3	2	2	2	3
2	Total Jumlah SMP/MTs	14	14	15	15	15
3	Persentase SMP/MTs Berakreditasi A	21,43	14,28	13,33	13,33	20

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Pada tingkat SMP persentase SMP yang berakreditasi A tahun 2018 sebesar 21,43 % dan turun tahun 2019 menjadi 14,28 %. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 13,33 %. Hal ini dikarenakan adanya reakreditasi sehingga adanya penambahan poin akreditasi yang belum dapat dipenuhi sekolah. Pada tahun 2022 jumlah SMP/MTS yang berakreditasi A bertambah menjadi 3 sekolah sehingga naik jadi 20%.

9. Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui jalur formal, non formal dan informal. Adapun kualitas dari lembaga PAUD yang ada di kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.67
Persentase Lembaga PAUD Berakreditasi di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi		76	70	70	102
2	Total Jumlah Lembaga PAUD		88	87	87	119
3	Persentase Lembaga PAUD Berakreditasi		86,36	80,46	80,46	80,71

Sumber Data: Profil Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Data Persentase Lembaga PAUD berakreditasi pada tahun 2019 berjumlah 86,36 %. Mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 80,46 %, karena ada lembaga PAUD yang sudah tutup sehingga mengurangi persentase PAUD yang berakreditasi. Pada tahun 2022 jumlah paud yang berakreditasi meningkat menjadi 80,71%.Karena beberapa lembaga PAUD yang belum terakreditasi dilakukan visitasi oleh BAH PAUD Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi masih belum semuanya yang dilakukan visitasi karena terkendala anggaran BAN PAUD provinsi itu sendiri.

10. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa perjenjang pendidikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.68
Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto
Tahun 2018– 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**SD**					
	Ikut Ujian	1077	1139	1050	1065	1076
	Lulus Ujian	1077	1139	1050	1065	1076
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
2.	**MI**					
	Ikut Ujian	79	80	323	90	90
	Lulus Ujian	79	80	323	90	90
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
3.	**SMP**					
	Ikut Ujian	800	851	783	758	818
	Lulus Ujian	790	851	783	756	816
	Persentase (%)	99,69	100	100	99,73	99,75
4.	**MTs**					
	Ikut Ujian	188	192	252	258	258
	Lulus Ujian	188	192	252	258	258
	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2018 sampai 2022 tingkat SD dan MI di Kota Sawahlunto kelulusan siswa sudah mencapai 100%. Pada tingkat SMP kelulusan siswa meningkat dari 99,73% pada tahun 2021 meningkat menjadi 99,75% pada tahun 2022. untuk tingkat SD, MI, MTs pada tahun 2022 jumlahnya adalah 100%.

11. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan.

Tabel 2.69
Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022 (%)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Putus Sekolah	4	11	0	0	0
1.2	Jumlah Murid	6.727	7.247	7.122	7.064	6233
1.3	Angka Putus sekolah	0,06	0,03	0	0	0
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah Putus Sekolah	11	5	38	0	0
2.2	Jumlah Murid	2.359	3.338	3.527	2.833	2355
2.3	Angka Putus sekolah	0,46	0,15	1,07	0	0

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Angka putus sekolah pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah angka putus sekolah tingkat SD sebesar 0,46% dan menurun pada

tahun 2019 menjadi 0,15%. Tahun 2021 - tahun 2022 tidak ada anak putus sekolah. Angka putus sekolah ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan mereka putus sekolah adalah kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga broken home, sehingga mereka kurang perhatian dari orang tua, selain itu juga tidak adanya kemauan dari mereka sendiri untuk ke sekolah karena adanya pengaruh dari orang lain. Jika kita lihat, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama alasan mereka putus sekolah. Karena untuk uang sekolah di sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar terhadap kemauan belajar mereka. Seperti pada tahun 2020, dimana saat pandemik covid 2019 banyak anak anak malas untuk Kembali ke sekolah. Salah pergaulan adalah salah satu bentuk pengaruh lingkungan yang buruk yang dapat memicu kemauan mereka untuk bersekolah.

12. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan dapat dilihat dari jumlah siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkat atasnya, adapun perkembangan jumlah siswa yang melanjutkan sekolah setelah kelulusan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.70
Angka Melanjutkan Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Siswa baru Tingkat I pada jenjang SMP/MTs	1.263	1.208	1.373	1.137	786
2	Jumlah Lulusan pada jenjang SD tahun ajaran sebelumnya	1.217	1.156	1.126	1.115	1065
3	Angka Melanjutkan (%)	103,78	104,50	121,94	101,97	73,80

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Angka melanjutkan pada tingkat SMP mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 angka melanjutkan menjadi 103,78 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 121,94. Dan pada tahun 2021 menurun lagi menjadi 101,97. Pada tahun 2022 kondisi Oktober 2022 angka melanjutkan masih 73,80%, hal ini dikarenakan karena banyaknya anak SD/MI yang melanjutkan sekolah di luar Kota Sawahlunto.

13. Sekolah SD/MI dalam Kondisi Baik

Sekolah dalam kondisi baik sangat menentukan kelancaran proses belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut. Secara keseluruhan keadaan kondisi sekolah yang ada di Kota Sawahlunto seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.71
Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		jumlah	(%)	jumlah	(%)	jumlah	(%)	jumlah	(%)	jumlah	(%)
1	Total Jumlah Kelas SD/MI dalam Kondisi baik	277	73,87	151	41,03	91	23,70	92	23,83	392	99,74
2	Total Jumlah Kelas SD/MI dalam kondisi rusak ringan	82	21,87	189	51,36	293	76,30	294	76,16	1	0,25

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		jumlah	(%)	jumlah	(%)	jumlah	(%)	jumlah	(%)	jumlah	(%)
3	Total Jumlah Kelas SD/MI dalam kondisi rusak sedang	15	4,8	27	7,34	0	0	0	0	0	0
4	Total Jumlah Kelas SD/MI dalam kondisi rusak berat	1	0,27	1	0,27	0	0	0	0	0	0
5	**Total Jumlah Kelas SD/MI**	**375**	**100**	**368**	**100**	**384**	**100**	**386**	**100**	**393**	**100**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Kelas dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 73,87 % meningkat menjadi menjadi 99,74 % pada tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya penurunan ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan, yaitu pada tahun 2018 dari 21,87 % menjadi 0,25 % pada tahun 2022. Ruang kelas rusak berat pada tahun 2018 sebesar 0,27 % pada tahun 2020 hingga 2022 tidak ada lagi yang mengalami rusak berat. Sedangkan keadaan kondisi sekolah untuk jenjang SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.72
Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam kondisi baik (%)

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)
1	Total Jumlah Kelas SMP/MTS dalam Kondisi baik	54	45,00	60	55,05	60	39,47	60	39,47	64	42,11
2	Total Jumlah Kelas SMP/MTS dalam kondisi rusak ringan	64	53,33	49	44,95	92	60,53	92	60,53	88	57,89
3	Total Jumlah Kelas SMP/MTS dalam kondisi rusak sedang	2	1,67	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total Jumlah Kelas SMP/MTS dalam kondisi rusak berat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Total Jumlah Kelas SMP/MTS**	**120**	**100**	**109**	**100**	**152**	**100**	**152**	**100**	**152**	**100**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Pada tingkat SMP jumlah ruang kelas kondisi baik juga mengalami penurunan pada tahun 2018 dari 45% menjadi 39,47 % pada tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya jumlah sekolah yang mengalami kerusakan ringan dari tahun 2018 sebesar 53,33 % meningkat menjadi 60,53 % ada tahun 2021. Tahun 2018 hingga tahun 2021 ruang kelas rusak sedang dan berat tidak ada lagi di Kota Sawahlunto.

14. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Definisinya adalah Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Interpresetasinya adalah rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia dasar. Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah di Kota Sawahlunto seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.73
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	TK					
1.1	Jumlah Sekolah (jumlah TK,RA, Paud)	125	131	131	131	131
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-6	3.360	3.404	3.394	3.394	3.394
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-6	1:26,85	1:25,98	1:25,91	1:25,91	1:25,91
2	SD/MI/SDLB					
1.1	Jumlah Sekolah	64	64	67	67	67
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	6.994	7.222	7.122	7083	7083
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1:109,28	1:112,84	1:106,30	1:105,72	1:105,72
3	SMP/MTs/SMPLB					
2.1	Jumlah Sekolah	14	14	15	15	15
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	3.506	3.532	3.602	3.561	3.561
2.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1:399	1:252,2	1:240,13	1:247,4	1:247,4

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Dari rasio ketersediaan sekolah diatas dapat kita lihat bahwa rasio ketersediaan sekolah di Kota Sawahlunto untuk tingkat Pendidikan TK termasuk didalamnya paud sudah sangat tinggi. Yaitu 1: 25,91. Sedangkan untuk tingkat ketersediaan sekolah usia SD sudah mencapai 1:105,72 pada tahun 2022. Sedangkan rasio ketersdiaan sekolah tingkat SMP masih berada pada 1:247,4.

15. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio Guru dan Murid di Kota Sawahlunto terihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.74
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto
Tahun 2018 - 2022

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	TK					
1.1	Jumlah Guru	172	123	400	399	399

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.2	Jumlah Murid	1.543	1.200	2.913	2.833	2.833
1.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 : 8,97	1:9,75	1:7,28	1;7,10	1;7,10
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Guru	603	428	579	600	539
2.2	Jumlah Murid	6.691	7.247	7.122	7.064	6235
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:11.02	1:16,93	1:12,30	1:11,77	1:11,56
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Guru	285	322	320	320	264
3.2	Jumlah Murid	2.615	3.338	3.527	3.275	2262
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 : 8,27	1:10,36	1:11,02	1:10,23	1: 8,56

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Selama kurun waktu 2018–2022 rasio ketersediaan guru di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan untuk setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2022 kondisi ketersediaan guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan TK adalah untuk 1 guru melayani 7 murid TK, untuk tingkat SD/MI 1 guru melayani 12 murid SD, untuk SMP 1 guru melayani 9 murid SMP/MTs. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini sama dengan tahun lalu akan tetapi untuk tingkat SMP/MTS mengakami penurunan, yaitu dariperbandingan 1;11 menjadi 1:10. Jumlah ini telah memenuhi untuk kondisi idealnya, dimana untuk jenjang pendidikan TK 1 orang guru idealnya melayani 11 murid.

16. Guru yang Memenuhi Kualitas S1/D IV

Sesuai perkembangan zaman kualitas guru sangat menentukan kualitas proses dalam belajar dan mengajar di sekolah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan D-IV atau S1 dalam mendorong peningkatan kualifikasi guru. Jumlah guru Kota Sawahlunto yang memenuhi Kualitas S1/D-IV sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.75
Guru yang Memenuhi Kualitas S1/ DIV

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Guru Yang memenuhi kualitas SI/D IV	932	953	1.020	971	971
2	Total Guru	1.044	1.344	1.299	1.324	1.324
3	Persentase Guru yang memenuhi Kualitas SI/D IV (%)	89,27	70,91	78,52	73,34	73,34

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Di Kota Sawahlunto jumlah guru yang memenuhi kualitas S1/DIV mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 persentasenya berjumlah 89,27%. Pada tahun 2021 menurun menjadi 73,34%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah guru dan guru yang memenuhi kualifikasi ada yang pindah dan pensiun.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait bidang Kesehatan, untuk tahun 2019-2022 diperoleh fluktuasi capaian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (%)

No	URAIAN	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 difasilitas	64,60	67,66	71,70	65,35

No	URAIAN	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022
		pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta				
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	75,54	76,78	79,90	73,88
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 -28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	79,49	79,68	83,66	77,81
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	74	76	74,60	86,19
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	100	68,36	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15- 59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	86,23	76,05	49,83	40,37
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	38,11	46,66	44,50	42,37
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hypertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	39,49	16,72	7,95	15,45
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Militus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	60,34	88,06	50,59	71,91
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar	100	150	100	100

No	URAIAN	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022
		dalam kurun waktu satu tahun				
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	27,14	13,10	26,03	40,38
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	30,83	100	100	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel diatas pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yaitu bidang kesehatan dari 12 indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Kesehatan mengalami peningkatan dari pencapaian indikator tahun sebelumnya. Realisasi mencapai SPM bidang Kesehatan belum mencapai 100% hal ini dikarenakan oleh kesulitan dalam cakupan sasaran yang akan dilayani.

2. Kasus Stunting Balita

Pencegahan stunting dilakukan agar anak-anak Indonesaia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetensi ditingkat global. Pemerintah Kota Sawahlunto juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan stunting, terbuktinya dengan menurunnya kasus stunting di dua tahun terakhir ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

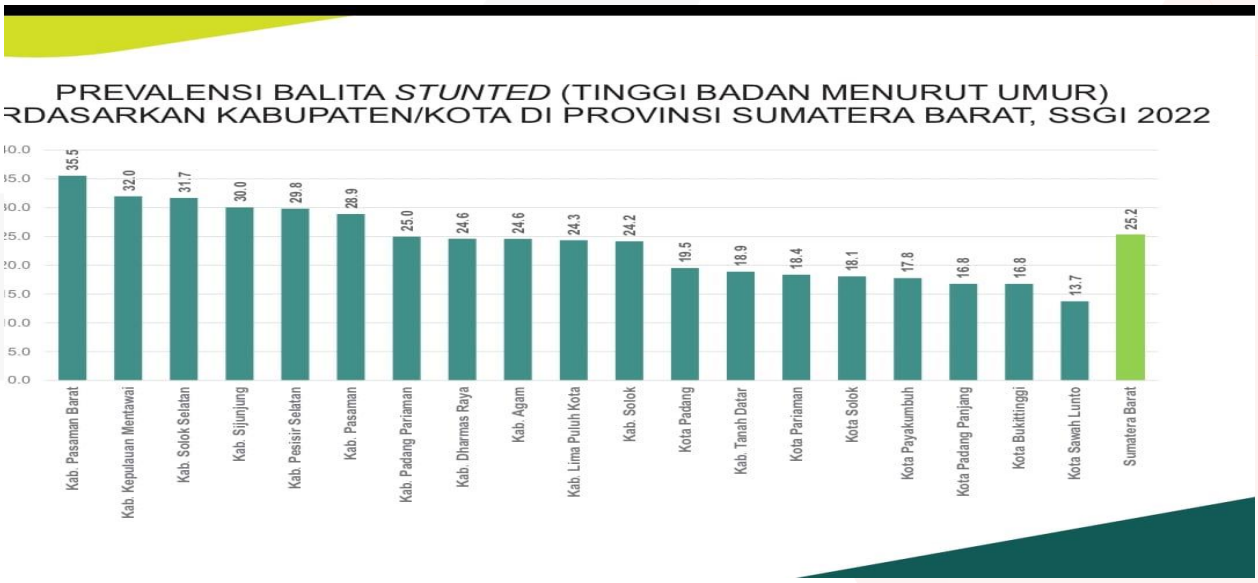
Tabel 2.77
Persentase Kasus Stunting Balita di Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

NO	PUSKESMAS	2018	2019	2020	2021	2022
1	Talawi	18,6	6,6	8,0	7,5	5,7
2	Kolok	33,0	19,7	13,3	7,3	8,6
3	Sungai Durian	1,7	7,2	3,3	1,7	1,7
4	Kampung Teleng	20,7	3,3	4,3	4,4	3,8
5	Lunto	17,2	16,0	11,8	12,2	11,9
6	Silungkang	26,7	21,7	10,3	5,6	5,6
	KOTA	**18,5**	**11,1**	**8,0**	**6,1**	**5,6**

Sumber Data: E-PPGBM, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2022

Persentasi kasus Stunting balita di Kota Sawahlunto pada tahun 2018 berjumlah 18,5% ini disebabkan oleh kurangnya intake gizi pada Balita, kurangnya Pola Asuh, faktor Perilaku, faktor ekonomi keluarga, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat. Untuk itu telah dilakukan upaya-upaya oleh Dinas Teknis yaitu dengan memberikan motivasi dan konseling kepada keluarga, memberikan makan tambahan, melakukan pemantauan kepada balita serta membentuk pos-pos gizi di tingkat desa kelurahan, maka untuk tahun 2020 persentasi kasus stunting di Kota Sawahlunto mengalami penurunan berjumlah 8,0 %. Dan pada tahun 2022 Jumlah kasus stunting di Kota Sawahunto dapat ditekan menjadi 5,6 %.

Grafik 2.13
Prevalensi Balita Stunted Berdasarkan Kab/Kota Di Sumatera Barat



Sumber: SSGI 2022, BKKBN 2023

Berdasarkan data SSGI (Survei Status Gizi Nasional) Prevalensi Balita Stunted di Kota Sawahlunto mengalami penurunan.Pada tahun 2021 Prevalensi stunting di Kota Sawahlunto sebesar 21,1 %. Menurun menjadi 13,7 % pada tahun 2022. Pada tahun 2022 Kota Sawahlunto daerah terendah Prevalensi Stunting di Sumatera Barat, serta telah mencapai target nasional yang pada tahun 2024 adalah 14 %, sedangkan Kota Sawahlunto telah mencapai 13,7 % pada tahun 2022.

Upaya kovergensi Percepatan Pencegahan Stunting akan dilaksanakan melalui tahap perencaan, pelaksanaan, sehingga pemantauan dan evaluasi terhadap Progaram dan Kegiatan. Upaya Konvergensi Stunting yang akan dilakukan melalui 8 Aksi yaitu : melakukan Analisis Situasi , Melakukan Pemetaan, Melaksanakan Rembuk Stunting, Membuat Perwako Tentang Peran Desa, Melakukan Pembinaan KPM, Membuat Sistim Manajemen Data, Melakukan Pengukuran dan Pulikasi Stunting, Melakukan Evalusi Stunting untuk memastikan :

a. Perencanaan kegiatan Pencegahan stunting dengan berbasis Data
b. Intervensi gizi yang diperioritaskan oleh Daerah yang sudah dimasukan pada perencanaan dan penganggaran
c. Melakukan pemantauan secara terpadu sebagai sarana untuk berkoordinasi dan melakukan penyesuaian dalam program
d. Melakukan Sistim manajemen data yang baik untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan
e. Menjadikan hasil evaluasi Kinerja digunakan dasar perencanaan dan Penganggaran

3. Jumlah Kasus Kematian Balita

Jumlah kasus kematian balita adalah jumlah kasus kematian balita pada usia 0-59 bulan. Pada tahun 2021 jumlah kasus kematian balita ini berjumlah 16 orang. 13 diantaranya dibawah usia 1 tahun yang termasuk juga bayi. Sedangkan usia diatas 1 tahun berjumlah 3 orang. Sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 23 orang. Angka kematian balita dihitung dengan membandingkan jumlah balita yang mati dengan angka kelahiran hidup, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.78
Jumlah kematian Balita Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kasus Kematian Balita	24	27	21	16	23

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2022

Jumlah kematian balita di Kota Sawahlunto setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah kasus kematian balita ada sebanyak 24 orang. Sedangkan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 27 orang. Pada tahun 2021 menurun lagi menjadi 16 orang. Pada pada tahun 2022 mengalami peningkatan lagi menjadi 23 orang. Pada tahun 2022 jumlah kematian balita ini adanya peningkatan yang disebabkan oleh penyakit leukimia, maningitis, kelainan bawaan dan gagal nafas.

4. Indikator Kinerja yang Berhubungan dengan RSUD

Persentase cakupan ayanan rujukan di Kota Sawahlunto sudah berjalan dengan baik dengan capaian 100 persen setiap tahunnya. Begitu pula dengan rasio daya tampung Rumah Sakit persatuan penduduk jumlahnya dari tahun 2018 adalah 0,0023. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,155. Persentase Rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi maka nilainya adalah utama. Sedangkan indikator Rumah Sakit terakreditasi adalah 100 %. Apabila dilihat secara keseluruhan maka indikator kinerja daerah yang berhubungan dengan RSUD ini telah mencapai target yang diharapkan.

Tabel 2.79
Indikator Kinerja Berhubungan dengan RSUD
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100	100	100	95
2.	Rasio daya tamping rumah sakit per satuan penduduk	0,0023	0,0022	0,0016	0,155	0,0016
3.	Persentase Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	utama	utama	utama	utama	utama
4.	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2022

5. Angka kematian Bayi

Angka Kematian Bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Tabel 2.80
Jumlah Kematian Bayi Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022

1.	Jumlah Kematian Bayi (bayi)	18	22	19	13	18

Sumber Data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2022

Jumlah kematian Bayi di Kota Sawahlunto tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah kematian bayi 18 orang meningkat menjadi 22 orang pada tahun 2019. Dan menurun pada tahun 2021 menjadi 13 orang dan naik lagi tahun 2022 menjadi 18 orang. Adanya angka kematian bayi ini disebabkan masih ada ibu hamil yang tidak mau memeriksakan kehamilan ke petugas Kesehatan, sehingga jika ditemukan resiko tinggi lainnya tidak terdeteksi secara Dini.

6. Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan

Kematian ibu menurut defenisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan atau cidera.

Tabel 2.81
Jumlah Kematian Ibu di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Puskesmas	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Talawi	0	2	0	1	1
2.	Kolok	0	1	1	0	0
3.	Sungai Durian	0	0	0	0	1
4	Lunto	0	0	0	0	0
5	Kap Teleng	0	0	0	0	0
6	Silungkang	0	0	1	0	0
	Jumlah Kematian Ibu	0	3	2	1	2

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel diatas angka kematian ibu di Kota Sawahlunto tahun 2018 tidak ada terjadi angka kematian ibu namun di tahun 2019 terjadi angka kematian ibu sebanyak 3 orang, 2 orang di kecamatan Talawi dan 1 orang di Kecamatan Barangin dan ditahun 2020 angka kematian Ibu sebanyak 2 Orang, 1 orang di Kecamatan Barangin dan 1 orang di Kecamatan Silungkang, Dan pada tahun 2021 jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang. 1 orang di kecamatan Talawi yang disebabkan karena pendarahan dan pada tahun 2022 angka kematian meningkat menjadi 2 orang yaitu 1 orang di kecamatan Talawi dan 1 orang di Kecamatan barangin.

Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemitraan bidan dengan dukun, meningkatkan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan program KIA dan Kespro, Pelaksanaan Review Maternal dan Parinatal (RMP) serta peningkatan sosialisai tentang kelas ibu dan program P4K.

7. Persentase Balita Gizi Buruk

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs adalah status gizi balita. Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja karena penyebab timbulnya masalah gizi ini adalah multifaktor, oleh karena itu pendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sektor terkait. Kurang gizi dipengaruhi oleh rendahnya konsumsi karbohidrat dan protein dalam makanan sehari-hari, tidak mendapatkan makanan bergizi seimbang pada usia balita, adanya penyakit infeksi, rendahnya ketahanan pangan keluarga dan pola asuh anak yang tidak baik serta faktor lingkungan yang jelek. Pada masyarakat dan ditingkat rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga dalam menyediakan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup dan ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, dan perilaku. Oleh karena itu penanganannya harus terpadu yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kemampuan dan ketrampilan asuhan gizi keluarga dan kualitas pelayanan kesehatan. Balita gizi buruk adalah balita usia 0 sampai dengan 59 bulan dengan tanda klinis gizi buruk atau

indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dengan nilai Z-score kurang dari -3 SD atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 sentimeter bagi balita 6 sampai dengan 59 bulan.

Tabel 2.82
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Sawahlunto
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Pencapaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,5	0,3	0,1	0,04	0,04

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2022

Berdasarkan data diatas pesentase balita gizi buruk di Kota Sawahlunto mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlahnya 0,5 % menurun pada tahun 2022 menjadi 0,04 %. Hal ini karena berbagai program dan kegiatan dengan cara tetap melacak kasus kasus yang muncul dilapangan, pemberian makanan tambahan pada balita ibu hamil dan menyusui, mengadakan konseling kedokter spesialis dan monitoring evaluasi dengan melakukan pemetaan dan kunjungan rumah.

8. Rasio Posyandu per satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. sehingga dalam pembangunan kesehatan peranan dan pemberdayakan masyarakat itu sangat penting guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan anggka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.83
Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Posyandu	Unit	103	103	103	103	104
2.	Jumlah Balita	Anak	6.138	6.040	5.983	4.578	6.663
3.	Rasio Posyandu/Jml Balita	Per 1.000 balita	16,79	17,05	17,22	44,01	15,61

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2022

Jumlah Posyandu dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan. Rasio Posyandu per jumlah balita pada Tahun 2021 yaitu 44,01 ini berarti bahwa setiap Posyandu pada Tahun 2021 rata-rata melayani 44 orang. Pada tahun 2022 turun menjadi 15,61 % berarti bahwa setiap posyandu melayani 15 orang balita. Disamping itu hal yang penting untuk melihat keberhasilan kegiatan program Posyandu dan peran serta masyarakat adanya peningkatan N/D dan D/S. Diharapkan juga adanya peningkatan untuk mencapai strata di Posyandu mulai dari Posyandu Pratama (Merah), Madya (Kuning), Purnama (Hijau) dan Mandiri (Biru) oleh masyarakat sebagai pengelola dan pemiliki posyandu yang didukung oleh Desa / Kelurahan, LPM, PKK dan OPD terkait. Berikut disajikan persentase D/S dan N/D di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.84
Persentase Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Sawahlunto

Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Sasaran Balita dari PUSDATIN	6.083	6.040	5.983	5.716	5663
2	Jumlah D/S	4.596	4.605	3.751	4.239	4213
3	Persentase D/S	75,6	76,2	62,7	68,9	74,3
4	Jumlah N/D	2.953	4.605	3.751	2.476	2351
5	Persentase N/D	69,5	67,5	66,7	63,9	64,6

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2022

Kegiatan pemantauan dan pembinaan terhadap posyandu dilaksanakan secara berkala dengan mengunjungi posyandu pada hari buka posyandu.Kegiatan penimbangan Balita di Posyandu berkaitan dengan cakupan pelayanan Gizi pada Balita, cakupan pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang pada balita. Dengan cakupan D/S yang tinggi diharapkan semakin tinggi pula cakupan vitamin A, cakupan imunisasi dan semakin rendahnya prevelensi gizi kurang. Cakupan balita ditimbang di Kota Sawahlunto Tahun 2018 adalah sebesar 75,6 % dan yang naik timbangannya 69,5 % dari jumlah balita sasaran 6.803 orang. Pada tahun 2022 cakupan balita ditimbang sebesar 74,3% dan yang naik timbangannya adalah 64,6% dari jumlah balita sasaran sebanyak 5.663 orang. Ini menunjukan kegiatan Posyandu perlu lebih ditingkatkan melalui peran serta masyarakat dan OPD terkait serta pihak swasta lainnya.

9. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, meningkatkan keadaan status gizi masyarakat, PHBS dan sebagainya dilaksanakan melalui jumlah sarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jumlah penempatan tenaga medis dan paramedis dimasyarakat. Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan praktek dokter merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat, semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan tersebut.

Tabel 2.85
Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto
Tahun 2018– 2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Puskesmas	Unit	6	6	6	6	6
2	Jumlah Praktek Dokter	Unit	29	48	48	48	10
3	Jumlah Pustu	Unit	23	26	26	26	26
4	Jumlah Total Puskesmas,Praktek Dokter dan Pustu	Unit	58	80	80	80	42
5	Jumlah Penduduk	Jiwa	61.898	62.524	65.138	65.687	64.470
6	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,94	1,27	1,22	1,22	0.65

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Pada tabel diatas, terlihat rasio puskesmas, praktek dokter dan Pustu per satuan penduduk yang ada di Kota Sawahlunto memperlihatkan trend kenaikan. Hal ini sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun yang yang diiringi penambahan jumlah Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu di Kota Sawahlunto.

10. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Berikut ini disajikan rasio Rumah sakit persatuan penduduk di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.86

Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	61.898	62.524	65.138	65.687	67.769
3	Rasio RSUD persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,0165	0,0159	0,0153	0,0152	0,0147

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Di Kota Sawahlunto, seperti yang terlihat pada tabel terdapat satu Rumah Sakit umum daerah. Rumah sakit dengan Tipe C ini merupakan milik Pemerintah Kota Sawahlunto. Apabila dilihat dari rasio perbandingan rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami penurunan dari tahun 2018 rasionya 0,0165 menurun menjadi 0,0147 dan pada tahun 2022.

11. Rasio Dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk di Kota Sawahlunto pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 0,048% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,63%.

Tabel 2.87
Rasio Dokter Per satuan Penduduk Di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter umum	Jiwa	23	25	25	30	33
2	Jumlah Dokter Gigi	Jiwa	7	8	7	12	10
3	Total Dokter	Jiwa	30	33	32	42	43
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	61.898	62.524	65.138	65.687	67.769
	Rasio Dokter persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,48	0,52	0,48	0,63	0,63

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Berdasarkan peraturan Kepmenko Bidang Kesra No 54 Tahun 2013 Standart target Rasio Kebutuhan SDMK pada tahun 2013 target dokter per 100.000 penduduk adalah 45 orang .Pada tahun 2020 Kota Sawahlunto telah mencapai 30 orang dengan jumlah penduduk yang tidak sampai 100.000 orang. Sehingga dengan kondisi ini sudah mencapai target standar rasio dokter per 100.000 penduduk. Pada tahun 2022 jumlah dokter umum dan dokter gigi meningkat jumlahnya menjadi 43 orang.

12. Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kota Sawahlunto, sudah dilengkapi dengan beberapa sarana penunjang seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.88
Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

No	Nama Sarana	2018	2019	2020	2021	2022
1	Polindes	4	6	6	6	6
2	Poskesdes	5	1	1	2	1
3	Puskesmas	6	6	6	6	6
4	Pustu	23	26	26	25	26
5	Puskesmas Keliling	17	17	10	8	8
6	Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C)	1	1	1	1	1
7	Klinik/Praktek Dokter	29	48	48	48	12
8	Bidan Praktek	27	25	25	25	4
9	Klinik KB	7	7	7	7	7
10	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1
	TOTAL	**120**	**120**	**138**	**136**	**72**

Sumber Data :Profil Kota Sawahlunto, 2022

Ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pelayanan kesehatan. Dari empat kecamatan yang ada

sudah didukung dengan keberadaan 6 Puskesmas induk, 25 Puskesmas Pembantu, 6 Polindes dan 1 Poskesdes/Poskeskel serta 1 Rumah Sakit Umum Daerah. Sarana ini ditujukan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena terkendala jarak. Dari sisi kualitas, dilakukan perbaikan dan pengadaan sarana prasarana pendukung serta akreditasi guna menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai standar.

Tabel 2.89
Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Tenaga Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokter umum	23	19	25	30	18
2	Dokter gigi	7	9	7	12	10
3	Perawat	214	127	231	234	111
4	Bidan	136	75	149	154	130
5	Sarjana Kesehatan Masyarakat	29	31	29	29	32
6	Ahli Gizi	24	18	20	22	15
7	Analisis Laboratorium	18	17	16	16	8
8	Perawat Gigi	12	10	10	10	8
9	Ahli Penyehatan Lingkungan	16	13	15	15	15
10	Tenaga Teknis Kefarmasian	30	40	49	49	17
11	Teknisi Elektromedis	4	1	1	1	1
12	Apoteker	10	9	7	7	6
13	Rekam Medis	22	7	7	7	8
14	Tenaga Keterapian Fisik	5	3	6	6	0
15	Refraksionis Optisien	0	0	0	0	0
16	Teknisi Transfusi Darah	5	5	5	5	0
	Jumlah	**555**	**384**	**577**	**579**	**379**

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2022

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaaan umum merupakan urusan kewenangan Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan ruang untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.90
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum (%)	84,00	84,00	85,26	86,00	91,67
2	Jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	77,00	60,00	99,86	90,00	93,33

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2022

Sesuai tabel diatas realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto mengalami peningkatan namun belum mencapai 100 %, hal ini disebabkan karena ada beberapa indikator belum terpenuhi. Upaya yang harus dilakukan oleh OPD pemangku SPM untuk mencapai realisasi SPM 100% adalah memastikan seluruh indicator yang merupakan syarat harus dipenuhi.

Realisasi indikator kinerja Daerah (IKD) untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.91

Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	77,03	92,5	78,00	93,23	94,66
2	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	43,96	43,98	46,75	44,21	44,91
3	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	84,69	79,27	66,98	81,71	83,06
4	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	42,38	47,35	48,35	45,95	46,87
5	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	-	-	-	11,11	17,09
6	Persentasi RT yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%) (SDGs)	77,00	78,00	81,00	85,45	85,10
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	88,00	93,69	95,24	62,32	85,32
8	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota	66,82	66,38	66,5	69,43	70,23
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	74,83	74,83	78,3	84,42	84,04
10	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah	74,83	74,33	78,3	84,42	85,57
11	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	54,96	59,45	62,34	66,90	69,40
12	Persentase luas sawah kewenangan kab/kota yang dilayani jaringan irigasi (%)	45,35	45,35	45,35	46,84	50,73
13	Persentase kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	86,00	86,00	87,50	84,15	84,15
14	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	77,03	92,5	78,00	93,23	98,00

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2022

Sesuai tabel diatas realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sudah cukup baik.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang masih rendah dari target sebesar (5,13 %) hal ini disebabkan karena adanya kegiatan penyusunan dokumen yang tidak jadi dilaksanakan terkait Penetapan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.

Faktor penyebab dari rendahnya beberapa capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto adalah:

1. Belum tersedianya dokumen/database kesesuaian tata ruang dengan IMB

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi pendukung pembangunan di Kota Sawahlunto. Status jalan di Sawahlunto terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Jalan nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan panjang 12,37 kilometer. Jalan provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Ruas jalan provinsi yang ada di Kota Sawahlunto yaitu Jalan Guguk Cino sampai dengan Sawahlunto (Lapangan Segitiga) dengan panjang 43,20 kilometer yang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar sangat strategis untuk pengembangan integrasi wisata sejarah (Kota Sawahlunto) dengan wisata budaya (Istana Pagaruyung). Status jalan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah jalan kota dengan panjang jalan 454,87 kilometer. Sesuai dengan Permen PU Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, disebutkan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah kondisi jalan mantap di bagi dengan panjang jalan kota. Indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap ini menggambarkan tingkat aksesibilitas pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota. Peningkatan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan sehingga dapat berkendara dengan selamat sampai tujuan. Berikut secara lengkap tabel proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kota Sawahlunto selama periode 2018-2022:

Tabel 2.92
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Sawahlunto
Tahun 2018– 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Kondisi Jalan baik (Km)	298,15	298,15	310,75	315,80	319,45
2	Panjang Jalan Kota (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87
3	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota	66,82	66,38	66,5	69,43	70,23

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2022

Sesuai tabel diatas, dari tahun 2018 hingga tahun 2022, terjadi peningkatan proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 3,97%. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun dilihat dari target akhir RPJMD Tahun 2023, pencapaiannya masih rendah sebesar 0,78%.
Upaya untuk meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi baik kedepannya adalah dengan pemeliharaan bangunan pelengkap seperti bahu jalan dan drainase karena salah satu penyebab kerusakan jalan adalah drainase dan bahu jalan yang tidak berfungsi dengan baik.

2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk didefenisikan dengan jumlah panjang jalan dibagi jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk kota sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.93
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Panjang Jalan Kota (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87
2	Jumlah Panjang Jalan Provinsi (Km)	30,65	30,65	30,65	43,20	43,20
3	Jumlah Panjang Jalan Negara (Km)	11,35	11,35	11,35	12,37	12,37
4	Jumlah panjang jalan total (Km)	496,87	496,87	496,87	510,44	510,44
5	Jumlah Penduduk (orang)	61.898	62.524	63.500	65.687	66.413
6	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (Km/orang)	0.0079	0.0079	0.0078	0,0077	0,0077

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2022

Dilihat dari tabel diatas rasio panjang jalan per satuan penduduk di kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 memiliki nilai yang cenderung menurun. Faktor yang mempengaruhinya adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk namun panjang jalan tetap atau tidak bertambah. Agar nilai indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk tidak menurun dapat diantisipasi dengan membuka jalan baru atau memperlebar jalan yang ada pada titik-titik tertentu.

Standar Pelayanan Minimal rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Sawahlunto adalah 0.74 kilometer per 100 penduduk. Dari data rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2022 adalah 0,007 kilometer per orang atau 0,77 kilometer per 100 orang. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sampai tahun 2022 sudah melebihi SPM rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, Menyikapi hal tersebut dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk perlu adanya pembangunan jalan baru. Mengingat terdapat jalan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan nasional di Kota Sawahlunto, maka perlu adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan nasional.

3. Panjang Dan Kondisi Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan diberi lebih tinggi dari permukaan jalan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 menyebutkan bahwa indikator yang digunakan untuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar dibagi dengan panjang jalan seluruh jalan kota dikalikan dengan 100. Data lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.94
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8
1	Panjang Jalan Yang Ada Trotoar (Km)	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
2	Panjang Seluruh Jalan Kota (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87
3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar (%)	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2022

Jalan yang memiliki trotoar di Kota Sawahlunto masih terlalu sedikit dibanding panjang jalan yang ada, persentasenya hanya 1,82% dari panjang jalan. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 panjang trotoar di kota Sawahlunto tidak mengalami peningkatan, karena pada rentang tahun tersebut Perangkat daerah terkait lebih fokus pada pembangunan drainase dan bahu jalan. Untuk tahun berikutnya perlu difokuskan untuk pembangunan trotoar sehingga akan memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki terutama di daerah pusat kota daerah yang lalu lintas baik orang atau kendaraan yang cukup ramai.

4. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tersedianya sistem drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase dilakukan perhitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota. Rincian drainase dalam kondisi baik Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Di Kota Sawahlunto Tahun 2018– 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (Km)	55,72	56,00	60,36	58,12	59,27
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	126,75	127,34	129,12	131,48	131,98

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat.(%)	43,96	43,98	46,75	44,21	44,91

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2022

Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat terjadi peningkatan namun mendekati angka 50%, hal ini disebabkan karena tingkat kerusakan drainase tidak seimbang dengan pemeliharaannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah lebih memprioritaskan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan drainase agar target drainase dalam kondisi baik semakin meningkat.

5. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jaringan irigasi keseluruhan dikali 100%. Irigasi di Kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.96
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajang Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km)	35,72	40,72	41,26	41,45	43,39
2	Panjang Saluran Irigasi (Km)	91,04	91,85	92,39	92,59	92,59
3	Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	42,38	44,33	44,66	44,77	46,87

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2022

Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,49% namun secara keseluruhan persentase saluran irigasi dalam kondisi baik hanya sebesar 46,87%, hal ini disebabkan oleh pemeliharaan irigasi tidak seimbang dengan tingkat kerusakannya. Untuk meningkatkan persentase saluran irigasi dalam kondisi baik maka harus lebih memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan irigasi. Dampak dari saluran irigasi yang baik adalah meningkatnya hasil pertanian dari masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian.

6. Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi

Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik adalah luas lahan pertanian yang terairi irigasi dibagi jumlah luas lahan pertanian seluruhnya dikali 100 persen. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001, status irigasi di Kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.571 Ha. Persentase luas lahan pertanian yang terairi irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97
Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Luas Lahan Terairi Irigasi (Ha)	762	762	762	787	797
2	Luas Lahan Budi Daya (Ha)	1.680	1.680	1.680	1.571	1.571
3	Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi	45,35	45,35	45,35	50,09	50,73

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2022

Perkembangan persentase luas lahan terairi irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2018 sampai 2020 memiliki nilai kecenderungan tetap, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu jaringan irigasi dan kondisi air yang kurang memadai serta adanya perubahan lahan pertanian. Tahun 2021 sampai tahun 2022 capaian persentase luas lahan terairi irigasi terjadi peningkatan, untuk persentase luas lahan terairi irigasi dalam kondisi baik diatas capaian RPJMDP sebesar 1,38%.

Sesuai target capaian RPJMDP persentase luas lahan terairi irigasi sudah baik namun masih di angka 50%, hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan lahan budidaya namun tidak didukung dengan ketersediaan sumber air. Langkah yang harus dilakukan adalah perlunya meningkatkan sumber air dengan cara membuat embung, memanfaatkan sawah tadah hujan dan memanfaatkan teknologi irigasi dengan panel tenaga surya.

7. Rasio Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budidaya pertanian. Sesuai dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001, status irigasi di Kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.680 Ha. Berikut tabel rasio jaringan irigasi kota Sawahlunto pada tahun 2018 – 2022 :

Tabel 2.98
Rasio Jaringan Irigasi Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	91,04	91,85	92,39	92,78	92,78
2	Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha)	1.680	1.680	1.680	1.571	1.571
3	Rasio Jaringan Irigasi	0,0542	0,0547	0,0549	0,0590	0,0590

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2022

Rasio jaringan irigasi dari Tahun 2018 – 2021 mengalami peningkatan setiap tahun, namun tahun 2022 tidak ada peningkatan karena tidak ada pembangunan saluran irigasi.

8. Sanitasi dan Air Bersih

a. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh oleh manusia terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat yang berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100° C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan.

Dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat memiliki keragaman akses terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksesibilitasnya dan ketersediaan sarana dan prasarananya. Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dibedakan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air). Selengkapnya cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.99
Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum
Tahun 2018- 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	16.542	16.542	16.542	16.542	16.603
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih (RT)	14.379	14.379	14.889	15.218	16.271
3	Persentase (%)	86,92	86,92	90,00	91,99	98,00

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2022

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2018 sampai tahun 2019 tetap dan pada tahun 2020 sampai tahun 2022 terjadi peningkatan, hal ini disebabkan oleh tersedianya sumber-sumber air bersih yang baru, baik yang disediakan oleh PDAM, maupun oleh program-program yang berbasis masyarakat, seperti Pamsimas yang bersumber dari dana DAK dan dana APBD.

Persentase penduduk berakses air minum

Tabel 2.100
Persentase Penduduk berakses Air Minum
Tahun 2018- 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	61.898	62.524	63.500	65.687	66.413
2	Penduduk berakses air minum	57.516	57.516	59.556	60.872	65.084
3	Persentase (%)	92,93	91,99	93,79	92,67	98,00

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2022

Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2018 sampai tahun 2021 cenderung naik turun dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan oleh tersedianya sumber-sumber air bersih yang baru, baik yang disediakan oleh PDAM, maupun oleh program-program yang berbasis masyarakat, seperti Pamsimas yang bersumber dari dana DAK dan dana APBD.

b. Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik

Jamban

Jamban sehat adalah pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penular penyakit, sekurang kurangnya untuk mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan yang mana kotoran diletakan pada suatu tempat atau jamban. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan rasa memiliki jamban sehat akan menjadi masalah untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang bersih. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.101
Persentase Rumah Tangga Yang Memenuhi Syarat
Tahun 2018 - 2022

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah (unit)	13.607	13.601	14.257	14.314	14.371
2	Jumlah rumah yang diperiksa (unit)	13.607	13.601	14.257	14.245	14.196
3	Jumlah rumah dengan jamban (unit)	12.702	12.714	13.352	13.558	13.633
4	Jumlah rumah dengan jamban yang memenuhi syarat (unit)	11.496	10.809	11.752	11.801	11.867
5	Persentase yang memenuhi syarat (%)	90,50	85,00	88,00	87,00	87,05

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2022

Dalam lima tahun terakhir ini Pemerintah Kota Sawahlunto telah memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembuatan jamban keluarga bagi keluarga miskin sehingga rumah yang selama ini tidak sehat dikarenakan tidak mempunyai jamban sehat menjadi sehat, hal ini dibuktikan bahwa tahun 2018 ini capaian rumah tangga yang mempunyai jamban sehat sudah 90,50%. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terjadi kenaikan hal ini disebabkan keseriusan pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan rumah dengan jamban sehat melalui program dan kegiatan di OPD terkait.Penyuluhan harus terus menerus disampaikan kemasyarakat agar masyarakat sadar akan manfaat jamban serta menghindarkan diri dari penyakit diare, cacingan dan lainnya.

Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Air Limbah adalah air bekas dari kamar mandi, dapur atau cucian yang dapat mengotori sumur, sungai dan lainnya yang dapat mengganggu masyarakat berupa pemandangan yang tidak nyaman, menjadi sarang penyakit, bau busuk dan mencemari air bersih karena tidak meresap kedalam tanah atau tergenang dan tidak mengalir. Ada faktor ekonomi, kebiasaan dan kualitas pendidikan yang berpengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat dalam memenuhi syarat kesehatannya. Penyuluhan harus terus dilakukan agar masyarakat dapat membuat pengelolaan air limbah yang sesuai dengan syarat kesehatan baik berupa septictank, sumur resapan, got dan lainnya. Persentase RT dengan SPAL yang memenuhi syarat sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2.102
Persentase Rumah Tangga dengan SPAL yang Memenuhi Syarat
Tahun 2018 - 2022

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah (unit)	13.607	13.601	14.257	14.314	14.371
2	Jumlah rumah yang diperiksa (unit)	13.607	13.601	14.257	14.257	13.362
3	Jumlah rumah dengan SPAL (unit)	13.148	13.173	13.983	14.192	13.351
4	Jumlah rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat (unit)	12.702	11.434	11.363	11.903	11.028
5	Persentase yang memenuhi syarat (%)	90,50	86,80	81,00	83,90	82,60

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2022

Di Kota Sawahlunto sesuai dengan hasil capaian cakupan SPAL di rumah tangga dari tahun 2018 sampai dengan 2021 terjadi peningkatan dan penurunan, hal ini karena sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada anggaran APBD 2022 tidak jadi terlaksana karena keterbatasan anggaran. Diharapkan hal ini terus ditingkatkan melalui penyuluhan dan pendekatan keluarga sehingga pemahaman akan fungsi dan manfaat SPAL dapat tercapai sesuai harapan serta angka penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan. Kenaikan dan penurunan persentase yang memenuhi syarat ini disebabkan banyak faktor salah satunya terkait perilaku penghuni rumah seperti adanya genangan air, tersumbat dan sebagainya.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara

layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan yang mengampu Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang perkembangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.103
Capain Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah warga negara terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/ kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2022

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sudah mencapai 100 %. Adapun setiap tahun diberikan bantuan untuk Rumah Layak huni untuk peningkatan/rehab dengan anggaran sebesar 20 juta rupiah bagi masing-masing rumah dengan rincian 17,5 juta rupiah untuk material dan 2,5 juta rupiah untuk upah. Sedangkan pembangunan rumah layak huni sebesar 40 juta dengan rincian 35 juta rupiah untuk material pembangunan rumah dan 5 juta rupiah untuk upah. Perkembangan jumlah penerima bantuan sebagai berikut :

Tabel 2.104
Penerima Bantuan RTLH Tahun 2018 -2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penerima bantuan RTLH	232	473	172	98	115

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2022

Selain SPM Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempunyai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terlihat dari perkembangan indikator kinerja daerah (IKD) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.105
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8
1	Penyedian dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang di kabupaten/kota yang ditangani (%)	60,00	65,00	70,00	75,00	79
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (kumuh tidak layak huni)(%)	6,40	5,40	11,29	10,08	1,15
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) (%)	62,00	65,00	70,00	75,00	80
5	Persentase RTLH (%)	7,48	4,01	2,62	10,63	7,38
6	Luas Pengurangan kawasan kumuh (hektar) (Sdgs)	42,58	32,62	0	49,37	42,15

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2022

Sesuai dengan tabel diatas, realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto

tahun 2022 sudah cukup baik. Kegiatan untuk pengurangan Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh tetap dilaksanakan setiap tahunnya, berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh yang ada di Kota Sawahlunto.

Pengertian perumahan sering dikaitkan dengan pembangunan sejumlah rumah oleh berbagai instansi baik pemerintah atau swasta dengan desain unit-unit rumah yang sama atau hampir sama. Jumlah rumah dan kelompok perumahan ini tidak tertentu, dapat terdiri dari dua atau tiga rumah atau dapat juga sampai ratusan rumah. Bentuknya pun tidak terbatas hanya pada bangunan satu lantai saja, yang berderet secara horizontal, melainkan dapat juga merupakan bangunan bertingkat yaitu merupakan rumah susun. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya.

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu; (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel yaitu; luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). (Badan Pusat Statistik, 2015). Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berikut ini adalah data rumah tidak layak huni Kota Sawahlunto dari tahun 2018 – 2022:

Tabel 2.106
Data Rumah Tidak Layak Huni
Tahun 2018 – 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Silungkang	29	9	246	246	315
2	Kecamatan Barangin	60	39	571	571	726
3	Kecamatan Talawi	110	31	365	365	318
4	Kecamatan Lembah Segar	99	85	339	339	302
	Total	**670**	**298**	**164**	**1.521**	**1.629**

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2022

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 – 2022 terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) di Kota Sawahlunto yang tersebar di 4 kecamatan, dengan jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) pada tahun 2022 sebesar 1.629 unit rumah. Peningkatan jumlah RTLH yang sangat besar ini disebabkan karena perubahan standar rumah yang layak huni dan pendataan ulang bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Permukiman kumuh atau *slum* merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah

perkotaan. Berdasarkan nota dinas dari Kementerian PUPR Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor: 242/ND-CK/2019 tanggal 26 Desember 2019, seluruh kabupaten/kota harus melakukan verifikasi ulang terhadap luasan kumuh. Verifikasi luasan kumuh Kota Sawahlunto berdasarkan pada baseline program KOTAKU bulan Juni tahun 2020.

Pada tahun 2020 dikeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang, perubahan ketiga atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 189.2/WAKO-SWL/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto pada tanggal 16 Juli 2019. Berikut Surat Keputusan Wali Kota Sawahlunto tahun 2020 – 2024:

Tabel 2.107
Surat Keputusan Walikota Sawahlunto
Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020
Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS KUMUH (Ha)
1	Talawi	Bukik Gadang	16,58
2	Talawi	Kumbayau	14,90
3	Talawi	Tumpuak Tangah	13,06
4	Talawi	Sikalang	2,94
5	Talawi	Rantih	11,03
6	Barangin	Durian II	14,89
7	Barangin	Santur	13,03
8	Barangin	Balai Batu Sandaran	2,00
9	Barangin	Lumindai	6,38
10	Lembah Segar	Air Dingin	3,20
11	Lembah Segar	Kubang Tangah	10,99
12	Lembah Segar	Pasar Kubang	7,45
13	Silungkang	Silungkang Duo	7,01
14	Silungkang	Silungkang Tigo	2,35
15	Silungkang	Taratak Bancah	3,60
16	Silungkang	Silungkang Oso	5,80
	JUMLAH		**135,21**

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2021

Adapun perkembangan pemukiman kumuh yang ada di Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.108
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Tahun 2018- 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Permukiman Kumuh (Ha)	42,58	9,36	135,21	85,84	43,69
2	Luas Permukiman)(Ha)	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63
3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	2,73	0,60	8,66	5,50	2,80

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2022

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh dari tahun 2018 – 2019 mengalami penurunan namun tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan adanya perubahan SK Kumuh pada tahun 2020 sehingga luasan kumuh Kota Sawahlunto bertambah menjadi 135,21 Ha. Untuk itu sangat perlu percepatan dalam mengatasi permukiman kumuh ini dalam menanggulangi kawasan pemukiman kumuh yang ada di Kota Sawahlunto dengan perbaikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi lingkungan kumuh tersebut.

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan air bersih. Berikut ini tabel rasio rumah layak huni:

Tabel 2.109
Rasio Rumah Layak Huni
Tahun 2018- 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah yang layak huni (unit)	12.589	13.056	13.884	12.793	12,685
2	Jumlah rumah (unit)	13.607	13.601	14.257	14.314	14.371
3	Rasio rumah layak huni	0,9252	0,9599	0,9738	0,8937	0,8862

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2022

Sesuai tabel diatas, terjadi penurunan rasio rumah layak huni di tahun 2022, disebabkan karena adanya perubahan standar rumah yang layak huni, sehingga rumah yang awalnya termasuk kategori layak huni di tahun 2020 menjadi rumah tidak layak huni di tahun 2022. Seiring dengan peningkatan jumlah rumah yang ada di Kota Sawahlunto terjadi juga penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah rumah yang layak huni di tahun 2022, ini disebabkan oleh adanya bencana longsor, kebakaran dan sebagainya. Untuk itu bantuan untuk RTLH ini tetap dilaksanakan setiap tahun dalam mengantisipasi untuk rumah-rumah yang tertimpa bencana karena keadaan geografis Kota Sawahunto yang rawan bencana.

2. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman yang layak huni didefinisikan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Hal ini menjadi urusan wajib pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman. Berikut ini tabel rasio permukiman layak huni:

Tabel 2.110
Rasio Permukiman Layak Huni
Tahun 2018- 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas permukiman yang layak huni (Ha)	1.519,05	1.552,27	1.426,42	1.475,79	1.515,79
2	Luas permukiman (Ha)	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63
3	Rasio permukiman layak huni	0,9727	0,9940	O,91354	0,9450	0,9706

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan tabel diatas, terjadi peningkatan rasio permukiman layak huni pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena program penanganan permukiman kumuh di tahun 2022 melalui program pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, sehingga mempengaruhi rasio permukiman layak huni.

3. Persentase Luas Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan

Menurut UU No.1 tahun 2011, permukiman yang tidak layak huni terjadi karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepandatan bangunanan dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Beberapa faktor pendorong timbulnya

permukiman kumuh diperkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat. Berikut tabel persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan tahun 2018 – 2022:

Tabel 2.111
Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawasan Perkotaan
Tahun 2018- 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas permukiman kumuh diperkotaan (Ha)	10,26	9,36	18,09	18,09	18,09
2	Luas permukiman kumuh (Ha)	42,58	9,36	135,21	85,84	43,69
3	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan (%)	24,09	100,00	13,38	21,07	41,40

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan SK Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/249/WAKO-SWL/2015 tanggal 18 November Tahun 2015, luas permukiman kumuh di Kota Sawahlunto adalah 42,58 Ha dan setelah dilakukan penanganan melalui berbagai program diantaranya Program KOTAKU, Sanimas, Pamsimas, BSPS dan DAK Perumahan sampai tahun 2019, tercatat luasan kumuh kota sawahlunto berkurang menjadi 9,36 Ha, dan seluruhnya berlokasi di wilayah perkotaan dan tidak bisa dilakukan penanganan atau intervensi karena berada di lokasi Tanah Milik PT. Bukit Asam dan PT. KAI. Pada tahun 2020 diterbitkan SK Walikota Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru di Kota Sawahlunto dan teridentifikasi seluas 135,21 Ha lokasi kumuh yang tersebar di 16 desa/kelurahan. Pada tahun 2022 sisa luas permukiman kumuh adalah 45,84 Ha, dengan luasan kumuh sebesar 18,09 Ha diantaranya berada di wilayah perkotaan. Persentase capaian realisasi luas permukiman kumuh dikawasan perkotaan tahun 2022 terjadi peningkatan karena luasan kumuh berkurang namun di luasan kumuh diperkotaan tetap. Permasalahan luas permukiman kumuh diperkotaan disebabkan oleh belum tersedianya sarana dan prasarana persampahan dan pengelolaannya.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (termasuk Penanggulangan Bencana dan Kebakaran)

Urusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Linmas. Keduanya bersinergi dalam mengupayakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Sawahlunto. Pencapaian keberhasilan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari indikator berikut ini :

Tabel 2.112
Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	0	0	0	0	0
Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda (IKD)	2,3	0,046	-50	-3300	33,06
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKD)	100	100	100	100	100

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (IKD)	100	100	100	100	100
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan (IKD	100	100	100	100	100
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda (IKD)	100	100	100	100	100
Jumlah Linmas per desa/kelurahan (IKD)	10	10	10	10	10
Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (linmas)	1 : 22,77	1 : 21,75	1 : 21,53	1 : 22,96	1 : 22,98
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100
Persentase penegakan perda	100	100	100	100	100

Sumber Data: Satpol PP & Pemadam Kebakaran, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat indikator pencapaian keberhasilan urusan ketentraman dan ketertiban dari tahun 2018 sampai dengan 2022, secara keseluruhan pencapaian sudah 100%, yakni persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan, persentase penanganan kasus pelanggaran Perda dan persentase penegakan Perda. Pada indikator persentase penurunan kasus pelanggaran Perda, dari tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan kasus. Hal ini disebabkan karena banyaknya terjadi pelanggaran kasus Covid-19 di Kota Sawahlunto di tahun 2020.

Penanganan atas pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto merupakan bentuk penegakan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto dimana semua pelanggaran 100% ditangani oleh Satpol PP. Ini merupakan salah satu cakupan SPM pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan msyarakat.

Selain pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat oleh petugas perlindungan masyarakat urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (angka kriminalitas) juga dipengaruhi oleh penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan). Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan.

Petugas Satpol PP dan Linmas juga menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dan berkonstribusi dalam menekan angka kriminalitas di Kota Sawahlunto. Berikut data kriminalitas di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.113
Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Curat (pencurian dan pemberatan)	19	21	19	9	6
Penggelapan	3	2	3	1	3
KDRT	3	3	4	-	1
Penipuan	19	3	3	2	4
Pengrusakan	3	4	2	1	3
Curanmor	23	6	8	7	4
Pembakaran	1	1	-	-	-
Anirat/Penganiayaan Pemberatan	-	1	1	1	1
Perkosaan	4	6	-	-	-
Pembunuhan	-	-	-	-	-
Jumlah kriminal	**75**	**47**	**40**	**21**	**22**
Jumlah penduduk	**61.898**	**62.524**	**63.138**	**65.687**	**66.413**
Angka kriminalitas (%)	**0,121**	**0,075**	**0,060**	**0,031**	**0,033**

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2023

Dilihat dari tabel di atas angka kriminalitas Kota Sawahlunto dari tahun 2018-2022 secara umum mengalami penurunan. Dari 0,121% menjadi 0,31% di tahun 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,033%, yakni menjadi 22 kasus dari 21 kasus di tahun 2021. Penambahan kasus di tahun 2022 terjadi pada kasus penggelapan, KDRT, penipuan dan pengrusakan. Sementara pada kasus pencuurian dan pemberatan serta pencurian kendaraan bermotor mengalami penurunan kasus.

Permasalahan tindak kriminalitas di Kota Sawahlunto dan dalam rangka sebagai upaya pembinaan kepada masyarakat selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto yang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Sawahlunto. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk pencegahan guna memberantas tindak kriminalitas dalam upaya menciptakan Kota Sawahlunto yang aman dan jauh dari kejahatan kriminalitas. Tindak kriminalitas menjadi bumerang bagi Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mengatasinya, baik itu untuk menekan jumlahnya dan tindakan pencegahan yang dilakukan.

Urusan ketenteraman dan ketertiban masyarakat juga mencakup pada indikator penanggulangan bencana daerah. Berikut indikator pencapaian urusan ketenteraman dan ketertiban pada aspek penanggulangan bencana daerah :

Tabel 2.114
Indikator pencapaian urusan ketenteraman dan ketertiban pada aspek penanggulangan bencana daerah Urusan Penanggulangan Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,47	0,49	0,44	0,56	0,50
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	210	238	395	330	450
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	185	213	147	290	450
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	204	117	599	339	525
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan evakuasi korban kebakaran (SPM)	78	85	75	56	87
6	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto (IKD)	100	100	100	100	100
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKD)	0	0	0	100	100
8	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (IKD)	33	34	33	33	33
9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (IKD)	100	100	100	100	100
10	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (IKD)	100	100	100	100	100
11	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (IKD)	100	100	100	100	100
12	Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana (IKD)	100	100	100	100	100
13	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	100	100	100	100
14	Tingkat waktu tanggap (response time rute) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (menit) (WMK) (IKD)	20	15	15	15	15

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar BPBD Kota Sawahlunto, 2022

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen dalam mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di Kabupaten, Kota dan Provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai 2022 fluktuatif mengalami peningkatan dan penurunan. Nilai penghitungan IKD dari tahun 2018-2021 merupakan nilai hasil peghitungan mandiri oleh Kota Sawahlunto. Sedangkan nilai IKD tahun 2022 merupakan nilai hasil penghitungan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sehingga terdapat penurunan nilai IKD didasarkan pada dua sumber data yang berbeda.

Kota Sawahlunto menjadi peringkat ke dua tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0,50 dengan kategori ”sedang”. Pengukuran IKD ini meliputi 7 pengukuran; Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penangangan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

Kota Sawahlunto merupakan kota yang relatif rawan longsor dan rawan bencana. Hal ini disebabkan karena tekstur wilayahnya berada di perbukitan dan pemukimannya banyak yang berada di lereng bukit. Sehingganya beberapa kawasan di Kota Sawahlunto menjadi daerah rawan bencana. Berikut data bencana alam yang terjadi di Kota Sawahlunto:

Tabel 2.115
Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banjir	4	12	-	2	1
2	Longsor	123	136	55	55	23
3	Gempa	-	1	-	-	-
4	Angin puting beliung	47	63	63	61	57
	Jumlah	174	212	118	118	81

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2023

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bencana yang paling sering terjadi adalah longsor dan puting beliung dengan jumlah kejadiannya fluktuatif tinggi. Bencana yang sering terjadi tidak hanya merusak infrastruktur kota tetapi juga menimbulkan kerugian materil bagi korban yang terdampak. Sebagai upaya penyelamatan bagi korban terdampak telah dilakukan dengan evakuasi korban ke daerah yang aman. Semua korban bencana telah mendapatkan pelayanan keselamatan 100%. Sebagai upaya pencegahan pemerintah Kota Sawahlunto juga mensosialisasikan zona rawan bencana kepada masyarakat agar masyarakat dapat berhati-hati dan mengantisipasi kemungkinan bencana yang akan terjadi. Upaya ini adalah sebagai bentuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Selain bencana alam, bencana non alam juga sering terjadi di Kota Sawahlunto. Bencana kebakaran juga selalu terjadi di Kota Sawahlunto. Setiap peristiwa bencana kebakaran yang terjadi menimbulkan kerugian baik materil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Berikut data kebakaran yang terjadi dari tahun 2018 sampai dengan 2022 di Kota Sawahlunto:

Tabel 2.116
Jumlah kasus bencana kebakaran di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kasus kebakaran	20	29	16	16	31
2	Kasus kebakaran yang ditangani	20	29	16	16	31
3	Persentase penangangan kebakaran (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Satpol PP dan Damkar, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumla kebakaran di Kota Sawahlunto sangat fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan jumlah kebakaran namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan dalam jumlah kasus kebakaran. Hal ini tentunya tidak lepas dari kewaspadaan masyarakat Kota Sawahlunto serta kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam pencegahan dan penanganan kebakaran yang terjadi. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan salah satu indikator dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Sebagai bentuk inovasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Kesatuan Politik dan Penanggulangan Daerah telah melakukan sosialisasi Perda dan Sosialisasi zona rawan bencana serta pelatihan penyelamatan dari bencana bagi masyarakat Kota Sawahlunto. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan dan mitigasi serta penanganan jika terjadi bencana di Kota Sawahlunto dengan harapan masyarakat Kota Sawahlunto cepat tanggap dalam penanganan bencana yang terjadi.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial (termasuk penanganan Pasca Bencana serta Taman Makam pahlawan)

Urusan Sosial adalah urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara melindungi rakyatnya. Kelompok masyarakat penerima layanan sosial antara lain adalah : masyarakat berkategori miskin, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan/pengemis terlantar, orang dengan gangguan jiwa terlantar dan korban bencana. Pelaksanaan urusan ini memiliki pengaruh dalam mendukung kemajuan pembangunan manusia .

Memenuhi amanat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Kota Sawahlunto telah dapat melaksanakan SPM Bidang Sosial dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.117
Capaian SPM Bidang Sosial Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Indikator	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar luar panti	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti (%)	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar pantI (%)	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti (%)	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh	100	100	100	100	100

No	Uraian	Indikator	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	gelandangan dan pengemis luar panti	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti (%)					
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2022

Pencapaian SPM di bidang Sosial sampai akhir Desember 2022 sudah mencapai 100. Terlaksananya capaian SPM adalah berkat kerjasama yang baik oleh semua pihak serta dukungan dana dari APBD Kota, Provinsi maupun APBN. Pelaksanaan SPM melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.118
Program dan Kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Sosial di Kota Sawahlunto

No	Program	Kegiatan
1	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
2	Program perlindungan dan jaminan sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
3	Program penanganan bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2022

Salah satu sasaran SPM adalah masyarakat dengan kondisi disabilitas. Adapun datanya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.119
Data Penyandang Disabilitas di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Penyandang Cacat	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyandang Tuna Netra	29	21	21	21	15
2	Penyandang Tuna Rungu	23	19	19	19	26
3	Penyandang Tuna Wicara	33	30	30	30	38
4	Penyadang Tuna Daksa	25	140	140	140	164
5	Penyandang Tuna Grahita	187	133	133	133	220
6	Cacat Lainnya/Mental Psikotik	86	19	44	44	29
	Jumlah	383	362	387	387	492

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2022

Ukuran ketercapaian pelaksanaan SPM tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang masalah sosial berikut:

Tabel 2.120
Data Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Sosial Tahun 2022

No	URAIAN	Jumlah	Target terbantu	Jumlah terbantu	% terbantu dari target
1	Jumlah Penyandang Disabilitas	492	191	191	100
2	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	103	96	96	100
3	Jumlah Penyandang gangguan jiwa (ODGJ)	21	21	21	100
4	Jumlah Lanjut Usia Terlantar	1.345	1.029	1.345	130

No	URAIAN	Jumlah	Target terbantu	Jumlah terbantu	% terbantu dari target
	Jumlah	1.645	1.337	1.653	100

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2022

Capaian pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang masalah sosial dari target yang ditetapkan telah mencapai 100%. Namun jika dilihat dari keseluruhan jumlah penyandang disabilitas, maka belum semuanya dapat terbantu oleh pemerintah (<50%). Diantara penyebab adalah ketersediaan anggaran yang terbatas serta jenis bantuan (kualitas dan kuantitas) yang diberikan tiap tahun belum menyentuh akar permasalahan sehingga tidak mampu mengangkat persoalan dan belum menaikkan derajat masyarakat menuju kesejahteraan.

Permasalahan kesejahteraan sosial ini cukup kompleks, perlu penanganan/ partisipasi bersama antara pemerintah, tokoh agama/adat, masyarakat serta pihak ketiga lainnya. Program kegiatan harus lebih tajam, terpadu (lintas sektoral) dan berkelanjutan mengingat Urusan Sosial adalah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayan Dasar.

Perhatian terhadap ABK di bidang kesehatan dan pendidikan/keterampilan diharapkan dapat menjadikan ABK mandiri dan punya penghasilan sendiri.

Untuk ODGJ sangat dibutuhkan upaya bersama berbagai pihak (keluarga, lingkungan, Pemerintah, tokoh masyarakat/agama, dan lainnya) dalam mencegah faktor pemicu gangguan jiwa & penanganan yang komprehensif untuk yang sudah mengalami gangguan jiwa. Dan untuk pengelolaan Panti Asuhan (2 unit di Sawahlunto) diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar dalam memperoleh kasih sayang dan kebutuhan dasar lainnya. Sehingga kebutuhan tumbuh kembang (fisik & mental) mereka dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan kondisi Kota Sawahlunto yang cukup luas dan keterbatasan ketersediaan panti asuhan di tiap kawasan Sawahlunto, maka diharapkan peran serta seluruh pihak / lapisan masyarakat untuk dapat saling membantu anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar lainnya yang ada dilingkungan masing-masing.

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki fasilitas 1 unit panti anak yatim piatu di Mudik Air dan 1 unit panti penyandang cacat di Waringin Lubang Panjang. Pemerintah menyiapkan biaya permakanan anak panti, transport ke sekolah, paket lebaran dan honor pengasuh.

Berikut adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto 2021 hasil pemutakhiran oleh Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai dasar pemberian bantuan-bantuan pemerintah.

Tabel 2.121
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto
Tahun 2022

URAIAN	L. SEGAR	BARANGIN	SILUNGKANG	TALAWI	JUMLAH
Jumlah penduduk DTKS (jiwa)	3.965	6.282	3.842	4.508	18.597
Jumlah kepala keluarga DTKS (jiwa)	1.353	2.236	1.275	1.571	6.435

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2022

DTKS ini memuat data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS diverifikasi rutin secara berjenjang mulai dari Petugas Sosial Masyarakat (PSM) ditiap desa kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Dinas Teknis Tingkat Kota, Provinsi dan Pusat. Kriteria penduduk yang belum sejahtera ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan status kesejahteraan berkategori :

a. Desil 1, yaitu rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah (sangat miskin) yang berhak menerima bantuan : Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
b. Desil 2, yaitu rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah (miskin) yang berhak menerima bantuan : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
c. Desil 3, yaitu rumah tangga dalam kelompok 20-30 persen terendah (hampir miskin) yang berhak menerima bantuan : Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sedangkan kelompok rumah tangga pada Desil 4 (rumah tangga dalam kelompok 30-40 persen terendah/rentan miskin) tidak dimasukkan sebagai penduduk yang belum sejahtera.

Pada tahun 2022, Kota Sawahlunto mendapat banyak jenis bantuan yang diterima oleh masyarakat yang terdata dalam DTKS seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.122
Jenis Bantuan Penanganan Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Jenis Bantuan	Penerima manfaat (org)	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana
I	**Kegiatan APBD Kota Sawahlunto**			
1	Bantuan permakanan untuk lansia	160	57.967.700,-	APBD
2	Penyediaan alat bantu untuk disabilitas	10	10.975.600,-	APBD
3	Bantuan transportasi sekolah anak berkebutuhan khusus	74	122.100.000,-	APBD
4	Bantuan uang tunai untuk lansia	127	190.500.000,-	APBD
5	Bantuan permakanan untuk disabilitas	25	11.900.000,-	APBD
6	Bantuan sosial untuk tukang ojek	300	135.000.000,-	APBD Dampak Inflasi
7	Bantuan korban bencana	12	6.000.000,-	APBD
8	Bantuan Tidak Terencana (BTT)	50	151.000.000,-	APBD
	Jumlah		685.443.300,-	
II	**Bantuan Sosial BLT BBM Pemprov Sumbar**			
1	Bantuan social keluarga kurang mampu (dampak inflasi)	130	78.000.000,-	APBD Prov. Sumbar
III	**Prog/Kegiatan dari Kementerian Sosial**			
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	1.655	5.040.625.000,-	APBN
2	BPNT/ Bantuan Pangan	1.465	3.499.200.000,-	APBN
3	BLT BBM Kemensos	2.372	1.423.200.000,-	APBN
4	Atensi rehabilitasi social (bantuan alat dengar, kursi roda, kaki palsu, tongkat, biaya hidup, anak sekolah, nutrisi, sembako, usaha ekonomi produktif)	399	805.000.000,-	APBN
5	Permakanan lansia & disabilitas	112	37.548.500,-	APBN
6	Rumah Sejahtera Terpadu (RST)	9	180.000.000,-	APBN
	Jumlah		10.985.573.500,-	
	T O T A L	**6.380**	**11.749.016.800,-**	

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2022

Pada tahun 2022, masyarakat Kota Sawahlunto mendapat banyak jenis bantuan, baik dari APBD Kota, provinsi dan Pemerintah Pusat untuk peserta DTKS sebagai bentuk dukungan dalam rangka pemulihan akibat dampak Pandemi Covid 19. Namun jumlah bantuan ini secara kuantitatif masih rendah, karena hanya 6.380 orang yang mendapat bantuan dari total 18.597 peserta DTKS (34,30 %). Namun angka ini meningkat dibanding tahun 2021 dengan jumlah masyarakat penerima manfaat yang sebanyak 30,67 %.

Tabel 2.123
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Sosial
Tahun 2022

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PPKS yang mampu hidup mandiri (%)	n/a	n/a	n/a	51,08	58,70

2	Persentase TKSK yang berpatispasi dalam penanganan PPKS (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	15,5	38,57	53,28	89,52	100
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2022

Dari keempat indikator IKD urusan sosial, masih terdapat 1 indikator dengan nilai masih rendah, yaitu persentase PMKS yang mampu hidup mandiri baru hanya 58,70 persen. Perlu upaya yang lebih besar lagi untuk mendorong PMKS agar terlepas dari masalah kesejahteraan sosial.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di Bidang Ketenagakerjaan yang menjadi urusan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja (15 sampai dengan 64 tahun). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Berikut ini dijelaskan tentang ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto.

1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adalah karena adanya pengaduan terkait masalah hak, masalah jamsostek, masalah upah pekerja, sistem kontrak kerja waktu tertentu dan PHK. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.124
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Sengketa Pekerja - Pengusaha	2	2	2	3	3
2	Jumlah Sengketa Selesai	2	2	2	3	3
3	Jumlah Perusahaan	86	86	80	66	58
4	Rasio Sengketa	2,33	2,33	2,50	4,55	5,17

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sengketa pekerja-pengusaha tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 2 sengketa, dan meningkat menjadi 3 sengketa pada tahun 2021 dan tahun 2022. Sengketa pada tahun 2018-2022 dipicu oleh masalah jamsostek, dan adanya hak-hak pekerja yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sengketa pengusaha dengan pekerja selama tahun 2018-2022 ini diselesaikan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat dengan status 100% terselesaikan.

2. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja adalah menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Objek perlindungan tenaga kerja antara lain meliputi perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja. Berikut disajikan jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja dan capaian indikator perlindungan tenaga kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.125
Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan dan Capaian Indikator Perlindungan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perusahaan	86	86	80	66	58
2	Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan	4.023	4.061	3.070	2.922	2.705
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (Orang)	2.877	2.927	2.679	2.125	2.125
	Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (%)	71,51	72,08	87,26	72,72	78,56
4	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan (Peraturan Perusahaan)	3	5	7	11	16
	Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (%)	3,49	5,81	8,75	16,67	27,59
5	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan (PKB)	2	2	2	2	2
	Persentase Perusahaan yang memiliki PKB (%)	2,33	2,33	2,50	3,03	3,45
6	Jumlah Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit (Perusahaan)	1	3	4	6	10
	Persentase Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit (%)	1,16	3,49	5,00	9,09	17,24
7	Struktur Skala Upah	-	-	-	-	-
8	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 (Perusahaan)	9	11	12	18	16
	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3 (%)	10,47	12,79	15,00	27,27	27,59
9	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Perserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	51,16	59,3	71,25	77,27	86,21

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase tenaga kerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan menunjukkan tren yang fluktuatif yaitu pada tahun 2018 sebanyak 71,51%, naik menjadi 72,08% pada tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 87,26%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 72,72%, dan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 78,56%. Persentase perusahaan yang memiliki

Peraturan Perusahaan, PKB dan LKS Bipartit dari tahun 2018-2022 rendah yaitu kurang dari 30%. Sedangkan untuk struktur skala upah belum ada, selama tahun 2018-2022 Kota Sawahlunto memakai dan berpedoman kepada Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat. Untuk persentase perusahaan yang menerapkan K3 menunjukkan tren yang meningkat yaitu 10,47% tahun 2018 naik menjadi 27,59% tahun 2022, tapi persentase ini juga rendah karena tidak sampai 30% dari perusahaan yang ada. Dengan rendahnya capaian indikator perlindungan tenaga kerja ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsostek.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari Kerja adalah individu yang berada dalam masa produktif yaitu umur 15-64 tahun dimana masih mencari pekerjaan. Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar/mengurus kartu AK-1. Berikut disajikan pencari kerja yang ditempatkan di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.126
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	2018			2019			2020			2021			2022		
		L	P	Jml		L	P	Jml	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	42	67	109	44	65	109	2	2	4	6	23	29	11	23	34
2	Jumlah Pencari kerja yang mendaftar/mengurus kartu AK-1 (Orang)	402	540	942	238	221	459	181	222	403	165	135	300	163	115	278
3	**Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)**	**10,45**	**12,41**	**11,57**	**18,49**	**29,41**	**23,75**	**1,10**	**0,90**	**0,99**	**3,64**	**17,04**	**9,67**	**6,75**	**20,00**	**12,23**

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022, Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2018-2019, persentase pencari kerja yang ditempatkan cenderung naik dengan pencari kerja perempuan lebih banyak dari pada pencari kerja laki-laki. Pada tahun 2018 jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 11,57%, dan naik menjadi 23,75% pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu hanya sebesar 0,99%, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 9,67%, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 12,23%. Rendahnya persentase pencari kerja yang ditempatkan ini disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaaan yang tersedia, tidak adanya pencari kerja yang melapor/mengembalikan kartu pencari kerja (kartu AK-1) ke DPMPTSPNaker saat mereka sudah diterima bekerja.

Faktor lain yang menyebabkan pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan adalah sebagai berikut :

a. Persaingan dunia kerja
   Banyaknya persaingan dalam dunia kerja dapat menyulitkan pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan impiannya.
b. Kemampuan, skill dan pendidikan
   Kemampuan, skill dan pendidikan seseorang juga termasuk faktor penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan.
c. Pengalaman
   Pengalaman juga menentukan apakah seseorang layak bekerja untuk perusahaan tersebut atau tidak. Orang yang berpengalaman adalah orang yang terbiasa dengan dunia kerja dan memahami kemampuan yang dimilikinya.
d. Minim informasi pekerjaan/networking dan lowongan kerja.

4. Pelatihan Tenaga Kerja

Untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan skill tenaga kerja di Kota Sawahlunto maka Dinas yang membidangi tenaga kerja yaitu Dinas PMPTSPNaker telah melakukan berbagai upaya yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan. Pada pertengahan tahun 2019 DPMPTSPNaker telah mendirikan/membentuk UPTD Balai Latihan Kerja (UPTD dari Dinas PMPTSPNaker), yang mana UPTD BLK ini khusus bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan dan keterampilan kerja berbasis kompetensi untuk mencetak tenaga kerja yang handal dan siap pakai. Pelatihan yang telah dilaksanakan di UPTD BLK antara lain adalah service hp, otomotif, menjahit, listrik, las, mebel, tata boga, bangunan, ac split dan lain-lain.

Berikut disajikan besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, kewirausahaan, dan berbasis masyarakat selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.127
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kewirausahaan Dan Masyarakat Tahun 2018-2022

No	Kategori	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tenaga Kerja yang dilatih	Orang	106	166	86	160	128
2	Pendaftar Pelatihan berbasis Kompetensi	Orang	120	223	125	200	150
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi**	**Persen**	**88**	**74**	**69**	**80**	**86**
No	**Kategori**	**Satuan**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Tenaga Kerja yang dilatih	Orang	40	90	106	92	90
2	Pendaftar Pelatihan berbasis kewirausahaan	Orang	60	100	120	105	110
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan**	**Persen**	**67**	**90**	**88**	**88**	**82**
No	**Kategori**	**Satuan**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Tenaga kerja yang dilatih	Orang	-	40	-	115	-
2	Pendaftar Pelatihan berbasis masyarakat	Orang	-	50	-	170	-
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat**	**Persen**	**-**	**80**	**-**	**68**	**-**

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022
Dinas Koperindag Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama tahun 2018-2022 besaran tenaga kerja Kota Sawahlunto yang mendapat pelatihan menunjukkan tren fluktuatif dan tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sarana dan prasarana pelatihan BLK, masih terbatasnya instruktur yang ada di BLK, masih terbatasnya daya tampung BLK dan paket-paket pelatihan yang ada di BLK, serta masih kurangnya minat pencari kerja Kota Sawahlunto untuk mengikuti pelatihan, baik pelatihan yang berbasis kompetensi, berbasis masyarakat maupun pelatihan berbasis kewirausahaan.

Untuk mendukung program unggulan Provinsi Sumatera Barat dalam mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif maka Kota Sawahlunto melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja dengan peserta pelatihan sebanyak 16 orang per paket untuk masing-masing jenis pelatihan, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pelatihan

kewirausahaan dengan peserta pelatihan sebanyak 30 orang per angkatan. Yang mana dengan adanya pelatihan ini diharapkan agar para lulusan pelatihan bisa bekerja mandiri atau berwirausaha, dan membuka/menciptakan lapangan kerja baru. Berikut disajikan data UMKM Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.128
Jumlah UMKM Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
UMKM Kota Sawahlunto	-	3.708	3.708	4.114	4.328

Sumber : Dinas Koperindag Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM Kota Sawahlunto selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upayanya untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha/ UMKM karena UMKM adalah jarring pengaman dan penggerak perekonomian.

5. Lapangan Usaha Penduduk yang Bekerja

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Pada tahun 2018 di Kota Sawahlunto penduduk yang bekerja terbesar adalah di lapangan usaha lainnya yaitu sebanyak 8.298 orang (laki-laki sebanyak 7.435 orang dan perempuan sebanyak 863 orang) yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.129
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Di Kota Sawahlunto Tahun 2018

No	Menurut Lapangan Usaha	Tahun 2018		
		L	P	Jml
1	Pertanian	3.179	1.812	4.991
2	Industri Pengolahan	1.139	3.088	4.227
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	2.548	3.040	5.588
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	2.631	4.585	7.216
5	Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan)	7.435	863	8.298
	Total	**16.932**	**13.388**	**30.320**

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

Sedangkan sejak tahun 2020 terjadi perubahan penyajian data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang mana lapangan usaha dibagi menjadi tiga kategori saja yaitu pertanian, manufaktur dan jasa seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.130
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2019 s.d 2022

No	Lapangan Usaha Tiga Kategori	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	2.658	1.369	4.027	3.710	1.936	5.646	3.628	1.919	5.547	2.881	1.765	4.646
2	Manufaktur	6.350	2.017	8.367	5.521	1.840	7.361	5.295	2.055	7.350	5.945	2.821	8.766
3	Jasa	7.930	8.793	16.723	8.179	9.124	17.303	8.666	8.623	17.289	9.454	9.409	18.863
Total		**16.938**	**12.179**	**29.117**	**17.410**	**12.900**	**30.310**	**17.589**	**12.597**	**30.186**	**18.280**	**13.995**	**32.275**

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2019 di Kota Sawahlunto penduduk yang bekerja terbanyak ada pada lapangan usaha Jasa yaitu berjumlah 16.723 orang (laki-laki sebanyak 7.930 orang dan perempuan sebanyak 8.793 orang). Dan pada tahun 2020 penduduk yang bekerja terbanyak juga ada pada lapangan usaha Jasa yaitu meningkat menjadi 17.303 orang (laki-laki sebanyak 8.179 orang dan perempuan sebanyak 9.124 orang), sedangkan pada tahun 2021 penduduk yang bekerja terbanyak juga ada pada lapangan usaha Jasa yaitu menurun menjadi 17.289 orang (laki-laki sebanyak 8.666 orang dan perempuan sebanyak 8.623 orang), dan pada tahun 2022 penduduk yang bekerja terbanyak juga ada pada lapangan usaha jasa yaitu meningkat menjadi 18.863 orang (laki-laki sebanyak 9.454 orang dan perempuan sebanyak 9.409 orang). Secara keseluruhan penduduk Kota Sawahlunto yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja paling banyak pada sektor jasa seperti : Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan perusahaan dan jasa kemasyarakatan lainnya. Untuk itu perlu peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi angkatan kerja dalam menambah skill untuk dapat menciptakan lapangan usaha sendiri dalam meningkatkan wirausaha di Kota Sawahlunto.

6. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Jumlah pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir yang terbanyak adalah tamatan SLTA yaitu pada tahun 2018 sebesar 53,97% atau sebanyak 999 orang, dan pada tahun 2022 jumlah pengangguran terbuka yang tamat SLTA mengalami penurunan menjadi 26,21% atau sebanyak 445 orang. Akan tetapi pada tamatan perguruan tinggi mengalami peningkatan dari 15,56% atau sebanyak 288 orang tahun 2018 naik menjadi 20,32% atau sebanyak 345 orang pada tahun 2022. Sehingga pengangguran di Kota Sawahlunto banyak dari pengangguran terdidik yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.131
Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Kegiatan Utama	2018					2019					2020					2021					2022				
		Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan					Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan					Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan					Pendidikan yang ditamatkan					Pendidikan yang ditamatkan				
		SD ke bawah	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	PT	Jml	SD ke bawah	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	PT	Jml	SD ke bawah	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	PT	Jml	SD ke bawah	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	PT	Jml	SD ke bawah	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	PT	Jml
1	Bekerja	3642	5543	9819	10961	29965	7761	5336	10325	5695	29117	8867	4841	9969	6633	30310	8299	4995	10275	6617	30186	8.612	4.471	12.040	7.152	32.275
2	Pengangguran Terbuka	292	272	999	288	1851	488	285	840	519	2132	476	286	1377	570	2709	170	368	981	538	2057	452	456	445	345	1.698

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2023

Banyaknya pengangguran terdidik di Kota Sawahlunto sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kota Sawahlunto, oleh karena itu diperlukan pelatihan-pelatihan untuk menambah skill angkatan kerja agar mereka dapat diarahkan untuk membuka lapangan usaha/berwirausaha. Setiap tahun Dinas PMPTSPNAKER khususnya UPTD BLK mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi, agar penganggur-penganggur terdidik yang banyak di Kota Sawahlunto mempunyai kompetensi sehingga dapat bersaing di dunia kerja dan juga dapat membuka lapangan usaha sendiri. Namun dalam kenyataannya para penganggur terdidik tersebut masih kurang berminat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Kota Sawahlunto.

Berikut disajikan capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Kota Sawahlunto secara keseluruhan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.132
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Pengangguran (%)	5,75	6,82	8,20	6,38	5
2	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Orang)	109	109	4	29	34
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Berwirausaha (Orang)	5	10	15	31	0
4	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu Rencana Tenaga Kerja (%)	60	88	64	100	67
5	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	5,66	5,06	10,9	65,63	76,56
6	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	87,586	96,044	91,089	93,738	91,161
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Perserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	51,16	59,3	71,25	77,27	86,21
8	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota) (%)	11,57	23,75	0,99	9,67	12,23
9	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	0	0	0	0
10	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek (%)	71,51	72,08	87,26	72,72	78,56
11	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0
12	Rasio Lulusan S1/S2/S3	6,34	6,59	6,91	7,42	7,46

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa capain indikator kinerja urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 masih tergolong rendah terutama pada jumlah tenaga kerja yang berwirausaha dan persentase tenaga kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang berwirausaha tidak ada alias nihil, dan persentase tenaga kerja yang ditempatkan hanya 12,23%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat dan motivasi angkatan kerja Kota Sawahlunto untuk berwirausaha, kurangnya skill pencari kerja, mismatch antara kualifikasi pendidikan dengan pekerjaan (dudi), minimnya informasi lowongan kerja dan terbatasnya lapangan kerja yang ada di Kota Sawahlunto serta kurangnya minat dan motivasi pencari kerja Kota Sawahlunto untuk bekerja di luar daerah/luar negeri. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan seperti pelaksanaan Job Fair, pemagangan pencari kerja, pelatihan keterampilan dan vokasi bagi pencari kerja, penyuluhan kewirausahaan, penyediaan fasilitas informasi ketenagakerjaan, mengadakan MoU dengan perusahaan-perusahaan lokal tentang penginformasian lowongan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja lokal untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia di perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Kota Sawahlunto, meningkatkan koordinasi di dalam menguatkan fungsi-fungsi pelayanan

penempatan tenaga kerja antara pemerintah provinsi, kota serta industri dan perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Gambaran umum pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran di dalam kehidupan berumah tangga. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.133
Jumlah KDRT Di Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah KDRT	6	7	5	3	3
2.	Jumlah Rumah Tangga/ KK	19.394	19.394	20.330	20.658	21.258
3.	Rasio KDRT	0,03	0,03	0,02	0,0145	0,0141
4.	Persentase bantuan penanganan KDRT (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA Tahun 2022
data Disdukcapil 2022

KDRT ibarat fenomena gunung es, dimana kasus yang terlaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data di atas rasio KDRT mengalami penurunan, Pemerintah Sawahlunto harus tetap waspada. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagi korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat di antaranya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diharapkan KDRT makin dapat ditekan.

Kepedulian Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan penelantaran. Berikut data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan :

Tabel 2.134
Data Kasus Penyelesaiannya Dibantu Oleh P2TP2A
Kota Arang Berdasarkan Perempuan dan Anak sebagai Korban
Tahun 2022

NO	Jenis Kasus	Tahun 2022	
		Perempuan	Anak
1	Kekerasan Fisik	0	1
2	Kekerasan Seksual	1	8
3	Kekerasan Psikis	0	0
4	Penelantaran Rumah Tangga	0	1
5	Eksploitasi	0	0
6	Trafficking	0	0
7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3	0
8	Pemenuhan Hak Anak	0	0
9	Anak Berhadapan dg Hukum	0	1
10	Kenakalan anak	0	2
Jumlah Jenis Kasus		4	13
Total		**17**	
Persentase bantuan penanganan kasus (%)		**100**	

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2022

Masih terdapat banyak kasus tahun 2022 yang harus diselesaikan oleh P2TP2A Kota Arang. Dari data diatas diketahui bahwa jumlah korban anak-anak lebih banyak. Anak-anak adalah warga Negara yang rentan dikenai tindakan kekerasan ketika ada masalah dalam keluarga atau lingkungannya. Faktor penyebab seperti : ketimpangan ekonomi, metal & spritual orang tua yang lemah, lingkungan yang tidak kondusif dan lainnya mengakibatkan perempuan dan anak-anak sering jadi korban. Hal ini adalah PR besar bagi Pemerintah Kota dan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah memfasilitasi semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, bantuan hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit, outreach,* sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan lainnya.

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis Hak Anak dan pembangunan yang Responsif Gender.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang Pengarusutamaan Gender maka Indeks Pembanguan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.135
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,68	95,51	95,48	95,73	95,73*
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,33	66,18	65,87	65,48	65,48*

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022
**Kondisi s/d 2021*

Yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah keberperanan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Partisipasi Anak dalam Pembangunan dilakukan sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dengan menggunakan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana tercantum pada Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: non-Diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan menghargai partisipasi anak. Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan dalam wadah Forum Anak.

Tabel 2.136
Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Forum Anak Tk. Kota Sawahlunto	1	1	1	1	1
2	Forum Anak Tingkat Kecamatan	4	4	4	4	4
3	Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan	23	37	37	37	37

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2022

Forum Anak dibina oleh Pemerintah secara berjenjang dalam rangka memenuhi hak partisipasi anak. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

Tabel 2.137
Kasus Kenakalan Remaja 5 Tahun Terakhir
Tahun 2018 – 2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kenakalan Remaja	9 orang	3 orang	5 orang	-	2 orang
Kasus Kenakalan Remaja yang Terselesaikan	9 kasus	3 orang	5 orang	-	2 orang
Persentase (%)	100	100	100	-	100

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2022

Tahun 2022 terdapat dua kasus kenakalan remaja yang diselesaikan oleh P2TP2A. Diharapkan kedepan tidak ada kasus di tahun-tahun berikutnya. Perlu peran serta keluarga, lingkungan dan Pemerintah untuk menjaga, mengawasi dan melindungi remaja dari tindak kenakalan.

Data kenakalan remaja yang ditampilkan diatas merupakan data kenakalan remaja yang diselesaikan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto., Kasus tersebut berdasar laporan yang diterima melalui masyarakat dan dibantu penyelesaian nya oleh P2TP2A sehingga bisa normal kembali. Dalam hal ini belum termasuk data kenakalan remaja yang terdapat pada sekolah-sekolah. Untuk kedepannya akan diupayakan kerja sama dengan Instansi terkait sehingga keseluruhan data kenakalan remaja akan bisa terpantau dan terselesaikan dengan sempurna.

Tabel 2.138
Predikat Kota Layak Anak Kota Sawahlunto
Tahun 2018- 2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2022

Dalam perwujudan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sementara di Kota Sawahlunto diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang perlindungan Perempuan dan Anak, maka dikembangkan Program Kota Layak Anak yang terdiri dari Kelembagaan dan 5 Klaster pemenuhan hak anak, yaitu : 1. Hak sipil dan Kebebasan, 2. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4. Pendidikan, 5. Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Dalam penilaian KLA terdiri dari predikat Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Pemerintah Kota Sawahlunto akan berupaya untuk meningkatkan kriteria KLA menjadi Utama.

Tabel 2.139
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pemberdayaan gender / IDG (IKU OPD)	95,68	95,51	95,48	65,48	65,48*
2	Persentase Penanganan dan penyelesaian pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak (IKU OPD) (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	20	20	20	20	20
5	Rasio KDRT	0,03	0,03	0,02	0,0145	0,0141
6	Persentase Kelurahan ramah anak (%)	n/a	n/a	n/a	51,35	50
7	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai (%)	100	100	100	100	100
8	Total fertility rate	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
9	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	11,7	16,5	5,3	3,4	4,4
10	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100
11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,019	0,029	0,012	0,019	0,02

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2022
**kondisi s/d 2021*

Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu dilakukan berbagai upaya untuk menekan angka Rasio KDRT dan Rasio kekerasan terhadap perempuan. Serta mendorong peningkat an nilai indikator lainnya.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.140
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Bidang Pangan
Tahun 2018 - 2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketahanan Pangan	64,17	65,89	67,36	68,91	73,85
Konsumsi keragaman pangan (kkal/kapita/hari)					
padi-padian	907,70	870,20	858,40	944	995,2
Umbi-umbian	66,20	35,90	38,60	32,2	62,6
Pangan Hewani	290,00	231,10	238,30	236,3	247,4
Minyak dan Lemak	279,90	350,80	310,50	343	314,3
Buah/Biji Berminyak	36,30	49,60	45,70	39,9	34,3
Kacang-kacangan	98,50	80,60	64,20	71,8	53,3
Gula	24,10	39,40	33,20	21,3	25,4
Sayur dan buah	90,30	126,80	112,30	106,7	104,4

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
lain-lain	9,30	9,60	10,60	9,5	11,3
Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi (%)	81,57	90,1	96,33	95,14	97,11
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	152	191	184	165	184,2
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	87,30	86,50	83,70	84,5	85,1
Ketersediaan Pangan Utama (Kal/hr)	3569,7	3564	3131	3027	3133
Ketersediaan Energi Protein Perkapita Gr/Kap/hr)	127,6	114,3	108,3	100,46	106,2
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan kali)	4	4	4	4	4

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Mulai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan indeks Ketahanan pangan ini menandakan bahwa kondisi terpenuhinya pangan kota Sawahlunto yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu yang mengalami peningkatan di lima tahun terakhir. Untuk konsumsi keragaman pangan seperti padi padian pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu sebesar 995,2 kal/hr dan tahun 2021 sebesar 944 kal/hr dan untuk umbi-umbian dan pangan hewani mengalami peningkatan pada Tahun 2022, untuk minyak dan lemak mengalami penurunan walaupun tidak terlalu banyak turunnya. Dan untuk buah dan biji berminyak mengalami penurunan dari pada Tahun 2021. Sedangkan Kacang- kacangan mengalami penurunan. Untuk Gula mengalami peningkatan dari pada Tahun 2021, sayur dan buah mengalami penurunan pada Tahun 2022 ini dan lain-lain pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari pada Tahun 2021. Dan untuk Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 95,14 % sedangkan tahun 2022 sebesar 97,11 %. Secara keseluruhan untuk konsumsi keragaman pangan yang paling besar konsumsi keragaman pangan kota Sawahlunto sampai 2022 adalah pada padi-padian, ini dikarenakan konsumsi keragaman pangan sangat berpengaruh dari pola konsumsi masyarakat, untuk Sumatera Barat pada umumnya menjadi padi-padian sebagai bahan utama yang wajib di konsumsi terutama beras. Dengan konsumsi keragaman pangan ini agar pola konsumsi tidak berfokus pada satu jenis bahan pangan saja, sehingga itu perlu adanya diversifikasi produk untuk makanan pokok di Kota Sawahlunto dengan menggiatkan sosialisasi terhadap aneka ragam konsumsi untuk beberapa bahan pangan. Untuk Ketersediaan Pangan Utama mengalami peningkatan yang pada Tahun 2021 sebesar 3027 Kal/hr pada Tahun 2022 naik menjadi 3133 Kal/hr, yang mana seiring dengan menurunnya produksi tanaman padi di Kota Sawahlunto pada tahun 2022. Untuk konsumsi keragaman pangan padi-padian di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan di Tahun 2022, namun secara ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, ini berarti Kota Sawahlunto masih perlu meningkatkan ketersedian pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan. Ini terlihat dari persentase ketersediaan pangan terutama beras di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan di Tahun 2022, dimana jumlah protein yang tersedia mengalami penurunan di Tahun 2022. Begitu juga dengan Ketersediaan Energi Protein Perkapita juga mengalami Penurunan pada Tahun 2021 walaupun tidak begitu signifikan. Dilihat dari keamanan pangan Berdasarkan itu Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dari untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 97,14 % ini ditandainya dengan dilakukannya pengawasan dan

pembinaan terhadap keamanan pangan setiap triwulannya sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Pada Urusan Bidang Pangan Tahun 2022 mempunyai Inovasi Kampung manggis, dengan memfokuskan pengembangan kawasan Holtikultura khususnya tanaman manggis untuk menjadi satu desa/kampung sebagai sentra pengembangan tanaman manggis menjadi contoh atau model serta kedepannya dapat dijadikan tempat Agro Wisata. Selain itu ada juga inovasi Mamareso Kaladang (MAK ADANG) yaitu dengan Pemeriksaan Cemaran Pestisida pada lahan lahan para petani terpilih di Kota Sawahlunto sehingga pencemaran Pestisida dapat terdeteksi. Adapun Inovasi di Bidang Ketahanan Pangan yaitu Informasi Via Billboard Running Texs (Info Barek) yaitu menyampaikan Info Harga Pasar Pagan hasil Survey pada 2 Pasar Utama di Kota Sawahlunto sebagai bahan Informasi Harga Pangan dan Fluktuasi Harga sehingga di ketahui Masyarakat.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program Kegiatan Pertanahan yang dilaksanakan disusun sebagai upaya yang strategis pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengendalikan tata administrasi pertanahan dan tata batas wilayah dengan tetap memperhatikan prinsip yang efektif dan efisien serta tetap menjaga stabilitas dan kondisi yang aman dan nyaman dalam penguasaan status hak atas tanah dengan meminimalisir timbulnya konflik dan masalah pertanahan dan tapal batas wilayah Kota Sawahlunto.

Secara nasional isu pemberitaan bidang pertanahan terfokus pada pengelolaan hutan, alih fungsi hutan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di Kota Sawahlunto, selain isu nasional tersebut, masih terdapat beberapa isu lainnya yang meliputi;

a. Terdapat Kawasan Permukiman dilokasi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang berada di 11 desa/kelurahan (Talawi Mudik, Kolok nan Tuo, Kolok Mudik, Talago Gunung, Santur, Balai Batu Sandaran, Lumindai, Lunto Barat, Lunto Timur, Kubang Tangah dan Kubang Utara Sikabu).
b. Isu terhambatnya pelaksanaan kegiatan redistribusi Tanah karena persoalan non teknis (Ninik Mamak). Kota Sawahlunto memiliki objek Redistribusi Tanah, yang tersebar di Kecamatan Talawi, Barangin dan Lembah Segar yaitu Datar Mansiang, Salak, Rantih, Batu Tanjung, Talago Gunung dan Air Dingin, Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak memperoleh izin ninik mamak.
c. Isu adanya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) Tanah Ulayat Nagari dan Kaum, sampai saat ini telah di inventarisasi dan identifikasi baru Balai Batu Sandaran-Lumindai, Lumindai-Lunto dan Lunto-Balai Batu Sandaran. untuk Kubang-Lunto, Kubang-Balai Batu Sandaran masih dalam proses, sedangkan Silungkang-Taratak bancah sampai saat ini belum ada kesepakatan, untuk itu perlu dilakukan inventarisasi khusus.
d. Isu penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) Tanah Pasca Tambang yang masih belum jelas penyelesaian status haknya, isu ini sangat berpotensi sebagai bom waktu yang sangat serius terutama adanya kepentingan-kepentingan banyak pihak, baik PT.BA, Pemerintah Daerah, Ulayat Nagari dan masyarakat, banyak yang selama ini memanfaatkan dan menguasai tanah pasca tambang tersebut melalui SIPT dan sewa pakai dari PT.BA (Persero) UPO.Tbk. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan, dan harus diantisipasi dengan melakukan dialog-dialog dan sosialisasi yang intensif, terutama dengan masyarakat adat, dan dilakukan kebijakan-kebijakan yang inovatif dengan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak PT.BA dalam pemanfaatan aset-aset pasca tambang yang saling menguntungkan semua pihak tanpa menerobos regulasi dan aturan hukum yang telah ada.

e. Isu adanya persoalan-persoalan penyerahan P3D khususnya yang menyangkut tanah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Provinsi maupun sebaliknya terkait dengan diundangkannya PP No. 44 tahun 1990 tentang perluasan wilayah derah.
f. Isu adanya persoalan-persoalan tapal batas pasca diundangkannya PP No 44 tahun 1990 Tentang Perluasan Wilayah Daerah Kota Sawahlunto pada 27 tahun yang silam tanah pemda yang sudah dibebaskan tetapi belum dimanfaatkan, adanya tanah pemda yang dipakai oleh Instansi vertikal dan masyarakat umum. Untuk tapal batas Sawahlunto-Solok, Sawahlunto-Tanah Datar telah selesai, sedangkan untuk Tapal Batas Sawahlunto Sijunjung saat ini sedang menunggu SK Kementerian Dalam Negeri.
g. Isu adanya kebutuan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur daerah
h. Isu banyaknya tanah yang telah dikuasai tidak terpelihara dan termanfaat (Penatagunaan Tanah) sementara karena belum adanya kepastian hukum. Saat ini telah ada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar tanah-tanah terdata dan dapat disertifikatkan.

Tabel 2.141
Data Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Sawahlunto

NO	Nama OPD	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Total Bidang Tanah
1	Dinas Pendidikan	51	30	81
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	11	22	33
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1	0	1
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	415	416
5	Dinas Sosial PMDes dan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	2
6	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan perikanan	5	3	8
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	2	0	2
8	Dinas Perhubungan	0	1	1
9	Dinas Koperasi UKM perdagangan dan Perindustrian	3	4	7
10	Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga Kerja	1	0	1
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	2	2
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	0	3	3
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	1
14	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	1	0	1
15	Inspektorat	1	0	1
16	Sekretariat Daerah Kota	19	60	79
17	Sekretariat DPRD	2	0	2
18	PPKD	4	0	4
19	Badan Kesbang Politik dan PBD	1	0	1
20	Kecamatan Silungkang	2	1	3
21	Kecamatan Lembah Segar	6	8	14
22	Kecamatan Barangin	12	0	12
23	Kecamatan Talawi	1	0	1
	Total	126	550	676

Sumber Data: BPKAD Sawahlunto, 2022

Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Sawahlunto sebanyak 23 Perangkat Daerah yang bersertifikat sebanyak 126 dan yang belum bersertifikat sebanyak 550 dengan total sebanyak 676.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bidang

Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

Tabel 2.142
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	-	-	100	-	-	0
2	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)		70,00	72,80	100,00	100,00	100,00
3	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)		-	-	56.25	-	0
4	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	0	0	0	0	0
5	Tersedianya tanah objek landreform9TOL yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0	0	0	0	0	-
6	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	0	0	0	0

Sesuai dengan tabel realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto tahun 2022, untuk persentase pemanfaat tanah dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin diterbitkan (%), realisasinya tidak dapat didata, karena penerbitan izin dilaksanakan secara Online melalui aplikasi OSS yang langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%) realisasinya pada tahun 2022 tidak ada (0%), pada tahun 2022 telah ditetapkan lokasi Redistribusi Tanah di Kota Sawahlunto yaitu Batu Tanjung dan Talago Gunung, akan tetapi kegiatan tidak dapat dilanjutkan karena adanya pertentangan dari ninik mamak.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Perencanaan Tata Kelola Lingkungan

Perencanaan Tata Kelola Lingkungan diperlukan untuk memetakan potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen Rencana tata kelola Lingkungan Antara lain Daya Dukung daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Perencanaan Tata Kelola Lingkungan diperlukan untuk memetakan potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen Rencana Tata Kelola Lingkungan antara lain Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kurangnya SDM tentang perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, Kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih rendah, dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) upaya Pemerintah Kota Sawahlunto dengan menjaga keanekaragaman hayati dengan Langkah-langka mitigasi yang jelas termasuk pengurangan yang signifikan dalam emisi gas rumah kaca dan peningkatan tutupan lahan/hutan.

A. Indeks Kinerja Daerah (IKD)

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.143
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	8
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	56,79	58,01	62,74	62,39	62,89
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	67,00	68,26	70,00	74,64	76,00
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin pplh dan puu lh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	%	81,25	81,36	75,00	75,00	75,00
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	-	-	-	-	68,12

Sumber Data :DKP2LH, 2022

Capaian realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan lingkungan hidup terhadap indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2022 adalah 62,89% dan sudah mencapai target RPJMDP.

Capaian terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota sudah sesuai dengan target RPJMDP namun perlu Langkah untuk mengurangi sampah dari sumber ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota pada tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan karena banyak pelaku usaha yang tidak aktif lagi atau tidak beroperasi.

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah merupakan salah satu kriteria penialaian Adipura, indeks tesebut di hitung apabila pada tahun tersebut dilaksanakan penilaian Adipura dari pusat, penilanan indeks kinerja pengelolaan sampah tahun 2022 belum bisa dilakukan perhitungan karena menungggu proses dari Kememntriann Lingkungan Hidup.

B. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 %

Kualitas lingkungan hidup Indonesia merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Dalam perdebatan akan kualitas lingkungan hidup, satu hal yang sering sekali sulit untuk di jawab secara lugas berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas lingkungan hidup berada dalam kategori baik, sedang atau buruk.

Indeks Kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu.

Berikut ini table hasil pengukuran kualitas air (IKA) :

Tabel 2.144
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 %
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 %	%	55,69	50,00	50,00	52,00

Sumber Data :DKP2LH, 2022

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2022 adalah 52 point, pemantauan IKA ini diambil pada 3 sungai yang dianggap mewakili kualitas air di Kota Sawahlunto. Dari hasil pemantauan sungai tersebut didapati beberapa parameter melewati ambang batas baku mutu. Sebagai penanggulangannya dilakukan pengendalian pada sumber-sumber yang berpotensi mencemari kualitas air sungai tersebut. Hasil pengukuran indeks kualitas air (IKA) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mulai dilaksanakan pada tahun 2019.

B. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) 40,5 %

Tabel 2.145
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) 40,5 %
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kualitas Udara (IKU) 40,5 %	%	82,69	87,54	87,65	87,00

Sumber Data :DKP2LH, 2022

Indeks kualitas udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan perundang-undangan. Perhitungan indeks ini didasari dari pengambilan sampel di beberapa wilayah yang dianggap mewakili kualitas udara kab/ kota dalam waktu tertentu. Capain indeks tahun 2022 ini adalah sebesar 87,00%. Terjadi penurunan indeks kualitas udara daripada tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan nilai parameter pencemar yang diukur. Hal ini dapat diatasi dengan menambah ruang terbuka hijau sebaagai penyaring emisi dari kendaraan bermotor. Hasil pengukuran indeks kualitas udar (IKU) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mulai dilaksanakan pada tahun 2019.

2. Persentase Penanganan Sampah

Mobilisasi sampah dari tingkat *user interface* menuju TPA Kayu Gadang, sepenuhnya di kelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH). Sedangkan sampah pasar Silungkang dan pasar Talawi pemungutan retribusinya dilakukan oleh KAN setempat sementara pengumpulan dan pembuangannya tetap oleh DPKP2LH. Cakupan pelayanannya adalah:

1) Sudah dilayani : 90% atau 34 desa/kelurahan
2) Belum terlayani : 10% atau 3 desa/kelurahan

Berdasarkan kemampuan operasional sarana angkutan yang ada, sampah yang terangkut ke TPA Kayu Gadang sebanyak 13 sampai dengan 14 ton/hari, sementara timbulan sampah per hari sekitar 18 ton/hari . Berikut adalah volume timbulan sampah dan yang dikelola di TPA, yaitu:

Tabel 2.146
Pengelolaan Persampahan Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

Pengelolaan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Timbulan sampah kota (ton/hari)	18.51	18,72	18,77	18,75	18,86
Rata-rata Timbulan (Ton/org/hari)	0,00028	0,00028	0,00028	0,00028	0,00028
Jumlah sampah penanganan sampah (Ton)	14,99	14,81	14.10	13,99	13,94
Persentase Sampah Tertangani dengan Timbulan Sampah (%)	80,98	80,01	75,1	74,64	73,66
Persentase jumlah sampah yang terkurangi (%)	13,29	19	21,49	20,57	24,72

Sumber Data : DKP2LH Kota Sawahlunto 2022

Dari tabel diatas Persentase Sampah Tertangani dengan Timbulan Sampah Kota Sawahlunto terjadi penurunan sebesar 2,93 % dari target RPJMDP yang harusnya sebesar 76,00 %. Sesuai dengan target JAKSTRADA tahun 2022 harusnya persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah sebesar 73 %, semakin banyak sampah terkurangi di sumber sampah maka semakin baik pengolahan sampah. Salah satu penyebab sampah tidak terkurangi disumber adalah prilaku dari masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah dan kurangnya sarana pengurangan sampah seperti TPST, TPS3R dan Bank sampah.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan membentuk Bank sampah di desa maupun Kelurahan serta memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah. Selain itu dilakukan inovasi untuk mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah yaitu SISABER-RT (Sedekah Plastik Sampah Berjadwal di Rumah Tangga). Inovasi ini merupakan penjemputan sampah terpilah secara terjadwal langsung ke rumah masyarakat. Dalam mengelola sampah tersebut sarana prasarana operasional yang sepenuhnya dikelola DKP2LH adalah berupa:

Tabel 2.147
Sarana Dan Prasarana Persampahan Tahun
2018-2022

NO.	JENIS SARANA	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
1	TPA Lontiek Maloweh (Ha)	2	-	-	-	-	Tidak aktif
2	TPA Kolok Nan Tuo (Ha)	1,50	1,50	1,50	1,50	-	Tidak aktif
3	TPA KayuGadang (Ha)	5	9,7	9,7	9,7	9,7	Dijadikan Sanitary Landfill
4	TPST (unit)	5	5	5	5	5	
5	TPS	-	-	-	-	-	
6	Truck Sampah						
A	Arm Roll Truck (unit)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	1 rusak
B	Dump Sampah (unit)	4 unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 unit	
7	Container (unit)	17 unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	31 unit	6 rusak
8	Bak Sampah (buah)	14 buah	30 Buah	30 Buah	30 Buah	30 Buah	
9	Drum/Tong Sampah (buah)				25	25	
10	Gerobak Sampah (unit)	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	29 unit	7 rusak
12	Becak Motor (unit)	18 unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	18 unit	2 rusak
13	Petugas K3 (orang)	152	152	152	152	152	
14	Bulldozer	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit	
15	Incenerator	3 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 Unit	2 rusak 2 baik

NO.	JENIS SARANA	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
16	Mesin Kompos	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	
17	Excavator	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	

Sumber Data : DKP2LH Kota Sawahlunto 2022

Kondisi sarana dan prasarana persampahan di Kota Sawahlunto ini sudah perlu ditingkatkan terutama pengadaan truk sampah dan armroll truk karena sudah berusia tua. Saat ini TPA Kayu Gadang telah ditingkatkan metode pemusnahan sampah dari sistem *control landfield* menjadi *sanitary landfield* melalui dana APBN.

Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) yang layak secara teknis. Keberadaan TPSS selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah secara tidak beraturan.

3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Rasio Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.148
Rasio Jumlah TPSS Di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah TPSS (unit)	344	344	344	344	344
2	Jumlah Daya Tampung TPSS (m^3)	147,92	147,92	147,92	147,92	147,92
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	61.398	61.898	62.524	65.138	67.334
4	Rasio Daya Tampung TPSS thd Jumlah penduduk (m^3/1000 jiwa)	2,32	2,32	2,36	2,21	2,20

Sumber Data : DKP2LH Kota Sawahlunto 2022

Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto tahun 2018 – 2022 sebanyak 344 unit dengan daya tampung 147,92 m^3.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan Kota Sawahlunto pada kondisi lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.149
Data Kepemilikan Kartu Keluarga
Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga					Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lembah segar	4.208	4.222	4.312	4.376	4.401	4.208	4.222	4.312	4.345	4.401
2	Barangin	5.991	6.139	6.345	6.463	6.540	5.991	6.139	6.345	6.429	6.540
3	Silungkang	3.391	3.464	3.530	3.547	3.627	3.391	3.464	3.530	3.522	3.627
4	Talawi	5.804	5.993	6.143	6.272	6.372	5.804	5.993	6.143	6.236	6.372
	Total	**19.394**	**19.818**	**20.330**	**20.658**	**20.940**	**19.394**	**19.818**	**20.330**	**20.532**	**20.940**

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan gambaran tabel diatas dapat dilihat bahwa sudah seluruh Kepala Keluarga memiliki Kartu Keluarga. Upaya jemput bola melalui pelayanan keliling tetap

dilakukan oleh dinas teknis guna memberi kemudahan pengurusan dokumen kependudukan masyarakat.

Tabel 2.150
Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP					Jumlah Penduduk Memiliki KTP -El				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lembah segar	10.261	10.255	10.236	10.207	10.320	9.250	9.915	9.987	10.099	10.237
2	Barangin	14.328	14.561	14.776	14.884	15.087	13.221	13.965	14.380	14.643	14.922
3	Silungkang	8.174	8.275	8.307	8.306	8.446	8.172	7.899	8.049	8.188	8.343
4	Talawi	14.291	14.563	14.678	14.753	15.062	14.198	14.086	14.408	14.591	14.950
	T o t a l	47.054	47.654	47.997	4.815	48.915	44.841	45.865	46.824	47.521	48.452

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2022

Sampai akhir tahun 2022, jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 99,05 persen dari 48.915 orang penduduk wajib ber-e KTP. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk Sawahlunto terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (e KTP dan KK) sangat tinggi dan usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerja sama dengan seluruh Desa dan Kelurahan membuahkan hasil.

Tabel 2.151
Rekapitulasi Data Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Kota Sawahlunto
Tiap Kecamatan Per 31 Desember 2022

No	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)				
		Anak 0-18 Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Belum Memiliki Akta Kelahiran	%
1	LEMBAH SEGAR	3.810	3.791	99,50	19	0,50
2	BARANGIN	5.982	5.934	99,20	48	0,80
3	SILUNGKANG	5.783	5.741	99,27	42	0,73
4	TALAWI	3.434	3.407	99,21	27	0,79
	JUMLAH	**19.009**	**18.873**	**99,28**	**136**	**0,72**

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2022

Dari segi kepemilikan Akta Kelahiran penduduk berusia 0 – 18 tahun, Kota Sawahlunto mencatat sudah 99,28% penduduk yang memilikinya. Bagi penduduk yang belum memiliki masih perlu upaya maksimal bersama seluruh pihak terkait guna meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran penduduk. Termasuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih berada diangka 72,93 % (seperti tabel dibawah berikut ini).

Tabel 2.152
Rekapitulasi Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Sawahlunto
Tiap Kecamatan Per 31 Desember 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)				
		Wajib KIA	Kepemilikan KIA	%	Belum Memiliki KIA	%
1	LEMBAH SEGAR	3.551	2.591	72,97	960	37,05
2	BARANGIN	5.629	4.173	74,13	1.456	34,89
3	SILUNGKANG	3.217	2.028	63,04	1.189	58,63
4	TALAWI	5.459	4.230	77,49	1.229	29,05
	JUMLAH	**17.856**	**13.022**	**72,93**	**4.834**	**37,12**

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2022

Tabel 2.153
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2018-2022

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Kependudukan dan Catatan Sipil					
1	Cakupan KTP (%)	99,50	99,14	106,36	97.87	99,05
2	Cakupan Akte kelahiran (%)	52,37	56,05	56,06	67.32	99,23
3	Cakupan KK (%)	100	100	100	99.52	100
4	Cakupan akte kematian (%)	100	100	100	100	100
5	Validitas database kependudukan (%)	100	100	100	100	100
6	Perekaman KTP elektronik (%)	99,62	98,05	106,64	97.49	99,05
7	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	0,00	38,44	57,55	63.87	72,93
8	Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir) (%)	95,93	97,24	98,13	98.73	99,28
9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	0,00	0,00	0,00	83.33	92,30

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2022

Dari sembilan indikator diatas, rata-rata capaian IKD dapat diketahui sudah memperoleh nilai yang sangat baik. Upaya maksimal harus tetap dilakukan agar dokumen kependudukan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu juga terus mendorong OPD untuk dapat memanfaatkan data kependudukan dalam melaksanakan program kegiatan.

G. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan maka keterlibatan masyarakat secara aktif sangat diperlukan. Masyarakat dengan berbagai latar belakang pekerjaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lainnya dapat berperan aktif melalui wadah/lembaga yang ada di Desa/Kelurahan. Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa/ Kelurahan yang ada di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.154
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan
Tahun 2018 - 2022

No	Nama Lembaga	2018	2019	2020	2021	2022
1	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	22	23	23	23	23
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	42	42	42	41	41
3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	42	42	42	41	41
4	Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum (BPSPAM)	64	64	64	64	64
5	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) / Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)	37	37	37	37	37
6	Posyandu Balita	103	103	103	103	103
7	Posyandu Lansia	55	55	55	55	55
8	Badan Permusyawarahan Desa (BPD)	27	27	27	27	27
9	Karang Taruna	37	37	37	37	37

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2022

Kemajuan suatu desa mempengaruhi iklim berinvestasi. Makin maju sebuah desa, maka akan makin menarik investasi untuk dapat berkembang diwilayahnya. Klasifikasi desa yang diharapkan untuk dapat menunjang iklim berinvestasi adalah dengan kategori Swasembada. Dimana pada kondisi ini daya dukung masyarakat/ Sumber Daya Manusia, potensi Sumber Daya Alam, kelembagaan, prasarana dan sarana memberikan efek positif bagi pengembangan investasi di wilayahnya. Untuk Kota Sawahlunto, status desa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.155
Status Desa berdasar Profil Desa Kota Sawahlunto
Tahun 2021-2022

No	Status Desa	2021		2022	
		Jumlah (desa)	Persentase (%)	Jumlah (desa)	Persentase (%)
1	Swasembada	8	21,62	6	16,22
2	Swakarya	9	51,35	17	45,94
3	Swadaya	10	27,82	4	14,81

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2022

Desa dengan status swasembada adalah desa : Lunto Barat, Lunto Timur, Balai Batu Sandaran, Kolok Nan Tuo, Salak dan Data Mansiang. Desa Kubang Tangah dan Taratak Bancah tahun 2021 berstatus Swasembada, namun tahun 2022 turun berstatus Swakarya karena saat penginputan data profil desa ke aplikasi terjadi gangguan jaringan, mengakibatkan data yang terinput tidak lengkap dan aplikasi telah terkunci. Upaya kedepan adalah meningkatkan status desa yang masih swakarya dan swadaya menuju swasembada. Dan sangat diperlukan inovasi positif dari tiap desa / kelurahan untuk dapat menarik banyak peluang investasi bagi kemajuan wilayahnya dari segala sumber.

Tabel 2.156
Status Desa berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Sawahlunto
Tahun 2021-2022

No	Klasifikasi Desa	2019		2020		2021		2022	
		Jumlah (desa)	Persentase	Jumlah (desa)	Persentase	Jumlah (desa)	Persentase	Jumlah (desa)	Persentase
1	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Berkembang	21	77,77	17	62,96	14	51,85	10	37,03
4	Maju	5	18,51	9	33,33	12	44,44	14	51,85
5	Mandiri	1	3,7	1	3,7	1	3,7	3	11,11

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2022

IDM memotret perkembangan kemandirian desa, mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkolerasi dengan karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dan modal sosial. Jumlah Desa Mandiri Kota Sawahlunto tahun 2022 bertambah 2 desa lagi setelah desa Talawi Mudiak, yaitu Santua dan Muaro Kalaban. Diharapkan setiap tahun terjadi penambahan desa menjadi desa mandiri.

Tabel 2.157
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2018 - 2022

NO	INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase pengentasan Desa Tertinggal (%)	0	0	0	0	0

NO	INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	19,04	23,8	52,94	85,71	140

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2022

Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan berperan aktif dalam proses pembangunan di daerahnya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan program kegiatan dan pengawasan pembangunan di wilayah masing-masing.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Terdapat tiga indikator tambahan yang berkaitan dengan KB dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2015 target 5b (Akses Universal terhadap Kesehatan Reproduksi) yang diharapkan akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesehatan ibu. Indikator tersebut adalah Contraceptive Prevalence Rate (CPR), Age Specific Fertility Rate (ASFR) dan unmet need.

Target nasional indikator tersebut pada tahun 2015 adalah CPR sebesar 65%, ASFR usia 15 sampai dengan 19 tahun sebesar 30/1000 perempuan usia 15 sampai dengan 19 tahun dan unmet need 5%. Dalam upaya akselerasi pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra BKKBN tahun 2010 sampai dengan 2014, maka telah direvisi sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2014. Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2014 adalah TFR sebesar 2,36 CPR sebesar 60,1% dan unmet need sebesar 6,5%. Dalam satu dekade terakhir keberhasilan pelayanan Keluarga Berencana di Indonesia mengalami suatu keadaan stagnan yang ditandai dengan kurangnya perbaikan beberapa indikator KB yaitu CPR, unmet need dan Total Fertility Rate (TFR), Negara ASEAN dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan KB serta kesehatan ibu dan bayi.

Tabel 2.158
Capaian Indikator Kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2018 - 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/ mCPR)	62	64	63	71,92	70,46
2	Persentase Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	23,51	19,31	17,58	10,87	12
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,18	1,01	1,4	0,99	1,75
3	TFR (Angka Kelahiran Total	2,1	2,38	2,33	2,00	2,02
4	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui kampung KB	48	56	60	64	64
5	Rata – rata jumlah anak perumah Tangga	4,18	2,75	2,32	2,00	2,02
6	Rasio Akseptor KB	77,04	72,68	73,03	71,92	70,46
7	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi	78,65	77,05	73,04	71,92	70,46

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022
	perempuan menikah usia15-48					
8	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan1	37	37	37	37	37
9	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	00	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2022

1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern

Capaian Kota Sawahlunto pada urusan pemerintah Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ada beberapa indikator Kinerja. Pada kinerja Persentase pemakaian Kontrasepsi modern mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sebanyak 62 Persen meningkat menjadi 64% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi yaitu 63 %, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 71,92%. Pertumbuhannya juga terjadi penurunan.

Tabel 2.159
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Tahun 2018 - 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/ mCPR)	62	64	63	71,92	70,46
2	Pertumbuhan		1,66	1,54	1,81	-2,03

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto,2023

2. Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Unmet need menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (**BKKBN**) adalah kebutuhan PUS untuk ber-KB tetapi tidak terpenuhi dengan kata lain PUS tidak menggunakan kontrasepsi. Hal ini juga dipengaruhi dengan kondisi PUS yang sedang Hamil, Ingin anak segera dan Ingin Anak ditunda, namun angka Unmet Need dikota Sawahlunto, sudah baik dan berada dibawah angka Nasional.

Indikator kinerja Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 angka unmet need ini adalah 23,51 % mengalami fluktuasi hingga tahun 2021 menjadi 10,87 % pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022 menjadi 12 %.

Tabel 2.160
Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	23,51	19,31	17,58	10,87	12
2	Pertumbuhan (%)	71,23	-17,86	-8,96	-38,17	0,10

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto,2022

Selama ini unmet need menjadi penyumbang cukup besar terhadap belum berpartisipasinya PUS dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan. Salah

satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping.

3. Angka Kelahiran Total (TFR)

Angka kelahiran Total (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.Angka kelahiran Total (TFR) ini digunakan Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Kondisi TFR tahun 2022 di Kota Sawahlunto sudah menuju perbaikan berada di angka 2,022, artinya Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun rata-rata sudah mempunyai anak 2 orang, sesuai juga dengan angka kemiskinan di Kota Sawahlunto mengalami penurunan secara signifikan. Mudah-mudahan kondisi ini menjadikan Kota Sawahlunto semakin maju dan berkembang serta terwujudnya visi dan misi kota Sawahlunto yang sudah ada.

Tabel 2.161
Angka Kelahiran Total (TFR) Kota Sawahlunto tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022
1	TFR (Angka Kelahiran Total	2,1	2,38	2,33	2	2,022
2	Pertumbuhan (%)	-8,70	13,33	-2,10	-14,16	1,1

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto,202

4. Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

Tabel 2.162
Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Kota Sawahlunto tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	48	56	60	64	48
2	Pertumbuhan	3,70	2,43	1,91	1,78	1,17

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto,2023

5. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian pendudukan pembangunan keluarga adalah dengan penyelenggaraan keluarga berencana. Pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas merupakan langkah yang sangat penting dalam mencapai pembanungan yang berkelanjutan. Salah satu keberhasilan dalam mencapai program keluarga berencana ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB dan hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan KIE. Secara demogafi program keluarga berencana adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Tabel 2.163
Rata-rata Jumlah Anak per Rumah Tangga di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata – rata jumlah anak per keluarga	4,18	2,75	2,32	2,00	2,02

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto,2022

Dilihat dari data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga di Kota Sawahlunto mengalami fluktuatif. Tahun 2017-2021 jumlah anak dalam keluarga mengalami trend penurunan. Jika dibandingkan dengan target 2 orang anak setiap rumah tangga pada program Keluarga Berencana tingkat nasional, maka dapat dikatakan program Keluarga Berencana di Kota Sawahlunto sudah berjalan dengan baik

6. Rasio Akseptor KB

Program Keluarga Berencanaa dimaksudkan untuk menciptakan keluarga kecil yang berkualitas sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk disamping itu juga mengurangi resiko tingkat kematian anak serta kematian ibu. Dalam pola pemikiran dimasyarakat harus diubah dari pembatasan kelahiran saja tapi juga untuk meningkatkan kualitas manusia dan mensinergisitaskan program keluarga berencana dengan sudut pandangan agama.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yag sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Rasio akseptor KB dari tahun ketahun mengalami trend yang menurun. Pada tahun 2017 rasio akseptor B berjumlah 78,80 % dan menurun pada tahun 2021 menjadi 71,92 %.Pertumbuhan rasio akseptor KB ini mengalami penurunan. Pada tahun 2022 menurun menjadi 70,46%.

Tabel 2.164
Rasio Akseptor KB di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Akseptor KB	77,04	72,68	73,03	71,92	70,46
2	Pertumbuhan	-2,23	-5,66	0,48	-1,52	-2,03

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto,2022

7. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

Angka Pemakaian Kontrasepsi adalah cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Di Kota Sawahlunto CPR ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 adalah 69,21% naik pada tahun 2018 menjadi 78,65% dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 71,92%. Pada tahun 2022 menurun menjadi 70,46%.

Tabel 2.165
Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia15-48	78,65	77,05	73,04	71,92	70,46
2	Pertumbuhan	13,64	-2,03	-5,20	-1,53	-2,10

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2022

8. Rasio petugas pembantu Pembina KB/Desa (PPKDB) setiap desa/kelurahan

Petugas pembantu Pembina KB Desa Setiap Desa/Kelurahan berjumlah 37 orang. Hal ini sama dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Dimana di setiap desa ada satu orang petugas Pembina KB. Peran PPKDB ini adalah berperan aktif dalam mengelola program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/kelurahan.

Tabel 1.166
Jumlah petugas pembantu Pembina KB/Desa (PPKDB) setiap desa/kelurahan

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	37	37	37	37	37

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2022

9. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Cakupan ketersediaan dan ditribusi alat dan oabt kontrasepsi di Kota Sawahlunto telah sangat baik. Karena telah mencapai 100%. Hal ini mendukung program KB di Kota Sawahlunto dapat di lihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.167
cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontreasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2022

I. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Sektor transportasi di Kota Sawahlunto hanya berupa transportasi darat dan perkeretaapian. Transportasi darat sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan perkeretaapian merupakan sarana penunjang kepariwisataan kota tua Sawahlunto dan tidak lagi dijadikan sarana penghubung antar daerah, hal ini dikarenakan banyak hal penunjang yang tidak lagi memadai. Melihat kondisi wilayah Kota Sawahlunto terkait dengan urusan transportasi dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.168
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota (IKD)	0,47	0,49	0,44	0,56	0,56
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (IKD)	45	45	56	65	65

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas (IKD)	25	32	26	35	30
4	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang (IKD)	2	2	2	2	2
5	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan (IKD)	44	67	25	40	60
6	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (IKD)	100	100	100	100	100
7	Jumlah arus penumpang angkutan umum	66.470	149.474	25.200	28.350	55.006
8	Jumlah uji KIR angkutan umum	1.105	981	382	24	727
9	Persentase layanan angkutan darat	75	70	55	75	75
10	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	72	73,4	30	65	70
11	Rasio Panjang jalan perjumlah kendaraan	1 : 83	1 : 85	1 : 75	1: 80	1:80

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator urusan perhubungan pada umumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 dan 2021 pada indikator jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan sebagai dampak Covid-19. Hal ini dikarenakan tahun 2020 sejak dimulainya wabah Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas orang dan barang sehingga jumlah orang dan barang yang keluar masuk Kota Sawahlunto jauh menurun dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji KIR. Dengan alasan kendaraan tidak beroperasional sehingga tidak dilakukan uji KIR yang berdampak juga terhadap pendapatan daerah Kota Sawahlunto. Namun pada tahun 2022 angka tersebut sudah mengalami peningkatan karena kondisi perekonomian pasca Covid sudah kembali normal.

Dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, dipasang berbagai sarana perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, kaca tikungan, *warning light* dan sarana lainnya. Penyediaan sarana pendukung ini masih perlu ditingkatkan, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, pada jalur padat dan ramai aktivitasnya dan pada daerah rawan kecelakaan. Ketersediaan sarana pendukung lalu lintas sangat diperlukan dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan dan tingginya tuntutan kebutuhan sarana transportasi. Berikut data sarana perlengkapan jalan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.169
Sarana Perlengkapan Jalan di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kaca Tikungan (unit)	82	82	82	82	89
2	Warningh Light (unit)	12	12	12	12	12
3	Traffic Light (unit)	1	1	1	1	1
4	Rambu-rambu (unit)	229	229	218	235	247
5	Guadril (unit)	147	147	147	147	147
6	Diliniatur (unit)	100	100	100	100	100
7	Trapikun (unit)	100	100	100	100	100
8	Marka Jalan (M')	113.885	113.885	113.885	113.885	113.885
9	Jembatan Penyebrangan (unit)	0	0	0	0	0
10	Papan Penunjuk Arah (unit)	46	46	46	46	46
11	Papan Informasi lalu Lintas	0	0	0	0	0
12	Zebra cross (unit)	724	724	724	724	724

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
13	Trotoar (M')	8.3	8.3	8.3	8.3	8,3
14	RPPJ (M')	10	10	10	10	10

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah perlengkapan jalan di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2022 terdapat penambahan jumlah pada pengadaan kaca tikung dan rambu-rambu. Secara kebutuhan sampai tahun 2022 ketersediaan rambu dan sarana perlengkapan jalan sudah 50%. Sementara ketersediaan penerangan jalan umum sudah 80% dari 5000 titik PJU yang dibutuhkan baru tersedia sebanyak 4000 PJU di Kota Sawahlunto.

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah perlengkapan jalan di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2022 terdapat penambahan jumlah pada pengadaan kaca tikung dan rambu-rambu. Dinas Perhubungan menetapkan arah kebijakan dalam hal meningkatkan manajemen transportasi, meningkatkan pelayanan moda transportasi dan mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api. Jalur kereta api di Kota Sawahlunto sudah dimulai sejak tahun 1892. Pada saat itu pembangunan dimulai sebagai sarana pengangkutan batu bara Ombilin. Seiring waktu pengangkutan batu bara dengan kereta api semakin berkurang bahkan tidak ada lagi. Kereta api beroperasi sebagai kereta wisata dengan rute Sawahlunto - Muaro Kalaban - Padang Panjang. Namun pada saat ini kereta api memang tidak beroperasi sama sekali. Sesuai dengan adanya rencana Pemerintah Kota Sawahlunto dengan PT.KAI yang akan mereaktivasi kembali jalur kereta api dan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)- Solok-Muaro Kalaban (Sawahlunto).

Melalui Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto telah dimulai pekerjaan pembersihan kawasan rel dengan bekerja sama dengan PT.KAI pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan selanjutnya Pemerintah Kota Sawahlunto mulai ingin menghidupkan kembali kereta api sebagai wisata sejarah. Panjang rel kereta api yang aktif pada saat ini adalah 4,2 Kilometer dari stasiun Sawahlunto ke Stasiun Muaro Kalaban dengan kondisi 2 stasiun aktif. Sawahlunto masih mempunyai 2 lokomotif dengan rincian 1 lokomotif diesel dan 1 lokomotif uap. Keinginan Pemerintah Kota Sawahlunto sangat kuat menjadikan kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang pernah diandalkan seperti pada masanya tanpa menghilangkan nilai sejarahnya.

Kereta api wisata mak itam Kota Sawahlunto telah beroperasi kembali semenjak diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Tohir pada tanggal 20 Desember 2022. Pengoperasian kereta api kembali merupakan hasil dukungan dari 4 BUMN yaitu PT.Kereta Api Indonesia, PT.Semen Indonesia, PT. Pupuk Indonesia dan PT. Biofarma dibawah koordinasi Project Manajemen Office (PMO) BUMN untuk Pariwisata Sumatera Barat. Pemerintah Kota Sawahlunto akan memfasilitasi operasional kereta api yang menjadi *icon* Pariwisata di Kota Sawahlunto.

Sebagai bentuk inovasi Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto telah melakukan pencegahan dalam penyelamatan berlalu lintas, yaitu dengan menempatkan aparat perhubungan dalam zona selamat sekolah. Aparat bertugas pada jam masuk dan pulang sekolah dan bertugas di sekolah-sekolah yang berada di lokasi jalan utama. Inovasi ini sebagai bentuk pencegahan dan salah satu upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Sawahlunto.

J. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika merupakan Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Perlayanan Dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten atau kota. Urusan

Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto mulai bulan November tahun 2022, sedangkan sebelumnya dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto. Berikut capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 2.170
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK	%	70	70	70	60	65
Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota	%	75	75	75	50	60
Persentase organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	%	100	100	100	100	100
Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	1,87	2,45	2,88	2,07	2,84
Persentase layanan publik yang telah dilaksanakan secara online dan terintegrasi (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota (%)	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022
Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto 2023

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa capaian beberapa indikator kinerja yang melekat pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto ada yang telah terpenuhi 100 %. Namun masih ada capaian beberapa indikator kinerja yang masih di bawah 100 % dan berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, indikator kinerja yang dimaksud adalah : 1). Persentasse OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK; 2). Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota; dan 3). Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Di samping rendahnya capaian beberapa indikator kinerja di atas, permasalahan lain yang dihadapi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto adalah rendahnya sebaran informasi tentang kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten atau kota. Permasalahan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 1). Belum semua Perangkat Daerah yang memanfaatkan aplikasi/website untuk penyebaran informasi; 2). terbatasnya Sumber daya manusia yang berlatar belakang keahlian Infomasi dan teknologi (IT); 3). Sulitnya pembangunan jaringan internet yang disebabkan kondisi geografis Kota Sawahlunto yang berbukit-bukit; 4).Terbatasnya pembangunan dan pelayanan jaringan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi; 5). Belum optimalnya integrasi data.

K. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan UKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan. Adapun perkembangan koperasi yang aktif dan tidak aktif di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.171
Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	56	56	53	54	53
2	Jumlah koperasi (unit)	68	68	68	68	69
3	Persentase koperasi aktif	82,4	77,9	77,9	79,4	77

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dari Tahun 2018-2020 persentase koperasi yang aktif mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan dan pada tahun 2022 persentase Koperasi aktif juga mengalami penurunan dibandingkan degan tahun 2021. Tahun 2022 tidak mengalami perubahan karena terkait masa pasca pandemic yang baru dimulai sehingga kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap koperasi sudah mulai bisa untuk dilaksanakan. Pembinaan terhadap koperasi sangat menentukan perkembangan koperasi, untuk koperasi aktif yang menjadi indikator adalah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, apabila koperasi tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut, maka dianggap koperasi tersebut tidak aktif. Ini perlu kerja keras pemerintah daerah dalam mengaktifkan koperasi yang ada. Koperasi yang tidak RAT diupayakan pembenahan agar dapat menjalankan aktifitas usaha kembali namun apabila tidak bisa diaktifkan lagi akan dibubarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM RI. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Secara modal dan keanggotaan koperasi dapat dlihat perkembangan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.172
Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi (unit)	68	68	68	68	69
2	Jumlah Koperasi Aktif	56	53	53	54	53
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	12	15	15	14	16
4	Jumlah Koperasi RAT	48	50	43	35	35
5	Jumlah Anggota orang)	9.352	8.972	8.775	8.221	8.162
6	Jumlah Tenaga Kerja	113	113	113	113	113
7	Volume Usaha (Rp))	94.078.447.603	103.589.617.000	57.792.083.000	38.567.300.000	32.069.047.000
8	Modal Sendiri (Rp)	43.567.601.878	46.255.521.000	48.055.094.000	46.707.152.000	48.755.020.000
9	Modal Luar (Rp)	32.997.713.250	33.295.190.000	33.169.494.000	29.679.215.000	29.404.939.000
10	Asset (Rp)	76.565.315.128	79.550.711.000	81.224.588.000	70.711.781.000	78.159.959.000
11	SHU (Rp)	4.137.934.098	4.510.185.000	4.427.901.000	4.427.901.000	2.075.983.000

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dilihat dari tabel diatas volume usaha pada tahun 2022 menurun drastis seiring dengan berkurangnya jumlah anggota koperasi yang mana di tahun 2021 berjumlah 8.221 orang dengan volume usaha Rp. 38.567.300.000,-, disebabkan adanya kebijakan Provinsi tetang cara penghitungan volume usaha. Perkembangan SHU juga tidak begitu baik di sebabkan adanya pandemi yang berdampak pada perkembangan usaha koperasi di Kota Sawahlunto. Selain permodalan yang tidak kalah penting adalah faktor sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengurus koperasi. Untuk itu fasilitasi Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan dunia usaha dinilai perlu ditempuh untuk mengoptimalkan potensi koperasi dan UKM yang telah ada. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap koperasi khususnya koperasi simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 6/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Perkembangan koperasi sehat ini dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.173
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Sawahlunto
Tahun 2018 - 2022

No	Kriteria Koperasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sehat (%)	23,53	11,76	14,71	9,37	14,50
2.	Cukup sehat (%)	42,65	39,70	32,35	39,06	31,89
3.	Kurang sehat (%)	0	4,41	10,29	4,69	2,90
4.	Belum dinilai (%)	16,17	4,41	5,88	0	27,54
5	Tidak dinilai (%)	17,65	39,72	36,77	46,87	23,19

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Penilaian kesehatan koperasi hanya untuk koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam sebanyak 49 koperasi dan telah melaksanakan RAT setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Dari 36 koperasi yang melaksanakan RAT, 2 diantaranya tidak di nilai karena usahanya tidak bergerak dibidang simpan pinjam. Dari *tabel* diatas dapat dijelaskan bahwa untuk koperasi sehat yang ada di kota Sawahlunto mengalami kenaikan Pada Tahun 2022 sebanyak 11 Koperasi dibanding tahun 2021 yaitu berjumlah 10 koperasi. Kondisi koperasi secara keseluruhan yang ada di Kota Sawahlunto dari tahun 2018-2022 rata-rata masih dalam kondisi cukup sehat, ini berarti sangat perlu peningkatan pengawasan terhadap koperasi. Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi bahwa yang melaksanakan pengawasan koperasi ini adalah Walikota.

Tabel 2.174
Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	82,35	77,94	77,94	10,29	8,70
2.	Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Wira Usaha (%)	0,00	0,22	1,12	36,17	0,4
3.	Persentase UMKM yang meningkat Skala Usahanya (%)	0,00	0,22	1,12	0,40	0,3
4.	Persentase UKM Non BPR	3.588	3.708	3.708	4.114	4.328
5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	95,77	99,78	99,78	100	99.80

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Tabel 2.175
Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro < 60.000.000
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	123	127	129	131	133
2.	Pertambangan danPengendalian	0	0	0	0	0
3.	Industri Pengolahan	1402	1413	1425	1439	1459
4.	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0	0
5	Bangunan	0	0	0	0	0
6.	Perdagangan,Hotel dan Restoran	1405	1430	1450	1476	1487
7.	Penganggkutan / Komunikasi	0	0	0	0	0
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
9.	Jasa Lainnya	195	198	202	207	211

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro Kurang dari 60.000.000 dapat disebutkanantara lain untuk Kinerja Usaha Mikro Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2022 yaitu 133, dari tahun 2018 sampai dengan 2022 selalu mengalami peningkatan walaupun tidak siknifikan, dan untuk Pertambangan dan Pengendalian Realisasi dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 masih 0, sedangkan untuk Industri Pengolahan tahun 2022 sebesar 1459, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 juga selalu mengalami peningkatan, untuk Indikator Usaha Mikro Listrik, gas dan Air dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 masih 0, Untuk Indikator Usaha Mikro Bangunan pada Tahun 2022 Realiasi masih 0, sedang untuk Kinerja Usaha Mikro Perdagangan, Hotel dan Restoran pada Tahun 2022 sebesar 1487, dan untuk capaian indikator kinerja Usaha Mikro pengangkutan/ Komunikasi dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 masih 0, untuk Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan realisasi tahun 2018 sampai dengan 2022 juga masih 0, sedangakan untuk Penilaian Indikator Kinerja Jasa Lainnya pada Tahun 2022 realisasinya sebesar 211.

Tabel 2.176
Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro > 60.000.000
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	6	6	8	8	8
2.	Pertambangan danPengendalian	0	0	0	0	0
3.	Industri Pengolahan	120	120	125	125	125
4.	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0	0
5	Bangunan	0	0	0	1	1
6.	Perdagangan,Hotel dan Restoran	570	573	580	586	594
7.	Penganggkutan / Komunikasi	0	0	0	0	0
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
9.	Jasa Lainnya	80	80	82	86	90

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro Lebih dari 60.000.000 dapat disebutkanantara lain untuk Kinerja Usaha Mikro Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2022 yaitu 8, dari tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sedangkan tahun 2020sampai dengan 2022 tidak mengalami peningkatan, dan untuk Pertambangan dan Pengendalian Realisasi dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 masih 0, sedangkan untuk Industri Pengolahan tahun 2022 sebesar 125, dari tahun 2018 sampai

dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sedangkan tahun 2020 sampai dengan 2022 tetap, untuk Indikator Usaha Mikro Listrik, gas dan Air dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 masih 0, Untuk Indikator Usaha Mikro Bangunan pada Tahun 2022 Realiasi 1, sedang untuk Kinerja Usaha Mikro Perdagangan, Hotel dan Restoran pada Tahun 2022 sebesar 594, dan untuk capaian indikator kinerja Usaha Mikro pengangkutan/ Komunikasi dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 masih 0, untuk Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan realisasi tahun 2018 sampai dengan 2022 juga masih 0, sedangakan untuk Penilaian Indikator Kinerja Jasa Lainnya pada Tahun 2022 realisasinya sebesar 90.

L. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Keberhasilan pembangunan bidang penanaman modal dapat ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi di Kota Sawahlunto, melalui kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan peran kinerja dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Kota Sawahlunto. Keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi dibawah ini.

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Berikut ini disajikan jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.177
Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Perusahaan (PMDN/PMA) yang berinvestasi	158	19	11	67	100	

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan jumlah perusahaan yang berusaha/berinvestasi di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, pada tahun 2018 sebanyak 158 perusahaan, pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 19 perusahaan, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 11 perusahaan, sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 67 perusahaan, pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 100 perusahaan. Kenaikan ini disebabkan oleh upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSPNaker seperti sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perusahaan, pengawasan dan monev, pendampingan berupa klinik perizinan dan klinik LKPM.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi di Kota Sawahlunto sebagian besar adalah investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan nilai investasinya dari tahun 2018 s/d 2022 cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh mulai menurunnya usaha pertambangan di Kota Sawahlunto dan kebijakan kota yang merubah perencanaan pembangunan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berikut disajikan realisasi investasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.178
Jumlah Realisasi Investasi di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Jenis	Tahun/Rp. Juta				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PMDN	86.377	200.440	28.276	45.831	112.593
2	PMA	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi investasi selama rentang tahun 2018-2022 berfluktuatif. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 86,377 milyar, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 200.440 milyar, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 28.276 milyar, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 45.831 milyar, tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 112.593 milyar. Kenaikan ini disebabkan oleh mulai bangkit/membaiknya perekonomian dan aktivitas ekonomi setelah PPKM dilonggarkan dan mulai melandainya pandemi Covid-19.

Target Indikator Kinerja Daerah Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) tidak tercapai karena persoalan internal dan eksternal. Kendala eksternal antara lain adalah : 1) kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, lahan di Kota Sawahlunto kebanyakan adalah tanah ulayat, 2) kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau bahan mentah yang harus diproduksi, dan 3) kesulitan dana atau pembiayaan proyek. Sedangkan kendala internal diantaranya, yaitu : 1) faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional ataupun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah, masih rendahnya kualitas promosi dan informasi investasi tentang peluang investasi; dan 2) adanya peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal. Rekomendasi mendorong investasi di Kota Sawahlunto melalui pemberian insentif atau fasilitas investasi yang menarik, dan meningkatkan konsistensi peraturan tentang penanaman modal pada setiap jenjang pemerintahan perlu dilakukan.

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Berikut disajikan rasio daya serap tenaga kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.179
Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata per Tahun (%)
1.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN yang ada di Kota Sawahlunto	3.841	3.673	2.638	2957	2.705	5,11
2.	Jumlah seluruh PMA/PMDN yang ada di Kota Sawahlunto	158	81	78	84	100	11,19
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	24	45	34	35	*27*	*16,30*

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan rasio daya serap tenaga kerja PMDN dan PMA di Kota Sawahlunto selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren fluktuatif

dengan pertumbuhan 16,30 %, baik penyerapan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri maupun penyerapan tenaga kerja di perusahaan asing.

Capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal Kota Sawahlunto secara keseluruhan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.180
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kenaikan Jumlah Nilai Investasi (%)	-85,31	132,05	-85,89	62,08	145,67
2	Persentase Kenaikan Jumlah Investor (%)	-5,95	-87,97	-42,11	509,09	49,25
3	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	86	200	28	45	112.593
4	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Aplikasi (%)	15	55	75	85	100
5	Persentase Layanan PTSP yang Memenuhi Standar Waktu Layanan sesuai SOP (%)	90	90	95	95	100
6	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	82,67	87,47	83,59	88,29	89,15
7	Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat (%)	60	50	30	50	33,3
8	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	-0,85	1,32	-0,86	0,62	145,67

Sumber : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di Tahun 2022 secara keseluruhan realisasi investasi mulai meningkat setelah melandainya Covid-19. Meningkatnya investasi di Kota Sawahlunto tahun 2022 ini sangat berpengaruh terhadap penggerakan ekonomi Kota Sawahlunto pada umumnya. Kemudahan-kemudahan investasi yang diberikan seperti inovasi yang dilakukan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal sangat berpengaruh terhadap jumlah investasi yang ada di Kota Sawahlunto, ini terbukti dengan tahun 2022 Dinas PMPTSPNaker mendapatkan penghargaan inovasi terhadap pelayanan perizinan di Kota Sawahlunto. Untuk itu peningkatan pelayanan perizinan menjadi hal penting dalam peningkatan investasi di Kota Sawahlunto.

M. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Perkembangan organisasi pemuda ini perlu ditingkatkan lagi sebagai salah satu antisipasi dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang pemuda di Kota Sawahlunto sehingga masalah sosial ini dapat dituntaskan. Perkembangan kepemudaan dan Olahraga yang ada di Kota Sawahlunto terlihat dari realisasi kinerja daerah setiap tahunnya, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.181
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	13	15	15	16	16
2	Peningkatan prestasi olahraga (medali)	60	70	77	148	183
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	1	1	1	1	1

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Sawahlunto mulai dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan dan dari tahun 2019 ke tahun 2020 tetap tapi pada tahun 2021 terjadi kenaikan lagi menjadi 16% serta tahun ini kembali tidak ada peningkatan. Tingkat partisipasi ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah Kota dilihat dari berbagai event event yang diikuti pemuda. Pada tahun 2020, Sawahlunto mengutus salah satu pemudanya menjadi perwakilan dalam ajang pemuda pelopor dan berhasil mendapatkan peringkat pertama ditingkat nasional sehingga setelah itu banyak pemuda pemudi Kota Sawahlunto yang mulai berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri seperti mengikuti pelatihan kewirausahaan pada tahun 2021 sebanyak 76 orang yang terbagi dalam :

Tabel 2.182
Pelatihan Kewirausahaan Untuk Pemuda Kota Sawahlunto
Tahun 2021

No	Jenis Pelatihan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki laki	Perempuan	
1.	Pembuatan Roti dan Kue	1	7	8
2.	Teknisi Sepeda Motor Konvesional	26	1	27
3.	Pengelasan SMAW Posisi 2F	27	-	27
4.	Kabinet Making	13	1	14
Total				**76**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Organisasi kepemudaan dan olahraga adalah hal penting yang ada dalam suatu daerah seperti tergambar dalam tabel diatas. Dalam Peningkatan prestasi olahraga dari tahun 2018 yang hanya mendapatkan 60 medali kemudian tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 70 medali dan tahun 2020 menjadi 77 medali tetapi pada tahun 2021 terjadi kenaikan perolehan medali yang sangat signifikan menjadi 148 medali kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan lagi menjadi 183 medali karena banyaknya event event yang diikuti. Dari kegiatan tersebut banyak terbentuk organisasi kepemudaan yang cukup aktif dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sangat memperhatikan dan sangat mendukung seluruh organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di Kota Sawahlunto. Adapun Perkembangan Organisasi kepemudaan di Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.183
Jumlah Organisasi Kepemudaan
Tahun 2018-2022

No	Nama Organisasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	HIPMI	V	V	V	V	V
2.	AMPI	V	V	V	V	V
3.	Fatayat NU	V	V	V	V	V
4.	Pemuda Muhammadiyah	V	V	V	V	V
5.	BM PAN	V	V	V	V	V
6.	Gema Kosgoro	V	V	V	V	V
7.	GM Kosgoro		V	V	V	V
8.	GP Anshor	V	V	V	V	V
9.	BKPRMI	V	V	V	V	V
10.	Garda Keadilan	V	V	V	V	V
11.	Nasyatul Assiyah	V	V	V	V	V
12.	IPTI		V	V	V	V
13.	KNPI Sawahlunto		V	V	V	V
14.	KNPI Kec. Talawi		V	V	V	V
15.	KNPI Kec. Barangin		V	V	V	V
16.	KNPI Kec. Lembah Segar		V	V	V	V

No	Nama Organisasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
17.	KNPI Kec. Silungkang		V	V	V	V
18.	GM FKPPI	V	V	V	V	V
19.	Pemuda Pancasila	V	V	V	V	V

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Tabel 2.184
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Tahun 2018–2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah organisasi Pemuda yang aktif (organisasi)	12	19	19	19	19
2	Jumlah Total organisasi Pemuda (organisasi)	19	19	19	19	19
3	**Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)**	**63,16**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Pada tahun 2018 terdapat 12 organisasi kepemudaan yang aktif tetapi tahun 2019-2021 terjadi peningkatan, karena seluruh organisasi kepemudaan tersebut sudah aktif. Dari 19 organisasi kepemudaan tersebut secara keseluruhan aktif serta mempunyai badan hukum serta masing masing organisasi mempunyai kegiatan yang selalu mendukung untuk visi misi dan arah pembangunan Kota Sawahlunto 5 tahun kedepan.

Tabel 2.185
Cakupan Pembinaan Olahraga
Tahun 2018–2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina (cabor)	32	36	38	44	45
2	Jumlah Cabang Olahraga yang ada/terdaftar (cabor)	32	36	38	44	45
3	**Cakupan pembinaan (%)**	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah cabang olahraga yang terdaftar di Kota Sawahlunto tahun 2018 sebanyak 32 cabor, tahun 2019 sebanyak 36 cabor, tahun 2020 sebanyak 38 dan tahun 2021 sebanyak 44 cabor. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 seluruh cabor tersebut dibina dengan baik melalui monitoring dan evaluasi ke cabor tersebut.

Tabel 2.186
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat Kota Sawahluto
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pelatih yang bersertifikat (orang)	10	11	12	22	25
2	Jumlah Seluruh Pelatih (orang)	64	72	76	88	90
3	**Cakupan pelatih yang bersertifikat (%)**	**15,6**	**15,3**	**15,8**	**25**	**27,8**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Dari tabel diatas dapat terlihat pada tahun 2018 dari 64 pelatih yang ada hanya 10 orang pelatih yang bersertifikat, sedangkan tahun 2019 ada penambahan jumlah pelatih menjadi 72 orang dengan penambahan pelatih bersertifikat menjadi 11 orang kemudian pada

tahun 2020 kembali ada penambahan pelatih manjadi 76 orang dan penambahan pelatih yang bersertifikat menjadi 12 orang, dan pada tahun 2021 terjadi penambahan yang cukup banyak menjadi 88 orang dan penambahan untuk peatih yang bersertifikat menjadi 22 orang yang disebabkan ada rencana untuk pengadaan porprov pada tahun 2022. Sehingga anggaran untuk pendidikan dan pelatihan pelatih ditingkatkan.

Tabel 2.187
Cakupan Pembinaan Atlet Pelajar Kota Sawahluto
Tahun 2018–2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Atlet Pelajar Yang dibina (orang)	100	101	110	113	118
2	Jumlah Seluruh Atlet Pelajar (orang)	178	181	188	200	220
3	**Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)**	**56,2**	**55,8**	**58,5**	**56,5**	**53,6**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Dari cakupan pembinaan atlet pelajar Kota Sawaahlunto terlihat terjadi peningkatan dari tahun 2018 sampai 2021, begitu juga dengan jumlah atlet pelajar yang dibina secara tetapi secara persentase perbandingan antara jumlah atlet pelajar dan atlet pelajar yang dibina terjadi penurunan karena banyak nya tambahan atlet pelajar sedangkan yang dibina tidak semua atlet pelajar yang ada. Dari tingkat perolehan medali dalam setiap ajang turnamet olahraga juga terlihat fluktuatif dari tahun 2019-2021 karena adanya pengaruh wabah covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan olahraga tidak diikuti oleh Kota Sawahlunto, tahun 2022 kembali terjadi peningkatan karena telah dibukanya kran pelaksanaan kegiatan baik tingkat Kota maupun Tingkat Provinsi dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.188
Prestasi Olahraga Menurut Cabang
Tahun 2018 – 2022

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	KEMPO	-	1	-	20	14
2.	FASI	-	1	1	2	-
3.	PABBSI	-	1	-	1	-
4.	KODRAT	-	13	-	1	-
5.	IMI	-	1	4	-	-
6.	CRICKET	-	2	-	1	-
7.	FPTI	-	30	40	33	-
8.	PTMSI	-	2	-	-	-
9.	FORKI	-	5	36	2	-
10.	TI	-	17	-	49	-
11.	GABSI	-	12	-	4	-
12.	PASI	-	4	-	3	-
13.	PERCASI	-	1	-	-	-
14.	PELTI	-	10	1	9	-
15.	PERTINA	-	2	-	-	-
16.	PERPANI	-	-	-	18	-
17.	PGSI	-	-	-	2	-
18.	WI	-	-	-	16	
19.	Panjat Tebing	-	-	-	-	2
20.	Taekwondo	-	-	-	-	25
21.	Bridge	-	-	-	-	2
22.	Aero Sport	-	-	-	-	-
23.	Gulat	-	-	-	-	9
24.	Tenis Lapangan	-	-	-	-	-
25.	Catur	-	-	-	-	-

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
26.	Atletik	-	-	-	-	-
27.	Karate	-	-	-	-	-
28.	Tenis Meja	-	-	-	-	-
29.	Wushu	-	-	-	-	-
30.	PERBASI	-	-	-	-	-
31.	FOPI	-	-	-	-	-
32.	KICKBOXING	-	-	-	-	-
33.	HOCKEY	-	-	-	-	-
34.	ESPROT	-	-	-	-	-
35.	IBA MMA	-	-	-	-	-
36.	ABTI	-	-	-	-	-
37.	PDBI	-	-	-	-	-
38.	YONG MOO DO	-	-	-	-	-
39.	PESTI	-	-	-	-	-
40.	PORDASI	-	-	-	-	-
41.	FAJI	-	-	-	-	-
42.	GATEBALL	-	-	-	-	-
43.	PORSEROSI	-	-	-	-	-
44.	FUTSAL	-	-	-	-	-
45.	MI	-	-	-	-	-
Total Medali			**102**	**82**	**161**	**52**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Dari tabel diatas juga dapat dilihat peningkatan perolehan medali pada tahun 2021 tidak lepas dari pengaruh pelatih pelatih yang sudah mempunyai sertifikat kepelatihan yang diperoleh Kota Sawahlunto sebanyak 22 orang yang tersebar dalam berbagai cabang olahraga. Begitu juga dengan tingkat pembinaan terhadap atlit muda yang selalu meningkat dari tahun 2019 sebanyak 181 orang, tahun 2020 menjadi 188 orang dan pada tahun 2021 menjadi 200 orang. Kemudian dari tabel diatas juga tergambar jumlah atlit yang dianggap berprestasi fluktuatif dari tahun 2019 yang berjumlah 78 kemudian tahun 2020 turun menjadi 59 orang karena adanya pengaruh wabah covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan olahraga tidak diikuti oleh Kota Sawahlunto dan kembali naik pada tahun 2021 menjadi 141 orang.

N. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik merupakan Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota. Setiap urusan memiliki indikator yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kota Sawahlunto pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 2.189
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku Kota Sawahlunto Dalam Angka	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kota Sawahlunto	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa ketersediaan sistem data dan statistik terintegrasi serta data statistik berupa buku Kota Sawahlunto Dalam Angka beserta

Buku PDRB Kota Sawahlunto dari tahun 2018-2022 telah terpenuhi, data tersebut merupakan dasar bagi perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah.

Meskipun indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik telah terpenuhi, namun masih terdapat permasalahan yang harus segera diatasi, yakni belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 1). Masih rendahnya pemahaman beberapa Perangkat Daerah yang telah menyampaikan data saat dilakukan verifikasi dan validasi; 2). Belum optimalnya hasil forum satu data; 3).Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data.

O. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Pengamanan informasi merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto melalui Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian merupakan Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini yang sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek, mulai dari administrasi perkantoran, perencanaan dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Berikut capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian di Kota Sawahlunto pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 2.190
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terselenggaranya Pengamanan Informasi Pemda (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, Penyelenggaraan pengamanan informasi daerah di Kota Sawahlunto terlihat berjalan dengan baik, tercermin dari terpenuhinya target setiap tahunnya sehingga tingkat capaian keamanan informasi pemerintah menunjukkan angka 100 % setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang berakibat pada belum optimalnya pengamanan informasi, yakni: 1). Belum memadainya sarana dan prasarana persandian; 2). Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli di bidang persandian.

P. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya

Kota Sawahlunto adalah Kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian besar telah ditetapkan sebagai cagar budaya dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya" dan terus melestarikan peninggalan hindia Belanda di Sawahlunto dan menjadikan Kota Sawahkunto sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat sejak produksi pertambangan terus menurun. Pada tanggal 6 Juli 2019 Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dengan keputusan Komite Warisan Dunia. Kawasan WTBOS meliputi 7

(tujuh) kabupaten/kota yang meliputi : Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar dan Kab. Padang Pariaman. Gambar 2. 1 Penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) sebagai Warisan Dunia UNESCO tanggal 6 Juli 2019 di Baku, Azerbaijan, 2019 Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto merupakan warisan budaya dunia ke-5 setelah Borobudur, Prambanan, Sangiran, dan Subak Bali. Cikal bakal pengajuan ini sudah dimulai sejak Tahun 2009 yang lalu, namun penggarapan secara intens untuk proses nominasi, evaluasi, hingga penetapan berlangsung cukup cepat, dimana hanya membutuhkan waktu 4 (empat) tahun sejak masuk dalam daftar sementara (tentative list) pada 30 Januari 2015 dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 12.15 waktu Baku Azerbaijan (https://whc.unesco.org/en/list/1610) yang dihadiri sebanyak 22 (dua puluh dua) orang delegasi Republik Indonesia dengan Ketua delegasi Prof. Rosa Surya Putra (Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO) dan Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat) serta Deri Asta (Walikota Sawahlunto) Proses sidang dimulai dengan ICOMOS membacakan hasil misi evaluasi, tanggapan para anggota komite warisan dunia, hingga Pimpinan Sidang yang saat ini dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Republik Azerbaijan mengetok palu tanda pengakuan kekayaan budaya Ombilin Sawahlunto sebagai kekayaan budaya dunia. Tentunya penetapan ini tidak II - 3 berjalan mulus dengan berbagai kondisi baik di daerah maupun di pusat, terutama peraturan perundangan pelestarian yang masih belum secara menyeluruh dapat dijadikan panduan dalam pengelolaan situs warisan dunia maupun cagar budaya.

Sawahlunto ditetapkan sebagai Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) adalah contoh representatif dan luar biasa dari kesatuan teknologi perintis yang direncanakan dan dibangun oleh insinyur Eropa di koloni mereka serta dirancang untuk mengekstraksi sumber daya batubara yang strategis. Properti ini tidak hanya memiliki nilai universal yang luar biasa karena menunjukkan perkembangan teknologi perintis, memadukan pengetahuan teknik Eropa dengan kearifan lingkungan lokal dan praktikpraktik tradisional dalam pengorganisasian tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan dampak mendalam dan berkelanjutan dari perubahan hubungan sosial dalam konteks produksi yang diberlakukan oleh kekuatan kolonial Eropa di koloni mereka, dalam hal mensuplai material dan tenaga kerja guna menopang industrialisasi di seluruh dunia pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Merujuk pada dokumen rencana pengelolaan (management plan) situs Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto ini dikelola dengan 3 (tiga) tingkat, pertama tingkat kebijakan yang melibatkan 12 (dua belas) kementerian dibawah koordinasi sebagai Ketua Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Wakil Ketua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Sumatera Barat, dan Bupati Solok, Bupati Tanah Datar, Bupati Padang Pariaman, Walikota Sawahlunto, Walikota Solok, Walikota Padang Panjang, dan Kota Padang. Kedua tingkat perencanaan dengan pengelola harian berada pada kantor pengelola situs, meskipun secara resmi belum terbentuk, dengan koordinasi dan konsultasi dengan unit pengelola teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sumatera Barat (Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya), pemilik aset objek signifikan, dan instansi terkait di provinsi, untuk dewan penasehat terdiri dari akademisi, ahli, dan komunitas, ketiga adalah tingkat operasional berada pada instansi teknis membidangi perencanaan, dan Kebudayaan di 7 (tujuh) kabupaten kota situs Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto.

Kota Sawahlunto sebagai Kota yang memiliki keragaman seni dan budaya serta memiliki banyak seniman-seniman yang berpotensi dibidangnya. Sebagai Kota yang telah mendeklarasikan sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, Kota Sawahlunto sering menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan event-event di bidang seni dan budaya. Budaya-budaya yang ada berkembang menjadi kelompok-kelompok seni dan komunitas budaya. Komunitas budaya adalah kesatuan sosial yang masih memegang tradisi budaya dan mempunyai ikatan geneologis, kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial,

dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan dan adat istiadat serta memiliki berbagai aktivitas sosial menurut pola tertentu. Berikut ini data komunitas budaya yang ada dan berkembang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.191
Komunitas Budaya yang ada di Kota Sawahlunto

No	Nama Komunitas	Jumlah
1.	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)	1
2.	Bundo Kandung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau	1
3.	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	10
4.	Bundo Kandung Kerapat Adat nagari	10
5.	Paguyuban Jawa	1
6.	Paguyuban Batak	1
7.	Paguyuban Sunda	1
8.	Komunitas Kota Tua Sawahlunto	1
9.	Komunitas Anak Nagari Sawahlunto (KANS)	1
Total Komunitas Budaya		**27**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2022

Jumlah Komunitas Budaya yang ada dari tahun 2018 sampai tahun 2020 berjumlah 25 komunitas budaya sedangkan pada tahun 2021 bertambah 2 komunitas budaya sehingga menjadi 27 komunitas budaya dan tahun 2022 jumlah komunitas tidak ada penambahan dan pengurangan sama sekali, 5 komunitas budaya yang telah aktif melaksanakan kegiatan, baik berupa acara adat dan tradisi maupun pagelaran seni dengan persentase sebesar 20 persen, sementara masih ada 20 komunitas budaya lagi yang belum aktif atau sebesar 80 persen artinya masih banyak komunitas budaya yang belum mampu menggali dan mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai dan seni budaya daerah yang akan menjadi karakter bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Kota Sawahlunto di samping memiliki kekayaan kesenian yang multietnis juga memiliki Warisan Budaya Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto atau disebut WTBOS, yang merupakan bukti dampak revolusi industri dunia Barat di wilayah Hindia Belanda. Walaupun operasi penambangan batu bara telah berhenti, namun jejak-jejak Kota tambang dengan segala tinggalannya masih terjaga dengan asri dan menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki Kota Sawahlunto. Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan, sekaligus sebagai salah satu asset pusaka yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai kota yang telah eksis sejak zaman Belanda, Sawahlunto memiliki banyak benda cagar budaya yang perlu dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai salah satu keunggulan lokal yang dimiliki.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan berbagai upaya agar bukti-bukti peninggalan tersebut tetap terawat dengan baik dan dilestarikan serta dengan ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prisip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022. Sebagai komitmen, Pemerintah Daerah telah menetapkan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs peninggalan tersebut sebagai Cagar Budaya. Adapun Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.192
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah sarana Penyelenggaraan kesenian (set)	9	20	20	20	20
2.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan (unit)	69	73	83	85	88
3.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit)	119	130	144	153	164
4.	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan (persen)	57,98	56,15	57,63	55,55	65,5
5.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola (unit)	21	21	21	94	102
6.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit)	119	130	144	153	164
7.	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola (persen)	17,65	16,15	14,58	61,44	69,95

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2022

Pada tahun 2021, dari 20 jumlah sarana penyelenggara kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto terdiri dari dalam ruangan (indoor) sebanyak 8 tempat dan luar ruangan (outdoor) 12 tempat, dan dari 153 total jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah yang ada pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 164 dan terdapat 88 buah yang sudah dilestarikan. Situs dan kawasan cagar budaya daerah yang ada terdapat 102 buah yang sudah dikelola, terjadi penambahan yang sangat dari tahun 2021 yang hanya sebanyak 94 buah. Persentase jumlah benda cagar budaya, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 65,5%. Kalau dilihat dari data persentase tahun sebelumnya terjadi peningkatan, hal ini disebabkan karena jumlah benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya terjadi penambahan di tahun 2022, penambahan penetapan benda, bangunan, struktur dan situs serta kawasan cagar budaya sebanyak 11 cagar budaya, sehingga dari jumlah yang awalnya cuma 153 keseluruhan menjadi berjumlah 164 serta Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola juga meningkat dari tahun 2021 berjumlah 94 buah, pada tahun 2022 meningkat menjadi 102 buah.

Berdasarkan data di atas, dalam rangka pelestarian benda cagar budaya salah satu langkah yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan cagar budaya. Dalam konteks pelestarian budaya, Pemerintah kota juga telah memelihara Benda Cagar Budaya (BCB) seperti bangunan tua dengan arsitektur Eropa peninggalan Belanda yang direhabilitasi dengan mempertahankan keaslian bentuknya dan dijadikan sebagai objek wisata. Kota Sawahlunto tidak hanya melestarikan benda cagar budaya (tangible), tetapi juga akan melestarikan budaya tak benda (intangible). Untuk data awal, ada 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Sawahlunto sebagai Budaya Tak Benda (intangible). Berikut ini data warisan budaya tak benda (intangible) di Kota Sawahlunto berdasarkan Data Objek Pemajuan Kebudayaan.

Tabel 2.193
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible*)
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Manuskrip	5	5	5	5	5
2.	Tradisi Lisan	46	46	43	43	43
3.	Adat Istiadat	40	40	40	40	40

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4.	Ritus	12	12	13	13	13
5.	Pengetahuan Tradisional	18	18	18	18	18
6.	Teknologi Tradisional	27	27	19	19	19
7.	Seni	38	38	38	38	38
8.	Bahasa	2	2	2	2	2
9.	Permainan Rakyat	35	35	35	35	35
10.	Olahraga Tradisional	2	2	2	2	2
	Total	**225**	**225**	**215**	**215**	**215**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel di atas, dapat di lihat total objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang ada di Kota Sawahlunto pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah sebanyak 225 OPK sedangkan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 terjadi pengurangan menjadi 215 OPK yang disebabkan karena setelah dilakukan regestrasi/penelitian ulang yang dilakukan pada tahun 2020 ada beberapa kriteria yang tidak termasuk kedalam OPK, seperti Tradisi Lisan yang awalnya berjumlah 46 menjadi 43, begitu juga dengan Teknologi Tradisional yang awalnya 27 menjadi 19 sedangkan pada Ritus terjadi penambahan 1 buah, namun ada dua (2) buah warisan budaya tak benda (intangible) yang sudah masuk ke dalam Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) yaitu Songket Silungkang yang termasuk kedalam Pengetahuan Tradisional dan Bahasa Tangsi yang termasuk kedalam Bahasa. Pemerintah Kota Sawahlunto berkewajiban menjaga dan mempertahankan serta melestarikannya sebagai warisan budaya tak benda agar dapat dilihat dan dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Tabel 2.194
Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya	40,28	40,28	62,50	69,44	88,70
2	Persentase Penampilan kelompok seni budaya	25,58	27,78	37,50	55,56	64,51
3	Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari	6,05	22,2	26,7	31,1	20
4	Persentase Budaya Benda yang Lestari	63,85	66,37	68,46	70,56	65,50
5	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	13,187	18,598	20,458	22,504	29.298

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2022

3. Jumlah Kunjungan Museum

Kalau dilihat dari data jumlah kunjungan objek wisata museum goedang ransum pada tabel 2.30 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2020 jumlah kunjungan menurun secara drastis karena disebabkan wabah pandemi covid-19 yang membuat seluruh tempat wisata atau tempat keramaian ditutup semua, namun kalau di lihat pada objek museum kereta api terjadi fluktuasi, hal ini merupakan tugas pemerintah daerah bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan pada objek Museum Kereta Api dengan Iconnya "Mak Itam". Saat ini kondisi lokomotif Mak Itam memang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, namun Pemerintah dapat membuat duplikat Mak Itam sehingga para pengunjung dapat merasakan berwisata dengan Duplikat kereta api Mak Itam namun suasana yang dirasakan seperti zaman dahulu. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.195
Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Museum Goedang Ransum	14.139	15.309	5.980	5.605	8797
2	Lubang Tambang Mbah Soero	8.151	8.492	3.957	3.884	6373
3	Museum Kereta Api	7.977	6.503	3.250	2.869	6159
	Jumlah	**30.267**	**30.304**	**13.187**	**12.358**	**21.329**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2022

Q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat Kota Sawahlunto. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan senantiasa terus dilakukan dengan menambah jumlah perpustakaan di lokasi yang mendekati permukiman masyarakat. Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 – khususnya urusan pemerintahan wajib bidang perpustakaan – menjadi fenomena baru bagi perkembangan perpustakaan di daerah terutama dalam hal sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerinrah Kabupaten/Kota. Dengan adanya sinkronisasi program kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan pencapaian program pembangunan di bidang perpustakaan dapat lebih realistis dan terukur. Untuk perkembangan urusan perpustakaan di Kota Sawahlunto sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.196
Rasio Perpustakaan Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022 *
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (orang)	169.174	173.452	52.530	86.936	158.045
	Perpustakaan Daerah	61.314	64.500	26.860	27.089	55.948
	Perpustakaan SD/MI	67.639	68.322	9.627	34.385	36.146
	Perpustakaan SMP/MTs	19.049	19.241	5.399	7.878	43.032
	Perpustakaan SMA/SMK/MA	16.675	16.843	7.201	11.496	16.783
	Perpustakaan Desa/Kelurahan	1.433	1.450	613	1.229	1.233
	Taman Bacaan Masyarakat	3.064	3.096	2.830	4.859	4.903
2	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (%)	0.28	2.53	-69.71	65.50	84.57
	Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto	61.898	62.524	63.500	65.687	65.687
3	Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk	2.73	2.77	0.83	1.32	2.40

Sumber Data : Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2022

Untuk perkembangan koleksi buku pada Perpustakaan Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.197
Perkembangan Koleksi Buku di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (buku)		163.330	183.204	200.907	174.361
	Perpustakaan Daerah	13.821	14.335	14.819	15.249	15.461

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Perpustakaan SD/MI		119.005	138.602	131.692	117.252
	Perpustakaan SMP/MTs		20.311	18.954	34.956	25.057
	Perpustakaan SMA/SMK/MA		6.044	6.354	6.373	6.631
	Perpustakaan Desa/Kelurahan		2.142	2.069	8.391	6.637
	Taman Bacaan Masyarakat		1.493	2.406	4.246	3323
2	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat (orang)	8	11	12	14	14
3	Koleksi Buku yang tersedia Per satuan Penduduk (%)		2.61	2.78	3.05	2.65

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan Uraian diatas bahwasannya Koleksi Buku yang terdapat di Perpustakaan Di kota Sawahlunto mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Komitmen kepala daerah dalam meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Sawahlunto dengan menganggarkan membeli Buku buku terbaru setiap tahunnya. Selain itu meningkatkan pelayanan Perpustakaan Di Kota Sawahlunto, Pemerintah Daerah Melakukan Penambahan SDM melalui penerimaan CPNS.

Tabel 2.198
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto
Tahun 2018- 2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Layanan Perpustakaan (layanan)					
	Pustaka : Umum	3	3	3	3	3
	Pustaka : Desa/Kelurahan	27	27	27	27	27
	Pustaka : Sekolah	92	92	92	92	92
	Pustaka : Perguruan Tinggi					
	TOTAL	**122**	**122**	**122**	**122**	**122**
2.	Jumlah Koleksi (koleksi)					
	Pustaka : Daerah	31,549	32,624	33,674	34,450	34.956
	Pustaka : SD/MI		119,005	138,602	131,692	345.676
	Pustaka : SMP/MTs		20,311	18,954	34,956	185.058
	Pustaka : SMA/SMK/MA		6,044	6,354	6,373	257.940
	Pustaka : Desa/Kelurahan		2,142	2,069	8,391	13.260
	TOTAL	**31,549**	**180,126**	**199,653**	**215,862**	**836.890**
3.	Jumlah Tenaga Perpustakaan (orang)					
	Pustaka : Umum	8	11	12	14	14
	Pustaka : Desa/Kelurahan	27	27	27	27	27
	Pustaka : Sekolah	92	92	92	92	92
	Pustaka : Perguruan Tinggi					
	TOTAL	**127**	**130**	**131**	**133**	**133**
4.	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan (orang)					
	Pustaka : Daerah	61,314	64,500	26,860	27,089	55.948
	Pustaka : SD/MI	67,639	68,322	9,627	34,385	36.146
	Pustaka : SMP/MTs	19,049	19,241	5,399	7,878	43.032
	Pustaka : SMA/SMK/MA	16,675	16,843	7,201	11,496	16.783

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Pustaka : Desa/Kelurahan	1,433	1,450	613	1,229	1.233
	TOTAL	**166,110**	**170,356**	**49,700**	**82,077**	**153.142**
5.	Jumlah Perpustakaan Terakreditasi (pustaka)					
	Pustaka : Daerah	0	0	0	2	2
	Pustaka : SD/MI	0	0	0	1	9
	Pustaka : SMP/MTs	0	0	0	2	5
	Pustaka : SMA/SMK/MA	0	0	0	1	3
	Pustaka : Desa/Kelurahan	0	0	0		
	TOTAL	0	0	0	**6**	**19**
6.	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (taman baca)	4	4	5	5	5
7.	Jumlah Anggota Perpustakaan (anggota)	4.215	4.612	4.862	5.137	5.671
8.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (%)			72.13	72.45	74.14
9.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Msyarakat (%)			50.2	50.4	60,1

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2022

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan Uraian diatas dari 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, setiap unsurnya memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dengan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana, akan berdampak pada indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun berikutnya.

R. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan daerah. Karena akuisisi arsip statis merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring keberadaan arsip yang memiliki potensi arsip statis di lingkungannya. Berdasarkan Uraian diatas dapat dijelaskan bahwasannya Peningkatan Arsip Statis yang diakuisisi di Kota Sawahlunto dari Tahun 2017-2021 mengalami Fluktuatif. Permasalahan Ini dikarenakan beberapa hal antara lain : 1. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tertib arsip yang ditandai dengan tidak adanya ruangan arsip yang memadai 2. Rendahnya Minat ASN untuk menjadi Pengelola Arsip. 3. Kurangnya kesadaran/kepedulian para pegawai terutama unsur pimpinan tentang arti pentingnya arsip dan kearsipan.

Tabel 2.199
Perkembangan Arsip Statis yang Diakuisisi Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Peningkatan Arsip Statis yang diakuisisi	Arsip	867	1.981	3.532	2.147	5.284

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2022

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan daerah. Karena akuisisi arsip statis merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring keberadaan arsip yang memiliki potensi arsip statis di lingkungannya. Berdasarkan Uraian diatas dapat dijelaskan bahwasannya Peningkatan Arsip Statis yang diakuisisi di Kota Sawahlunto dari Tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami Fluktuatif. Permasalahan Ini dikarenakan beberapa hal antara lain : 1. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tertib arsip yang ditandai dengan tidak adanya ruangan arsip yang memadai 2. Rendahnya Minat ASN untuk menjadi Pengelola Arsip. 3. Kurangnya kesadaran/kepedulian para pegawai terutama unsur pimpinan tentang arti pentingnya arsip dan kearsipan.

Tabel 2.200
Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	11.5	11.5	7.7	11.5	11.5

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan Uraian Data diatas dapat dijelaskan masih rendahnya OPD dalam menerapkan Pengelolaan Arsip. Kondisi ini terjadi karena kurangnya pemahaman aparatur pengelola Arsip tentang Kearsipan sehingga berdampak pada OPD Lainnya. Pola Pembinaan pengelolaan arsip selama ini hanya berupa bimtek dan monitoring saja, untuk kedepannya akan dilakukan pendampingan langsung pengelolaan arsip dilapangan secara intensif berkelanjutan sampai OPD mampu mengelola arsip secara mandiri sesuai standar baku kearsipan.

Tabel 2.201
Persentase Kesediaan Arsip Sebagai Bahan AK, ABS dan PN Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Kesediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional	%	17	20	25	25	100

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan Uraian data diatas dapat dijelaskan Selama 4 tahun ini Tingkat Kesediaan Arsip sebagai Bahan AK, Alat Bukti dan Pertanggungjawaban Nasional masih dibawah 30 %. Ini dikarenakan Sarana Prasarana, Kompetensi SDM, Manajemen system Kearsipan dan Komitmen Pimpinan belum memadai. Maka dari itu untuk kedepannya Perangkat Daerah yang bersangkutan akan melakukan pendampingan langsung ke OPD Lainnya. Namun Pada Tahun 2022, OPD melakukan kebijakan dan Inovasi Inovasi terhadap penunjang perencanaan sehingga perencanaan pembangunan maupun perencanaan Teknis berjalan efektif dan efisien.

Tabel 2.202
SDM Pengelola Kearsipan Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	6	7	10	10	10

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan Uraian data diatas, Jumlah Pegawai yang mengelola kearsipan dari tahun 2018-2022 melandai dan stagnan. Ini dikarenakan Keterbatasan Anggaran sehingga SDM yang ditugaskan sebagai pengelola tiap tahunnya tidak mengalami penambahan.

Tabel 2.203
Data Capaian Pembangunan Kota Sawahlunto Bidang Kearsipan
Tahun 2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	953 Berkas
2	Arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	1212 Berkas
3	arsip statis yang telah dibuatkan sarana Bantu temu balik	83.994 Lembar
4	Jumlah arsip yang di masukkan dalam SIKN melalui JIKN	-
5	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	97%
6	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip NSPK	901 berkas
7	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana NSPK	-
8	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau di bubarkan dan pemekaran Daerah kota dengan NSPK	50,30 %
9	Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	80,66 %
10	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	5 %
11	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	1%

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2022

Dari beberapa Indikator Kinerja Daerah (Data Capaian Pembangunan Kota Sawahlunto Bidang Kearsipan Tahun 2022 terjadinya penurunan 26 % pada indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban karena ada beberapa kegiatan yang tidak ada yang mempengaruhi dalam rumus penghitungan sehingga terjadi penurunan persentase.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan kota Sawahlunto bersumber dari bidang perikanan tangkap dan bidang perikanan budi daya karena kondisi geografis Kota Sawahlunto yang berada 250 – 785 meter ketinggian dari laut. Untuk produksi ikan darat dan konsumsi ikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.204
Produksi dan Konsumsi Ikan
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Produksi Ikan (Ton)	216,05	217,26	206,27	189,79	235,55
Konsumsi ikan (kg)	1.327.948	1.908.507	2.456.822	2.472.273	2.072.506
Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	32,77	28,55	36,66	36,43	41,49

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2022

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ikan darat di Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai 2022 untuk produksi mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun tidak begitu signifikan. Namun tahun 2021 produksi ikan mengalami penurunan yaitu menjadi 189,79 ton dan pada Tahun 2022 ini produksi ikan sebesar 235,55. Namun dilihat dari jumlah konsumsi ikan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana tahun 2021 konsumsi ikan kota Sawahlunto adalah 36,43 kg perkapita per tahun dan pada tahun 2022 jumlah produksi ikan Kota Sawahlunto kembali mengalami peningkatan menjadi 235,55 ton. Dilihat dari kinerja produksi ikan tahun 2022 mengalami

peningkatan. Adapun yang mempengaruhi produksi dari perikanan ini adalah kualitas dan kuantitas benih, luas lahan budidaya ikan serta kualitas dan kuantitas makanan ikan. Dalam memproduksi ikan di Kota Sawahlunto mempunyai budidaya perikanan darat kolam dan perikanan perairan umum (rawa, danau dan sungai), adapun perkembangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.205
Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha)
Tahun 2018-2022

Jenis	2018	2019	2020	2021	2022
Sungai/perairan umum	195,97	195,97	195,97	195,97	195,97
Kolam	62,621	62,621	39,02	39,02	39,02
Sawah	-	-	-	-	-
Total	**258,591**	**258,591**	**234,99**	**234,99**	**234,99**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa luas area budidaya perikanan di tahun 2022 menjadi 234,99 hektar. Dilihat dari jenis areal budidaya perikanan tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan areal kolam tetap 39,02 hektar. Tidak adanya kenaikan budidaya ini sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi ikan yang dihasilkan, untuk tahun 2021 untuk produksi ikan budidaya sungai/peraian umum adalah 28,76 ton dan untuk budidaya kolam menghasilkan 177,52 ton. Untuk itu sangat perlu di lakukan perluasan untuk budidaya perikanan di Kota Sawahlunto dalam meningkatkan produksi ikan. Upaya peningkatan luas areal budidaya perikanan darat diantaranya melalui salah satunya pelaksanaan fasilitasi pada kelompok tani untuk pembangunan kolam terpal dan permanen beserta bibit ikan yang diiringi pembinaan langsung dari penyuluh, selain itu juga memanfaatkan aliran sungai untuk budidaya ikan. Dengan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu usaha masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mencukupi konsumsi masyarakat akan ikan.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Untuk mendukung Brand Image Pariwisata Halal, Pemko Sawahlunto telah menindaklanjuti Perda Nomor 1 Tahun 2020 pada Program/Kegiatan dan beberapa Subkegiatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga antara lain: Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata dan subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif.

Pariwisata Kota Sawahlunto memiliki spesifik dibandingkan dengan pariwisata di kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Pariwisata Kota Sawahlunto selain memiliki wisata alam, wisata buatan dan wisata religius, juga memiliki wisata sejarah dengan icon Kawasan Kota Lama dengan gedung-gedung dan bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Berikut adalah capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.206
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
Tahun 2018-2022

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB sektor Pariwisata (Juta rupiah)	73.951,36	82.406,43	75.255,42	80.359,32	97.528,6
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	2,17	2,24	2,06	2,18	2,22
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	2,58	2,48	1,75	1,86	1.601.967.246
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaaan (%)	1,37	0,12	-0,98	2	5,14
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	-22,0	-9	-59	14,59	36
6	Tingkat hunian akomodasi (%)	23,81	14,74	15,84	19,27	30,29
7	Persentase pengunjung yang mengantakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	60	65	65	75	80
8	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	32,25	32,25	38,24	50	50
9	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (%)	60,55	60,55	60,55	64,26	34
10	Jumlah Wisatawan (orang)	260.214	235.524	95.995	88.248	123,882
11	Persentase kelembagaan kepariwisataan yang professional (%)	13,22	13,22	13,22	15,30	51

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Data kunjungan objek pariwisata di Kota Sawahlunto dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.207
Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Sawahlunto (Berdasarkan Tiket Masuk)
Tahun 2018-2022

Objek Wisata	2018	2019	2020	2021	2022
Museum Gudang Ransum	14.143	15.309	5.959	5.574	9.568
Museum Kereta Api	7.964	6.503	3.246	2.867	6.030
Water Boom	76.274	68.709	23.024	31.150	38.692
Taman Satwa Kandi	66.166	57.715	15.894	14.890	34.507
Lubang Tambang Mbah Soero	8.663	8.492	3.932	3.704	6.745
Desa Wisata Rantih	5.619	5.599	2.822	2.406	1.082
Kelok 16	-	-	-	-	-
Puncak Cemara	52.079	44.627	21.682	17.812	20.990
Taman Buah	9.545	4.897	3.363	6.556	2.943
Camping Ground Kandi	18.578	9.611	9.627	3.289	3.025
Sinema 4 Dimensi					2.795
Museum Tari					184
Museum Musik					510
Museum Lukis					314
Iptek Center					5.385
Kampung Lebah Zam Zam					94
Puncak Sati					81
Kolam Pemandian Mudiak Lugha					8.075
Total	**260.214**	**235.524**	**95.995**	**88.248**	**141.020**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2022 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2022

Kalau di lihat dari tabel di atas, jumlah pengunjung pada objek wisata berdasarkan tiket masuk tahun 2020 dan 2021 pada masing-masing objek terjadi penurunan ini disebabkan karena Kota Sawahlunto juga terdampak wabah covid-19 sehingga membuat objek objek tersebut ditutup dan bagi yang masih dibuka harus diterapkan protokol

kesehatan yang ketat serta turunnya minat masyarakat untuk berkunjung ketempat wisata yang disebabkan ikut turunnya pendapatan atau perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Tetapi pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan kunjungan. Camping Ground Kandi terjadi kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 karena adanya penambahan atraksi baru pada Camping Ground pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2021 dan 2022 kembali terjadi penurunan sehingga secara keseluruhan akan berdampak terhadap jumlah pengunjung wisata di Kota Sawahlunto yang tentunya akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto, baik dari sisi industri pariwisata maupun kelembagaan pariwisata, adapun rincian kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.208
Jumlah Pengunjung Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
Tahun 2018-2022

Pengunjung	2018	2019	2020	2021	2022
Wisatawan Mancanegara	360	403	7	7	34
Wisatawan Nusantara	259.854	235.121	95.988	88.241	123.848
Total	**260.214**	**235.524**	**95.995**	**88.248**	**123.882**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung Wisatawan Mancanegara pada tahun 2018 relatif cukup banyak sebanyak 360 orang yang berasal dari berbagai Negara dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 403 orang karena banyaknya kegiatan kegiatan yang bertaraf internasional seperti Sawahlunto Internasional Songket Silungkang Carnival dan Sawahlunto Internasional Musik Festival yang diadakan di Kota Sawahlunto. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 7 orang, penurunan ini disebabkan karena Kota Sawahlunto juga terdampak wabah covid-19 sehingga membuat objek objek tersebut ditutup dan kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi objek wisata yang disebabkan juga karena perekonomian masyarakat yang juga ikut terdampak karena wabah covid-19 begitu juga dengan tahun 2021 kunjungan wisatawan mancanegara hanya sebanyak 7 orang. Tetapi pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan menjadi 34 orang. Kunjungan wisatawan nusantara terjadi kenaikan dari 88.241 orang menjadi 123.882 orang yang disebabkan mulai hilangnya dampak wabah covid-19 sehingga seluruh masyarakat sudah kembali bebas melakukan aktifitas diluar rumah.

Ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prinsip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022, Terkait dengan itu destinasi pariwisata sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat disampaikan bahwa dari target 9 Destinasi pariwisata yang dikembangkan telah terealisasi sebanyak 3 destinasi baru, sedangkan objek wisata baru yang dibangun adalah kelok 16 dan batu runcing (geopark). Terkait keikut sertaan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan objek wisata baru terlihat dari gerakan PT.WWS yang mengelola Waterboom dan Bioskop 4 Dimensi. Potensi objek wisata yang terdata sampai 2022 tercatat sebanyak 30 Geosite yang sudah termasuk kedalam Geopark Nasional.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidag Pertanian, Pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan beberapa indikator kinerja daerah yang menjadi target pencapaian pemerintah daerah di urusan bidang pertanian, adapun indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.209
Capaian Indikator Bidang Pertanian
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Sektor Pertanian	312.007,01	325.354,30	326.224,79	345.211,69	383.196,89
Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	9,16	8,84	8,92	8,96	8,73
Produksi Padi	16.108,00	17,926,00	17.874,45	16.691,72	17.733,35
Produksi Kakau(ton)	542,02	565,73	566,11	572,44	588,80
Produksi Karet (ton)	1262,63	1540,16	2012,87	2223,86	2230,91
Jumlah Produksi ikan konsumsi (ton)	216,05	217,26	206,27	215,92	235,55
Produktifitas Pertanian Per hektar/Tahun (padi sawah)(%)	4,69	5,16	5,16	5,56	5,95
Persentase Penurunan Kejadian danJumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	20,00	20,00	20,00	0	100
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi (%)	12,85	11,29	-0,29	-6,61	6,24
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kakao (%)	4,28	4,37	0,06	1,11	2,86
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Karet(%)	1,75	21,98	30,69	10,48	0,32
Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi (%)	5,41	-3,91	-0,73	-4,45	6,09
Persentase Peningkatan Produksi Daging Ayam (%)	-	-	-2,59	33,30	13,47
Indek Penanaman (IP)	2,03	2,14	2,07	2,12	2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2022

Dari tabel diatas PDRB Sektor Pertanian dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami Peningkatan setiap tahunnya, dan untuk Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan pada Tahun 2019 mengalami penurunan dan tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan kembali walaupun tidak terlalu siknivikan. Untuk Produksi Padi pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 hal ini disebabkan karena produktivitas meningkat dan pendampingan di lapangan terutama di lokasi kerangka samping area (KSA) BPS, luas baku lahan sawah dari 1.860 hektar menjadi 1.571 hektar dan untuk Produksi Tanaman Kakao dapat dilhat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh karena adanya pelatihan bagi Petani tentang pemeliharaan tanaman kakao dan diberikan bantuan pupuk npk, adanya bantuan gunting pangkas untuk memangkas Tanaman. Dan untuk Produksi Tamanan Karet juga mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya sebesar 2012,87 Ton dan Tahun 2021 sebesar 2223,86 Ton dan tahun 2022 sebesar 2230,91 ton, hal ini disebabkan karena adanya pemeliharaan tanaman yang baik oleh petani dan pembinaan oleh penyuluh tentang pemeliharaan tanaman dan tentang pengendalian hama penyakit. Jumlah Produksi Ikan Konsumsi pada Tahun 2022 juga mengalami peningkatan yaitu 235,55 Ton hal ini disebabkan oleh banyak nya pembudidayaan yang mengisi ulang kolam tersebut. Dan Untuk Produktifitas Pertanian Perhektar juga mengalami peningkatan pada Tahun 2022 Sebesar 5,95 % (padi Sawah) disebabkan karena adanya peningkatan pemakaian benih unggul berlebel sebanyak 3.000 kg benih gadang rumpun kumbayau, disamping itu juga ada bantuan pupuk NPK ponska plus sebanyak 22.500 kilogram untuk peningkatan Produksi dan Produktivitas padi. Untuk Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus Penyakit Hewan menular pada tahun 2022 ini dengan 100 %. Untuk Persentase Peningkatan Tanaman Padi pada Tahun 2022 mengalami peningkatan, tahun 2021 sebesar -6,61. Dan untuk Persentase Peningkatan Tanaman Kakao mengalami sedikit kenaikan pada Tahun 2022 ini yaitu sebesar 2,86 % hal ini disebabkan karena adanya pembinan oleh penyuluh pertanian dilapangan tentang

pemeliharaan Tanaman. Dan Untuk Persentase Peningkatan Persentase Produksi Tanaman Karet mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,32% hal ini disebabkan anatara lain kerena harga murah biasanya petani enggan untuk memanen. Dan untuk Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi pada Tahun 2022 sebesar 6,09%. Untuk Persentase Peningkatan Produksi daging Ayam pada Tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 13,47% Dan Untuk Indek Penanaman juga mengalami sedikit Kenaikan menjadi 2% pada Tahun 2022 hal ini disebabkan karena adanya perbaikan jaringan irigasi baik melalui dana APBD maupun APBN.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap, aktivitas perekonomian di Kota Sawahlunto. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal dan mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Adapun perkembangannya Sektor Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.210
Capaian Indikator Bidang Perdagangan Realisasi
Tahun 2018 -2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB sektor perdagangan	Juta Rupiah	510.433,17	553.593,38	547.822,20	564.865,95	560.862,45
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB(2010=100)	%	14,99	15,9	14,98	14,67	14,86
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	%	10	10	10	10	42,7
Persentase kinerja realisasi pupuk	%	80	80	80	98	67
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	0	40	0	37,7	0
jumlah omset dipasar pasar tradisional Sawahlunto	rupiah	23.635,4 1	23.900,00	22.885,00	25.048	25.563

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dari Tabel Urusan bidang Perdagangan diatas dapat disebutkan pada PDRB Sektor Perdagangan Pada Tahun 2022 mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 yaitu sebesar 564.865,95 dan pada tahun 2022 turun menjadi 560.862,45. Untuk Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (2010=100) pada Tahun 2022 ini mengalami peningkatan dari pada Tahun 2021 sebesar 14,67 dan pada tahun 2022 ini sebesar 14,86.

Untuk Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko dan Swalayan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 tidak mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 menjadi 42,7. Untuk Persentase Penilaian Realisasi Pupuk tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun tahun sebelumnya yaitu sebesar 98% dan tahun 2022 menjadi 67%. Untuk Persentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

pada Tahun 2022 yaitu sebsar 0 %. Dan Untuk Jumlah Omset Pasar Tradisional Sawahunto juga mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar 25.048, 00 dan Pada Tahun 2022 sebesar 25.563. Prilaku Pembelian barang berlebihan sebagai stock pada Tahun 2022 seperti untuk kebutuhan Beras, gula , minyak dan bahan lainnya sehingga terjadi kenaikan omset Pasar Pada Tahun 2022.

Daya beli di pasar-pasar tradisional di Kota Sawahlunto ini didukung oleh penataan (delapan) pasar tradisional dan pembangunan pasar songket Silungkang yang dapat meningkatkan pangsa pasar sehingga memberikan kontribusi terhadap sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang mana pasar merupakan tempat aktivitas perekonomian di kota Sawahlunto. Selain itu Kota Sawahlunto juga mempunyai 12 mini market dan 1.523 toko/warung/kios yang juga mempengaruhi proses perdagangan di Kota Sawahlunto. Untuk itu dapat dilihat perkembangan jumlah pedagang pasar yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.211
Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Nama Pasar	Pedagang Yang Menempati Kedai (Orang)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pasar Sawahlunto	779	779	779	779	779
2.	Pasar Silungkang	72	72	72	72	72
3.	Pasar Talawi	140	140	140	140	140
4.	Pasar Sapan	50	50	50	50	50
5.	Pasar Tak Bancah	3	3	3	3	3
6.	Pasar Tumpuak Tangah	0	0	0	0	0
7.	Pasar Lumindai	30	30	30	30	30
8.	Pasar Kolok Mudik	10	10	10	10	10
9.	Pasar Songket	75	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dilihat dari tabel diatas jumlah pedagang tetap yang ada di setiap pasar yang ada di Kota Sawahlunto tidak mengalami penambaha, ini seiring dengan peningkatan penataan pasar yang dilakukan pada tahun 2018 smpai dengan tahun 2022. Dengan tidak adanya penambahan pedagang yang menempati kedai di Pasar Sawahlunto ini dikarenakan karena keadaan Kota Sawahlunto yang sekarang masih dalam keadaan pasca pandemi Covid-19. Peningkatan usaha perdagangan di Kota Sawahlunto bisa dikatakan tersendat dan sekarang pada Tahun 2022 Pasca Pandemi Perdagangan di Kota Sawahlunto sudah mulai naik. Selain pedagang tetap, yang berpengaruh terhadap jual beli di pasar adalah pedagang kaki lima, untuk itu dapat dilihat perkembangan pedagang kaki lima di masing-masing pasar sebagai berikut :

Tabel 2.212
Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2022

No	Nama Pasar	Pedagang Kaki Lima											
		Asli Sawahlunto						Luar Sawahlunto					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pasar Sawahlunto	145	154	160	160	160	160	200	213	213	213	213	213
2.	Pasar Silungkang	101	102	105	105	105	105	29	32	32	32	32	32
3.	Pasar Talawi	95	95	96	98	98	98	213	213	221	221	221	221
4.	Pasar Sapan	36	36	38	41	41	41	8	11	18	18	18	18
5.	Pasar Tak Bancah	10	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	3
6.	Psr Tumpuak Tangah	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1
7.	Pasar Lumindai	12	12	12	12	12	12	5	5	5	5	5	5

No	Nama Pasar	Pedagang Kaki Lima											
		Asli Sawahlunto						Luar Sawahlunto					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.	Pasar Kolok Mudik	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2
9.	Pasar Songket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	383	401	407	420	434	434	451	464	495	495	495	495

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dilihat dari tabel diatas secara keseluruhan terhadap jumlah pedagang kaki lima yang berasal dari luar Sawahlunto tidak mengalami kenaikan, terutama di Pasar Talawi dan Pasar Sawahlunto. Kedua pasar tersebut mudah untuk diakses, transportasi lancar dan mempunyai konsumen yang banyak dari pasar lainnya, terutama pasar Sawahlunto yang merupakan pusat dari seluruh pasar yang ada di Kota Sawahlunto.Kedua pasar diatas berjalan 2 kali dalam seminggu, untuk pasar sawahlunto pada hari rabu dan sabtu dan untuk Pasar Talawi pada hari selasa dan jumat.namun untuk kebutuhan pokok masih tetap ada setiap harinya. Pedagang yang berasal dari luar Sawahlunto ini pada umunya menjual sayur sayuran, ikan dan bahan lainnya yang mana produksi dari Kota Sawahlunto sendiri tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto seperti, ikan air tawar masih ada pedagang dari tanah datar begitu juga dengan pedaganga cabe merah, sayuran, daun bawang dan lainnya juga masih ada yang berasal luar sawahlunto, seperti tanah datar dan solok. Adanya pedagang luar ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan sayuran, ikan dan lainnya di Kota Sawahlunto. Sebenarnya apabila pedagang kaki lima ini dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat jika semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima dari luar Kota akan berpengaruh terhadap lapangan usaha bagi masyarakat kota, untuk itu perlu adanya peran pemerintah daerah dalam mengorganisir pedagang kaki lima dalam kota sehingga menjadi sumber daya baru bagi peningkatan ekonomi kota, sebagai katub pengaman dari pengangguran dan sarana pemenuhan kebutuhan konsumen dari golongan ekonomi lemah.

Untuk melindungi konsumen di pasar maka diwajibkan untuk setiap pasar untuk melaksanakan tera ulang. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan daerah, kegiatan Tera Ulang UTTP ini merupakan kewenangan daerah, dimana tahun tahun sebelumnya daerah hanya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini dan yang melakukan tera ulang di datangkan dari propinsi. Dengan telah diberlakukanya UU ini pada tahun 2017,2018 dan 2019 Dinas Koperindag tidak melakukan kegiatan Tera Ulang UTTP Karena sarana dan prasarana serta tenaga tera ulang di Kota Sawahlunto belum ada. Pada akhir tahun 2019 Kota Sawahlunto mendapatkan bantuan dari Kementerian Perdagangan untuk kegiatan Tera Ulang UTTP berupa sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tera Ulang UTTP, Tahun 2020 tidak melakukan tera ulang sehingga tahun 2021 tera ulang sebanyak 1650 buah timbangan yang ditera dengan kenaikan 80% dan Pada Tahun 2022 ini telah dilakukan Tera Ulang sebanyak 377 buah timbangan.

Secara teoritis yang diharapkan dari pasar ini adalah bagaimana berfungsinya pasar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, untuk itu salah satunya dapat kita lihat dari jumlah pendapatan/omset suatu pasar dalam menjalankan fungsinya tersebut. Rendah tingginya pendapatan/omset pasar inilah yang bisa menjadi salah satu yang mempengaruhi kemajuan suatu pasar. Kenyamanan dan keamanan konsumen juga sangat diperlukan dalam meningkatkan jual beli di pasar. Tahun 2021 omset pasar-pasar Sawahlunto totalnya Rp. 25.048.000,- dimana ini masih dibawah target RPJMD, untuk itu pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan rehab dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pasar untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen sehingga menarik masyarakat untuk berbelanja di pasar. Selain itu monitoring dan evaluasi terhadap pasar terutama dalam pendapatan pasar perlu dilakukan untuk melihat keberhasilan pasar dalam menjalankan fungsinya.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Capaian indikator kinerja bidang perindustrian sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.213
Urusan Pemerintahan Sektor Perindustrian Realisasi
Tahun 2018 -2022

uraian	Satuan	2018	2019	2020	2022	2022
Nilai PDRB sektor Industri	Juta Rupiah	415.867,46	392.312,53	395.492,23	432.174,39	474.214,96
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB(2010=100)	%	12,22	10,66	10,82	11,22	10,80
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah diKabupaten/Kota	%	10,62	10,62	10,62	10,62	4,46
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0	0	0	78
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	%	100	100	100	100	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansiterkait	%	100	100	100	100	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100
Persentase Produk IKM yang mempunyai standar Mutu	%	0	0	0	0,004	0,007
Persentase IKM yang memanfaatkan teknologiindustri	%	0	0	0	0,007	0,026

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dari tabel Urusan Pemerintahan Sektor Perindustrian dapat disebutkan antaralain yaituu untuk Nilai PDRB Sektor Industri pada Tahun 2022 mengalami Kenaikan dari Tahun 2021. Pada Tahun 2021 sebesar Rp.432.174,39 dan tahun 2022 sebesar 474.214,96. Dan untuk Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (2010=100) Tahun 2019 dan Tahun 2020 hampir sama yaitu diangka lebih dari 10 persen yaitu 2019 sebesar 10,66 % dan Tahun

2020 sebesar 10,82 % sedangkan pada Tahun 2021 sedikit mengalami Peningkatan yaitu sebesar 11,22 % dan untuk tahun 2022 turun menjadi 10,80%.

Untuk Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah diKabupaten/Kota dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami kenaikan dan tahun 2022 ini mengalami Penurunan yaitu menjadi 4,46. Dan Untuk Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP masih belum ada. Untuk Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansiterkait dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 mencapai 100 persen. Untuk Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait Tahun 2018 sampai Tahun 2021 mencapai 100 % dan tahun 2022 sekarang 0%. Untuk Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota Tahun 2018 sampai Tahun 2022 mencapai 100 %.

Untuk Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Tahun 2018 sampai Tahun 2022 mencapai 100 %. Dan Untuk Persentase Produk IKM yang mempunyai standar Mutu Tahun 2022 sebesar 0,007 % ada pergerakan sedikit di bandingkan Tahun tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya penerimaan standar mutu Produksi. Dan Untuk Persentase IKM yang memanfaatkan Teknologi Industri untuk tahun 2022 sebesar 0,026 % dan ini disebabkan karena IKM pada Tahun 2022 ada menerima alat produksi seperti Komputer, Printer, Alat Pencacah Plastik, *Spiner*.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi kesekretariatan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Secara rinci capaian kinerja urusan kesekretariatan daerah tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.214
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesekretariatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	na	na	B (80)	B (81,21)	B (83,40)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B	B(60,06)	B (61,03)	B (61,61)	B (61,92)
Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota Sawahlunto	%	- 6,44 %	2,23 %	- 1,99 %	54,67 %	25,05 %
LPPD	Skor	3,0965	na	na	na	na

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 80 pada tahun

2020 menjadi 83,40 pada tahun 2022 dengan kategori B. Indeks Kepuasan Masyarakat ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan realita. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota Sawahlunto mulai terlaksana pada tahun 2020 bekerja sama dengan Lembaga Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Sumatera Barat dengan sampel 10 Organisasi Perangkat Daerah. Sebelum tahun 2020, penilaian IKM dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Kinerja Kesekretariatan Daerah berikutnya adalah Nilai SAKIP. Nilai SAKIP Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 memiliki prediket SAKIP B dengan skor yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari skor 60,06 pada tahun 2019 menjadi 61,92 pada tahun 2022.

Peningkatan zakat di Kota Sawahlunto adalah Kinerja Kesekretariatan Daerah lainnya. Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa peningkatan zakat di Kota Sawahlunto berfluktuasi dari tahun ke tahun, dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 54,67 % dari Rp.2.856.875.200 pada tahun 2020 menjadi Rp. 4.418.653.451 pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp.5.525.690.987 atau terjadi peningkatan sebesar 25,05%. Peningkatan zakat ini sangat tergantung pada jumlah muzaki. Dan untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat yang mungkin diperoleh setiap tahun di Kota Sawahlunto adalah dengan mengetahui seberapa banyak potensi jumlah muzaki yang ada di Kota Sawahlunto. Saat ini terdapat kendala untuk mengetahui jumlah muzaki, karena penyerahan zakat yang dilakukan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah tanpa melaporkan jumlah konkrit muzaki yang ada pada instansi/lembaga/perangkat daerah tersebut, sehingga tidak diketahui perkembangan jumlah muzaki di Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun. Namun Baznas Kota Sawahlunto rencananya akan melakukan pendataan muzaki berdasarkan nama, instansi dan alamat.

Dan indikator kinerja urusan kesekretariatan daerah Kota Sawahlunto berikutnya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Nilai LPPD Kota Sawahlunto yang tersedia hanya pada tahun 2018 dengan skor 3,0965. Sedangkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2019-2022 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum ada diumumkan.

B. Sekretariat DPRD

a. Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap kelengkapan alat-alat DPRD Kota
b. Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen kerja Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Tahunan (RKPD)
c. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto untuk periode 2019 – 2024 adalah 20 orang, dengan 4 fraksi, yaitu:

- Fraksi PKPI
- Fraksi Persatuan Pembangunan, Demokrat, Perindo
- Fraksi PAN, Golkar, PDI Perjuangan
- Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya

Tabel 2.215
Jumlah anggota dewan berdasarkan partai politik dan jenis kelamin

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golkar	1	1	2
PPP	1	2	3
PKPI	2	1	3
PKS	2	-	2
PAN	2	-	2
Perindo	1	-	1
Demokrat	2	-	2
PDIP	2	-	2
Gerindra	1	-	1
Nasdem	2	-	2
Jumlah/total	16	4	20

Sumber : Sawahlunto dalam angka 2022

Tabel 2.216
Jumlah kegiatan Sidang dan Rapat DPRD Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2022

No.	Rapat	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Rapat Paripurna/Istimewa	32	33	14	18	20	1
2	Rapat Pimpinan/Gab. Pimpinan	18	19	43	43	42	44
3	Rapat Badan Musyawarah (Bamus)	20	21	19	18	20	20
4	Rapat Badan Anggaran (Banggar)	12	13	25	14	16	15
5	Rapat Panitia Khusus (Pansus)	15	16	-	8	10	-
6	Rapat Konsultasi	9	9	12	12	10	19
7	Rapat Fraksi	10	11	14	18	18	16
8	Rapat Kerja/Dengar Pendapat/gabungan Komisi	8	8	38	38	36	36
9	Rapat Badan Kehormatan (BK)	6	6	5	-	3	13
10	Rapat Badan Legislatif Daerah	6	6	64	64	60	14
11	Rapat Komisi	33	35	30	36	36	36
	Jumlah/total	169	177	268	269	271	-

Sumber : Sawahlunto dalam angka 2022
**) data dari Sekretariat DPRD*

Tabel 2.217
Jumlah Keputusan DPRD menurut Jenis Keputusan di Kota Sawahlunto,
Tahun 2017-2022

	Jenis Keputusan	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Keputusan DPRD	24	13	14	8	30	13
2	Keputusan Sekwan	28	23	37	48	13	28
	Jumlah/total	**52**	**36**	**51**	**56**	**43**	

Sumber : Sawahlunto dalam angka 2022

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Unsur Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Kota Sawahlunto terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Kota Sawahlunto pada urusan perencanaan untuk lima tahun terakhir dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.218

Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perencanaan Urusan Pemerintahan Tahun 2017 – 2021

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI CAPAIAN TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
I	**PERENCANAAN**						
1	Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi)	Peringkat	1	-	-	4	4
2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	92	99
3	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	%	100	100	100	100	99
4	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	%	50	19,22	21,43	26,55	28,3
5	Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	%	100	100	100	100	100
INDIKATOR KINERJA							
6	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak)	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak)	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA (Ada/tidak)	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak)	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	92	99
11	Penjabaran Konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	99
12	Kesesuaian Rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: RPJMD 2018-2023 (Data olahan)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perencanaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kecuali Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD Tingkat Provinsi). Sebagaiman Kita ketahui Indeks Kualitas Perencanaan merupakan penghargaan yang di berikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah, dan juga inovasi pembangunan yang telah dilakukan. Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD Tingkat Provinsi) merupakan indikator baru pada Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023, dimana Tahun 2021 Kota Sawahlunto meraih peringkat 4 dari 7 Kota yang ada di

Sumatera Barat. Hal ini turun satu peringkat dari target yang telah ditetapkan yaitu peringkat 3. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan tersebut karena menurunnya kualitas dokumen perencanaan yang dibuat. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari perencanaan tersebut melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana yang harus menjadi prioritas utama melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, studi tiru serta peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang kualitas perencanaan yang dihasilkan.

B. Unsur Keuangan

Di dalam Undang-undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Realisasi keuangan Kota Sawahlunto yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan dan silpa selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.219
Realisasi APBD Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

Uraian	Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	586.463.778.018,45	638.026.463.488,09	576.857.864.031,56	598.040.864.187,45	620.647.226.213,62
Belanja	582.394.700.607,61	622.472.823.122,01	544.263.658.204,79	599.185.054.472,27	643.653.414.741,00
Pembiayaan	779.342.925,21	-2.184.587.830,61	11.474.898.868,81	39.863.898.029,58	35.121.134.786,76
SILPA	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76	12.114.946.259,38

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi APBD Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuatif. Realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 586.463.778.018,45 mengalami kenaikan menjadi Rp. 620.647.226.213,62 tahun 2022. Realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp. 582.394.700.607,61 mengalami kenaikan menjadi Rp. 643.653.414.741,00 tahun 2022. Realisasi pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp. 779.342.925,21 mengalami kenaikan

yang signifikan menjadi Rp. 35.121.134.786,76 tahun 2022. Realisasi SILPA tahun 2018 sebesar Rp. 4.848.420.336,05 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp. 12.114.946.259,38 tahun 2022.

Capaian indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan Kota Sawahlunto secara keseluruhan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.220
Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Peningkatan PAD (%)	0,25	0,21	0,04	-0,14	0,28
3	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja (%)	90,95	89,04	89,58	92,11	94,47
5	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja (%)	38,81	37,40	50,50	96,21	40,19
6	Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja (%)	13,31	15,16	11,70	13,16	18,07
7	Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	8,05	8,96	10,32	8,44	10,62
9	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (%)	100,33	92,12	98,88	97,71	101,80
10	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (%)	90,85	88,56	89,70	83,54	76,35
11	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah (buah)	20	19	19	20	20
12	Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan (%)	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55
13	Rasio PAD (%)	1,49	1,68	1,74	1,95	1,95
14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (%)	68,21	68,21	60,02	10,15	10,15
15	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (%)	90,95	89,04	89,58	91,10	91,10
16	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (%)	94,36	94,98	98,19	100,94	96
17	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya (%)	0,75	2,09	6,30	6,37	0,71
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	-	29,531	26,775	39,307	58,225
19	Apakah ada Daftar Asset Tetap (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
20	Apakah Ada Manual untuk Menyusun Daftar Asset Tetap (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
21	Apakah Ada Proses Inventarisasi Asset Tahunan (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
22	Apakah Nilai Asset Tercantum Dalam Laporan Anggaran (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
23	Persentase SILPA (%)	1,05	0,69	2,19	6,72	0,66
24	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	1,05	0,69	2,19	6,72	0,66
25	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana (%)	0	0	0	0	0
26	Persentase Belanja Pendidikan (20 %)	20	20	20	20	20
27	Persentase Belanja Kesehatan (10 %)	18	18	23	24	24
28	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (%) ⟶ Perbandingan antara Belanja Langsung dengan APBD	51	54	46	62	62
	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (%) ⟶ Perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dengan APBD	49	46	54	38	38
29	Bagi Hasil Kabupatan/Kota dan Desa	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 tergolong cukup baik. Namun ada 3 indikator yang realisasinya rendah dan dibawah target yang telah ditetapkan yaitu persentase peningkatan PAD, nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, persentase realisasi penerimaan retribusi daerah, bahkan persentase realisasi penerimaan retribusi daerah ini mengalami penurunan dari tahun 2021. Rendahnya capain kedua indikator tersebut (persentase peningkatan PAD dan persentase realisasi penerimaan retribusi daerah) disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya, belum optimalnya pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, masih belum optimalnya penerimaan oleh pos-pos retribusi daerah, belum optimalnya pembukaan tempat wisata sehingga retribusi daerah yang berasal dari tempat rekreasi dan olahraga masih rendah, belum maksimalnya

penerimaan retribusi dari pelayanan kesehatan karena masih belum optimalnya pelayanan yang ada di rumah sakit dan puskesmas, rendahnya penerimaan retribusi dari pengujian kendaraan bermotor karena jumlah kendaraan yang melakukan pengujian menurun yang dipengaruhi oleh adanya sistem pengujian kendaraan online. Untuk itu pada tahun berikutnya perlu di optimalkan kembali pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada.

Belum tercapainya realisasi nilai IPKD dari yang ditargetkan disebabkan oleh masih rendahnya nilai pengukuran untuk masing-masing dimensi yang dinilai dalam IPKD tersebut (kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah). Untuk meningkatkan nilai IPKD ini harus dilakukan perbaikan dan perubahan yang terus menerus guna mewujudkan peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah.

Jenis, Jumlah Bank Dan Cabang Serta Asuransi

Bank dan asuransi merupakan lembaga intermediasi keuangan untuk menampung surplus pendapatan rumah tangga setelah konsumsi. Lembaga ini (terutama Bank) berperan dalam penciptaan modal yang akan digunakan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja pihak swasta dan pada gilirannya akan ikut membantu proses pembangunan ekonomi sebuah daerah.

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko nasabah dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Berikut adalah data jumlah bank dan asuransi yang ada di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.221
Jumlah Bank dan Asuransi Tahun 2018-2022

No	Bank dan Asuransi	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Bank (unit)	9	15	15	15	15
2.	Jumlah Perusahaan Asuransi (unit)	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022

Daftar nama Bank yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2022 :

1. Bank BRI KCP Unit Sawahlunto
2. Bank BRI KCP Unit Talawi
3. Bank BRI KCP Unit Santur
4. Bank BRI KCP Unit Silungkang
5. Bank Nagari Cabang Sawahlunto
6. Bank Nagari KCP Pembantu Talawi
7. Bank Mandiri Sawahlunto
8. Bank Syariah Mandiri
9. Bank BNI Sawahlunto
10. Bank BTPN KCP Sawahlunto

11. Bank BTN Kantor Kas Sawahlunto
12. BPR LPN Talawi Sakato
13. BPR LPN Pasar Baru Durian
14. BPR LPN Kubang
15. BPR Gajahtongga Kotopiliang

Daftar nama Asuransi yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2022 :
1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan

C. Unsur Kepegawaian

Penyelenggaraan Pemerintahan memerlukan sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksananya. Pemerintahan Daerah akan dapat diselenggarakan dengan baik, efektif dan efisien jika didukung dengan ASN yang senantiasa menerapkan nilai-nilai dasar ASN atau *Core Values* ASN yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. *Core Values* ini merupakan inti dari nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka mewujudkan ASN yang menerapkan *core values* ASN sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin ASN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, maka PNS wajib mematuhi disiplin PNS dan setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Berangkat dari uraian tersebut, adapun gambaran penanganan kasus kepegawaian di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.222
Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian	%	0.42	0.84	0.58	0.38	0.59

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan tabel dan data di atas dapat diketahui bahwa ASN di Kota Sawahlunto dalam segi penanganan disiplin maupun penanganan administrasi lainnya relatif baik. Pada tahun 2022 hanya terdapat 13 kasus kepegawaian dari total 2.172 jumlah pegawai yang ada di Kota Sawahlunto dan semua kasus yang muncul sudah terselesaikan. Untuk menekan angka kasus kepegawaian agar semakin kecil demi mewujudkan prinsip tata pemerintahan yang lebih baik dari tahun ke tahun, diperlukannya pemupukan *core values* ASN agar menjadi karakter pada setiap ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Upaya pembinaan internal secara preventif juga harus dilakukan secara rutin agar Pemerintah Kota Sawahlunto terbebas dari munculnya kasus kepegawaian baik dari segi penanganan disiplin maupun penanganan kasus administrasi lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konteks ini, adapun Indeks Kepuasan Pelayanan Administratif

Kepegawaian pada Pemerintah Kota Sawahlunto urusan Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.223
Persentase IKPAK Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Indeks Kepuasaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2022

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah bagian kepegawaian saat ini sudah memenuhi harapan penerima layanan. Hal ini dapat diketahui dari tingginya persentase indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian dari tahun ke tahun bertahan di angka 100%. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dihitung berdasarkan pelayanan administrasi kepegawaian yang masuk dan yang dilayani. Hal ini merupakan wujud dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki citra pemerintah, misalnya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya diantaranya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Dalam rangka menggerakkan roda pemerintahan Kota Sawahlunto, terdapat perubahan jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi serta Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintahan Kota Sawahlunto dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yang diurai pada tabel berikut:

Tabel 2.224
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi Instansi Pemerintah
Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	26	26	26	26	28
2	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	99	99	99	99	105

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan uraian data di atas dapat dijelaskan bahwasanya Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi sebelum dan setelah dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/2603/OTDA tanggal 22 April 2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi tidak mengalami kenaikan hingga tahun 2021. Namun di tahun 2022 terdapat penambahan sebanyak dua Jabatan Pimpinan Tinggi dan enam Jabatan Administrasi, hal ini dikarenakan lahirnya Organisasi Perangkat Daerah baru yang merupakan hasil dari pemisahan Organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya masih dalam satu payung organisasi.

Dilain sisi, Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Sawahlunto dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami penambahan yang cukup signifikan. Jumlah penambahan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu ini tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.225
Jumlah ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu

Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1123	1143	1125	1279	1314

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan tabel di atas, kenaikan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yaitu total sebanyak 191 orang. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional yang merupakan tindak lanjut salah satu dari lima Visi Pembangunan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo di masa bakti 2019-2024 yaitu "Reformasi Birokrasi".

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) PNS merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai. Diklat mengandung dua fungsi yaitu peningkatan pengetahuan sekaligus menambah keterampilan pegawai. Adapun persentase ASN Kota Sawahlunto yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.226
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	7.22

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2022

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan baru dianggarkan khusus pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto di tahun 2022. Di tahun sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan OPD masing-masing. Adapun realisasi persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di tahun 2022 masih sangat rendah. Hal ini cukup menjadi perhatian mengingat pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan demi pengembangan kompetensi ASN dan sebagai salah satu perwujudan dari hak pengembangan kompetensi ASN. Oleh karena itu diperlukan peningkatan peruntukan anggaran penyelenggaraan ataupun anggaran untuk mendukung ASN dalam mengikuti kegiatan pendidikan serta pelatihan formal.

Tabel 2.227
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Orang	6,36	0,22	-	0,90	0,31

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2022

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 menyatakan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural. Adapun persentase pejabat ASN

yang telah megikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh faktor ketersediaan anggaran pada Badan Kepegawainan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto.

Tabel 2.228
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Kepegawaian Tahun 2022

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Realisasi Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
32	**KEPEGAWAIAN**						
32.1	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi (%)	(Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Ijazah/Sertifikat Terakhir/Jumlah Jabatan) x 100 %	90	91	92	93	94
32.2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi (%)	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi/Jumlah Pegawai yang membutuhkan sertifikat diklat teknis kompetensi) x 100 %	80	80	80	85	85
32.3	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat struktural peningkatan kompetensi (%)	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Struktural Peningkatan kompetensi/Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural) x 100 %	100	100	100	76	80
32.4	Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi (%)	(Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi/Jumlah Pegawai yang mengikti Tugas dan Izin Belajar) x 100 %	90	90	90	100	100
32.5	Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik (%)	Jumlah aparatur dg nilai SKP min baik/jumlah aparatur yg memiliki nilai SKP	100	100	99,99	100	99.95
32.6	Persentase penanganan kasus kepegawaian (%)	Jumlah kasus yg ditangani/ jumlah kasusx 100%	90	600	120	80	130
32.7	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	Ukuran Kepuasan terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100	100
32.8	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	-	-	61	63	63
32.9	Indeks Merit Sistem ASN	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintahan	-	-	-	103,5	157
32.10	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah	2,48	2,66	2,29	2,55	2,95
32.11	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,03	0,03	0,09	0,19	0,25
32.12	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,64	0,64	0,64	0,34	0,39

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2022

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan pada indikator 32.3 perihal persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat struktural peningkatan kompetensi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 diangka 100%, namun di tahun 2021 turun menjadi 76% dan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 80%. Hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas untuk mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan diklat.

Pada indikator 32.5 yaitu persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik mengalami penurunan di tahun 2022 disebabkan karena terdapat 1 orang ASN yang tidak membuat SKP pada tahun tersebut. Sedangkan pada indikator nomor 32.6 yaitu persentase penanganan kasus pegawai, dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Target pada BKPSDM untuk menyelesaikan kasus kepegawaian per tahun yaitu sebanyak 10 kasus. Namun di tahun 2018 kasus yang masuk hanya sebanya 9 kasus, di tahun 2019 sebanyak 60 kasus, 2020 sebanyak 12 kasus, 2021 sebanyak 8 kasus dan di tahun 2022 sebanyak 13 kasus. Hal tersebutlah yang menyebabkan fluktuasi penangan kasus dari tahun ke tahun.

D. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan diharapkan tersedianya inovasi-inovasi baru untuk Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Pelaksanaan Inovasi Daerah tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi hal masif untuk dapat diterapkan. Penumbuhkembangan dan penyebarluasan praktik-praktik inovasi yang baik secara berkelanjutan sangat perlu dilakukan sebagai salah satu budaya dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan yang selaras dengan kebijakan Pimpinan Daerah yang menuntut adanya inovasi dalam setiap pelaksanaan tata kelola pemerintah maupun pelayanan publik pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Adapun capaian predikat inovasi yang telah diraih Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.229
Indeks Inovasi Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tahun	Kategori
1	2017	Sangat inovatif
2	2018	Sangat inovatif
3	2019	Sangat inovatif
4	2020	Sangat inovatif
5	2021	Inovatif
6	2022	Inovatif

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa predikat Inovasi Daerah Kota Sawahlunto pada Tahun 2021 dan 2022 berpredikat kota inovatif, meskipun dalam pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA) Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 Kota Sawahlunto dinobatkan sebagai Kota Terinovatif Kedua se Sumatera Barat. Terjadinya penurunan predikat disebabkan karena perubahan beberapa indikator yang menjadi penilaian dalam pelaksanaan Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Kemendagri yang menjadi *leading sektor* dalam penilaiaan indeks inovasi daerah. Selain itu masih kurangnya pengetahuan terkait kematangan nilai sebuah inovasi dan pergeseran pejabat pelaksana dalam pelaksanaan inovasi pada perangkat daerah menjadi beberapa alasan penurunan nilai indeks inovasi

daerah Kota Sawahlunto. Oleh sebab itu pemerintah Kota Sawahlunto lebih aktif melakukan sosialisasi terkait inovasi daerah dengan tujuan munculnya inisiator-inisiator inovasi pada setiap perangkat daerah. Bahkan kedepannya Kota Sawahlunto melaui Badan Perencancanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto mendorong adanya inovasi pada setiap program kegiatan yang dilakasanakan oleh setiap perangkat daerah, tidak hanya penjaringan inovasi dikembangkan sampai tingkat Desa dan Kelurahan melalui lomba inovasi tingkat Desa dan Kelurahan, sehingga peningkatan daya saing daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih prima dapat tercapai sehingga Kota Sawahlunto dapat berprestasi dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tingkat nasional.

Tabel 2.230
Kegiatan Inovasi yang Telah Dilaksanakan
Tahun 2020

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
1	Pendidikan Digital untuk SD dan SMP	Pendidikan Digital bertujuan menggabungkan dua kemampuan (Blonded learning) yaitu kemampuan dengan menggunakan otak secara keseluruhan antara otak kiri dan kanan secara seimbang sekaligus menggunakan alat bantu berupa teknologi komputer dan multimedia antara lain : Audio, Visual, Text elektronik dan logica.	Dinas Pendidikan
2	Pengadaan sarana belajar siswa baru untuk kurang mampu	Membantu siswa baru yang kurang mampu pada tingkat SD dan SMP di Kota Sawahlunto	Dinas Pendidikan
3	Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kota Sawahlunto	Menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat melalui suatu kegiatan menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan masyarakat khususnya anak dan perempuan melakukan aktivitas belajar mengenal, mendekatkan dan mencintai membaca sehingga terbentuk budaya gemar membaca yang akhirnya terjadi pecerahan, tranformasi dan perubahan ke arah perbaikan karakter sehinggga masyarakat mampu berbuat produktif	Dinas Pendidikan
4	Poliklinik Geriatri	Pelayanan khusus yang diberikan kepada pasien kategori Lansia (umur ≥ 60 tahun) dengan multiple diagnosa/ multi penyakit, atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin. Pelayanan poliklinik geriatri dapat dilayani oleh lebih dari satu orang dokter spesialis.	RSUD
5	Bisa RSUD Sawahlunto	BISA RSUD Sawahlunto (*Bed Information System App.)* adalah aplikasi untuk menampilkan display kamar/ tempat tidur RSUD Sawahlunto terkini secara *realtime*. Aplikasi ini memanfaatkan pengolahan database SIM-RS yang terintegrasi di setiap ruangan perawatan. Aplikasi ini terdiri dari 2 (dua) output laporan diantaranya : 1. Bed Display untuk informasi pasien 2. Bed Display dan daftar pasien rawat inap RSUD Sawahlunto bagi petugas pusat informasi	RSUD
6	REMEDI RSUD Sawahlunto	REMEDI (REkam MEdis DIgital) RSUD Sawahlunto memungkinkan penulisan rekam medis (diagnosa, tindakan intervensi, dan obat-obatan) pasien dapat diinputkan memalui sistem informasi berbasis teknologi. Sehingga pembacaan rekam medis dapat dilakukan melalui aplikasi yang bisa di akses dengan cepat oleh dokter, perawat dan tenaga medis lainnya di RSUD Sawahlunto dengan tidak harus menunggu lagi kurir Rekam Medis membawa berkas ke ruangan pemeriksaan	RSUD
7	BOR RSUD Sawahlunto	BOR (Booking Online Rawat jalan) RSUD Sawahlunto merupakan sistem pendaftaran pasien rawat	RSUD

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		jalan/poliklinik spesialis RSUD Sawahlunto secara online melalui aplikasi WA (What's up Appointment dan website RSUD Sawahlunto). Aplikasi ini dapat dimanfaatkan bagi pasien Rawat Jalan/ poliklinik yang akan mendaftar minimal satu hari sebelum hari kunjungan/ pemeriksaan	
8	HEBAT RSUD Sawahlunto	HEBAT (Hitung kinErja Berbasis Aplikasi yang Terintegrasi) RSUD Sawahlunto merupakan aplikasi untuk menghitung kinerja pegawai RSUD perencanaan kegiatan harian, target, capaian Sawahlunto. Aplikasi ini mencakup kegiatan, hasil dari pekerjaan/ kegiatan yang dilaksanakan setiap hari terintergrasi ke SIM-RS RSUD Sawahlunto	RSUD
9	Bridging SISRUTE dan SIRANAP Kemenkes RI	Aplikasi ini memungkinkan terintegrasinya SIMRS RSUD Sawahlunto dengan SISRUTE (Sistem Informasi Rujukan Terpadu) dan SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap) milik Kementerian Kesehatan RI. Aplikasi ini mengurangi double entri data yang dapat memungkinkan kesalahan input dan update data rawat inap secara manual. Cukup satu kali entri dan memanfaatkan link dengan Database SIMRS, data SISRUTE dan SIRANAP dapat terupdate secara *realtime*	RSUD
10	Si GUNTU	Si GUNTU singkatan dari Sistem Informasi Guna Tanggap Umum dan istilah Si GUNTU merupakan inovasi bidang pelayanan yang diberikan oleh Desa Lunto Barat kepada Masyarakat. Melalui Si GUNTU ini masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan surat-surat yang terkait di Desa dari mana saja. Tanpa terikat tempat dan waktu. Asalkan bisa mengakses computer atau gedget berupa android atau iphone yang terkoneksi dengan jaringan internet	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	BANK DESA	kebutuhan masyarakat tentang unit simpan pinjam/ perkreditan BUMDes , BANK desa sebagai alternative bagi masyarakat dalam unit simpan pinjam dengan pola syariah bagi hasil	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	BANK RAB	Pada Penyusunan APBDes 2019, Bukik Gadang merupakan desa yang mengumpulkan paling awal se Kota Sawahlunto . Hal ini bisa dilakukan karena Desa bukik Gadang menerapkan Sistem BANK RAB yang berisi kumpulan dari RAB kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	BUMDES EKSPOR KOMODITI PINANG	Tidak hanya berinovasi dengan pendirian BANK DESA, BUMDes Kumbayau juga melakukan Ekspor Pinang ke Mancanegara seperti India, Nepal dan Turki . Dalam Hal Pengiriman dan administrasi BUMDes KMB bekerjasama degan PT POS Indonesia Region Sumatera Barat , Riau dan Jambi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	COFFEE MORNING	Coffee Morning Merupakan nama keren dari kegiatan wirid subuh yang dilakukan setiap hari Minggu di Desa Lunto Timur Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi waktu luang jamaah setela sholat Subuh, menambah wawasan keagamaan dan adat juga untuk menanamkan kembali falsafah "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Menuju KPM PKH Mandiri	Merubah pola pikir masyarakat miskin melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
			Perlindungan Anak
16	Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB)	Tujuan dari Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor ini adalah: 1. Memudahkan dalam Pengadaan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan data pendukung lainnya. 2. Memudahkan dalam pencarian data laporan yang diperlukan setiap saat, baik itu perhari, perbulan ataupun per periode. 3. Meningkatkan akurasi proses analisis yang cermat dan cepat untuk dapat merumuskan kebijakan terkait peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. 4. Kedepannya dapat menjadi alat bantu pelayanan bagi pemiliki kendaraan wajib uji dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. 5. Memudahkan dalam penyimpanan data sehingga suatu saat terjadi force majeur data akan aman karena data dapat di backup di media storage yang lain	Dinas Perhubungan
17	Pemetaan Lokasi Sarana dan Prasana Lalu Lintas se Kota sawahlunto	Pemetaan lokasi yang digunakan untuk dapat mempermudah pendataan sarana prasarana yang tersedia maupun yang belum tersedia. Dan juga dapat memudahkan dalam penempatan dan pemasangan titik lokasi sarana prasarana tiap tahunnya. Saat ini pemasangan sarana prasarana lalu lintas tersebut hanya berdasarkan survei lapangan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Dinas Perhubungan
18	Workshop Desain Komunikasi Visual Bahan Promosi Sawahlunto	Melaksanakan pelatihan "Digital Marketing" untuk para pelaku ekonomi kreatif Kota Sawahlunto para pelaku ekonomi kreatif Kota Sawahlunto memalui pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi E-Commerce	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19	Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan ini merupakan usaha untuk mengaktifkan para pelaku ekonomi kreatif yang terdiri dari 16 Sub Sektor. Bentuk kegiatan berupa pengiriman kelompok2 kreatif ke berbagai iven-iven Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemasaran produk lokal	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
20	Monitoring Evaluasi Usaha Ekonomi Kreatif	Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah lanjutan tahapan kegiatan untuk melihat dampak dari hasil Workshop pelaku ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
21	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Perlunya komitmen yang tajam dari pelaku pariwisata Sawahlunto terutama pelaku industri pariwisata untuk dipromosikan dan dituangkan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dengan para pelaku promosi pariwisata di Sumatera Barat (biro perjalanan)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata	Pengadaan sarana dan prasarana promosi pariwisata yang bersifat inovatif perlu dilaksanakan, diantaranya membranding sarana mobilitas milik Pemko Sawahlunto dan bahan promosi lainnya, baik bersifat cetakan, media luar ruang dan bentuk lainnya yang tepat sasaran untuk meningkatkan awareness kepariwisataan Kota Sawahlunto	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
23	Penyusunan Site Plan Destinasi Wisata	Perencanaan dalam bentuk desain maupun anggaran untuk pembuatan kawasan destinasi baru	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
24	Festival Sawahlunto Kreatif	Perlunya mengangkat potensi potensi kreatif dari pelaku Ekraf di Kota Sawahlunto dengan mengundang Academic, Business, Community, Government. Kolaborasi ABCG	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		dalam bentuk festival akan meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Sawahlunto	
25	Penyusunan Profil Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Penyusunan Profil Pelaku Ekonomi Kreatif akan membantu mempermudah mempublikasi potensi Produk dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdiri dari 16 Subsektor Ekonomi Kreatif.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
26	Penyusunan data base kepariwisataan	Perlunya data dasar kepariwisataan yang akan menjadi bahan analisa dan rekomendasi untuk strategi pariwisata selanjutnya	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
27	Evaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata	Pelunya evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata berdasarkan indikator yang telah disepakati agar menghasilkan strategi pemasaran yang tepat dan dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan pemasaran pariwisata efektif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
28	Fasilitasi Hari jadi Kota Sawahlunto	Pelaksanaan HJK merupakan salah satu agenda rutin dan event unggulan Kota Sawahlunto. Perlu persiapan yang lebih matang untuk peningkatan kualitas pelaksanaan HJK Sawahlunto	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
29	Festival Prof M.Yamin	Perlunya mengangkat ketokohan M.Yamin sebagai salah satu tokoh nasional yang berasal dari Sawahlunto melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan lokal sehingga semangat nasionalisme M. Yamin tetap mengalir di tengah masyarakat Sawahlunto dan Nasional	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
30	Bimtek Pengembangan SDM Pemasaran Pariwisata	Perlunya peningkatan kapasitas pelaku promosi pariwisata dari berbagai kalangan untuk menghasilkan pelaku promosi pariwisata yang profesional dan bersertifikasi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
31	Pembangunan Historikal Park	Agar kawasan kandi semakin berkembang, dengan bertambahnya destinasi baru untuk menjawab dari kebutuhan wisata untuk menjadikan kawasan kandi menjadi kawasan wisata, maka perlu pengembangan Historikal Park untuk dijadikan salah satu kawasan baru dengan memunculkan kota Sawahlunto zaman dulunya.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
32	Fasilitasi Pengembangan Geopark Nasional sawahlunto	Untuk melengkapi sapras dari Geopark, dengan pembuatan sign/tanda/petunjuk yang mencirikhaskan Geopark Sawahlunto serta kegiatan penunjang untuk menjadikan Geopark Nasional menjadi UNESCO GLOBAL GEOPARK (UGG) Taman Bumi Warisan Dunia.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
33	IJAZAH (INSENTIF BAGI PENYELENGGARA JENAZAH)	Saat ini petugas keagamaan yang memiliki peran yang sangat penting adalah penyelenggara jenazah. Di mana jumlahnya semakin berkurang dari waktu ke waktu sementara keberadaannya sangat diperlukan. Di kota Sawahlunto petugas penyelenggara jenazah diprioritaskan untuk dua kecamatan yaitu kecamatan Lembah Segar dan Barangin. Hal ini disebabkan karena dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Talawi dan Silungkang memiliki nagari dimana untuk urusan keagamaan diserahkan sepenuhnya kepada pengurus nagari yang dalam istilah adat disebut dengan Malin. Selama ini penyelenggara jenazah melaksanakan tugasnya secara sosial penuh dengan keikhlasan dan dedikasi. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Kota Sawahlunto merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan motivasi berupa pemberian insentif atas jasa yang dilakukannya sehingga dapat memicu kinerja petugas tersebut. Di samping itu juga keberadaan petugas ini sangat mendukung pencapaian salah satu misi kota Sawahlunto yaitu menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.	Setdako
34	IMMAGARI (INSENTIF BAGI	Sawahlunto merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 4 kecamatan, 10	Setdako

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
	IMAM DAN MUADZIN MASJID NAGARI)	kelurahan dan 27 desa. Di samping itu Sawahlunto juga memiliki wilayah administratif berupa nagari. Jumlah nagari di Sawahlunto sebanyak 10 nagari yaitu Talawi, Sijantang, Salak, Kolok, Talago Gunung, Balai Batu Sandaran, Lumindai, Lunto, Kubang dan Kajai. Saat ini petugas keagamaan yang memiliki peran yang sangat penting adalah imam dan muadzin masjid nagari. Di kota Sawahlunto masing-masing nagari memiliki masjid yang petugas keagamaannya ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Setiap masjid nagari memiliki petugas berupa imam dan muadzin. Di mana keduanya bertugas membantu kelancaran dan menciptakan kenyamanan pelaksanaan ibadah sehingga menambah kekhusyukan beribadah. Selama ini kedua petugas keagamaan tersebut melaksanakan tugasnya secara sosial penuh dengan keikhlasan dan dedikasi. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Kota Sawahlunto merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan motivasi berupa pemberian insentif atas jasa yang dilakukannya sehingga dapat memicu kinerja petugas tersebut. Di samping itu juga keberadaan petugas ini sangat mendukung pencapaian salah satu misi Kota Sawahlunto yaitu menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.	
35	GERAKAN SAWAHLUNTO MENGHAFAL AL-QUR'AN	Mengingat Sawahlunto saat ini sedang gencar mempersiapkan diri menjadi salah satu kota tujuan wisata di Sumatera Barat, salah satu cara untuk membentengi generasi muda dari dampak modernisasi dan westernisasi yang mendukung kepariwisataan adalah melalui pendidikan hafalan Al-Qur'an. Di samping itu tidak kalah pentingnya pendidikan hafalan Al-Qur'an ini mampu meningkatkan kecerdasan generasi muda. Begitu pentingnya pendidikan di bidang hafalan Al- Qur'an, alangkah baiknya Pemerintah Kota Sawahlunto menciptakan suatu terobosan yaitu melalui "Gerakan Sawahlunto Menghafal Al-Qur'an" dengan target hafalan minimal 1 juz/orang/tahun.	Setdako
36	Pembangunan Command Center	Ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi command center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Tetapi tidak hanya itu, command center sangat membantu dalam mempermudah jalannya meeting dan koordinasi antar bidang. Command center juga dapat membantu memastikan setiap keputusan penting, respon dan aksi yang diambil adalah seakurat mungkin sesuai data yang ada. Command center sangat penting bagi kantor instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang memerlukan manajemen krisis. Beberapa kantor pusat daerah di Indonesia telah memiliki command center sebagai pusat integrasi data mereka, untuk koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang lebih efisien	Setdako
37	Kliping Digital	Sebuah aktifitas / kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu dari sebuah koran yang memuat berita tentang kota Sawahlunto dan kemudian dilanjutkan dengan proses menempelkan guntingan-guntingan tersebut pada sebuah media kemudian di scan dan di upload ke website pemerintah kota	Setdako
38	Jaringan antar OPD/Jaringan Terintegrasi	Suatu sistem di mana semua OPD di pemerintah kota sawahlunto diintegrasikan ke dalam suatu jaringan, yang menyediakan konektivitas digital untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas yang keuntungannya berupa fleksibilitas dan penghematan biaya, karena biaya	Setdako

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		untuk sistem yang terintegrasi ini akan jauh lebih murah apabila menggunakan sistem yang terpisah	

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Berdasarkan data dari tabulasi diatas dapat disajikan sebaran data Inovasi Daerah Kota Sawahlunto tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.231
Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto

No	Organisai Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan	3	7.89
2	RSUD	6	15.79
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	15.79
4	Dinas Perhubungan	2	5.26
5	Dinas Pariwisata	15	39.47
6	Setdako	6	15.79
Total		38	100

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Tabel dibawah ini merupakan kumpulan kegiatan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto di Tahun 2021.

Tabel 2.232
Kegiatan Inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
1	BOS	a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan dasar untuk memasukan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; b. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara online; c. Melakukan verifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasinya dan selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik; d. Melakukan Verifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi agar memperoleh alokasi Bantuan Operasional Sekolah minimal. e. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto sebagai penanggung jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah menandatangani naskah Perjanjian Hibah mewakili sekolah jenjang pendidikan dasar; f. Memberikan sojalisasi/pelatihan kepada sekolah jenjang pendidikan dasar, komite sekolah dan masyarakat; g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan; h. Memantau pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Operasional sekolah; i. menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan; j. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dari Sekolah; k. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring; l. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.	Dinas Pendidikan

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
2	BASEKOLAH	Kesadaran untuk melakukan inovasi dan menunjang berbagai masukan pengembangan pendidikan suatu daerah menjadi kunci karena tanpa inovasi maka suatu daerah atau organisasi/instansi akan menjadi kekurangan visi dan tujuan ke depan sehingga dirasa perlu menggenjot kinerja melalui inovasi, memaksakan inovasi sampai menjadi sebuah budaya/habbit serta kebutuhan. Ketidakmampuan dalam membeli seragam sesuai data dinas pendidikan kota sawahlunto, Pertimbangan apakah lebih bersih penampilan dan cemerlang prestasi anak didik serta pertumbuhan semangat belajar anak didik menjadi sebuah bahan diskusi hangat. Keinginan walikota - wakil walikota terpilih untuk membantu warganya berupa pakaian seragam bagi siswa yang baru masuk dan Tidak tersedianya menu belanja untuk pakaian seragam bagi siswa miskin di dana BOS umum nasional dari pemerintah pusat, DAK non fisik, maka muncul ide dan gagasan untuk menggunakan APBD sebagai solusi dari hal ini.	
3	MERPATI	Untuk mewujudkan Kota Sawahlunto yang cerdas dan kompetitif dengan ini Pemerintahan Kota Sawahlunto mengadakan program MERPATI (Memberikan Reward/Penghargaan Masuk Perguruan Tinggi) kepada Mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto Penghargaan ini bertujuan untuk mewujudkan kompetensi sumber daya manusia Kota Sawahlunto yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, Penghargaan ini dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Kota Sawahlunto.	
4	PENDEKAR	Dinas Pendidikan selaku Organisasi Perangkat Daerah dari Pemerintah Kota Sawahlunto mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan yang ada wilayah Kota Sawahlunto. Dalam rangka memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar telah menyusun program pendidikan berkarakter.	
5	DISDIK TV	DISDIK TV adalah program alternatif Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto dalam mengatasi pembelajaran di era pandemi dan akan tetap eksis di masa normal Melalui siaran televisi dan siaran youtube maka guru guru dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah dapat terhubung dengan leluasa melalui internet dan jaringan LAN dalam pembelajaran.Berbagai kelas virtual dan model pembelajaran serta latihan soal soal dapat dijadikan program pengisi kegiatan di dalam nya.	
6	KELOK ES	Kelompok Edukasi Game Sawahlunto Heritage. Kelompok ini di inisisasi untuk di bentuk di setiap sekolah SD dan	

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		SMP Se Kota Sawahlunto sehingga menjadi Gerakan Massal yang proaktif	
7	RENI	RENI adalah bentu reward yang diberikan kepada mahasiswa/i kota Sawahlunto yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang berakreditasi A atau B. Dimana Mahasiswa/i memperoleh nilai Indek Semester 3,1 ke atas. Program RENI merupakan program unggul Pemko Sawahlunto yang menjadi program Dinas Pendidikan. Tujuan program RENI adalah untuk memotivasi mahasiswa/i melanjutkan dan mengikuti pendidikan di jenjang PT dan selalu meningkatkan dan mempertahakan nilai semester.	
8	KAHFI	KAHFI dirancang dan diimplementasikan untuk mendorong minat dan bakat peserta didik terhadap Tahfizh Al Qur'an, meningkatkan hafalan yang sudah ada maupun memulai hafalan Qur'an sehingga bertumbuh dan banyak memiliki peserta di seluruh sekolah yang ada di Kota Sawahlunto baik itu jenjang SD maupun jenjang SMP.	
9	PESAN KESASAR	Pesan Kesasar ini termasuk kategori inovasi kesehatan, karena dalam pengelolaan kasus PTM dibutuhkan upaya promosi Kesehatan dan pencegahan yang tepat dan terpadu. Selama ini masyarakat belum menyadari pentingnya kesehatan karena PTM merupakan penyakit tidak memiliki gejala atau tanda klinis yang khas. Hal ini menyebabkan individu tidak mengetahui dan tidak menyadari kondisi tersebut sejak permulaan perjalanan penyakit. Kondisi ini berdampak terhadap keterlambatan dalam penanganan dan menimbulkan komplikasi bahkan berakibat kematian lebih dini. Pada point ini tidak menjelaskan tentang kontribusi pada SDGs melaikan hanya penjelasan inovasi sesuai dengan kategori yang di pilih, misalnya kalau memilih kategori kesehatan, maka ceritakan bahwa inovasi ini adalah inovasi kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	PEER KU SIAP	Dalam rangka peningkatan pemanfaatan pelayanan pengobatan tradisional pemerintah terus mendorong pengembangan dibidang pengobatan tradisional dengan mempersiapkan beberapa rumah sakit yang mampu memberikan pengobatan tradisional dan puskesmas dengan poli pengobatan tradisional selain itu beberapa rumah sakit swasta berinisiatif memasukkan pengobotan tradisional	
11	CERDAS	Dengan tingginya angka stunting maka dibentuk lah inovasi yang bisa menurunkan angka stunting di desa tersebut. Inovasi yang terbentuk adalah CERDAS (Cegah Resiko, Deteksi Dini, Atasi Stunting). Inovasi CERDAS adalah suatu kegiatan yang mencangkup semua sasaran (Remaja, Ibu hamil, dan balita).	
12	BATUA BANA	Bantuan Untuk Keluarga Terdampak Bencana, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa uang non tunai yang nantinya diharapakan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Mekanisme pemeberian bantuan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan daan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan social yang dananya tersedia.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
13	SITU YAPANA	Sinergeritas Terpadu Pelayanan Penanggulangan Bencana, Prosedur Tetap Tim Kaji Cepat Kota Sawahlunto yang juga Tim Sinergitas Terpadu dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam (Situ Yapana) ini bertujuan memberikan panduan bagi personil yang bergabung dalam tim untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencanayang terjadi.	
14	SILO	Dalam rangka peningkatan pengetahuan bagi perempuan yang telah menikah (istri) tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang tangguh dan mampu memberikan pengasuhan yang berkualitas bagi anak, Pemerintah Kota Sawahlunto mempunyai gagasan/ide untuk membentuk sekolah khusus bagi perempuan yang telah menikah yang dikenal dengan nama SILO (Sekolah Istri Teladan Sawahlunto)	Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	LAKEH SATO	LAKEH SATO Merupakan Pelayanan dengan menggunakan pendekatan by name by addresyang dilakukan petugas teknis dengan mendatangi kandang ternak milik masyarakat Kota Sawahlunto berupa pelayanan : 1. Pemeriksaan hewan secara umum, 2. Pemberian multivitamin, 3. Pemberian Anti elektro dan, 4. Pemeriksaan kebuntingan dan status reproduksi	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
16	Rancak Digital	Aplikasi Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	SIRANGGA SATU	SIRANGGA SATU (SIap ceRAi laNGsung GAnti StATUs) merupakan sebuah inovasi pelayanan terhadap masyarakat dalam melakukan perubahan data kependudukan sehabis melakukan perceraian di Pengadilan Agama (setelah terbitnya akta cerai).	
18	SI CEPAT KILAT	Pelayanan Pengiriman Dokumen Perizinan Via Pos Kilat Khusus, DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto bekerja sama dengan Kantor Pos Sawahlunto untuk melaksanakan penyelenggaraan kerjasama pengiriman dokumen izin guna memberikan kemudahan dan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan sinergi kedua belah pihak dalam menyokong program Pemerintah.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
19	SIBARO	Sistem Informasi Perizinan Berbasis Masyarakat Sawahlunto, Teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan sebagai media informasi pelayanan kepada publik, menampung dan mengolah pengaduan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik dengan mengusung prinsip mudah, terpadu dan tuntas dalam menyalurkan aspirasi dan aduan masyarakat, yang dapat diakses secara online. Portal ini juga menyediakan link ke layanan perizinan OSS dan sicantik cloud disertai dengan berbagai informasi dan tata cara menggunakan layanan perizinan perizinan.	
20	BIKIN LAPAR	Bikin Izin Layanan Paralel, Pelayanan paralel memberikan kemudahan kepada Badang Usaha atau Perorangan untuk mengurus izin secara paket dengan waktu yang relatif lebih cepat sesuai dengan SOP 7 hari kerja, sedangkan untuk pengurusan reguler membutuhkan waktu hingga 14 s/d 60 hari kerja, pelayanan ini juga mempersingkat alur perizinan.	

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
21	LARIS	Layanan Perizinan dengan SMS, Inovasi sistem SMS gateway yang terintegrasi dengan system pelayanan perizinan sicantik cloud, dimana front office dan back office Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto mendapat notifikasi sms ketika ada perizinan yang harus diproses.	
22	MAS LAPOR	Media Sosial untuk Layanan Perizinan Online, Inovasi Smartphone berbasis android dimanfaatkan untuk memberikan layanan informasi yang efektif dan efisien, komunikasi via WhatsApp ini dimaksudkan untuk menghubungkan layanan informasi perizinan, layanan pengaduan dan potensi kepesertaan BPJS Kesehatan serta BPJS Tenaga Kerja.	
23	USUS BUNTU	Urus Izin Susah, Kami Bantu, masyarakat yang megurus izin berusaha melalui aplikasi OSS akan diarahkan langsung dan diberi edukasi tentang bagaimana mengoperasikan Aplikasi OSS untuk mendapatkan perizinan berusaha. Sehingga masyarakat mendapat kemudahan dalam mengurus perizinan secara terintegrasi yang berbasis online.	
24	SUPER *ONLINE*	Surat Pengantar *Online,* Super Online yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan serta menghemat waktu, dilakukan pengiriman data / dokumen perizinan ke OPD Teknis secara online sehingga diharapkan petugas teknis dapat melakukan respons yang cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis yang diminta.	
25	PTSP CERAH	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik dan Mudah, masyarakat yang mengurus perizinan tidak harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, tetapi cukup mengakses secara online pada aplikasi tersebut, kemudian mendapatkan output melalui email yang bertandatangan dan tersertifikasi sah secara elektronik. Pemohon mendapat notifikasi melalui sms, whatsapp dan email, selanjutnya dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon, sehingga akan menghemat waktu dan biaya serta meminimalisir resiko atas pengurusan perizinan terutama dalam masa pandemi Covid – 19 ini.	
26	PS PARENT	Pelestarian Songket Silungkang dalam bentuk Pergelaran Event, pelestarian nilai budayadan kunjungan wisata juga hal yang harus diwujudkan. Dari sisi nilai-nilai budaya, mengacu pada amanat Undangundang no. 5 tahun 2017 tentang Kebudayaan, maka Tenun Songket Silungkang setidaknya mengandung 5 (lima) Unsur Objek Pemajuan Kebudayaan OPK). Salah satu unsur OPK yang dominan adalah masih dipertahankannya Teknologi Tradisional.	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
27	Penetapan Sawahlunto Warisan Dunia	Sawahlunto: Dari Lubang Tambang Hingga Situs Warisan Dunia UNESCO	
28	DOKTER *ONLINE*	Digitalisasi koleksi/ dokumen terbitan pemerintah daerah yang nantinya akan dilayankan secara *online*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	KEJAR LITERASI	Pengembangan dan peningkatan minat baca, literasi informasi	

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
30	PEMBAJAK LAUD	Peningkatan Minat Baca dengan Layanan Kunjungan TK/ PAUD, Perpustakaan Umum Kota Sawahlunto mengupayakan peningkatan minat baca tersebut dengan mengadakan layanan kunjungan TK/ PAUD ke Perpustakaan dengan acara-acara yang menarik, mengadakan games, memberikan hadiah serta menyediakan pendongeng berkompeten.	
31	PRT	Pembinaan Rumah Tahfiz, Dalam rangka meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara baik dan benar serta meningkatkan jumlah generasi penghafal Al-Qur'an di Kota Sawahlunto diperlukan adanya lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an/Madrasah Diniyah Awaliyah (TPQ/TPSQ/MDA) dan Rumah Tahfidz.	Sekretariat Daerah
32	PENYUSUP PT	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Terdepan, melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa dan OPD melalui koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi secara berkala.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
33	E-MONEV	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi pembuatan e-Monev ini merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, kenyamanan, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas yang menuju pada peningkatan kualitas sistem monev pembangunan daerah.	
34	UCLG Aspac	Sawahlunto Join Mayor Academy Asia Pasific 2020, Program Asia Pacific Mayors Academy merupakan program executive courses bagi Walikota-walikota lingkup Asia Pasific yang diselenggarakan oleh Organisasi Non-Pemerintah dibawah PBB, seperti United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), UN HABITAT, UN ESCAP, APRU, IGES, dan melibatkan akademi-akademisi dari universitas ternama di luar negeri.	
35	BISA	*Bed Information System App* RSUD Sawahlunto, aplikasi untuk menampilkan display kamar/ tempat tidur RSUD Sawahlunto terkini secara realtime. Aplikasi ini memanfaatkan pengolahan database SIM-RS yang terintegrasi di setiap ruangan perawatan.	Rumah Sakit Umum Daerah
36	AMBULANCE DESA	Penyediaan Ambulance Desa untuk keperluan masyarakat, desa sikalang terletak di wilayah kecamatan talawi kota sawahlunto, dalam rangka meningkatkan pelayan kesehatan masyarakat desa sikalang harus ditunjang dengan sarana transportasi sebagai bentuk pelayanan yang baik. ambulan desa merupakan bentuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat desa sikalang dan ambulan desa merupakan cita-cita pemerintah desa sikalang sejak lama dan baru terealisasi tahun 2020. untuk dapat kita ketahui bersama bahwasannya pemerintah desa sikalang untuk pembelian mobil grand max blind van tahun 2015 (gambar terlampir) yang akan digunakan sebagai mobil ambulan desa, yang mana mobil tersebut dibeli dari hasil juara nasional bpjs ketenagakerjaa pada tahun 2019.	Kecamatan Talawi
37	KELOPAK DARA	Kelompok Ternak Pemuda Saringan, banyaknya pengangguran di Kelurahan Saringan, maka Lurah dan Bhabin Kamtibmas Kelurahan Saringan berinisiatif untuk membuat wadah untuk berkumpulnya para remaja tersebut , selain untuk pengontrolan dan juga diarahkan	Kecamatan Barangin

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		menjadi remaja aktif yang produktif dengan membentuk sebuah kelompok ternak dimana tujuan akhirnya adalah menurunkan angka pengangguran dan kenakalan remaja di Kelurahan Saringan.	
38	POKDARWIS	Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Saringan, Pembentukan Pokdarwis berawal dari kemauan dan inisiatif masyarakat di Kelurahan Saringan untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang kepariwisataan, maka pada tanggal 01 Oktober 2019 dibentuklah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Saringan yang difasilitasi oleh Kepala Kelurahan Saringan dan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
39	GAMES ROTAN	Gathering positif bermedia Media Sosial Dalam Birokrasi Kecamatan, Sebagian besar masyarakat menggunakan perangkat teknologi hampir dua pertiga waktu yang dimilikinyakepemiikan media sosial jejaring facebook dan whatsapp merupakan suatu inovasi yang sangat trend dan sangat dibutuhkan dalam melayani dan menyebarkan informasi.	Kecamatan Silungkang
40	KE CANTIK	Kecamatan Cinta Statistik, Inovasi pembentukan dan pengembangan desa/kelurahan statistik ini merupakan upaya untuk penguatan dan pemberdayaan fungsi kelembagaan desa/kelurahan di bidang data dan statistik melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi dan metodologi di bidang data statistik yang didukung dengan sarana dan prasarana serta dukungan sumberdaya lainnya.	Kecamatan Lembah Segar
41	SISSCA ONLINE	Sawahlunto Internasional Songket Silungkang Carnival) Online 2020, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Inovasi event yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 lalu, diapresiasi oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan masuknya SISSCa ke dalam daftar 1 dari 100 Wonderful Event di Indonesia 2020.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
42	SISABER RT	Sedekah Plastik Sampah Berjadwal di Rumah Tangga, (SISABER RT) merupakan inovasi yang melibatkan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup tentang sampah yang dilakukan oleh seksi perencanaan dan tata lingkungan pada bidang lingkungan hidup dengan kegiatan pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh seksi operasional kebersihan pada bidang kebersihan dan pertamanan. SISABER RT rancang bangun inovasinya didasari atas semakin meningkatnya timbulan sampah di masyarakat dan tingkat kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih belum optimal terwujud di rumah tangga.	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
43	MATA ELANG	Mari Tata dan Evaluasi Langsung	Inspektorat
44	BPHTB	HOST TO HOST BPHTB, sebuah sistem yang mengoneksikan aplikasi e-BPHTB milik BPKAD dan aplikasi milik Kantah Sawahlunto. Koneksi tersebut bersifat online dan real time, sehingga wajib pajak yang telah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		menyelesaikan pembayaran BPHTBnya di BPKAD langsung tervalidasi di aplikasi Kantah Sawahlunto.	
45	JALAH SELALIN	Layanan Jaga Sekolah Selamat Berlalu Lintas, Dimasa pandemi sekarang ini diharuskan kepada seluruh masyarakat agar selalu menjaga jarak agar terhindar atau mengurangi dampak penyebaran virus covid 19 ini, oleh sebab itu banyak nya penjagaan serta pemeriksaan protocol kesehatan yang sangat ketat di berbagai daerah. dan Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto telah membuat inovasi yang bernama Layanan Jaga Sekolah serta sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah sekitah wilayah Kota sawahlunto untuk menerapkan inovasi tersebut.	Dinas Perhubungan

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Berdasarkan tabulasi data diatas dapat disajikan sebaran data Inovasi Daerah Kota Sawahlunto sebelum tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.233
Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto

No	Organisai Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan	8	17,78
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6,67
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	2	4,44
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	1	2,22
5	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	1	2,22
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	4,44
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8	17,78
8	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	2	4,44
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	6,67
10	Sekretariat Daerah	1	2,22
11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	6,67
12	Rumah Sakit Umum Daerah	1	2,22
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	2,22
14	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1	2,22
15	Inspektorat	1	2,22
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	2,22
17	Dinas Perhubungan	1	2,22
18	Kecamatan Silungkang	1	2,22
19	Kecamatan Lembah Segar	1	2,22
20	Kecamatan Talawi	1	2,22
21	Kecamatan Barangin	2	4,44
Total		45	100

Tabel dibawah ini merupakan kumpulan kegiatan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto di Tahun 2022.

Tabel 2.234
Kegiatan Inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
1	SIAP CERAI LANGSUNG GANTI STATUS (SI RANGGA SATU)	Pelayanan terintegrasi dengan Pengadilan Agama	Disdukcapil
2	Kelopak Dara (Kelompok Ternak Pemuda Saringan)	Pembentukan Kelompok ternak sebagai wadah bagi pemuda-pemuda yang pernah bermasalah dengan hukum	Kecamatan Barangin
3	PRT (Pembinaan Rumah Tahfidz)	Apresiasi kepada Guru TPQ/TPSQ/MDA, imam, muadzin, gharim, penyelenggara jenazah, dan rumah tahfidz se-kota Sawahlunto Dalam rangka meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara baik dan benar serta meningkatkan jumlah generasi penghafal Al-Qur'an	Setdako
4	GATHERING POSITIF BERMEDIA SOSIAL DALAM BIROKRASI KECAMATAN (GAMESROTAN)	Pemanfaatan media online dalam penyelenmggaraan pemerintahan dalam melakukan pelayanan publik di kecamatan	Kecamatan Silungkang
5	Database Sicabe (Sistem Informasi Cagar Budaya Elektronik)	Sistem khusus yang dibuat untuk mempermudah dalam pengelolaan dan pendokumentasian data lebih efektif dan efisien untuk mengoptimalkan penggunaan data cagar budaya	Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
6	Buku Digital si Puti (Sistem Informasi Pustaka Digital Cagar Budaya)	Sistem Informasi Pustaka Digital Cagar Budaya dalam bentuk Buku digital e- teks media digital dan dilindungi dengan hak cipta digital dalam berbentuk file pdf, word, html, txt dll	
7	BISA (Bed Information System App.) RSUD Sawahlunto	Aplikasi untuk menampilkan display kamar/ tempat tidur RSUD Sawahlunto terkini secara realtime. Aplikasi ini memanfaatkan pengolahan database SIM-RS yang terintegrasi di setiap ruangan perawatan	RSUD
8	PeErKu SIAP(Pelayanan Herbal dan Akupresur Sehat Insyaallah Aman dari Zat Kimia)	Penanggulangan penyakit dengan memanfaatkan tanaman obat tradisional yang ada di lingkungan sekitarnya.	Dinas Kesehatan dan PPKB (UPTD Puskesmas)
9	KARI PINDANG GURAMI	Kartu Digital Fisioterapi Penyandang Disabilitas Berguna di Era Pandemi	
10	Mas Lita (MASyarakat peduLI gizi baliTA)	Memberdayakan kader posyandu balita yang telah mendapatkan pelatihan menjadi agen yang berperan dalam memotivasi keluarga balita khususnya dengan masalah gizi dan mampu melakukan edukasi dalam perubahan perilaku masyarakat	
11	SINGKOK TUDUANG (menyingkap atau membuka tudung saji sasaran yang memiliki masalah gizi)	Menyingkap atau membuka tudung saji sasaran yang memiliki masalah gizi dan dilakukan edukasi Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah sasaran	
12	SONGKET jo ALAT TENUN (Songsong Keluarga Bebas Tuberkulosis Jo Ajak Lintas Sektor Temukan Minum Obat Sampai Tuntas)	Kerjasama berbagai pihak melalui kemitraan antara lintas program petugas Puskesmas Silungkang dengan lintas sektor Jumantuk (Juru Pemantau Batuk), Pemerintahan Desa, Babinkabtimas/ babinsa dan pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk peran Penta Helix dalam penanganan TBC di Indonesia	
13	GEBU ALINDI (Gerakan Ibu Hamil Anti Bersalin Dirumah)	Kunjungan rumah ibu hamil oleh bidan, pws, kader, dukun yang aktif pihak desa untuk memotivasi ibu hamil agar pada saat persalinan dilaksanakan di fasilitas kesehatan karena jika persalinan dilaksanakan dirumah maka keluarga tidak mendapatkan surat keterangan kelahiran serta pembentukan group Whatsapp Sayang Ibu sebagai media komunikasi dan informasi kepada semua ibu hamil	

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
14	BATUA BANA	Bantuan pada Keluarga yang terdampak bencana di Kota Sawahlunto, Baik itu tanah longsor, Kebakaran dan bencana-bencana lainnya	Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
15	SITU YAPANA (SINERGERITAS TERPADU PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM)	Prosedur Tetap Tim Kaji Cepat Kota Sawahlunto yang juga Tim Sinergitas Terpadu dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	
16	SIPOLAN (SISTEM INFORMASI LAPORAN BENCANA)	Sistem Informasi Pelaporan Bencana yang dipergunakan oleh seluruh Desa/Kelurahan untuk membuat laporan bencana sehingga terwujud data yang sama antara Pemerintah Daerah dengan Desa/Kelurahan.	
17	KAMPUNG DIGITAL MARKETING	Gerakan sosial yang berkembang menjadi social enterprise yang fokus pada pengembangan pemuda desa menjadi mahir di bidang digital marketing dan customer service	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdaganggan
18	SISABER RT (Sedekah Sampah Plastik Berjadwal di Rumah Tangga)	Pengelolaan sampah rumah tangga dalam mengantisipasi timbulan sampah yang masuk ke TPA dan efisiensi operasional layanan persampahan melalui Sedekah Plastik Sampah Berjadwal di Rumah Tangga	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
19	KaMuCo (Kandi Mural Competition)	Kegitan lomba Mural yang diadakan di kawasan wisata kandi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
20	SILO (Sekolah Istri Teladan Sawahlunto)	Peningkatan pengetahuan bagi perempuan yang telah menikah (istri) yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang tangguh serta mampu memberikan Pengasuhan yang berkualitas bagi anak. Pemerintah Kota Sawahlunto mempunyai gagasan/ide untuk membentuk sekolah khusus bagi perempuan yang telah menikah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21	DIMANJA (Disabilitas Mandiri Berjaya)	Pengasuhan dan perawatan penyandang disabilitas sehingga mereka dapat tumbuh berkembang dengan baik ditengah keluarga dan masyarakat. Serta terpenuhinya standar kebutuhan penyandang disabilitas untuk dapat hidup layak secara fisik, mental dan psikososial mampu meningkatkan penghormatan terhadap martabat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan penyandang disabilitas dan terpenuhinya hak-hak mereka sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta dapat hidup secara mandiri dan sejahtera (berjaya)	
22	Super Online (Surat Pengantar Online)	Mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan serta menghemat waktu, dilakukan pengiriman data/dokumen perizinan ke OPD Teknis secara online	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
23	Usus Buntu (Urus Izin Susah, Kami Bantu)	Aplikasi OSS diarahkan langsung dan diberi edukasi tentang bagaimana mengoperasikan Aplikasi OSS untuk mendapatkan perizinan berusaha Sehingga masyarakat mendapat kemudahan dalam mengurus perizinan secara terintegrasi yang berbasis online.	
24	Mas Lapor (Media Sosial untuk Layanan Perizinan Online)	Smartphone berbasis android dimanfaatkan untuk memberikan layanan informasi yang efektif dan efisien, komunikasi via WhatsApp ini dimaksudkan untuk menghubungkan layanan informasi perizinan, layanan pengaduan dan potensi kepesertaan BPJS Kesehatan serta BPJS Tenaga Kerja	

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
25	LARIS (Layanan Perizinan dengan SMS)	Sistem SMS gateway yang terintegrasi dengan system pelayanan perizinan sicantik cloud, dimana front office dan back office Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	
26	KIPPER (KLINIK PERIZINAN)	Pelayanan perizinan sicantik cloud, dimana front office dan back office Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto mendapat notifokasi sms	
27	LIPAN (Layanan Informasi PPAT dan Notaris)	Sistem SMS gateway yang terintegrasi dengan system pelayanan perizinan sicantik cloud	
28	SIAP BOS	Sistem Antrian Pelayanan Publik Berbasis Online Pelayanan Perizinan Sawahlunto	
29	JEBOL GILA (Jemput Bola Tagih LKPM)	Metode pendekatan persuasive kepada perusahaan dan membuat jadwal kunjungan ke lapangan setiap Triwulan atau Semester, sehingga perusahaan menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal	
30	PPTK (Pelayanan Perizinan dengan Tandatangan Elektrokik)	Penyelenggaraan pelayanan penerbitan izin melalui aplikasi SiCANTIK CLOUD yang menggunakan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) dilakukan secara online, darimana saja dan kapan saja.	
31	SiMas Publish (Sistem Informasi Pelayanan Publik Sawahlunto)	Pemanfaatan Teknologi komunikasi dan informasi sebagai media informasi pelayanan kepada publik, menampung dan mengolah pengaduan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik dengan mengusung prinsip mudah, terpadu dan tuntas dalam menyalurkan aspirasi dan aduan masyarakat, yang dapat diakses secara online	
32	GETUK	Gerakan Tukar Buku Antar Siswa Bisa Dengan Pinjam Pustaka Atau Pribadi Sekali Sebulan peningkatan minat baca murid	Dinas Pendidikan
33	PERFECTO	Pendidikan Non Formal Edukasi Percontohan Di Lapas Kota Sawahlunto mendapatkan pendidikan dan pengajaran Hak tersebut merupakan bagian integral dari HAM, baik dalam perspektif Islam maupun peraturan perundanganundangan	
34	CHECKLIST CLEAN (CEKRICEK SEKALI SEMINGGU KEBERSIHAN KANTOR)	Menjaga kebersihan lingkungan kantor dengan cara yang sama seperti dengan cara menjaga kebersihan lingkungan rumah	
35	Sawahlunto Join Mayor Academy Asia Pasific 2020	Program executive courses bagi Walikota-walikota lingkup Asia Pasific yang diselenggarakan oleh Organisasi Non-Pemerintah dibawah PBB, seperti United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), UN HABITAT, UN ESCAP, APRU, IGES, dan melibatkan akademi-akademisi dari universitas ternama di luar negeri	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
36	PENYUSUP PT (Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Terdepan)	Pendampingan dan pengawalan terhadap proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa dan OPD melalui koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi secara berkala, tahun sebelumnya dilakukan terhadap dokumen RKPDes/RPJMDes yang diajukan atau diminta oleh desa yang sedang melakukan penyusunan RKPDes kepada Barenlitbangda	

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
37	E-MONEV	Aplikasi yang menginovasi proses Monitoring dan Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, khusunya dalam menyusun SAKIP/LAKIP, Pengukuran Perjanjian Kinerja dan LKPJ menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu inovasi dalam memonitor dan mengevaluasi perlu dilakukan, salah satunya adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	
38	TIM PASTI-PD (Pendampingan, Asistensi Inovasi Perangkat Daerah)	Pendampingan, Asistensi Inovasi Perangkat Daerah dalam bentuk kegiatan dalam bentuk tatap muka langsung melalui kunjungan lapangan, sosialisasi, dan verifikasi pada setiap inovasi Perangkat Daerah.	
39	JALAH SELALIN (Layanan Jaga Sekolah Selamat Ber Lalu Lintas)	Layanan Jaga Sekolah untuk menjaga kelancaran dan ketertiban	Dinas Perhubungan
40	KEJAR LITERASI (Kelompok Belajar Literasi)	Meningkatkan kunjungan ke Perpustakaan, meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat, melibatkan masyarakat untuk berkegiatan di Perpustakaan, memanfaatkan sarana dan prasarana Perpustakaan untuk memfasilitasi potensi pengguna Perpustakaan. Dengan program KEJAR LITERASI maka semua masyarakat dapat merasakan manfaat Perpustakaan terutama para orang tua yang secara ekonomi belum mampu untuk memberikan tambahan belajar berupa kursus atau les kepada anak-anaknya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
41	DOKTER ONLINE (Dokumen Terdigitalisasi secara Online)	Menyediakan kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat dan mudah sebagai lembaga penyedia informasi melalui Digitalisasi Koleksi, Dokumen Terbitan Pemerintah Daerah yang Dilayankan secara Online	
42	LAKEH SATO (Layanan Gratis Kesehatan Hewan Kota Sawahlunto)	Pelayanan dengan menggunakan pendekatan by name by addres yang dilakukan petugas teknis dengan mendatangi kandang ternak milik masyarakat Kota Sawahlunto berupa pelayanan : 1. pemeriksaan hewan secara umum, 2. Pemberian multivitamin, 3. Pemberian Anti elektro dan, 4. Pemeriksaan kebuntingan dan status reproduksi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
43	Kampung Manggis	Pengembangan kawasan hortikultura khususnya tanaman manggis dengan menjadikan satu desa/kampung sebagai pusat/sentra pengembangan tanaman manggis yang akan menghasilkan buah mangggis berkualitas dan dapat dijadikan sebagai contoh / model serta ke depan dapat dijadikan sebagai tempat agro wisata.	
44	LAYANAN “Call POPT”	Pengendalian serangan hama penyakit tanaman, Penanganan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan di tingkat Petani yang tersebar di 37 Desa dan Kelurahan se Kota Sawahlunto	
45	PETAS (PELAYANAN TANPA BATAS)	Pelayanan damkar kepada masyarakat kapan saja, pelayanan 24 jam kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kota Sawahlunto	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
46	KECANTIK (KECAMATAN CINTA STATISTIK)	Pembentukan dan pengembangan desa/kelurahan statistik ini merupakan upaya untuk penguatan dan pemberdayaan fungsi kelembagaan desa/kelurahan di bidang data dan statistik melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi dan metodologi di bidang data statistik yang didukung dengan sarana dan prasarana serta dukungan sumberdaya lainnya	Kecamatan Lembah Segar
47	PENA BATU	(Percepatan Pelaksanaan Batas Administrasi Tanah Ulayat) ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara pihak pemerintah dengan ninik mamak dan tokoh masyarakat dalam upaya percepatan pelaksanaan penetapan batas administrasi tanah ulayat masing-masing suku/kaum di Kota Sawahlunto	DPKP2LH
48	MUTASI SERUMAH	(Musyawarah Tokoh Atasi Sengketa dan Ukur Tanah) bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara pihak Pemerintah dengan Ninik mamak dan tokoh masyarakat dalam upaya penyelesaian sengketa melalui sosialisasi kepada masyarakat	DPKP2LH

Tabel 2.235
Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2022

No.	OPD Pelaksana	Jumlah	Persentase %
1	Disdukcapil	1	2,08
2	Kecamatan Barangin	1	2,08
3	Setdako	1	2,08
4	Kecamatan Silungkang	1	2,08
5	Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	2	4,18
6	RSUD	1	2,08
7	Dinas Kesehatan dan PPKB (UPTD Puskesmas)	6	12,50
8	Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	3	6,25
9	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdaganggan	1	2,08
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	3	6,25
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	2,08
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	4,18
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	10	20,83
14	Dinas Pendidikan	3	6,25
15	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	8,33
16	Dinas Perhubungan	1	2,08
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	4,18
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	3	6,25
19	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	2,08

No.	OPD Pelaksana	Jumlah	Persentase %
20	Kecamatan Lembah Segar	1	2,08
Total		**48**	**100,00**

Grafik 2.14
Usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2022



Sumber : Barenlitbangda, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah inovasi yang dilaporkan pada tahun 2022 akan tetapi jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan inovasi pelaksanaan inovasi berkurang, sedangkan untuk tahun 2021 peningkatan Perangkat Daerah yang melaporkan inovasi sebanyak 80,76 persen dari tahun sebelumnya (Tahun 2020 sebanyak 6 PD dan Tahun 2021 sebanyak 21 PD), dengan peningkatan jumlah inovasi sebanyak 18,4 persen (Tahun 2020 sebanyak 38 inovasi dan Tahun 2021 sebangyak 45 inovasi) dan target kedepannya 90 persen lebih Perangkat Daerah sudah berinovasi. Selain inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto juga memotivasi Desa dan Kelurahan untuk menciptakan berbagai kegiatan yang inovatif ditengah-tangah masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan minat dan motivasi dalam pelaksanaan inovasi oleh Perangkat Daerah dan Desa/ Kelurahan, Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto melaksanakan kegiatan lomba inovasi dengan tujuan untuk terciptanya kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif dalam mewujudkan Sawahlunto yang lebih baik.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

A. Inspektorat

Dalam pelaksanaan pemerintah aspek pengawasan harus diimplementasikan secara komprehensif sebagai alat evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan secara prioritas. Perkembangan indikator pembangunan Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.236
Jumlah Auditor dan P2UPD di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian Jabatan Fungsional	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
1	**Auditor**	**8**	**10**	**10**	**13**	**12**	
	Utama	-	-	-	-	-	
	Madya	3	4	7	7	7	
	Muda	3	4	1	2	1	
	Pertama	1	1	1	2	2	
	Penyelia	-	-	-	-	1	
	Pelaksana Lanjutan	1	1	-	1	1	
2	**P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Perangkat Daerah)**	**4**	**9**	**10**	**17**	**17**	
	Utama	-	-	-	-	-	
	Madya	2	3	3	6	5	
	Muda	2	3	3	5	6	
	Pertama	-	3	4	6	6	
3	**Auditor Kepegawaian**	**0**	**0**	**0**			
	Total	**13**	**13**	**19**	**20**	**29**	

Sumber Data : Inspektorat Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa SDM Inspektorat kota Sawahlunto setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan adanya penambahan jabatan fungsional Aditor dan penambahan jabatan fungsional P2UPD. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Desa – desa dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto. Dengan adanya penambahan SDM Inspektorat Kota Sawahlunto diharapkan pengawasan yang lebih efektif dan efisien sehingga terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

A. Kecamatan

Indikator kinerja daerah (IKD) adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.237
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	100	100	100	100	100

Sesuai dengan tabel realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) persentase lembaga kemasyarakatan di Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai 2022 sudah cukup baik. Untuk tahun 2020 dan 2021 pelaksanaannya lebih banyak ke penanggulangan Covid 19. Sedangkan diawal tahun 2021 permasalahn Covid sudah turun secara signifikan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan lebih difokuskan Edukasi perekonomi akibat dampak Covid 19.

B. Kawasan Strategis Wilayah

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah, berikut ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto:

a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan strategis Kota Sawahlunto dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang. Ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang.

b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
Kawasan Strategis Kota Sawahlunto dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya adalah:
- Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya
- Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kolok dan Sijantang, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota.

c. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukug Lingkungan Hidup

Kawasan strategis terkait aspek lingkungan di Kota Sawahlunto adalah upaya rehabilitasi dan penataa Kawasan bekas tambang untuk mendukung pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup serta untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem. Kawasan strategis dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan di Kandih, Kecamatan Barangin dan Kecamatan talawi untuk Pengembangan Pariwisata. Dengan fokus pada pengembangan kawasan bekas tambang .

Pengembangan genangan bekas penambangan sebagai Kawasan rekreasi air ini adalah dalam rangka penigkatan ruang terbuka hijau, pegendalian banjir, peningkatan resapan air kota dan sebagai cadangan air di musim kemarau. Pengembangan genangan bekas penambangan tanam rekreasi kota dan Pendidikan *Aqua Culture*.

Pengembangan hutan kota berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tangkapan air, memperbaiki kualitas udara dan keindahan (*landscape* kota). Hutan kota ditanami dengan tanaman keras/ tahunan yang dapat menunjang estetika kota dan pelestarian/pengembangan tanaman durian kubang.

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

A. Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan,

keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Di Kota Sawahlunto urusan pemerintahan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Isu strategis dalam urusan ini adalah persiapan menghadapi Pemilu serentak tahun 2024. Pemilu Presiden dan Legislatif akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 dan Pilkada Walikota Sawahlunto akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Sesuai dengan tugasnya Kesbangpol Kota Sawahlunto melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika politik, budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik daerah, maka berdasarkan hal ini Kesbangpol Kota Sawahlunto telah melakukan pemetaan dan persiapan untuk menghadapi tahapan ini.

Kesbangpol Kota Sawahlunto juga telah memulai pemetaan untuk persiapan dan pencegahan antisipasi terjadinya konflik dengan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam pencegahan terjadinya konflik sosial. Sebagai bentuk inovasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto menggaet perwakilan masyarakat di masing-masing kelurahan dan anggota kepolisian sebagai pemantau dalam rangka mencegah konflik sosial dan mengamati gejala-gejala konflik yang ada di masyarakat.

Sebagai bentuk pembinaan ideologi Pancasila, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang mempunyai fungsi dalam membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melakukan koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi dalam pengendalian pembinaan ideologi Pancasila di daerah. Pembinaan ideologi Pancasila ini merupakan bentuk penerapan demokrasi Pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan di daerah.

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Kota Sawahlunto pada tahun 2022 adalah 2,87 yang menyatakan bahwa ketahanan Nasional Kota Sawahlunto pada nilai kurang Tangguh dari penilaian 8 gatra yang terdiri dari 108 variabel dan 821 indikator. Nilai Kota Sawahlunto masih tinggi dari nilai IKN Nasional yaitu 2,75.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dijelaskan bahwa diselenggarakan oleh bidang pembinaan ideologi Pancasila. Untuk selanjutnya kewenangan ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (BPS, https://sirusa.bps.go.id). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita adalah Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya jumlah penduduk pada pertengahan tahun dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Pengeluaran Konsumsi RT Per Kapita} = \frac{\text{Total Pengeluaran Konsumsi RT}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\ \%$$

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang atau jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah

tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1) Makanan, Minuman, dan Rokok; 2) Pakaian dan Alas Kaki; 3) Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga; 4) Kesehatan dan Pendidikan; 5) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya; 6) Hotel dan Restoran, dan 7) Lainnya. Dan Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan salah satu dari enam komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran (*demand side*). Komponen lainnya adalah Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, Net Ekspor Barang dan Jasa. (Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023 : 400).

Berikut disajikan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto beserta variabel pembentuknya selama kurun waktu 2018-2022 pada tabel berikut :

Tabel 2.238
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi RT ADHB Kota Sawahlunto	Juta Rupiah	1.898.442, 83	2.086.707, 65	2.059.425, 35	2.149.716, 58	2.382.394, 65
Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto	Jiwa	61.898	62.524	65.138	65.687	66.413
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto	**Juta Rupiah/jiwa**	**30.67**	**33.37**	**31.62**	**32.73**	**35.87**
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto	**%**	**7,46%**	**8,82%**	**-5,27%**	**3,51%**	**9,61%**

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020 saat merebaknya wabah pandemic covid 19, yang mana Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto mengalami penurunan sebesar 1,76 juta rupiah /jiwa atau turun sebesar 5,27 %. Sedangkan sebelum mewabahnya Covid-19, yakni periode 2018-2019, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto meningkat sebesar 7,46% tahun 2018 dan 8,82% tahun 2019. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 35,87 juta rupiah/jiwa dengan peningkatan 9,61% dari tahun sebelumnya.

2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita

Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita merupakan rasio atau perbandingan Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan dengan Total Pengeluaran (Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 : 205) dengan rumus sebagai berikut:

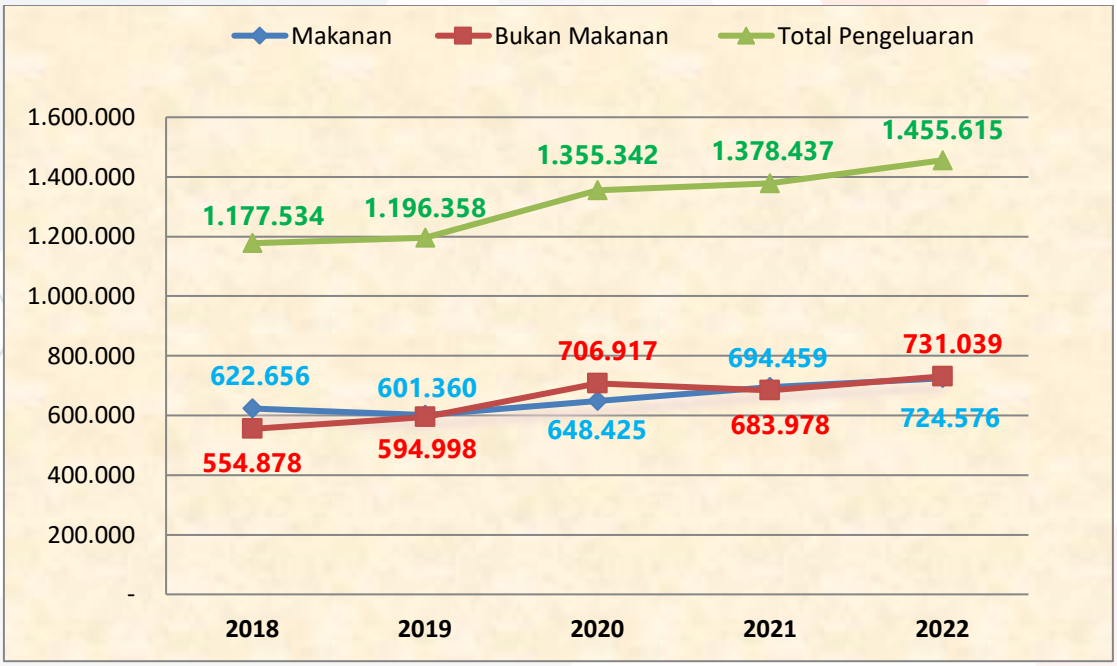
$$\% \text{ Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita} = \frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Total Pengeluaran}} \times 100\ \%$$

Menurut BPS, pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluaran. **Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan.** Atau dengan kata lain, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.. **Makin rendah persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan terhadap total pengeluaran, makin membaik tingkat kesejahteraan** (Sumber : BPS, https://sirusa.bps.go.id).

Pengeluaran konsumsi untuk makanan digunakan untuk membeli padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telor dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi, dan rokok. Sedangkan **pengeluaran konsumsi untuk bukan makanan** digunakan untuk membiayai perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka komoditas dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; komoditas tahan lama; pajak, pungutan, dan asuransi; keperluan pesta dan upacara/kenduri (Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2023 : 363).

Berikut disajikan perkembangan rata-rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 pada grafik berikut :

Grafik 2.15
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 (Dalam Rp)



Sumber Data : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2023 Halaman 363, Survei Sosial Ekonomi Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa selama kurun waktu 2018-2022, pengeluaran konsumsi kelompok makanan mendominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Sawahlunto, **kecuali tahun 2020 dan 2022**, dimana kondisi pada kedua tahun ini pengeluaran konsumsi kelompok **bukan makanan lebih tinggi** dari pengeluaran konsumsi kelompok makanan. Pada Tahun 2020, terjadi peningkatan tajam rata-rata pengeluaran konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan dengan nilai sebesar **706.917** rupiah per kapita per bulan, angka ini **meningkat** dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar **594.998** rupiah per kapita per bulan. Meningkatnya rata-rata pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan bukan makanan di Kota Sawahlunto tahun 2020 digunakan untuk membeli kuota internet karena sistem pembelajaran yang dilakukan secara online. Demikian juga halnya dengan kondisi tahun 2022, pengeluaran konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan **bukan makanan** sebesar **731.039** rupiah per kapita per bulan, angka ini **lebih besar** dari pengeluaran konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan **makanan** dengan nilai sebesar **724.576** rupiah per kapita per bulan.

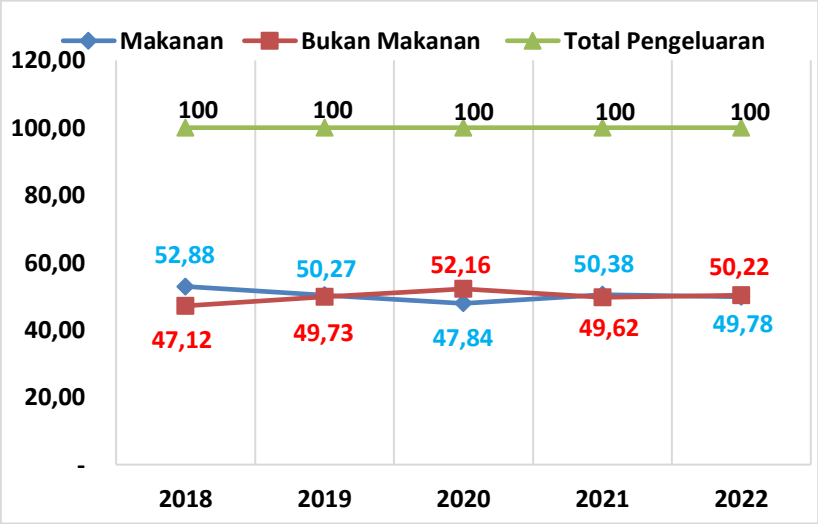
Pengeluaran konsumsi kelompok bukan makanan pada tahun 2022 sebagian besar digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga dengan nilai sebesar Rp. 313.519, selanjutnya pengeluaran untuk aneka komoditas dan jasa sebesar Rp. 201.815, berikutnya pengeluaran untuk pajak, pungutan, dan asuransi sebesar Rp. 84.419, pengeluaran untuk komoditas tahan lama sebesar Rp.59.283, pengeluaran untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala sebesar Rp. 48.814 dan pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri sebesar Rp. 23.189 (Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2023 : 363).

Sedangkan Pengeluaran konsumsi kelompok makanan pada tahun 2022 sebagian besar digunakan untuk makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 195.259, selanjutnya pengeluaran untuk rokok sebesar Rp. 102.253, berikutnya pengeluaran untuk padi-padian sebesar Rp.74.503, pengeluaran untuk sayur-sayuran sebesar Rp.72.781, pengeluaran untuk ikan/udang/cumi/kerang sebesar Rp.63.110, pengeluaran untuk daging sebesar Rp.50.019, pengeluaran untuk telor dan susu sebesar Rp.42.924, pengeluaran untuk minyak dan kelapa sebesar Rp.31.974, pengeluaran untuk buah-buahan sebesar Rp.29.819,

pengeluaran untuk bahan minuman sebesar Rp.16.370, pengeluaran untuk konsumsi lainnya sebesar Rp.12.706, pengeluaran untuk kacang-kacangan sebesar Rp.12.583, pengeluaran untuk bumbu-bumbuan sebesar Rp.10.728, pengeluaran untuk kacang-kacangan sebesar Rp.12.583, pengeluaran untuk umbi-umbian sebesar Rp.9.546 (Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2023 : 363):

Untuk melihat komposisi pengeluaran konsumsi kelompok makanan dan bukan makanan dapat dilihat pada besarnya Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan. Berikut disajikan perkembangan Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 pada grafik berikut :

Grafik 2.16
Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Diolah

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan di Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2018-2022 di atas 50 % kecuali tahun 2020 dan 2022 dengan kecenderungan berfluktuasi. Hal ini berartinya pembiayaan rumah tangga di Kota Sawahlunto lebih dari separohnya digunakan untuk membeli kebutuhan kelompok makanan. **Pada tahun 2020**, pengeluaran untuk kebutuhan makanan di Kota Sawahlunto sebesar 47,84% dan untuk konsumsi **bukan makanan** sebesar **52,16%.** Dengan demikian **pada tahun 2020**, distribusi pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk bukan makanan di Kota Sawahlunto **lebih besar** dari pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk makanan. Begitu juga dengan **tahun 2022**, pengeluaran untuk kebutuhan **bukan makanan** di Kota Sawahlunto sebesar **50,22%** dan pengeluaran untuk kebutuhan makanan 49,78%.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada **tahun 2020 dan 2022 lebih baik atau lebih sejahtera**. Karena proporsi pengeluaran konsumsi **bukan makanan lebih besar** dari pengeluaran konsumsi untuk makanan. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi modern/maju (**Walt Whitman Rostow)**, salah satu ciri perekonomian yang paling modern adalah jika tujuan utama konsumsi masyarakatnya adalah untuk meningkatkan arti hidup, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder. Atau dengan kata lain, **semakin tinggi perekonomian suatu masyarakat, konsumsi untuk kebutuhan bukan makanan semakin tinggi**.

Penyebab kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2020 lebih baik atau lebih sejahtera dari pada tahun-tahun adalah diduga karena turunnya laju inflasi

pada kelompok bahan makanan akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan pasar sepi sehingga harga-harga menjadi turun. Disamping itu, penyelenggaraan sekolah dan aktivitas lainnya dilakukan secara daring sehingga memerlukan tambahan biaya untuk kuota internet (pengeluaran kelompok bukan makanan). Sedangkan pada **tahun 2022**, **inflasi pada kelompok bukan makan lebih tinggi** dari pada kelompok makanan yang dipicu oleh naiknya harga pertalite, pertamax dan solar bersubsidi pada bulan September 2022. Disamping kenaikan harga bahan bakar minyak, juga terjadi kenaikan tarif air dan listrik, harga bahan bakar rumah tangga (gas elpiji), harga barang perlengkapan/peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, harga alat kesehatan, dan biaya transportasi.

3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas adalah perbandingan antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut (Husein Umar, dkk). Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli dimaksud maka dianalogikan output daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) suatu daerah dan input adalah Jumlah Tenaga Kerja yang ada pada daerah tersebut, sehingga Produktivitas total daerah dapat dihitung dengan cara membagi PDRB ADHK dengan jumlah tenaga kerja dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Produktivitas Total Daerah} = \frac{\text{PDRB ADHK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$$

Produktivitas Total Daerah menggambarkan efektifitas tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja. Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.239
Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHK (Rp. Juta)	2.655.619,77	2.796.536,45	2.760.924,18	2.829.590,03	2.942.206,85
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,50	5,31	-1,27	2,49	3,98
Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	30.320	29.117	30.310	30.186	32.275
Pertumbuhan Tenaga Kerja (%)	4,10	-3,97	4,10	-0,41	6,92
Produktivitas Total Daerah (Juta/Jiwa)	87,59	96,04	91,09	93,74	91,16

Sumber :BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023 Halaman 87 & 383, Data Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto berfluktuasi dari tahun ke tahun. Produktivitas Total Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 (sebelum covid 19 melanda) yang mencapai 96,04 juta rupiah/jiwa dan terendah terjadi pada tahun 2018 dengan capaian 87,59 juta rupiah/jiwa. Tingginya Produktivitas Total Daerah pada tahun 2019 disebabkan tingginya jumlah output (PDRB ADHK) tahun 2019 yang tumbuh mencapai 5,31% , sementara input (tenaga kerja) berkurang sebanyak 3,97%. Ketika pandemic covid 19 melanda pada tahun 2020, Produktivitas Total Daerah menurun menjadi 91,09 juta rupiah/jiwa, hal ini disebabkan output (PDRB ADHK) berkurang sebanyak 1,27%, sebaliknya input (tenaga kerja) meningkat sebanyak 4,10%. Setelah covid 19 usai tahun 2021, Produktivitas Total Daerah kembali

meningkat menjadi 93,74 juta rupiah/jiwa seiring dengan meningkatnya jumlah output (PDRB ADHK) sebesar 2,49% dan berkurangnya jumlah input (tenaga kerja) sebesar 0,41%. Dan pada tahun 2022 ketika output (PDRB ADHK) semakin meningkat mencapai 3,98%, justru Produktivitas Total Daerah menurun menjadi 91,16 juta rupiah/jiwa, hal ini disebabkan tinggi pertambahan input (tenaga kerja) yang mencapai 6,92%, jauh melebihi pertumbuhan output (PDRB ADHK).

Untuk melihat Lapangan usaha mana yang paling produktif, maka Produktivitas Total Daerah dirinci berdasarkan output (produksi) dan input dari masing-masing lapangan usaha yang ada. Dengan kata lain Produktivitas Total Daerah diperoleh dengan membandingkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha tertentu yang dihasilkan dengan jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha tertentu dimaksud. Produktivitas total daerah dihitung menurut lapangan usaha dengan tujuan untuk mengindentifikasi kinerja lapangan usaha perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya.

Mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kelompok lapangan usaha terdiri dari tiga lapangan usaha besar, yaitu : **Pertanian; Manufaktur; dan Jasa**. Lapangan usaha ***Pertanian*** terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan usaha ***Manufaktur*** terdiri dari Lapangan usaha pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan lapangan usaha ***Jasa*** terdiri dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum; Pergudangan dan transportasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa-jasa lainnya. Sedangkan pada tahun 2018 dan sebelumnya, kelompok lapangan usaha di Kota Sawahlunto terdiri dari **lima lapangan usaha besar**, yaitu : Pertanian; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan; dan Lainnya. Lapangan usaha *lainnya* terdiri dari Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air; Kontruksi; Angkutan; Pergudangan; Komunikasi; Keuangan; Asuransi; Real Estate; dan Jasa Perusahaan.

Dengan adanya perubahan kelompok lapangan usaha tersebut, maka data yang disajikan dimulai pada tahun 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.240
Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 – 2022

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
Lapangan Usaha	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Pertanian	217.981,59	219.533,32	235.288,04	247.566,33
Manufaktur	872.139,94	860.221,60	829.656,15	843.833,71
Jasa	1.706.414,89	1.681.169,26	1.764.645,84	1.850.806,80
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja (Jiwa)				
Lapangan Usaha	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Pertanian	4.027	5.646	5.547	4.646
Manufaktur	8.367	7.361	7.350	8.766
Jasa	16.723	17.303	17.289	18.863
Produktivitas Total Daerah (Juta Rupiah / Jiwa)				
Lapangan Usaha	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Pertanian	54,13	38,88	42,42	53,29
Manufaktur	104,24	116,86	112,88	96,26
Jasa	102,04	97,16	102,07	98,12

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa lapangan usaha yang paling produktif di Kota Sawahlunto pada tahun 2019-2021 adalah sektor Manufaktur, sedangkan pada tahun 2022 lapangan usaha yang paling produktif adalah lapangan usaha Jasa.

Produktivitas lapangan Usaha Jasa berfluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun Tahun 2022 **lapangan Usaha Jasa adalah yang paling produktif** dibandingkan lapangan usaha lainnya dengan capaian 98,12 juta rupiah/tenaga kerja, namun produktivitasnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 102,07 juta rupiah/tenaga kerja. Hal ini disebabkan peningkatan output lebih kecil dari peningkatan input, output lapangan usaha jasa meningkat sebesar 4,88% sedangkan input (tenaga kerja) meningkat sebesar 9,10%. Sejak lima tahun terakhir **lapangan usaha Jasa ini memang paling banyak menyerap tenaga kerja**. Pada Tahun 2022, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha Jasa **empat kali lipat** lebih banyak dari jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha pertanian dan **dua kali lipat** lebih banyak dari jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha manufaktur.

Produktivitas lapangan Usaha Manufaktur mengalami penurunan selama dua tahun terakhir, dari 116,86 juta rupiah/tenaga kerja pada tahun 2020 menjadi 112,88 juta rupiah/tenaga kerja pada tahun 2021 dan kembali turun drastis pada tahun 2022 menjadi 96,26 juta rupiah/tenaga kerja. Hal ini disebabkan menurunnya jumlah output lapangan usaha ini pada tahun 2021 sebanyak 3,55%. Dan meskipun output lapangan usaha ini kembali meningkat sebesar 1,71% pada tahun 2022, namun **peningkatan output ini jauh lebih kecil dibandingkan** dengan kenaikan jumlah input yang meningkat sangat pesat sebesar 19,27%.

Lapangan usaha yang **paling rendah produktivitasnya** adalah lapangan usaha **pertanian.** Namun selama dua tahun terakhir produktivitas lapangan usaha pertanian ini mengalami peningkatan yang signifikan, dari 38,88 juta rupiah/tenaga kerja tahun 2020 meningkat menjadi 42,42 juta rupiah/tenaga kerja tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 53,29 juta rupiah/tenaga kerja. Hal ini disebabkan output lapangan usaha ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan berkisar antara 0,71%-7,18%, sementara inputnya berkurang sebesar 1,75% pada tahun 2021 dan kembali berkurang drastis sebesar 16,24% pada tahun 2022.

4. Nilai tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks yang diterima petani (IT) dengan indeks yang dibayar petani (IB) dikali dengan 100 (Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 : 205) dengan rumus sebagai berikut :

$$\textbf{Nilai Tukar Petani} = \frac{\textbf{Indeks yang diterima petani (IT)}}{\textbf{indeks yang dibayar petani (IB)}} \times \textbf{100 \%}$$

Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan hanya menghitung Nilai Tukar Petani sampai tingkat Provinsi. Dengan demikian Nilai Tukar Petani Kota Sawahlunto merujuk pada Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat.

Indeks harga yang diterima petani (IT) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. IT ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup sektor padi, palawija, hasil

peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budidaya).

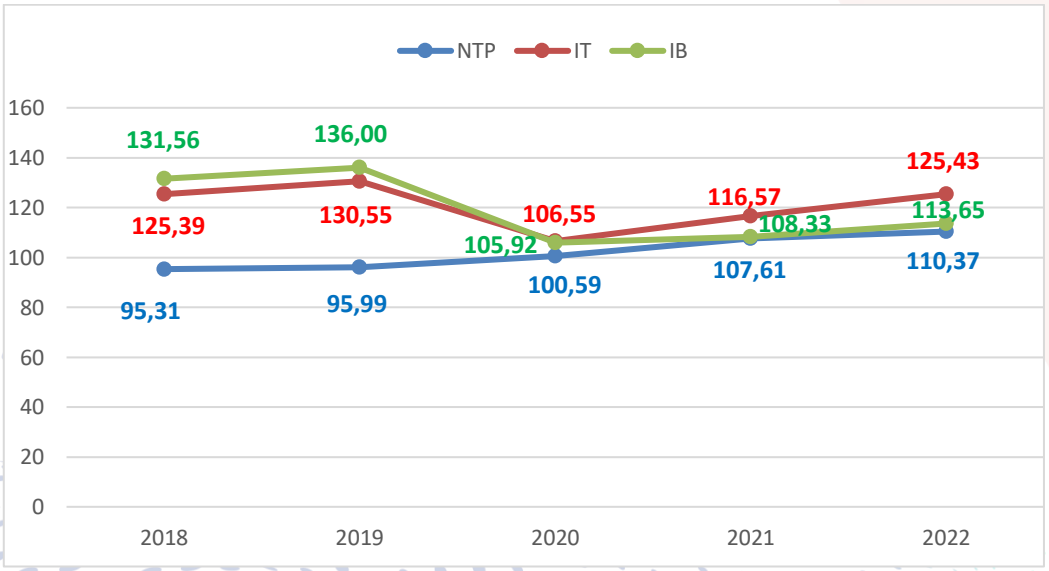
Indeks harga yang dibayar petani (IB) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. IB dihitung berdasarkan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang/jasa non makanan.

Secara umum Nilai tukar petani (NTP) menunjukkan tiga kondisi :

1. NTP > 100 atau IT > IB
   Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani lebih besar dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami surplus.
2. NTP = 100 atau IT = IB
   Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani sama besar dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami titik impas.
3. NTP < 100 atau IT < IB
   Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih kecil* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *defisit.*

Berikut disajikan grafik perkembangan Nilai Tukar Petani Sumatera Barat dari tahun 2017-2021 bersamaan dengan Indeks harga yang dibayar petani (IB) dan Indeks harga yang diterima petani (IT) :

Grafik 2.17
Perkembangan Nilai Tukar Petani Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023, Halaman 836

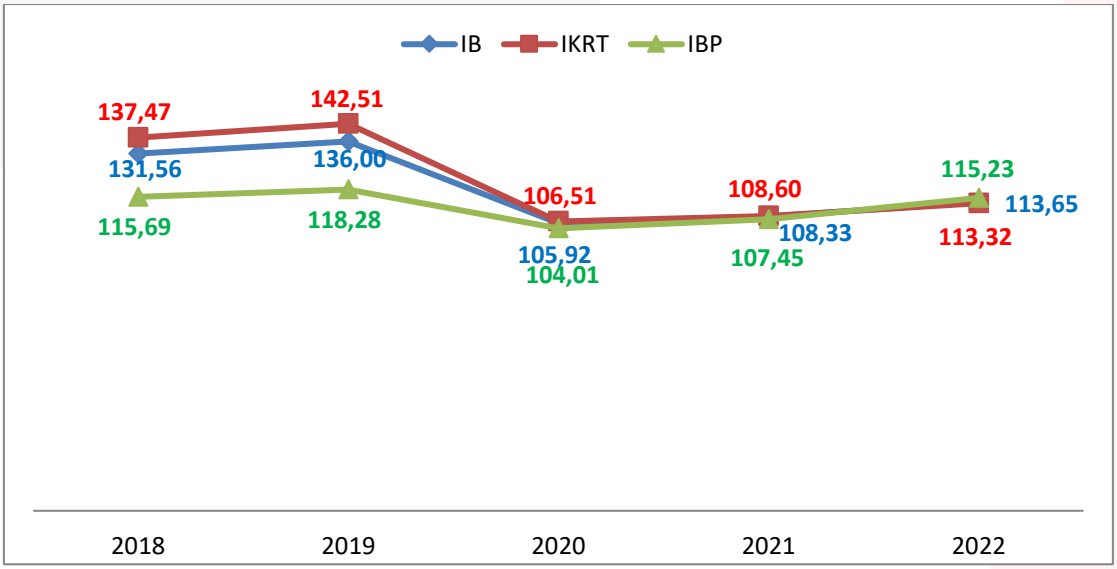
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Nilai Tukar Petani dari tahun 2019 hingga tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Mulai tahun 2020 Nilai Tukar Petani atau NTP sudah lebih dari 100 (NTP >100). Hal Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani (IT) **lebih besar** dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani (IB) dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain **petani mengalami surplus**.

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi periode tahun 2018-2019, dimana petani terus menerus mengalami *defisit* (NTP <100), yang berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani (IT) **lebih kecil** dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani (IB). Sebetulnya pada periode ini sudah terjadi peningkatan pendapatan petani (IT), namun peningkatan pendapatan petani tersebut diiring oleh peningkatan Indeks harga yang dibayar petani (IB) yang lebih tinggi. Akibatnya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi lebih kecil dari 100 (NTP < 100) atau defisit.

Indeks harga yang dibayar petani (IB) meliputi indeks harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga (Indeks Konsumsi Rumah Tangga/IKRT) maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian (Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal/IBP). Berikut disajikan perkembangan Indeks harga yang dibayar petani (IB) periode 2018 – 2022.

Grafik 2.18
Perkembangan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB)
Tahun 2018 - 2022



Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023, Halaman 836

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada periode 2018-2021, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) **lebih dominan** dari pada Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBP). Ini berarti para petani menggunakan sebagian besar pendapatan yang diterimanya untuk membeli kebutuhan rumah tangganya dari pada digunakan untuk Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal. Namun pada tahun 2022, Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBP) lebih besar dari Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT). Ini menunjukkan para petani sudah menggunakan sebagian besar pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal. Meskipun demikian, campur tangan pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelatihan agar produktivitas hasil pertanian meningkat dan nilai tambah hasil pertanian juga meningkatkan melalui pengendalian harga hasil pertanian. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa harga barang-barang pertanian cenderung rendah dan tergantung pada harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul hasil pertanian.

5. Analisis Lapangan Usaha Unggulan Kota Sawahlunto

I. Metode *Shift Share*

Metode ini digunakan untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan lapangan usaha/sektor/industry di wilayah yang sempit (daerah/kabupaten/kota) dengan wilayah yang lebih luas (nasional/Provinsi) (Tarigan, 2005). Dengan kata lain ***metode shift share*** menganalisis pergeseran struktur perekonomian daerah (kecamatan/kabupaten/kota/provinsi) terkait dengan peningkatan perekonomian daerah di atasnya (kabupaten/kota/provinsi/nasional).

Pada analisis ini akan dilihat pertumbuhan lapangan usaha di Kota Sawahlunto dengan lapangan usaha yang sama pada tingkat Provinsi Sumatera Barat. Berikut disajikan hasil perhitungan Metode Shift Share untuk mengetahui kondisi lapangan usaha di Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 pada tabel berikut :

Tabel 2.241
Hasil Analisis *Shift Share* (SS) Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN		KOMPONEN				KATEGORI
		Provinsi (Rip)	SWL (Rij)	NSij	DSij	PSij	SSij	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,02	0,04	6.249,17	-947,15	3.827,02	9.129,04	Basis/Potensial
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	-0,03	4.713,99	-2.545,67	-6.963,02	(4.794,70)	Non Basis
3	Industri Pengolahan	0,01	0,00	8.755,84	-6.424,11	-1.252,18	1.079,55	Non Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	1.560,51	-1.029,50	482,59	1.013,59	Basis/Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	286,40	101,79	-91,57	296,62	Non Basis
6	Konstruksi	0,03	0,02	8.126,04	-609,52	-1.777,92	5.738,61	Non Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,04	0,03	12.385,84	6.510,06	-3.227,85	15.668,05	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	-0,01	0,01	6.814,08	-8.705,21	5.284,17	3.393,04	Basis/Potensial
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,03	0,05	1.377,46	322,60	652,28	2.352,34	Basis/Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	0,08	0,07	7.208,25	13.495,80	-1.569,40	19.134,64	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,04	0,05	2.492,34	1.259,00	435,58	4.186,93	Basis/Potensial
12	Real Estat	0,04	0,04	1.333,89	500,49	205,45	2.039,83	Basis/Potensial
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	100,04	-3,25	7,81	104,60	Basis/Potensial
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,02	0,02	9.017,86	-2.387,07	-434,97	6.195,82	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0,05	0,06	2.314,20	1.863,91	493,00	4.671,12	Basis/Potensial
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,07	0,06	917,72	1.308,78	-256,09	1.970,40	Non Basis
17	Jasa Lainnya	0,04	0,04	3.552,59	1.716,71	-171,82	5.097,48	Non Basis

Berdasarkan tabel di atas diketahui lapangan usaha unggulan berdasarkan Analisa Shift Share (*Proportional Shift* (PSij) yang positif), dimana lapangan usaha dimaksud di Kota Sawahlunto yang lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan Provinsi, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pengadaan Listrik dan Gas;
3. Transportasi dan Pergudangan;
4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
5. Jasa Keuangan dan Asuransi;
6. Real Estat;
7. Jasa Perusahaan;
8. Jasa Pendidikan.

II. Metode Location Quotient

Metode Location Quotient adalah perbandingan peran sector/lapangan usaha suatu daerah terhadap besarnya peran sektor/lapangan usaha tersebut secara nasional (Tarigan, 2014). Nilai dari Location Quotient (LQ) adalah :

1. LQ > 1, artinya peranan lapangan usaha/sektor tersebut lebih besar di daerah dari pada nasional, yang mengindikasikan dimungkinkan ekspor pada lapangan usaha/sektor tersebut (sektor basis/potensial).
2. LQ < 1, artinya peranan lapangan usaha/sektor tersebut lebih kecil di daerah dari pada nasional, yang mengindikasikan perlunya dilakukan impor pada lapangan usaha/sektor tersebut karena belum mampu memenuhi kebutuhan daerah tersebut (sektor non basis)
3. LQ = 1, artinya peranan lapangan usaha/sektor tersebut di daerah sama dengan nasional.

Berikut disajikan hasil perhitungan ***Metode Location Quotient*** untuk mengetahui sektor-sektor unggulan di Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 pada tabel berikut :

Tabel 2.242
Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Sawahlunto 2018-2022

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					LQ	KATEGORI
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,36	0,36	0,35	0,37	0,38	**0,37**	Non Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	1,56	1,63	1,79	1,32	1,26	**1,51**	Basis/Potensial
3	Industri Pengolahan	1,21	1,20	1,16	1,19	1,20	**1,19**	Basis/Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	19,28	19,57	19,63	20,19	20,03	**19,74**	Basis/Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,72	3,74	3,75	3,78	3,61	**3,72**	Basis/Potensial
6	Konstruksi	1,16	1,14	1,11	1,13	1,14	**1,14**	Basis/Potensial
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	**0,98**	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,75	0,77	0,82	0,84	0,82	**0,80**	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,59	1,58	1,68	1,76	1,70	**1,66**	Basis/Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	1,18	1,17	1,15	1,17	1,16	**1,17**	Basis/Potensial

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					LQ	KATEGORI
		2018	2019	2020	2021	2022		
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,11	1,11	1,10	1,12	1,13	**1,11**	Basis/Potensial
12	Real Estat	0,87	0,86	0,86	0,89	0,89	**0,87**	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	**0,30**	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,11	2,05	2,04	2,08	2,11	**2,08**	Basis/Potensial
15	Jasa Pendidikan	0,72	0,72	0,71	0,74	0,74	**0,73**	Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,77	0,75	0,77	0,77	**0,77**	Non Basis
17	Jasa Lainnya	2,61	2,63	2,65	2,66	2,61	**2,63**	Basis/Potensial

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient, di Kota Sawahlunto terdapat sepuluh (10) Lapangan Usaha yang Potensial/Basis selama lima tahun terakhir (tahun 2018-2022), yakni :

1. Pertambangan dan Penggalian**;**
2. Industri Pengolahan;
3. Pengadaan Listrik dan Gas;
4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
5. Konstruksi;
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
7. Informasi dan Komunikasi;
8. Jasa Keuangan dan Asuransi;
9. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
10. Jasa Lainnya.

III. Metode Tipologi Klassen

Metode Tipologi Klassen merupakan salah satu instrument analisa ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengindentifikasi kondisi lapangan usaha yang ada di Kota Sawahlunto. Metode ini akan menghasilkan empat klasifikasi lapangan usaha dengan karakteristik yang berbeda (Sjafrizal, 2008), yaitu :

1. Lapangan usaha maju dan tumbuh pesat (warna ungu)
   Lapangan usaha dengan kondisi (**Ski ≥ Sk, Si ≥ S)**
2. Lapangan usaha maju tapi tertekan (orange)
   Lapangan usaha dengan kondisi (**Ski ≥ Sk, Si < S)**
3. Lapangan usaha potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (hijau)
   Lapangan usaha dengan kondisi (**Ski < Sk, Si ≥ S)**
4. Lapangan usaha relatif tertinggal (biru)
   Lapangan usaha dengan kondisi (**Ski < Sk, Si < S)**

Berikut disajikan hasil perhitungan Metode Tipologi Klassen untuk mengetahui kondisi lapangan usaha yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 pada tabel berikut :

Tabel 2.243
Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN		KONTRIBUSI		KATEGORI
		S	Si	Sk	Ski	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.03	0.02	0.22	0.08	Relatif Tertinggal
2	Pertambangan dan Penggalian	0.03	0.04	0.04	0.07	maju dan tumbuh pesat
3	Industri Pengolahan	0.00	0.00	0.10	0.12	maju dan tumbuh pesat
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.01	0.05	0.00	0.02	maju dan tumbuh pesat
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.05	0.00	0.00	maju dan tumbuh pesat
6	Konstruksi	0.05	0.04	0.09	0.11	Maju tapi Tertekan

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN		KONTRIBUSI		KATEGORI
		S	Si	Sk	Ski	
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.05	0.04	0.16	0.16	Maju tapi Tertekan
8	Transportasi dan Pergudangan	0.01	0.03	0.12	0.09	potensial/ masih dapat berkembang dengan pesat
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.02	0.03	0.01	0.02	maju dan tumbuh pesat
10	Informasi dan Komunikasi	0.09	0.09	0.07	0.08	maju dan tumbuh pesat
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.02	0.02	0.03	0.03	maju dan tumbuh pesat
12	Real Estat	0.04	0.04	0.02	0.02	maju dan tumbuh pesat
13	Jasa Perusahaan	0.03	0.04	0.00	0.00	maju dan tumbuh pesat
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.04	0.04	0.06	0.12	maju dan tumbuh pesat
15	Jasa Pendidikan	0.08	0.07	0.04	0.03	Relatif Tertinggal
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.08	0.07	0.01	0.01	Maju tapi Tertekan
17	Jasa Lainnya	0.03	0.04	0.02	0.05	maju dan tumbuh pesat

Berdasarkan hasil Analisis Tipologi Klassen, di Kota Sawahlunto tahun 2018-2022, terdapat sebelas (11) lapangan usaha maju dan tumbuh pesat, yakni :

1. Pertambangan dan Penggalian**;**
2. Industri Pengolahan;
3. Pengadaan Listrik dan Gas;
4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
6. Informasi dan Komunikasi;
7. Jasa Keuangan dan Asuransi;
8. Real Estat;
9. Jasa Perusahaan;
10. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
11. Jasa Lainnya.

Dalam upaya untuk melihat lapangan usaha mana yang unggul secara ekonomi di Kota Sawahlunto, dilakukan perbandingan hasil analisis ketiga metode dimaksud sebagai berikut.

Tabel 2.244
Perbandingan Hasil Analisis Shift Share, LQ dan Tipologi Klassen
Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

NO	LAPANGAN USAHA	KATEGORI		
		Shift Share (PSij)	LQ	Klassen
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Basis/Potensial	Non Basis	Relatif Tertinggal
2	Pertambangan dan Penggalian	Non Basis	Sektor Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
3	Industri Pengolahan	Non Basis	Sektor Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Basis/Potensial	Sektor Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Non Basis	Sektor Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
6	Konstruksi	Non Basis	Sektor Basis/Potensial	Maju tapi Tertekan
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	Non Basis	Non Basis	Maju tapi Tertekan

NO	LAPANGAN USAHA	KATEGORI		
		Shift Share (PSij)	LQ	Klassen
	Mobil dan Sepeda Motor			
8	Transportasi dan Pergudangan	Basis/Potensial	Non Basis	potensial/masih dapat berkembang dengan pesat
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Basis/Potensial	Sektor Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
10	Informasi dan Komunikasi	Non Basis	Sektor Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Basis/Potensial	Sektor Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
12	Real Estat	Basis/Potensial	Non Basis	maju dan tumbuh pesat
13	Jasa Perusahaan	Basis/Potensial	Non Basis	maju dan tumbuh pesat
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Non Basis	Sektor Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
15	Jasa Pendidikan	Basis/Potensial	Non Basis	Relatif Tertinggal
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Non Basis	Non Basis	Maju tapi Tertekan
17	Jasa Lainnya	Non Basis	Sektor Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat

Pada tabel di atas terlihat perbandingan hasil analisis ketiga metode (Shift Share, Location Quotient dan Tipologi Klassen) yang digunakan untuk melihat sektor unggulan yang ada di Kota Sawahlunto, terdapat tiga (3) Lapangan Usaha Unggulan yang beririsan/bersesuaian dengan ketiga metode tersebut, yakni :

1). Pengadaan Listrik dan Gas;
2). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
3). Jasa Keuangan dan Asuransi.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi topografi dan terjadinya pergerakan tanah dibeberapa daerah di Kota Sawahlunto sangat mempengaruhi kondisi fasilitas wilayah dan infrastruktur yang telah terbangun di Kota Sawahlunto. Hal tersebut membutuhkan penanganan dengan perlakuan khusus terhadap infrasturktur yang dibangun agar dapat bertahan lebih lama. Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi fasilitas wilayah/infrastruktur tersebut, yaitu : rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

1. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan

Nilai rasio panjang jalan terhadap kendaraan bermotor menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya

dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (kilometer). Nilai ini berarti 1 kilometer jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Untuk Panjang jalan, dihitung baik itu jalan kota, jalan propinsi maupun jalan nasional. Sementara untuk jumlah kendaraan, mengacu pada data jumlah kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Indikator ini untuk melihat kelayakan jalan di Kota Sawahlunto dalam menampung jumlah kendaraan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.245
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2022

NO	JENIS DATA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Panjang Jalan Kota	Km	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87
2	Jumlah Panjang Jalan Provinsi	Km	30,65	30,65	30,65	43,20	43,20
3	Jumlah Panjang Jalan Negara	Km	11,35	11,35	11,35	12,37	12,37
4	Jumlah panjang jalan total	Km	496,87	496,87	496,87	510,44	510,44
5	Jumlah Kendaraan	unit	18.755	19.858	20.389	21.567	22.155
6	**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**		**0.026**	**0.025**	**0.024**	**0.023**	**0,023**

Sumber Data: Pengolahan data Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto,2022

Dilihat dari tabel di atas rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 memiliki penurunan setiap tahunnya. Dalam artian terjadinya peningkatan kepadatan jalan atas jumlah kendaraan yang ada. Pada setiap tahunnya terjadinya peningkatan jumlah kendaraan dengan panjang jalan yang masih sama dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel Kota Sawahlunto mempunyai panjang jalan total sepanjang 510,44 kilometer. Jalan di Kota Sawahlunto masih memenuhi untuk menampung jumlah kendaraan dan tidak terjadi kemacetan di Kota Sawahlunto.

2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Tabel 2.246
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	66.470	149.474	25.200	28.350	55.006

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto , 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2022 sudah mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan 2021. Hal ini dikarenakan masa pemulihan pasca Covid masyarakat sudah beraktifitas seperti biasanya. Tidak ada pembatasan arus penumpang dan mobilitas keluar masuk Kota Sawahlunto.

3. Ketaatan terhadap RTRW

Peningkatan kebutuhan ruang semakin bertambah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk dan aktivitas penduduk, sementara itu keberadaan lahan di Kota

Sawahlunto tetap dan terbatas. Akibatnya terdapat konflik kepentingan lahan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan ruang penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan pada ruang yang tetap dan terbatas agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang ada secara serasi antara untuk kepentingan kawasan lindung dan kawasan budidaya serta efisiensi dalam alokasi investasi.

Disamping itu, penataan ruang merupakan isu strategis dalam pembangunan wilayah dikarenakan semua kegiatan pembangunan khususnya yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang dan menjadi salah satu jawaban dari persolan wilayah kota yang semakin kompleks baik ekonomi maupun lingkungan. Melalui penataan ruang, pembangunan di daerah diharapkan dapat diselenggarakan secara terpadu baik lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas pemangku kepentingan agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan ruang ini merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Urusan penataan ruang daerah menjadi salah satu urusan wajib dan penting dilakukan Pemerintah daerah untuk menata ruang-ruang yang ada secara cerdas dan peduli terhadap penataan ruang. Adapun persentase ketaatan ruang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.247
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kota Sawahlunto
Tahun 2018–2022

no	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi RTRW	17	17	17	17	17
2	Rencana Peruntukan RTRW	20	20	20	20	20
3	Persentase	85	85	85	85	85

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2023

Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012 sampai dengan 2032 untuk tahun 2018 sampai dengan 2022 terdapat 20 komponen rencana pola ruang dan rencana struktur ruang. Untuk realisasi hingga tahun 2022 baru 17 dokumen rencana yang terealisasi sehingga baru 85 % dari rencana pada tahap I RTRW di RPJMD tahun 2013 sampai dengan 2018.

Dokumen RTRW Kota Sawahlunto 2012 sampai dengan 2032 dalam proses revisi dan dilegalkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Perubahan kebijakan dan perubahan isu akan menjadi dasar dalam revisi RTRW Kota Sawahlunto, sehingga menyebabkan persentase ketaatan terhadap RTRW sampai tahun 2021 tidak mengalami perubahan.

Berikut data persentase realisasi kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang Kota Sawahlunto :

Tabel 2.248
Realisasi Persentase kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang
Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang	86,00	86,00	87,50	84,15	84,15

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Berdasarkan tabel diatas realisasi kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terjadi capaian realisasi yg fluktuatif atau naik turun, hal ini disebabkan masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengendalian dan pemanfaatan ruang dan belum adanya sistem informasi tata

ruang secara digital serta masih kurangnya pengawasan terhadap pengendalian dan pemanfaatan ruang.

4. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Kota Sawahlunto dari tahun 2018 tidak mengalami banyak perubahan sampai tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh topografi wilayah yang bergelombang dan berbukit, dimana wilayah produktif hanya kurang lebih 18 persen dari luas wilayah kota atau seluas 4.922,10 hektar.

5. Luas wilayah industri

Luas wilayah industri di kota Sawahlunto sejak tahun 2018 tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2022, seperti tabel berikut:

Tabel 2.249
Luas Wilayah Industri Tahun 2018-2022

Tahun	Luas Wilayah Industri (ha)
2018	39.84
2019	39.84
2020	39.84
2021	39.84
2022	39.84

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2023

6. Luas wilayah kebanjiran

Topografi wilayah kota yang ada dengan tingkat kemiringan rata-rata diatas 15 persen, tidak memungkinkan terjadi kebanjiran di suatu kawasan karena kecepatan aliran air sangat tinggi sampai ke muara. Hanya saja terdapat beberapa kawasan yang tergenang disebabkan luapan sungai yang ada disekitar kawasan antara lain seperti sepanjang aliran sungai Batang Lasi di Silungkang Duo dan Silungkang Tigo, sepanjang aliran batang Malakutan kenagarian Kolok, sepanjang aliran batang Ombilin di TaLawi Hilir dan Sijantang, dengan tinggi genangan antara 0,10 sampai dengan 0,50 meter yang berlangsung selama 1 sampai dengan 3 jam.

7. Luas wilayah kekeringan

Wilayah kekeringan umumnya terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Silungkang (Silungkang Oso), Kecamatan Barangin (Talago Gunung) serta di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan di Kecamatan Talawi seperti di Bukit Gadang, Batu Tanjung, Tumpuk Tangah, Datar Mansiang dan Kumbayau.

8. Luas wilayah perkotaan

Walaupun disebut sebuah “Kota”, Wilayah Kota Sawahlunto secara administrasi terdiri dari 4 wilayah kecamatan, 27 desa dan 10 Kelurahan, dengan luas 27.345 hektar. Dalam mengkategorikan wilayah perkotaan, yang dijadikan acuan perhitungan luas wilayah perkotaan adalah luas wilayah kelurahan.

Tabel 2.250
Luas Wilayah Kota Sawahlunto

No	Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	**Kecamatan Barangin**	
03	Kel. Saringan	0,81
04	Kel. Lubang Panjang	1,00
05	Kel. Durian I	1,17
06	Kel. Durian II	1,25
2	**Kecamatan Lembah Segar**	
06	Kel. Pasar	0,50

No	Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	0,28
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	0,27
09	Kel. Aur Mulyo	0,20
10	Kel. Tanah Lapang	0,16
11	Kel. Air Dingin	0,14
Jumlah		**5,78**

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022

9. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Indikator yang digunakan untuk persentase rumah tangga yang menggunakan listrik adalah jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali seratus persen. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut :

Tabel 2.251
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	15.163	15.351	15.534	16.225	16.542
2	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik (RT)	11.476	11.858	12.314	12.884	13.109
3	Persentase Rumah Tagga yang menggunakan listrik (%)	75,68	77,24	79,27	79,40	79,24

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata untuk semua jenis pelanggan listrik mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang dikarenakan kebutuhan dasar akan pemenuhan daya listrik. Jika dilihat dari pelanggan rumah tangga, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Namun jika dilihat dari persentasenya mengalami kondisi naik turun. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah rumah tangga tidak sebanding dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Ini harusnya menjadi perhatian pemerintah Kota Sawahlunto bagaimana agar semua masyarakat Kota Sawahlunto dapat terlayani dan menikmati energi listrik yang ada.

10. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Perkembangan zaman menuntut masyarakat menjadi pintar dalam teknologi. Seiring perkembangan arus informasi yang mengalir deras, masyarakat juga membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Banyak media yang memberikan akses teknologi dan informasi kepada masyarakat, seperti telepon selular/Handpone (HP) dan komputer/laptop. Telepon selular/Handpone (HP) adalah salah satu produk dari perkembangan teknologi modern yang paling banyak digemari. Handpone menjadi barang wajib bagi setiap orang saat ini.

Tabel 2.252
Persentase Masyarakat yang Menggunakan Telepon/HP
Tahun 2017- 2021

NO	Alat Komunikasi dan Informasi	2017	2018	2019	2020	2021
1	HP / Telepon	83,27	84,31	84,72	86,43	89,21

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga di Kota Sawahlunto yang memiliki telepon selular sudah mencapai 86,43 persen. Hal ini dinilai tinggi dengan artian sebagian besar masyarakat Kota Sawahlunto telah menggunakan HP sebagai sarana komunikasi. Didukung dengan jaringan komunikasi yang sudah baik sehingga memudahkan akses dan keterbukaan informasi di Kota Sawahlunto.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Berikut disajikan angka kriminalitas di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.253
Angka Kriminalitas di Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Tindak Kejahatan *Crime*	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Curat (Pencurian dengan Pemberatan	19	21	19	9	6
2	Penggelapan	3	2	3	1	3
3	KDRT	3	3	4	-	1
4	Penipuan	19	4	3	2	4
5	Pengrusakan	3	4	2	1	3
6	Pencurian Kendaraan Bermotor	23	6	8	5	4
7	Pembakaran	1	1	-	-	-
8	Anirat (Penganiayaan dengan Pemberatan)	-	1	1	1	1
9	Perkosaan	4	6	-	-	-
10	Pembunuhan	-	-	-	-	-

Sumber Data: BPS Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka kriminalitas di Kota Sawahlunto selama tahun 2018-2022 berfluktuatif dengan pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor mendominasi. Angka kriminalitas mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi. Investor dalam menghasilkan barang dan jasa, akan dirugikan jika terganggu oleh kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum (perijinan). Untuk mengurangi angka kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum, perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan petugas keamanan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban, sehingga investor tidak ragu dan merasa nyaman untuk berinvestasi. Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan; pengembangan sistem pengamanan rahasia; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Sawahlunto.

2. Jumlah Demonstrasi

Demontrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat

kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakukan majikannya dan lain-lain. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Di Kota Sawahlunto dalam periode waktu tahun 2018-2022 tidak ada terjadi aksi demonstarsi alias nihil (*sumber data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto*).

3. Lama Proses Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Selain prosedur perizinan yang mudah, ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada sudah dipermudah dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah.

Proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker). Penerbitan dokumen izin dan non izin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Investasi yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan. Kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Lamanya proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan Perwako Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwako Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto terdapat 138 jenis perizinan dan non perizinan.

Dan berdasarkan Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 dan Perpres RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik maka Pemerintah Kota Sawahlunto melalui DPMPTSPNaker telah membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP), yang pada saat ini sudah aktif/sudah beroperasi, sudah selesai penandatanganan naskah kerjasama atau MoU dengan beberapa lembaga terkait perizinan dan non perizinan (Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Organisasi Perangkat Daerah, Swasta, dan Lembaga sebanyak 25 gerai) dan sudah diresmikan oleh Menteri PANRB pada tanggal 26 September 2022. Yang mana MPP ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi, efektif dan efisien (pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal di DPMPTSNaker juga telah dilaksanakan beberapa inovasi antara lain : 1) PPTK (Pelayanan Perizinan dengan Tanda Tangan Elektronik) yaitu penyelenggaraan pelayanan penerbitan izin melalui aplikasi SiCANTIK CLOUD dan menggunakan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) dilakukan secara online, darimana saja dan kapan saja, cukup melalui aplikasi ini; 2) Super Online (Surat Pengantar Online) yaitu pengiriman data/dokumen perizinan ke OPD Teknis secara online sehingga diharapkan petugas teknis dapat melakukan respon yang cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis yang diminta; 3) SIMas Publish (Sistem Informasi Pelayanan Publik Sawahlunto) yaitu media informasi pelayanan

publik teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan sebagai media informasi pelayanan kepada publik, menampung dan mengolah pengaduan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik dengan mengusung prinsip mudah, terpadu dan tuntas dalam menyalurkan aspirasi dan aduan masyarakat, yang dapat diakses secara online; 4) SIAP BOS (Sistem Antrian Pelayanan Publik Berbasis Online) yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai media dalam memanagement antrian pelayanan kepada publik yang berbasis online atau web; 5) Mas Lapor (Media Sosial untuk Layanan Perizinan Online) yaitu penggunaan Smartphone berbasis android untuk memberikan layanan informasi yang efektif dan efisien/menghubungkan layanan informasi perizinan, layanan pengaduan dan potensi kepesertaan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan melalui WhatsApp; 6) LARIS (Layanan Perizinan dengan SMS) yaitu dengan sistem SMS gateway yang terintegrasi dengan system pelayanan perizinan sicantik cloud, dimana front office dan back office mendapat notifikasi sms ketika ada perizinan yang harus diproses; 7) Usus Buntu (Urus Izin Susah, Kami Bantu) yaitu dengan layanan OSS Mandiri, masyarakat yang megurus izin berusaha melalui aplikasi OSS akan diarahkan langsung tentang bagaimana mengoperasikan Aplikasi OSS untuk mendapatkan perizinan berusaha sehingga masyarakat mendapat kemudahan dalam mengurus perizinan secara terintegrasi yang berbasis online; 8) KIPER (Klinik Perizinan) yaitu merupakan program pelayanan konsultasi dan bimbingan pelayanan untuk seluruh jenis perizinan yang ada pada DPMPTSPNaker. KIPER ini juga diperuntukkan bagi para investor yang membutuhkan segala macam perizinan untuk dapat memulai usaha ataupun mengoperasikan usahanya agar proses perizinan dapat menjadi lebih cepat, hemat biaya dan tidak melanggar aturan; 9) LIPAN (Layanan Informasi PPAT dan Notaris) yaitu membantu memberikan informasi praktis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan service Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah); 10) JEBOL GILA (Jemput Bola Tagih Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yaitu pelayanan publik kepada perusahaan yang wajib melaporkan laporan kegiatan penanaman modal melalui metode pendekatan persuasif kepada perusahaan untuk memudahkan pelaku usaha/perusahaan dalam melaporkan LKPM nya dengan pendampingan langsung oleh petugas dari DPMPTSPNaker.

Realisasi pelayanan perizinan dan non perizinan Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.254
Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto
Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan	
		Jumlah Perizinan	Jumlah Non Perizinan
1	2018	1.563	338
2	2019	700	867
3	2020	272	680
4	2021	411	428
5	2022	411	456

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa jumlah izin dan non izin yang diterbitkan berfluktuatif setiap tahunnya. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan tahun 2018 adalah 1.901, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.567, tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 952, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 839, sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 867. Kenaikan ini disebabkan oleh kemudahan pengurusan perizinan melalui Sistem Online Single Submission (OSS), yang mana berdasarakan PP Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 KBLI yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Kenaikan perizinan ini juga disebabkan oleh telah beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) mulai dari bulan Maret tahun 2022 ini. Yang mana di MPP ini terdapat 134 jenis layanan yang terintegrasi pada satu tempat.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan serta ketenagakerjaan yang dilaksanakan dapat secara maksimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut disajikan jumlah SDM dalam pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.255
Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	OPD	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dinas PMPTSPNaker	10 orang	9 orang	9 orang	10 orang	10 orang
2	Dinas Teknis	29 orang	35 orang	43 orang	43 orang	41 orang
	Jumlah	**39 orang**	**44 orang**	**52 orang**	**53 orang**	**51 orang**

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SDM yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto sebagian besar adalah pegawai yang berada diluar DPMPTSPNaker, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung kepada Dinas Teknis.

4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri dari pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi KTP dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman/penguburan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi. Retribusi jasa usaha terdiri dari pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.256
Target dan Realisasi PDRD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
I	**Pajak Daerah**	**5.527.610.850**	**5.546.092.124**	**5.973.337.400**	**5.502.589.718**	**5.666.500.000**	**5.602.920.091.75**	**6.134.000.000**	**5.993.540.247**	**7.303.500.000**	**7.434.834.333,40**
1	Pajak Hotel	160.000.000	132.597.836	105.000.000	94.965.756	22.500.000	47.335.931	148.000.000	168.914.129	170.000.000	266.384.955,80
2	Pajak Restoran	514.223.450	529.988.908	514.000.000	532.945.719	399.700.000	477.464.758.75	704.500.000	617.303.460	837.000.000	993.108.403,60
3	Pajak Hiburan	394.687.400	283.599.800	400.137.400	109.385.500	5.300.000	1.650.000	107.000.000	-	156.000.000	61.170.000
4	Pajak Reklame	34.200.000	47.786.507	34.200.000	47.810.243	38.000.000	48.692.318	39.500.000	42.613.818	39.500.000	45.912.393
5	Pajak Penerangan Jalan	3.100.000.000	3.189.233.765	3.500.000.000	3.339.015.131	3.500.000.000	3.344.827.881	3.300.000.000	3.434.721.546	3.700.000.000	3.735.969.454
6	Pajak Mineral Bukan Logam	15.000.000	16.382.400	15.000.000	12.979.400	1.000.000	769.600	23.000.000	10.651.360	100.000.000	74.030.951
7	Pajak Parkir	4.500.000	4.500.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	511.000
8	PBB-P2	1.055.000.000	937.788.713	1.055.000.000	958.272.261	1.100.000.000	963.603.643	1.112.000.000	1.057.891.430	1.500.000.000	1.661.104.059
9	BPHTB	250.000.000	404.214.195	350.000.000	407.215.708	600.000.000	718.575.960	700.000.000	661.444.504	800.000.000	596.643.117
II	**Retribusi Daerah**	**3.889.736.594**	**3.533.959.570**	**4.093.327.838**	**3.625.062.865**	**3.108.095.850**	**2.787.376.593**	**3.108.095.850**	**2.724.639.922**	**4.649.762.464**	**3.550.241.052**
A.	**Retribusi Jasa Umum**										
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	686.913.300	919.339.000	511.926.030	518.014.000	582.406.850	483.055.400	582.406.850	293.176.700	352.072.464	362.942.700
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	78.556.000	62.770.000	78.556.000	85.986.000	92.000.000	114.030.000	92.000.000	132.276.000	138.500.000	124.303.000
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	151.150.000	146.020.000	166.750.000	166.750.000	78.200.000	78.200.000	78.200.000	169.400.000	181.200.000	176.200.000
4	Retribusi Pelayanan Pasar	795.348.000	446.051.000	765.348.000	494.482.500	419.034.000	428.224.000	419.034.000	363.876.000	589.840.000	537.933.500
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000	124.817.160	100.000.000	119.509.740	32.000.000	33.630.580	32.000.000	1.035.000	150.000.000	52.522.500
6	Retribusi Penggantian Biaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Cetak Peta										
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	53.700.000	54.550.000	53.700.000	32.150.000	28.700.000	29.900.000	28.700.000	30.100.000	48.200.000	42.400.000
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**Retribusi Jasa Usaha**										
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.296.269.294	1.022.463.010	1.443.747.808	1.359.739.525	1.039.855.000	966.718.013	1.039.855.000	1.173.842.422	1.304.950.000	1.322.331.070
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-	13.200.000	-	13.200.000	1.800.000	23.000.000	3.600.000
3	Retribusi Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	54.200.000	57.255.000	54.200.000	59.927.500	53.500.000	60.745.000	53.500.000	57.182.500	65.000.000	55.862.000
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	543.200.000	557.373.000	788.700.000	683.052.000	698.800.000	516.801.000	698.800.000	436.595.000	1.746.600.000	847.974.000
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**										
1	Retribusi IMB	130.000.000	143.201.400	130.000.000	105.131.600	70.000.000	75.992.600	70.000.000	65.196.300	-	-
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung									50.000.000	24.172.282
3	Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Retribusi Izin Trayek	400.000	120.000	400.000	320.000	400.000	80.000	400.000	160.000	400.000	-
	JUMLAH TOTAL	**9.417.347.444**	**9.080.051.694**	**10.066.665.238**	**9.127.652.583**	**8.774.595.850**	**8.390.296.684.75**	**9.242.095.850**	**8.718.180.169**	**11.953.262.464**	**10.985.075.385,40**

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022

Untuk tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Pajak dan Retribusi yang dipungut oleh Kabupatan/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.257
Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 s.d selanjutnya

No	Uraian
I	**Pajak Daerah**
1	PBB-P2
2	BPHTB
3	PBJT
4	Pajak Reklame
5	PAT
6	Pajak MBLB
7	Pajak Sarang Burung Walet
8	Opsen PKB
9	Opsen BBNKB
II	**Retribusi Daerah**
1	**Retribusi Jasa Umum**
a.	Pelayanan Kesehatan
b.	Pelayanan Kebersihan
c.	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
d.	Pelayanan Pasar
e.	Pengendalian Lalu Lintas
2	**Retribusi Jasa Usaha**
a.	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
b.	Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
c.	Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
d.	Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
e.	Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
f.	Pelayanan jasa kepelabuhanan
g.	Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
h.	Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
i.	Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
j.	Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**
a.	Persetujuan bangunan gedung
b.	Penggunaan tenaga kerja asing
c.	Pengelolaan pertambangan rakyat

Sumber : Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

Berdasarkan tabel target dan realisasi PDRD diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir berfluktuatif. Target dan realisasi Pajak Daerah dari tahun 2018-2022 selalu menunjukkan trend positif, yaitu meningkat dengan target dari Rp. 5.527.610.850 pada tahun 2018 menjadi Rp. 7.303.500.000 pada tahun 2022 dengan realisasi Rp. 5.546.092.124 pada tahun 2018 menjadi Rp. 7.434.834.333,40 pada tahun 2022. Pajak daerah yang menjadi kontributor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto yang terbesar adalah pajak penerangan jalan, disusul oleh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), sedangkan pajak daerah yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah pajak parkir, bahkan pada tahun 2019-2021 pajak parkir tidak ada memberikan kontribusi sama sekali alias nihil. Pajak parkir ini mulai tahun

2019 tidak lagi dikelola oleh Wahana Wisata Sawahlunto (WWS) tapi dikelola oleh Pemda/diselenggarakan oleh pemerintah daerah sehingga tidak termasuk objek pajak.

Target dan realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2018-2022 menunjukkan trend positif, yaitu meningkat dengan target dari Rp. 3.889.736.594 pada tahun 2018 menjadi Rp. 4.649.762.464 pada tahun 2022 dengan realisasi Rp. 3.533.959.570 pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 3.550.241.052 pada tahun 2022. Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Daerah dari tahun 2018-2022 berfluktuatif. Retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi paling besar untuk PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi pelayanan kesehatan, sedangkan retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD adalah retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang mana dalam periode 5 tahun terakhir retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak ada memberikan kontribusi sama sekali alias nihil. Hal ini disebabkan oleh retribusi penggantian biaya cetak peta sudah tidak ada lagi di Perda. Retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, sedangkan retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD adalah retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir, bahkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir retribusi terminal tidak ada memberikan kontribusi sama sekali terhadap PAD, sedangkan retribusi tempat khusus parkir selama 3 tahun terakhir (2018 s.d 2020) tidak ada memberikan kontribusi sama sekali alias nihil dan pada tahun 2021 s.d 2022 retribusi tempat khusus parkir memberikan sedikit kontribusi yaitu sebesar Rp. 1.800.000 tahun 2021 dan Rp. 3.600.000 tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh retribusi terminal sudah menjadi tanggungjawab provinsi sedangkan retribusi tempat khusus parkir tahun 2021 hanya sedikit yang terealisasi disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Untuk retribusi perizinan tertentu yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sedangkan retribusi perizinan tertentu yang memberikan kontribusi paling rendah terhada PAD adalah retribusi izin trayek. Hal ini disebabkan oleh tidak beroperasinya lagi angkutan kota dalam Kota Sawahlunto.

Belum tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari yang ditargetkan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak/masyarakat dalam membayar kewajibannya, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, dan belum optimalnya pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

5. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *goodwill* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam Perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyaraat melakukan investasi. Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Berikut ini disajikan jumlah perda yang mendukung iklim usaha di Kota Sawahlunto yang ditetapkan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.258
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Sawahlunto yang Ditetapkan Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perda terkait Perizinan	Buah	0	0	0	0	0

2	Perda terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	Buah	0	0	0	0	0
3	Perda terkait Ketenagakerjaan	Buah	2	0	0	0	0

Sumber: Bagian Hukum Setdako Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perda yang mendukung iklim usaha yang ditetapkan dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah perda yang mendukung iklim usaha yang ditetapkan adalah 2 perda sedangkan pada tahun 2019 s.d 2022 tidak ada satu perda pun yang dikeluarkan/ditetapkan. Peraturan Daerah ini diperlukan untuk mendukung iklim usaha di Kota Sawahlunto. Dengan adanya perda maka dapat meningkatkan usaha di Kota Sawahlunto yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraaan masyarakat.

Dalam memajukan iklim investasi, Pemda dan masyarakat harus berkomitmen, dengan memberikan rasa aman bagi investor, kemudahan dalam mengurus administrasi perizinan, serta daya dukung anggaran pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi mutakhir. Majunya iklim investasi akan berdampak positif tehadap kemajuan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila hal ini bisa terlaksana dengan baik maka iklim investasi akan terus berkembang dan angka pengangguran akan berkurang, karena terbukanya lapangan kerja baru.

Pemerintah Kota Sawahlunto diharapkan terus memberikan pelayanan terbaik, serta masyarakat terus menjaga keamanan yang kondusif demi mendukung perkembangan iklim investasi demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu berupaya mengevaluasi seluruh bidang pembangunan di Kota Sawahlunto yang dapat dijadikan peluang bagi investor untuk berinvestasi di Kota Sawahlunto. Sehingga, dapat diketahui bidang mana yang memerlukan investasi yang lebih baik di Kota Sawahlunto.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atau sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.259
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah lulusan S1	3.957	4.149	4.358	4.692	4.873
2	Jumlah lulusan S2	248	255	270	289	315
3	Jumlah lulusan S3	3	3	2	3	3
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	4.208	4.407	4.630	4.984	5.191
5	Jumlah penduduk Angkatan kerja	32.171	31.249	33.019	32.243	33.973
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	13,08	14,10	14,02	15,46	15,28

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2022

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun

keatas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya. Data rasio ketergantungan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.260
Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	16.918	16.836	16.632	16.663	15.452
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	4.661	4.884	4.897	4.911	5.773
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	21.579	21.721	21.529	21.574	21.225
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	44.798	45.133	45.478	45.580	46.544
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	48,17	48,13	47,34	47,33	45,60

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 menunjukkan trend fluktuatif, tahun 2018 sebanyak 48,17 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 47,24, artinya tiap 100 orang penduduk yang berusia kerja/usia produktif (15-64) pada tahun 2022 mempunyai tanggungan sebanyak lebih kurang 47 orang penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Semakin rendah rasio ketergantungan maka semakin tinggi produktivitas angkatan kerja.

2.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

2.2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2022 secara keseluruhan capaian IKU di Kota Sawahlunto telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk tingkat kemiskinan, pada tahun 2022 Kota Sawahlunto kembali dapat mempertahankan peringkat sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia di angka 2,28, yang artinya pemerintah kota bersama masyarakat kota Sawahlunto mampu kembali bangkit pasca melemahnya ekonomi pada masa pandemi. Kebijakan-kebijakan terkait pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah kota mampu menyasar kepada sasaran yang tepat, sehingga dapat kembali menekan angka kemiskinan. Di samping itu, penurunan jumlah balita stunting di Kota Sawahlunto juga patut menjadi perhatian, pada tahun 2021 prevalensi stunting di Kota sawahlunto mencapai 21,7%, sementara di tahun 2022 mengaami penurunan cukup besar hingga 13,7%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat sangat serius dalam menghadapi isu stunting pada balita yang ada di Kota Sawahlunto. Dari bidang pendidikan pada tahun 2022 juga mengalami kemajuan, angka harapan lama sekolah di tahu 2022 meningkat dari 13,18 ke 18, 42, sedangkan angka rata-rata

lama sekolah juga meningkat dari 10,17 menjadi 10,32. Hal ini menyatakan bahwa kesadaran masyarakat akan pendidikan di Kota Sawahlunto telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Program-program menarik seperti beasiswa prestasi dan pembagian seragam bagi peserta didik Kota Sawahlunto juga menjadi sebuah motivasi dalam meningkatkan keinginan mengenyam pendidikan yang lebih baik bagi anka usia sekolah di Kota Sawahlunto.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat secara keseluruhan dalam tabel berikut:

Tabel 2.261
Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelaksanaan Tahun 2018-2023 RPJMD Kota Sawahlunto

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022,00		2021	2022	
1	2	3	4	8	9	13	14,00	15	19=13/8x100	20=14/9x100	21=15/4x100
A.	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN										
1.	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota sawahlunto (%)	((Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun n - Jumlah zakat pada BAZNAS tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	1,77	1,23	1,43	60,31	24,47	24,47	4903,25	1711,19	100,00
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,53	2,9	3,24	2,49	3,98	3,98	85,862	122,84	87,86
3.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	59,99	62,93	58,62	66,10	66,1	97,72	105,04	100,11
4.	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,1	2,05	2,38	2,28	2,28	86,67	88,78	86,57
5.	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,278	0,28	0,28	0,30	0,31	0,31	95,02	89,29	88,49
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	74,09	73,17	73,63	72,88	73,73	73,73	99,60	100,14	99,51
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	61,54	52,93	60,05	53,21	55,68	55,68	100,53	92,72	90,48
8.	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	0,139	0,044	0,046	-3300	33,06	33,06	-7500000,00	71869,57	100,00
9.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	79,69	81,71	84,42	87,60	87,6	105,94	107,21	100,00
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,52	95,5	95,51	95,73	belum rilis	belum rilis	100,24	belum rilis	belum rilis
				RATA-RATA IKU TUJUAN							121,86
B	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN SASARAN										
1.	Persentase Komunitas Budaya yang aktif (%)	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	88	76	84	76	88,71	88,71	100,00	105,61	100,00
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	7,55	6,81	6,38	5,00	5,00	115,50	126,58	100,00
3.	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	418.106,23	401.862,74	409.417,45	432.174,39	432174,39	432174,39	107,54	94,44	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022,00		2021	2022	
1	2	3	4	8	9	13	14,00	15	19=13/8x100	20=14/9x100	21=15/4x100
4.	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11.024,59	10.307,58	10.632,26	10.195,00	10537,00	10537,00	98,91	99,10	95,58
5.	PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	615.823,20	556.832,20	582.684,76	564.865,95	560862,45	560862,45	101,44	96,25	91,08
6.	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	344.355,30	329.730,34	336.849,19	345.211,69	345211,69	345211,69	104,70	102,48	100,00
7.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	72,33	68,91	70,56	68,91	73,85	73,85	100,00	104,66	100,00
8.	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	41	36	36	45	112593,00	112.593	125,00	312758,33	100,00
9.	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,2	13,18	13,19	13,18	13,42	13,42	100,00	101,74	101,67
10.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	11,3	10,75	11,01	10,32	10,32	10,32	96,00	93,73	91,33
11.	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	30	20	25	15	22,00	22	75,00	88,00	73,33
12.	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	BB (72,83)	B (64,57)	B (68,22)	61,61	61,92	61,92	95,42	90,77	79,56
13	Opini laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00
14.	Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%	12,68	4,04	4,19	-0,14	0,28	0,28	-3,47	6,68	2,21
15.	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	75,00	66,00	70,00	63,00	63,00	63,00	95,45	90,00	84,00
16	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,42	70,14	70,28	70,1	70,40	70,4	99,94	100,17	99,97
17.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	Jumlah Kasus stunting pada Balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	2,650	6,10	3,78	6,10	5,60	5,60	100,00	51,85	-11,32
18.	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	95.714,10	80.359,32	87.536,71	84.016,90	97528,60	97528,6	104,55	111,41	101,90
19.	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	2,13	1,86	1,98	1,36	3,30	3,30	73,12	166,67	154,93
20	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan,	83,57	79,69	81,71	84,42	87,60	87,60	105,94	107,21	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022,00		2021	2022	
1	2	3	4	8	9	13	14,00	15	19=13/8x100	20=14/9x100	21=15/4x100
		air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga									
21.	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	66,73	63,42	65,07	66,90	68,57	68,57	105,49	105,38	100,00
22	Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	51,22	47,72	49,22	46,84	50,73	50,73	98,16	103,07	99,04
23.	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,53	0,55	0,56	0,50	0,5	105,66	90,91	100,00
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	66,22	65,18	65,7	62,39	62,89	62,89	95,72	95,72	94,97
		Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)									
25.	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	90	88	89	84,15	92,16	92,16	95,63	103,55	100,00
26.	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,5	10,08	8,9	10,51	11,38	11,38	104,27	127,87	100,00
27.	Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	83,54	72,93	85,84	42,15	42,15	102,75	57,80	100,00
28.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	90,1	88,01	89,05	96,83	92,16	92,16	110,02	103,49	100,00
29.	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfaslitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	100	89,84	94,78	89,52	100,00	100	99,64	105,51	100,00
30	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,1	2,92	2,96	2,07	2,84	2,84	70,89	95,95	91,61
31	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan	89,87 (A)	83,34 (B)	86,55	81,21 (B)	83,4 (B)	83,4 (B)	97,44	96,36	92,80

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022,00		2021	2022	
1	2	3	4	8	9	13	14,00	15	19=13/8x100	20=14/9x100	21=15/4x100
		dari penyelenggaraan pelayanan publik									
	RATA-RATA IKU SASARAN										101,52
	RATA-RATA TOTAL										111,69

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, 2023 (data diolah)

B. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan.

Secara umum capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Sawahlunto sudah baik, angka harapan hidup di Kota Sawahlunto meningkat dari 70,1 menjadi 70,4 tahun, melebihi target tahun 2022 yang hanya 70,28 tahun. Indeks pembangunan infrastruktur wilayah juga meningkat dari84,42% menjadi 87,60 sedangkan capaian rumah tangga yangmemiliki akses sumber daya air minum layak juga teah mencapai 99,18%, hal ini berarti distribusi air bersih sudah hamper merata di kota ini. Dari idang pertanian, saat ini hasil pertanian sudah mulai meningkat, terlihat dari jumlah hasil panen yang mulai meningkat dari tahun sebelumnya. Pemerintahan desa pun saat ini juga mengalami kemajuan, sebelumnya Kota Sawahlunto hanya memiliki 1 desa dengan kategori mandiri namun di tahun 2022 ada 3 desa yang telah mencapat predikat desa mandiri. Hal yang menjadi perhatian saat ini adalah meningkatknya rasio KDRT dari 0,15 menjadi 0,50, sehingga kedepannya diperlukan program kegiatan yang dapat menanggulangi hal tersebut.

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dapat dilihat secara keseluruhan dalam tabel berikut:

Tabel 2.262
Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pelaksanaan Tahun 2018-2023 RPJMD Kota Sawahlunto

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
											178,49
1	**KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**										**275,61**
1.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,53	2,90	3,24	2,49	3,98	3,98	85,86	122,84	87,86
1.2	Gini Ratio (%)	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,28	0,28	0,280	0,295	0,314	0,31	95,02	112,14	87,86
1.3	PDRB Perkapita (juta/jiwa)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	59,99	62,93	58,62	66,10	66,10	97,72	105,04	99,89
2	**KESEJAHTERAAN SOSIAL**										**81,37**
2.1	Tingkat kemiskinan (%)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,10	2,05	2,38	2,28	2,28	86,67	88,78	86,57
2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (skor)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	74,09	73,17	73,63	72,88	73,73	73,73	99,60	100,14	99,51
2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (skor)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100 %	95,52	95,50	95,51	95,73	belum rilis	belum rilis	100,24	belim rilis	belum rilis
2.4	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	11,30	10,75	11,01	10,32	10,43	10,43	96,00	94,73	92,30
2,5	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) (Tahun)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,20	13,18	13,19	13,18	13,42	13,42	100,00	101,74	100,00
2.6	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,42	70,14	70,28	70,10	70,40	70,40	99,94	100,17	99,97
2.7	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	7,55	6,81	6,38	5,00	5,00	84,50	73,42	77,76
2.8	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	30,00	20,00	25,00	15,00	22,00	22,00	75,00	88,00	73,33
2.9	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	2,65	6,10	3,78	6,10	5,60	5,60	100,00	51,85	-11,32
2.10	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11024,59	10307,58	10632,26	10195,00	10537,00	10537,00	98,91	99,10	95,58
2.11	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota sawahlunto (%)	((Jumlah Zakat Pada BAZ Tahun n - Jumlah zakat pada BAZ tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	1,77	1,23	1,43	60,31	24,47	24,47	4903,25	1711,19	100,00
ASPEK PELAYANAN UMUM											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR											**62,61**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
1	**PENDIDIKAN**										**84,12**
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) (Tahun)	lama sekolah dalam tahun yang diharapakan yang akan dilaksanakan oleh anak pada umur tertentu	13,20	13,19	13,20	13,18	13,42	13,42	99,92	101,67	100,00
1.2	Angka Rata-rata lama sekolah (ARLS) (Tahun)	Jumlah tahun belajar penduduk umur 15 keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal tidak termasuk tahun mengulang	11,30	11,01	11,30	10,32	10,43	10,43	93,73	92,30	92,30
1.3	Persentase lulusan SD Hafiz Alquran (%)	lulusan SD Hafiz Alquran Minimal jus 30 / total lulusan SD x 100 %	30,00	20,00	30,00	15,00	22,00	22,00	75,00	73,33	73,33
1.4	Persentase Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (Literasi) memenuhi Kompetensi Minimum (%)	(Jumlah Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (Literasi) memenuhi Kompetensi Minimum/ Jumlah Siswa yang mengikuti ujian) x 100 %	100,00	100,00	100,00	56,87	58,50	58,50	56,87	58,50	58,50
1.5	Persentase Siswa dengan Nilai Assesment kompetensi (Numerasi) memenuhi Kompetensi Minimum (%)	(Jumlah Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (Numerasi) memenuhi Kompetensi Minimum/ Jumlah Siswa yang mengikuti ujian) x 100 %	100,00	100,00	100,00	64,00	67,17	67,17	64,00	67,17	67,17
1.6	**Angka Partisipasi Kasar**										
1.6.1	APK PAUD (%)	(Jumlah Siswa PAUD /Jumlah seluruh anak yang berusia 3-6 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	76,30	60,00	61,00	83,47	89,62	89,62	139,12	146,92	100,00
1.6.2	APK SD/MI/Paket A (%)	(Jumlah Siswa SD /Jumlah seluruh anak yang berusia 7- 12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	115,40	101,00	102,00	99,94	99,99	99,99	98,95	98,03	86,65
1.6.3	APK SMP/MTs/Paket B (%)	(Jumlah Siswa SMP /Jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	142,05	91,90	91,99	97,67	91,91	91,91	106,28	99,91	64,70
1.7	Angka Partisipasi Murni							0,00			
1.7.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	Angka Partisipasi Murni SD	100,00	100,00	100,00	91,69	90,17	90,17	91,69	90,17	90,17
1.7.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	Angka Partisipasi Murni SMP	100,00	100,00	100,00	91,69	87,77	87,77	91,69	87,77	87,77
1.7.3	Rasio Siswa SD/MI Perkelas (siswa perkelas)	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SD/MI tidak melebihi 32 orang siswa	17.65 : 1	17,50:1	17,55:1	18,30:1	14,25:1	14,25:1	81,43	81,20	80,74
1.7.4	Rasio Siswa SMP/MTS Perkelas (siswa perkelas)	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SMP tidak melebihi 32 orang siswa	22.7 : 1	22,60:1	22,65:1	21,55:1	15,74:1	15,74:1	69,65	69,49	69,34
1.7.5	Persentase sekolah yang berakreditasi A (%)	sekolah yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan	30,00	25,00	29,00	52,00	59,70	59,70	208,00	205,86	100,00
1.7.6	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi (%)	Jumlah Lembaga PAUD/PAUD yang terdaftar di BAN PAUD	24,00	22,00	23,00	70,00	80,71	80,71	318,18	350,91	100,00
1.7.7	Angka kelulusan (%)	(jumlah anak yang mengikuti ujian/ jumlah anak yang lulus)x100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	99,94	99,94	100,00	99,94	99,94
1.8	Rata-rata nilai ujian sekolah SD (Nilai)	Jumlah Nilai Rata-Rata SD/Jumlah SD se-Kota Sawahlunto	78,60	78,20	78,40		84,03	84,03	0,00	107,18	100,00
1.9	Rata-rata Nilai ujian SMP (Nilai)	Jumlah Nilai Rata-Rata SMP/Jumlah SMp se-Kota Sawahlunto	78,60	78,20	78,40		80,58	80,58	0,00	102,78	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
1.10	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam PUD (%)(	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar di satuan PUD / anak usia5-6 Kota Sawahlunto	20,00	18,00	19,00	100,00	84,28	84,28	555,56	443,58	100,00
1.11	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-12 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	Jumlah anak usia7-12 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar sekolah Dasar / anak usia7-12 Kota Sawahlunto	52,00	49,00	50,00	100,00	84,28	84,28	204,08	168,56	100,00
1.12	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia13-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Pertama (%)	Jumlah anak usia13-15 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar Sekolah Menengah Pertama / anak usia13-15 Kota Sawahlunto	35,00	25,00	29,00	100,00	80,00	80,00	400,00	275,86	100,00
1.13	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-18 tahun yang yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (%)	Jumlah anak usia7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar pada kesetaraan sedang belajar sekolah Dasar / anak usia7-18 Kota Sawahlunto	100,00	100,00	100,00	70,64	80,00	80,00	70,64	80,00	80,00
2	**KESEHATAN**										**-92,79**
2.1	Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perobahan moralitas menurut umur	70,42	70,14	70,28	70,10	70,40	70,40	99,94	100,17	99,97
2.2	Jumlah Kasus Kematian Bayi (kasus)	Jumlah Kasus Kematian Bayi	18,00	19,00	18,00	13,00	18,00	18,00	131,58	100,00	100,00
2.3	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan (kasus)	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	0	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	-200,00	-400,00	-400,00
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	jumlah Balita Gizi buruk/Jumlah Bayi di Kota Sawahlunto x 100	7,30	7,80	7,50	0,04	0,07	0,07	199,49	199,07	100,00
2.5	Jumlah kasus Kematian Balita (kasus)	Jumlah kasus Kematian Balita	0	0,00	0,00	16,00	23,00	23,00	-3200,00	-3200,00	-3200,00
2.6	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.8	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk	0,00	0,0015	0,001	0,16	0,0016	0,0016	10333,33	114,29	100,00
2.9	Porsentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terkredetasi (%)	Jumlah RS Rujukan yang terkreditasi/jumlah RS Kota Sawahlunto x100	utama	utama	utama	utama	utama	utama	100,00	100,00	100,00
2.10	Posetase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah ibu hamil di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	71,70	65,35	65,35	71,70	65,35	65,35
2.11	Posetase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)	Jumlah ibu bersalinl yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah ibu bersalin di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	79,90	73,88	73,88	79,90	73,88	73,88
2.12	Posetase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah Bayi baru lahir di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	83,66	77,81	77,81	83,66	77,81	77,81
2.13	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai Standar (%)	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah Balita di Kota Sawahlunto x100	79,00	77,00	78,00	74,60	86,88	86,88	96,88	111,38	100,00
2.14	Porsenase Anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Jumlah anak usia pendidikan dasaryang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlahanak usia Pendidikan dasar di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	68,36	100,00	100,00	68,36	100,00	100,00
2.15	Porsenase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skring Kesehatan sesuai Standar (%)	Jumlah anak usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining	100,00	100,00	100,00	49,83	40,37	40,37	49,83	40,37	40,37

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
		kesehatan sesuai standar /jumlah anak usia 15-59 di Kota Sawahlunto x100									
2.16	Porsenase warga Negara usia 60 tahun mendapatkan skring Kesehatan sesuai Standar (%)	Jumlah warga usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar /jumlah warga usia 60 di Kota Sawahlunto x100	73,00	70,00	71,00	44,50	51,69	51,69	63,57	72,80	70,81
2.17	Porsenase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita Hipertensi di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	7,95	23,69	23,69	7,95	23,69	23,69
2.18	Porsenase penderita DM mendapatkan mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita DM di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	50,59	76,68	76,68	50,59	76,68	76,68
2.19	Porsenase penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar (%)	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah PenderitaODGJ berat di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.20	Porsenase terduga TBC mendapatkan pelayan TBC sesuai Standar (%)	Jumlah penderitaTBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah PenderitaTBC di Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	26,03	41,30	41,30	26,03	41,30	41,30
2.21	Porsenase orang dengan resiko terinveksi HIV mendapatkan pelayan deteksi dini HIV sesuai Standar (%)	Jumlah penderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita HIVdi Kota Sawahlunto x100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,22	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	Jumlah Kasus stunting pada Balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	2,65	6,10	3,78	6,10	5,60	5,60	100,00	51,85	-11,32
3	**PEKERJAAN UMUM**										**91,46**
3.1	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	(Panjang Jembatan dalam kondisi mantap dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	79,00	78,00	78,50	92,23	94,66	94,66	118,24	120,59	100,00
3.2	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	52,34	46,75	50,37	44,21	44,91	44,91	94,57	89,16	85,80
3.3	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai standar: jumlah bangunan pemerintah yang ada kali 100 %	80,28	66,98	64,00	81,71	83,06	83,06	121,99	129,78	100,00
3.4	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen	50,35	48,35	49,35	45,95	46,87	46,87	95,04	94,97	93,09
3.5	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang (%)	(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan Penataan Ruang x 100%	55,55	11,11	22,22	11,11	17,09	17,09	100,00	76,91	30,77
3.6	Persentasi RT yang memilik akses terhadap layanan sanitasi layak (%) (SDGs)	Persentasi air limbah yang ditangani (%)	91,00	89,00	90,00	85,45	85,10	85,10	96,01	94,56	93,52
3.7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan IMB sesuai peruntukannya/jumlah IMB yang berlaku x 100 %	98,30	96,30	97,70	62,32	85,32	85,32	64,71	87,33	86,80
3.8	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/jumlah panjang jalan x 100 %	72,21	68,75	70,01	69,43	73,62	73,62	100,99	105,16	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
3.9	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah	Jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan,air minum,sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	79,69	81,71	84,42	85,57	85,57	105,94	104,72	100,00
3.10	Persentase infra struktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah persentase kondisi jalan ,jembatan,irigasi,gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik/5	66,73	63,42	65,07	66,90	69,40	69,40	105,49	106,65	100,00
3.11	Persentase luas sawah yang terairi dengan irigasi (%)	(Luas lahan sawah yang terairi dari irigasi/total luas sawah) x 100 %	51,22	47,72	49,22	46,84	50,73	50,73	98,16	103,07	99,04
3.12	Persentase kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	Perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan ruang	90,00	88,00	89,00	84,15	84,15	84,15	95,63	94,55	100,00
3.13	Persentase RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100 %	91,00	89,00	90,00	93,23	98,00	98,00	104,75	108,89	100,00
4	**PERUMAHAN RAKYAT**										**96,23**
4.1	Penyedian dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%)	Jumlah rumah lorban bencana yang ditangani / Jumlah rencana yang akan dibangun x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Fasilitasi pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasiprogram pemerintah kabupaten/kota (%)	Rumah tangga penerima fasilitas pengendalian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni/jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang di kabupaten/kota yang ditangani (%)	Luas Kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha) / luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha x100 %	90,00	85,00	87,00	75,00	79,00	79,00	88,24	90,80	87,78
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (kumuh tidak layak huni) (%)	Jumlah unit RTLH / jumlah total unit rumah x 100 %	7,50	10,08	8,90	10,08	1,15	1,15	100,00	187,08	100,00
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	85,00	75,00	80,00	75,00	80,00	80,00	100,00	100,00	94,12
4.6	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH / Jumlah rumah x 100 %	7,50	10,08	8,90	10,51	11,38	11,38	95,73	72,13	91,72
4.7	Luas Pengurangan kawasan kumuh (hektar) (Sdgs) (Ha)	Luas kawasan kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	83,54	72,93	49,37	42,15	42,15	140,90	142,20	100,00
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										**100,02**
5.1	Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	0,14	0,05	0,05	-3300,00	53,51	53,51	-7173913,04	109204,08	100,00
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.3	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	(Jumlah pengaduan yang ditagani/ jumlah pendaguan pelanggaran yang masuk) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
5.4	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan (%)	(Jumlah kasus diselesaikan/jumlah laporan kasus masuk) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.5	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda (%)	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.6	Jumlah Linmas per desa/kelurahan (orang)	Jumlah Linmas per desa/kelurahan	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	100,00	100,00	100,00
5.7	Angka kriminalitas (%)	(jumlah kasus kriminal/jumlah penduduk) x 100%	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	63,27	82,50	94,29
5.8	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto (%)	(Jumlah kasus kebakaran yang ditangani/jumlah kasus kebakaran) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.10	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	25,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	75,00	75,00	60,00
5.11	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (%)	(Jumlah aparatur pemadam yang mempunyai sertifikat keahlian/jumlah aparatur pemadam) x 100%	60,00	40,00	50,00	33,00	35,00	35,00	82,50	70,00	58,33
5.12	Indeks Ketahanan Daerah	Upaya untuk mengukur kapsitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,53	0,55	0,56	0,50	0,50	105,66	90,91	87,72
5.13	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	(Jumlah Masyarakat yang menerima informasi kebencanaan /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.14	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	(Jumlah Masyarakat yang menerima layanan kebencanaan /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.15	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	(Jumlah Masyarakat yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.16	Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana (%)	(Jumlah Fassum yang tertangani/Jumlah Fasum yang terdampak) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	**SOSIAL**										**96,64**
6.1	Angka Kemiskinan (%)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,10	2,05	2,38	2,28	2,28	86,67	88,78	86,57
6.2	Persentase TKSK yang berpatispasi dalam penanganan PMKS (%)	(Jumlah TKSK yang berpatispasi dalam penanganan PMKS/ Jumlah TKSK) x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
6.3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti : populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%	100,00	89,84	94,78	89,52	100,00	100,00	99,64	100,00	100,00
6.4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun anggaran : populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR											**90,13**
7	**TENAGA KERJA**										**103,45**
7.1	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	7,55	6,81	6,38	5,00	5,00	100,00	100,00	100,00
7.2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dunia usaha formal	25,00	10,00	15,00	29,00	34,00	63,00	100,00	226,67	100,00
7.3	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha (orang)	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha non formal	35,00	28,00	30,00	31,00	0,00	31,00	100,00	0,00	88,57
7.4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100%	90,00	80,00	85,00	100,00	67,00	67,00	125,00	78,82	74,44
7.5	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	25,00	15,00	20,00	65,63	76,56	76,56	100,00	100,00	100,00
7.6	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan / jumlah tenaga kerja x 100%	98,77	93,14	95,12	93,74	91,16	91,16	100,64	95,84	92,30
7.7	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / jumlah perusahaan x 100%	82,56	73,75	77,38	77,27	86,21	86,21	100,00	100,00	100,00
7.8	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Keerja dalam wilayah kebupaten/kota) (%)	Jumlah pencaker yang ditempatkan / jumlah pencaker terdaftar x 100%	7,10	3,97	4,97	9,67	12,23	12,23	100,00	246,08	172,25
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**										**89,10**
8.1	Indeks Pemberdayaan gender / IDG (IKU OPD) (%)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	95,52	95,50	95,51	65,48	65,48	65,48	68,57	68,56	68,55
8.2	Persentase Penanganan dan penyelesaian pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak (IKU OPD) (%)	Jumlah penanganan & penyelesaian pengaduan kasus kekerasan perempuan & anak/ Jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan & anak x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.3	Persentase PKK Aktif (%)	Jumlah PKK aktif/jumlah total PKK x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.4	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	Jumlah anggota DRPD perempuan/ jumlah total anggota DPRD x 100%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
8.5	Persentase Kelurahan ramah anak (%)	Jumlah kelurahan ramah anak/ jumlah kelurahan x 100%	100,00	100,00	100,00	51,35	50,00	50,00	51,35	50,00	50,00
8.6	Total fertility rate	Jumlah rata-rata kelahiran anak per seorang wanita sepanjang usia produktifnya	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	100,00	100,00	100,00
8.7	Persentase ARG (anggaran responsif gender) pada belanja langsung APBD (%)	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD : jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100%	85,56	85,56	85,60	3,40	4,40	4,40	3,97	5,14	5,14
8.8	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 th) korban kekerasan yg ditangani instansi tingkat kab/kota yg didampingi : jumlah anak (penduduk usia kurang 18 th) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	**PANGAN**										**90,90**
9.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	72,33	68,91	70,56	68,91	73,85	73,85	100,00	104,66	100,00
9.2	Konsumsi keragaman pangan										
9.2.1	padi-padian (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan padi perkapita perhari	943,00	944,00	942,50	944,00	995,20	1939,20	100,00	100,00	100,00
9.2.2	Umbi-umbian (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan umbi-umbian perkapita perhari	113,20	32,20	113,10	32,20	62,60	94,80	100,00	100,00	100,00
9.2.3	Pangan Hewani (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan pangan hewani perkapita perhari	226,30	236,30	226,20	236,30	247,40	483,70	100,00	100,00	100,00
9.2.4	Minyak dan Lemak (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan minyak dan lemak perkapita perhari	250,00	348,30	275,00	343,00	314,30	657,30	98,48	100,00	100,00
9.2.5	Buah/Biji Berminyak (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan buah/bij berminyak perkapita perhari	56,60	39,90	56,60	39,90	34,30	74,20	100,00	60,60	100,00
9.2.6	Kacang-kacangan (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan kacang-kacangan perkapita perhari	94,30	71,80	94,30	71,80	53,30	125,10	100,00	56,52	100,00
9.2.7	Gula (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan gula perkapita perhari	94,30	21,30	94,30	21,30	25,40	46,70	100,00	26,94	49,52
9.2.8	Sayur dan buah (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan sayur dan buah perkapita perhari	113,20	106,70	113,20	106,70	104,40	211,10	100,00	92,23	100,00
9.2.9	lain-lain (kkal/kapita/hari)	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan lainnya perkapita perhari	56,60	9,50	56,60	9,50	11,30	20,80	100,00	19,96	36,75
9.2.10	Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi (%)	(Jumlah Keamanan Pangan Segar yang dikonsumsi/Jumlah Pangan Segar) x 100 %	91,00	90,14	90,30	95,14	97,11	97,11	100,00	100,00	100,00
9.2.11	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	11584,46	165,00	11475,89	10515,77	11172,01	11172,01	6373,19	97,35	96,44
9.2.12	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (skor)	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya	86,00	84,00	85,00	84,50	85,10	85,10	100,00	100,00	98,95
10	**PERTANAHAN**										**100,00**
10,6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	Jumlah Kasus pertanahan yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah kasus pertanahan x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10,7	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)	(Jumlah usulan ganti rugi tanah yang ditetapkan/ usulan ganti rugi dari OPD) x 100%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
11	**LINGKUNGAN HIDUP**										**97,91**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKL)	66,22	65,18	65,70	62,39	62,89	62,89	95,72	95,72	94,97
11.2	Terlakasanaya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%)	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	77,00	75,10	76,00	75,00	76,21	76,21	99,87	100,28	98,97
11.4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (%)	Gambaran indikasi standar kinerja pengelolaan sampah dinilai dari indeks pengelolaan/pemerintahan(Govarnance) dan indeks efektifitasdan efisiensi terkait pengelolaan sampah	68,27	67,95	68,11	0,00	68,12	68,12	0,00	100,00	99,78
12	**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**										**99,04**
12.1	Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	(Jumlah keluarga yang tertib administrasi kependudukan / jumlah KK) x 100 %	70,00	55,00	65,00	38,53	65,00	65,00	70,05	100,00	92,86
12.2	Cakupan KTP (%)	Banyaknya kepemilikan KTP	99,00	98,00	98,02	97,87	97,87	97,87	99,87	99,85	98,86
12.3	Cakupan Akte kelahiran (%)	Banyaknya kepemilikan akte kelahiran	62,00	60,00	62,00	67,32	99,23	99,23	100,00	100,00	100,00
12.4	Cakupan KK (%)	Banyaknya kepemilikan KK	100,00	100,00	100,00	99,52	99,52	99,52	99,52	99,52	99,52
12.5	Cakupan akte kematian (%)	Banyaknya kepemilikan akte kematian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.6	Validitas database kependudukan (%)	Pelaksanaan validasi data kependudukan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.7	Perekaman KTP elektronik (%)	Jumlah penduduk berumur 17 th keatas yg memiliki KTP : jumlah penduduk 17 th keatas x 100%	99,20	99,00	99,00	97,49	98,65	98,65	98,47	99,65	99,45
12.8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 hari yg sudah memiliki KIA : Jumlah anak usia 0-17 th x 100%	66,00	63,00	65,00	63,87	69,66	69,66	100,00	100,00	100,00
12.9	Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir) (%)	Jumlah anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir : Jumlah anak usia 0-18 th x 100%	99,50	99,00	99,20	98,73	99,23	99,23	99,73	100,00	99,73
12.10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	Jumlah OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama : Jumlah OPD x 100%	50,00	50,00	50,00	83,33	83,33	83,33	100,00	100,00	100,00
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**										**100,00**
13.1	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	Jumlah desa tertinggal yg memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun : Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
13.2	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun : Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x100%	3,70	3,70	3,70	85,31	140,00	140,00	100,00	100,00	100,00
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**										**93,51**
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total) (%)	Persentase jumlah rata-rata anak yang dilahirkan wanita selama usia subur	2,22	2,29	2,25	2,00	2,02	2,02	87,34	89,78	90,99
14.2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/mCPR) (%)	(Jumlah Peserta KB Aktif Modern/Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100 %	69,21	67,78	68,55	71,92	70,46	70,46	100,00	100,00	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
14.3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100 %	13,40	15,97	14,60	10,87	12,00	12,00	68,07	82,19	89,55
15	**PERHUBUNGAN**										**97,62**
15.1	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang (unit)	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	100,00
15.2	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,18	0,18	0,18	0,56	0,56	0,56	100,00	100,00	100,00
15.3	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (%)	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100,00	100,00	100,00
15.4	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.5	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan (%)	Jumlah kendaraan laik jalan/jumlah kendaraan	70,00	40,00	60,00	40,00	60,00	60,00	100,00	100,00	85,71
15.6	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n- tahun n-1/ jumlah angka kecelakaan tahun n-1 x 100%	25,00	35,00	30,00	35,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**										**83,69**
16.1	Persentasse OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)	Jumlah OPD yang sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasiskan TIK / Jumlah OPD) x 100 %	95,00	70,00	85,00	60,00	65,00	65,00	85,71	76,47	68,42
16.2	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	Jumlah Aplikasi Layanan Publik yangterintegrasidalamjaringan Kota/ Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100%	95,00	75,00	85,00	50,00	40,00	40,00	66,67	47,06	42,11
16.3	Persentase organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (%)	jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo/ jumlah OPD x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,10	2,92	2,96	2,07	2,84	2,84	70,89	95,95	91,61
16.4	Persentase layanan publik yang telah dilaksanakan secara online dan terintegrasi (%)	jumlah layanan publik yang diselenggarkan secara online/ jumlah layanan publik x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota (%)	(Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota/Jumlah Penduduk) x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**										**35,19**
17.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ jumlah seluruh koperasi) x 100%	80,00	78,00	79,00	10,29	8,78	8,78	13,19	11,11	10,98
17.2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi Wirausaha (%)	(jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha/jumlah usaha mikro keseluruhan) x 100%	4,09	2,03	3,07	36,17	0,40	0,40	1781,77	13,03	9,78
17.3	Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015) (%)	(Jumlah Koperasi sehat/ jumlah total koperasi) x 100%	26,00	22,00	24,00	9,37	29,17	29,17	42,59	121,54	100,00
17.4	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	(Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya/Jumlah UMKM) x 100%	1,50	0,80	0,90	0,40	0,30	0,30	50,00	33,33	20,00
18	**PENANAMAN MODAL**										**99,12**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
18.1	Persentase Kenaikan jumlah nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	83,77	55,79	56,38	62,08	145,67	145,67	100,00	100,00	100,00
18.2	Persentase Kenaikan jumlah investor (%)	(jumlah investor tahun n dikurangi jumlah investor tahun n-1) / jumlah investor tahun n-1 x 100%	25,00	-9,09	20,00	509,09	49,25	49,25	100,00	100,00	100,00
18.3	Nilai Realisasi Investasi (milyar)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	41,00	36,00	36,00	45,00	112593,00	112593,00	100,00	100,00	100,00
18.4	Persentase masyarakat yang menggunakan aplikasi (%)	(Jumlah Masyarakat yang mengurus perizinan melalui Aplikasui x 100%/Jumlah Masyarakat yang mengurus perizinan)	100,00	95,00	100,00	85,00	100,00	100,00	89,47	100,00	100,00
18.5	Persentase layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP (%)	(Jumlah layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP x 100 %/ Jumlah Layanan PTSP)	100,00	98,00	100,00	95,00	100,00	100,00	96,94	100,00	100,00
18.6	Nilai Survey kepuasaan masyarakat (Nilai)	Nilai Survey kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	95,00	86,29	90,00	88,29	89,15	89,15	100,00	99,06	93,84
18.7	Persentase penurunan pengaduan masyarakat (%)	(Jumlah Pengaduan Tahun (n-1)-Jumlah Pengaduan n)/Jumlah Pengaduan Tahun n) x 100 %	20,00	40,00	30,00	50,00	33,30	33,30	100,00	100,00	100,00
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**										**41,64**
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota/jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota X 100%	17,00	16,00	16,00	16,00	4,13	4,13	100,00	25,81	24,29
19.2	Peningkatan prestasi olahraga (Medali)	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	160,00	148,00	153,00	148,00	177,00	177,00	100,00	100,00	100,00
19.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi/jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota X 100%	1,25	1,00	1,10	1,00	0,01	0,01	100,00	0,73	0,64
20	**STATISTIK**										**100,00**
20.1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia (	Ketersediaan dokumen statistik daerah dan OPD	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	100,00
20.2	Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (dokumen)	Ketersediaan data statistik daerah dan OPD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
20.3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah/ jumlah OPD x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah/ jumlah OPD x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**PERSANDIAN**										**100,00**
21.1	Terselenggaranya pengamanan informasi Pemda (bulan)	Pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
21.2	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	**KEBUDAYAAN**										**96,73**
22,1	Terelestarikannya cagar budaya (%)	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan/Jumlah cagar budaya yang terdata X 100%	63,92	57,18	60,55	57,10	60,50	60,50	99,86	99,92	94,65

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
22.2	Persentase Komunitas Budaya yang aktif (%)	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	88,00	76,00	84,00	76,00	88,71	88,71	100,00	100,00	100,00
22.3	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya (%)	Jumlah kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya/ Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100	69,44	40,28	62,50	69,44	88,71	88,71	100,00	100,00	100,00
22.4	Persentase Penampilan kelompok seni budaya (%)	Jumlah Penampilan Kelompok Seni Budaya / Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100	55,56	27,78	37,50	55,56	64,51	64,51	100,00	100,00	100,00
22.5	Persentase Budaya Benda yang Lestari (%)	Jumlah Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah Cagar Budaya x 100	70,56	66,37	68,46	57,10	60,50	60,50	86,03	88,37	85,74
22.6	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	22504,00	18598,00	20458,00	15937,00	34660,00	34660,00	85,69	100,00	100,00
23	**PERPUSTAKAAN**										**95,70**
23.1	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	(Jumlah Pengunjung Tahun n - jumlah pengunjung tahun n-1)*100%/Jumlah Pengunjung Tahun n-1	91,65	89,64	89,47	12,90	84,57	84,57	14,39	94,52	92,27
23.2	Persentase perpustakaan aktif (%)	Jumlah pustaka aktif/ jumlah total pustaka x 100%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
23.3	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat (%)	Nilai kebiasaan masyarakat memperoleh pengetahuan /informasi	53,00	51,00	52,00	-	60,10	60,10	-	100,00	100,00
23.4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (%)	Nilai kondisi semua jenis perpustakaan	80,00	75,00	77,00	-	72,43	72,43	-	94,06	90,54
24	**KEARSIPAN**										**98,67**
24.1	Persentase peningkatan arsip statis yang diakuisisi (%)	(Jumlah arsip statis yang diakuisisi/Jumlah Arsip Statis) x 100 %	75,00	65,00	70,00	-	70,00	70,00	-	100,00	93,33
24.2	Persentase OPD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%)	Jumlah OPD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku/ jumlah total OPD & kelurahan x 100%	65,00	50,00	65,00	11,50	65,00	65,00	23,00	100,00	100,00
24.3	Tingkat ketersediaan arsip sbg bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah & pertanggungjawaban nasional (pasal 40 & pasal 59 UU no 43/2009 ttg kearsipan) (%)	T=(a+i+s+j)/4 T = tingkat kearsipan, a = % arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip, i = % arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, s = % arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = % jumlah arsip	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00
24.4	Tingkat keberadaan & keutuhan arsip sbg bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa & bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat (%)	T = (m+b+g+a+c+i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan & penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD Prov yg digabung dan/atau dibubarkan & pemekaran daerah kab/kota dg NSPK, a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis & arsip hasil alih media dengan NSPK, c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan	50,46	50,30	50,42	-	50,46	50,46	-	100,00	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
		izin penggunaan arsip yg bersifat tertutup dg NSPK									
24.5	Indeks Kearsipan (ANRI) (Nilai)	Jumlah berkas arsip yg berhasil di buat daftar & tersimpan di depo arsip	A	B	B+	-	B+	B+	-	B+	100,00
URUSAN PILIHAN											90,58
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**84,16**
25.1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) (ton)	jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	622,50	207,00	207,50	189,79	235,55	235,55	91,69	100,00	68,33
25.2	Persentase Peningkatan Produksi Ikan (%)	(jumlah produksi ikan tahun ini-jumlah produksi ikan tahun lalu/ jumlah produksi ikan tahun lalu) x 100%	0,97	0,30	0,50	0,05	7,50	7,50	15,33	100,00	100,00
26	**PARIWISATA**										**112,66**
26.1	PDRB sektor Pariwisata (Juta Rupiah)	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	95714,10	80359,32	87536,71	84016,90	97528,60	97528,60	104,55	111,41	101,90
26.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,28	2,12	2,19	2,18	2,22	2,22	102,83	101,37	97,33
26.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,13	1,86	1,98	1,86	3,30	3,30	100,00	100,00	100,00
26.4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaaan (%)	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 / jumlah wisatawan tahun n-1 X 100%	3,00	2,00	2,50	2,00	385,70	385,70	100,00	100,00	100,00
26.5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 / jumlah wisatawan tahun n-1 X 100%	15,38	14,59	18,18	14,59	59,80	59,80	100,00	100,00	100,00
26.6	Tingkat hunian akomodasi (%)	Jumlah kamar yang terjual / jumlah kamar yang tersedia X 100%	25,81	19,27	22,36	19,27	30,29	30,29	100,00	100,00	100,00
26.7	Persentase pengunjung yang mengantakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	Persepsi kepuasan pengunjung terhadap objek wisata	90,00	75,00	80,00	75,00	80,00	80,00	100,00	100,00	88,89
26.8	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(jumlah objek wisata unggulan tipe A / total jumlah objek wisata yang ada) x 100 %	61,76	50,00	55,88	50,00	50,00	50,00	100,00	89,48	80,96
26.9	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (Unit) (%)	Jumlah Industri pariwisata dengan omset minimal 250 juta setahun / Jumlah total industri pariwisata) x 100 %	66,85	64,26	65,54	64,26	34,00	34,00	100,00	51,88	50,86
26.10	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)	150000,00	110000,00	130000,00	88248,00	141020,00	141020,00	80,23	100,00	94,01
26.11	Persentase kelembagaan kepariwisataan yang profesional (%)	(Jumlah Kelembagaan pariwisata yang memiliki perizinan / total kelembagaan pariwisata yang ada) x 100 %	16,87	15,30	16,07	15,30	51,00	51,00	100,00	100,00	100,00
27	**PERTANIAN**										**93,30**
27.1	PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (juta rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian dan perikanan	344355,30	329730,34	336849,19	345211,69	345211,69	345211,69	100,00	100,00	100,00
27.2	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	(Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian dan perikanan / Nilai PDRB ADHB total) x 100%	8,21	8,70	8,44	8,96	8,96	8,96	100,00	100,00	100,00
27.3	Produksi padi (ton)	jumlah produksi padi	46040,00	14700,00	15593,00	16691,72	17733,35	34425,07	100,00	100,00	74,77
27.4	Produksi Kakao (ton)	jumlah produksi kakao	1677,00	540,00	568,00	572,44	588,80	1161,24	100,00	100,00	69,25
27.5	Produksi karet (ton)	jumlah produksi karet	4719,00	1260,00	1729,00	2223,86	2230,91	4454,77	100,00	100,00	94,40
27.6	Jumlah produksi ikan konsumsi	jumlah produksi ikan	622,50	207,00	207,50	215,92	232,12	448,04	100,00	100,00	72,53

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
27.7	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	(jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun/luas panen) x 100%	5,19	4,85	5,18	5,56	5,95	5,95	100,00	100,00	100,00
27.8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan(t)- jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) / jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	10,00	20,00	10,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
27.9	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi (%)	(Jumlah produksi tanaman padi tahun ini -jumlah produksi tanaman padi tahun lalu/jumlah produksi tahun lalu) x 100 %	0,97	0,30	0,45	-6,61	6,24	6,24	-2203,33	100,00	100,00
27.10	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kakao (%)	(Jumlah produksi tanaman kakao tahun ini -jumlah produksi tanaman kakao tahun lalu/jumlah produksi tanaman kakao tahun lalu) x 100 %	0,17	0,15	0,17	1,11	2,86	2,86	100,00	100,00	100,00
27.11	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Karet (%)	(Jumlah produksi tanaman karet tahun ini -jumlah produksi tanaman karet tahun lalu/jumlah produksi tanaman karet tahun lalu) x 100 %	0,06	0,04	0,05	10,48	0,32	0,32	100,00	100,00	100,00
27.12	Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi (%)	(Jumlah produksi Daging Sapi tahun ini -jumlah produksi Daging Sapi tahun lalu/jumlah produksi Daging sapi tahun lalu) x 100 %	1,18	0,32	0,90	-4,45	6,09	6,09	-1390,63	100,00	100,00
27.13	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ayam (%)	(Jumlah produksi Daging Ayam tahun ini -jumlah produksi Daging Ayam tahun lalu/jumlah produksi Daging Ayam tahun lalu) x 100 %	7,14	5,50	7,70	33,30	13,47	13,47	100,00	100,00	100,00
27.14	Indeks Penanaman (IP)	Perbandingan antara julan luas pertanaman dalam pola tanam setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami	2,10	2,08	2,09	2,12	2,00	2,00	100,00	95,69	95,24
28	**PERDAGANGAN**										**73,35**
28.1	PDRB sektor perdagangan (juta rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan	615823,20	556832,20	582684,76	564865,95	560862,45	560862,45	100,00	96,25	91,08
28.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB(2010=100) (%)	(Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan / Nilai PDRB ADHB total) x 100%	14,67	14,70	14,61	14,67	14,86	14,86	100,00	100,00	100,00
28.3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan) (%)	(jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan/jumlah pelaku usaha diwilayah kab/kota) x 100%	30,00	5,00	15,00	10,00	42,70	42,70	100,00	100,00	100,00
28.4	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	realisasi/RDKK x 100%	80,00	80,00	80,00	98,00	67,00	67,00	100,00	83,75	83,75
28.5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan/jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota x 100%	70,00	70,00	70,00	37,70	0,00	0,00	53,86	0,00	-
28.6	jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto (rupiah)	jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	77511,99	25837,33	25837,33	25048,00	25563,00	50611,00	96,95	98,94	65,29
29	**PERINDUSTRIAN**										**89,40**
29.1	Nilai PDRB sektor Industri (juta rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan	418106,23	401862,74	409417,45	432174,39	432174,39	432174,39	100,00	100,00	100,00
29.2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB(2010=100) (%)	(Nilai PDRB ADHB sektor Industri / Nilai PDRB ADHB total) x 100%	9,96	10,61	10,26	11,22	11,22	11,22	100,00	100,00	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
29.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah diKabupaten/Kota (%)	(jumlah industri kecil dan menengah tahun n jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) / Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100%	16,04	12,06	14,38	10,62	4,46	15,08	88,06	31,02	94,01
29,4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP/Jumlah Seluruh Indikator Pembangunan Industri yang ditetapkan dalam RPIP	70,00	0,00	50,00	0,00	78,00	78,00	-	100,00	100,00
29.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait (%)	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait (%)	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-
29.6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota (%)	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29.7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	100,00	100,00	100,00						
		Informasi produksi dan kapasitas produksi	100,00	100,00	100,00						
		Informasi bahan baku dan bahan penolong	100,00	100,00	100,00						
		informasi bahan bakar/energy	100,00	100,00	100,00						
		informasi tenaga kerja	100,00	100,00	100,00						
		informasi investasi	100,00	100,00	100,00						
29.8	Persentase Produk IKM yang mempunyai standar mutu (%)	(Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu/jumlah produk IKM)x 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	100,00	100,00	100,00
29.9	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri (%)	(jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri/jumlah IKM)x 100%	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,03	35,00	100,00	100,00
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											**99,69**
30	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**										**77,23**
30.1	Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi)	Peringkat PPD tingkat Provinsi	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	133,33	133,33	100,00
30.2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan (%)	Jumlah Program Pada RKPD x 100 % /Jumlah Program pada RPJMD	100,00	100,00	100,00	99,00	97,10	97,10	99,00	97,10	97,10
30.3	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras (%)	Jumlah OPD Yang memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras x 100 %/ Jumlah OPD	100,00	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00
30.4	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan (%)	(Jumlah Usulan Desa/Kel yang disampaikan/Jumlah Usulan yang diakomodir)x100	30,00	28,30	29,00	28,30	9,94	9,94	100,00	34,28	33,13
30.5	Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang (%)	(Jumlah Peserta yang hadir/Jumlah Undangan)x100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30.6	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi (level)	Penilaian SPIP Terintegrasi Kota Sawahlunto	Level 3	-	Level 3 (2.5)	-	Level 3	Level 3	-	100,00	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
30.7	Persentase OPD SPIP RTP Level 3 (%)	(Jumlah OPD SPIP RTP level 3/OPD SPIP level 2) x 100	72,00	52,00	60,00	-	-	-	-	-	-
30.8	Persentase OPD Nilai SAKIP A (%)	Penilaian terhadap SAKIP OPD	72.83 (BB)	64.57 (B)	68.22 (B)	-		0,00	100,00	-	-
30.9	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Tingkat Kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil quality Assurance (QA) yang dikeluarkan BPKP	Level 4	Level 2	Level 3	-	Level 2	Level 2	-	70,00	50,00
30.10	Opini laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00
30.11	Penetapan Perda APBD tepat waktu (waktu)	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00
30.12	Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%	12,68	4,04	4,19	-0,14	0,28	0,28	-3,47	6,68	2,21
30.13	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	(realisasi belanja/anggaran belanja)x100%	95,00	90,00	92,00	92,11	94,47	94,47	100,00	100,00	99,44
30.14	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja (%)	(Total Belanja Pegawai/Total Belanja)x100%	49,99	49,99	49,99	96,21	40,19	40,19	100,00	80,40	80,40
30.15	Persentase belanja modal terhadap total belanja (%)	(Total Belanja Modal/Total Belanja)x100%	20,00	20,00	20,00	13,16	18,07	18,07	65,80	90,35	90,35
30.16	Laporan keuangan berbasis akrual	Laporan keuangan berbasis akrual	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	100,00	100,00	100,00
30.17	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah (%)	(Total PAD/Total Pendapatan)x100%	13,65	11,38	12,51	8,44	10,62	10,62	74,17	84,89	77,80
30.18	Persentase realisasi Penerimaan Pajak Daerah (%)	(Realisasi Penerimaan Pajak daerah/Target Penerimaan Pajak)x100%	100,00	100,00	100,00	97,71	101,80	101,80	97,71	100,00	100,00
30.19	Persentase realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (%)	(Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah/Target Penerimaan Retribusi Daerah)x100%	93,00	91,00	92,00	83,54	76,35	76,35	91,80	82,99	82,10
30.20	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00
30.21	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan / Jumlah APBD x 100%	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	100,00	100,00	100,00
30.22	Rasio PAD	Jumlah PAD / Jumlah APBD Non Migas x 100%	2,34	1,86	2,18	1,95	1,95	1,95	100,00	89,45	83,33
30.23	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures / jumlah belanja APBD x 100%	60,02	60,02	60,02	10,15	10,15	10,15	16,91	16,91	16,91
30.24	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi / total belanja APBD dikurangi satu x 100%	95,00	90,00	92,00	91,10	91,10	91,10	100,00	99,02	95,89
30.25	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi / total PAD dalam APBD dikurangi satu x 100%	99,00	99,00	99,00	100,94	96,00	96,00	100,00	96,97	96,97
30.26	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA / total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100%	4,50	4,50	4,50	6,37	0,71	0,71	100,00	15,78	15,78
30.27	Indeks Pengelolaan Keuangan daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	80,00	75,00	77,00	39,30	58,23	58,23	52,40	75,62	72,78
30.28	Apakah ada daftar asset tetap?	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	ya	ya	ya	100,00	100,00	100,00
30.29	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	ya	ya	ya	100,00	100,00	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
30.30	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	ya	ya	ya	100,00	100,00	100,00
30.31	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	ya	ya	ya	100,00	100,00	100,00
32	**KEPEGAWAIAN**										**91,39**
32.1	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi (%)	(Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Ijazah/Sertifikat Terakhir/Jumlah Jabatan) x 100 %	95,00	93,00	94,00	93,00	94,00	94,00	100,00	100,00	98,95
32.2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi (%)	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi/Jumlah Pegawai yang membutuhkan sertifikat diklat teknis kompetensi) x 100 %	100,00	100,00	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
32.3	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat struktural peningkatan kompetensi (%)	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Struktural Peningkatan kompetensi/Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural) x 100 %	100,00	100,00	100,00	76,00	80,00	80,00	76,00	80,00	80,00
32.4	Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi (%)	(Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi/Jumlah Pegawai yang mengikti Tugas dan Izin Belajar) x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.5	Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik (%)	Jumlah aparatur dg nilai SKP min baik/jumlah aparatur yg memiliki nilai SKP	100,00	100,00	100,00	100,00	99,95	99,95	100,00	99,95	99,95
32.6	Persentase penanganan kasus kepegawaian (%)	Jumlah kasus yg ditangani/ jumlah kasusx 100%	100,00	100,00	100,00	80,00	130,00	130,00	80,00	100,00	100,00
32.7	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	Ukuran Kepuasan terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.8	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	75,00	66,00	70,00	63,00	63,00	63,00	95,45	90,00	84,00
32.9	Indeks Merit Sistem ASN	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah	0,83	0,75	0,78	103,50	157,00	157,00	100,00	100,00	100,00
32.10	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah	2,51	2,51	2,51	2,55	2,95	2,95	100,00	100,00	100,00
32.11	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,03	0,03	0,03	0,19	0,25	0,25	100,00	100,00	100,00
32.12	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,80	0,70	0,75	0,34	0,39	0,39	48,57	52,00	48,75
33	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**										**100,00**
33.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%)	(Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite Pemda/Realisasi belanja untuk unit pelayanan	97,00	95,00	96,00	95,00	100,00	100,00	100,00	104,17	100,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Target di Akhir Periode RPJMD	Target Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022	Tingkat Capaian		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD sampai Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5x100	11=8/6x100	12=9/4x100
		dapat diakses diwebsite pemda)x100%									
33.2	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah (%)	(Jumlah Dokumen yang dipublikasi diwebsite pemda/Total Jumlah dokumen yang dirinci)x100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	**KESEKRETARIATAN DAERAH**										**177,82**
34.1	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	BB (72,83)	B (64,57)	B (68,22)	B (61,61)	B(61,92)	B(61,92)	95,42	n/a	85,02
34.2	Peringkat LPPD	Penilaian kemendagri terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	SB	SB	SB	SB	belum rilis	belum rilis	100,00	n/a	belum rilis
34.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	89.87 (A)	83,34 (B)	86.55 (B)	81,21 (B)	83,40	83,40	97,44	96,36	92,80
31.1	**PENGADAAN**										**51,12**
	Persentase Jumlah Total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	(Jumlah Kontrak Infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n/jumlah kontrak keseluruhan tahun n) x 100 %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.1	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif	60,00	55,00	57,00	98,24	30,00	30,00	100,00	52,63	50,00
31.2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	(Jumlah Nilai Belanja Langsung yang melalui pengadaan/Total belanja langsung)x100%	65,00	60,00	63,00	62,40	48,40	48,40	100,00	76,83	74,46
31.3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)	Pengukuran pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi & kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ	100,00	100,00	100,00	60,00	80,00	80,00	60,00	80,00	80,00
35	**KESEKRETARIATAN DPRD**										**100,00**
35.1	Jumlah perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan	Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										**100,00**
36.2	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	100,00	100,00	100,00
37	**KEWILAYAHAN**										**100,00**
37.1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	(Jumlah LPM,PKK, RT/RW yang Aktif/Jumlah Total LPM,PKK, RT/RW) x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	RATA-RATA CAPAIAN IKD										**104,30**

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah : **"DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA"**
Untuk lebih jelasnya makna atas kata-kata pilihan dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

KEBERSAMAAN dalam Visi tersebut adalah, menghadirkan semangat kebersamaan dalam membangun Kota disegala Bidang terutama kebersamaan antara kekuatan politik, Pemerintah, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang. Karena dengan kebersamaan ini Insya Allah segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membangun Kota Sawahlunto yang lebih maju.

KOTA WISATA adalah mewujudkan Visi Kota Sawahlunto sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu " SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA " serta mengkaji kemungkinan terbaik yang perlu dilakukan sehingga arah pembangunan kota sesuai dengan VISI yang sudah disepakati seluruh stakeholders kota.

KREATIF maksudnya Pariwisata adalah persaingan pasar yang kompetitif dan dinamis atau berubah setiap waktu, kalau tidak ada wahana yang baru atau kreasi baru yang menarik, orang tidak akan berkunjung untuk kedua kalinya ke Kota Sawahlunto. Untuk itu diperlukan kreatifitas dalam pelaksanaan pembangunan terutama pengelolaan kepariwisataan di Kota Sawahlunto.

INOVATIF maksudnya dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Kota Wisata tambang yang berbudaya, selain kreatifitas, juga dibutuhkan inovasi-inovasi baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, maupun pengembangan kualitas produk daerah. Pada visi ini, inovasi ditekankan pada pengembangan dari produk yang yang Sawahlunto, baik itu Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah, Pertanian, Industri, Pariwisata dan lainnya.

UNGGUL maksudnya seluruh aktifitas yang dibuat atau dilakukan diseluruh bidang harus mempunyai keunggulan tertentu, harus mempunyai nilai lebih dari daerah lain, baik di bidang Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Adat Istiadat, Infrastruktur, Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan.

BERMARTABAT maksudnya terciptanya kebersamaan dan kerukunan serta gotong-royong dalam kehidupan masyarakat, memiliki daya saing, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berkepribadian, demokratis, rasional dan berkeadilan, meningkatkan kualitas beragama untuk membentuk kepribadian, watak akhlak dan tingkah laku yang sesuai dengan budaya lokal, serta membentengi generasi muda akan pengaruh dari budaya asing.

BERKEADILAN maksudnya pembangunan tidak boleh bertumpu pada satu kecamatan atau daerah tertentu saja, harus merata sesuai dengan potensi yang ada. Pendistribusian kegiatan dan hasil pembangunan harus merata. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan kecamatan, menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidak adilan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

SEJAHTERA maksudnya; masyarakat Kota Sawahlunto terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan. Memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak terutama untuk anak disabilitas, warga kurang mampu dan lansia,

terbukanya kesempatan kerja dengan penghasilan yang memadai dan hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sawahlunto.

Tabel 2.263
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA					
NO	**MISI**	**NO**	**TUJUAN**	**NO**	**SASARAN**
1	Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik	1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya	1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat
				2	Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota
		2	Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	1	Meningkatnya profesionalisme, aktivitas dan ekspresi seni dan budaya Kota Sawahlunto
				2	Meningkatnya budaya asli sawahlunto yang lestari
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK	1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
				2	Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan
				3	Meningkatnya aktivitas perekonomian masyaraka
				4	Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan
				5	Tersedianya iklim investasi yang kondusif
3	Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar)	1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	1	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan
4	Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif	1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
				2	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah
		2	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	3	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA					
NO	**MISI**	**NO**	**TUJUAN**	**NO**	**SASARAN**
5	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat	1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				2	Menurunnya prevalensi stunting
6	Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan	1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata
7	Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai	1	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	1	Tersedianya sarana dan prasarana kota yang merata dan memadai
				2	Meningkatnya kesiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana
				3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
				5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
8	Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya	1	Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan Gender	1	Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
				2	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan
9	Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor	1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1	meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
				2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

C. EVALUASI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

Visi pemerintah Kota Sawahlunto dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah: **"DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA"**. Dalam pencapaian visi tersebut terdapat beberapa misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK
3. Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif
5. Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan
6. Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan
7. Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai
8. Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya
9. Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor

Untuk menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 digunakan 2 (dua) skala pengukuran, yaitu:

1. Skala Nilai dan Kriteria Penilaian Kinerja

Untuk menyimpulkan hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran dan program dilakukan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.264
Skala Nilai dan Kriteria Penilaian Kinerja

Nomor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

2. Skala Nilai dan Prediket Pencapaian Kinerja

Kriteria ini digunakan dengan asumsi bahwa setiap tahun pencapaian target kinerja RPJMD sudah terlaksana 20%. Sehingga pada pelaksanaan tahun keempat RPJMD Tahun 2018 – 2023, keberhasilan pencapaian target kinerja minimal sudah terlaksana 80 %.

Tabel 2.265

Skala Nilai dan Prediket Pencapaian Kinerja

Nomor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Prediket Pencapaian Kinerja
1	≥100 %	Telah Tercapai
2	30,01 % - 99,99 %	Akan Tercapai
3	≤ 30 %	Sulit Tercapai/ Perlu Upaya Keras

Pencapaian kinerja Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dapat dilihat per misi sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

MISI 1: Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik

Sebagai kota yang memiliki keragamana etnis dan agama, menciptakan kerukunan masyarakat lintas etnis dan agama merupakan sebuah hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya tentu melestarikan budaya dan tradisi yang sudah dipertahankan sejak lama juga merupakan suatu prioritas. Saat ini Kota Saahlunto sangat serius dalam melakukan pembinaan pada pondok-pondok tahfid yang berada di Kota Sawahlunto, hal ini terbukti pada tahun 2022 telah berhasil diwisuda ratusan hafidz pelajar di Kota Sawahlunto. Disamping itu, kesejahteraan bagi para guru hafidz dan TPQ, imam masjid, garin, penyelenggara jenazah, juga selalu diperhatikan oleh pemerintah kota. Tidak hanya para guru, bagi siswa SD yang hafal 1 juz juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah kota. Dari segi budaya, Kota Sawahlunto merupakan kota yang memiliki banyak warisan budaya, hal inilah yang berusaha dijaga dan dilestarikan serta dikembangkan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah kota. Setelah meraih predikat OMCHS (Ombilin Coal Mining Heritage Sawahlunto) pemerintah kota semakin serius dalam melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah dalam perjalanan Kota Sawahlunto sebagai kota tambang tertua. Menarik generasi muda melalui pengenalan sejarah berbalut kegiatan-kegiatan seru seperti perlombaan dan sebagainya.

Secara umum tingkat capaian misi 1 dengan prediket **sangat tinggi**, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **100%** dengan predikat pencapaian kinerja **telah tercapai**, seluruh target dapat tercapai dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Saat ini belum ada permasalahan yang berarti dalam pencapaian misi ini, sehingga kedepannya hanya perlu memningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi semakin baik. Toleransi kehidupan beragama dan berbudaya diharapkan juga akan semakin baik sehingga tidak akan ditemukan permasalahan-permasalahan terkait hal-hal tersebut, dimana bisa saja diluar Kota Sawahlunto hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang serius.

Misi 1 memiliki 2 sasaran yaitu meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dan melestarikan budaya dan tradisi yag menjadi karakter kota.

Capaian Misi 1:

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
	Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik														37,27	2.975.024.258,00	84,06	65,49	100,00	46,85	60,13	5.004.909.671,75	100,00	104,81
	Tujuan 1.1. Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya		Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZ Tahun n - Jumlah zakat pada BAZ tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	0	517.530.000	4,43	53.539.090.000	1,23	10.113.420.000	1,43	12.224.920.000	54,67		24,47		4444,7154	0,00	1711,19	0,00	79,14	-	1786,46	0,00
	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat		Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZ Tahun n - Jumlah zakat pada BAZ tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	0	265	4,43	45.529.260.000	1,23	8.480.350.000	1,43	12.224.920.000			24,47		0	0,00	1711,19	0,00	24,47	-	552,37	0,00
1		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase santri rumah/pondok tahfizdz yang hafidz minimal 1 juz dalam setahun (persen)	jumlah santri yang hafidz 1 juz / jumlah santri rumah tahfidz) x 100 (%)	0	0	50	29.263.080.000	30	8.480.350.000	40	10.274.920.000	31	7.101.512.930	55,75	11.383.599.503	103,33	83,74	139,38	110,79	86,75	18.485.112.433	173,50	63,17
			Peningkatan Jumlah Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto (Pondok Tahfiz)	Jumlah pondok tahfidz tahun n01 0 jumlah pondok tahfiz tahun n	0	0	60		36		50		38		52		105,56		104,00		90		150,00	
			Persentase imam masjid yang mengikuti pelatihan (persen)	(Jumlah imam yang mengikuti pelatihan/ jumlah imam mesjid)x 100%	0	0	100		100		100		100		100		100,00		100,00		200		200,00	

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
	Sasaran 1.1.2. Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota		Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunitas budaya) x 100 %	n/a	252,53	1,77	8.009.830.000	1,23	1.633.070.000	1,43	1.950.000.000			tdk dipakai		0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00
2		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)	(Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/ Total jumlah objek pemajuan kebuadayaan) X100%	0	0	31,1	255.450.000	22,2	874.500.000	26,7	800.000.000	20	568.465.050	25,05	234.604.855	90,09	65,00	93,82	29,33	45,05	803.069.905	144,86	314,37
3		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	(Jumlah kelompok seni yang mandiri/Jumlah kelompok seni yang ada) X 100%			13,3	2.017.930.000	13,30	617.930.000	13,30	650.000.000	7,89	375.898.175	13,28	197.089.854	59,32	60,83	99,85	30,32	21,17	572.988.029	159,17	28,39
4		Program Pembinaan Sejarah	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	(Jumlah kelompok masyarakat yang mengetahui sejarah lokal/Jumlah kelompok masyarakat yang ada) X 100%			60	1.190.640.000	39	140.640.000	50	500.000.000	32,56	73.665.500	55	84.802.820	83,49	52,38	110,00	16,96	87,56	158.468.320	145,93	13,31

MISI 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK

Misi 2 fokus kepada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian. Misi 2 memiliki 5 sasaran yaitu:

1. Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif
2. Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan
3. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat
4. Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan
5. Tersedianya iklim investasi yang kondusif

Misi ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto yang semakin baik, berkualitas dan produktif. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi ini dititikberatkan pada pengembangan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Sebagai dasar utama peningkatan kualitas ekonomi ini akan dimulai dari peningkatan keterampilan dan kualitas Calon Pencari Kerja.

Pada tahun 2022 rata-rata capaian kinerja pada misi 2 adalah sebesar 100% dengan predikat **sangat tinggi** dan predikat pencapaian kinerja **telah tercapai**. Capaian secara keseluruhan dalam peningkatan ekonomi telah memperoleh hasil yang sangat baik, terlihat dari peringkat Kota Sawahlunto sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah se- Indonesia dengan perolehan 2,28%. Tingkat pengangguran di Kota Sawahlunto juga lebih baik dari sebelumnya yaitu sebesar 5% dimana sebelumnya sebesar 6,38. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang baik, ditengah recovery pasca pandemic covid 19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020, Kota Sawahlunto mampu berjuang untuk kembali menstabilkan ekonomi masyarakat melalui program-program strategis yang dibuat. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja meningkat menjadi 75,56% dari 75%, Program penempatan tenaga kerja meningkat menjadi 68, 05% dari 60%. Selain itu, dalam rangka kemandirian pangan da peningkatan perekonomian, Kota Sawahlunto juga berusaha untuk meningkatkan sector pertanian dan perikanan sehingga juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara untuk pemulihan ekonomi melalui koperasi juga terus dilakukan, Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi meningkat dari 18% menjadi 49,27%. Program pengendalian izin usaha Industri juga meningkat dari 6,28% menjadi 75%, hal ini menunjukkan semakin banyaknya pemilik usaha yang memiliki izin. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat sedang menuju arah yang positif.

Capaian Misi 2 :

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
	Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK									-		-					100,00	33,29	100,00	72,12	100,00	76326252,77	100,00	42,48
	Tujuan 2.1. Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n01)/ Nilai PDRB ADHK tahun n01) x 100%	5,75		4,53		2,9	-	3,24	-	2,49		2,28		85,86	0,00	70,37	0,00	4,77	-	105,30	0,00
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	52,7		66,03		59,99	-	62,93	-	58,62		belum rilis		0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	-	88,78	0,00
			Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	8.197,43	2,01	78.334.090.000,00	2,1	16.311.930.000	2,05	10.865.600.000	2,38		2,28		113,33	0,00	111,22	0,00	4,66	-	231,84	0,00
			Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,3		0,28			-		-	0,3		0,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	-	217,86	0,00
	Sasaran 2.1.1. Menurunnya tingkat penganggura n terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,19	502,96	134,95	5.261.140.000,00	7,55	1.261.150.000	6,81	6.430.000	6,38	1.077.024.460	5		115,50	85,40	126,58	200,00	11,38	1.077.024.460	8,43	20,47

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
1		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)	(Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang Tersedia / Jumlah Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja) x 100 (%)	0	0	100	216180000	100	46.180.000	100	80.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00
2		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)	(Jumlah angkatan kerja yang lulus uji kompetensi / jumlah peserta pelatihan) x 100%	0	0	70	2.764.320.000,00	50	859.100.000	60	1.035.110.000	75	814.408.499	76,56	415.493.384	0,02	94,80	127,60	40,14	151,56	1.229.901.883	216,51	44,49
3		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	(Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja) x 100%	0	0	75,35	384700000	73,68	307.930.000	74,51	36.770.000	60	67.762.600	70,85	16.664.800	81,43	22,01	95,09	45,32	130,85	84.427.400	173,66	21,95
4	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)	Jumlah Perusahaan yang memiliki Lembaga Kerjasama Bipartid (Perusahaan)	0	0	10	145880000	6	47.940.000	8	47.940.000	4	39.063.250	10	18.654.640	66,67	81,48	125,00	38,91	14	57.717.890	140,00	39,57
	Sasaran 2.1.2.Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan		PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	404.956,76	1.161,60	418.106,23	16.465.220.000,00	401.862,74	2.707.640.000	409.417,45	2.231.970.000			432174,39		0,00	0,00	105,56	0,00	432174,39	-	103,36	0,00
5		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/jumlah	Jumlah koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/jumlah	*0*	*0*	26,47	753900000	21	94.000.000	23,53	375.000.000	18	-	49,27	29.466.800	85,71	0,00	209,39	7,86	67,27	29.466.800	254,14	3,91

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
			peraturan perkoperasian.	koperasi x 100%																				
6		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi sehat (%)	Jumlah Koperasi sehat / jumlah koperasi x 100 %	*0*	*0*	26	720720000	22	122.720.000	24	303.000.000	57,4	11.315.250	30	18.018.000	260,91	9,22	125,00	5,95	87,4	29.333.250	336,15	4,07
7		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)	jumlah koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60%/jumlah koperasi x 100%	*0*	*0*	60	295420000	30	145.420.000	45	-	27	330.612.986	100	334.001.266	90,00	227,35	222,22	0,00	127	664.614.252	211,67	224,97
8		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha / jumlah UMkM x 100%	*0*	*0*	53	870970000	47	338.000.000	50	262.970.000	34	193.061.375	4,6	29.871.140	72,34	57,12	9,20	11,36	38,6	222.932.515	72,83	25,60
9		Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya/ / jumlah UMKM x 100%	*0*	*0*	1,5	289800000	0,8	89.800.000	0,9	-	0,4	1.100.000	0	-	50,00	1,22	0,00	0,00	0,4	1.100.000	26,67	0,38
10		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	jumlah IKM yang meningkat skala usahanya / jumlah IKM x 100%	*0*	*0*	2	2.929.540.000,00	1,8	1.400.540.000	1,9	1.059.000.000	1,8	95.467.353	2	##########	100,00	6,82	105,26	2422,62	3,8	25.751.021.528	190,00	879,01

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
11		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)	jumlah industri kecil menengah yang mempunyai izin / jumlah industri kecil dan menengah x 100%	*0*	*0*	30	699160000	5	457.160.000	15	142.000.000	6,28	77.502.150	75	19.730.300	125,60	16,95	500,00	13,89	81,28	97.232.450	270,93	13,91
12		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terpublis (%)	jumlah IKM yang terpublish / jumlah IKM x 100%	*0*	*0*	100	170000000	80	60.000.000	90	90.000.000	*0*	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00
	Sasaran 2.1.3. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat		Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	9.343,00	1.323,76	11.024,59	14.559.690.000,00	10.307,58	1.946.850.000	10.632,26	1.006.910.000			10.537,00		0,00	0,00	99,10	0,00	10537	-	95,58	0,00
			PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	468.021,05		615.823,20		556.832,20	-	582.684,76	-			560862,45	-	0,00	0,00	96,25	0,00	560862,45	-	91,08	0,00
13		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	jumlah pasar rakyat dengan minimal tipe C / jumlah pasar rakyat x 100%	*0*	*0*	50		14	-	50	28.210.000	14	536.533.100	14	536.533.100	100,00	0,00	28,00	0,00	28	1.073.066.200	56,00	0,00
			Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)	*0*	*0*	422	1.202.540.000,00	382	1.024.330.000	402		382				100,00	0,00	0,00	0,00	382	-	90,52	0,00

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
			(pedagang)																					
14		Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	Jumlah produk unggulanyang diekspor / jumlah produk unggulan x 100%	*0*	*0*	60	897500000	50	310.000.000	55	337.500.000	50	70.191.710	50	23.881.959	100,00	22,64	90,91	7,08	100	94.073.669	166,67	10,48
15	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Nilai produk lokal yang terjual (juta rupiah)	Nilai produk lokal yang terjual (juta rupiah)	*0*	*0*	300	623700000	75	253.700.000	100	250.000.000	13500	-			18000,00	0,00	0,00	0,00	13500	-	4500,00	0,00
16		Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah omset dipasar0pasar tradisional Sawahlunto	jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun	*0*	*0*	27.015,91	559260000	25.837,33	189.260.000	26.785,71	220.000.000	25000	45.596.825	25563	74.939.967	96,76	24,09	95,44	34,06	50563	120.536.792	187,16	21,55
17	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	persentase pasar tradisional tertib ukur (%)	Jumlah pasar tradisional yang tertib ukur / jumlah pasar tradisional x 100%	*0*	*0*	30	460760000	30	169.560.000	30	171.200.000	30	55.862.860	0	230.000	100,00	32,95	0,00	0,13	30	56.092.860	100,00	12,17
	Sasaran 2.1.4. Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan		PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	309.537,83	4.810,19	344.355,30	38.946.440.000,00	329.730,34	9.566.110.000	336.849,19	7.018.540.000			345211,69		0,00	0,00	102,48	0,00	345211,69	-	100,25	0,00

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
			Indeks Ketahanan Pangan	RataOrata skor ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan	n/a		72,33		68,91	-	70,56	-			73,85		0,00	0,00	104,66	0,00	73,85	-	102,10	0,00
18	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)	Jumlah kecukupan kebutuhan pangan pokok dari bahan pangan lokal/jumlah kecukupan kebutuhan bahan pangan pokok	*0*	*0*	75	233250000	70	32.250.000	73	86.000.000	*68*	*17.557.128*	100	4.540.500	97,14	54,44	136,99	5,28	168	22.097.628	224,00	9,47
19		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	Survei indeks rataOrata konsumsi pengan masyarakat terhadap 9 kelompok pangan	*0*	*0*	86	1.130.170.000,00	84	348.670.000	85	340.900.000	*84,5*	*258.091.414*	85,1	576.445.125	100,60	74,02	100,12	169,10	169,6	834.536.539	197,21	73,84
20		Program Penanangan kerawanan pangan	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	(Jumlah penurunan penduduk rawan pangan/jumlah penduduk)x 100%	*0*	*0*	16	41280000	4	10.280.000	6	10.000.000	4,3	3.978.000	6	4.241.000	107,50	38,70	100,00	42,41	10,3	8.219.000	64,38	19,91
21		Program Pengawasan Keamanan pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	Perbandingan produk pangan segar dan produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba / total bahan pangan	*0*	*0*	91	166500000	90,14	45.000.000	90,3	45.000.000	95,41	36.481.000	97,78	35.104.520	105,85	81,07	108,28	78,01	193,19	71.585.520	212,30	42,99

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target			Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022			2021		2022		2021		2022				
1	2	3	4	5	6		7		11		12	16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
22		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan (ton)	Jumlah produksi perairan umum dan budidaya	*0*	*0*	652,5	1.417.460.000,00	217	487.460.000	217,5	470.000.000	*218,76*	*163.951.553*	235,55	200.941.847	100,81	33,63	108,30	42,75	454,31	364.893.400	69,63	25,74
23		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia selama satu tahun dalam bantuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar	*0*	*0*	36,67	200000000	33,2	50.000.000	36	60.000.000	*36,92*	*49.744.200*	*41,49*	50.032.550	111,20	99,49	115,25	83,39	78,41	99.776.750	213,83	49,89
24		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rasio Ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian	(Perbandingan luas sawah dengan handtraktor)	*0*	*0*	01:10		01:14	3.659.080.000	01:12	2.624.640.000	01:12.6	1.398.308.536		971.849.848	90,00	38,21	9248,08	37,03	00:00	2.370.158.384	0,00	0,00
			Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	Produktivitas x luas panen	*0*	*0*	46.040		14.700		15.593		16.692		17733,35		113,55		113,73		34425,06	-		
			Jumlah Produksi Karet (ton)	Produktivitas x luas panen tanaman yang menghasilkan	*0*	*0*	4.719		1.260		1.729		2.224		2230,91		176,50		129,03		4454,77	-		
			Jumlah Produksi Kakao (ton)	Produktivitas x luas panen tanaman yang menghasilkan	*0*	*0*	1.677		540		568		572,44		588180		106,01		103552,82		588752,44	-		
			Jumlah Produksi :		*0*	*0*			0		0		0				0,00		0,00		0	-		
			Jumlah Produksi Daging Sapi (ton)	pemotongan tercatat + 5%(pemotongan tercatat) x 173,5	*0*	*0*	1.064		353,68		354,68		319,97		90,47		90,47		25,51		410,44	-		
			Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	Daging Ayam Buras :	*0*	*0*			0		0		*996,91*				996,91		0,00		996,91	-		
				(150% x populasi) x 0,715 kg	*0*	*0*		10.014.320.000,00	0		0		*0*				0,00		0,00		0	-		
				Daging Ayam Ras Pedaging	*0*	*0*			0		0		*0*				0,00		0,00		0	-		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
				(60% x 97% x populasi) x 0,825 kg			2698,38		898,66		899,46		0				0,00		0,00		0	-		
				Daging Ayam Petelur :	0	0			0		0		0				0,00		0,00		0	-		
				(50% x populasi) x 0,825 kg	0	0			0		0		0				0,00		0,00		0	-		
			Jumlah Produksi Telur (ton)	Telur Ayam Ras: 60% x populasi x 10,6 kg	0	0			0		0		308,03		367,7		308,03		0,00		675,73	-		
				Telur Itik 60% x populasi x 7,6 kg	0	0	406,08		134,86		135,36		0				0,00		0,00		0	-		
				telur ayam buras : 30% x populasi x 1,4 kg	0	0			0		0		0				0,00		0,00		0	-		
25		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	Penambahan sawah beririgasi / sawah berigasi data awal	0	0	12,5	9.562.170.000,00	5	3.739.170.000	5	2.453.000.000	11,02	1.130.448.312			220,40	30,23	0,00	0,00	11,02	1.130.448.312	88,16	11,82
26		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (%)	(jumlah kejadian penyakit tahun lalu0jumlah kejadian penyakit tahun ini/jumlah kejadian penyakit tahun lalu)x100%	0	0	10	1.399.190.000,00	20	425.260.000	20	429.000.000	100	320.626.513	100	388.200.772	500,00	75,40	500,00	90,49	200	708.827.285	2000,00	50,66
27		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)	(Luas serangan OPT/luas tanam) x 100%	0	0	10	662100000	10	186.300.000	10	105.000.000	15,96	117.654.143	12,19	11.776.275	159,60	63,15	121,90	11,22	28,15	129.430.418	281,50	19,55
28		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	(Penyuluh naik jenjang jabatan / Total penyuluh) X 100 %	0	0	16,65		5,55	582.650.000	5,55	395.000.000	19	227.866.761	17,39	184.154.140	342,34	39,11	313,33	46,62	36,39	412.020.901	218,56	0,00

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
			Jumlah kelompok tani yang Naik Skor sesuai Permentan (kelompok / Wilayah Binaan)	Hasil penilaian kelompok tani sesuai kriteria Permentan	*0*	*0*	15	1.632.650.000,00	5		5		11		19		220,00		380,00		30	-	200,00	0,00
	Sasaran 2.1.5. Tersedianya iklim investasi yang kondusif		Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	n/a	398,92	41	3.101.610.000,00	36	830.190.000	36	601.760.000	45	434	112593		125,00	0,00	312758,33	0,00	112638	434	274726,83	0,00
29		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker	*0*	*0*	B	919220000	B	511.290.000	B	188.960.000	B	269.349.175	A	153.023.313	100,00	52,68	100,00	80,98	100	422.372.488	100,00	45,95
30		Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP	Nilai Rata0rata Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP	*0*	*0*	B	511870000	0	-	B	243.930.000	0	-	B	112.270.730	100,00	0,00	100,00	46,03	100	112.270.730	100,00	21,93
31		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	(Nilai Investasi Tahun N 0 Nilai Investasi (N01)) x 100% / Nilai Investasi N01	*0*	*0*	25	342950000	20	110.620.000	20	110.660.000	62	-	145,67	-	310,00	0,00	728,35	0,00	207,67	-	830,68	0,00
32		Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Lokal (milyar rupiah)	Jumlah Investasi PMDN Lokal	*0*	*0*	80	285020000	25	162.630.000	25	58.200.000		24.482.000	214876	58.940.334	0,00	15,05	859504,00	101,27	214876	83.422.334	268595,00	29,27
			Nilai Investasi Nasional (milyar rupiah)	Jumlah Investasi PMDN Nasional	*0*	*0*	30		10	-	10	-			262272		0,00		2622720,00		262272	-	874240,00	
			Nilai Investasi Asing	Jumlah Investasi PMA	*0*	*0*	3		1	-	1	-			0		0,00		0,00		0	-	0,00	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
			(milyar rupiah)																					
33	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal (%)	(Jumlah Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal / Jumlah Total Perusahaan) x 100%	*0*	*0*	100	105650000	100	45.650.000	100	-	100	139.766.555	45,65	215.256.400	100,00	306,17	45,65	0,00	145,65	355.022.955	145,65	336,04

MISI 3: Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar).

Melalui misi ini, pemerintah kota mengupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sawahlunto, khususnya pada bidang Pendidikan. Penekanan misi ini adalah pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat untuk mewujudkan manusia yang unggul dalam pendidikan, kreatif mengambil tindakan dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang melalui peningkatan sarana dan prasarana bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

Tingkat rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 96,58% dengan predikat **sangat tinggi** dan predikat pencapaian kinerja **akan tercapai (86,89%)**. Saat ini Indeks Pembangunan Manusai (IPM) Kota Sawahlunto adalah 73,73%, meningkat dari tahun sebelumnya 72,68%. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kota sudah tepat, karena salah satu item dlam penghitungan IPM adalah pendidikan. Pasca pandemic, angka harapan lama sekolah di Kota Sawahlunto juga meningkat dari 13,18% menjadi 13,42%, sedangkan angka rata-rata lama sekolah yang sebelumnya 10,32% meningkat menjadi 10,43%. Disamping itu, di kota Sawahlunto juga memiliki siswa SD yang telah menjadi hafidz quran, jumlahnya cukup banyak yakni 22%.

Sementara terdapat penurunan pada persentase guru yang bersertifikat pendidik, dimana sebelumnya 80% saat ini hanya 54,71%.

Capaian Misi 3 :

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022 (TW IV)		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
	Misi 3 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)									-		-					96,58	100,00	62,95	45,94	86,89	1487506952 1,00	100,00	100,00
	Tujuan 3.1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata0rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	71,13	23.660,21	74,09	153.219.430.000,00	73,17	39.999.130.000	73,63	29.923.360.000	72,88		73,73		99,60	0,00	100,14	0,00	146,61	-	197,88	0,00
	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai0nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	13,14		13,2		13,18	-	13,19	-	13,18		13,42		100,00	0,00	101,74	0,00	26,6	-	201,52	#DIV/0!
			Angka Rata0rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	9,93	23.660,21	11,3	153.219.430.000,00		39.999.130.000		29.923.360.000	10,32		10.43		88,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022 (TW IV)		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
			Persentase Lulusan SD hafidz al0Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al0Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	n/a		30		20	-	25	-	15		22		75,00	0,00	88,00	0,00	37	-	123,33	#DIV/0!
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	Angka Partisipasi Murni SD	0	0	101,3	60.759.230.000,00	100	27.063.310.000	100,2	18.775.760.000	94,69	25.416.236.877	90,17	24.699.338.082	94,69	93,91	89,99	131,55	184,86	50.115.574.959	182,49	82,48
			APM SMP	Angka Partisipasi Murni SMP	0	0	93,5	7.397.700.000,00	92,5	6.113.800.000	93	6.725.180.000	91,69		87,77		99,12	0,00	94,38	0,00	179,46	-	191,94	0,00
			Persentase Lulusan SD hafidz al0Quran minimal juz 30	(Lulusan SD hafidz al0Quran minimal juz 30 /total jumlah lulusan) x 100 %	0	0	30	94380000	20	78.000.000	25	85.800.000	15		22		75,00	0,00	88,00	0,00	37	-	123,33	0,00
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Persentase guru yang bersertifikat pendidik	(Jumlah Guru yang bersertifikat Pendidik dan berkualifikasi Min / Jumlah Total Guru) x 100 %	0	0	90,3	13.961.450.000,00	87,3	6.253.020.000	88,5	3.951.620.000	80	6.129.447.129	54,71	892.478.302	91,64	98,02	61,82	22,59	134,71	7.021.925.431	149,18	50,30
3	Program Pembinaan Perpustakaan		Terkelolanya perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan pustaka			12	1.567.500.000,00	12	481.000.000	12	377.000.000	12	2.243.649.764	12	111.726.480	100,00	466,46	100,00	29,64	24	2.355.376.244	200,00	150,26
4	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		Naskah kuno milik daerah kabupaten/ kota yang dilestarikan (naskah)	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan			12	29000000	4	10.000.000	4	8.000.000	4	7.401.450	0	-	100,00	74,01	0,00	0,00	4	7.401.450	33,33	25,52

MISI 4: Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

Melalui misi ini diharapkan adanya upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, bersih dalam pengelolaan tata pemerintahan dan mampu berinovasi dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif ini akan terwujud jika aparatur sipil negara (ASN) pada pemerintahan Kota Sawahlunto ini mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi, menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam bekerja dan mampu menterjemahkan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Misi ini meiliki 2 sasaran yaitu:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah

Pada tahun 2022 capaian rata-rata kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat **sangat tinggi** dan predikat pencapaian kinerja **akan tercapai (98,64)**. Capaian pada misi ini secara umum sudah baik, terlihat pada Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) beberapa tahun terakhir yang meraih WTP. Pemerintah kota selalu berusaha menghadirkan pemerintahan yang baik ditengah-tengah masyarakat, Konsistensi antara RPJMD terhadap RKPD yang mencapai 100% menunjukkan keterkaitan dokumen yang berkesinambungan. Pemerintah juga berusaha selalu berinovasi dalam pelayanan mengikuti perkembangan zaman, pada tahun 2022 sudah dibuat sebanyak 46 kajian dan proposal terkait inisiatif inovasi daearah. PAda program penyelengaraan pengawasan juga mencapai 100%, hal ini berarti sector pengawasan berjalan dengan baik menindaklanjuti setiap temuan. Sementara dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, saat ini indeks profesionalitas ASN telah mencapai angka 63. Setelah pada tahun lalu persentase pelanggaran perda meningkat akibat covid 19, saat ini kondisi telah jauh membaik, persentase penurunan pelanggaran perda hanya sebesar 34,3%.

Capaian Misi 4 :

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
	Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif									-		-					129,38	73,17	77,81	64,60	98,64	7196875556,95	100,00	61,08
	Tujuan 4.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	n/a	73.675,58	61,54 (B)	1.835.378.480.000,00	52,93	461.556.220.000	60,05	521.436.590.000	53,21		n/a		100,53	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00
	Sasaran 4.1.1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	CC	71.893,23	BB (72,83)	1.824.765.900.000,00	B (64,57)	458.566.110.000	B (68,22)	519.723.740.000	61,61		n/a		105,65	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00
			Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	4.822,48	WTP	168.334.630.000,00	WTP	2.520.770.000	WTP	75.171.890.000	WTP	2.259	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100	2.259	100,00	0,00
			Persentase peningkatan PAD (%)		0	0	4,45		4,04	-	4,19	-	0,14	1.309	27,79	627.406.708	3,47	0,00	663,25	0,00	27,93	627.408.017	627,64	0,00
1		Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%	0	0	100	3.258.000.000,00	100	1.163.000.000	100	357.451.435	100	700.542.728	100	313.329.238	100,00	60,24	100,00	87,66	200	1.013.871.966	200,00	31,12
2		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)	(Jumlah Program di RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%			100		100	-	100	193.985.600	100		100	187.147.017	100,00	0,00	100,00	96,47	200	187.147.017	200,00	0,00

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
			Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPD (%)	(Jumlah Program di RKPD Bidang Perekonomian dan SDA dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%	0	0	100	3.358.720.000,00	100	1.152.830.000	100		100	372.259.905	100		100,00	32,29	100,00	0,00	200	372.259.905	200,00	11,08
			Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD (%)	(Jumlah Program di RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%	0	0	100		100	-	100		100		100		100,00	0,00	100,00	0,00	200	-	200,00	0,00
3		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan dalam Perencanaan / Pembangunan (Proposal)	0	0	40	824000000	20	199.000.000	25	173.253.300	45	104.565.820	46	169.564.420	225,00	52,55	184,00	97,87	91	274.130.240	227,50	33,27
4		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	WTP	228.596.070.000,00	WTP	79.126.480.000	WTP	73.664.390.000	WTP		WTP		100,00	2,01	100,00	82,57	WTP	62.413.590.611	100,00	27,30
			Persentase Capaian Realisasi Belanja (Quality Of Budget Planning) (%)	(Jumlah Realisasi Belanja / APBD) x 100%	0	0	90		90	-	90	-	92	1.591.086.247	94,47	60.822.504.364	102,22		104,97		186,47	-	207,19	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
			Maksimal Defisit APBD (%)	Jumlah Pendapatan Daerah dikurangi dengan Belanja Daerah pada tahun yang sama	0	0	4,1		4,1	-	4,1	-	4,1		8		100,00		195,12		12,1	-	295,12	
5		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	(Jumlah OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel / Jumlah Total OPD) x 100%	0	0	95	2.580.620.000,00	93	594.620.000	94	960.500.000	88	667.813.039	90	1.666.112.105	94,62	112,31	95,74	173,46	178	2.333.925.144	187,37	90,44
6		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	(Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah / Target Pendapatan Asli Daerah) x 100%	0	0	100	2.151.080.000,00	100	1.002.380.000	100	547.000.000	99,93	1.308.870.466	96,34	627.406.708	99,93	130,58	96,34	114,70	196,27	1.936.277.174	196,27	90,01
7		Program Perekonomian dan Pembangunan	*Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan*			36	2.926.490.000,00	12	803.270.000	12	988.390.000	12	274.527.319	12	443.984.764	100,00	34,18	100,00	44,92	24	718.512.083	66,67	24,55
8		Program Pengelolaan Arsip	Terkelolanya arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan arsip			36	*77530000*	12	114.830.000	12	275.000.000	63,89	42.490.546	12	64.031.930	532,42	37,00	100,00	23,28	75,89	106.522.476	210,81	137,40
9		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Terlaksananya perlindungan & penyelamatan arsip (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan perlindungan & penyelamatan arsip			12	*465000000*	12	70.000.000	12	160.000.000	12	17.217.200	12	41.480.000	100,00	24,60	100,00	25,93	24	58.697.200	200,00	12,62
10		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase administrasi desa yang dibina	Jumlah administrasi desa yang dibina/ jumlah desa x 100%	0	0	100	2.864.110.000,00	90	1.302.220.000	95	508.997.518	90	729.927.944	100	494.389.850	100,00	56,05	105,26	97,13	190	1.224.317.794	190,00	42,75
11		Program Penataan Desa	Persentase Desa yang ditata	Jumlah desa yang ditata/	0	0	100	*329790000*	100	329.790.000		-	0	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
				jumlah total desax 100%																				
12		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina/ jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat x 100%	0	0	100	2.301.160.000,00	90	642.110.000	95	351.454.630	90	422.902.928	95	342.766.314	100,00	65,86	100,00	97,53	185	765.669.242	185,00	33,27
13		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	Persentase tindaklanjut LHP (%)	0	0	100	2.166.340.000,00	100	304.940.390	100	114.429.350	100	193.206.559	93,37	106.837.730	100,00	63,36	93,37	93,37	193,37	300.044.289	193,37	13,85
14		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai APIP (Level)	Penilaian Target BPKP terhadap APIP Kota Sawahlunto (Level)	0	0	level 4	1.105.970.000,00	level 2	147.384.584	level 2	44.924.000	level 2	92.525.765	level 2	42.289.388	100,00	62,78	100,00	94,14	level 2	134.815.153	100,00	12,19
15		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan program	0	0	36	258.968.770.000,00	12	100.702.830.000	12	79.091.470.000	103	82.825.964.427	12	91.522.115.249	858,33	82,25	100,00	115,72	115	174.348.079.676	319,44	67,32
					0	0	36	261.680.740.000,00	12	85.354.400.000	12	88.163.170.000	12	27.843.061.472			100,00	32,62	0,00	0,00	12	27.843.061.472	33,33	10,64
					0	0	36	35.342.490.000,00	12	14.152.270.000	12	9.793.220.000	12	7.672.497.459	12	31.261.773.646	100,00	54,21	100,00	319,22	24	38.934.271.105	66,67	110,16
					0	0	36	27.173.370.000,00	12	8.507.930.000	12	8.884.890.000	12	5.783.300.779			100,00	67,98	0,00	0,00	12	5.783.300.779	33,33	21,28
					0	0	36	14.115.670.000,00	12	3.655.330.000	12	4.385.390.000	12	5.611.255.380	12	8.742.663.373	100,00	153,51	100,00	199,36	24	14.353.918.753	66,67	101,69
					0	0	36	23.992.410.000,00	12	6.754.570.000	12	8.408.700.000	12	6.396.688.712			100,00	94,70	0,00	0,00	12	6.396.688.712	33,33	26,66
					0	0	36	16.160.840.000,00	12	5.111.340.000	12	5.408.780.000	100	4.034.830.023	12	9.782.497.920	833,33	78,94	100,00	180,86	112	13.817.327.943	311,11	85,50

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
					0	0	36	18.592.540.000,00	12	6.748.380.000	12	6.072.080.000	12	7.373.237.907			100,00	109,26	0,00	0,00	12	7.373.237.907	33,33	39,66
											12	4.728.704.794			12	4.589.844.899			100,00	97,06				
															2	361.105.227								
					0	0	36	40.167.550.000,00	12	12.311.900.000	12	13.459.620.000	12	10.099.033.465	12	3.716.744.783	100,00	82,03	100,00	27,61	24	13.815.778.248	66,67	34,40
					0	0	36	13.264.640.000,00	12	3.678.740.000	12	4.414.390.000	100	2.334.680.303			833,33	63,46	0,00	0,00	100	2.334.680.303	277,78	17,60
					0	0	36	19779360000	12	1.719.870.000	12	8.208.860.000	12	6.183.079.084	12	8.264.789.719	100,00	359,51	100,00	100,68	24	14.447.868.803	66,67	73,05
															12	13.481.606.826								
											12	10.848.460.820			12	10.760.175.943								
					0	0	36	18.046.040.000,00	12	4.872.800.000	12	5.876.420.501	14	4.152.723.132	12	5.692.499.342	116,67	85,22	100,00	96,87	26	9.845.222.474	72,22	54,56
					0	0	36	16.899.660.000,00	12	4.538.580.000	12	5.886.230.000	12	3.876.987.883			100,00	85,42	0,00	0,00	12	3.876.987.883	33,33	22,94
					0	0	36	9.988.010.000,00	12	3.016.650.000	12	3.247.164.057	93,46	2.894.556.330	12	3.138.361.651	778,83	95,95	100,00	96,65	105,46	6.032.917.981	292,94	60,40
					0	0	36	80.214.440.000,00	12	22.889.850.000	12	27.732.000.000	12	20.906.955.055			100,00	91,34	0,00	0,00	12	20.906.955.055	33,33	26,06
					0	0	36	44.387.670.000,00	12	13.507.580.000	12	14,720.741.648	12	12.272.622.286	12	14.855.122.022	100,00	90,86	100,00	100,91	24	27.127.744.308	66,67	61,12
					0	0	36	15.183.460.000,00	12	5.494.360.000	12	5.400.195.156	12	4.841.941.875	12	230.379.158	100,00	88,13	100,00	4,27	24	5.072.321.033	66,67	33,41
					0	0	36	26.770.180.000,00	12	8.295.950.000	12	8.791.190.000	12	7.564.168.315			100,00	91,18	0,00	0,00	12	7.564.168.315	33,33	28,26
					0	0	36	22.143.630.000,00	12	9.178.040.000	12	4.457.362.967	12	4.182.754.157	12	4.169.654.999	100,00	45,57	100,00	93,55	24	8.352.409.156	66,67	37,72
											12	3.520.647.836			12	3.271.464.061								
					0	0	36	4.681.400.000,00	12	5.237.490.000	12	5.932.970.000	12	6.374.333.433	12	6.309.478.256	100,00	121,71	100,00	106,35	24	12.683.811.689	66,67	270,94

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
					0	0	36	19.027.000.000,00	12	6.273.000.000	12	6.377.000.000	12	5.734.626.319	12	6.179.966.063	100,00	91,42	100,00	96,91	24	11.914.592.382	66,67	62,62
					0	0	36	7.911.000.000,00	12	2.394.000.000	12	2.510.084.953	12	2.393.473.107	12	2.454.733.028	100,00	99,98	100,00	97,79	24	4.848.206.135	66,67	61,28
					0	0	36	8.364.100.000,00	12	2.496.000.000	12	2.987.582.750	12	2.214.120.537	12	2.450.769.665	100,00	88,71	100,00	82,03	24	4.664.890.202	66,67	55,77
					0	0	36	15.259.000.000,00	12	4.761.000.000	12	5.358.143.678	12	4.463.277.710	12	4.711.619.626	100,00	93,75	100,00	87,93	24	9.174.897.336	66,67	60,13
					0	0	36	18.438.000.000,00	12	4.640.150.000	12	6.480.850.000	12	3.271.658.659			100,00	70,51	0,00	0,00	12	3.271.658.659	33,33	17,74
16		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	(Luas wilayah dalam kondisi aman dan tertib/total luas wilayah)x 100%	0	0	100	202170000	100	117.460.000	100	20.000.000	100	39.180.575	100	4.199.400	100,00	33,36	100,00	21,00	200	43.379.975	200,00	21,46
					0	0	100	54710000	100	16.710.000	100	19.000.000	100	16.734.270	100	18.572.250	100,00	100,15	100,00	97,75	200	35.306.520	200,00	64,53
					0	0	100	24800000	100	8.000.000	100	5.025.000	100	9.233.250	100	5.025.000	100,00	115,42	0,00	0,00	200	14.258.250	200,00	57,49
					0	0	100	88500000	100	56.000.000	100	15.000.000	100	55.575.000	100	4.925.150	100,00	99,24	100,00	32,83	200	60.500.150	200,00	68,36
			Persentase fasilitasi penanganan kasus covid	Operasional penanganan kasus Covid	0	0	100	455120000	100	455.120.000		-	100	642.002.200			100,00	141,06	0,00	0,00	100	642.002.200	100,00	141,06
17		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	(jumlah kegiatan terselenggara/total jumlah kegiatan)x100%	0	0	100	164550000	0	-	100	58.928.000	0	-	100	58.845.900	0,00	0,00	100,00	99,86	100	58.845.900	100,00	35,76
					0	0	100	25000000	0	-	100	142.500.000	0	-	100	55.840.200	0,00	0,00	100,00	39,19	100	55.840.200	100,00	223,36
					0	0	100	108000000	100	30.000.000	100	35.000.000	0	-	100	57.119.500	0,00	0,00	100,00	163,20	100	57.119.500	100,00	52,89
					0	0	100	43500000	100	7.100.000	100	48.000.000	0	-	100	56.192.600	0,00	0,00	100,00	117,07	100	56.192.600	100,00	129,18

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
18		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif/Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada) x 100 %	0	0	100	4.017.080.000,00	100	2.313.000.000	100	1.504.000.000	100	197.394.475	100	740.395.130	100,00	8,53	100,00	49,23	200	937.789.605	200,00	23,35
					0	0	100	324000000	100	110.000.000	100	1.548.987.540	100	80.951.681	100	1.263.247.430	100,00	73,59	100,00	81,55	200	1.344.199.111	200,00	414,88
					0	0	100	3.374.000.000,00	100	1.570.000.000	100	69.826.500	100	1.536.116.745	100	62.311.548	100,00	97,84	100,00	89,24	200	1.598.428.293	200,00	47,37
					0	0	100	452000000	100	97.000.000	100	148.000.000	100	77.374.700	100	67.838.940	100,00	79,77	100,00	45,84	200	145.213.640	200,00	32,13
19		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	(Jumlah pelayanan publik yang terlayani/total pelayanan) x 100 %	0	0	100	8.068.000.000,00	100	2.781.000.000	100	53.410.000	*100*	*174.017.525*	100	53.235.160	100,00	6,26	100,00	99,67	200	227.252.685	200,00	2,82
					0	0	100	557000000	100	168.280.000	100	4.221.800.000	*100*	126.408.417	100	3.293.486.828	100,00	75,12	100,00	78,01	200	3.419.895.245	200,00	613,98
					0	0	100	676000000	100	168.000.000	100	297.500.000	*100*	*167.157.632*	100	136.046.435	100,00	99,50	100,00	45,73	200	303.204.067	200,00	44,85
					0	0	100	989690000	100	597.190.000	100	3.584.876.418	*100*	93.116.400	100	3.259.193.385	100,00	15,59	100,00	90,92	200	3.352.309.785	200,00	338,72
20		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	Jumlah Desa yang dibina/total jumlah desa x 100%	0	0	100	3343500000	100	151.550.000	100	120.000.000	100	11.889.550	100	5.404.840	100,00	7,85	100,00	4,50	200	17.294.390	200,00	0,52
					0	0	100	42250000	100	13.250.000	100	6.009.150	100	13.002.000	100	4.773.230	100,00	98,13	100,00	79,43	200	17.775.230	200,00	42,07
					0	0	100	130200000	100	42.000.000	100	5.010.000	100	5.059.500	100	5.010.000	100,00	12,05	100,00	100,00	200	10.069.500	200,00	7,73
					0	0	100	94700000	100	46.000.000	100	85.000.000	100	25.793.500	100	2.866.720	100,00	56,07	100,00	3,37	200	28.660.220	200,00	30,26

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
21		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	(Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah propemperda) x 100 %	0	0	100 %	33.830.030.000,00	100	11.485.860.000	100	10.646.245.340	100	10.214.798.455	100	12.325.476.528	100,00	88,93	100,00	115,77	200	22.540.274.983	20000,00	66,63
22		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase validasi data kependudukan (%)	Jumlah data penduduk yang telah melakukan validasi (update data) / Jumlah penduduk x 100%	0	0	100	345910000	97	118.960.000	100	32.993.125	100	134.976.375	100	32.823.600	103,09	113,46	100,00	99,49	200	167.799.975	200,00	48,51
23		Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil / Jumlah penduduk x 100%	0	0	100	798970000	50	239.950.000	97,5	19.770.750	97,5	220.667.548	97,5	16.122.550	195,00	91,96	100,00	81,55	195	236.790.098	195,00	29,64
24		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan / Jumlah penduduk x 100%	0	0	100	1.296.850.000,00	97	64.000.000	100	316.971.550	100	628.104.553	100	286.766.492	103,09	981,41	100,00	90,47	200	914.871.045	200,00	70,55
	Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah		Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya		2000	75	9.174.720.000,00	66	-	70	-			63		0,00	#DIV/0!	90,00	#DIV/0!	63	-	84,00	0,00
25		Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan (%)	(Jumlah ASN yang terlayani / Jumlah seluruh ASN yang mengajukan permohonan	0	0	100	5.333.490.000,00	100	1.595.720.000	100	1.710.869.140	100	1.537.500.546	100	1.375.517.075	100,00	96,35	100,00	80,40	200	2.913.017.621	200,00	54,62

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
				pelayanan) x 100%																				
26		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN (paket)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi	0	0	2	600000000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00
	Tujuan 4.2. Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto		Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n01)0 jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %		1.782,36	0,14	10.612.580.000,00	0,04	2.990.110.000	0,05	1.712.850.000	-33 00		34,3	217.697.226	-825000,00	0,00	686000,00	12,71	-3265,7	217.697.226	-2332642,86	2,05
	Sasaran 4.2.1. Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto		Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n01)0 jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %		1.782,36	0,14	10.612.580.000,00	0,04	2.990.110.000	0,05	1.712.850.000			34,3	217.697.226	0,00	0,00	686000,00	12,71	34,3	217.697.226	24500,00	2,05
27		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Melalu Forum Strategis (%)	*(Jumlah laporan Pembinaan yang di tindaklanjuti / jumlah laporan) x 100%*	0	0	100	2.362.560.000,00	65	1,232.060.000	100	450.000.000	80	1.156.080.319	100	229.915.983	123,08	93,83	100,00	51,09	100	1.385.996.302	100,00	58,67
28		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Rekomendasi hasil rapat yang ditindaklanjuti (%)	(Jumlahrekomendasi yang ditindaklanjuti /jumlah rekomendasi rapat) x 100%	0	0	100	421500000	0	-	100	75.000.000	100	-	100	57.574.616	0,00	0,00	100,00	76,77	200	57.574.616	200,00	13,66

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
29		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan perda (%)	*(jumlah penyelesaian penegakan Perda/ jumlah pelanggaran Perda) x 100%*	0	0	100	2.406.610.000,00	100	1.446.940.000	100	468.620.000	100	1.146.486.191	100	217.697.226	100,00	79,24	100,00	46,45	100	1.364.183.417	100,00	56,68
									-		-		100				0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	0,00	0,00
30		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Krimilatitas (%)	(Jumlah Angka Kriminalitas Tahun (N01) 0 Jumlah Angka Kriminalitas Tahun N) / Jumlah Angka Kriminalitas Tahun (N01) x 100%	0	0	15	720680000	5	311.110.000	10	134.570.000	19,75	42.506.802	0,033	34.729.010	395,00	13,66	0,00	25,81	0	77.235.812	0,00	10,72
31		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)	Jumlah pemilih yang datang ke TPS/Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) x 100%	0	0	85		0	-	82,56	-	0	-	78	584.664.124	0,00	0,00	94,48	0,00	78	584.664.124	91,76	0,00
			Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pemilih yang datang ke TPS/Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) x 100%	0	0	80	1.184.660.000,00	0	-	78,62	584.660.000	0	-	78,62		0,00	0,00	100,00	0,00	78,62	-	98,28	0,00
			Tingkat Partisipasi Pemilih pada pemilihan Gubernur	Jumlah pemilih yang datang ke TPS/Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) x 100%			65		0	-	54,27	-	0	-	54,27		0,00	0,00	100,00	0,00	54,27	-	83,49	0,00

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
32		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi (%)	Jumlah organisasi masyarakat yang diawasi/jumlah organisasi kemasyarakatan x 100%	0	0	100	25000000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00

MISI 5: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat

Pada misi ini, pemerintah mengupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sawahlunto dari segi kesehatan. Penekanan misi ini adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat ditingkat pelayanan dasar dan rujukan, untuk mewujudkan manusia yang sehat secara jasmani, dan mempunyai kepercayaan diri dalam jaminan pelayanan kesehatannya. Hal ini akan diwujudkan melalui pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selalin itu, pada misi ini juga akan diperhatikan perilaku hidup sehat masyarakat, yang dimulai dari diri, keluarga dan lingkungannya.

Pada tahun 2022 capaian rata-rata kinerja misi 5 adalah sebesar 99,51% dengan predikat **sangat tinggi** dan predikat pencapaian kinerja **telah tercapai**. Indikator pada misi ini diantaranya adalah angka usia harapan hidup yang meningkat menjadi 70,4, hal lain yang juga mengalami peningkatan sangat baik dari bidang kesehatan adalah prevalensi stunting yang sebelumnnya 6,1% menjadi 5,5%. Pemerintah selalu mengupayakan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat, sehingga cakupan pelayanan dasar selalu diupayakan mencapai 100% yang mana berarti masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat terlayani dengan baik. Sementara pada program pembinaan keluarga berencna mengalami penurunan dimana sebelumnya 71,92 menjadi 70,46%.

Capaian Misi 5 :

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
	Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat									-		-					99,51	70,78	64,31	514,72	100,00	3361968817,71	100,00	65,40
	Tujuan 5.1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata0rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	71,13	30.716,33	74,09	176.802.370.000,00	73,17	67.990.960.000	73,63	21.468.670.000	72,88		73,73		99,60	0,00	100,14	0,00	146,61	-	197,88	0,00
	Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata0 rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	69,39	30.295,46	70,42	169.947.900.000,00	70,14	65.828.360.000	70,28	21.196.170.000	70,1		70,4		99,94	0,00	100,17	0,00	140,5	-	199,52	0,00
1		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100 %	0	0	100		95	-	96	-	96,4	18.943.890.059	99,64		101,47	0,00	103,79	0,00	196,04	18.943.890.059	196,04	0,00

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
			Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	(Gambaran kepuasan dari pasien/masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit + Puskesmas yang diukur melalui kuesioner) / 2	0	0	0	104.671.560.000,00	80	64.893.750.000	81	20.841.170.000	80,5		82,43		100,63	0,00	101,77	0,00	162,93	-	0,00	0,00
			Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	(Jumlah Rujukan IGD dan Rawat Inap / Jumlah kunjungan IGD dan Rawat Inap) x 100 %	0	0	0		≤ 4,50	-	≤ 4,25	-					0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00
2		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	(Jumlah tenaga Kesehatan dan tenaga medis yang sesuai standar / jumlah tenaga kesehatan dan medis) x 100 %	0	0	92	383370000	90	165.870.000	91	80.000.000	90	401.597.680	71,49		100,00	242,12	78,56	0,00	161,49	401.597.680	175,53	104,75
3		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Keluarga Sehat (%)	Jumlah Keluarga Sehat dengan indek >0,8 dibagi dengan seluruh kepala keluarga	0	0	37	1.128.010.000,00	33	583.490.000	35	195.000.000	24	411.102.895	0,28	44.549.747	72,73	70,46	0,80	22,85	24,28	455.652.642	65,62	40,39
4		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	(Jumlah tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan / Jumlah Tempat pengolahan makanan yang	0	0	78	372500000	76	185.250.000	77	80.000.000	93	121.223.200		13.485.480	122,37	65,44	0,00	16,86	93	134.708.680	119,23	36,16

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
				diperiksa) x 100 %																				
	Sasaran 5.1.2 Menurunnya prevalensi stunting		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu		420,87	5,9	6.854.470.000,00	6,1	2.162.600.000	6	272.500.000	6,1		13,7		100,00	0,00	228,33	0,00	19,8	-	335,59	0,00
5		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)	(Jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi/ jumlah pasangan usia Subur) x 100 %	0	0	69,21	1.980.540.000,00	67,78	1.788.630.000	68,55	62.500.000	67,78	1.092.976.593	70,12	1.915.454.800	100,00	61,11	102,29	3064,73	137,9	3.008.431.393	199,25	151,90
6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	0	0	705	554750000	235	280.500.000	235	97.000.000	235	49.014.000	148	359.577.500	100,00	17,47	62,98	370,70	383	408.591.500	54,33	73,65
7		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk		0	0	6,76	354970000	2,29	93.470.000	2,25	113.000.000	2,29	36.360.506	2,29	144.549.264	100,00	38,90	101,78	127,92	4,58	180.909.770	67,75	50,96

MISI 6: Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk melanjutkan komitmen daerah dalam mencapai Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Pengembangan pariwisata di Kota Sawahlunto ini perlu inovasi, keseriusan, terkonsep secara jelas dan berkelanjutan. Melalui misi ini diharapkan sektor pariwisata di Kota Sawahlunto betul-betul mampu menjadi mesin penggerak utama dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Yang menjadi perhatian utama pada misi ini adalah peningkatan kualitas destinasi wisata, pembinaan atraksi wisata sesuai potensi daerah, peningkatan kualitas promosi wisata agar lebih tepat sasaran dan pengembangan ekonomi kreatif yang akan mendukung berkembanganya sektor pariwisata ini. Pariwisata diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang positif dalam meningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.

Pada tahun 2022 tingkat rata-rata capaian misi 6 adalah sebesar 90,01% dengan predikat **sangat tinggi** dan predikat pencapaian kinerja **telah tercapai.** PAsca pandemi covid 19 pada tahun 2020 yang dapat dikatakan membuat industry pariwisata lesu, saat ini industry pariwisata sedang mencoba bangkit dan kembali pulih, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari 88.248 menjadi 141.020 orang, kontribusi sector pariwisata terhadap PAD yang sebelumnya 1,86 m3ningkat menjadi 3,3% dan masih diharapkan unutk semakin meningkat setiap tahunnya melalui program-program unggulan yang dibuat oleh pemerintah kota. Sektor pariwisata merupakan salah satu sector yang dapat memberika efek yang mencakup berbagai lapisan masyarakat, dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber peningkatan ekonomi yang akan bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Capaian Misi 6 :

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
	Misi 6 Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan									-		-					90,01	64,85	84,63	54,60	100,00	3439156476,11	100,00	38,28
	Tujuan 6.1. Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n0 1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n01) x 100%	5,75		4,53		2,9	-	3,24	-	2,49		3,98		85,86	0,00	122,84	0,00	0	-	0,00	0,00
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	52,7		66,03		59,99	-	62,93	-	58,62		66,1		97,72	0,00	105,04	0,00	124,72	-	188,88	0,00
			Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	344.593,35	2,01	98.590.570.000,00	2,1	19.693.870.000	2,05	16.460.980.000			2,28		0,00	0,00	111,22	0,00	2,28	-	113,43	0,00
			Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,3		0,28		0,28	-	0,28	-	0,3		0,31		107,14	0,00	110,71	0,00	0,61	-	217,86	0,00
	Sasaran 6.1.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata		PDRB sektor Pariwisata0(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	60.733,09		95.714,10		80.359,32	-	87.536,71	-	84016,9		belum rilis		104,55	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00
			Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	2,58	344.593,35	2,13	98.590.570.000,00	1,86	19.693.870.000	1,98	16.460.980.000	2,18		belum rilis		117,20	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
1		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pengunjung yang mengatakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	(Persepsi kepuasan pengunjung terhadap objek wisata)	0	0	90		75	-	80	-	44,12	6.959.570.794	80	8.387.929.303	58,83	0,00	100,00	0,00	124,12	15.347.500.097	137,91	0,00
			Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(Jumlah objek wisata unggulan tipe A/Total jumlah objek wisata yang ada) X100%	0	0	*61,76*	26.261.680.000,00	*50*	9.457.000.000	*55,88*	4.804.680.000	50	746.976.558			100,00	7,90	0,00	0,00	50	746.976.558	80,96	2,84
2		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan (orang)	(Jumlah pengunjung objek wisata(tiket masuk)		331.483,00	1.300.000	7.384.130.000,00	434.128	1.407.240.000	1.000.000	1.866.610.000	434130	746.976.558	130000	584.249.460	100,00	53,08	13,00	31,30	564130	1.331.226.018	43,39	18,03
3		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	(Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mandiri/Jumlah pelaku ekonomi kreatif) X100%	0	0	20		18	-	19	-	18	1.043.113.097	18	124.510.800	100,00	0,00	94,74	0,00	36	1.167.623.897	180,00	0,00
			persentase MoU kemitraan aktif (%)	(Jumlah MOU kemitraan aktif/jumlah MOU kemitraan) X 100%	0	0	*90*	2.059.010.000,00	*75*	1.109.200.000	*80*	253.610.000	25		80	51.109.000	33,33	0,00	100,00	20,15	105	51.109.000	116,67	2,48
4		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)	(Jumlah produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HAKI/Jumlah produk ekonomi kreatif) X 100%	0	0	0,5	293750000	0,5	144.930.000	0,5	68.820.000	0,5	183.747.000	0,15	20.651.475	100,00	126,78	30,00	30,01	0,65	204.398.475	130,00	69,58

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
5		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	0	0	45	4.045.530.000,00	15	1.468.370.000	15	933.100.000	15	1.210.533.218	15	754.384.045	100,00	82,44	100,00	80,85	30	1.964.917.263	66,67	48,57
6		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/ internasional (atlit)	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/interna sional (atlit)	0	0	160	9.462.640.000,00	148	2.003.280.000	153	5.414.160.000	148	1.913.206.414	177	3.028.554.482	100,00	95,50	115,69	55,94	325	4.941.760.896	203,13	52,22
7		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	0	0	75	2.045.090.000,00	75	490.000.000	75	500.000.000	75	298.765.666	75	349.960.600	100,00	60,97	100,00	69,99	150	648.726.266	200,00	31,72
8		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase budaya benda yang lestari (%)	(Jumlah cagar budaya yang lestari/Total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) X 100%	0	0	63,92	4.889.680.000,00	57,18	1.589.680.000	60,55	1.600.000.000	57,1	1.141.368.215	60,5	116.888.893	99,86	71,80	99,92	7,31	117,6	1.258.257.108	183,98	25,73
9		Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah kunjungan museum (orang)	(Jumlah kunjungan museum (tiket terjual)(orang)	0	0	33.000	4.144.180.000,00	31.000	2.024.180.000	32.000	1.020.000.000	15937	1.884.766.151	34658	2.203.232.114	51,41	93,11	108,31	216,00	50595	4.087.998.265	153,32	98,64

MISI 7 : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai

Melalui misi ini, diharapkan ketersediaan jalan dan jembatan sebagai aksesibilitas seluruh sektor berada dalam kondisi baik, ketersediaan lingkungan yang bersih dan berkualitas, ketersediaan air bersih masyarakat yang layak, ketersediaan sarana perumahan dan pemukiman yang lebih baik, serta pembangunan yang sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan. Pada misi ini, juga akan memperhatikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, penanggulanan dan penanganan bencana.

Capaian rata-rata kinerja pada tahun 2022 untuk misi 7 adalah sebesar 80,29% dengan predikat **tinggi** dan predikat pencapaian kinerja **telah tercapai.** PAda tahun 2022 indeks pembangunan infrastruktur wilayah meningkat dari 84,42 menjadi 87,60%. Sementara dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat melalui sector pertanian persentase luas sawah yang telah dialiri salran irigasi juga menigkat dari 46,84% menjadi 50,73%. Disamping itu pada program pengelolaan dan pengembangan system drainase juga mengalami peningkatan dari 44,21% menjadi 44,91%. Dalam menyediakan sumber air minum juga mengalami peningkatan dari 87,25% menjadi 98,18%. Sementara sekaitan dengan mulai beroperasinya kembali kereta api di Kota Sawahlunto, program pengelolaan perkeretaapian juga meningkat dari 27% menjadi 45%.

Selain menyediakan sarana dan prasarana public yang memadai bagi masyarakat pemerintah kota juga wajib menyediakan tindakan antisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat dlaam menghadapi bencana, hal ini terlihat dari indeks ketahanan daerah yang meningkat dari 0,56 menjadi 0,65%. Dari segi indeks kualitas lingkungan hidup juga mengalami peningkatan dari 62,30% menjadi 62,89%.

Capaian Misi 7 :

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
	Misi 6 Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan									-		-					90,01	64,85	84,63	54,60	100,00	3439156476,11	100,00	38,28
	Tujuan 6.1. Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n0 1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n01) x 100%	5,75		4,53		2,9	-	3,24	-	2,49		3,98		85,86	0,00	122,84	0,00	0	-	0,00	0,00
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	52,7		66,03		59,99	-	62,93	-	58,62		66,1		97,72	0,00	105,04	0,00	124,72	-	188,88	0,00
			Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	344.593,35	2,01	98.590.570.000,00	2,1	19.693.870.000	2,05	16.460.980.000			2,28		0,00	0,00	111,22	0,00	2,28	-	113,43	0,00
			Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,3		0,28		0,28	-	0,28	-	0,3		0,31		107,14	0,00	110,71	0,00	0,61	-	217,86	0,00
	Sasaran 6.1.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata		PDRB sektor Pariwisata0(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	60.733,09		95.714,10		80.359,32	-	87.536,71	-	84016,9		belum rilis		104,55	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00
			Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	2,58	344.593,35	2,13	98.590.570.000,00	1,86	19.693.870.000	1,98	16.460.980.000	2,18		belum rilis		117,20	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
1		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pengunjung yang mengatakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	(Persepsi kepuasan pengunjung terhadap objek wisata)	0	0	90		75	-	80	-	44,12	6.959.570.794	80	8.387.929.303	58,83	0,00	100,00	0,00	124,12	15.347.500.097	137,91	0,00
			Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(Jumlah objek wisata unggulan tipe A/Total jumlah objek wisata yang ada) X100%	0	0	*61,76*	26.261.680.000,00	*50*	9.457.000.000	*55,88*	4.804.680.000	50	746.976.558			100,00	7,90	0,00	0,00	50	746.976.558	80,96	2,84
2		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan (orang)	(Jumlah pengunjung objek wisata(tiket masuk)		331.483,00	1.300.000	7.384.130.000,00	434.128	1.407.240.000	1.000.000	1.866.610.000	434130	746.976.558	130000	584.249.460	100,00	53,08	13,00	31,30	564130	1.331.226.018	43,39	18,03
3		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	(Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mandiri/Jumlah pelaku ekonomi kreatif) X100%	0	0	20		18	-	19	-	18	1.043.113.097	18	124.510.800	100,00	0,00	94,74	0,00	36	1.167.623.897	180,00	0,00
			persentase MoU kemitraan aktif (%)	(Jumlah MOU kemitraan aktif/jumlah MOU kemitraan) X 100%	0	0	*90*	2.059.010.000,00	*75*	1.109.200.000	*80*	253.610.000	25		80	51.109.000	33,33	0,00	100,00	20,15	105	51.109.000	116,67	2,48
4		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)	(Jumlah produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HAKI/Jumlah produk ekonomi kreatif) X 100%	0	0	0,5	293750000	0,5	144.930.000	0,5	68.820.000	0,5	183.747.000	0,15	20.651.475	100,00	126,78	30,00	30,01	0,65	204.398.475	130,00	69,58
5		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	0	0	45	4.045.530.000,00	15	1.468.370.000	15	933.100.000	15	1.210.533.218	15	754.384.045	100,00	82,44	100,00	80,85	30	1.964.917.263	66,67	48,57

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
6		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/ internasional (atlit)	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/interna sional (atlit)	0	0	160	9.462.640.000,00	148	2.003.280.000	153	5.414.160.000	148	1.913.206.414	177	3.028.554.482	100,00	95,50	115,69	55,94	325	4.941.760.896	203,13	52,22
7		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	0	0	75	2.045.090.000,00	75	490.000.000	75	500.000.000	75	298.765.666	75	349.960.600	100,00	60,97	100,00	69,99	150	648.726.266	200,00	31,72
8		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase budaya benda yang lestari (%)	(Jumlah cagar budaya yang lestari/Total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) X 100%	0	0	63,92	4.889.680.000,00	57,18	1.589.680.000	60,55	1.600.000.000	57,1	1.141.368.215	60,5	116.888.893	99,86	71,80	99,92	7,31	117,6	1.258.257.108	183,98	25,73
9		Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah kunjungan museum (orang)	(Jumlah kunjungan museum (tiket terjual)(orang)	0	0	33.000	4.144.180.000,00	31.000	2.024.180.000	32.000	1.020.000.000	15937	1.884.766.151	34658	2.203.232.114	51,41	93,11	108,31	216,00	50595	4.087.998.265	153,32	98,64

MISI 8: Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya

Pada misi ini pemerintah kota berupaya menyediakan pembangunan yang berkeadilan bagi kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya di Kota Sawahlunto. Misi ini merupakan pengejawantahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan jaminan kehidupan yang layak bagi kelompok marginal tersebut. Pemerintah harus memberikan keadilan dan kesetaraan pembangunan pada lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan kesetaraan dan keberdayaan gender dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada tahun 2022 rata-rata capaian kinerja misi 8 adalah sebesar 82,50% dengan predikat **tinggi** dan predikat pencapaian kinerja **telah tercapai.** Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti mengalami penibgkatan dari 89,52% menjadi 100% dimana berarti pemerintah telah memenuhi kebutuhan dasar dari kelompok marginal tersebut. Dalam program pemberdayaan social dimana pemerintah memfasilitasi PSM dan TKSK untuk menjangkau langsung kepada kelompok marginal tersebut sehingga dapat dijangkau, jumlahnya pun mengalami peningkatan dati 25% menjadi 100%.
Sementara pada bidang perempuan dan perlindungan anak, pada tahun 2022 Kota Sawahlunto kembali meraih predikat Kota layak Anak tingkat Nindya dan program perlindunga anak yang mencakup capaian 100%.

Capaian Misi 8 :

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022 (TW IV)		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
	Misi 8 Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya									-		-					82,50	74,11	80,00	81,54	100,00	358413844,30	100,00	78,53
	Tujuan 8.1. Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM LakiOlaki) x 100 %	95,52	2.498,60	95,52	13.223.080.000,00	95,5	2.938.380.000	95,51	1.620.160.000			belum rilis		0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00
	Sasaran 8.1.1. Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya		Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfaslitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	18,64	1.744,15	100	8.663.590.000,00	89,84	1.645.560.000	94,78	1.276.160.000		1.078.236.564	100	816.565.880	0,00	65,52	105,51	63,99	100	1.894.802.444	100,00	21,87
1		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi / Jumlah total penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) x 100%	0	0	100	2.543.830.000,00	89,84	1.220.690.000	100	463.974.800	89,84	736.417.444	100	455.727.570	100,00	60,33	100,00	98,22	189,84	1.192.145.014	189,84	46,86
2		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	0	0	100	156390000	100	33.890.000	100	226.695.600	100	26.642.966	100	154.828.160	100,00	78,62	100,00	68,30	200	181.471.126	200,00	116,04
				/jumlah total PMKS x 100%						-		-					0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022 (TW IV)		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
3		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan	Jumlah PSM & TKSK yang diberdayakan /jumlah total PSM & TKSK x 100%	0	0	100	1.278.990.000,00	100	307.120.000	100	223.980.908	25	315.176.154	100	206.010.150	25,00	102,62	100,00	91,98	125	521.186.304	125,00	40,75
4		Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)	Jumlah penanganan bencana alam yang terfasilitasi/ jumlah bencana alam x 100 %	0	0	100	103960000	100	-	100	34.380.150	0	-	100	24.043.246	0,00	0,00	100,00	69,93	100	24.043.246	100,00	23,13
5		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan (TMP) yang terfasilitasi	Jumlah TMP yang terfasilitasi / jumlah TMP x 100%	0	0	100	243050000	100	83.860.000	100	17.196.000	100	86.403.330	100	16.934.120	100,00	103,03	100,00	98,48	200	103.337.450	200,00	42,52
	Sasaran 8.1.2. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki0laki) x 100	95,52	754,45	95,52	4.559.490.000,00	95,5	1.292.820.000	95,51	382.601.500			belum rilis	370.217.687	0,00	0,00	0,00	96,76	0	370.217.687	0,00	8,12
6		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	0	0	100	817680000	65,63	400.010.000	66	90921000	65,62	120.113.567	belum rilis	87.674.200	99,98	30,03	0,00	96,43	0	207.787.767	0,00	25,41
7		Program Perlindungan Perempuan	Persentase perlindungan perempuan dari kekerasan (%)	(Jumlah kasus kekerasan perempuan yang ditangani/jumlah kasus kekerasan perempuan) x100%	0	0	100	476070000	100	145.070.000	100	162.486.000	100	24.155.150	100	76.756.500	100,00	16,65	100,00	47,24	100	100.911.650	100,00	21,20
8		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga	0	0	100	849070000	100	266.678.500	100	266.678.500	100	432.453.711	100	261.130.087	100,00	162,16	100,00	97,92	100	693.583.798	100,00	81,69
9		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak (%)	Pencapaian hasil penilaian Kota Layak Anak	0	0	utama	198430000	Nindya	101.560.000	utama	25.002.000	100	29.022.966	nindya	21.413.400	100,00	28,58	0,00	85,65	0	50.436.366	0,00	25,42

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022 (TW IV)		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
10		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase perlindungan khusus bagi anak (%)	Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus/jumlah kasus pada anak x 100%	0	0	100	140560000	100	122.210.000	100	513.865.750	100	194.459.545	100	314.776.177	100,00	159,12	100,00	61,26	100	509.235.722	100,00	362,29

MISI 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor

Melalui misi ini, diharapkan sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang ada di Kota Sawahlunto akan cepat, efektif dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelayanan. Jika hal ini terwujud, secara langsung akan mempermudah pelayanan investasi ke Kota Sawahlunto melalui kemudahan birokrasinya. Akses terhadap informasi potensi daerah juga akan mudah diketahui oleh masyarakat.

Pada tahun 2022 tingkat rata-rata capaian kinerja misi 9 adalah sebesar 85,82% dengan predikat **tinggi** dan predikat pencapaian kinerja **telah tercapai.** Indeks Pembangunann system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) mengalami peningkatan dari 2,07 menjadi 2,84. Pada program aplikasi informatika juga mengalami peningktan dari 75% menjadi 85.

Capaian Misi 9 :

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022 (TW IV)		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
	Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor									-		-					85,82	59,73	84,49	75,15	100,00	850019464,00	100,00	42,95
	Tujuan 9.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	n/a	4.604,00	61,54 (B)	23.646.210.000,00	52,93	3.120.710.000	60,05	4.138.720.000	17		18		32,12	0,00	29,98	0,00	35	-	97,58	0,00
	Sasaran 9.1.1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi		Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	n/a	4.604,00	3,1	23.646.210.000,00	2,92	3.120.710.000	2,96	4.138.720.000	2,07		2,84		70,89	0,00	95,95	0,00	4,91	-	158,39	0,00
1		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)	(Jumlah OPD yang sudah meggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasiskan TIK / Jumlah OPD) x 100 %	0	0	95	1.509.870.000,00	70	559.870.000	85	450.000.000	60	436.927.950	65	355.214.061	85,71	78,04	76,47	78,94	125	792.142.011	131,58	52,46
			Jumlah publikasi kegiatan DPRD dalam masa sidang (masa sidang)	Jumlah publikasi kegiatan DPRD dalam masa sidang (masa sidang)	0	0	3	377940000	3	377.940.000	0	-	3	60.600.000			100,00	16,03	#DIV/0!	#DIV/0!	3	60.600.000	100,00	16,03

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target				Realisasi				Tingkat capaian				Capaian RPJMD Sampai Tahun 2022		Rasio Capaian Akhir (%)	
									2021		2022		2021		2022 (TW IV)		2021		2022					
1	2	3	4	5	6		7		11		12		16		17		21=16/11x100		22=17/12x100		23		24=23/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp =(16+17)	K	Rp
2		Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	(Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota/ Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100 %	0	0	95	7.399.540.000,00	75	2.043.860.000	85	3.155.680.000	50	365.749.092	60	1.996.275.373	66,67	17,90	70,59	63,26	110	2.362.024.465	115,79	31,92
3		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)		0	0	90	670000000	88	75.500.000	88	469.500.000	80	44.366.950	80	54.770.440	90,91	58,76	90,91	11,67	160	99.137.390	177,78	14,80
4		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)	Pengelolaan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			36	202090000	12	63.550.000	12	63.550.000	12	53.513.100	12	93.260.890	100,00	84,21	100,00	146,75	24	146.773.990	66,67	72,63

2.2.2 EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis-jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dikemudian dinyatakan dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah telah menetapkan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar yang terdiri dari Bidang :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
f. Sosial

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Sawahlunto menyusun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Untuk pencapaian target program dan kegaitan SPM dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dapat dilihat ada tabel dibawah ini :

Tabel 2.266
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2022

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target				Realisasi			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	**PENDIDIKAN**									**100**
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipas di dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MT (%)	100	100	100	100	85,99	92,09	100	100
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaika n pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100	100	100	100	85,05	56,7	50,3	100
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi (%)	100	100	100	100	78,76	93,27	100	100
2	**KESEHATAN**									**70,01**
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	64,6	56,7	71,7	72,28

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target				Realisasi			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan (%)	100	100	100	100	75,54	76,78	79,9	79,11
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	79,49	79,68	83,6	82,25
	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	38,36	38	74,6	89,5
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	97,91	100	68,36	100
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	86,2	76,05	49,83	52,29
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan (%)	100	100	100	100	38,11	46,66	44,64	61,35
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	39,49	16,72	7,95	38,95
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	60,34	88,06	50,59	81,35
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	150	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB (%)	100	100	100	100	27,14	13,1	26,03	52,99
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV (%)	100	100	100	100	86,33	100	100	100
3	**PEKERJAAN UMUM**									**93,22**
	Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum (%)	100	100	100	100	84	85,26	86	91,67
		Jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	100	100	100	100	60	99,86	90	93,33
	Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%) (SPM)	100	100	100	100	92,5	78	93,23	94,66
4	**PERUMAHAN RAKYAT**									**100**
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100	100	-	-	100	100
5	**KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									**100**
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kab/ kota (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target				Realisasi			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
6	SOSIAL									100
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	RATA-RATA CAPAIAN SPM									93,87

2.3 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Dasar hukum pembentukan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan serta pembinaan pemerintah daerah (Pemda). Sebagian besar atau seluruh modal BUMD dimiliki atau dikuasai oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, BUMD merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjalankan serta mengembangkan perekonomian setiap daerah dan perekonomian nasional. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Sawahlunto meliputi :

a. PT. Lembu Betina Subur (LBS)

PT. Lembu Betina Subur merupakan perusahaan milik BUMD kota Sawahlunto yang bergerak pada usaha pembibitan sapi potong. PT. Lembu Betina Subur (LBS) didirikan pada tahun 2005 berdasarkkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Savwablunto dengan PT. Lembu Jantan Perikasa (LJP) yang bekkedudukan di Serang, Banten, Tujuan pendirian dan target PT. LBS adalah untuk mempermudah peternak untuk mendapatkan sapi unggul dan menjadikan PT. LBS sebagai sentra peternakan atau penghasil bibit sapi unggul kausunsnya bagi masyarakat Sumatera Barat serta transfer *knowledge* kepada peternak mengenai breeding dan manajemen pengelolaan.

Jumlah populasi awal sapi potong PT. LBS pada tahun 2005 sebanyak 200 ekor sapi bunting yang diperoleh dari PT. LJP Serang, Banten. Pihak LBS memilih bibit induk bunting sebagai bibit di awal usahanya sehingga di tahun yang sama telah terjadi peningkatan populasi dari kelahiran tahap pertama sebanyak 139 ekor anak dari 200 imduk betina. sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah, PT LBS turut serta melaksanakkan pembangunan daerah dan penbangunan ekonomi nasional khususnya dalam peningkatan populasi sapi potong Perusahaan ini mengalami perkembangan layaknya sebuah bisnis pada umumnya yang mengalami perkembangan, namun juga sempat mengalarni stagnasi.

Berdasarkan data perkembangan populasi sapi potong dan kondisi keuangan perusahaan, periode 2006-2009 merupakan fase pertumbuhan, sekaligus menuju puncak bisnis. Penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebanyak 162 ekor yang didominasi oleh penjualan anak. Penjualan pada tahun ini sekaligus menjadi sumber penerinmaan terbesar PT. LBS selama beroperasi dari tahun 2005.

b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Sawahiunto yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 1992, di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto. Sebelum berdirinya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto, pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang dibentuk berdasarkan Keputusan 020/KPTSICK/I/1980. Bentuk Hukum tersebut diatas sudah sesuai dengan Menteri Pekerjaan Umum Nomor PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Tujuan dan Fungsi Perusahaan Tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto adalah dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dengan mengutakan pemberian jasa, penyelenggaraan kemanfaatan umum serta Pemasukan pendapatan daerah.

Memberikan pelayanan dalam penyediaan kebutuhan air bersih masyarakat secara memadai, adil dan merata serta berkesinambungan yang memenuhi persyaratan untuk setiap jenis pemakaian, mengembangkan perekonomian dan pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial kesehatan dan pelayanan umum merupakan tujuan dan fungsi perusahaan dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.

Melakukan usaha-usaha pengembangan perusahaan serta mengusulkan dan mencari bantuan modal. Dalam melaksanakan tugas pokok Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto dilandasi dengan 2 fungsi yaitu:

a. Fungsi Ekonomi
   Sebagai Publik Utility senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuan pelayanan dan memenuhi kewajiban lainnya dengan cara pengelolaan Perusahaan secara sehat berdasarkan asas ekonomi Perusahaan.

b. Fungsi Sosial
Memproduksi air minum yang merupakan kebutuhan pokok manusia senantiasa dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dengan memberlakukan tarif air minum yang disesuaikan dengan kondisi/fungsi tempat pelanggan dan pelanggan yang disubsidi.

Pendapatan dan Beban Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Kota Sawahlunto beberapa tahun terakhir dan perkiraan ekonomi Kota Sawahlunto di masa yang akan datang, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2022 beranjak pulih lebih cepat dari yang diperkirakan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,31 % sepanjang tahun 2022. Angka ini melampaui target yang ditetapkan Pemerintah sebesar 5,2 % dan telah kembali mencapai 5 % sebagaimana sebelum pandemi. Dengan didukung fundamendal ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap menggeliat meskipun kondisi ekonomi global masih mengalami perkembangan pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa *leading indicators* menunjukkan prospek yang cerah untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Pemerintah terus waspada dan antisipatif dengan kondisi pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian penguatan ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan ekonomi Indonesia tahun 2023. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan utama seperti :

1. Menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dengan program 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif), serta optimalisasi program perlindungan sosial yang akan melindungi masyarakat rentan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako (BPNT), dan sejenisnya.
2. Memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi (KUR Alsintan).
3. Meningkatkan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih kuat.
4. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja.
5. Melakukan reformasi dan pendalaman sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang akan memperkuat basis sumber pembiayaan untuk pembangunan ekonomi.
6. Membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Selain itu, untuk mendukung ekonomi hijau dan penurunan emisi karbon, pemerintah juga mendorong pengembangan kendaraan listrik.
7. Untuk meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan SDM, Pemerintah memberikan dukungan melalui program padat karya, pelatihan, dan program Kartu Pra Kerja.
8. Mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi, diantaranya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diharapkan mampu meningkatkan minat turis asing untuk datang ke destinasi wisata dalam negeri.

Dengan strategi di atas dan dengan melakukan koordinasi yang lebih intens dengan seluruh stakeholder dalam menerapkan strategi dan kebijakan yang ada, *maka* ***target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 % tahun 2023 optimis dapat dicapai.***

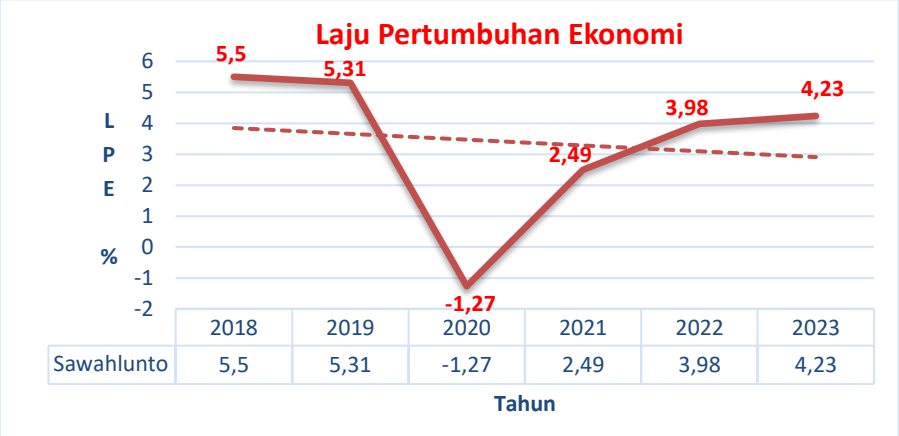
Di lingkup regional, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2022 tercatat sebesar 4,36 %, menguat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,29 %. Di lain pihak Provinsi Sumatera Barat telah ***menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 5,17 %.***

Mengacu pada target kinerja makro nasional dan regional Sumatera Barat serta target RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dan mempertimbangkan capaian kinerja perekonomian yang telah dibahas pada Bab II, maka dapat dilakukan proyeksi capaian kinerja makro Kota Sawahlunto tahun 2023 sebagai berikut.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu "indikator kinerja makro" yang merupakan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diukur berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2010 dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu penggunaan atau pengeluaran (*demand side*) dan sektoral atau lapangan usaha (*supply side*).

Grafik 3.1
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022
Dan Prediksi Tahun 2023



Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Diolah 2023

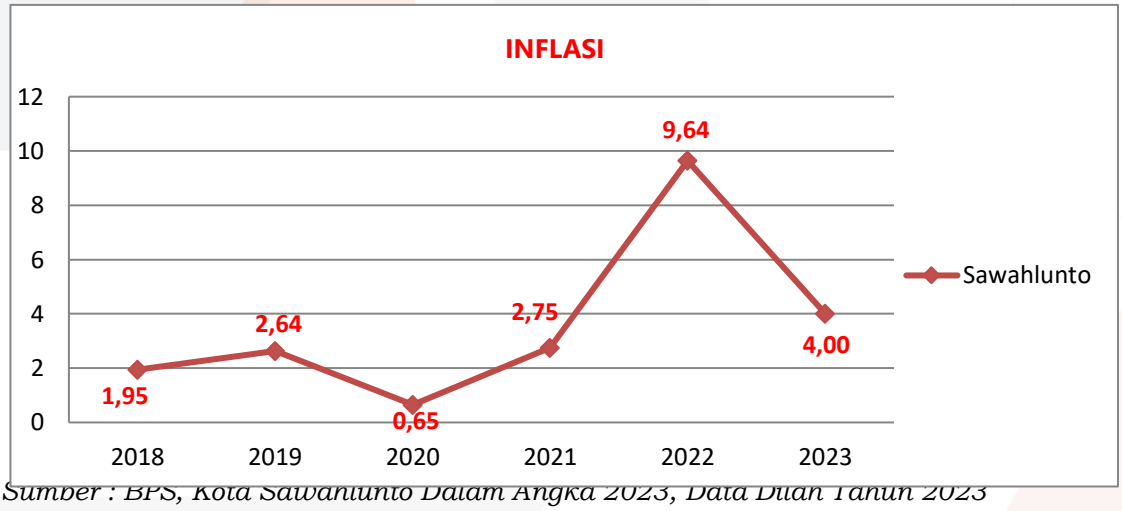
Tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2022 sebesar 3,98 % meningkat dari tahun 2021 dengan capaian sebesar 2,49 %. Merujuk pada perkiraan perekonomian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 serta trend pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum pandemic covid-19 dan perkembangan perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2020-2022, ***maka pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2023 diperkirakan mencapai 4,23 %.***

B. Infasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang dan jasa tersebut mengalami kenaikan. Penyebab lain dari inflasi adalah : adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, dan lain-lain.

Untuk mengukur laju inflasi Kota Sawahlunto digunakan Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sawahlunto menurut Lapangat Usaha dan menurut Pengeluaran. Indeks Implisit adalah suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*).

Grafik 3.2
Capaian Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022
Dan Prediksi Tahun 2023



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Diolah Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2019 (sebelum covid 19 melanda) sebesar 2,64 %, cenderung meningkat dari tahun 2018. Sedangkan ketika wabah Covid 19 tahun 2020 melanda, laju inflasi Kota Sawahlunto menurun tajam menjadi 0,65 %. Seiring bangkitnya perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2021 laju inflasi Kota Sawahlunto kembali melonjak menjadi 2,75 %. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022, laju inflasi Kota Sawahlunto meningkat sangat tinggi mencapai 9,64 % dan ini merupakan laju Inflasi tertinggi di Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingginya laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 menjadi salah satu penyebab tertekannya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto yang hanya mencapai 3,98%. Dan laju Inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 ini jauh melampaui target inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran laju Inflasi tahun 2022-2024 dengan kisaran 2 % - 4 %.

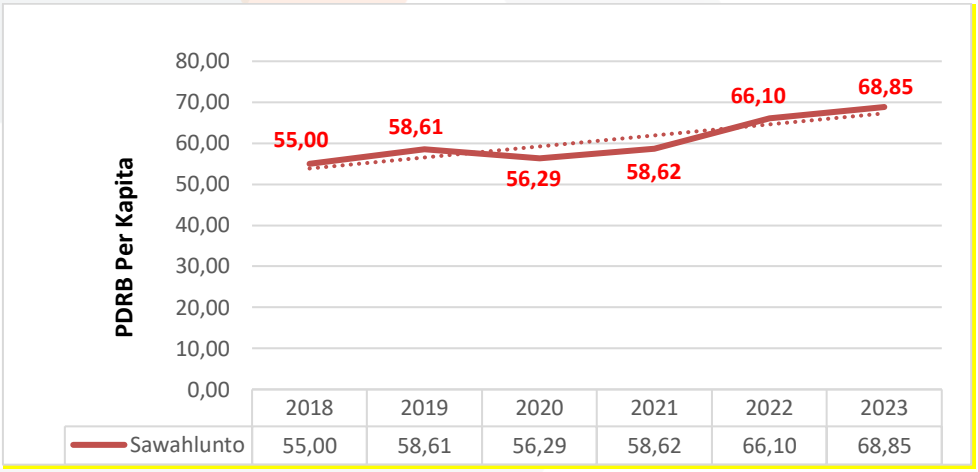
Tinggi laju inflasi Kota Sawahlunto didorong oleh tingginya harga komoditas pertambangan dan galian pada bulan Agustus 2022, seperti harga batubara yang mencapai US$ 321,59 per ton dan harga emas yang mencapai Rp 962.000 per gram, "sehingga lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami inflasi sebesar 64,07**%"**. Disamping itu naiknya harga pertalite, pertamax dan solar bersubsidi pada bulan September 2022, juga terjadi kenaikan tarif air dan listrik, harga bahan bakar rumah tangga (gas elpiji), harga barang perlengkapan/peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, harga alat kesehatan, dan biaya transportasi yang menyebabkan "Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami inflasi sebesar sebesar 7,08**%"**.

Dan pada tahun 2023, diperkirakan laju inflasi Kota Sawahlunto dapat ditekan hingga 4 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan Pemerintah melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran laju Inflasi tahun 2022-2024 melalui berbagai upaya untuk mengendalikan ketersediaan barang di Kota Sawahlunto sehingga harga-harga dapat dikendalikan.

C. Pendapatan Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB Per Kapita suatu wilayah semakin makmur wilayah tersebut. PDRB Per Kapita menunjukkan PDRB per satu orang atau PDRB per kepala yang diperoleh dengan cara membagi PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Oleh karena itu, meningkat dan menurunnya PDRB Per Kapita ditentukan oleh meningkat dan menurunnya nilai PDRB serta bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk.

Grafik 3.3
Capaian PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022
Dan Prediksi Tahun 2023



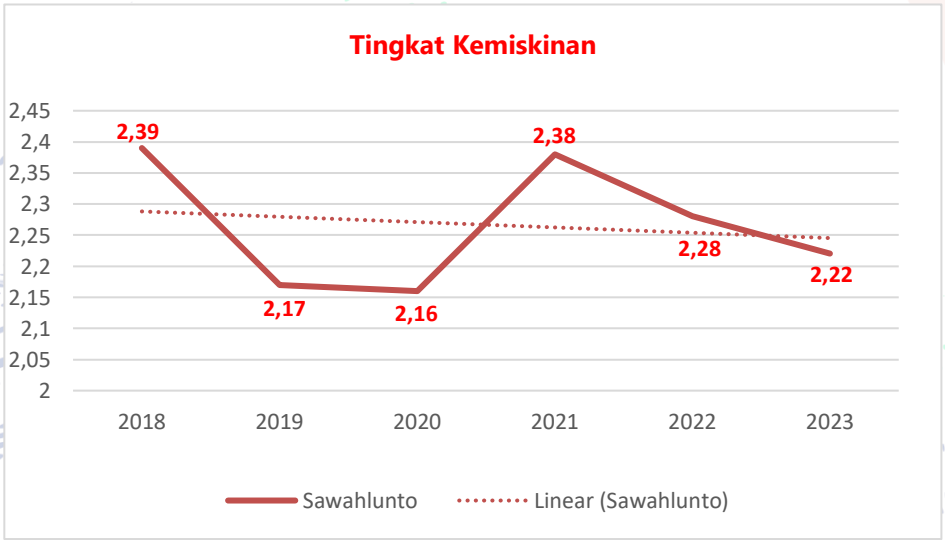
Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Diolah 2023

PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada kurun waktu 2018 – 2022 berada pada kisaran trenline, dan ***diperkirakan pada tahun 2023 masih berada pada trenline dengan nilai sebesar 68,85 juta rupiah***. Hal ini disebabkan sudah pulihnya perekonomian Kota Sawahlunto seiring berakhirnya pandemi Covid-19. Sebagaimana terlihat pada grafik di atas, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sempat mengalami penurunan dan berada di bawah trenline pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, namun ketika pandemi Covid-19 berakhir pada tahun 2022, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto kembali meningkat dan berada di atas trenline**.**

D. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan merupakan salah satu "indikator kinerja makro" yang merupakan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat. "Semakin rendah tingkat kemiskinan suatu daerah, semakin baik penilaian terhadap capaian kinerja pemerintah daerah tersebut".

Grafik 3.4
Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022
Dan Prediksi Tahun 2023



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Diolah Tahun 2023

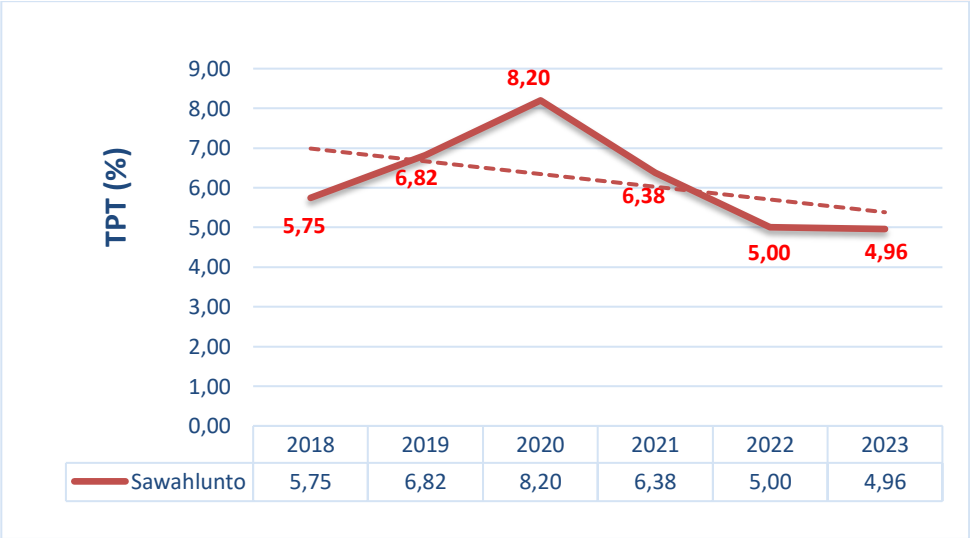
Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2018 – 2022 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, dan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2021 pada kisaran 2,38 % - 2,39 %. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lima tahun terakhir ini tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto berada pada posisi tingkat kemiskinan terendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Wabah pandemi Covid-19 yang mulai merebak di awal tahun 2020 yang mengakibatkan tingkat kemiskinan nasional dan sebagian besar daerah kabupaten/kota mengalami peningkatan. Namun hal ini tidak terjadi di Kota Sawahlunto, meskipun Kota Sawahlunto tidak luput dari wabah pandemi covid-19, tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto tetap menurun dari 2,17 persen pada tahun 2019 turun menjadi 2,16 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan banyaknya bantuan sosial yang didistribusikan ke Kota Sawahlunto, mulai dari bantuan pusat sampai bantuan tingkat desa, sehingga masyarakat miskin dapat meningkat perekonomiannya. Namun pada tahun 2021 dimana pandemi Covid-19 masih mewabah meskipun sudah melandai, justru terjadi lonjakan tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto yang mencapai angka 2,38, hal ini disebabkan naiknya angka Garis Kemiskinan. Namun pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto kembali turun menjadi 2,28 %, dan ***pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto diperkirakan akan kembali turun pada angka 2,22 %*** dengan berbagai upaya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah rasio jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka mengindikasikan luasnya kesempatan kerja di daerah tersebut. Semakin tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka di suatu daerah menunjukkan semakin sempit kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut.

Grafik 3.5
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 Dan Prediksi Tahun 2023



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2023, Data Diolah Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto cenderung mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020. Dari 6,82 persen pada tahun 2019 menjadi 8,20 pada tahun 2020. Angka ini merupakan angka tertinggi selama kurun waktu 2018-2022. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto pada tahun 2020 tertinggi ketiga setelah Kota Padang dan Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat, bahkan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

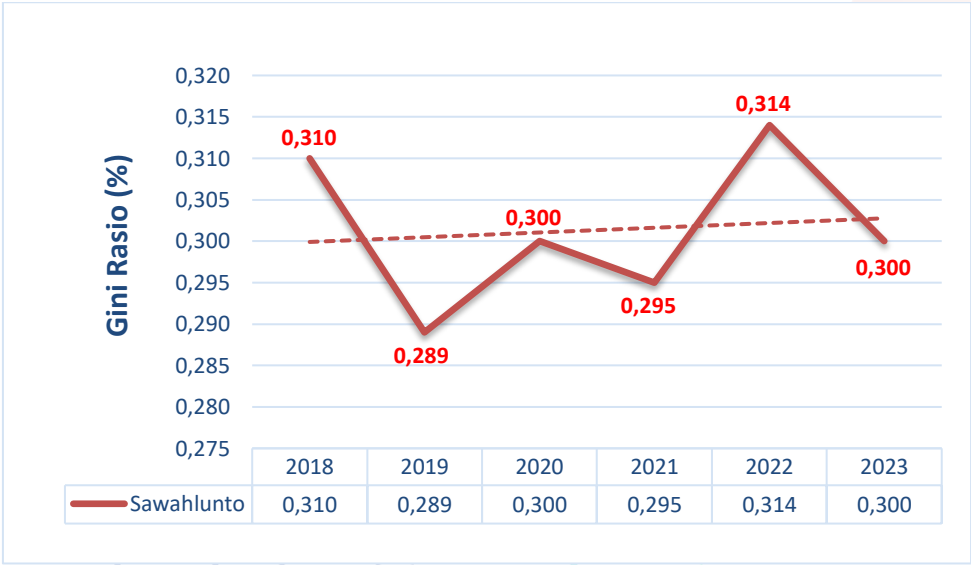
Tingginya lonjakan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 diperkirakan sebagai dampak dari kebijakan PSBB dan himbauan untuk di rumah saja sebagai langkah mengurangi wabah covid-19. Disamping itu juga adanya dugaan tambahan pengangguran

dari kepulangan para perantau yang kehilangan pekerjaan di rantau. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan jumlah penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2020 yang meningkat empat kali dari rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto per tahun selama lima tahun terakhir. Dan pada tahun 2022 dengan bangkitnya perekonomian daerah dan nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto turun hingga 5,00. Hal yang sama juga diperkirakan akan terjadi ***pada tahun 2023, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto akan turun pada angka 4,96 %*** dengan bauran kebijakan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan investasi dan membuka lapangan usaha guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka.

F. Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini adalah ukuran untuk menunjukkan "tingkat ketimpangan" pengeluaran atau pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna dari pengeluaran atau pendapatan, sedangkan apabila Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna dari pengeluaran atau pendapatan. Perubahan Indeks Gini merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran/pendapatan penduduk (Sumber : https://sirusa.bps.go.id). Jika Indeks Gini menurun berarti distribusi pengeluaran/pendapatan penduduk mengalami perbaikan, sebaliknya jika Indeks Gini meningkat berarti distribusi pengeluaran/pendapatan penduduk memburuk. Semakin tinggi Indeks Gini, berarti kelompok miskin lebih lambat untuk keluar dari kemiskinannya, sedangkan yang sudah kaya justru lebih cepat untuk bertambah kaya.

Grafik 3.6
Capaian Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022
Dan Prediksi Tahun 2023



Sumber : BPS, Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Data Diolah Tahun 2023

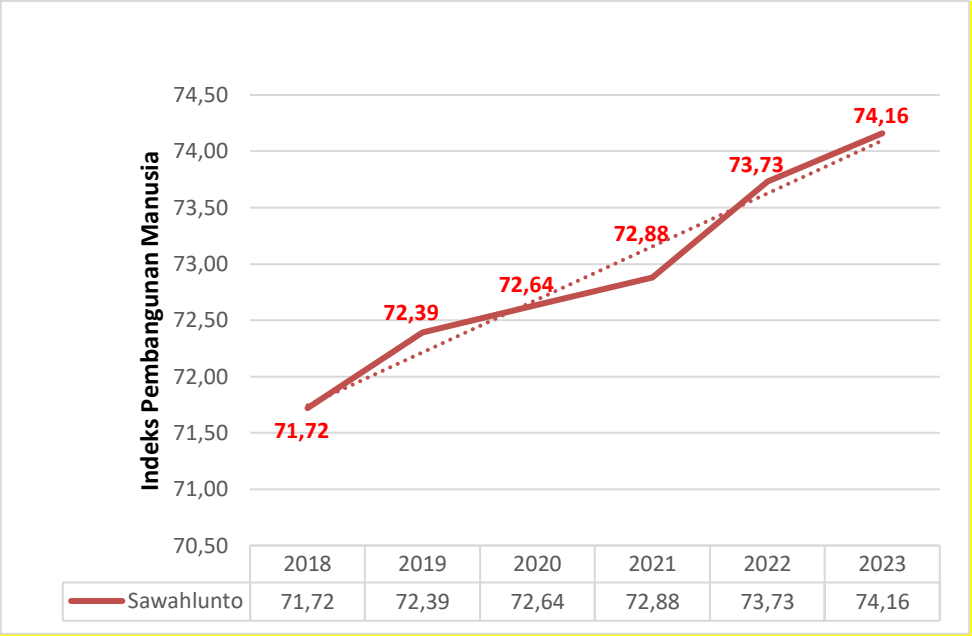
Secara umum, Gini Ratio Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, kondisi ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran/pendapatan antar penduduk di Kota Sawahlunto semakin memburuk. Ketimpangan pengeluaran/pendapatan antar penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2022 ditunjukkan oleh Gini Ratio sebesar 0,314, angka ini meningkat 6,44 % dibandingkan tahun 2021 dengan capaian 0,295. Dan ketimpangan pendapatan Kota Sawahlunto tahun 2022 ini adalah yang tertinggi ketiga di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang dan Kota Bukittinggi dengan Gini Ratio sebesar 0,354 dan 0,317. Namun ***Gini Rasio Kota Sawahlunto diperkirakan akan mampu turun lagi menjadi 0,300 pada tahun 2023*** dengan semakin membaiknya pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor swasta dan sektor informal.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu : 1). umur panjang dan hidup sehat; 2). Pengetahuan; dan 3). standard hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait dengan banyak faktor.

Berikut dapat dilihat perkembangan IPM Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 dan prediksi IPM Kota Sawahlunto tahun 2023.

Grafik 3.7
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 Dan Prediksi Tahun 2023



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Diolah 2023

Memperhatikan grafik di atas, Indeks Pembangunan Kota Sawahlunto pada kurun waktu 2018 – 2022 ***sudah mengikuti trenline*** dan cenderung lebih tinggi dari IPM Nasional dan IPM Provinsi Sumatera Barat, kecuali tahun 2018 dimana IPM Kota Sawahlunto dengan nilai 71,72 berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 71,73 namun tetap lebih tinggi dari IPM Nasional dengan nilai 71,39. Angka IPM ini berdasarkan kategori yang dikeluarkan oleh BPS termasuk ***kategori tinggi*** (70 ≤ IPM < 80). Dan pada ***tahun 2023 Indeks Pembangunan Kota Sawahlunto diperkirakan masih berada pada trenline dengan angka 74,16***. Hal ini merujuk pada semakin meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta meningkatnya aktivitas perekonomian yang berdampak pada meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat sebagai dampak dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto hingga Pemerintah Pusat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Tantangan yang perlu dicermati ke depan adalah cuaca ekstrem atau perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan dan aktivitas ekonomi. Kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian. Persoalan iklim menjadi salah satu dari empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan. Tantangan pertama adalah ketegangan geopolitik yang merupakan tantangan paling berat saat ini. Tantangan kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi digital, yang di satu sisi membawa manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi di sisi lain menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia, persoalan privasi dan keamanan siber. Tantangan ketiga adalah perubahan iklim

dan respons kebijakan yang mengikutinya. Tantangan keempat adalah covid 19, meskipun kini covid 19 telah berakhir namun kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu dibangun dari sekarang.

Selain tantangan eksternal di atas, tantangan internal yang diperkirakan akan dihadapi Kota Sawahlunto pada tahun 2024 adalah :

1. Potensi inflasi sebagai dampak dari inflasi negara maju yang akan menggerus daya beli masyarakat;
2. Konsumsi Pemerintah yang masih rendah dan terus menurun menjadi tantangan bagi Kota Sawahlunto untuk melakukan belanja yang produktif;
3. Topografi Kota Sawahlunto yang berbukit-bukit menyebabkan rawan longsor dan bencana alam lainnya membutuhkan anggaran pembangunan yang sangat besar;
4. Jumlah angkatan kerja yang besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja.

Meskipun terdapat tantangan yang bersifat eksternal dan internal dalam perekonomian Kota Sawhlunto tahun 2024, namun terdapat juga beberapa hal yang akan mendorong prospek ekonomi Kota Sawahlunto ke depan berupa dukungan dari pemerintah pusat dan regional Sumatera Barat serta pemerintah Kota Sawahlunto dengan upaya sebagai berikut :

1. Penguatan daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial untuk meningkatkan permintaan barang dan jasa guna menggerakkan dunia usaha sekaligus sebagai upaya menekan angka kemiskinan;
2. Pengembangan berbagai peluang investasi melalui kemudahan berusaha;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif bagi dunia usaha dan industri;
4. Mengembangkan produk unggulan Kota Sawahlunto melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran produk-produk unggulan;
5. Meningkatkan produktivitas produk pertanian, peternakan dan perikanan;
6. Mendorong hilirisasi industri produk pertanian dan perikanan;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pembangunan perekonomian daerah;
8. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian Kota Sawahlunto lima tahun terakhir, tantangan dan daya dukung perekonomian Kota Sawahlunto serta prediksi ekonomi makro Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, maka prediksi ekonomi makro Kota Sawahlunto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,48 %, hal ini merujuk pada perkembangan sektor utama perekonomian Kota Sawahlunto yang mulai meningkat aktivitasnya.
- Sementara tingkat inflasi Kota Sawahlunto tahun 2024 ditargetkan lebih kecil dari 3,5 % dengan asumsi Pemerintah Kota Sawahlunto mampu mengendalikan ketersediaan barang di Kota Sawahlunto sehingga harga-harga dapat dikendalikan.
- PDRB Per Kapita ADHB Kota Sawahlunto tahun 2024 ditargetkan sebesar 71,60 juta rupiah dengan asumsi pertumbuhan PDRB ADHB Kota Sawahlunto jauh lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto tahun 2024 ditargetkan turun menjadi 4,92 % karena diperkirakan dunia usaha akan mulai bangkit dan lapangan kerja/peluang kerja akan terbuka.
- Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto tahun 2024 ditargetkan turun menjadi 2,19 % dengan asumsi perlindungan sosial masih tetap dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat hingga pemerintah Kota Sawahlunto untuk penguatan ekonomi produktif.
- Indeks Gini Kota Sawahlunto tahun 2024 ditargetkan akan turun menjadi 0,289 dengan asumsi semakin membaiknya pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor swasta dan sektor informal.
- Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto tahun 2024 ditargetkan meningkat menjadi 74,74 dengan asumsi semakin meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat serta meningkatnya aktivitas perekonomian Kota Sawahlunto sehingga

pendapatan masyarakat juga meningkatkan, dan dengan demikian pengeluaran per kapita juga akan meningkat.

Tabel 3.1
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2024

No	Indikator Makro Ekonomi	Prediksi Tahun 2024	Prediksi Tahun 2025	Prediksi Tahun 2026
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,48	4,73	4,98
2	Inflasi (%)	< 3,5	< 3,5	< 3,5
3	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	71,60	74,35	77,11
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,92	4,83	4,75
5	Tingkat Kemiskinan (%)	2.19	2,18	2,17
6	Indeks Gini	0,289	0,285	0,280
7	IPM	74,74	75,24	75,74

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antar kementerian/lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah

mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
Rumusan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto untuk tahun 2024-2026 adalah Pemulihan Ekonomi Melalui Keungggulan Pariwisata dan Produk Lokal dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.
2. Peningkatan produktivitas sektoral ekonomi.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata melalui keunggulan warisan budaya dunia dan geopark.
4. Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Mall Pelayanan Publik (MPP).
6. Pemantapan reformasi birokrasi pemerintah.

3.3 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, dijabarkan sebagai berikut.

3.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja

pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.3.1.1 Pendapatan Daerah

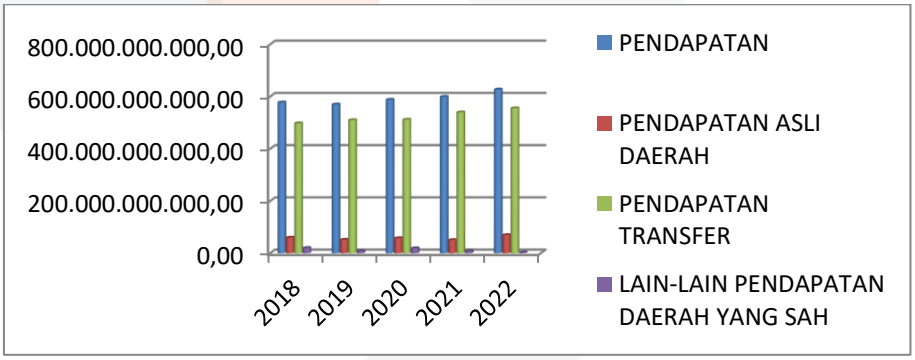
Realisasi pendapatan selama kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022

NO	URAIAN	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
	PENDAPATAN	**586.463.778.018,45**	**638.026.463.488,09**	**576.857.864.031,56**	**598.040.864.187,45**	**620.582.717.802,53**	**0,50**
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**47.227.132.335,45**	**57.170.993.865,09**	**59.537.385.897,66**	**51.475.336.271,45**	**65.877.844.019,53**	**0,85**
a	Pajak Daerah	5.546.092.124,00	5.502.589.718,00	5.602.920.091,75	**5.993.540.247,00**	**7.237.123.832,40**	**5,16**
b	Retribusi Daerah	3.533.959.570,00	3.624.747.865,00	2.788.116.593,00	**2.731.559.922,00**	**3.558.340.436,00**	**2,30**
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.983.800.455,00	10.832.616.199,00	12.026.462.819,00	**10.806.423.680,00**	**13.477.268.009,00**	**1,67**
d	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	28.163.280.186,45	37.211.040.083,09	39.119.886.393,91	**31.943.812.422,45**	**41.605.111.742,13**	**0,83**
2	**Pendapatan Transfer**	**532.012.325.683,00**	**571.997.269.623,00**	**497.369.022.340,00**	**538.147.448.116,00**	**552.087.496.083,00**	**0,51**
a	**Transfer Pemerintah Pusat**						
1	**Dana Perimbangan**						
a	**Dana Transfer Umum**						
1	Dana bagi Hasil	19.143.752.466,00	25.713.090.626,00	14.815.556.253,00	**28.949.393.592,00**	**36.873.646.167,00**	**26,89**
2	Dana Alokasi Umum	374.920.211.899,00	390.050.861.000,00	347.498.276.000,00	**341.393.550.000,00**	**340.799.183.261,00**	**-2,09**
b	Dana Transfer Khusus						
1	DAK Fisik	38.664.176.844,00	47.626.733.644,20	49.948.863.041,40	**36.226.376.563,00**	**74.358.095.142,00**	**-7,23**
2	DAK Non Fisis	25.776.117.896,00	31.751.155.762,80	33.299.242.027,60	**35.452.676.526,00**	**40.654.753.253,00**	**-0,44**
2	Dana Insentif Daerah	50.969.694.000,00	22.193.148.000,00		**37.290.036.000,00**	**5.044.116.000,00**	**84,63**
3	Dana Otonomi Khusus						
4	Dana Keistimewaan						
5	Dana Desa		28.211.222.000,00	28.631.236.000,00	**30.109.035.910,00**	**20.098.731.000,00**	**-12,94**
b	Transfer antar daerah						
1	Pendapatan Bagi hasil	22.538.372.578,00	26.451.058.590,00	23.175.849.018,00	**28.726.379.525,00**	**34.258.971.260,00**	**7,56**
2	Bantuan Keuangan					**600.000.000,00**	**-32,03**
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**7.224.320.000,00**	**8.858.200.000,00**	**19.951.455.793,90**	**8.418.079.800,00**	**2.617.377.700,00**	**855,79**
a	Hibah		8.858.200.000,00	8.148.061.693,00			**-21,60**
b	Dana darurat			11,503.247.000,00			**0,00**
c	Lain-lian pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	7.224.320.000,00		300.147.100,90	**8.418.079.800,00**	**2.617.377.700,00**	**1592,93**

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2018-2021 dan LKPD 2022 unaudited

Grafik 3.8
Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022



Dari tabel dan grafik diatas diketahui bahwa jumlah penerimaan pendapatan dari rentang waktu 2018-2022 relatif berfluktuasi. Dari tahun 2018 -2019 realisasi pendapatan mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi nasional dan daerah. Sehingga baik jumlah pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer mengalami penurunan. Hal ini berlanjut pada tahun anggaran 2021 dimana aktivitas masyarakat dan perekonomian masih dibatasi dengan kebijakan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Perkantoran (PPKM) akibat masih belum melandainya pandemi covid-19. Hal ini tampak nyata pada pendapatan retribusi daerah akibat lumpuhnya beberapa kegiatan perekonomian. Sedangkan pada tahun 2022 (data unaudited), maka tampak terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah seiring dengan makin membaiknya tingkat perekonomian daerah yakni menjadi Rp. 620.582.717.802,53 atau terdapat peningkatan sebesar 3,77% dibandingkan tahun 2021.

Sedangkan jika dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, maka diketahui bahwa Kota Sawahlunto berada pada tingkat yang sangat kurang, artinya sangat mengandalkan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi. Sedangkan jumlah PAD yang dihasilkan sangat minim, sehingga Kota Sawahlunto dikategorikan sangat tidak mandiri dalam penyediaan anggaran.

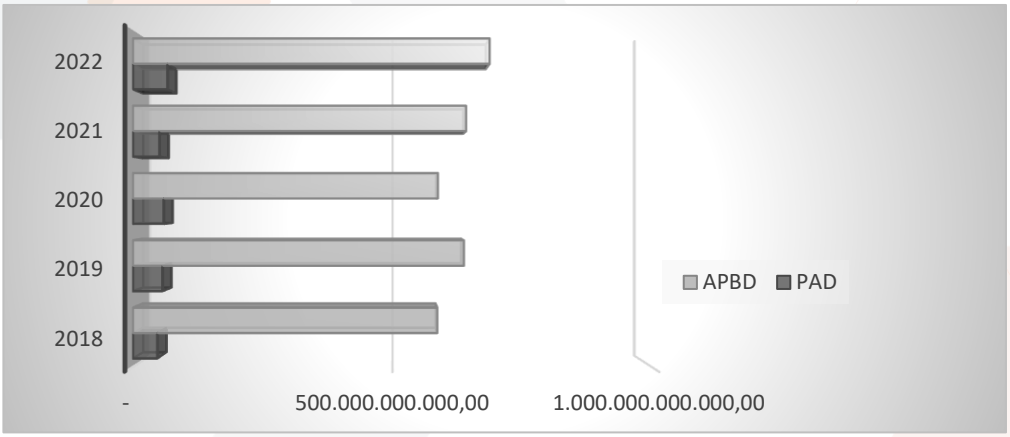
Tabel 3.3
Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)
Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	PAD	47.227.132.335,45	57.170.993.865,09	59.537.385.897,66	51.475.336.271,45	66.920.994.265,62
2	APBD	586.463.778.018,45	638.026.463.488,09	587.598.325.124,00	642.136.428.783,03	687.476.569.407,00
3	DOFD	8,05	8,96	10,13	8,02	9,73
kriteria DOFD		**Sangat Kurang**	**Sangat Kurang**	**Sangat Kurang**	**Sangat Kurang**	**Sangat Kurang**

Sumber : data LRA diolah

Pada grafik dibawah ini terlihat bahwa penerimaan PAD memberikan kontribusi yang masih rendah terhadap APBD Kota Sawahlunto, sehingga APBD Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir sangat tergantung pada penerimaan transfer dari pemerintah pusat.

Garfik 3.9
Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)
Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022



3.3.1.2 Belanja Daerah

Selain mengukur kinera APBD dari sumber pendapatan, maka kinerja APBD juga diukur dari sisi realisasi belanja pemerintah daerah.
Secara umum, komponen belanja terdiri dari :

a. transfer.
b. Realisasi belanja Belanja operasi;
c. Belanja modal;
d. Belanja tak terduga;

Realisasi Belanja Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022

URAIAN	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
BELANJA	**518.069.931.532,61**	**551.743.879.687,01**	**476.891.824.080,79**	**599.185.054.472,27**	**645.040.476.515,00**	**5,08**
Belanja Operasi	**440.209.799.134,61**	**457.292.466.687,51**	**397.517.138.143,22**	**444.009.727.121,27**	**470.076.364.155,00**	**3,78**
Belanja Pegawai	226.004.496.283,00	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00	240.644.834.014,00	259.233.838.302,00	6,75
Belanja Barang dan Jasa	195.048.782.209,00	214.487.904.967,00	115.269.632.648,50	186.235.989.165,00	191.035.682.287,00	5,43
Belanja Bunga	1.438.215.088,61	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72	796.043.279,27	891.962.272,00	-8,26
Belanja Hibah	17.718.305.554,00	5.185.275.249,00	3.309.250.287,00	13.936.860.663,00	15.083.131.294,00	73,23
Belanja Bantuan Sosial	0	3.557.137.500,00	2.950.150.000,00	2.396.000.000,00	3.831.750.000,00	
Belanja Modal	**77.527.748.798,00**	**94.384.258.018,50**	**63.699.147.392,57**	**85.611.045.938,00**	**116.556.616.400,00**	**4,49**
Belanja Modal Tanah		577.625.000,00	800.006.000,00	-		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.107.565.569,00	27.959.464.883,50	29.000.506.074,70	20.880.045.268,00	17.702.013.340,00	5,18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.568.199.763,00	12.886.728.863,00	25.216.284.417,82	14.804.687.034,00	41.519.712.400,00	30,46
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.267.197.546,00	52.411.798.670,00	8.025.081.127,05	49.683.258.936,00	57.234.931.760,00	88,28
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.584.785.920,00	548.640.602,00	657.269.773,00	243.054.700,00	99.958.900,00	-37,91

URAIAN	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
BeLanja Tak Terduga	**332.383.600,00**	**67.154.981,00**	**15.675.538.545,00**	**2.655.984.000,00**	**294.991.005,00**	**4594,22**
BeLanja Tak Terduga	332.383.600,00	67.154.981,00	15.675.538.545,00	2.655.984.000,00	294.991.005,00	4594,22
TRANSFER	**64.324.769.075,00**	**70.728.943.435,00**	**67.371.834.124,00**	**66.908.297.413,00**	**58.112.504.955,00**	**-1,65**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**941.735.998,00**	**1.006.666.600,00**	**877.460.000,00**	**885.532.503,00**	**1.046.900.955,00**	**4,46**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	552.761.999,00	597.333.800,00	566.650.000,00	885.532.503,00	637.792.686,00	-0,95
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	388.973.999,00	409.332.800,00	-		409.108.269,00	
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya			310.810.000,00			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**63.383.033.077,00**	**69.722.276.835,00**	**66.494.374.124,00**	**66.022.764.910,00**	**57.065.604.000,00**	**-1,73**
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	62.855.994.917,00	69.171.227.892,00	65.909.710.000,00	66.022.764.910,00	57.065.604.000,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	527.038.160,00	551.048.943,00	584.664.124,00	0,00	0,00	-37,70

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2018-2021 dan LRA Kota Sawahlunto TA 2022 (unaudited)

Untuk realisasi belanja selama kurun waktu tersebut, belanja menunjukkan angka yang relatif berfluktuasi. Dalam rentang waktu 2018-2019 terdapat peningkatan belanja, sedangkan pada tahun 2020 belanja juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan jumlah pendapatan. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 sehingga banyaknya program dan kegiatan yang telah direncanakan mengalami pembatalan dan tidak terlaksana. Ini juga merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan atas dana transfer ke daerah. Pada tahun 2021 belanja kembali mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 2022 (data unaudited), terdapat realisasi belanja menjadi Rp. 645.040.711.829,53 atau terdapat peningkatan rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 5,08%.

Grafik 3.10
Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, belanja didominasi oleh belanja pegawai yakni sebesar 40,28% dari total belanja, sedangkan belanja barang dan jasa sebesar 29,62% sedangkan belanja modal sebesar 18,10%.

3.3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada anggaran tahun-tahun berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang;dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Realisasi pembiayaan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Pembiayaan Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH	**6.946.009.591,87**	**12.937.426.797,11**	**13.393.565.535,47**	**44.095.564.695,58**	**38.757.801.454,76**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	6.814.084.391,87	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76
Pencairan Dana Cadangan					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah		8.008.445.961,06			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	131.925.200,00	80.560.500,00	24.513.000,00	26.460.000,00	38.093.710,00
Penerimaan Piutang Daerah					
Jumlah	**6.946.009.591,87**	**12.937.426.797,11**	**13.393.565.535,47**	**44.095.564.695,58**	**38.757.801.454,76**
PENGELUARAN DAERAH					
Penyertaan Modal Daerah			0	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	1.166.666.666,66	9.175.112.627,72	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66	1.166.666.668,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.946.902.000,00	752.000.000,00	65.000.000,00	470.000.000,00
Jumlah	**6.166.666.666,66**	**15.122.014.627,72**	**1.918.666.666,66**	**1.231.666.666,66**	**3.636.666.668,00**
Pembiayaan Neto	**779.342.925,21**	**-2.184.587.830,61**	**11.474.898.868,81**	**42.863.898.028,92**	**35.121.134.786,76**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**4.848.420.336,05**	**13.369.052.535,47**	**13.393.565.535,47**	**44.095.564.695,58**	**12.114.946.259,38**

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2018-2021 dan LRA Kota Sawahlunto TA 2022 (unaudited)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama dua tahun terakhir jumlah SILPA menujukkan angka yang relatif besar akibat terjadinya badai covid 19 dan PPKM sehingga banyak program dan kegiatan yang tidak terealisasi. Pada Tahun 2022 (data unaudited) terjadi penurunan SiLPA diakibatkan makin membaiknya tingkat perekonomian sehingga program dan kegitan yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Sedangkan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari baru bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2021 dan 2022.

3.3.2 Permasalahan Umum Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

3.3.2.1 Permasalahan Umum Pendapatan Daerah

Permasalahan utama pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2018-2022 adalah :

1. Tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sawahlunto terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi. Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan hanya berkisar 8-11%. Pendapatan Kota Sawahlunto sangat bergantung pada penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
2. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dan stabilitas nasional menyebabkan adanya penyesuaian dan perubahan pada postur APBN yang berdampak pada penyaluran dana transfer dan dana desa. Ditambah dengan aturan pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis dan mengalami perubahan aturan, misalnya kebijakan restrukturisasi anggaran.
3. Hak-hak pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil belum optimal karena kurang akuratnya alokasi untuk pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber penerimaan PAD. Berdasarkan data laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir ini, maka dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kecil. Perlu dilakukan kajian dan inventarisasi terhadap pengoptimalan pemanfaatan barang milik daerah demi peningkatan pendapatan. Masih banyaknya potensi pendapatan yang belum tergali serta aset barang milik daerah yang bersifat idle mengakibatkan kerugian bagi Kota Sawahlunto.
5. Belum optimalnya kinerja keuangan beberapa unit usaha daerah sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah. Pada Kota Sawahlunto, beberapa unit usaha belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap pendapatan daerah. Penerimaaan hanya diperoleh dari Bank Nagari berupa dividen atas penyertaan modal pada bank tersebut. Sedangkan dari BUMD yang ada, akibat kerugian yang diderita BUMD tersebut sehingga belum mampu memberikan kontribusi pendapatan.
6. Masih terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi sehingga diperlukan perbaikan tata kelola dan administrasi menjadi lebih efisien.
7. Masih rendahnya ketaatan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

3.3.2.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah

Permasalahan utama belanja daerah adalah keterbatasan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan belanja daerah yang makin meningkat serta persentase belanja yang belum sesuai dengan aturan mandatory spending.

3.3.2.3 Permasalahan Utama pembiayaan Daerah

Permasalahan pembiayaan pada Kota Sawahlunto adalah tingginya tingkat SiLPA dikarenakan banyaknya Program dan Kegitan yang tidak terealisasi sehingga SiLPA tersebut digunakan untuk menutupi beban belanja tahun berikutnya (defisit) serta pengembalian pinjaman daerah yang tidak sesuai dengan penganggaran. Hal tersebut berdampak pada penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto.

3.3.3 Kebijakan Terhadap Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto

3.3.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto yang telah diambil sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, perbaikan administrasi perpajakan dan peningkatan kerja sama dengan stake holder.
2. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui pengembangan aplikasi sistem pemungutan secara elektronik dan push android yang menyajikan tagihan secara real time dan dukungan transaksi non tunai.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan secara tepat dan kondusif melalui pelatihan, pelayanan yang mudah dan berkualitas serta edukasi dan hubungan masyarakat yang efektif.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung peningkatan pendapatan daerah.
5. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

3.3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah Kota Sawahlunto

Kebijakan Belanja Daerah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya.
6. Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya paling sedikit meliputi:
   a. dukungan program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka

meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
b. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
c. dukungan pelaksanaan program vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
d. dukungan kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
e. insentif tenaga kesehatan untuk penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019;
f. dukungan penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019 skala desa; dan
g. belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

7. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
8. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.

3.3.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk:

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

3.3.4 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Neraca Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

Uraian	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	Pertumbuhan rata-rata
ASET						
Aset Lancar	18.433.789.335,90	37.219.485.368,40	52.748.532.582,88	54.786.319.119,00	36.159.619.728,89	20,78
Investasi Jangka Panjang	104.537.898.751,32	101.115.725.996,06	101.867.725.996,06	104.963.129.655,56	105.074.549.809,75	0,58
Aset Tetap	725.089.573.083,69	610.763.954.775,30	802.873.919.535,36	809.890.893.290,38	826.474.356.284,20	4,75
Dana Cadangan						0,00
Aset Lainnya	21.093.479.260,55	20.607.403.558,45	20.294.034.832,45	23.824.772.987,25	26.499.810.585,45	35,03
JUMLAH ASET	**869.154.740.431,46**	**769.706.569.698,21**	**977.784.212.946,75**	**993.465.115.052,19**	**994.208.336.408,29**	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek	5.686.488.882,05	9.600.519.502,67	6.525.554.960,71	11.590.811.435,33	10.159.415.772,00	7,21
Kewajiban Jangka Panjang	19.335.135.758,55	19.424.375.712,52	17.105.192.770,14	9.333.333.111,03	8.166.666.441,03	-16,44
JUMLAH KEWAJIBAN	**25.021.624.640,60**	**29.024.895.215,19**	**23.630.747.730,85**	**20.924.144.546,36**	**18.326.082.213,03**	
EKUITAS						
SILPA						
Pendapatan yang ditangguhkan						
Cadangan Piutang						
Cadangan Persediaan						
Dana Untuk Pembayaran Utang Jk Pendek						
EDL Bukan Silpa						
Ekuitas Dana Investasi						
JUMLAH EKUITAS	**844.133.115.790,86**	**740.681.674.483,02**	**954.153.465.215,90**	**972.540.970.505,83**	**975.882.254.195,26**	5,36
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**869.154.740.431,46**	**769.706.569.698,21**	**977.784.212.946,75**	**993.465.115.052,19**	**994.208.336.408,29**	4,63

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2018-2021 dan LKPD 2022 unaudited

a) Aset

Aset Pemerintah Kota Sawahlunto selama periode Tahun 2018 – 2022 secara total mengalami penambahan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Terdapat penambahan pada aset lancar dan aset tetap dan aset lainnya dengan nilai yang cukup signifikan , sedangkan untuk investasi jangka panjang tidak mengalami penambahan yang berarti. Rata-rata pertumbuhan aset selama 5 tahun terakhir adalah 20,78%. Namun pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah aset akibat kecilnya kas pada Kasda (SiLPA) pada akhir tahun 2022.

b) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Kota Sawahlunto selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuasi antar waktu, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar -9,22 %. Kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka pendek dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 7,21% . Kewajiban jangka pendek ini merupakan pinjaman RSUD selaku BLUD ke pihak perbankan dan kewajiban jangka panjang mengalami pengurangan akibat telah dilakukan kewajiban pembayaran atas tagihan pokok Bank Dunia atas pembangunan pasar Kota Sawahlunto.

c) Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto selama Tahun 2018 - 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun . Berdasarkan data yang dijelaskan di atas, maka dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Adapun rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun pada periode 2018 sampai 2022 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7
Rasio Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun 2016-2022

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio lancar (current ratio)	3,74	1,22	3,24	3,88	8,08	4,73	3,56
2	Rasio quick (quick ratio)	2,94	0,89	2,33	3,06	7	4,12	1,57
3	Debt to aset ratio	0,05	0,05	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02
4	Debt to equity ratio	0,05	0,05	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02

Sumber : Data LRA 2016-2022 diolah

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan sebagai berikut.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Pemerintah Kota yaitu:

1. Rasio lancar (current ratio)
   Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio cepat (quick ratio)
   Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset
   Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.
2. Rasio Hutang Terhadap Modal
   Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kota Sawahlunto, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.3.5 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota

Sawahlunto pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Pemerintah Kota Sawahlunto. Dimana rata-rata selama 5 tahun terakhir, serapan realisasi terhadap anggaran belanja adalah diatas 90 persen.

Tabel 3.8
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kota Sawahunto Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		%	%	%	%	%
	BELANJA					
A	**Belanja Operasi**					
1	Belanja Pegawai	95,73	95,78	93,73	96,21	97,24
2	Belanja Barang dan Jasa	87,11	87,9	88,13	87,16	90,83
3	Belanja Bunga	91,94	83,42	76,83	79,6	100,00
4	Belanja Hibah	93,36	84,45	96,53	96,23	90,12
5	Belanja Bantuan Sosial	-	92,48	94,65	99,76	97,80
6	Belanja Bantuan Keuangan	99,36	100,00	100,00	100,00	100,00
B	**Belanja Modal**					
1	Belanja Modal Tanah	-	96,27	95,59	-	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90,76	82,57	92,55	79,52	88,27
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79,95	59,07	95,4	79,74	95,94
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	79,66	73,49	37,53	94,27	92,40
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	93,34	70,36	99,39	93,96	95,93
C	**Belanja Tak Terduga**					
1	BeLanja Tak Terduga	44,32	8,95	56,92	73,05	13,08
	TRANSFER					
D	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**					
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	100	100	100	94,16	87,582
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	100	100	100	100	100
3	Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	
E	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**					
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	99,05	100	100	100
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	

Sumber : Data LRA 2018-2022 diolah

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kota Sawahlunto ditampilkan pada tabel di bawah. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Sawahlunto Tahun 2018– 2022

No	Uraian	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
1	Belanja gaji dan tunjangan	132.746.984.175,00	137.033.482.750,00	174.875.001.175,00	240.644.834.014,00	259.237.850.902,00
2	Belanja tambahan penghasilan	85.968.423.996,00	87.962.530.425,00	70.901.646.348,00	83.111.407.478,00	91.603.469.551,00
3	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	4.621.800.000,00	4.406.800.000,00	5.619.355.084,00	7.246.342.495,00	8.309.013.178,00
5	Insentif pemungutan pajak	335.254.026,00	349.683.311,00	349.056.090,00	39.148.988,00	47.121.501,00

No	Uraian	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
	dan retribusi daerah					
6	Uang Lembur	-	1.884.157.250,00	603.516.000,00	878.884.000,00	600.543.500,00
7	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	2.332.034.086,00	1.174.197.293,00	833.543.254,00	6.163.801.200,00	7.747.028.592,00
8	Belanja beasiswa pendidikan PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		
9	Belanja kursus, pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.315.694.405,00	5.811.951.767,00	1.643.340.470,00	2.070.322.072,00	2.075.297.082,00
10	Belanja premi asuransi kesehatan	3.984.151.576,00	10.982.757.400,00	10.853.606.292,00	12.730.744.915,00	13.061.577.339,00
11	Belanja makanan dan minuman pegawai	7.090.622.609,00	7.178.309.044,00	4.683.978.668,00	7.222.835.343,00	8.569.948.765,00
12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	2.076.775.950,00	2.254.637.675,00	790.625.100,00	1.061.243.850,00	1.088.299.927,00
13	Belanja perjalanan dinas	25.837.531.213,00	28.323.431.379,00	16.841.043.377,00	22.374.079.104,00	29.235.487.808,00
14	Belanja modal (Kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	11.040.452.705,00	11.105.669.680,00	29.000.506.074,70	20.880.045.268,00	17.666.803.013,00
	Total	**280.389.724.741,00**	**298.507.607.974,00**	**317.035.217.932,70**	**404.423.688.727,00**	**439.242.441.158,00**

Sumber Data : LRA Kota Sawahlunto 2018-2022 (diolah)

Tabel 3.10
Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2018	280.389.724.741,00	524.236.598.199,27	53,49
2	Tahun Anggaran 2019	298.507.607.974,00	566.865.894.314,73	52,66
3	Tahun Anggaran 2020	316.985.217.927,70	478.810.490.747,45	66,2
4	Tahun Anggaran 2021	404.423.688.727,00	643.280.619.167,85	62,73
5	Tahun Anggaran 2022	439.242.441.158,00	682.411.216.195,76	64,28

Sumber Data : LRA Kota Sawahlunto 2018-2022 (diolah)

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif fluktuatif antar tahun pada periode Tahun 2018–2022. Dari tabel diatas dapat diketahui lebih besar belanja untuk kebutuhan aparatur dibandingkan dengan belanja pembangunan.

3.3.6 Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
A	**Belanja Wajib**	**225.717.159.257,61**	**301.383.054.552,51**	**275.438.945.198,72**	**315.714.178.555,27**	**326.813.257.336,00**
1	Belanja gaji dan tunjangan	218.715.408.171,00	224.996.013.175,00	203.207.239.715,00	240.644.834.014,00	259.237.850.902,00
2	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	4.621.800.000,00	4.406.800.000,00	3.707.355.084,00	7.365.003.849,00	8.570.939.207,00
3	Belanja bunga	1.438.215.088,61	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72	796.043.279,27	891.962.272,00
4	Belanja bagi hasil	941.735.998,00	70.728.943.435,00	67.371.834.124,00	66.908.297.413,00	58.112.504.955,00
B	**Belanja Mengikat**	**17.806.998.884,66**	**25.476.129.986,72**	**12.560.861.584,66**	**11.477.465.791,00**	**14.432.425.180,00**
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	-	-	-		
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, telepon, air dan sejenisnya)	15.264.842.536,00	15.738.702.376,00	10.818.851.033,00	8.621.919.998,00	11.170.617.567,00
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1.335.489.682,00	522.314.983,00	535.343.885,00	1.688.879.127,00	2.095.140.945,00
5	Pembentukan dana cadangan	-				
6	Pembayaran pokok hutang	1.166.666.666,66	9.175.112.627,72	1.166.666.666,66	1.166.666.666,00	1.166.666.668,00
	A + B	**243.524.158.142,27**	**326.859.184.539,23**	**287.999.806.783,38**	**327.191.644.346,27**	**341.245.682.516,00**

Sumber Data : LRA Kota Sawahlunto 2018-2022 (diolah)

Tabel 3.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Proporsi dari total defisit ril				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	**Surplus (Defisit) Riil**	**4.069.077.410,84**	**17.038.640.366,08**	**32.594.205.826,77**	**- 1.144.190.284,82**	**- 23.006.188.527,38**
1	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan	6.946.009.591,87		13.393.565.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	6.814.084.391,87	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76

No	Uraian	Proporsi dari total defisit ril				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	131.925.200,00	80.560.500,00		26.460.000,00	38.093.710,00
5	Pinjaman Dalam Negeri					
6	Penerimaan Piutang Daerah		8.008.445.961,06	-		
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	6.946.009.591,87	12.937.426.797,11	13.369.052.535,47	44.095.564.695,58	38.757.801.454,76

Sumber Data : LRA Kota Sawahlunto 2018-2022 (diolah)

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.Data Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif.

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13
SILPA Kota Sawahlunto
Tahun 2018-2022

No	Uraian	SILPA
1	Tahun Anggaran 2018	4.848.420.336,05
2	Tahun Anggaran 2019	13.369.052.535,47
5	Tahun Anggaran 2020	44.069.104.695,58
4	Tahun Anggaran 2021	38.719.707.744,76
5	Tahun Anggaran 2022	12.114.946.259,38

Sumber Data : LRA Kota Sawahlunto 2018-2022

3.4 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.4.1 Proyeksi Serta Kebijakan Pendapatan dan Belanja Tahun 2024-2026

3.4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 dilakukan dengan beberapa cara berikut:

1. Intensifikasi PAD, melalui:

a. Optimalisasi sistem pajak on line dengan menambahkan peralatan berupa tapping box (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
b. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan SKPD kurang bayar kepada wajib pajak.
c. Penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
d. Optimalisasai Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitan SDM perpajakan.
e. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
f. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
g. Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
h. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
i. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.

2. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, melalui:
   a. Perubahan tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
   b. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan tax bassed) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
   c. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

3.4.1.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

Dengan menerapkan kebijakan atas pendapatan tersebut, maka diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan pendapatan seperti tampak pada tabel proyeksi dibawah ini.

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan 2024 – 2026
Kota Sawahlunto

Uraian	PROYEKSI		
	2024	2025	2026
	Anggaran	Anggaran	Anggaran
PENDAPATAN	**642.197.680.422,07**	**684.859.620.044,81**	**736.252.581.122,77**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**72.099.421.517,21**	**81.234.998.176,35**	**88.146.860.451,92**
Pendapatan Pajak Daerah	8.596.755.200,32	9.886.268.480,36	11.369.208.752,42
Pendapatan Retribusi Daerah	5.596.184.303,15	6.537.048.215,10	7.636.095.784,48
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.691.025.315,44	19.194.679.112,76	21.126.203.428,48
Lain-lain PAD yang Sah	41.215.456.698,30	45.617.002.368,13	48.015.352.486,54
PENDAPATAN TRANSFER	**566.798.258.904,86**	**600.274.621.868,46**	**644.705.720.670,86**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**539.945.974.716,07**	**571.621.932.525,85**	**614.131.911.724,39**
Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak	32.645.720.400,00	39.174.864.480,00	47.009.837.376,00
Dana Alokasi Umum	366.966.803.500,00	377.975.807.605,00	396.874.597.985,25
Dana Alokasi Khusus	119.695.056.570,74	133.695.018.346,41	149.332.465.707,00
Dana Insentif Daerah	-	-	-
Dana Desa	20.638.394.245,33	20.776.242.094,44	20.915.010.656,14
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**26.852.284.188,79**	**28.652.689.342,62**	**30.573.808.946,47**

Uraian	PROYEKSI		
	2024	2025	2026
	Anggaran	Anggaran	Anggaran
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.852.284.188,79	28.652.689.342,62	30.573.808.946,47
Bantuan Keuangan			
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**3.300.000.000,00**	**3.350.000.000,00**	**3.400.000.000,00**
Pendapatan Hibah			
Pendapatan Lainnya	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**
Bantuan Keuangan	800.000.000,00	850.000.000,00	900.000.000,00

Sumber Data : APBD Kota Sawahlunto 2022-2023 (data diolah)

3.4.1.3 Kebijakan Belanja Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

1. Pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan.
2. Penggunaan anggaran diprioriotaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan berkelanjutan.
3. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Setiap program kegiatan pada SKPD harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program kegiatan dimaksud ditunjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja.
5. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
   b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
   c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
   d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM bidang Pendidikan Dialokasikan anggarannya untuk dapat menjamin pemenuhan dan pencapaian :

- Standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
- Standar peserta didik yakni perlengkapan dasar Peserta Didik dengan Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun, dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester, yang hanya diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- Pembiayaan Pendidikan.
- Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
- Kualitas Kepala Sekolah paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, pada setiap Satuan Pendidikan.
- Kualitas tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Pengalokasian anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini;
2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.
4) 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan Alokasi anggaran diprioritaskan untuk:

- Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), Tablet tambah darah, Alat deteksi risiko ibu hamil, Kartu ibu/rekam medis ibu, dan Buku KIA.
- Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi Dokter/ dokter spesialis kebidanan atau Bidan atau Perawat.
- Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai : (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4), (2) Standar kualias yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes Laboratorium, Tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling), (3) Menjamin ketersediaan Formulir partograf, Tablet tambah darah, Alat deteksi risiko ibu hamil, Kartu ibu/rekam medis ibu, dan Buku KIA, (4) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi Dokter/ dokter spesialis kebidanan atau Bidan atau Perawat serta (5) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- Menjamin ketersediaan Vaksin Hepatitis B0, Vitamin K1 Injeksi, Salep/tetes mata antibiotic, Formulir Bayi Baru Lahir, Formulir MTBM, dan Buku KIA. - Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi Dokter/ dokter spesialis anak atau Bidan atau Perawat.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi : (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal. (2) Standar

kualitas yakni Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam), dan Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

- Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, Formulir DDTK, Buku KIA, Vitamin A Biru, Vitamin A Merah, Vaksin imunisasi dasar, Vaksin imunisasi lanjutan, Jarum suntik dan BHP, dan Peralatan anafilaktik.
- Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi Dokter, atau Bidan, atau Perawat dan Gizi dan Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti Guru PAUD dan Kader kesehatan.
- Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi : (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 - 11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi. (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- Menjamin ketersediaan Buku Rapor Kesehatanku, Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner Skrining Kesehatan, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
- Menjamin ketersediaan tenaga Kesehatan yakni Dokter/ dokter gigi, atau Bidan, atau Perawat, Gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatanterlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni Guru, Kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah, meliputi :
- Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera serta tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan
- Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
- Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko. (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- Menjamin ketersediaan Strip uji pemeriksaan (Gula darah dan Kolesterol), Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G), dan Buku Kesehatan Lansia
- Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi (1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan

penyakit tidak menular ang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah, Pemeriksaan gangguan mental, Pemeriksaan gangguan kognitif, Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan Anamnesa perilaku berisiko: (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.

- Menjamin ketersediaan Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE, Tensimeter, dan Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM.
- Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi: (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan. (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- Menjamin ketersediaan Glukometer, Strip tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet, Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM dan Pedoman dan media KIE.
- Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru, Kit berisi 2 Alat Fiksasi, Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan, dan Media KIE.
- Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi: (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni Pemeriksaan status mental dan Wawancara; (2) Edukasi: (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan (4) Edukasi kepatuhan minum obat (5) Melakukan rujukan jika diperlukan
- Menjamin ketersediaan Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), Reagen Zn TB, Masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, Catridge Tes cepat Molekuler, Formulir pencatatan dan pelaporan, Pedoman/ standar operasional prosedur.
- Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), Penata Rontgen, Tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda. (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis. (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan (4) Melakukan rujukan jika diperlukan
- Menjamin ketersediaan Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, Tes Cepat HIV (RDT) pertama), Bahan medis habis pakai, Alat tulis, Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.
- Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau Perawat, Bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain Pendamping dan Penjangkauan.

- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Belanja daerah harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
2) 100% Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan
3) 100% Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan
4) 100% Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan
5) 100% Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan
6) 100% Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan
7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan
8) 100% Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan
9) 100% Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan
10) 100% Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
11) 100% Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan Kesehatan
12) 100% Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota harus diprioritaskan kepada sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air terlayani melalui sistem penyediaan air minum.
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/kota, yang terdiri dari :

1) 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dialokasikan anggarannya yang mencukupi untuk

menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani,

- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota melalui tahapan Pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, dan Pelaksanaan rehabilitasi rumah.

- Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana, dan Pembangunan Rumah.
- Pembangunan Baru/Relokasi Korban Bencana melalui tahapan Pengadaan Lahan, Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni, Pembangunan Rumah Khusus + PSU.
- Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota untuk menjamin terlaksananya penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk menjamin terlaksananya penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana untuk terlaksananya respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian,

pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk menjamin terlaksananya layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;

- Investigasi Kejadian Kebakaran untuk menjamin terlaksananya layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran untuk menjamin terlaksananya layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota guna menjamin terlaksananya Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

1) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada;
2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
3) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota

f. SPM Sosial

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, yakni:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang dapat menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa: a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu. b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang

Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan Kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi social dan rujukan

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang dapat menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa: a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/ kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti;
4) 100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti
5) 100% Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3.4.1.4 Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan data realiasi pada tahun-tahun sebelumnya serta penerapan kebijakan belanja yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka dapat disusun proyeksi belanja 3 tahun ke depan yakni untuk tahun 2024-2026 yang tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2024 – 2026

Uraian	PROYEKSI		
	2024	2025	2026
	Anggaran	Anggaran	Anggaran
BELANJA	**669.390.848.954,95**	**715.447.702.325,62**	**766.844.613.831,22**
Belanja Operasi	**512.863.877.350,52**	**536.388.543.773,20**	**555.202.373.428,45**
Belanja Pegawai	264.499.998.448,67	269.789.998.417,64	283.279.498.338,52
Belanja Barang dan Jasa	221.275.601.302,08	238.977.649.406,25	243.757.202.394,37
Belanja Bunga	1.233.347.293,29	1.216.916.436,70	1.200.704.474,69
Belanja Hibah	22.659.870.306,48	23.113.067.712,61	23.575.329.066,86
Belanja Bantuan Sosial	3.195.060.000,00	3.290.911.800,00	3.389.639.154,00
Belanja Modal	**101.225.753.446,36**	**126.653.887.789,04**	**162.200.651.000,82**
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.124.131.646,40	6.905.511.899,44	6.560.236.304,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.402.452.640,06	56.563.433.696,08	73.532.463.804,91
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.557.469.803,75	63.068.963.764,50	81.989.652.893,85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	141.699.356,15	115.978.429,02	118.297.997,60
BeLanja Tak Terduga	**2.368.036.625,50**	**2.368.036.625,50**	**2.368.036.625,50**
BeLanja Tak Terduga	2.368.036.625,50	2.486.438.456,78	1.740.506.919,74
TRANSFER	**52.933.181.532,57**	**50.037.234.137,89**	**47.073.552.776,44**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**1.340.624.127,48**	**1.439.522.239,04**	**1.439.522.239,04**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	789.327.000,00	805.113.540,00	821.215.810,80
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	551.297.127,48	634.408.699,04	730.049.872,13
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**51.592.557.405,09**	**48.597.711.898,85**	**45.634.030.537,40**
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	51.592.557.405,09	48.597.711.898,85	45.776.711.227,15
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			

Sumber Data : APBD Kota Sawahlunto 2022-2023 (data diolah)

3.4.1.5 Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026

Kebijakan pembiayaan daerah Kota Sawahlunto yakni melakukan rasionalisasi terhadap belanja daerah sehingga tingkat defisit berada pada posisi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.4.1.6 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan data 3 tahun sebelumnya, maka dapat disusun proyeksi pembiayaan 3 tahun ke depan.

Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2024 -2026

Uraian	2024	2025	2026
Total Defisit	**- 27.193.168.532,88**	**- 30.588.082.280,81**	**- 30.592.032.708,45**
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN DAERAH	**28.859.835.199,54**	**32.254.748.947,47**	**32.258.699.375,11**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	16.800.268.415,54	20.195.182.163,47	20.199.132.591,11
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
Penerimaan Pinjaman Daerah			

Uraian	2024	2025	2026
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.059.566.784,00	12.059.566.784,00	12.059.566.784,00
Penerimaan Piutang Daerah			
Jumlah	**28.859.835.199,54**	**32.254.748.947,47**	**32.258.699.375,11**
PENGELUARAN DAERAH			
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	
Pembayaran Pokok Utang	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66
Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Jumlah	**1.666.666.666,66**	**1.666.666.666,66**	**1.666.666.666,66**
Pembiayaan Netto	**27.193.168.532,88**	**30.588.082.280,81**	**30.592.032.708,45**

Sumber : APBD Kota Sawahlunto 2021-2023 (data diolah)

3.4.1.7 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow programme) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) terdiri atas : Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun prioritas anggaran untuk pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan pelayanan dasar,
c. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

NO	Proyeksi	2024	2025	2026
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah			
1	**Prioritas I**	401.634.509.372,97	429.268.621.395,37	460.106.768.298,73
2	**Prioritas II**	267.756.339.581,98	286.179.080.930,25	306.737.845.532,49

Sumber : APBD Kota Sawahlunto 2022-2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jika kemampuan keuangan daerah Kota Sawahlunto hanya mampu membiayai prioritas I dan II yakni untuk belanja wajib dan mengikat dan pemenuhan *mandatory spending*.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Sawahlunto dengan luas lahan 27.345 hektar, memiliki lahan dengan kelas kemiringan 25-40 % dan > 40% sebesar 16.621 hektar, sehingga sangat rentan terhadap bencana longsor. Kerawanan bencana gerakan tanah atau longsoran di Kota Sawahlunto cukup bervariatif dari mulai kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi gempa bumi, sedangkan longsoran dan struktur patahan akan cenderung mejadi kendala dalam pembangunan wilayah, inilah yang menjadi masalah secara aspek geografi, sedangkan dari aspek demografi kota Sawahlunto yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang menunjukkan angka positif serta menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan pangan, berbagai sarana prasarana dan fasilitas-fasilitas umum, fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan lainnya agar kesejahteraan penduduk terjamin.

4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pemulihan Pertumbuhan Perekonomi

Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak 2019 telah mempengaruhi sendi perekonomian di Kota sawahlunto, Provinsi sumatera barat dan negara Republik Indonesia bahkan dunia. Hal ini terlihat dari kontraksi perekonomian daerah di tahun 2020. Sebelum terjadinya pandemi covid 19, sampai dengan tahun 2020, Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota sawahlunto mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 5,75 % tahun 2017 menjadi 5,31 % tahun 2019. Pada saat terjadinya pandemi, Pertumbuhan ekonomi di Kota Sawahlunto mengalami kontrasi sebesar -1,27 % ditahun 2020. Walaupun terjadi penurunan, pertumbuhan ekonomi Korta Sawahlunto ini masih berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi sumatera Barat. Setelah terjadinya pandemi covid 19, ekonomi daerah secara regional dan nasional mengalami penguatan dan pertumbuhan yang signifikan. Akan tetapi, untuk kota sawahlunto, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak setinggi provinsi dan nasional. Hal ini terlihat dari Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2022 sebesar 3,98 % berada dibawah provinsi dan Nasional yang berturut-turut sebesat 4,36 % dan 5,31 %. Padahal sebelumnya 2018-2020 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota sawahlunto lebih tinggi daripada Provinsi dan Nasional. Pada tingkat regional Sumatera Barat, pada tahun 2022 Kota sawahlunto merupakan kab/kota dengan pertumbuhan ekonomi terendah kedua setelah Kabupaten Sijunjung dari 19 kab/kota di sumatera Barat, seperti terlihat pada tabel berikut:

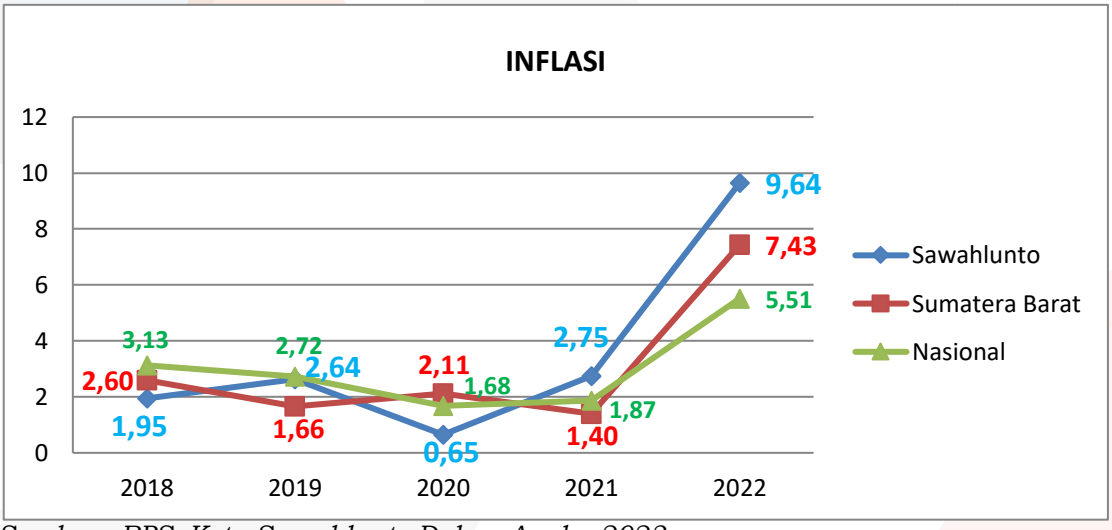
Tabel 4.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

NO	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kepulauan Mentawai	4,89	4,73	-1,85	2,89	4,94
2	Pesisir Selatan	5,32	4,78	-1,11	3,37	4,02
3	Kab.Solok	5,19	5,04	1,12	3,32	4,31
4	Sijunjung	5,07	4,80	-1,1	3,15	3,95
5	Tanah Datar	5,05	4,98	-1,13	3,30	4,20
6	Padang Pariaman	5,44	2,40	-10,47	2,18	6,87
7	Agam	5,23	4,80	-1,38	3,70	4,21
8	Lima Puluh Kota	5,23	5,06	-1,16	3,33	4,04
9	Pasaman	4,97	4,80	-0,87	3,39	4,09
10	Solok Selatan	5	4,86	-1,24	3,35	4,02
11	Dharmasraya	5,28	4,94	-1,39	3,42	4,28
12	Pasaman Barat	5,21	4,45	-1,34	3,75	4,17
13	Padang	6,06	5,65	-1,86	3,66	4,33
14	Kota Solok	5,65	5,49	-1,42	3,56	4,60
15	Sawahlunto	5,5	5,31	-1,27	2,49	3,98
16	Padang Panjang	5,71	5,56	-1,44	3,46	4,39
17	Bukittinggi	6	5,84	-1,74	3,61	4,68
18	Payakumbuh	6,02	5,89	-1,66	3,58	4,52
19	Pariaman	5,47	5,30	-1,32	3,53	4,55
Provinsi Sumatera Barat		5,14	5,01	-1,60	3,29	4,36
Nasional		5,17	5,02	2,07	3,69	5,31

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

Tertekannya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto yang hanya mencapai 3,98 % dan merupakan kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan terendah kedua setelah Kabupaten Sijunjung salah satunya disebabkan oleh tingginya laju inflasi Kota Sawahlunto pada tahun 2022. Laju inflasi Kota Sawahlunto selama tahun 2018–2022 cukup terkendali di bawah 3 %, namun pada tahun 2022 laju inflasi Kota Sawahlunto meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 9,64 %. Adapun perbandingan laju inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada grafik berikut ini:

Grafik 4.1
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023
BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa laju inflasi Kota Sawahlunto, laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan laju inflasi Nasional selama periode 2018-2022 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kota Sawahlunto mengalami inflasi terendah pada tahun 2020 saat covid 19 melanda dengan laju inflasi sebesar 0,65%. Hal yang sama juga terjadi pada laju inflasi Nasional dengan laju inflasi sebesar 1,68%. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat justru mengalami laju inflasi terendah setelah covid 19 usai pada tahun 2021 dengan laju inflasi sebesar 1,40 %. Pada tahun 2022 Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sama-sama mengalami laju inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir dengan laju inflasi secara berurutan sebesar 9,64 %, 7,43 % dan 5,51%.

Tingginya laju inflasi ini tentu saja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Sebagai ilustrasi, dengan tingginya inflasi atau naiknya harga-harga barang secara umum akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, dengan kata lain jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat lebih sedikit karena pendapatan mereka tidak naik. Akibatnya kesejahteraan masyarakat menurun. Dampak selanjutnya, masyarakat akan menurunkan minat menabungnya. Dengan turunnya tingkat tabungan masyarakat pada bank, tentunya berdampak pada berkurang jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada investor. Akibatnya investasi akan berkurang yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan melambat.

Tantangan dalam Pembangunan Manusia.

Pembangunan Manusia di Kota Sawahlunto diukur melalui peningkatan Indeks Pembangunan manusia di Kota Sawahlunto. Secara Kabupaten/Kota, nilai IPM Kota Sawahlunto merupakan peringkat ketujuh di Sumatera Barat. Akan tetapi, jika dikerucutkan hanya diperbandingkan untuk Kota saja, nilai ini merupakan yang TERENDAH diantara Kota-kota lain se Sumatera Barat. Nilai IPM Kota Sawahlunto tahun 2022 sebesar 73,73, lebih tinggi daripada nilai IPM Provinsi Sumatera Barat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, tepatnya setelah terjadinya pandemic covid 19. Sedangkan untuk nasional, nilai IPM kota Sawahlunto selalu lebih tinggi. Jika dibandingkan secara nilai IPM antara Kota-kota di Sumatera Barat, terdapat Gab yang besar antara Nilai IPM Kota Sawahlunto dengan Nilai IPM Kota lainnya di Sumatera Barat. Bahkan nilai IPM Kota Sawahlunto ini hanya sedikit diatas nilai-nilai IPM Kabupaten di Sumatera Barat.

Tabel 4.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

NO	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kepulauan Mentawai	60,28	61,26	61,09	61,35	62,19
2	Pesisir Selatan	69.40	70,08	69,9	70,03	70,84
3	Kab.Solok	68.60	69,08	69,08	69,24	70,02
4	Sijunjung	66,97	67,66	67,74	67,86	68,69
5	Tanah Datar	71,25	72,14	72,33	72,46	73,29
6	Padang Pariaman	69.71	70,59	70,61	70,76	71,63
7	Agam	71.70	72,37	72,46	72,57	73,29
8	Lima Puluh Kota	69,17	69,67	69,47	69,68	70,28
9	Pasaman	65.60	66,46	66,64	66,77	67,41
10	Solok Selatan	68,45	68,94	69,04	69,23	69,71
11	Dharmasraya	70,86	71,52	71,51	71,76	72,30
12	Pasaman Barat	67,43	68,21	68,49	68,76	69,57
13	Padang	82,25	82,68	82,82	82,90	83,29
14	Kota Solok	77,89	78,48	78,29	78,41	79,23
15	Sawahlunto	71,72	72,39	72,64	72,88	73,73
16	Padang Panjang	77,3	78.00	77,93	77,97	78,78
17	Bukittinggi	80,11	80,71	80,58	80,70	81,42
18	Payakumbuh	78,23	78,95	78.90	79,08	79,53
19	Pariaman	76,26	76,70	76.90	77,07	77,65
Sumatera Barat		71,73	72,39	72,38	72,65	73,26
Nasional		71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

Permasalahannya akan terlihat bila komponen IPM dilihat lebih dalam. Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Sawahlunto merupakan peringkat ketujuh jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se sumatera Barat. Akan tetapi, jika dikhususkan kepada perbandingan tingkat Kota saja, angka RLS ini merupakan yang terendah dibandingkan Kota lainnya se Sumatera Barat. ARLS kota Sawahlunto tahun 2022 yang sebesar 10,48 tahun ini lebih tinggi dari nilai ARLS Penduduk secara umum Se Sumatera Barat ditahun yang sama yaitu sebesar 9,18 tahun dan nasional sebesar 8,69 Tahun, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Sawahlunto	9,94	9,97	10,17	10,32	10,48
Provinsi Sumatera Barat	8,76	8,92	8,99	9,07	9,18
Nasional	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

Sedangkan untuk angka harapan lama sekolah, Pada tahun 2022, Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Sawahlunto merupakan peringkat 11 diantara seluruh Kabupaten Kota se Sumatera Barat. Selain yang terendah diantara Kota-kota se Sumatera Barat, Angka ini juga mempunyai *Gab* yang sangat besar dengan Kota-

kota lain tersebut. Yang lebih mengkhawatirkan, nilai AHLS ini lebih rendah daripada Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Dapat dikatakan, pada tahun 2022, harapan lamanya seorang anak akan bersekolah jika dilihat dari kondisi pembangunan sektor pendidikan di tahun yang sama, lebih rendah dibanding anak-anak di Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 4.4
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Sawahlunto	13,15	13,16	13,17	13,18	13,42
Provinsi Sumatera Barat	13,95	14,01	14,02	14,09	14,10
Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

Untuk angka harapan hidup masyarakat di Kota sawahlunto, juga merupakan yang terendah dibanding kota lain se Sumatera Barat atau peringkat ke 11 (sebelas) dibanding seluruh kab/Kota. Bahkan nilai AHH sebesar 70,40 tahun 2022, mempunyai gab yang juga besar dibanding AHH Kota lain di Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan nasional, AHH Kota Sawahlunto sedikit diatas Provinsi dan berada dibawah nasional. Secara rinci Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Sawahlunto	69,59	69,87	70,00	70,10	70,40
Provinsi Sumatera Barat	69,01	69,31	69,47	69,59	69,90
Nasional	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

Indikator pembentuk IPM yang terakhir, juga menunjukkan nilai yang rendah untuk kota sawahlunto. Pada tahun 2022, nilai Pengeluaran Perkapita Kota Sawahlunto merupakan peringkat 13 diantara seluruh Kabupaten Kota se Sumatera Barat. Selain yang terendah diantara Kota-kota se Sumatera Barat, Angka ini juga mempunyai Gab yang sangat besar dengan Kota-kota lain tersebut. Yang lebih mengkhawatirkan, nilai PP ini lebih rendah daripada Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok. Angka Pengeluaran Perkapita masyarakat Kota Sawahlunto ini juga selalu lebih rendah dari PP se-Sumatera Barat. Dapat dikatakan, pada tahun yang berkenaan (2022) pengeluaran perkapita masyarakat di Kota Sawahlunto lebih rendah dibanding masyarakat di Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Pengeluaran Perkapita Kota Sawahlunto

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Sawahlunto	9,77	10,24	10,18	10,19	10,54
Provinsi Sumatera Barat	10,64	10,93	10,73	10,79	11,13
Nasional	11,05	11,30	11,01	11,16	11,48

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

4.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

4.1.3.1 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Belum optimalnya Pemenuhan kemampuan siswa dalam rangka peningkatan kemampuan Numerasi
2. Rendahnya kemampuan Literasi peserta didik dalam memahami pembelajaran
3. Persentase sekolah yang berakreditasi A masih rendah
4. Pembelajaran berkualitas belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah
5. Masih belum optimalnya Pendidikan dasar dan menengah yang berpasrtisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Masih rendahnya konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan
2. Masih Kuranganya peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
3. Masih tingginya angka kematian bayi
4. Masih tingginya kasus kematian balita
5. Adanya pandemic Covid 19 yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak optimal
6. Masih belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu
7. Masih kurang optimalnya peran lintas sektor dan anggota keluarga untuk mendukung program Kesehatan ibu dan ank
8. Fasilitas pelayanan Kesehatan belum dimanfaatkan secara maksimal
9. Fasilitas pelayanan Kesehatan masih dimanfaatkan sebatas rujukan/pengobatan belum pada konseling, kosultasi maupun kegiatan promotive preventif dan pemberdayaan secara inisiatif masyaraka setempat
10. Banyaknya masyarakat yang berkunjung kerumah sakit lain yang diakibatkan masih berkurangnya pelayanan di Rumah Sakit Sawahlunto.
11. Masih belum mencukupi ruangan puskesmas untuk melakukan upaya inovasi atau pengembangan pelayanan Kesehatan dasar yang sudah dilaksanakan.
12. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran ibu tentang pentingnya imunisasi anak.

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Adanya kenaikan target yang tidak didukung dengan anggaran.
2. Kegiatan dan sub kegiatan tidak mendukung langsung capaian Program.
3. Belum tersedianya database kesesuaian tata ruang dengan IMB
4. Persentase jalan yang memiliki trotoar terlalu sedikit dibanding panjang jalan yang ada.
5. Topografi yang curam di Kota Sawahlunto.

6. Tingginya pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto akibat kondisi tanah yang kurang stabil
7. Status lahan yang sebagian masih dikuasai oleh PT. KAI, PT.BA dan Tanah Ulayat
8. SDM yang masih terbatas {tenaga terampil atau tenaga Ahli)
9. Belum maksimalnya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
10. Banyaknya daerah yang rawan bencana di kota sawahlunto
11. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum
12. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan terutama pembukaan jalan baru dan pelebaran jalan
13. Kurangnya sumber air bersih yang ada di Kota Sawahlunto
14. Kurangnya kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak
15. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata
16. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang
17. Belum terwujudnya penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Anggaran yang disediakan untuk rumah tidak layak huni tidak sebanding dengan kebutuhan dilapangan.
2. Susahnya menggali swadaya masyarakat karena faktor perekonomian yang tidak memungkinkan
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman
4. Kualitas permukiman pada kawasan kumuh yang ada masih rendah
5. Masih banyaknya kualitas rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (termasuk penanggulangan bencana dan kebakaran)

1. Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Sawahlunto untuk menjaga ketertiban.
3. Masih terbatasnya operasional dan SDM penanganan kebakaran di Kota Sawahlunto
4. Masih rendahnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana
5. Masih rendahnya kesiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial (termasuk penanganan Pasca Bencana serta Taman Makam)

1. Masih banyak masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu sebanyak 27,53% (18.489 peserta DTKS dari 67.154 jumlah penduduk Sawahlunto tahun 2021).
2. Belum maksimalnya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penerima bantuan yang terfasilitasi sebanyak 43% (550 orang) dari 1.279 PPKS.
3. Belum semua bantuan yang diberikan memberikan daya ungkit optimal dalam mengangkat persoalan sosial (terutama ekonomi) bagi penerima bantuan

4.1.3.2 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1. Masih rendahnya skill angkatan kerja
2. Masih rendahnya kesempatan kerja/lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja
3. Belum optimalnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
4. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsostek
5. Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak, salah satu contoh masih rendahnya persentase kelurahan ramah anak (50%).
3. Belum optimalnya ketahanan keluarga untuk mewujudkan tatanan sosial yang berbasis agama, adat dan budaya.
4. Keberdayaan ekonomi perempuan (wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan) masih rendah.
5. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih belum optimal.

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Rata-rata kelompok konsumsi pangan yang masih dibawah batas ideal,.
2. Masih adanya daerah yang rawan pangan berdasarkan hasil FSVA.

Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup

1. Kurangnya kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah
2. Kurangnya SDM tentang perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang untuk pengendalian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan
4. Belum berjalannya sistem penegakan hukum dibidang lingkungan hidup
5. Kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih rendah
6. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap lingkungan hidup
7. Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan
8. Kurangnya pengendalian pencemaran daan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
9. Belum optimalnya pemulihan lahan bekas tambang
10. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah
11. Kualitas pengelolaan persampahan belum optimal
12. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah
13. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan publik

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masuk dalam DTKS (27,53 %).
2. Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama antar desa dalam peningkatan pendapatan desa. Dimana tahun 2021 baru hanya 1 desa dengan status mandiri berdasar IDM.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
2. Masih rendahnya keterlibatan dan peran serta organisasi masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan dan pembangunan keluarga
3. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana
4. Belum maksimal desain program dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;
5. kekurangan data dasar program KB didaerah sebagai dasar dalam penyusunan peta kerja untuk memudahkan penyusunan perencanaan pelaksanaan program KB.

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1. Masih kurangnya pelayanan dan keselamatan transportasi jalan seperti rambu dan marka jalan di Kota Sawahlunto
2. Kurang optimalnya fasilitas pelayanan gedung uji kendaraan di Kota Sawahlunto
3. Masih kurangnya kualitas dan pemeliharaan infrastruktur kota

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Rendahnya sebaran informasi tentang kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten atau kota. Permasalahan;
2. Belum semua Perangkat Daerah yang memanfaatkan aplikasi/website untuk penyebaran informasi;
3. Terbatasnya Sumber daya manusia yang berlatar belakang keahlian Infomasi dan teknologi (IT);
4. Sulitnya pembangunan jaringan internet yang disebabkan kondisi geografis Kota Sawahlunto yang berbukit-bukit;
5. Terbatasnya pembangunan dan pelayanan jaringan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi;
6. Belum optimalnya integrasi data.

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih rendahnya jumlah koperasi yang sehat di Kota Sawahlunto

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1. Masih rendahnya realisasi investasi
2. Masih rendahnya kualitas promosi dan informasi investasi
3. Permasalahan kepemilikan lahan/tanah ulayat

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih rendahnya daya saing kepemudaan yang disebabkan Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan.
2. Masih rendahnya daya saing olahraga disebabkan Belum tersedianya sarana dan prasana olah raga yang berkualitas
3. Belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga antara propinsi dan daerah, belum tertatanya sistem pembibitan dan Kurangnya Pelatih yang bersertifikasi.

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sectoral;
2. Masih rendahnya pemahaman beberapa Perangkat Daerah yang telah menyampaikan data saat dilakukan verifikasi dan validasi;
3. Belum optimalnya hasil forum satu data;
4. Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data.

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

1. Belum optimalnya pengamanan informasi;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana persandian;
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli di bidang persandian.

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Belum Optimalnya Status Warisan Tambang Batubara Ombilin sebagai Situs Warisan UNESCO utuk peningkatan kesejahteraan masyarakat disebabkan belum di tetapkannya badan pengelola WTBOS yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 7 kabupaten/kota, BUMN pemilik asset cagar budaya serta stakeholder2 lain yang terkait.
2. Belum optimalnya informasi untuk pengunjung dan interpretasi, baik di museum maupun di situs. Isu telah menjadi perhatian dan rekomendasi dari Komite Warisan Dunia UNESCO agar mengembangkan suatu strategi interpretasi yang dapat mencakup sejarah sosial, interpretasi digital melalui situs web dan aplikasi gawai, pengembangan papan informasi, program pendidikan, revitalisasi museum, dan pengembangan interpretasi di lokasi atribut-atribut WTBOS.
3. Beberapa bangunan atau benda cagar budaya belum sepenuhnya terpelihara dan dilestarikan dengan baik disebabkan tingginya biaya pemeliharaan dan pelestarian bangunan atau benda cagar budaya serta sebagian besar bangunan/benda cagar budaya yag terdaftar sebagai warisan dunia dimiliki oleh BUMN sehingga dalam pengelolaan mengalami keterbatasan kewenangan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan dan kurang optimalnya kelembagaan budaya. Selain itu, belum ada program sejarah lisan dan sejarah sosial budaya tentang pertambangan yang dilestarikan kepada generasi-generasi saat ini dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam interpretasi WTBOS.

4.1.3.3 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Menurunnya jumlah produksi ikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

1. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Sawahlunto dikarenakan belum optimalnya pengelolaan Destinasi Pariwisata di Kota sawahlunto pada objek wisata strategis. Hal ini ditunjang oleh kelengkapan dokumen perencanaan yang belum komprehensif.
2. Kurangnya Atraksi pada setiap objek wisata disebabkan Sarana dan prasarana atraksi tidak dikelola secara berkelanjutan.
3. Kualitas Promosi masih rendah disebabkan SDM pelaku promosi pariwisata belum mendukung, Kemitraan/kerjasama biro perjalanan belum aktif, Sarana dan prasarana promosi pariwisata belum memadai dan Promosi pariwisata dilakukan secara manual
4. Industri Pariwisata belum berkembang disebabkan kurangnya sarana dan presarana penginapan/akomodasi dan restoran yang representatif, serta sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai dan dan jaringan biro perjalanan yang terintegrasi.
5. Kelembagaan Pariwisata yang belum professional disebabkan belum tepatnya pembagian tupoksi dalam kelembagaan, belum meratanya penguatan organisasi kelompok sadar wisata yang ada, masih kurangnya koordinasi antara pokdarwis dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah serta kualitas SDM dari pokdarwis.
6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi Kreatif disebabkan SDM pelaku ekonomi kreatif belum memadai, sarana dan prasarana pendukung ekonomi kreatif belum ada serta akses pelaku ekonomi kreaatif terhadap sumber pendanaan yang terbatas.
7. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan objek pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Lebih luas lahan Tadah hujan 878 Ha dari pada luas lahan Irigasi 693 Ha.
2. Rendahnya Pengunaan Benih Unggul Bersertifikasi.
3. Ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pengelolaan pertanian masih terbatas
4. Masih kurangnya diversifikasi dan konsumsi Masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi seimbang dan aman).
5. Masih Rendahnya Motivasi petani dalam berusaha tani

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1. Banyaknya UKM yang tidak berkembang
2. Masih kurangnya kemampuan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha.
3. Masih rendahnya kemampuan UMKM untuk menggunakan teknologi informasi dalam berusaha
4. Terbatasnya jaringan perdagangan antar daerah
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar serta ketertiban dan kebersihan pasar

6. Masih adanya pelaku usaha yang kurang memahami tentang upaya terhadap perlindungan konsumen melalui tertib ukur.
7. Besarnya pengaruh pasar online terhadap jual beli di pasar pada masa pandemic
8. PKL dilingkungan pasar dapat mengakibatkan gangguan terhadap pasar dan para pedagang didalamnya

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1. Besarnya potensi komoditi unggulan yang belum dikembangkan secara optimal
2. Minimnya diversifikasi serta rendahnya kualitas dan daya saing mayoritas produk industri kecil
3. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan usaha indistri kecil dan menengah
4. Minimnya standarisasi produk industri
5. Masih lemahnya SDM pelaku industri
6. Belum optimalnya fasilitas yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitas kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan

4.1.3.4 Permasalahan Terkait Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz
2. Belum optimalnya fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
3. Masih terbatasnya informasi dan jejaring kerjasama pemerintah kota dengan pihak lain
4. Belum optimalnya kualitas ASN yang bersih dan inovatif

4.1.3.5 Permasalahan Terkait Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

1. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perencanaan
2. Kurang memadainya data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan
3. Masih kurangnya komitmen dalam menyusun dokumen perencanaan

Keuangan

1. Masih terbatasnya potensi pendapatan asli daerah
2. Belum optimalnya pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah
3. Masih rendahnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban pajak dan membayar retribusi daerah

Kepegawaian

1. Belum semua ASN memberikan pelayanan maksimal sesuai tupoksinya
2. Penempatan pegawai masih ada yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
3. Masih rendahnya kemampuan inovasi ASN
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan

5. Belum maksimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/ budaya melayani
6. Masih rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal maupun struktural.

4.1.3.6 Permasalahan Terkait Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

1. Faktor Internal
   a. Belum optimalnya komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah
   b. Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemeriksa Inspektorat dikarenakan masih adanya temuan pemeriksaan setiap kali pemeriksaan.
   c. Adanya keterbatasan SDM pada Inspektorat Kota Sawahlunto untuk melakukan pembinaan pada OPD.
   d. Kurangnya Jabatan Fungsional yang ada di Inspektorat Kota Sawahlunto, terutama pada Jabatan Ahli Muda dan Pertama.
   e. Kualitas LHP belum sesuai yang diharapkan dan belum memenuhi standar pemeriksaan, dikarenakan belum memadainya kualitas SDM.
2. Faktor Eksternal
   a. Masih rendahnya anggaran pengawasan yang ada pada Inspektorat Kota Sawahlunto yang mengakibatkan pemeriksaan yang dilaksanaakan tidak optimal.
   b. Terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan sehingga dalam pengembangan pengetahuan dan potensi pegawai dan pejabat fungsional dalam meningkatkan SDM tidak maksimal.
   c. Belum optimalnya OPD menindaklanjuti temuan pemeriksaan.
   d. Adanya perubahan regulasi menuntut APIP agar segera dapat memahami aturan baru tersebut sebagai landasan dalam melakukan pengawasan.

4.1.3.7 Permasalahan Terkait Unsur Kewilayahan

Kecamatan

1. Belum optimalnya pelayanan public kepada masyarakat
2. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang terbatas
3. Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi

4.1.3.8 Permasalahan Terkait Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Belum optimalnya peran kelembagaan Kesbangpol Kota Sawahlunto
2. Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan

4.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Angka Pengangguran yang masih tinggi dan perlunya peningkatan daya saing Tenaga Kerja

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran di Kota Sawahlunto adalah 5,00 %, turun dari tahun 2021 sebesar 6,38 %. Walaupun turun, angka ini masih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lain se sumatera barat. Jika dibanding Provinsi dan nasional, angka ini sedikit lebih rendah. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran di Sumatera barat sebesar 6,28 % yang juga lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran secara nasional, sebesar 5,86 %. Beberapa faktor yang menyebabkan tinginya angka pengangguran di Kota Sawahlunto adalah Terbatasnya jumlah penawaran kerja dari dunia usaha menyebabkan kesempatan kerja relative rendah, rendahnya daya saing pencari kerja serta kurangnya skill dan keterampilan dari pengangguran atau pencari kerja. Sedikitnya jumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Sawahlunto sebagai akibat dari rendahnya tingkat investasi di Kota Sawahlunto, menyebabkan sedikitnya kesempatan kerja yang ditawarkan kepada pencari kerja. Untuk lebih jelasnya perkembangan tingkat pengangguran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Sawahlunto	5,75	6,82	8,2	6,38	5,00
Provinsi Sumatera Barat	5,55	5,34	6,88	6,52	6,28
Nasional	5,34	5,28	7,07	6,49	5,86

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

Tingkat pengangguran Kota Sawahlunto yang lebih rendah dari provinsi dan Nasional merupakan apresiasi terhadap kota Sawahlunto, namun yang menjadi perhatian adalah dengan tingkat kemiskinan terendah tetapi angka pengangguran masih tinggi. Ini dikarenakan pengangguran yang ada di Kota Sawahlunto banyak yang baru menyelesaikan pendidikan dan masih menunggu hasil penerimaan kerja, sehingga untuk kehidupan sehari-hari masih dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi masuk dalam perhitungan masyarakat yang mempunyai pendapatan di atas garis kemiskinan.

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Permasalahan utama dalam Pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto adalah tingginya pembiayaan infrastruktur akibat topografi daerah yang berbukit, kondisi tanah yang labil akibat penambangan di beberapa titik sentral Kota Sawahlunto. Hal ini menyebabkan sulitnya mewujudkan kondisi jalan yang mantap di Kota Sawahlunto. Dari total panjang jalan 454,87 km, terdapat 21,62% jalan dengan kondisi rusak sedang dan rusak berat (Tahun 2021). Hal ini tentunya akan selau meningkat setiap tahun, terutama jika pemeliharaan jalan tidak rutin dilakukan. Tidak hanya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pada pembangunan sarana gedung pemerintahanpun, harus betul-betul memperhatikan kondisi tanah. Penyediaan sumber-sumber air, terutama untuk air bersih dan sumber irigasi, dibutuhkan inovasi dan kejelian pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Kondisi daerah yang terletak di kawasan-kawasan perbukitan secara otomatis akan mengakibatkan rendahnya ketersediaan sumber-sumber air masyarakat. Adanya Pamsimas dan Sanimas, telah banyak membantu penyediaan air bersih bagi

masyarakat. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Selain itu, penyediaan air bagi lahan pertanian dan irigasi juga perlu ditingkatkan. Pembangunan embung dan sarana irigasi teknis perlu terus dibangun dan ditambah jumlahnya. Permasalahan yang harus menjadi perhatian adalah sumber air untuk irigasi tersebut.

Masih melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi

Dengan rangka perwujudan visi kota sebagai kota wisata tambang, indikator keberhasilan pembangunan daerah yang utama perlu jadi perhatian adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Kota Sawahlunto, telah berhasil mendapatkan status warisan budaya duni tahun 2019. Akan tetapi, tentunya diharapkan status ini memberikan dampak terhadap pariwisata dan kunjungan wisatawan ke Kota sawahlunto. inilah yang belum maksimal terjadi. Terlihat dari masih rendahnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB serta terhadap PAD. Permasalahan dalam hal ini belum optimalnya pengelolaan pariwisata di Kota Sawahlunto sehingga kunjungan wsatawan ke Kota Sawahlunto belum memberikan multiplier efek yang besar terhadap ekonomi daerah. Kunjungan ke Objek wisata tidak dibarengi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, baik untuk berbelanja maupun untuk menginap di Kota Sawahlunto. Kunjungan ke Kota Sawahlunto masih sebatas kunjungan ke Objek Wisata, belum mengharuskan pengunjung untuk menginap di Kota Sawahlunto. Potensi ini sebetulnya terjawab jika pengelolaan pariwisata di Kota Sawahlunto mampu mengedepankan potensi wisata tambang. Singkatnya, permasalahan ini adalah belum teropttimalkannya status warisan dunia WTBOS UNESCO dan Geopark nasional Sawahlunto untuk kesejahetraan masyarakat di Kota sawahlunto. Selain itu, dari sisi pemasaran juga belum optimalnya pemasaran wisata baik secara integral melalui koordinasi dengan pusat maupun promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri. Keberhasilan mendapatkan predikat warisan dunia memang sudah terlihat dari jumlah kunjungan akademisi mulai meningkat, akan tetapi belum mampu memberikan daya ungkit terhadap ekonomi masyarakat. Sawahlunto belum dijadikan destinasi utama karena potensi wisata tambang dan wisata alamnya yang belum sepenuhnya dikenal oleh konsumen. Selain itu, Terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses menuju beberapa objek wisata juga masih menjadi masalah dalam pengelolaan pariwisata. Peningkatan SDM Pelaku pariwisata juga masih perlu ditingkatkan, untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini.

Sektor pertanian memberikan kontribusi 8,73 persen terhadap PDRB kota sawahlunto, karena sawahlunto merupakan kota yang memiliki desa

Belum efektifnya tata kelola pemerintah yang melayani dan inovatif

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur perlu menjadi perhatian lebih dalam pembangunan Kota Sawahlunto kedepan. Perubahan paradigma yaparatur agar lebih mampu memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, harus didukung oleh kualitas apartur itu sendiri. Selalin itu juga harus didukung oleh sistem tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Seiring perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, aparatur pemerintah di Kota Sawahlunto juga harus mampu memanfaatkannya dalam efisiensi pengelolaan dan birokrasi pemerintahan. Dengan diberlakukannya penyederhanaan birokrasi, akan merubah konsep bekerja di Pemerintahan Kota Sawahlunto ini harus mampu ditindaklanjuti oleh aparatur sipil yang ada di Kota Sawahlunto.

Dari empat aspek permasalahan berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada Bab II, maka dapat dipetakan permasalahan pembangunan kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Kota Sawahlunto

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tantangan dalam pembangunan manusia	derajat kesehatan masih dibawah rata-rata nasional	belum optimalnya akses dan layanan kualitas kesehatan
		belum optimalnya pengadaan sarana dan prasaran kesehatan
	belum optimalnya pengelolaan pendidikan pada usia sekolah	pemerataan pendidikan pada usia sekolah
		belum optimalnya proses belajar mengajar untuk putus sekolah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat
Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	belum optimalnya aksesbilitas wilayah	sarana dan prasarana infrastruktur yang belum memadai
		belum optimalnya infrastruktur untuk konektifitas antar daerah tetangga
	belum optimalnya kualitas perumahan dan permukiman	belum optimalnya kualitas PSU perumahan dan permukiman
		masih adanya rumah tidak layak huni
		masih adanya kawasan permukiman kumuh
	masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	belum optimalnya pengendalian/pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
	belum optimalnya pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pola ruang	belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang dalam perencanaan pembangunan
Masih melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi	meningkatnya laju inflasi	belum terciptanya stabilitas harga
		Belum optimalnya daya beli masyarakat
	melambatnya pertumbuhan lapangaan usaha penyediaan jasa akomodasi makan dan minum, lapangan pertanian perikanan serta industri pengolahan	masih rendahnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah
		belum optimalnya pemanfaatan status OCMHS dan Geopark Nasional dalam meningkatan pendapatan pariwisata
		masih rendahnya nilai pendapatan sektor pertanian
		masih rendahnya kontribusi perindustrian terhadap perekonomian daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	masih kurangnya lapangan pekerjaan bagi usia kerja	masih tingginya tingkat pengangguran
		masih kurangnya skill angkatan kerja dalam mencari lapangan pekerjaan
Belum efektifnya tata kelola pemerintah yang melayani dan inovatif	belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
		sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum memadai
		masih kurangnya aksesibilitas dalam mendapatkan informasi publik
		belum optimalnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

4.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karateristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka Panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Pembangunan Manusia

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan karena dari tubuh yang sehat, memungkinkan manusia untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai modal dasar pembangunan. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dengan menciptakan lingkungan sehat dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Pada pemenuhan layanan dasar urusan kesehatan, kota Sawahlunto memiliki 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Kapasitas tampung rumah sakit diidentifikasi belum seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mencakup penduduk Kota Sawahlunto sendiri dan sebagian penduduk dari kabupaten Sijunjung dan Kab. Tanah Datar. Kapasitas tampung juga terkait dengan jumlah dan kualitas tenaga medis yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu juga teridentifikasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Hal ini merupakan catatan tersendiri bagi peningkatan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Peran tenaga medis diharapkan makin meningkat dalam hal pencegahan timbulnya penyakit melalui upaya edukatif terhadap masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Seiring dengan program nasional, perilaku hidup bersih dan sehat ini akan dilanjutkan dengan program keluarga sehat dengan ukuran keberhasilan indeks keluarga sehat. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat perlu untuk

dikedepankan mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan modal utama pembangunan.

Stunting menjadi isu yang masih menjadi perhatian di tingkat nasional hingga daerah. Upaya perbaikan gizi balita ditunjukkan dengan penurunan kasus stunting di Kota Sawahlunto dalam beberapa tahun terakhir. Delapan aksi prevalensi stunting terdiri dari analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Peraturan Walikota tentang peran desa, pembinaan KPM, Sistem Manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting dan reviu kinerja tahunan. Kota Sawahlunto pada tahun 2022 telah melaksanakan 7 aksi dan untuk aksi 8 dilaksanakan pada tahun 2023. Perlu dilakukan peningkatan untuk monitoring dan evaluasi terhadap 8 aksi integrase stunting.

Pelaksanaan pendidikan berkarakter tetap menjadi isue yang harus diperhatikan dalam pembangunan sektor pendidikan tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan isu pembangunan pendidikan ditingkat provinsi dan Nasional. Konsep pendidikan berkarakter yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus betul-betul diaplikasikan oleh sekolah dan guru. Perbaikan sikap mental anak, pengamalan ajaran agama, sikap kekeluargaan dan gotong royong serta karakter budaya dan adat istiadat yang mulai ditinggalkan generasi muda menjadi fokus perbaikan dalam mengembangkan pendidikan karakter ini. Perlunya pengawasan dan evaluasi secara rutin dari dinas pendidikan selaku leading Sektor pelaksanaan pendidikan di Kota Sawahlunto. Pendidikan berkarakter ini menjadi sangat penting sekarang ini sebagai proteksi akhlak anak dalam terhadap dampak negatif perkembangan informasi dan teknologi yang mudah untuk diakses generasi muda dan penduduk usia sekolah.

Kebijakan di bidang pendidikan dalam mengantisipasi pembatasan sosial kegiatan masyarakat perlu menjadi perhatian khusus mengingat kualitas pendidikan tetap harus ditingkatkan meskipun dihadapkan dengan tantangan keterbatasan dalam proses pembelajaran. Dinas Pendidikan perlu mengambil langkah-langkah inovatif dan mengembangkan pola pengajaran yang kreatif yang melibatkan semua pihak baik pihak sekolah, guru, orang tua dan murid. Kebijakan merdeka belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI dan masyarakat. Isu penting dalam pendidikan adalah pelaksanaan proses belajar mengajar yang terkait dengan sarana prasarana proses belajar dan mengajar, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan serta kualitas pembelajaran.

Pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari isi kesetaraan gender, pembangunan perempuan dan perlindungan anak. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak masih ditemukannya kesenjangan terhadap akses, partisipasi, kontrol serta manfaat dalam bidang pembangunan. Upaya perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan masih belum optimal, unti itu penguatan kelembagaan P2TP2A sangan penting dalam rangka promotif (sosialisasi, kampanye, penyuluhan) preventif (pencegahan), kuratif (penanganan), rehabilitatif (pemulihan/pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan).

Pembangunan Insfrastruktur dan Lingkungan Hidup

Kualitas infrastruktur pendukung keberlangsungan Kota perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah 3 tahun kedepan. Kondisi kota sawahlunto yang merupakan kota bekas penambangan batubara, dengan beberapa titik aktivitas penambangan masih berlangsung, mengakibatkan pengentasan permasalahan infrastruktur kota mempunyai kendala tersendiri. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sebagai aksesibilitas dari dan ke Kota, maupun kondisi

jalan dalam kota, membutuhkan biaya yang tinggi. Dengan keterbatasan anggaran daerah, dibutuhkan kejelian dan koordinasi yang baik dengan Pusat dan Provinsi untuk menanganinya. Kondisi topografi daerah yang berbukit, terutama bagian selatan, ditambah keterbatasan sumber air baku, mengakibatkan permasalahan air juga perlu menjadi perhatian.

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Masih terdapatnya beberapa bekas penambangan yang berada dalam proses reklamasi lahan, masih adanya aktivitas penambangan, jalur transportasi batubara serta adanya aktivitas PLTU Sijantang menyebabkan permasalahan kualitas lingkungan hidup juga menjadi perhatian. Peningkatan jumlah penduduk di Kota sawahlunto juga akan berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap ruang dan fasilitas hidup. Hal ini juga harus akan menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan. Belum tersedianya peraturan daerah tentang Rencana detail tata Ruang, menyebabkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang masih mengacu pada Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini sedang dalam proses revisi.

Kawasan permukiman padat dan tidak teratur pada pusat kota dan sub pusat kota juga menjadi permasalahan dalam pembangunan perumahan di Kota Sawahlunto. Pola permukiman masih belum sesuai dengan peruntukkan penggunaan lahan disebabkan belum ada regulasi penetapan kawasan perumahan. Saat ini masih terdapat backlog perumahan yang tidak layak huni. Selain itu, sulitnya memperoleh tanah untuk perumahan karena tanah banyak dikuasai oleh kuasa penambangan PT.BA dan PT.KAI. Selain itu, penguasaan tanah adalah tanah ulayat yang menyulitkan pihak swasta berinvestasi di sektor perumahan.

Pembangunan Ekonomi

Keberhasilan Kota sawahlunto mendapatkan predikat dan Status warisan Budaya dunia WTBOS tahun 2019 dan Geopark Nasional Tahun 2018, belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kunjungan wiasatawan ke Kota sawalunto. Hal ini juga terdampak dengan adanya wabah pandemic Covid 19 pada akhir 2019 sampai saat ini, yang memporak porandakan seluruh sektor, terutama sektor pariwisata. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan status OCMHS dan Geopark nasional menjadi sulit dilakukan. Dengan melandainya kasus pandemic covid 19, menjadi kesempatan dan tantangan bagi pemerintah daerah Kota sawahlunto untuk kembali menarik kunjungan wisatawan yang akan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Dalam masa pandemic kemarin, Kota sawahlunto sudah mempersiapkan kualitas infrastruktur objek-objek wisata utama untuk dikunjungi.

Selain itu, peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan juga akan diprioritaskan. Dengan telah adanya sentra Industri Kecil Menengah (IKM), diharapkan daya saing produk-produk industri unggulan Kota Sawahlunto dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan juga akan mendukung pengembangan sektor pariwisata yang ada. Selain itu, peningkatan aktivitas industri ini juga harus mampu diiringi dan mendukung peningkatan nilai tambah untuk sektor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian dan peternakan juga akan menjadi perhatian karena sektor pertanian ini merupakan sektor yang dominan mempngaruhi ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto.

Keberadaan mall Pelayanan public yang telah diresmikan oleh Menteri Pan RB RI pada tahun 2022, diharapkan meningkatkan jumlah investasi di Kota sawahlunto. Kemudahan-kemudahan perizinan, ketersediaan bahan baku yang berkualitas, serta penyediaan iklim investasi yang kondusif juga diharapkan akan meningkatkan minat

investor untuk berinvestasi. Hal lai yang menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi potensi dan pengelolaan pendapatan asli daerah.

Dengan adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah memberikan amanat bagi seluruh lapis pemerintah sampai Pemerintahan Desa untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk dengan meraih dukungan dari unsur non pemerintah untuk terlibat dalam upaya intervensi.
Arahan Presiden tersebut diantaranya :

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
   a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat;
   c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Tata Kelola Pemerintahan

Ditengah pergeseran gaya hidup, perkembangan teknologi serta industrialisasi 4.0 saat ini, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Dengan telah dilakukannya penyetaraan jabatan struktural eselon IV kepada jabatan fungsional tertentu, dibutuhkan penyesuaian gaya dan tata kelola pemerintahan. Hal ini diharapkan kualitas kinerja, profesionalisme, inovasi dan produktivitas aparatur juga harus meningkat. Pejabat pemerintah harus mampu menterjemahkan tujuan dan visi misi kepala daerah, dengan tetap memperhatikan arahan dan aturan dari pemerintah Provinsi dan nasional. Dengan masa transisi kepemimpinan di Kota sawahlunto, hal ini perlu dijaga. Hal ini tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan pubik prima disetiap sektor. Setiap aparatur harus mengedapankan paradigma melayani masyarakat, bukan dilayani.

Dari penjelasan beberapa yang terkait dengan isu pembangunan daerah dapat disimpulkan Pemetaan isu strategis pembangunan daerah seperti dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Pemetaan Isu Strategis Pembangunan Daerah

ISU UTAMA	ISU STRATEGIS
Isu Pembangunan Manusia	peningkatan derajat kesehatan
	penurunan prevalensi stunting
	peningkatan kualitas pendidikan
Isu pembangunan insfrastruktur dan Lingkungan Hidup	peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
	peningkatan konektivitas antar wilayah potensial

ISU UTAMA	ISU STRATEGIS
	peningkatan kualitas lingkungan hidup
	peningkatan pengendalian dan pemanfaatan ruang
	peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman
	peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah
Isu Pembangunan Ekonomi	peningkatan stabilitas harga
	pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan status OCMHS dan Geopark nasional
	peningkatan nilai tambah untuk sektor industri dan pertanian
	peningkatan investasi daerah
	peningkatan pendapatan asli daerah
	penghapusan kemiskinan ekstrem
Isu Tata Kelola Pemerintahan	reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
	peningkatan pelayanan publik menuju pelayanan publik prima
	Penguatan Inovasi Daerah

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Insruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah pada tahun 2023 dan daerah otonom baru bahwa Penentuaan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah didasarkan pada visi dan misi RPJPD atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan isu strategis aktual.

Visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 adalah "**Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya".** Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

1. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat ditengah-tengah masyarakat
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum
3. Mengembangkan objek wisata tambang
4. Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata

Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat ditengah-tengah masyarakat

Mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat yang baik tidak terlepas dari tuntunan dan panduan dari agama dan kepercayaan masing-masing. Kehidupan masyarakat yang menerapkan nilai-nilai beragama akan menciptakan sikap toleransi yang tinggi antar sesama. Hal ini sejalan dengan falsafah Minangkabau yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat yaitu " Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau tersebut, dijadikan sebagai persayaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: tata beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan. Selain itu, seiring dengan perkembangan era globalisasi dan perdagangan bebas, dibutuhkan pemahaman yang kuat untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan serta membentengi diri dari pengaruh budaya luar dengan mempertahankan budaya dan adat istiadat yang berlandaskan agama di Kota Sawahlunto.

Meningkatkan fasilitas pelayanan umum

Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia serta dibutuhkan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengembangkan berbagai macam usahanya. Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana itu, maka diharapkan kegiatan perekonomian masyarakat, maka diharapkan kegiatan perekonomian masyarakat akan semakin tumbuh dan berkembang dimasa mendatang, sehingga akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat kota. Semua itu harus didukung oleh pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance) yang merupakan persyaratan penting untuk dapat mewujudkan upaya pembangunan daerah yang terarah, efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Mengembangkan objek wisata tambang

Kota Sawahlunto memiliki keindahan alam, nilai historis dan budaya yang spesifik sehingga mempunyai daya Tarik tersendiri yang tercermin dalam setiap obyek wisata yang memiliki nilai historis serta tetap tumbuh dan berkembang budaya multi etnis yang ada, dengan ciri khas daerah Kota Sawahlunto tersebut diatas perlu dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menarik jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Sawahlunto. Daya tarik daerah yang demikian harus dapat dimanfaatkan oleh Kota Sawahlunto untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera dengan wisata tambang dan budaya dengan segala ciri khasnya.

Penetepan sebagai Warisan Dunia UNESCO (salah satu dari hanya lima situs warisan budaya dunia di Indonesia) sesungguhnya menciptakan sebuah peluang untuk pengembangan pariwisata. Namun demikian, sebuah strategi yang mumpuni masih dibutuhkan untuk mengembangkan objek wisata tambang, termasuk berinvestasi dalam teknologi digital untuk interpretasi dan mempromosikan Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto; meningkatkan pengalaman bagi pengunjung, termasuk fasilitas pejalan kaki dan informasi yang menarikdi museum dan situs; mengembangankan 'hub' interpretasi baru di area Ombilin di luar kota perusahaan;memfasilitasi akses pengunjung.; emaksimalkan potensi warisan perkeretaapian; serta mendokumentasikan dan melestarikan sejarah sosial Sawahlunto (terkait dengan sejarah dan objek wisata tambang) dengan partisipasi yang tinggi dari masyarakat setempat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung situs di luar Sawahlunto dan membuka peluang pembangunan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata

Pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto didukung oleh berbagai sektor baik Pendidikan, pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, hiburan, olahraga, kuliner maupun sektor lainnya. Pengembangan sektor wisata juga sangat didukung dengan kegiatan olahraga dan hobbi, karena dimasa mendatang program dan kegiatan olahraga dan hobbi yang dapat menarik minat wisatawan harus lebih ditingkatkan. Misalnya olahraga pacuan kuda, balap sepeda dan mungkin juga pertandingan Tennis Internasional dengan mengundang peserta dari Belanda dalam rangka menelusuri masa lalu, disamping olahraga hibbi dan rekreasi seperti; berburu, lomba burung berkicau, petualangan, memancing, aktivitas bertanam padi, proses pengolahan biji kopi dan kakao, proses bertenun tradisional, proses pembuatan makanan tradisional, festival marchingband suasana tempo dulu, dapat dikemas dalam paket wisata minat khusus dan bukan hal yang mustahil untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kota Sawahlunto. Disamping itu, pengembangan dan peningkatan program kegiatan UMKM yang berbasis potensi lokal juga perlu ditingkatkan, sehingga dapat menghasilkan produk yang menarik bagi para wisatawan untuk dijadikan barang souvenir sebagai tanda bahwa mereka memang telah berkunjung ke Kota Sawahlunto. Pengembangan potensi ini perlu didukung dengan kegiatan promosi, baik didalam maupun diluar negeri secara terus menerus sehingga Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata tambang yang berbudaya benar-benar diminati oleh para wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Keselarasan visi dan isi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Keselarasan Visi dan Misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Tujuan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025		RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026	
VISI		**TUJUAN**	
	Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya		
MISI			
1.	Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat ditengah-tengah masyarakat	1.	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya
2.	Meningkatkan fasilitas pelayanan umum	2.	Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
3.	Mengembangkan objek wisata tambang	3.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dan produk lokal
4.	Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata	4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif

5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Pembangunan Daeah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun kedepan. Dengan tetap mengacu pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah maka rumusan tujuan sasaran untuk tahun 2024-2026 terdiri dari empat tujuan dan 18 sasaran, yaitu :

1. **Tujuan 1 : Terwujudya SDM yang berkualitas dan berkarakter.**

Tujuan pertama ini memiliki dua sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 2) meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.

2. **Tujuan 2 : Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**

Tujuan kedua ini memiliki empat sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik, 2) meningkatnya kualitas lingkungan hidup, 3) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, 4) meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman.

3. **Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian**

Tujuan ketiga ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) menurunnya tingkat pengganggguran, 2) meningkatnya kontribusi pariwisata, 3) meningkatnya kontribusi sektor

industri dan perdagangan, 4) terwujudnya ketahanan pangan, 5) meningkatnya produksi pertanian, 6) meningkatnya nilai investasi.

4. Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif

Tujuan keempat ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, 2) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, 3) meningkatnya indeks inovasi daerah, 4) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, 5) meningkatnya kualitas ASN, 6) meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan Pj. Kepala Daerah tahun 2024-2026. Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
1	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter**			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia**	**73,73**	**74,74**	**75,24**	**75,74**	**75,74**
		1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,40	70,69	70,75	70,89	70,89
				Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak balita pada waktu yang sama) x 100 %	13,7	13,00	12,50	10,60	10,60
		2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,42	13,55	13,75	14,01	14,01
				Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,43	10,57	10,64	10,72	10,72
2	**Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**			**Indeks infrastruktur Wilayah**	**[40 %{50%(50 % kualitas jalan + 50 % kualitas jembatan)} + {40 % (50 % kualitas SDA + 50 % kualitas drainase kondisi baik)} + (10 % bangunan Gedung Pemerintah kondisi baik)] + 20 % {60 %(50 % Pengurangan sampah + 50 % Pungutan sampah) + (40 % IKLH)] + [20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni][20 %{70%PSU+ 30%**	**69,67**	**72,35**	**74,00**	**75,22**	**75,22**

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
					persentase rumah layak huni)] + [10 % {(50 % kinerja Lalu lintas + (50 % kinerja PJU)} + [10 % {(50 % kampung +20 % rehabilitasi rekonstruksi tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + {30 % ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30 % edukasi proteksi kebakaran + 40 % Response Time}]/2					
		1	Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	(Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, , Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik/5	67,83	70,72	71,74	72,65	72,65
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5% IKU, 21,9% IKTL)	62,89	64,74	65,52	66,57	66,57
				Indeks Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah	0	68,46	68,66	68,90	68,90
		3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	84,15	86,23	87,20	88,32	88,32
		4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi	75,00	84,00	86,00	87,00	87,00

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
				PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	PSU / jumlah unit rumah x 100 %					
				Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,38	7,16	7,05	7,00	7,00
3	**Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian**			**Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)**	**((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%**	**3,98**	**4,48**	**4,73**	**4,98**	**4,98**
				PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	**PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)**	**66,10**	**71,6**	**74,35**	**77,11**	**77,11**
				Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	**(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%**	**2,28**	**2,19**	**2,18**	**2,17**	**2,17**
				Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	**Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)**	**10,54**	**11,15**	**11,37**	**11,47**	**11,47**
		1	Menurunnya Tingkat Pengganggguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	5	4,92	4,83	4,75	4,75
		2	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,22	2,26	2,30	2,34	2,34
		3	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan	Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	10,80	11,50	11,78	12,06	12,06

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
				Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,92	14,94	14,96	14,98	14,98
		4	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (%)	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	73,85	73,85	73,88	73,90	73,90
		5	Meningkatnya produksi pertanian	Nilai PDRB sektor Pertanian (juta)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	383.196,89	398.524,76	414.465,75	431.044,38	431.044,38
		6	Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	9,68	8,63	8,83	9,03	9,03
4	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB**	**55,68**	**56,50**	**57,32**	**58,14**	**58,14**
		1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan RB	61,92	62,19	62,50	62,81	62,81
		2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	58,23	76,00	77,00	78,00	78,00

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
		3	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	58,98	60,01	63,01	66,01	66,01
		4	Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	83,40	84,61	85,82	87,03	87,03
		5	Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	63	78,00	80,00	82,00	82,00
		6	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,84	3,10	3,15	3,20	3,20

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang akan dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama tiga tahun mulai tahun 2023 sampai dengan 2026. Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran		Strategi
1	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter**			
		1	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				meningkatkan pengendalian jumlah penduduk
				percepatan pencegahan stunting
		2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	meningkatan pengelolaan pendidikan
				meningkatkan pengendalian perizinan pendidikan
				meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan
				meningkatkan kualitas keluarga dalam masyarakat
				meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
				meningkatan pembinaan terhadap perpustakaan di daerah
				meningkatkan pengelolaan arsip
				meningkatkan pemberdayaan sosial
				mengelola taman makam pahlawan
2	**Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**			
		1	Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi baik	meningkatkan pengelolaan Sumber Daya air
				meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
				meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
				meningkatkan pengelolaan sistem drainase

No	Tujuan	Sasaran		Strategi
				meningkatkan penataan bangunan gedung dan lingkungannya
				meningkatkan kualitas penyelenggaraan jalan
				meningkatkan pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi
				meningkatkan penanggulangan bencana daerah
				meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
				mengelola Perkereta apian
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	meningkatkan perencanaan lingkungan hidup
				meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				meningkatkan pengendalian/pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
				meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengeolaan lingkungan hidup (PPLH)
				meningkatkan pengelolaan persampahan
		3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	meningkatkan penyelenggaran penataan ruang
				meningkatkan pengendalian dan pengawasan tata ruang
				meningkatkan tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah
				meningkatkan kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan tanah negara
		4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	meningkatkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah
				meningkatkan sarana dan prasarana dan Utilitas Umum
3	**Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian**			

No	Tujuan	Sasaran		Strategi
		1	Menurunnya Tingkat Pengganggguran	meningkatkan penempatan tenaga kerja
				meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja
				meningkatkan hubungan industrial untuk mencegah terjadinya perselisihan kerja
		2	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata	meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata (destinasi OCMHS dan geopark)
				meningkatkan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis pariwisata
				mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan kearifan lokal
				mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian potensi budaya lokal
				meningkatkan pembinaan terhadap sejarah daerah
				meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
				peningkatan pengelolaan permuseuman
				meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan
				meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan
		3	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan	meningkatkan perencanaan dan pembangunan industri serta ijin usaha industri
				meningkatkan pengelolaan sistem informasi industri nasional
				meningkatkan perizinan dan sarana distribusi perdagangan
				menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan perlindungan konsumen
				meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
				meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi

No	Tujuan	Sasaran		Strategi
				meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMKM
		4	Terwujudnyan ketahanan pangan dengan meningkatan produksi pertanian	meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan
				meningkatkan penanganan kerawanan pangan
				meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
				meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
				meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
				meningkatkan perizinan usaha pertanian
				meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya
		5	Meningkatnya nilai investasi	meningkatkan pelayanan penanaman modal
				meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
4	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif**			
		1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
				meningkatkan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				meningkatkan penyelenggaraan pengawasan
				meningkatkan tata pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat
				meningkatkan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan
				melaksanakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
				meningkatkan Pemberdayaan desa dan kelurahan
				meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
				meningkatkan pelayanan penyelamatan kebakaran

No	Tujuan	Sasaran		Strategi
				meningkatkan Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
				meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
				meningkatkan pengawasan dan pembinaan pemerintah desa
				meningkatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
				meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melaui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
				meningkatkan kualitas kewaspadaan nasional dan fasiitasi penanganan konflik sosial
		2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	mengoptimakan pengelolaan keuangan daerah
				meningkatkan pengelolaan barang milik daerah
				meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah
		3	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	meningkatkan penelitian dalam perencanaan pembangunan daerah
				meningkatkan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah
		4	Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat	meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik
				meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan
				meningkatkan kepemilikan dokumen catatan sipil
		5	Meningkatnya Kualitas ASN	meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara
				meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
		6	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi	meningkatkan informasi dan komunikasi publik
				meningkatkan aplikasi informatika

Tabel 6.2
Arah Kebijakan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Mengoptimalkan pemenuhan SPM bidang Kesehatan	Mengoptimalkan pemenuhan dan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan	Mengoptimalkan evaluasi SPM bidang Kesehatan
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan
meningkatkan pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	meningkatkan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
memberikan jaminan kesehatan masyarakat	mengoptimalkan pelayanan terhadap jaminan kesehatan masyarakat	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jaminan kesehatan masyarakat
Memberikan pelatihan terkait dengan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Implementasi Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatkan monitoring dan evaluasi Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder dalam promosi kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam promosi kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam promosi kesehatan melalui monitoring dan evaluasi
Melaksanakan koordinasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Melaksanakan evaluasi terhadap sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Meningkatkan kuantitas dan kualitas Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	meningkatkan Pendayagunaan dan evaluasi terhadap Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
Meningkatkan Pengendalian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Meningkatkan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka menjadikan keluarga yang sejahtera	Meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam rangka menjadikan keluarga yang sejahtera	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap masyarakat dalam rangka menjadikan keluarga yang sejahtera
Melaksanakan aksi konvergensi untuk pencegahan stunting	Melanjutkan aksi konvergensi untuk pencegahan stunting	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap aksi konvergensi untuk pencegahan stunting

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
meningkatkan peranan pos gizi disetiap desa/kelurahan	melanjutkan penguatan peranan pos gizi disetiap desa/kelurahan	melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peranan pos gizi disetiap desa/kelurahan
memberikan gizi spesifik untuk ibu hamil dan menyusui	menguatkan Intervensi gizi spesifik untuk ibu hamil dan menyusui	mengevaluasi terhadap Intervensi gizi spesifik untuk ibu hamil dan menyusui
memberikan gizi sensitif untuk remaja putri, pasangan usia subur dan masyarakat umum	menguatkan Intervensi gizi sensitif untuk remaja putri, pasangan usia subur dan masyarakat umum	mengevaluasi Intervensi gizi sensitif untuk remaja putri, pasangan usia subur dan masyarakat umum
melaksanakan SPM bidang pendidikan	mengoptimalkan SPM bidang pendidikan	mengevaluasi SPM bidang pendidikan
Melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar	Melakukan peningkatan terhadap pengelolaan pendidikan dasar	Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pendidikan dasar
Melaksanakan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Melakukan peningkatan terhadap Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Melaksanakan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Melakukan peningkatan terhadap Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
Mengidentifikasi Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Melaksanakan Pemerataan terhadap Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi	Mengelola kerjasama dengan perguruan tinggi	Mengelola dan mengevaluasi kerjasama dengan perguruan tinggi
Menetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar bercirikan kondisi daerah/nasional/global (WTBOS, Geopark, Perubahan Iklim)	Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar bercirikan kondisi daerah/nasional/global (WTBOS, Geopark, Perubahan Iklim)	Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar bercirikan kondisi daerah/nasional/global (WTBOS, Geopark, Perubahan Iklim)
Menetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Identifikasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Memfasilitasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Evaluasi Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Identifikasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Memfasilitasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Evaluasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Meningkatkan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah	Meningkatkan pengelolaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah	penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan daerah	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan daerah	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan daerah
Identifikasi Kekerasan Terhadap Perempuan	Melaksanakan sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Melakukan tindakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Meningkatkan Pengelolaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Evaluasi Penyediaan dan pengelolaan terhadap Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Menyediakan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Menguatkan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Melakukan bimbingan untuk meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Menguatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
Membentuk Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Mengelola Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Menguatkan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
Membentuk kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Meningkatkan kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Menguatkan kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
Meningkatkan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak	Menguatkan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak	mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak
identifikasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	melaksanakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan	Mengevaluasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
Menyediakan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Mengelola Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	mengelola dan mengevaluasi Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Membentuk Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Menguatkan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Melaksanakan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah	Mengoptimalkan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Melaksanakan Pembudayaan Gemar Membaca masyarakat di Daerah	Meningkatkan Pembudayaan Gemar Membaca masyarakat di Daerah melalui sosialisasi dan pembinaan	Meningkatkan evaluasi terhadap Pembudayaan Gemar Membaca masyarakat di Daerah
Melaksanakan pelestarian naskah kuno dan koleksi budaya daerah	pengeloaan terhadap pelestarian naskah kuno dan koleksi budaya daerah	Meningkatan pelestarian naskah kuno dan koleksi budaya daerah
Identifikasi Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	Mengelola Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	Mengembangkan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah
Meningkatan pengelolaan arsip dinamis daerah	Mengoptimalkan pengelolaan arsip dinamis daerah	mengevaluasi pengelolaan arsip dinamis daerah
Meningkatan pengelolaan arsip statis daerah	Mengoptimalkan pengelolaan arsip statis daerah	Mengevaluasi pengelolaan arsip statis daerah
Melaksanakan identifikasi Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di daerah	Mengelola Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di daerah	Meningkatkan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di daerah
Identifikasi Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Memusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	evaluasi Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Identifikasi Arsip Akibat Bencana daerah	Melindungi dan menyelamatkan Arsip Akibat Bencana daerah	evaluasi terhadap Arsip Akibat Bencana daerah
Identifikasi Arsip Perangkat Daerah yang Digabung atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan desa/kelurahan	Menyelamatkan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan desa/kelurahan	mengevaluasi Arsip Perangkat Daerah yang Digabung atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan desa/kelurahan
Melaksanakan pengelolaan kebudayaan daerah	Mengoptimalkan pengelolaan kebudayaan daerah	Mengevaluasi pengelolaan kebudayaan daerah
Melaksanakan Pelestarian Kesenian Tradisional daerah melalui pembinaan	Meningkatkan Pelestarian Kesenian Tradisional daerah dengan pembinaan dan memberikan fasilitasi bantuan	Mengoptimalkan Pelestarian Kesenian Tradisional daerah
Melaksanakan Pembinaan Lembaga Adat daerah	Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat daerah	Mengevaluasi Pembinaan Lembaga Adat daerah
Melaksanakan pembinaan kelompok seni tradisional dan kelembagaannya	Meningkatkan pembinaan kelompok seni tradisional dan kelembagaannya	Meningevaluasi pembinaan kelompok seni tradisional dan kelembagaannya
Melaksanakan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	Mengevaluasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal
Menyediakan Sarana dan Prasarana Pembinaan sejarah lokal	Mengelola Sarana dan Prasarana Pembinaan sejarah lokal	Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Pembinaan sejarah lokal

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Melaksanakan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Mengevaluasi Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
Penetapan Cagar Budaya daerah	Meningkatkan pengelolaan cagar budaya yang sudah ditetapkan	Mengevaluasi pengelolaan cagar budaya yang sudah ditetapkan
Melaksanakan Pelindungan Koleksi Secara Terpadu	Meningkatkan Pengembangan Koleksi Secara Terpadu	Meningkatkan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
Melaksanakan Pembinaan dan Mutu Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Mengevaluasi terhadap Pembinaan dan Mutu Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana museum	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana museum	Mengoptimalkan sarana dan prasarana museum
Melaksanakan revitalisasi sarana dan prasarana museum	mengoptimalkan revitalisasi sarana dan prasarana museum	Mengevaluasi revitalisasi sarana dan prasarana museum
Melaksanakan pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air
Pengembangan dan rehabilitasi Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam kota	Mengelola Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam kota	Mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam kota
Peningkatan Pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif	Pengoptimalan Pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif	Evaluasi Pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif
Menyusun Rencana, Kebijakan dan Strategi SPAM	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perkotaan dan pedesaan	Mengevaluasi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perkotaan dan pedesaan
Melaksanakan Operasi SPAM di Kawasan Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatkan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Pedesaan	Mengoptimalkan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Pedesaan
Menyusun Rencana, Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di daerah	Melaksanakan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota dan skala permukiman	Melaksanakan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota dan skala permukiman
Melakukan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dan skala permukiman	Mengevaluasi Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dan skala permukiman	Mengoptimalkan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dan skala permukiman
Menyusun Rencana, Kebijakan dan Strategi Sistem Drainase Perkotaan	Membangun dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Mengoptimalkan Pembangunan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
Menyediakan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Mengoptimalkan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Mengevaluasi Sarana Sistem Drainase Lingkungan

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Membangun dan mengembangkan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Membangun dan mengembangkan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Membangun dan mengembangkan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Memelihara Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Mengoptimalkan pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Mengevaluasi Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Melaksanakan Pengawasan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Melaksanakan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Megevaluasi Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Melaksanakan pembangunan/peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur di Kawasan Prioritas Pariwisata (WTBOS)	Melaksanakan pembangunan/peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur di Kawasan Prioritas Pariwisata (WTBOS)	Melaksanakan pembangunan/peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur di Kawasan Prioritas Pariwisata (WTBOS)
Melaksanakan penyelenggaraan Bangunan Gedung , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Mengevaluasi kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Melaksakanan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Melaksakanan n pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Mengoptimalkan Penataan dan pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Monitoring Penataan Bangunan dan Lingkungan	Monitoring Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Mengoptimalkan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Menyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan dan jembatan serta pelaksanaan pembangunannya	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitas jalan dan jembatan	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitas jalan dan jembatan
Melaksanakan Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Pengoptimalan Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Evaluasi Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
Menyelenggarakan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatkan pembinaan terhadap Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Mengevaluasi Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	Meningkatkan kualitas Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	Mengevaluasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah
Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan penyelenggaraanya	Melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Melanjutkan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Melaksanakan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Mengoptimalkan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Mengevaluasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Melaksanakan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Mengoptimalkan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Mengevaluasi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Melaksanakan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Mengoptimalkan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Mengevaluasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Mengoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Mengevaluasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Menyusun dan menetapkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dilanjutkan dengan pelaksanaan	Melaksanakan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan RTH	Mengoptimalkan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan RTH
melaksanakan peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	mengevaluasi Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Mengawasi Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Mengoptimalkan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Mengevaluasi pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Menoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Mengevaluasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	mengoptimalkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	mengevaluasi Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Menumbuhkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Meningkatkan pendampingan dan sosialisasi dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
Menyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	Melakukan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Mengoptimalkan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Mengoptimalkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Mengevaluasi Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Mengoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Mengevaluasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Menetapkan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota
Melaksanakan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kota	Mengoptimalkan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kota	Mengevaluasi Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kota
Melaksaanakan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kota	Melaksaanakan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kota	Melaksaanakan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kota
Melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program kota	melanjutkan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program kota	Mengoptimalkan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program kota
Melaksanakan peningkatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	Mengoptimalkan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	mengevaluasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum
Melaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan	Melanjutkan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan	Mengoptimalkan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan
Melaksaanakan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	mengoptimalkan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	mengevaluasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Melaksanakan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dan penyediaannya	Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi hunian	mengoptimalkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi hunian

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Melanjutkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	mengevaluasi Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Melaksanakan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	Melanjutkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	Mengevaluasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah
Melaksanakan penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	melanjutkan penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Mengevaluasi penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Melaksanakan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah	Melanjutkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah	Mengevaluasi Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah
Melaksanakan koordinasi dalam Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah	Melanjutkan koordinasi dalam Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah
Melaksanakan Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	melaksanakan Fasilitasi Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	mengevaluasi Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah
melaksanakan Pelayanan Informasi Rawan Bencana di kota	mengoptimalkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana di kota	mengevaluasi Pelayanan Informasi Rawan Bencana di kota
melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	mengoptimalkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	mengevaluasi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
melaksanakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	mengoptimalkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Melaksanakan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam kota	mengoptimalkan pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam kota	mengevaluasi pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam kota
Menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ kota	Lanjutan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ kota	Implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ kota
Menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan kota	memelihara Perlengkapan Jalan di Jalan kota	mengoptimalkan Perlengkapan Jalan di Jalan kota

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Memberikan Fasilitasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	mengoptimalkan Fasilitasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	mengevaluasi Fasilitasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Melakukan Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	melanjutkan Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	mengevaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah	mengoptimalkan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah	mengevaluasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah
Pelaksanaan operasional kereta api wisata Mak Itam	Pengembangan operasionalisasi kereta api wisata Mak Itam	Pengembangan operasionalisasi kereta api wisata Mak Itam
Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja makro dan Mikro	mengimplementasikan Perencanaan Tenaga Kerja makro dan Mikro	mengevaluasi Perencanaan Tenaga Kerja makro dan Mikro
Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	meningkatkan kualitas Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Mengevaluasi Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi
Melaksanakan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	mengoptimalkan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	mengevaluasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Melaksanakan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Melaksanakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	mengevaluasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
Melaksanakan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Geopark, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)	Meningkatkan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Geopark, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)	mengevaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Geopark, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)
Melaksanakan Pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terintegrasi dengan melibatkan stakeholders terkait (WTBOS, Geopark, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)	Meningkatkan Pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terintegrasi dengan melibatkan stakeholders terkait (WTBOS, Geopark, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)	Mengevaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terintegrasi dengan melibatkan stakeholders terkait (WTBOS, Geopark, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)
Memberikan fasilitasi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	meningkatkan fasilitasi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	mengevaluasi fasilitasi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
melaksanakan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan luar negeri (Geopark, OCMHS, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)	meningkatkan kualitas Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan luar negeri (Geopark, OCMHS, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)	menguatkan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan luar negeri (Geopark, OCMHS, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)
Memberikan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata yang bersinergi dan efektif efisien baik Dalam dan Luar Negeri	meningkatkan kualitas Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata yang bersinergi dan efektif efisien baik Dalam dan Luar Negeri	mengoptimalkan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata yang bersinergi dan efektif efisien baik Dalam dan Luar Negeri
Menyediakan Data dan Menyebarkan Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	meningkatkan kualitas update Data dan Menyebarkan Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	mengevaluasi update Data dan Menyebarkan Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
melakukan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	menguatkan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	melanjutkan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	mengoptimalkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Menyediakan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah	melaksanakan pengelolaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah	mengevaluasi pelaksanaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah
Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	mengoptimalkan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar
melaksanakan peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif	meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi kreatif	mengoptimalkan Pelaku Ekonomi kreatif
Menyusun Rencana Pembangunan Industri kota	Lanjutan Menyusun Rencana Pembangunan Industri kota	mengimplementasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri kota
melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	melanjutkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	mengevaluasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	melanjutkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	mengevaluasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	melanjutkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	mengevaluasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Memberikan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	meningkatkan kualitas Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	mengoptimalkan Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Memberikan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	meningkatkan kualitas Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	mengoptimalkan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Melaksanakan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah	meningkatkan kualitas Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah	mengevaluasi Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah
Melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan	melaksanakan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan	mengoptimalkan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan
Mengendalikan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	melanjutkan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	mengoptimalkan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
melaksanakan pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Daerah	melanjutkan pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Daerah	mengoptimalkan pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Daerah
Melaksanakan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,	melanjutkan pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,	Mengoptimalkan pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,
Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kota	melanjutkan pelaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kota	mengoptimalkan pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kota
Melaksanakan Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat kota	Meningkatkan kualitas Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat kota	mengevaluasi Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat kota

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Melaksanakan Sistem dan Jaringan Informasi perdagangan	Meningkatan kualitas pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi perdagangan	mengoptimalkan pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi perdagangan
Melaksanakan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	Meningkatkan kualitas Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	mengevaluasi Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi
Melaksanakan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi dan UKM yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah	melanjutkan pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi dan UKM yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah	mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi dan UKM yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah
Melakukan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Melakukan update Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	mengoptimalkan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
melaksanakan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	mengoptimalkan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
Memberikan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	melanjutkan pemberian Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	mengevaluasi Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
Memberikan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	mengevaluasi Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Memberikan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Meningkatkan kualitas Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	mengevaluasi Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
Menyediakan Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan	memelihara Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan	mengoptimalkan Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Melanjutkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Mengoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
Mengelola dan menyeimbangkan Cadangan Pangan Kota	Melanjutkan pengelolaan Cadangan Pangan Kota	mengoptimalkan pengelolaan Cadangan Pangan Kota
melaksanakan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kota	Meningkatkan kualitas Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kota	mengoptimalkan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kota
Melaksanakan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	melanjutkan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	mengevaluasi Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	melakukan pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	mengevaluasi pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
melaksanakan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatkan kualitas Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Mengoptimalkan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kota	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kota	mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kota
melaksanakan pengadaan ternak	Meningkatkan Mutu dan pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	evaluasi pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah
Meningkatkan Pengendalian Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak,	Meningkatkan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak,	Mengoptimalkan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak,
Melaksanakan pembangunan prasarana pertanian	memelihara bangunan prasarana pertanian	mengevaluasi pembangunan prasarana pertanian
melaksanakan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah	meningkatkan kualitas Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah	Menjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah
Mengelola Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	meningkatkan kualitas Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	mengoptimalkan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
Melaksanakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	meningkatkan kualitas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	mengoptimalkan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Melaksanakan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	melanjutkan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	mengoptimalkan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
melaksanakan pembinaan terhadap Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan kualitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	mengevaluasi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Menyediakan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	mengelola Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	mengevaluasi penyediakan dan memanfaatkan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Melaksanakan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	melanjutkan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
melaksanakan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan melalui pemberian bibit ikan kepada masyarakat pembudidaya	meningkatkan kualitas Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan melakukan pembinaan terhadap petani ikan	mengoptimalkan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan kota	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	mensosialisasikan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan kota
Menyusun Peta Potensi Investasi kota	mensosialisasikan Peta Potensi Investasi kota	mengevaluasi Peta Potensi Investasi kota
Menyusun Strategi Promosi Penanaman Modal	Melaksanakan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	melanjutkan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Menyediakan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	melaksanakan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	mengevaluasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Menyediakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	melaksanakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	mengevaluasi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan Pemantauan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Daerah	melanjutkan Pengelolaan update Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Daerah	mengevaluasi Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Daerah
melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Melanjutkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	mengoptimalkan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Identifikasi Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Pengelolaan update Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	evaluasi update Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
melaksanakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial kota	meningkatakn pengelolaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial kota	mengevaluasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota	melanjutkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota	mengoptimalkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
melaksanakan sosialisasi terhadap Pemuda Pelopor Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Pemberdayaan Terhadap Pemuda Pelopor Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Pengembangan Terhadap Pemuda Pelopor Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kota	Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kota	Evaluasi Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kota
Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Evaluasi Organisasi Kepramukaan
Pembinaan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Evaluasi Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah	meningkatkan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah	evaluasi penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah
Pembinaan Organisasi Olahraga tingkat daerah	Pengembangan Organisasi Olahraga tingkat daerah	evaluasi Organisasi Olahraga tingkat daerah
Menyusun perencanaan dan pegangaran tahun 2025	Menyusun perencanaan dan pegangaran tahun 2026	Menyusun perencanaan dan pegangaran tahun 2027
melaksanakan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah untuk tahun 2024	melaksanakan Analisis update Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah tahun 2025	melaksanakan Analisis update Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah tahun 2026
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2024	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2025	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2026
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	mengoptimalkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	meningkatkan kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	mengoptimalkan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	meningkatkan kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	mengoptimalkan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
melaksanakan Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	pengembangan penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	penerapan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
melaksanakan Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	penerapan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
melaksanakan Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penerapan hasil penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
melaksanakan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	penerapan Inovasi dan Teknologi
melaksanakan Pengawasan Internal	meningkatkan kualitas Pengawasan Internal	optimal Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	melaksanakan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	mengevaluasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatkan kualitas Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	mengoptimalkan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	Meningkatkan kualitas Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	mengoptimalkan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah
melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatkan kualitas Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	mengoptimalkan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
melaksanakan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan daerah	meningkatkan kualitas Pengelolaan update Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan daerah	mengoptimalkan Pengelolaan update Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan daerah
Menyusun Standar Harga, Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2024	update dan penerapan Standar Harga, Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah untuk tahun 2025	update Standar Harga, Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah untuk tahun 2026
Inventarisasi dan penata usahaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
identifikasi Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	evaluasi Pengembangan Pajak Daerah, serta Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan pajak daerah	Pengelolaan pajak daerah	mengevaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan pajak daerah
Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Melaksanakan Pengolahan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Melaksanakan Pengawasan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Melaksanakan Pembinaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penagihan pajak daerah untuk tahun 2024	Penagihan pajak daerah untuk tahun 2025	Penagihan pajak daerah untuk tahun 2026
Melaksanakan Adminstrasi tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Meningkatkan kualitas Adminstrasi tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	mengoptimalkan Adminstrasi tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
menyusun Kebijakan Perekonomian dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Melaksanakan Kebijakan Perekonomian dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	mengoptimalkan Kebijakan Perekonomian dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD untuk tahun 2024	melaksanakan peraturan daerah tahun 2024 dan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD tahun 2025	melaksanakan peraturan daerah tahun 2025 dan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD tahun 2026
Pembahasan Kebijakan Anggaran tahun 2025	Pembahasan Kebijakan Anggaran tahun 2026	Pembahasan Kebijakan Anggaran tahun 2027
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2024	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2025	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2026
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat untuk tahun 2025	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat untuk tahun 2026	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat untuk tahun 2027
pembahasan Kerja Sama Daerah	melaksanakan Kerja Sama Daerah	Pembahasan Kerja Sama Daerah
melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	meningkatkan kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	mengoptimalkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
melaksanakan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	meningkatkan kualitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	mengoptimalkan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
melaksanakan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	meningkatkan kualitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	mengoptimalkan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
melaksanakan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa	melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Desa	melaksanakan Pengawasan Pemerintahan Desa
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
Menyusun Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	melakukan koordinasi dan fasilitasi program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Menyusunkan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Menyusunkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Melaksanakan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Menyusun Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Melaksanakan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Menyusunkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Melaksanakan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Menyusun Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Melaksanakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	meningkatkan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	mengoptimalkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Peningkatan SDM, sarana dan prasarana (command center) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah
melaksanakan Pelayanan Pencatatan Sipil	Mengoptimalkan Pelayanan Pencatatan Sipil	mengevaluasi Pelayanan Pencatatan Sipil

Arah kebijakan (Tahun 2024)	Arah kebijakan (Tahun 2025)	Arah kebijakan (Tahun 2026)
melaksanakan Penyelenggaraan pencatatan sipil	melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan pencatatan sipil	melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan pencatatan sipil
Pengumpulan Data Kependudukan dan Database Kependudukan	Penyajian data kependudukan dan Database Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan dan database Kependudukan
melaksanakan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	melaksanakan Pembinaan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	melaksanakan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa program prioritas yang mendukung keberhasilan dari pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome*)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia**	**73,73**	**74,74**	**72.903.361.650**	**75,24**	**77.047.699.450**	**75,74**	**82.517.619.708**	**75,74**	**232.468.680.808**	
	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	**Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)**	**Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur**	**70,40**	**70,69**	**20.948.361.650**	**70,75**	**21.060.199.450**	**70,89**	**21.477.619.708**	**70,89**	**63.486.180.808**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**
		Prevalensi Stunting	**(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak baita pada waktu yang sama) x 100 %**	**13,7**	**13,00**		**12,50**		**10,6**		**10,6**		**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk x 100	0,15	0,16	16.164.538.650	0,16	16.390.455.300	0,16	16.676.808.850	0,16	49.231.802.800	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	Jumlah RS Rujukan tingkat yang terkreditasi/jumlah RS di kab/ Kota Sawahlunto x100	100	100		100		100		100		
		Persentase Puskesmas terakreditasi	Jumlah puskesmas terakreditasi / jumlah seluruh puskesmas x 100	100	100		100		100		100		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	Jumlah dokter dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000	0,38	0,40	1.595.000.000	0,39	1.603.000.000	0,39	1.611.400.000	0,39	4.809.400.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	Jumlah SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya dibagi dengan jumlah tenaga kesehatan seluruhnya x 100	62,35	90		100		100		100		
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan	Jumlah Sarana yang memenuhi standar dan pelayanan perizinan/Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian x 100	78	80	145.000.000	85	150.800.000	90	156.862.000	90	452.662.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin	Jumlah Sarana pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi standar perizinan/Jumlah Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman x 100	77	80		85		90		90		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan dibagi dengan jumlah poskesdes dan poskeskel yang ada x 100	0	50	540.000.000	75	540.000.000	100	540.000.000	100	1.620.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate /MCPR)	Jumlah AkseptorAktif Moder/ Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	64,6	66	350.400.000	68	114.850.000	70	118.400.000	70	583.650.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome*)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100	12	12,2	1.460.543.000	12,0	1.533.570.150	11,6	1.610.248.658	11,6	4.604.361.808	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	Jumlah semua kelompok ketahanan keluarga yang mendapatkan informasi Bangga /Semua Jumlah Ketahanan Kelompok yang ada x 100	80	86	692.880.000	87	727.524.000	88	763.900.200	88	2.184.304.200	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	**Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)**	**lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.**	**13,42**	**13,55**	**51.955.000.000**	**13,75**	**55.987.500.000**	**14,01**	**61.040.000.000**	**14,01**	**168.982.500.000**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	**Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)**	**10,43**	**10,57**		**10,64**		**10,72**		**10,72**		
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/Paket A %	Jumlah siswa SD atau jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto x 100%	108,96	110,25	51.000.000.000	111,21	55.000.000.000	111,4	60.000.000.000	111,4	166.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		APM SD/MI/Paket A %	Jumlah murid SD/sederajat usia 7-12 tahun/ jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto	99,03	99,7		99,8		99,9		99,9		
		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	Capaian kompetensi Literasi SMP adalah persentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	2,06	2,19		2,27		2,37		2,37		
		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	Capaian kompetensi Numerasi SMP adalah persentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	1,82	1,94		2,03		2,12		2,12		
		APK PAUD	Jumlah siswa PAUD/ jumlah seluruh anak yang berusia 3-6 tahun di Kota Sawahlunto x 100%	89,62	90,1		90,25		90,35		90,35		
	Program Pengembangan Kurikulum	Pesentase Kurikulum Muatan Lokal Yang Dikembangkan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Dibagi Dengan Satuan Pendidikan Yang Ada Di Kota Sawahlunto	0	73	350.000.000	100	367.500.000	100	400.000.000	100	1.117.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi Perizinan Pendidikan Yang Diselengarakan Oleh Masyarakat Jenjang PAUD/SD/SMP)	Jumlah Rekomendasi Usulan Yang Dikeluarkan/ Seluruh Usulan Yang Masuk X 100 %	0	100	55.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	185.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Memiliki Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Sesuai Standar Baik Kuantitas Maupun Kualitas Disetiap Jenjang Pendidikan Dibagi Dengan Jumlah Satuan Pendidikan Semua Jenjang Di Kota Sawahlunto	93	100	550.000.000	100	560.000.000	100	570.000.000	100	1.680.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	**Indeks infrastruktur Wilayah**	**[40 %{50%(50 % kualitas jalan + 50 % kualitas jembatan)} + {40 % (50 % kualitas SDA + 50 % kualitas drainase kondisi baik)} + (10 % bangunan Gedung Pemerintah kondisi baik)] + 20 % {60 %(50 % Pengurangan sampah + 50 % Pungutan sampah) + (40 % IKLH)} + [20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni][20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni)] + [10 % {(50 % kinerja Lalu lintas + (50 % kinerja PJU)} + [10 % {(50 % kampung +20 % rehabilitasi rekonstruksi tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + {30 % ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30 % edukasi proteksi kebakaran + 40 % Response Time}]/2**	**69,67**	**72,35**	**100.500.470.869**	**74**	**101.945.335.955**	**75,22**	**106.231.037.551**	**75,22**	**307.786.844.376**	
	Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi baik	**Persentase infrastruktur dalam kondisi baik**	**(Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, , Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik/5**	**67,83**	**70,72**	**78.405.000.000**	**71,74**	**80.385.000.000**	**72,65**	**82.995.000.000**	**72,65**	**241.785.000.000**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen	46,87	50,55	7.000.000.000	51,72	7.500.000.000	52,45	8.000.000.000	52,45	22.500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Sarana prasarana air minum dalam kondisi baik/ Jumlah sarana prasarana Air minum yg terpasang) x 100	98,18	99	2.000.000.000	99,5	1.750.000.000	100	1.500.000.000	100	5.250.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome*)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD / Jumlah Rumah) x 100 %	91	92	1.500.000.000	92,25	1.555.000.000	92,97	1.620.000.000	92,97	4.675.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa Konstruksi terampil (%)	Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi yang bersetifikat dibagi jumlah pelaku jasa konstruksi X 100	0	10	155.000.000	15	210.000.000	20	275.000.000	45	640.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	Jumlah gedung pemerintah kondisi baik/ jumlah gedung pemerintahX100	83,06	85,12	22.000.000.000	86,89	22.500.000.000	87,14	23.000.000.000	87,14	67.500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi	Jumlah bangunan yg direkomendasi : jumlah bangunan x 100%	62,84	64,56		65,11		65,98		65,98		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	(luas Lingkungan yang tertata/luas Lingkungan) x 100	78	80,13	6.500.000.000	81,9	6.570.000.000	82,52	7.000.000.000	82,52	20.070.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/jumlah panjang jalan x 100 %	73,62	75,13	35.000.000.000	76,23	36.000.000.000	77,27	37.000.000.000	77,27	108.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	(Panjang Jembatan dalam kondisi mantap dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	94,1	95,03	2.500.000.000	95,21	2.550.000.000	95,94	2.600.000.000	95,94	7.650.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome*)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	Panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	44,91	47,78	1.750.000.000	48,66	1.750.000.000	49,26	2.000.000.000	49,26	5.500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)**	**Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKTL)**	**62,89**	**64,74**	**5.417.683.841**	**65,52**	**5.639.452.224**	**66,57**	**6.200.397.447**	**66,57**	**17.257.533.512**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
		Indeks Pengelolaan Persampahan	**Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah**	**0**	**68,46**		**68,66**		**68,90**		**68,90**		**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen perencanaan yang memilliki dokumen kajian lingkungan hidup (%)	Jumlah Dokumen perencanaan yang memiliki dokumen kajian lingkungan hidup / Jumlah Dokumen Perencanaan yangmembutuhkan kajian lingkungan hidup x 100%	9,09	45,45	500.000.000	54,55	230.000.000	63,64	250.000.000	63,64	980.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	(Jumlah Kegiatan yang melakukan pengelolan dan pemantauan / Jumlah Kegiatan Usaha) x 100 %	75	78	359.544.524	79	395.498.976	80	435.048.874	80	1.190.092.374	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program pengelolaaan Kenanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)	(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %	100	100	1.303.033.490	100	1.433.336.839	100	1.576.670.523	100	4.313.040.852	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3 (%)	jumlah Kegiatan usaha yang memiliki izin PLB3/ Jumlah kegiatan Usahax 100%	75	76	23.352.395	77	25.687.635	78	28.256.398	78	77.296.427	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	jumlah usaha yang taat lingkungan/seluruh usaha yang berizin x 100	75	77	105.790.663	78	116.369.729	79	128.006.702	79	350.167.095	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup(%)	Jumlah Masyarakat yang di diklat/Jumlah Masyarakat x 100%	100	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	400.510.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang LH yang diperoleh	Jumlah penghargaan LH yg diberikan/ Jumlah seluruh penghargaanLH x 100%	100	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	364.100.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan (%)	Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan/Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang dilaporkan x100%	100	100	16.500.000	100	18.150.000	100	19.965.000	100	54.615.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang terkelola (%)	Total volume sampah ditangani/total volume timbunan sampah x 100 %	95	97	2.878.462.769	98	3.166.309.045	99	3.482.939.950	99	9.527.711.764	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	**Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang**	**perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang**	**84,15**	**86,23**	**1.945.000.000**	**87**	**445.000.000**	**88,32**	**445.000.000**	**88,32**	**1.945.000.000**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan Penataan Ruang x 100%	17,09	100	1.945.000.000	50	445.000.000	55	445.000.000	100	1.945.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan	Jumlah bangunan sesuai tata ruang/ jumlah bangunan X 100										Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)**	**Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %**	95	**84**	**14.732.787.028**	**86**	**15.475.883.731**	**87**	**16.590.640.104**	**87**	**46.799.310.864**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome)*	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Lingkungan Hidup
		Persentase RTLH (%)	**(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %**	**7,38**	**7,16**		**7,05**		**7,00**		**7,00**		**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100	77,25	80,13	6.500.000.000	81,9	6.570.000.000	82,52	7.000.000.000	82,52	20.070.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	Jumlah Rumah terkena bencana yang direhab/ Jumlah rumah yang terkena bencana) x 100%	85	92	768.967.028	93	845.863.731	94	929.350.104	94	2.544.180.864	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sesuai SK Walikota (Ha)	72,93	19,08	275.000.000	19,08	412.500.000	19,08	550.000.000	19,08	1.237.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %	80	83	4.375.000.000	84	4.675.000.000	85	4.977.500.000	85	14.027.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman
	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	Jumlah unit yang sedang dibangun terfasilitasi PSU/ jumlah unit rumah x 100%	80	84	2.497.000.000	85	2.628.000.000	86	2.759.000.000	86	7.884.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman
		Persentase Tanah pemerintah yang tertib administrasi (%)	Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat/jumlah bidang tanah pemerintah x 100	20,5	23,31	158.410.000	26,69	172.260.000	30,6	187.395.000	30,6	518.065.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman
		Jumlah dokumen pertanahan	jumlah dokumen pertanahan yang tersedia	0	25	158.410.000	25	172.260.000	25	187.395.000	75	518.065.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome*)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman
	Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian	**Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)**	**((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%**	**3,98**	**4,48**	**30.230.150.250**	**4,73**	**42.146.842.225**	**4,98**	**38.193.293.999**	**4,98**	**95.370.286.474**	
		PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	**PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)**	**66,1**	**71,6**		**74,35**		**77,11**		**77,11**		
		Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	**(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%**	**2,28**	**2,19**		**2,18**		**2,17**		**2,17**		
		Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	**Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)**	**10,54**	**11,15**		**11,37**		**11,47**		**11,47**		
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)**	**Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%**	**5**	**4,92**	**797.236.550**	**4,83**	**954.236.550**	**4,75**	**954.236.550**	**4,75**	**2.705.709.650**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja (%)	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan x 100%	67	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Berwirausaha (%)	Jumlah lulusan pelatihan yang berwirausaha / Jumlah peserta pelatihan keseluruhan x 100%	0	5	690.000.000	7	740.000.000	9	740.000.000	9	2.170.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja (%)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	12,23	23	37.481.800	25	144.481.800	30	144.481.800	30	326.445.400	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/Jumlah total perusahaan x 100%	86,21	88	19.754.750	89	19.754.750	90	19.754.750	90	59.264.250	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata	**Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)**	**Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran**	**2,22**	**2,26**	**15.553.879.750**	**2,3**	**27.089.267.725**	**2,34**	**22.678.194.499**	**2,34**	**50.321.341.974**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan	Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)	Jumlah produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI/ Jumlah produk ekonomi kreatif x 100%	0,15	1	44.172.500	2	48.589.750	3	53.448.725	3	146.210.975	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome)*	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual												Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang profesional/ Jumlah pelaku ekonomi kreatif x 100%	18	20	128.477.600	25	141.325.360	30	155.457.896	30	425.260.856	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	Jumlah pengunjung yang mengatakan puas / jumlah seluruh pengunjung x 100%	80	70	717.269.450	75	788.996.395	80	867.896.035	80	2.374.161.880	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	Jumlah Objek Wisata Unggul/ jumlah objek wisata x 100%	n/a	50	10.200.000.000	55	21.200.000.000	60	16.200.000.000	60	32.600.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	15	16	773.419.350	17	850.761.285	18	935.837.414	18	2.560.018.049	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional/Jumlah organisasi kepramukaan x 100%	75	75	350.000.000	77	385.000.000	79	423.500.000	79	1.158.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional (atlit)	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional (atlit)	177	148	3.340.540.850	155	3.674.594.935	160	4.042.054.429	160	11.057.190.214	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan	**Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)**	**Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri**	**10,80**	**11,50**	**3.300.000.000**	**11,78**	**3.835.000.000**	**12,06**	**4.030.000.000**	**12,06**	**11.165.000.000**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**
		Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	**Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan**	**14,92**	**14,94**		**14,96**		**14,98**		**14,98**		**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome*)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian	Jumlah koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/jumlah koperasi x 100%	49,27	77	200.000.000	77	240.000.000	77	250.000.000	77	690.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang meningkat volume usahanya	Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya/ Jumlah UMKMx100%	4,6	4	95.000.000	4	120.000.000	5	145.000.000	5	360.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya/total koperasi x 100%	30	50	240.000.000	52	260.000.000	52	290.000.000	52	790.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya	Jumlah pengelola koperasi bersertifikat / Total pengelola koperasi x100%	100	0,04	590.000.000	0,07	650.000.000	0,11	710.000.000	0,11	1.950.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase pengelola UMKM yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya	Jumlah pengelola UMKM bersertifikat / Total UMKM x100%	52	52		52		52		52		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha/Jumlah UMKM X 100%	46	47	160.000.000	47	205.000.000	47	250.000.000	47	615.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	Jumlah pasar rakyat dengan minmal tipe C / jumlah pasar x 100%	14	14	500.000.000	14	500.000.000	14	500.000.000	14	1.500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional	Jumlah bahan pokok yang stabil/Total kebutuhan bahan pokok x 100%	100	80	250.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	80	750.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	Jumlah produk unggulan yang diekspor/Jumlah Produk unggulan x 100%	50	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	600.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pesentase pasar tradisional tertib ukur (%)	Jumlah pasar tradisional tertib ukur/ jumlah pasar tradisional x 100%	14	28	100.000.000	28	120.000.000	42	140.000.000	42	360.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk dalam negeri yang dipromosikan (%)	Jumlah produk dalam negeri dipromosikan/Total Produk dalam negeri x100%	50	55	85.000.000	60	90.000.000	65	95.000.000	65	270.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	Jumlah IKM yang meningkat skala usahanya/ Total IKM x100%	2	2	680.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	1.880.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai izin (%)	Jumlah Indsutri kecil menengah yang mempunyai izin/jumlah industri kecil dan menengah x 100%	28	40	100.000.000	50	100.000.000	60	100.000.000	60	300.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Program Pengelola Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terpublis di SIINAS(%)	Jumlah IKM yang terpublis di SIINAS /jumlah IKM X 100%	30	35	100.000.000	40	500.000.000	45	500.000.000	45	1.100.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Terwujudnya Ketahanan Pangan	**Indeks Ketahanan Pangan (%)**	**Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.**	**73,85**	**73,85**	**1.628.446.000**	**73,88**	**1.788.250.000**	**73,90**	**2.290.275.000**	**73,90**	**5.506.971.000**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Kecukupan Kebutuhan Beras	Jumlah Produksi/Jumlah Kebutuhan Beras X 100 %	100	100	246.946.000	100	270.600.000	100	479.160.000	100	996.706.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	Survey indek rata-rata konsumsi pangan masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok	85,1	86	545.000.000	86,5	599.500.000	87	859.350.000	87	1.803.850.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	Jumlah penurunan produk rawan pangan/jumlah penduduk rawan pangan x 100%	6	6	60.000.000	6	66.000.000	6	72.600.000	18	198.600.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome*)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Bidang Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida	Perbandingan produk pangan segar yang terdeteksi dari cemaran mikroba bagi total bahan pangan yang menjadi sampel	97,78	93	136.500.000	93	150.150.000	93	165.165.000	93	451.815.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan	Jumlah Produksi perairan umum dan Budidaya	235,55	200	580.000.000	202	637.000.000	204	644.000.000	606	1.861.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	Jumlah kg ikan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia selama 1 tahun dslsm brntuk konfersi	41,49	39	60.000.000	39	65.000.000	39	70.000.000	39	195.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya produksi pertanian	**Nilai PDRB sektor Pertanian (juta)**	**Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan**	**383.196,89**	**398.524,76**	**8.000.000.000**	**414.465,75**	**7.429.500.000**	**431.044,38**	**7.190.000.000**	**431.044,38**	**22.619.500.000**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Produktivitas x luas panen	17733,75	15800	2.930.000.000	15850	2.699.500.000	15900	3.035.000.000	47550	8.664.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Jumlah Produksi Karet	Produktivitas x luas panen TM	2230,91	1730		1735		1740		5.205		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Jumlah Produksi Kakao	Produktivitas x luas panen TM	588,8	569		570		571		1710		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Jumlah Produksi :											Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Daging Sapi	Pemotongan tercatat + 5% (pemotongan tercatat) x 173,5	339,45	319		320		321		960		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Daging Ayam	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	1005,85	900,26		900,26		900,26		900,26		Perangkat Daerah Yang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Telur	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	367,7	135,86		135,86		135,86		407,58		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam		01:12,0	01:10		01:10		01:10		01:10		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penambahan atau perbaikan jaringan irigasi	Jaringan irigasi yang ditambah atau diperbaiki/luas baku sawah x 100%	7,48	2,5	3.720.000.000	2,5	3.245.000.000	2,5	2.770.000.000	7,5	9.735.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari MHS dan zoonosis	Jumlah wilayah yang terkendali/jumlah wilayah yang terjangkit x 100%	100	90	605.000.000	90	670.000.000	90	735.000.000	90	2.010.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanaman pangan dan perkebunan	Luas lahan yang dikendalikan/luas lahan yang terserang x 100%	12,19	100	275.000.000	100	285.000.000	100	60.000.000	100	620.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang berprestasi	17,39	1	470.000.000	1	530.000.000	1	590.000.000	3	1.590.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Jumlah Ketenagaan Penyuluh yang berprestasi	Jumlah Ketenagaan Penyuluh yang berprestasi	2	1		1		1		3		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Meningkatnya nilai investasi	**Persentase peningkatan nilai investasi (%)**	**(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%**	**9,68**	**8,63**	**950.587.950**	**8,83**	**1.050.587.950**	**9,03**	**1.050.587.950**	**9,03**	**3.051.763.850**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah realisasi investasi (PMDN dan PMA)	112.593	46	200.000.000	51	100.000.000	56	100.000.000	153	400.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome*)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	(Jumlah investor tahun n - jumlah investor tahun n-1) / Jumlah investor tahun n-1 x 100%	49,25	27	50.000.000	29	150.000.000	31	150.000.000	31	350.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai SOP (%)	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP/jumlah total perizinan dan non perizinan yang diterbitkan x 100%	100	100	178.454.800	100	278.454.800	100	278.454.800	100	735.364.400	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peluang Investasi Yang Telah Divalidasi (%)	Jumlah perusahaan yang telah divalidasi/jumlah total perusahaan x 100%	n/a	40	369.694.850	50	369.694.850	60	369.694.850	60	1.109.084.550	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terakses Publik (%)	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terakses publik/ jumlah total data dan informasi perizinan dan non perizinan x 100%	n/a	100	152.438.300	100	152.438.300	100	152.438.300	100	457.314.900	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB**	**55,68**	**56,5**	**88.795.213.109**	**57,32**	**100.214.032.429**	**58,14**	**105.726.602.505**	**58,14**	**294.439.725.948**	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	**Nilai SAKIP**	**Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan RB**	**61,92**	**62,19**	**16.378.371.093**	**62,5**	**18.250.564.186**	**62,81**	**19.707.939.235**	**62,81**	**54.336.874.514**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah**
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti/ Jumlah Kerjasama yang direncanakan x 100%	100	100	14.445.071.150	100	15.712.405.385	100	16.979.739.620	100	47.137.216.155	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
		Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	Jumlah Bantuan Hukum yang Difasilitasi/ Jumlah Permohonan Bantuan Hukum yang masuk x 100%	100	100		100		100		100		
		Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)	Jumlah Hafidz Al Quran pada Tahun n	584	600		650		700		700		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
		Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto	Jumlah Zakat yang Terkumpul pada Tahun n (Milyar)	5,51	5,82		6,17		6,58		18,57		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%)	Jumlah kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi/jumlah kebijakan Perekonomian x 100%	100	100	855.000.000	100	1.180.000.000	100	1.497.500.000	100	3.532.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
		Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%)	Jumlah dana pembangunan yang terserap/ jumlah total dana pembangunan x 100%	89	92%		94%		96%		96%		
		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangai pada kuartal pertama Tahun / Jumlah kontrak keseluruhan Tahun n x 100%	0	0		0		0		0		
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif x 100%	65	65%		66%		67%		67%		
		Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan/ total belanja langsung x 100%	0,34	0,35		0,36		0,37		0,37		
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD Kedalam RKPD (%)	Jumlah Program pada RKPD/ Jumlah Program pada RPJMD x 100%	100	100	396.308.773	100	588.372.828	100	415.977.611	100	1.400.659.212	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Perencanaan
		Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	Jumlah Capaian Program/ Jumlah Target Program yang ada x 100%	100	100		100		100		100		
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Mitra (%)	60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100% (Bidang Mitra)	100	100	413.660.470	100	474.622.203	100	490.041.857	100	1.378.324.530	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Perencanaan
		Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%)	Jumlah Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan/jumlah data perencanaan pembangunan x 100%	100	100	268.330.700	100	295.163.770	100	324.680.147	100	888.174.617	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Perencanaan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	**IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)**	**penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah**	**58,23**	**76,00**	**59.626.449.848**	**77,00**	**68.179.993.035**	**78,00**	**71.426.659.370**	**78,00**	**199.233.102.253**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Keuangan**
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Penilaian terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	58,25	76	58.396.240.215	77	66.660.370.245	78	69.834.673.590	78	194.891.284.050	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Keuangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD Dengan Laporan BMD Yang Akurat Dan Akuntabel (%)	jumlah OPD dengan laporan BMD yang akurat dan akuntabel/jumlah total OPD X 100%	90	95	626.158.475	95	932.510.250	95	976.915.500	95	2.535.584.225	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Keuangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	Total nilai PAD / total Pendapatan Daerah x 100%	10,62	11,74	604.051.158	12,35	587.112.540	12,43	615.070.280	12,43	1.806.233.978	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Keuangan
	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	**Indeks Inovasi Daerah**	**Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)**	**58,98**	**60,01**	**334.471.183**	**63,01**	**450.000.000**	**66,01**	**515.000.000**	**66,01**	**1.299.471.183**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Perencanaan**
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan	35	55	334.471.183	60	450.000.000	65	515.000.000	180	1.299.471.183	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat	**Indeks kepuasan Masyarakat**	**Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik**	**83,40**	**84,61**	**5.742.210.859**	**85,82**	**6.043.357.944**	**87,03**	**6.379.693.931**	**87,03**	**18.165.262.733**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unsur Kewilayahan**
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan KTP (%)	Jumlah pemilik KTP/ jumlah wajib KTP X 100%	98,65	99,6	289.608.055	99,8	300.000.000	99,9	332.850.670	99,9	922.458.725	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan KK (%)	Jumlah kepala keluarga yang memiliki KK/ jumlah kepala keluarga wajib KK X 100%	98	92,2		94		96		96		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependuduka

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome*)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													n dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 hari yg sudah memiliki KIA x 100% Jumlah anak usia 0-17 th	82,95	75		80		85		85		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	Jumlah keluarga yang tertib administrasi kependudukan x 100 % Jumlah KK	98	85		90		95		95		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akte kelahiran (%)	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir /Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%	70,04	65	50.000.000	68	62.500.000	70	73.000.000	70	185.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan akte kematian (%)	Jumlah penerbitan akte kematian/ jumlah kematian yang dilaporkan x 100%	100	100		100		100		100		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Validltas Data Kependudukan (%)	Pelaksanaan validasi data kependudukan	100	100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.300.000	100	99.300.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan (Buku)	Jumlah jenis buku profil yang tersedia	3	3	42.000.000	3	46.200.000	3	50.820.000	3	139.020.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome*)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana/jumlah kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik x 100%	98	100	2.332.984.000	100	2.447.734.000	100	2.568.096.500	100	7.348.814.500	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec.Barangin)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana/jumlah kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik x 100%	100	100	2.946.118.804	100	3.097.573.944	100	3.257.016.761	100	9.300.709.508	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec. Lembah Segar)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	41.000.000	100	45.100.000	100	49.610.000	100	135.710.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Silungkang)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	10.500.000	100	11.250.000	100	12.000.000	100	33.750.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Talawi)
	Meningkatnya Kualitas ASN	**Indeks Profesionalitas ASN**	**Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya**	**63**	**78**	**3.299.257.151**	**80**	**3.534.218.991**	**82**	**3.566.530.148**	**82**	**10.103.884.196**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kepegawaian**
	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah	2.95	2.95	2.838.246.630	2.95	3.043.107.418	3,00	3.043.107.418	3.00	8.924.461.466	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kepegawaian
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0.39	0.39		0.39		0.40		0.40		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kepegawaian
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan	0.25	0.25		0.25		0.26		0.26		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kepegawaian
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemenuhan Penataan ASN (NSPK) Pemerintah Kota Sawahlunto	Nilai NSPK BKN	70	75	141.010.521	80	155.111.573	85	170.622.730	85	170.622.730	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome*)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Pemerintahan, Unsur Kepegawaian
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	% pengawasan terlaksana sesuai PKPT	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan / Jumlah Rencana Pengawasan di PKPT x 100	100%	100%	190.000.000	100%	199.500.000	100%	209.475.000	100%	598.975.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	IPAK tahun N - IPAK TAHUN n-1 / IPAK TAHUN n-1 x 100%	belum tersedia	3,7	130.000.000	3,75	136.500.000	3.80	143.325.000	3,8	409.825.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
		Persentase Rekomendasi Kebijakan yang disusun	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan/Target x 100%	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi		5 Rekomendasi		5 Rekomendasi		5 Rekomendasi		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi	**Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah**	**2,84**	**3,1**	**3.414.452.975**	**3,15**	**3.755.898.273**	**3,2**	**4.130.779.821**	**3,2**	**11.301.131.069**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Permendagri 86/2017	Ada	Ada	81.110.600	Ada	89.221.660	Ada	97.435.547	Ada	267.767.807	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
		Ketersediaan Buku "Kota Sawahlunto Dalam Angka"		Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		
		Ketersediaan Buku " PDRB Kota Sawahlunto "		Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota	(Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota/jumlah penduduk) x 100%	100	100	1.064.234.525	100	1.170.657.978	100	1.287.723.775	100	3.522.616.278	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Program Aplikasi Informatika	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan Publik) x 100%	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60	70	2.165.000.000	75	2.381.500.000	80	2.619.650.000	80	7.166.150.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Titik yang Diamankan Dibandingkan dengan Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan	Jumlah Titik yang Diamankan/ jumlah Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan x 100%	50	60	104.107.850	65	114.518.635	70	125.970.499	70	344.596.984	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah /	100	100		100		100		100		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome*)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Total Perangkat Daerah x 100 % (Permendagri 86/2017)										Pemerintahan Bidang Persandian
		TOTAL KESELURUHAN				**292.429.195.878**		**321.353.910.059**		**332.668.553.763**		**930.065.537.606**	

6.2 *Roadmap* Inovasi Tahun 2024-2026

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren dengan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
3. Urusan Pemerintahan Pilihan;
4. Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rencana implementasi inovasi daerah diarahkan dengan beberapa tematik yang menjadi sasaran diantaranya adalah :

- **Kesehatan :** Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting, pasca covid-19 yang menjadi endemi dalam pelaksanaan tatanan baru pelayan publik.
- ***Smart City*** : Inovasi daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan layanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital atau inovasi digital dalam aplikasi. *Smart City* dalam konteks ini memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis pada inovasi-inovasi berjenis digital yang telah terhimpun dan terintegrasi oleh pemerintah daerah.
- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** : Inovasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD.
- **Kota Bersih dan Bebas Sampah** : Merupakan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh pemda dalam kebijakan program pemerintah mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan.
- **Pariwisata :** Inovasi Pengelolaan kepariwisataan dan pergelaran *event* dengan tujuan peningkatan kunjungan wisata.

Tabel 6.4
Jumlah Inovasi Berdasarkan Inisiator

NO.	INISIATOR INOVASI	TARGET INOVASI PER INISIATOR	TARGET MINIMAL INOVASI
1	Kepala Daerah	10	200
2	Anggota DPRD		
3	ASN	140	
4	Perangkat Daerah		
5	Masyarakat (Desa/Kelurahan)	50	

Dari tabel diatas jumlah minimal inovasi yang dilaporkan pada Kemendagri melalui penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sebanyak 200 inovasi yang berasal dari inisiator Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah dan Masyarakat melalui Desa/Kelurahan.

Tabel 6.5
Target Inovasi Berdasarkan Perangkat Daerah

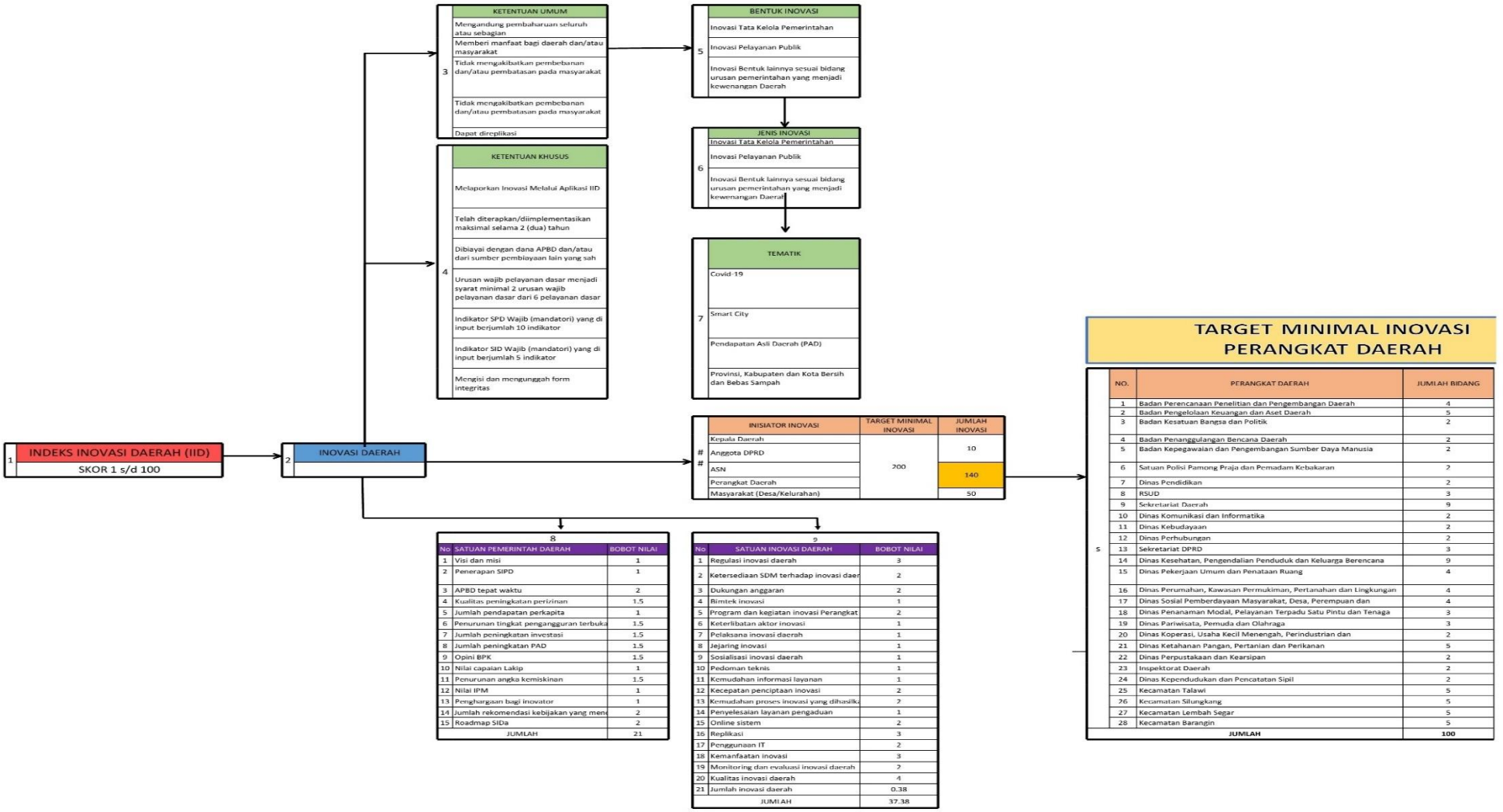
NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BIDANG	TARGET MINIMAL INOVASI
1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	6
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	7
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	3
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	3
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	3
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2	3
7	Dinas Pendidikan	2	3
8	RSUD	3	6
9	Sekretariat Daerah	9	13
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	3
11	Dinas Kebudayaan	2	3
12	Dinas Perhubungan	2	3
13	Sekretariat DPRD	3	4
14	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	20
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	6
16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4	6
17	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	4	6
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3	8
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3	4
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2	3
21	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	5	8
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	4
23	Inspektorat Daerah	2	3
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	8

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BIDANG	TARGET MINIMAL INOVASI
25	Kecamatan Talawi	5	2
26	Kecamatan Silungkang	5	2
27	Kecamatan Lembah Segar	5	2
28	Kecamatan Barangin	5	2
JUMLAH		**100**	**140**

Dari tabel diatas dijabarkan analisis jumlah target inovasi Perangkat Daerah berdasarkan jumlah bidang masing-masing, terdapat 4 Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dan 1 Perangkat Daerah Teknis dengan target lebih dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya yaitu :

- RSUD
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

hal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sehingga berdampak langsung terhadap masyarakat, selain itu juga untuk peningkatan daya saing daerah yang menjadi salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan.


1
INDEKS INOVASI DAERAH (IID)
SKOR 1 s/d 100
2
INOVASI DAERAH
3
KETENTUAN UMUM
Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian
Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat
Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat
Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat
Dapat direplikasi
4
KETENTUAN KHUSUS
Melaporkan Inovasi Melalui Aplikasi IID
Telah diterapkan/diimplementasikan maksimal selama 2 (dua) tahun
Dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah
Urusan wajib pelayanan dasar menjadi syarat minimal 2 urusan wajib pelayanan dasar dari 6 pelayanan dasar
Indikator SPD Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 10 indikator
Indikator SID Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 5 indikator
Mengisi dan mengunggah form integritas
5
BENTUK INOVASI
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
Inovasi Pelayanan Publik
Inovasi Bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6
JENIS INOVASI
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
Inovasi Pelayanan Publik
Inovasi Bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7
TEMATIK
Covid-19
Smart City
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah
#
#
INISIATOR INOVASI
TARGET MINIMAL INOVASI
JUMLAH INOVASI
Kepala Daerah
Anggota DPRD
ASN
Perangkat Daerah
Masyarakat (Desa/Kelurahan)
200
10
140
50
8
No
SATUAN PEMERINTAH DAERAH
BOBOT NILAI
1 Visi dan misi 1
2 Penerapan SIPD 1
3 APBD tepat waktu 2
4 Kualitas peningkatan perizinan 1.5
5 Jumlah pendapatan perkapita 1
6 Penurunan tingkat pengangguran terbuka 1.5
7 Jumlah peningkatan investasi 1.5
8 Jumlah peningkatan PAD 1.5
9 Opini BPK 1.5
10 Nilai capaian Lakip 1
11 Penurunan angka kemiskinan 1.5
12 Nilai IPM 1
13 Penghargaan bagi inovator 1
14 Jumlah rekomendasi kebijakan yang men 2
15 Roadmap SIDa 2
JUMLAH 21
9
No
SATUAN INOVASI DAERAH
BOBOT NILAI
1 Regulasi inovasi daerah 3
2 Ketersediaan SDM terhadap inovasi daer 2
3 Dukungan anggaran 2
4 Bimtek inovasi 1
5 Program dan kegiatan inovasi Perangkat 2
6 Keterlibatan aktor inovasi 1
7 Pelaksana inovasi daerah 1
8 Jejaring inovasi 1
9 Sosialisasi inovasi daerah 1
10 Pedoman teknis 1
11 Kemudahan informasi layanan 1
12 Kecepatan penciptaan inovasi 2
13 Kemudahan proses inovasi yang dihasilka ?
14 Penyelesaian layanan pengaduan 1
15 Online sistem 2
16 Replikasi 3
17 Penggunaan IT 2
18 Kemanfaatan inovasi 3
19 Monitoring dan evaluasi inovasi daerah ?
20 Kualitas inovasi daerah 4
21 Jumlah inovasi daerah 0.38
JUMLAH 37.38
TARGET MINIMAL INOVASI PERANGKAT DAERAH
5
NO.
PERANGKAT DAERAH
JUMLAH BIDANG
1 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 4
2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5
3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2
5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2
6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ?
7 Dinas Pendidikan 2
8 RSUD 3
9 Sekretariat Daerah 9
10 Dinas Komunikasi dan Informatika 2
11 Dinas Kebudayaan 2
12 Dinas Perhubungan 2
13 Sekretariat DPRD 3
14 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9
15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4
16 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan 4
17 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan 4
18 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 3
19 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 2
21 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 5
22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2
23 Inspektorat Daerah 2
24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2
25 Kecamatan Talawi 5
26 Kecamatan Silungkang 5
27 Kecamatan Lembah Segar 5
28 Kecamatan Barangin 5
JUMLAH 100

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi target pencapaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Sawahlunto.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan tahun 2024-2026 berdasarkan permasalahan dan isu strategis kota Sawahlunto, arah kebijakan provinsi dan nasional agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan priorita pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2024-2026.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam mendukung pencapaian pembangunan Tahun 2024-2026, diperlukan kerangka pendanaan yang diproyeksi setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1
Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Uraian	PROYEKSI		
	2024	2025	2026
	Anggaran	Anggaran	Anggaran
BELANJA	**669.390.848.954,95**	**715.447.702.325,62**	**766.844.613.831,22**
Belanja Operasi	**512.863.877.350,52**	**536.388.543.773,20**	**555.202.373.428,45**
Belanja Pegawai	264.499.998.448,67	269.789.998.417,64	283.279.498.338,52
Belanja Barang dan Jasa	221.275.601.302,08	238.977.649.406,25	243.757.202.394,37
Belanja Bunga	1.233.347.293,29	1.216.916.436,70	1.200.704.474,69
Belanja Hibah	22.659.870.306,48	23.113.067.712,61	23.575.329.066,86
Belanja Bantuan Sosial	3.195.060.000,00	3.290.911.800,00	3.389.639.154,00
Belanja Modal	**101.225.753.446,36**	**126.653.887.789,04**	**162.200.651.000,82**
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.124.131.646,40	6.905.511.899,44	6.560.236.304,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.402.452.640,06	56.563.433.696,08	73.532.463.804,91
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.557.469.803,75	63.068.963.764,50	81.989.652.893,85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	141.699.356,15	115.978.429,02	118.297.997,60
BeLanja Tak Terduga	**2.368.036.625,50**	**2.368.036.625,50**	**2.368.036.625,50**

Uraian	PROYEKSI		
	2024	2025	2026
	Anggaran	Anggaran	Anggaran
BeLanja Tak Terduga	2.368.036.625,50	2.486.438.456,78	1.740.506.919,74
Belanja Transfer	**52.933.181.532,57**	**50.037.234.137,89**	**47.073.552.776,44**
Belanja Bagi Hasil	1.340.624.127,48	1.439.522.239,04	1.439.522.239,04
Belanja Bantuan Keuangan	51.592.557.405,09	48.597.711.898,85	45.634.030.537,40
Surplus/defisit	**-27.193.168.532,88**	**-30.588.082.280,81**	**-30.592.032.708,45**

7.2 Kerangka Pendanaan Program Pembangunan

Penyusunan Rencana program perangkat daerah beserta indikator kinerja dan target yang menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah. Rencana Program menurut Perangkat Daerah dan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan												
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/Paket A %	Jumlah siswa SD atau jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto x 100%	108,96	110,25	51.000.000.000	111,21	55.000.000.000	111,4	60.000.000.000	111,4	166.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		APM SD/MI/Paket A %	Jumlah murid SD/sederajat usia 7-12 tahun/ jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto	99,03	99,7		99,8		99,9		99,9		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	Capaian kompetensi Literasi SMP adalah persentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	2,06	2,19		2,27		2,37		2,37		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	Capaian kompetensi Numerasi SMP adalah persentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	1,82	1,94		2,03		2,12		2,12		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		APK PAUD	Jumlah siswa PAUD/ jumlah seluruh anak yang berusia 3-6 tahun di Kota Sawahlunto x 100%	89,62	90,1		90,25		90,35		90,35		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Pesentase Kurikulum Muatan Lokal Yang Dikembangkan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Dibagi Dengan Satuan Pendidikan Yang Ada Di Kota Sawahlunto	0	73	350.000.000	100	367.500.000	100	400.000.000	100	1.117.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi Perizinan Pendidikan Yang Diselengarakan Oleh Masyarakat Jenjang PAUD/SD/SMP)	Jumlah Rekomendasi Usulan Yang Dikeluarkan/ Seluruh Usulan Yang Masuk X 100 %	0	100	55.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	185.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Memiliki Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Sesuai Standar Baik Kuantitas Maupun Kualitas Disetiap Jenjang Pendidikan Dibagi Dengan Jumlah Satuan Pendidikan Semua Jenjang Di Kota Sawahlunto	93	100	550.000.000	100	560.000.000	100	570.000.000	100	1.680.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
						51.955.000.000		55.987.500.000		61.040.000.000		168.982.500.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan												
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk x 100	0,15	0,16	16.164.538.650	0,16	16.390.455.300	0,16	16.676.808.850	0,16	49.231.802.800	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	Jumlah RS Rujukan tingkat yang terkreditasi/jumlah RS di kab/ Kota Sawahlunto x100	100	100		100		100		100		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Puskesmas terakreditasi	Jumlah puskesmas terakreditasi / jumlah seluruh puskesmas x 100	100	100		100		100		100		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	Jumlah dokter dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000	0,38	0,4	1.595.000.000	0,39	1.603.000.000	0,39	1.611.400.000	0,39	4.809.400.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	Jumlah SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya dibagi dengan jumlah tenaga kesehatan seluruhnya x 100	62,35	90		100		100		100		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan	Jumlah Sarana yang memenuhi standar dan pelayanan perizinan/Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian x 100	78	80	145.000.000	85	150.800.000	90	156.862.000	90	452.662.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin	Jumlah Sarana pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi standar perizinan/Jumlah Sarana Pengelolaan	77	80		85		90		90		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Makanan dan Minuman x 100										Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan dibagi dengan jumlah poskesdes dan poskeskel yang ada x 100	0	50	540.000.000	75	540.000.000	100	540.000.000	100	1.620.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
						18.444.538.650		18.684.255.300		18.985.070.850		56.113.864.800	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen	46,87	50,55	7.000.000.000	51,72	7.500.000.000	52,45	8.000.000.000	52,45	22.500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Sarana prasarana air minum dalam kondisi baik/ Jumlah sarana prasarana Air minum yg terpasang) x 100	98,18	99	2.000.000.000	99,5	1.750.000.000	100	1.500.000.000	100	5.250.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD / Jumlah Rumah) x 100 %	91	92	1.500.000.000	92,25	1.555.000.000	92,97	1.620.000.000	92,97	4.675.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	Panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	44,91	47,78	1.750.000.000	48,66	1.750.000.000	49,26	2.000.000.000	49,26	5.500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100	77,25	80,13	6.500.000.000	81,9	6.570.000.000	82,52	7.000.000.000	82,52	20.070.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	Jumlah gedung pemerintah kondisi baik/ jumlah gedung pemerintahX100	83,06	85,12	22.000.000.000	86,89	22.500.000.000	87,14	23.000.000.000	87,14	67.500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi	Jumlah bangunan yg direkomendasi : jumlah bangunan x 100%	62,84	64,56		65,11		65,98		65,98		
	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	(luas Lingkungan yang tertata/luas Lingkungan) x 100	78	80,13	6.500.000.000	81,9	6.570.000.000	82,52	7.000.000.000	82,52	20.070.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/jumlah panjang jalan x 100 %	73,62	75,13	35.000.000.000	76,23	36.000.000.000	77,27	37.000.000.000	77,27	108.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	(Panjang Jembatan dalam kondisi mantap dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	94,1	95,03	2.500.000.000	95,21	2.550.000.000	95,94	2.600.000.000	95,94	7.650.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa Konstruksi terampil (%)	Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi yang bersetifikat dibagi jumlah pelaku jasa konstruksi X 100	0	10	155.000.000	15	210.000.000	20	275.000.000	45	640.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan Penataan Ruang x 100%	17,09	100	1.945.000.000	50	445.000.000	55	445.000.000	100	1.945.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan	Jumlah bangunan sesuai tata ruang/ jumlah bangunan X 100										Perangkat Daerah Yang Menangani

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						86.850.000.000		87.400.000.000		90.440.000.000		263.800.000.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman												
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	Jumlah Rumah terkena bencana yang direhab/ Jumlah rumah yang terkena bencana) x 100%	85	92	768.967.028	93	845.863.731	94	929.350.104	94	2.544.180.864	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sesuai SK Walikota (Ha)	72,93	19,08	275.000.000	19,08	412.500.000	19,08	550.000.000	19,08	1.237.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %	80	83	4.375.000.000	84	4.675.000.000	85	4.977.500.000	85	14.027.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	Jumlah unit yang sedang dibangun terfasilitasi PSU/ jumlah unit rumah x 100%	80	84	2.497.000.000	85	2.628.000.000	86	2.759.000.000	86	7.884.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Tanah pemerintah yang tertib administrasi (%)	Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat/jumlah bidang tanah pemerintah x 100	20,5	23,31	158.410.000	26,69	172.260.000	30,6	187.395.000	30,6	518.065.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung gjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah dokumen pertanahan	jumlah dokumen pertanahan yang tersedia	0	25	158.410.000	25	172.260.000	25	187.395.000	75	518.065.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
						8.232.787.028		8.905.883.731		9.590.640.104		26.729.310.864	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	(Jumlah pengaduan yang ditagani/ jumlah pendaguan pelanggaran yang masuk) x 100%	100	100	550.000.000	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	2.300.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto (%)	(Jumlah kasus kebakaran yang ditangani/jumlah kasus kebakaran) x 100%	100	100	365.000.000	100	980.000.000	100	1.120.000.000	100	2.465.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	Jumlah bencana tertangani/ Jumlah kejadian bencana (%)	100	100	3.404.000.000	100	3.465.000.000	100	4.665.000.700	100	11.534.000.700	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
						4.319.000.000		5.195.000.000		6.785.000.700		16.299.000.700	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial												
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase TKSK yang berpatispasi dalam penanganan PPKS (%)	Persentase TKSK yang berpatispasi dalam penanganan PPKS/jumlah TKSK X 100%	100	100	291.000.000	100	322.100.000	100	348.310.000	100	961.410.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Pemerintahan Bidang Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang terfasilitasi	Jumlah seluruh PPKS uang difasilitasi/ Jumlah seluruh PPKS x 100%	100	100	1.055.190.000	100	1.491.690.000	100	2.019.460.000	100	4.566.340.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti/ populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis x 100%	100	100		100		100		100		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	142.240.000	100	182.220.000	100	221.530.000	100	545.990.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)	Jumlah penanganan bencana : jumlah kejadian bencana x 100%	100	100	220.000.000	100	254.000.000	100	298.800.000	100	772.800.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan (TMP) yang terfasilitasi	Jumlah TMP yang difasilitasi : jumlah seluruh TMP x 100%	100	100	80.000.000	100	154.880.000	100	154.880.000	100	389.760.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						1.788.430.000	600	2.404.890.000	600	3.042.980.000	600	7.236.300.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja												
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja (%)	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan x 100%	67	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Berwirausaha (%)	Jumlah lulusan pelatihan yang berwirausaha / Jumlah peserta pelatihan keseluruhan x 100%	0	5	690.000.000	7	740.000.000	9	740.000.000	9	2.170.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja (%)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	12,23	23	37.481.800	25	144.481.800	30	144.481.800	30	326.445.400	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/Jumlah total perusahaan x 100%	86,21	88	19.754.750	89	19.754.750	90	19.754.750	90	59.264.250	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
						797.236.550		954.236.550		954.236.550		2.705.709.650	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	Jumlah anggota DRPD perempuan/ jumlah total anggota DPRD x 100%	20	20	300.000.000	20	315.000.000	20	330.000.000	20	945.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase PKK aktif (%)	Jumlah PKK aktif/ jumlah total PKK x 100%	100	100	570.000.000	100	600.000.000	100	560.000.000	100	1.605.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kelurahan ramah anak (%)	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai (pee 1000 anak/mil)	50	100	175.000.000	100	188.000.000	100	200.000.000	100	563.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase sekolah ramah anak (%)	Jumlah sekolah ramah anak/jumlah sekolah x 100%	100	100		100		100		100		Perangkat Daerah Yang Menangani

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yg mengalami kekerasan : jumlah penduduk perempuan x 100.000	0,02	0,01	380.000.000	0,01	395.000.000	0,01	410.000.000	0,01	1.185.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memproleh layanan sesuai (per 1000 anak (permil)	(Jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memproleh layanan sesuai/Jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus)x1000	100	100	380.000.000	100	405.000.000	100	430.000.000	100	1.215.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 th) korban kekerasan yg ditangani instansi tingkat kab/kota yg didampingi : jumlah anak (penduduk usia kurang 18 th) x 100%	100	100		100		100		100		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						1.805.000.000		1.903.000.000		1.930.000.000		5.513.000.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan												
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Kecukupan Kebutuhan Beras	Jumlah Produksi/Jumlah Kebutuhan Beras X 100 %	100	100	246.946.000	100	270.600.000	100	479.160.000	100	996.706.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	Survey indek rata-rata konsumsi pangan masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok	85,1	86	545.000.000	86,5	599.500.000	87	859.350.000	87	1.803.850.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	Jumlah penurunan produk rawan pangan/jumlah penduduk rawan pangan x 100%	6	6	60.000.000	6	66.000.000	6	72.600.000	18	198.600.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida	Perbandingan produk pangan segar yang terdeteksi dari cemaran mikroba bagi total bahan pangan yang menjadi sampel	97,78	93	136.500.000	93	150.150.000	93	165.165.000	93	451.815.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
						988.446.000		1.086.250.000		1.576.275.000		3.450.971.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)	Jumlah Kasus pertanahan yang terfasilitasi/dengan jumlah kasus pertanahan x 100%	100	100	40.150.000	100	44.165.000	100	48.581.500	100	132.896.500	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)	(Jumlah usulan ganti rugi tanah yang ditetapkan/ usulan ganti rugi dari OPD) x 100%	100	100	60.850.000	100	66.935.000	100	73.628.500	100	201.413.500	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota (%)	Jumlah tanah ulayat yang ditetapkan dibagi jumlah tanah ulayat x 100%	100	100	27.500.000	100	30.250.000	100	33.275.000	100	91.025.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan (%)	(Jumlah rekomendasi izin membuka tanah yg diterbitkan/ jumlah permohonan) x 100%	100	100	17.910.000	100	17.910.000	100	17.910.000	100	53.730.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)	(Luas Tanah budidaya yang memiliki aspek hukum / luas tanah budidaya) x 100%	75	81	12.000.000	82	13.000.000	83	14.000.000	83	39.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
						158.410.000		172.260.000		187.395.000		518.065.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup												
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen perencanaan yang memilliki dokumen kajian lingkungan hidup (%)	Jumlah Dokumen perencanaan yang memiliki dokumen kajian lingkungan hidup /	9,09	45,45	500.000.000	54,55	230.000.000	63,64	250.000.000	63,64	980.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Perencanaan yangmembutuhkan kajian lingkungan hidup x 100%										Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	(Jumlah Kegiatan yang melakukan pengelolan dan pemantauan / Jumlah Kegiatan Usaha) x 100 %	75	78	359.544.524	79	395.498.976	80	435.048.874	80	1.190.092.374	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program pengelolaaan Kenanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)	(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %	100	100	1.303.033.490	100	1.433.336.839	100	1.576.670.523	100	4.313.040.852	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3 (%)	jumlah Kegiatan usaha yang memiliki izin PLB3/ Jumlah kegiatan Usahax 100%	75	76	23.352.395	77	25.687.635	78	28.256.398	78	77.296.427	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	jumlah usaha yang taat lingkungan/seluruh usaha yang berizin x 100	75	77	105.790.663	78	116.369.729	79	128.006.702	79	350.167.095	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup(%)	Jumlah Masyarakat yang di diklat/Jumlah Masyarakat x 100%	100	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	400.510.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang LH yang diperoleh	Jumlah penghargaan LH yg diberikan/ Jumlah seluruh penghargaanLH x 100%	100	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	364.100.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan (%)	Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan/Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang dilaporkan x100%	100	100	16.500.000	100	18.150.000	100	19.965.000	100	54.615.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang terkelola (%)	Total volume sampah ditangani/total volume	95	97	2.878.462.769	98	3.166.309.045	99	3.482.939.950	99	9.527.711.764	Perangkat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			timbunan sampah x 100 %										Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
						5.417.683.841		5.639.452.224		6.200.397.447		17.257.533.512	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan KTP (%)	Jumlah pemilik KTP/ jumlah wajib KTP X 100%	98,65	99,6	289.608.055	99,8	300.000.000	99,9	332.850.670	99,9	922.458.725	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan KK (%)	Jumlah kepala keluarga yang memiliki KK/ jumlah kepala keluarga wajib KK X 100%	98	92,2		94		96		96		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 hari yg sudah memiliki KIA x 100% Jumlah anak usia 0-17 th	82,95	75		80		85		85		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	Jumlah keluarga yang tertib administrasi kependudukan x 100 % Jumlah KK	98	85		90		95		95		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akte kelahiran (%)	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir /Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%	70,04	65	50.000.000	68	62.500.000	70	73.000.000	70	185.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													an Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan akte kematian (%)	Jumlah penerbitan akte kematian/ jumlah kematian yang dilaporkan x 100%	100	100		100		100		100		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	ValidItas Data Kependudukan (%)	Pelaksanaan validasi data kependudukan	100	100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.300.000	100	99.300.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan (Buku)	Jumlah jenis buku profil yang tersedia	3	3	42.000.000	3	46.200.000	3	50.820.000	3	139.020.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						411.608.055		441.700.000		492.970.670		1.346.278.725	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan IDM per tahun/jumlah desa berkembang x 100%	n/a	100	785.680.168	100	1.575.000.000	100	1.136.000.000	100	3.496.680.168	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan IDM per tahun/jumlah desa tertinggal x 100%	0	0		0		0		0		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberday

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													aan Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%)	Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina/Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat seluruhnya x 100%	100	100	750.000.000	100	850.000.000	100	960.000.000	100	2.560.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						1.535.680.168		2.425.000.000		2.096.000.000		6.056.680.168	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate /MCPR	Jumlah AkseptorAktif Moder/ Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	64,6	66	350.400.000	68	114.850.000	70	118.400.000	70	583.650.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100	12	12,2	1.460.543.000	12	1.533.570.150	11,6	1.610.248.658	11,6	4.604.361.808	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	Jumlah semua kelompok ketahanan keluarga yang mendapatkan informasi Bangga /Semua Jumlah Ketahanan Kelompok yang ada x 100	80	86	692.880.000	87	727.524.000	88	763.900.200	88	2.184.304.200	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						2.503.823.000		2.375.944.150		2.492.548.858		7.372.316.008	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan												
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan x 100%	80	100	3.565.000.000	100	3.330.000.000	100	3.290.000.000	100	10.185.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Perhubungan
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase sarana prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	Jumlah sarana yang tersedia/jumlah sarana yang dibutuhkan X 100%	85	90	500.000.000	95	200.000.000	100	200.000.000	100	900.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
						4.065.000.000		3.530.000.000		3.490.000.000		11.085.000.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota	(Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota/jumlah penduduk) x 100%	100	100	1.064.234.525	100	1.170.657.978	100	1.287.723.775	100	3.522.616.278	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Program Aplikasi Informatika	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan Publik) x 100%	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60	70	2.165.000.000	75	2.381.500.000	80	2.619.650.000	80	7.166.150.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
						3.229.234.525		3.552.157.978		3.907.373.775		10.688.766.278	
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah												
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian	Jumlah koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/jumlah koperasi x 100%	49,27	77	200.000.000	77	240.000.000	77	250.000.000	77	690.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang meningkat volume usahanya	Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya/ Jumlah UMKMx100%	4,6	4	95.000.000	4	120.000.000	5	145.000.000	5	360.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya/total koperasi x 100%	30	50	240.000.000	58	260.000.000	66	290.000.000	66	790.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya	Jumlah pengelola koperasi bersertifikat / Total pengelola koperasi x100%	100	0,04	590.000.000	0,07	650.000.000	0,11	710.000.000	0,11	1.950.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase pengelola UMKM yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya	Jumlah pengelola UMKM bersertifikat / Total UMKM x100%	52	52		52		52		52		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha/Jumlah UMKM X 100%	46	47	160.000.000	47	205.000.000	47	250.000.000	47	615.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
						1.285.000.000		1.475.000.000		1.645.000.000		4.405.000.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal												
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah realisasi investasi (PMDN dan PMA)	112.593	46	200.000.000	51	100.000.000	56	100.000.000	153	400.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	(Jumlah investor tahun n - jumlah investor tahun n-1) / Jumlah investor tahun n-1 x 100%	49,25	27	50.000.000	29	150.000.000	31	150.000.000	31	350.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai SOP (%)	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP/jumlah total perizinan dan non perizinan yang diterbitkan x 100%	100	100	178.454.800	100	278.454.800	100	278.454.800	100	735.364.400	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peluang Investasi Yang Telah Divalidasi (%)	Jumlah perusahaan yang telah divalidasi/jumlah total perusahaan x 100%	n/a	40	369.694.850	50	369.694.850	60	369.694.850	60	1.109.084.550	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terakses Publik (%)	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terakses publik/ jumlah total data dan informasi perizinan dan non perizinan x 100%	n/a	100	152.438.300	100	152.438.300	100	152.438.300	100	457.314.900	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
						950.587.950		1.050.587.950		1.050.587.950		3.051.763.850	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga												
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	15	16	773.419.350	17	850.761.285	18	935.837.414	18	2.560.018.049	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional/Jumlah organisasi kepramukaan x 100%	75	75	350.000.000	77	385.000.000	79	423.500.000	79	1.158.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional /internasional (atlit)	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional /internasional (atlit)	177	148	3.340.540.850	155	3.674.594.935	160	4.042.054.429	160	11.057.190.214	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
						4.463.960.200		4.910.356.220		5.401.391.843		14.775.708.263	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Permendagri 86/2017	Ada	Ada	81.110.600	Ada	89.221.660	Ada	97.435.547	Ada	267.767.807	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
		Ketersediaan Buku "Kota Sawahlunto Dalam Angka"		Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		
		Ketersediaan Buku " PDRB Kota Sawahlunto "		Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		
						81.110.600		89.221.660		97.435.547		267.767.807	
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Titik yang Diamankan Dibandingkan dengan Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan	Jumlah Titik yang Diamankan/ jumlah Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan x 100%	50	60	104.107.850	65	114.518.635	70	125.970.499	70	344.596.984	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah / Jumlah Total Perangkat Daerah x 100 % (Permendagri 86/2017)	100	100		100		100		100		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
						104.107.850		114.518.635		125.970.499		344.596.984	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pemajuan Kebudayaan Yang Lestari (%)	(Jumlah pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/Total jumlah pemajuan kebudayaan) X100%	25,05	31,1	700.000.000	31,3	770.000.000	31,5	847.000.000	31,5	2.317.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri (Kelompok)	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri	13,29	13,3	772.572.000	13,6	849.829.200	13,9	934.812.120	13,9	2.557.213.320	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah (%)	(Jumlah kelompok masyarakat yang mengetahui sejarah / Jumlah kelompok masyarakat yang ada) X 100%	55	60	75.000.000	65	82.500.000	70	90.750.000	70	248.250.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar Budaya Yang Lestari (%)	(Jumlah cagar budaya yang lestari / Total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) X 100%	60,5	63,92	5.240.000.000	65	6.364.000.000	67	6.500.400.000	67	18.104.400.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah kunjungan museum (orang)	Jumlah kunjungan museum (orang)	34658	33000	2.460.000.000	33500	2.706.000.000	34000	2.976.600.000	34000	8.142.600.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
						9.247.572.000		10.772.329.200		11.349.562.120		31.369.463.320	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	∑ (UPLM1-7/ALM) * 100	74,14	74,5	240.000.000	74,6	310.000.000	74,7	310.000.000	74,7	860.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)	Jumlah naskah yang dinyatakan sebagai naskah kuno	0	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	22.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
						247.500.000		317.500.000		317.500.000		882.500.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												
	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sbg bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah & pertanggungjawaban nasional (pasal 40 & pasal 59 UU no 43/2009 ttg kearsipan) (%)	T = (m+b+g+a+c+i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan & penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD Prov yg digabung dan/atau dibubarkan & pemekaran daerah kab/kota dg NSPK, a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis & arsip hasil alih media dengan NSPK, c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yg bersifat tertutup dg NSPK	50,4	50,57	150.000.000	50,58	95.000.000	50,6	95.000.000	50,6	340.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan & keutuhan arsip sbg bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa & bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat (%)	T=(a+i+s+j)/4 T = tingkat kearsipan, a = % arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip, i = % arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, s = % arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = % jumlah arsip	50,42	50,5	80.000.000	50,56	60.000.000	50,6	60.000.000		200.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase arsip yang diberi akses (%)	Jumlah arsip yang bisa akses (dokumen)	na	3	15.000.000	6	17.500.000	10	20.000.000	10	52.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						245.000.000		172.500.000		175.000.000		592.500.000	
	Urusan Pemerintahan Pilihan												
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan												
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan	Jumlah Produksi perairan umum dan Budidaya	235,55	200	580.000.000	202	637.000.000	204	644.000.000	606	1.861.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	Jumlah kg ikan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia selama 1 tahun dslsm brntuk konfersi	41,49	39	60.000.000	39	65.000.000	39	70.000.000	39	195.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
						640.000.000		702.000.000		714.000.000		2.056.000.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata												
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)	Jumlah produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI/ Jumlah produk ekonomi kreatif x 100%	0,15	1	44.172.500	2	48.589.750	3	53.448.725	3	146.210.975	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang profesional/ Jumlah pelaku ekonomi kreatif x 100%	18	20	128.477.600	25	141.325.360	30	155.457.896	30	425.260.856	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	Jumlah pengunjung yang mengatakan puas / jumlah seluruh pengunjung x 100%	80	70	717.269.450	75	788.996.395	80	867.896.035	80	2.374.161.880	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	Jumlah Objek Wisata Unggul/ jumlah objek wisata x 100%	n/a	50	10.200.000.000	55	21.200.000.000	60	16.200.000.000	60	32.600.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
						11.089.919.550		22.178.911.505		17.276.802.656		35.545.633.711	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Produktivitas x luas panen	17733,75	15800	2.930.000.000	15850	2.969.500.000	15900	3.035.000.000	47550	8.934.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Jumlah Produksi Karet	Produktivitas x luas panen TM	2230,91	1730		1735		1740		5.205		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Jumlah Produksi Kakao	Produktivitas x luas panen TM	588,8	569		570		571		1710		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Jumlah Produksi :											Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Daging Sapi	Pemotongan tercatat + 5% (pemotongan tercatat) x 173,5	339,45	319		320		321		960		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Daging Ayam	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	1005,85	900,26		900,26		900,26		900,26		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Telur	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	367,7	135,86		135,86		135,86		407,58		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam		01:11,6	01:10		01;10		01:10		01:10		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penambahan atau perbaikan jaringan irigasi	Jaringan irigasi yang ditambah atau diperbaiki/luas baku sawah x 100%	7,48	2,5	3.720.000.000	2,5	3.245.000.000	2,5	2.770.000.000	7,5	9.735.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													an Bidang Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari MHS dan zoonosis	Jumlah wilayah yang terkendali/jumlah wilayah yang terjangkit x 100%	100	90	605.000.000	90	670.000.000	90	735.000.000	90	2.010.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanaman pangan dan perkebunan	Luas lahan yang dikendalikan/luas lahan yang terserang x 100%	12,19	100	275.000.000	100	285.000.000	100	60.000.000	100	620.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang berprestasi	17,39	1	470.000.000	1	530.000.000	1	590.000.000	3	1.590.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Jumlah Ketenangan Penyuluhyangberprestasi	Jumlah Ketenagaan Penyuluh yang berprestasi	2	1		1		1		3		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
						8.000.000.000		7.699.500.000		7.190.000.000		22.889.500.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan												
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	Jumlah pasar rakyat dengan minmal tipe C / jumlah pasar x 100%	14	14	500.000.000	14	2.500.000.000	14	1.500.000.000	14	4.500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional	Jumlah bahan pokok yang stabil/Total kebutuhan bahan pokok x 100%	100	80	250.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	80	750.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	Jumlah produk unggulan yang diekspor/Jumlah Produk unggulan x 100%	50	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	600.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pesentase pasar tradisional tertib ukur (%)	Jumlah pasar tradisional tertib ukur/ jumlah pasar tradisional x 100%	14	28	100.000.000	28	120.000.000	42	140.000.000	42	360.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk dalam negeri yang dipromosikan (%)	Jumlah produk dalam negeri dipromosikan/Total Produk dalam negeri x100%	50	55	85.000.000	60	90.000.000	65	95.000.000	65	270.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
						1.135.000.000		3.160.000.000		2.185.000.000		6.480.000.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian												
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	Jumlah IKM yang meningkat skala usahanya/ Total IKM x100%	2	2	680.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	1.880.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai izin (%)	Jumlah Indsutri kecil menengah yang mempunyai izin/jumlah industri kecil dan menengah x 100%	28	35	100.000.000	40	100.000.000	45	100.000.000	45	300.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Program Pengelola Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terpublis di SIINAS(%)	Jumlah IKM yang terpublis di SIINAS /jumlah IKM X 100%	30	35	100.000.000	40	500.000.000	45	500.000.000	45	1.100.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
						880.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		3.280.000.000	
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan												
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah												
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti/ Jumlah Kerjasama yang direncanakan x 100%	100	100	14.445.071.150	100	15.712.405.385	100	16.979.739.620	100	47.137.216.155	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah
		Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	Jumlah Bantuan Hukum yang Difasilitasi/ Jumlah Permohonan Bantuan Hukum yang masuk x 100%	100	100		100		100		100		
		Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)	Jumlah Hafidz Al Quran pada Tahun n	584	600		650		700		700		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah
		Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto	Jumlah Zakat yang Terkumpul pada Tahun n (Milyar)	5,51	5,82		6,17		6,58		18,57		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%)	Jumlah kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi/jumlah kebijakan Perekonomian x 100%	100	100	855.000.000	100	1.180.000.000	100	1.497.500.000	100	3.532.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah
		Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%)	Jumlah dana pembangunan yang terserap/ jumlah total dana pembangunan x 100%	89	92%		94%		96%		96%		
		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangai pada kuartal pertama Tahun / Jumlah kontrak keseluruhan Tahun n x 100%	0	0		0		0		0		
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif x 100%	65	65%		66%		67%		67%		
		Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan/ total belanja langsung x 100%	0,34	0,35		0,36		0,37		0,37		
						15.300.071.150		16.892.405.385		18.477.239.620		50.669.716.155	
	Unsur Sekretariat DPRD												
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang terlaksana/ jumlah kegiatan DPRD x 100%	100	100	16.295.000.000	100	17.639.500.000	100	19.392.450.000	100	53.326.950.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD
						16.295.000.000		17.639.500.000		19.392.450.000		53.326.950.000	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan												
	Unsur Perencanaan												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD Kedalam RKPD (%)	Jumlah Program pada RKPD/ Jumlah Program pada RPJMD x 100%	100	100	396.308.773	100	588.372.828	100	415.977.611	100	1.400.659.212	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Perencanaan
		Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	Jumlah Capaian Program/ Jumlah Target Program yang ada x 100%	100	100		100		100		100		
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Mitra (%)	60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100% (BIDANG MITRA)	100	100	413.660.470	100	474.622.203	100	490.041.857	100	1.378.324.530	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Perencanaan
		Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%)	Jumlah Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan/jumlah data perencanaan pembangunan x 100%	100	100	268.330.700	100	295.163.770	100	324.680.147	100	888.174.617	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Perencanaan
						1.078.299.943		1.358.158.801		1.230.699.615		3.667.158.359	
	Unsur Penelitian dan Pengembangan												
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan	35	55	334.471.183	60	450.000.000	65	515.000.000	180	1.299.471.183	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Penelitian dan Pengembangan
						334.471.183		450.000.000		515.000.000		1.299.471.183	
	Unsur Keuangan												
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Penilaian terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	58,25	76	58.396.240.215	77	66.660.370.245	78	69.834.673.590	78	194.891.284.050	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Keuangan
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD Dengan Laporan BMD Yang Akurat Dan Akuntabel (%)	jumlah OPD dengan laporan BMD yang akurat dan akuntabel/jumlah total OPD X 100%	90	95	626.158.475	95	932.510.250	95	976.915.500	95	2.535.584.225	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Keuangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	Total nilai PAD / total Pendapatan Daerah x 100%	10,62	11,74	604.051.158	12,35	587.112.540	12,43	615.070.280	12,43	1.806.233.978	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Keuangan
						59.626.449.848		68.179.993.035		71.426.659.370		199.233.102.253	
	Unsur Kepegawaian												
	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah	2.95	2.95	2.838.246.630	2.95	3.043.107.418	3,00	3.043.107.418	3.00	8.924.461.466	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kepegawaian
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0.39	0.39		0.39		0.40		0.40		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kepegawaian
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan	0.25	0.25		0.25		0.26		0.26		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kepegawaian
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemenuhan Penataan ASN (NSPK) Pemerintah Kota Sawahlunto	Nilai NSPK BKN	70	75	141.010.521	80	155.111.573	85	170.622.730	85	170.622.730	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kepegawaian
						2.979.257.151		3.198.218.991		3.213.730.148		9.095.084.196	
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Unsur Inspektorat Daerah												
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	% pengawasan terlaksana sesuai PKPT	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan / Jumlah Rencana Pengawasan di PKPT x 100	100%	100%	190.000.000	100%	199.500.000	100%	209.475.000	100%	598.975.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	IPAK tahun N - IPAK TAHUN n-1 / IPAK TAHUN n-1 x 100%	belum tersedia	3,7	130.000.000	3,75	136.500.000	3.80	143.325.000	3,8	409.825.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
		Persentase Rekomendasi Kebijakan yang disusun	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan/Target x 100%	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi		5 Rekomendasi		5 Rekomendasi		5 Rekomendasi		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
						320.000.000		336.000.000		352.800.000		1.008.800.000	
	Unsur Kewilayahan												
	Unsur Kecamatan												
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan Pemerintahan dan pelayanan Publik dikali seratus	98	100	2.332.984.000	100	2.447.734.000	100	2.568.096.500	100	7.348.814.500	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec.Barangin)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	Jumlah Lembaga Kemasyarakat yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dikali 100	97	100	1.695.000.000	100	1.635.300.000	100	1.844.250.000	100	5.174.550.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec.Barangin)
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	Jumlah Wilayah dalam Kondisi Aman dibagi Jumlah Wilayah dikali 100	100	100	30.000.000	100	32.000.000	100	35.000.000	100	97.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec.Barangin)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan umum dengan baik	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik dibagi jumlah urusan pemerintahan umum dikali 100	100	100	175.000.000	100	26.000.000	100	187.000.000	100	388.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													(Kec.Baran gin)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	Jumlah Desa yang terlaksana Penyelenggaraan Pemerintahannya dengan Baik dibagi Jumlah desa dikali 100	100	100	41.000.000	100	63.500.000	100	48.000.000	100	152.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec.Baran gin)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan Pemerintahan dan pelayanan Publik dikali seratus	100	100	2.946.118.804	100	3.097.573.944	100	3.257.016.761	100	9.300.709.509	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec. Lembah Segar)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	Jumlah Lembaga Kemasyarakat yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dikali 100	100	100	1.176.980.704	100	933.679.740	100	1.277.438.727	100	3.388.099.171	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec. Lembah Segar)
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	Jumlah Wilayah dalam Kondisi Aman dibagi Jumlah Wilayah dikali 100	100	100	13.875.125	100	15.262.638	100	16.788.901	100	45.926.664	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec. Lembah Segar)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan umum dengan baik	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik dibagi jumlah urusan pemerintahan umum dikali 100	-	100	170.000.000	100	20.000.000	100	170.000.000	100	360.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec. Lembah Segar)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	Jumlah Desa yang terlaksana Penyelenggaraan Pemerintahannya dengan Baik dibagi Jumlah desa dikali 100	100	100	85.000.000	100	97.500.000	100	97.000.000	100	279.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec. Lembah Segar)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan Pemerintahan dan pelayanan Publik dikali seratus	100	100	41.000.000	100	45.100.000	100	49.610.000	100	135.710.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Silungkang)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	Jumlah Lembaga Kemasyarakat yang aktif dibagi Jumlah Lembaga	100	100	358.000.000	100	88.800.000	100	359.680.000	100	806.480.000	Perangkat Daerah Yang Menangani

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kemasyarakatan dikali 100										Unsur Kewilayahan (Kecamatan Silungkang)
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	Jumlah Wilayah dalam Kondisi Aman dibagi Jumlah Wilayah dikali 100	100	100	15.000.000	100	16.500.000	100	18.150.000	100	49.650.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Silungkang)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan umum dengan baik	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik dibagi jumlah urusan pemerintahan umum dikali 100	100	100	170.000.000	100	22.000.000	100	174.200.000	100	366.200.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Silungkang)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	Jumlah Desa yang terlaksana Penyelenggaraan Pemerintahannya dengan Baik dibagi Jumlah desa dikali 100	100	100	17.000.000	100	23.700.000	100	25.570.000	100	66.270.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Silungkang)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan Pemerintahan dan pelayanan Publik dikali seratus	100	100	10.500.000	100	11.250.000	100	12.000.000	100	33.750.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Talawi)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	Jumlah Lembaga Kemasyarakat yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dikali 100	100	100	395.657.495	100	104.223.245	100	434.223.245	100	934.103.984	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Talawi)
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	Jumlah Wilayah dalam Kondisi Aman dibagi Jumlah Wilayah dikali 100	100	100	30.000.000	100	32.000.000	100	35.000.000	100	97.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Talawi)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan umum dengan baik	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik dibagi jumlah urusan pemerintahan umum dikali 100	100	100	170.000.000	100	20.000.000	100	170.000.000	100	360.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													(Kecamatan Talawi)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	Jumlah Desa yang terlaksana Penyelenggaraan Pemerintahannya dengan Baik dibagi Jumlah desa dikali 100	100	100	82.000.000	100	90.000.000	100	96.500.000	100	268.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Talawi)
						9.955.116.128		8.822.123.567		10.875.524.134		29.652.763.828	
	Unsur Pemerintahan Umum												
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	Jumlah Peserta yang meningkat pemahamannya/jumlah peserta x 100%	50	57	300.000.000	60	400.000.000	65	500.000.000	70	1.200.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pemerintahan Umum
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pemilu/Jumlah DPT x 100%	78	86,25	1.500.000.000	0	750.000.000	0	800.000.000	86,25	3.050.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pemerintahan Umum
		Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan kepala daerah	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pilkada/Jumlah DPT x 100%	78,62	82,5		0		0		82,5		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pemerintahan Umum
		Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pilgub/Jumlah DPT x 100%	54,27	65,8		0		0		65,8		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pemerintahan Umum
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif di Kota Sawahlunto	Jumlah organisasi yang terdaftar dan aktif/jumlah organisasi yang terdata x 100%	0	100	35.000.000	100	45.000.000	100	65.000.000	100	145.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pemerintahan Umum
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	Pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100	100	750.000.000	100	850.000.000	100	950.000.000	100	2.550.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pemerintahan Umum
		Desa Bersinar yang terbentuk	Jumlah Desa Bersinar yang terbentuk	5	1		1		1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pemerintahan Umum
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase gejala konflik sosial yang dapat diselesaikan	Jumlah konflik sosial yang diselesaikan/jumlah konflik sosial x 100%	100	100	800.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	2.700.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Pemerintahan Umum
		Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis	Jumlah laporan Pembinaan yang di tindaklanjuti / jumlah laporan) x 100%	100	100		100		100		100		Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pemerintahan Umum
						3.385.000.000		2.945.000.000		3.315.000.000		9.645.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	96,6	100	110.651.547.324	100	112.633.317.467	100	115.535.000.000	100	361.598.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	40.486.788.209	100	41.511.127.619	100	44.636.684.000	100	127.634.599.828	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	2.564.079.118	100	2.580.000.000	100	3.580.000.000	100	8.724.079.118	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	11.891.596.336	100	13.080.755.970	100	13.200.755.970	100	38.173.108.276	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	2.970.000.000	100	3.337.700.000	100	4.337.700.000	100	10.645.400.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	6.086.454.771	100	5.605.700.731	100	6.605.700.731	100	18.297.856.233	Perangkat Daerah Yang Menangani

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	12.652.316.141	100	13.772.620.074	100	14.888.674.141	100	41.313.610.356	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	5.400.000.000	100	5.940.000.000	100	6.500.000.000	100	17.840.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	92,9	100	4.500.123.978	100	4.641.704.182	100	5.019.516.276	100	5.019.516.276	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	7.500.000.000	100	7.809.012.780	100	9.809.012.780	100	25.118.025.560	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	4.536.570.126	100	5.482.572.334	100	6.397.763.499	100	16.816.905.959	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	7.296.000.000	100	7.493.000.000	100	8.615.000.000	100	22.404.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Perindustrian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	5.319.336.269	100	5.022.954.371	100	6.022.954.371	100	16.365.245.011	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	4.943.337.166	100	5.237.670.883	100	5.981.437.971	100	16.362.446.019	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	4.445.250.000	100	4.432.000.000	100	5.432.000.000	100	14.309.250.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	4.943.337.166	100	5.237.670.883	100	5.981.437.971	100	16.362.446.019	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	28.955.496.618	100	29.845.546.280	100	34.755.595.942	100	95.556.638.840	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	19.947.000.000	100	20.041.000.000	100	22.715.870.000	100	61.404.570.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	9.183.352.384	100	9.501.948.183	100	11.163.945.715	100	29.849.246.282	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Keuangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	6.301.670.644	100	6.801.234.400	100	8.582.516.001	100	20.000.139.444	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Perencanaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	85	80	6.718.752.165	85	6.789.921.640	90	7.789.921.640	90	21.298.595.445	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kepegawaian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	7.325.905.056	100	7.587.983.676	100	9.352.163.860	100	26.532.355.799	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	4.899.802.655	100	5.405.747.282	100	6.113.189.146	100	16.418.739.084	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec.Barangin)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	6.500.000.000	100	7.472.283.020	100	8.070.587.171	100	22.042.870.191	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec. Lembah Segar)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	2.500.000.000	100	2.709.183.800	100	3.090.102.180	100	8.299.285.980	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Silungkang)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	2.500.000.000	100	2.730.893.490	100	3.001.043.631	100	8.231.937.121	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Talawi)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Defenisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	5.061.302.642	100	5.442.798.379	100	6.442.798.379	100	16.946.899.400	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pemerintahan Umum
						336.080.018.768		348.146.347.444		383.621.371.376		1.083.565.766.241	
	TOTAL KESELURUHAN					**676.225.320.138**		**722.467.702.326**		**774.359.613.831**		**2.172.259.542.855**	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja makro merupakan alat ukur untuk mengetahui perkembangan dari indikator kinerja yang berlaku secara nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga terkait.

8.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO

Untuk mengukur tujuan pembangunan Kota Sawahlunto secara makro, baik itu dari pendapatan masyarakat, kemampuan ekonomi, kemiskinan, pembangunan manusia, pemerataan pendapatan dan pengangguran dapat dari pencapaian Indicator Kinerja Makro. Berikut capaian Indikator Kinerja Makro Kota Sawahlunto.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Makro Terhadap Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,48	4,73	4,98	4,98
2	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	71,60	74,35	77,11	77,11
3	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,289	0,285	0,280	0,280
4	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,19	2,18	2,17	2,17
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,92	4,83	4,75	4,75
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	74,74	75,24	75,74	75,74

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
7	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,69	70,75	70,89	70,89
8	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,55	13,75	14,01	14,01
9	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,57	10,64	10,72	10,72
10	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11,15	11,37	11,47	11,47

8.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif yang akan memberikan infrmasi sejauh mana keberhasilan peaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dari penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digunakan untuk perbaiakan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada RPD tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Terhadap Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN					
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	**74,74**	**75,24**	**75,74**	**75,74**

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
2	Indeks Infrastruktur Wilayah	[40 %{50%(50 % kualitas jalan + 50 % kualitas jembatan)} + {40 % (50 % kualitas SDA + 50 % kualitas drainase kondisi baik)} + (10 % bangunan Gedung Pemerintah kondisi baik)] + 20 % {60 %(50 % Pengurangan sampah + 50 % Pungutan sampah) + (40 % IKLH)] + [20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni][20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni)] + [10 % {(50 % kinerja Lalu lintas + (50 % kinerja PJU)} + [10 % {(50 % kampung +20 % rehabilitasi rekonstruksi tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + {30 % ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30 % edukasi proteksi kebakaran + 40 % Response Time}]/2	**72,35**	**74,00**	**75,22**	**75,22**
3	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,48	4,73	4,98	4,98
4	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	**71,60**	**74,35**	**77,11**	**77,11**
5	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,19	2,18	2,17	2,17
6	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11,15	11,37	11,47	11,47
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	56,50	57,32	58,14	58,14
	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN SASARAN					
1	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,69	70,75	70,89	70,89
2	Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak	13	12,5	10,6	10,6

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
		balita pada waktu yang sama) x 100 %				
3	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,55	13,75	14,01	14,01
4	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,57	10,64	10,72	10,72
5	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	(Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik/5	70,72	71,74	72,65	72,65
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5% IKU, 21,9%	64,74	65,52	66,57	66,57
7	Indeks Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah	68,46	68,66	68,9	68,9
8	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	86,23	87,20	88,32	88,32
9	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	84,00	86,00	87,00	87,00
10	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,16	7,05	7,00	7,00
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,92	4,83	4,75	4,75
12	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,26	2,30	2,34	2,34

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
	pada PDRB (%)					
13	Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	11,50	11,78	12,06	12,06
14	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,94	14,96	14,98	14,98
15	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	73,85	73,88	73,90	73,90
16	Nilai PDRB sektor Pertanian pada (juta)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	398.524,76	414.465,75	431.044,38	431.044,38
17	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	8,63	8,83	9,03	9,03
18	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan RB	62,19	62,50	62,81	62,81
19	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	76,00	77,00	78,00	78,00
20	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	60,01	63,01	66,01	66,01
21	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	84,61	85,82	87,03	87,03
22	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	78,00	80	82,00	82,00

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
23	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,10	3,15	3,20	3,20

8.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada RPD tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD/ Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kota Sawahlunto x 100 %	100	100	100	100
APK PAUD (%)	(Jumlah Siswa PAUD /Jumlah seluruh anak yang berusia 3-6 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	95,12	95,62	96,12	96,12
Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	Jumlah anak usia7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar sekolah Dasar / anak usia7-12 Kota Sawahlunto	100	100	100	100
APK SD/MI/Paket A (%)	(Jumlah Siswa SD /Jumlah seluruh anak yang berusia 7- 12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	110,25	111,21	111,40	111,40
APK SMP/MTs/Paket B (%)	(Jumlah Siswa SMP /Jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	94,10	95,20	96,30	96,30
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	(Jumlah Murid SD/sederajat usia 7-12 tahun /Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	99,70	99,80	99,90	99,90
Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama/ Jumlah anak usia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto x 100 %	100	100	100	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	(Jumlah Murid SMP/sederajat usia 13-15 tahun /Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	83,20	84,30	85,20	85,20
Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Capaian kompetensi literasi SD adalah persentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus di kalikan bobot setiap kompetensi	2,07	2,16	2,25	2,25
Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	capaian kompetensi Numerasi SD adalah presentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	1,84	1,94	2,03	2,03
Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	capaian kompetensi Literasi SMP adalah presentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	2,16	2,21	2,26	2,31
Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	capaian kompetensi Numerasi SMP adalah presentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	2,19	2,27	2,37	2,37
Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP) (%)	Jumlah izin yang dikeluarkan (dibagi) / seluruh usulan yang masuk	100	100	100	100
Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (%)	Jumlah satuan pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai standar baik kuantitas maupun kualitas disetiap jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah satuan pendidikan	100	100	100	100
Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan (%)	Jumlah Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal dibagi dengan satuan pendidikan yang ada	73	100	100	100
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan/ Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kota Sawahlunto x 100 %	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
Cakupan Layanan Rujukan (%)	Jumlah Pasien Rujukan yang Dilayani / Jumlah Pasien yang Dirujuk ke RSUD Sawahlunto x 100%	100	100	100	100
Cakupan Layanan Dasar (%)	Jumlah puskesmas yang menjalankan kegiatan UKM dan UKP dibagi dengan jumlah puskesmas dikali 100 %	100	100	100	100
Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk x 100 %	0,16	0,16	0,16	0,16
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	Jumlah RS Rujukan tingkat yang terkreditasi/jumlah RS di kab/ Kota Sawahlunto x100 %	100	100	100	100
Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	Jumlah puskesmas terakreditasi / jumlah seluruh puskesmas x 100 %	100	100	100	100
Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	Jumlah dokter / dengan jumlah penduduk dikali 1000	0,39	0,39	0,39	0,39
Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya (%)	Jumlah SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya dibagi dengan jumlah tenaga kesehatan seluruhnya x 100	90	100	100	100
Jumlah kasus kematian bayi (kasus)	Jumlah Kematian bayi pada satu tahun tertentu	14	10	7	31
Jumlah Kasus Kematian IBU (kasus)	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	1	1	1	3
Persentase Balita Gizi Buruk (%)	jumlah Balita Gizi buruk/Jumlah Balita di Kota Sawahlunto x 100	7,3	7,1	7	7
Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan (%)	Jumlah Sarana yang memenuhi standar dan pelayanan perizinan/Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian x 100	80	85	90	90
Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin (%)	Jumlah Sarana pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi standar perizinan/Jumlah Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman x 100	80	85	90	90
Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan (%)	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan dibagi dengan jumlah poskesdes dan poskeskel yang ada x 100	50	75	100	100
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan/ Jumlah ibu hamil di Kota Sawahlunto x 100%	100	100	100	100
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan/Jumlah ibu bersalin di Kota Sawahlunto x 100%	100	100	100	100
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x 100%	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar/Jumlah balita di Kota Sawahlunto x 100%	100	100	100	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar /Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100
Persentase orang usia15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar /Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100
Persentase warganegara usia 60 tahun ke atas mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar/Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /Jumlah penderita hipertensi di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100
Persentase penderitaDM yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar (%)	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah penderita DM di kota sawahlunto x100%	100	100	100	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/Jumlah penderita ODGJ di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar /Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar/Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Nilai SAKIP Dinas PUPR	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	(luas daerah yang dilayani jaringan irigasi/total luas daerah) x 100	0,61	0,63	0,71	0,71
Presentase sawah yang terairi (%)	Luas sawah yang terairi/luas sawah x 100	52,42	53,13	54,43	54,43
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota sawahlunto/Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota sawahlunto x 100%	98,61	99,01	99,50	99,50
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk	92,00	92,25	92,97	92,97

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
layanan pengolahan air limbah domestik (%)	+ jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di kota sawahlunto x 100%				
Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen	50,55	51,72	52,45	52,45
Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100	99,20	99,50	100	100
Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	Panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	47,78	48,66	49,26	49,26
Persentase luas permukiman yang tertata (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100	80,13	81,9	82,52	82,52
Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	Jumlah gedung pemerintah kondisi baik/ jumlah gedung pemerintah x 100	85,12	86,89	87,14	87,14
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/jumlah panjang jalan x 100 %	77,13	78,23	79,27	79,27
Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	(Panjang Jembatan dalam kondisi mantap dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	95,03	95,21	95,94	95,94
Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang (%)	(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan Penataan Ruang x 100%	100	100	100	100
Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan (%)	Jumlah bangunan sesuai tata ruang/ jumlah bangunan X 100	40	50	55	55
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di kota sawahlunto yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis /Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di kota sawahluntox 100%	0,1	1,5	0,2	0,2
Rasio kepatuhan PBG kab/ kota	Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya/Jumlah PBG yang berlaku x 100%	86	86,5	87	87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Nilai SAKIP Dinas KP2LH	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sesuai SK Walikota (Ha)	8,00	8,00	3,08	3,08
Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %	83	84	85	85
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima	100	100	100	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
	Penyediaan Rumah Layak Huni / Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%				
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	Jumlah unit rumah tidak layak huni/Jumlah total unit rumah kabupaten/kota x 100%	1,1	1,05	1	1
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU/Jumlah unit rumah di kota sawahlunto x 100%	84	86	87	87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	100	100	100	100
Persentase Penurunan kasus kebakaran (%)	(jumlah kasus kebakaran tahun (n-1) -jumlah kasus kebakaran tahun n)/ jumlah kasus kebakaran tahun (n) x 100%	17,64	13,3	15,3	15,3
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	(Jumlah pengaduan yang ditagani/ jumlah pendaguan pelanggaran yang masuk) x 100%	100	100	100	100
Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto (%)	(Jumlah kasus kebakaran yang ditangani/jumlah kasus kebakaran) x 100%	100	100	100	100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran danPenyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kota sawahlunto dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah/Jumlah kejadian kebakaran di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15	15	15	15
Nilai SAKIP BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan	100	100	100	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)				
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	100
Indeks Ketahanan daerah	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,55	0,56	0,57	0,57
Persentase Penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus Pelanggaran perda tahun (n-1) -jumlah kasus pelanggaran perda tahun n)/ jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100%	0,11	0,06	0,02	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
Nilai SAKIP Dinas Sosial PMDesPPA	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti : populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun anggaran : populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
Nilai SAKIP DPMPTSPNaker	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	BB	BB	BB
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	70	75	80	80
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	PDRB ADHK tahun berjalan / Jumlah tenaga kerja x 100%	94,55	96,25	97,94	97,94
Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan x 100%	100	100	100	100
Persentase lulusan pelatihan yang berwirausaha (%)	Jumlah lulusan pelatihan yang berwirausaha / Jumlah peserta pelatihan keseluruhan x 100%	5	7	9	9
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	23	25	30	30
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	23	25	30	30

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
mekanisme layanan antar kerja(%)					
Persentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (%)	Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan / Jumlah pekerja pada perusahaan se-Kota Sawahlunto x 100%	85	95	100	100
Persentase perusahaan yang menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun n / Jumlah perusahaan di wilayah Kota Sawahlunto pada tahun n x 100%	40	45	50	50
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/Jumlah total perusahaan x 100%	83	85	90	90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Indeks Pemberdayaan gender / IDG (IKU OPD) (%)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	65,89	65,89	65,9	65,9
Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD : jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100%	5	6	7	7
Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	Jumlah anggota DRPD perempuan/ jumlah total anggota DPRD x 100%	20	20	20	20
Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	Jumlah keluarga yang ditingkatkan kualiasnya/ jumlah seluruh keluarga x 100 %	100	100	100	100
Persentase Kelurahan ramah anak (%)	Jumlah kelurahan ramah anak / jumlah seluruh kelurahan x 100 %	100	100	100	100
Persentase sekolah ramah anak (%)	Jumlah sekolah ramah anak/ jumlah seluruh sekolah x 100 %	100	100	100	100
Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan.....x 100.000 jumlah penduduk perempuan	0,01	0,01	0,01	0,01
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi/Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan/Jumlah penduduk perempuan x100%	0,01	0,01	0,01	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
Nilai SAKIP Dinas KP3	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	BB	BB	BB
Persentase Kecukupan Kebutuhan Beras (%)	Jumlah Produksi/Jumlah Kebutuhan Beras X 100 %	100	100	100	100
Skor PPH	Survey indek rata-rata konsumsi pangan masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok	86	86,5	87	87

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	Jumlah penurunan produk rawan pangan/jumlah penduduk rawan pangan x 100%	6	6	6	18
Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	Perbandingan produk pangan segar yang terdeteksi dari cemaran mikroba bagi total bahan pangan yang menjadi sampel	93	93	93	93
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	Jumlah cadangan pangan/ Jumlah kebutuhan pangan x 100%	161,7	167,7	179,2	179,2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani/jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100%	100	100	100	100
Persentase Dokumen Pertanahan (%)	jumlah dokumen pertanahan yang terlaksana/jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	25	25	25	75
Persentase tanah pemerintah yang tertib administrasi (%)	Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat/jumlah tanah pemerintah x 100 %	23,31	26,69	30,6	30,6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5% IKU, 21,9%	64,74	65,52	66,57	66,57
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%)	Total Vol sampah yang dapat ditangani /Total vol timbunan sampah kabupaten/kota x 100%	97	98	99	99
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izinlingkungan, izin PPLHdan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kota sawahlunto /usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100%	77	78	79	79
Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 %	Jumlah sampel yang memenuhi baku mutu air	56,09	57,50	58,00	58,00
Indeks Kualitas udara (IKU) 40,5 %	Jumlah sampel yang memenuhi baku mutu udara	87,44	87,54	87,64	87,64
Indeks Kualitas tutupan lahan (IKL) 21,9 %	luas tutupan lahan	46,72	47,72	48,72	48,72
Indeks Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sambah	68,46	68,66	68,9	68,9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Catpil	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 hari yg sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 th x 100%	75	80	85	85

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
Perekaman KTP elektronik (%)	Jumlah penduduk berumur 17 th keatas yg memiliki KTP /jumlah penduduk 17 th keatas x 100%	99,6	99,8	99,9	99,9
Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir) (%)	Jumlah anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir /Jumlah anak usia 0-18 th x100%	98,05	98,1	98,2	98,2
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	Jumlah OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama : Jumlah OPD x 100%	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun : Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x100%	100	100	100	100
Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang pertahun berdasarkan indeks desa membangun/tahun x 100%	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
TFR (Total Fertility Rate) Angka Kelahiran Total	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	2,2	2,18	2,16	6,54
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate /MCPR (%)	Jumlah AkseptorAktif Moder/ Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	66	68	70	204
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100	12,2	12	11,6	35,8
Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga (%)	Jumlah semua kelompok ketahanan keluarga yang mendapatkan informasi Bangga /Semua Jumlah Ketahanan Kelompok yang ada x 100	86	87	88	261
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Rasio konektivitas kota	(IK1 x bobot angkutan jalan) + IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,56	0,56	0,56	0,56
Kinerja lalu lintas (%)	(Volume lalu lintas/kapasitas jalan) x 100 %	65	65	65	65
Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n- tahun n-1/ jumlah angka kecelakaan tahun n-1 x 100%	50	60	70	70
Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan x 100%	50	75	100	100
Persentase sarana prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	Jumlah sarana yang tersedia/jumlah sarana yang dibutuhkan X 100%	90	95	100	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Nilai SAKIP Dinas Kominfo	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik) x 100 % (Permendagri 18/2020)	70	75	80	80
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota (%)	(jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota/jumlah penduduk) x 100%	100	100	100	100
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (%)	(jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo/jumlah opd) x 100%	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
Nilai SAKIP Dinas Koperindag	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ Jumlah seluruh koperasi x 100%	8,8	8,8	8,9	8,9
Persentase koperasi sehat (%)	(jumlah koperasi sehat/total kopoerasi)x100%	27	28	29	29
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (%)	(Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya/ Total UMKM)x100%	17	20	22	24
Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian (%)	Jumlah koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/jumlah koperasi x 100%	77	77	77	77
Persentase UMKM yang meningkat volume usahanya (%)	Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya/ Jumlah UMKMx100%	0,5	0,6	0,7	0,7
Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya/total koperasi x 100%	50	58	66	66
Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya (%)	Jumlah pengelola koperasi bersertifikat / Total pengelola koperasi x100%	50	56	62	62
Persentase pengelola UMKM yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya (%)	Jumlah pengelola UMKM bersertifikat / Total UMKM x100%	10	11	12	12
Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha/Jumlah UMKM X 100%	5	5,5	6	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
Persentase Kenaikan nilai realisasi investasi (%)	(Jumlah investasi tahun njumlah investasi tahun n-1) di kota sawahlunto/jumlah investasi tahun n-1 di kota sawahluntox100%	8,63	8,83	9,03	9,03

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah realisasi investasi (PMDN dan PMA)	46	51	56	153
Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	(Jumlah investor tahun n - jumlah investor tahun n-1) / Jumlah investor tahun n-1 x 100%	27	29	31	31
Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP (%)	Jumlah Penerbitan Dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP/jumlah penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan x 100%	100	100	100	100
Persentase Peluang Investasi yang telah divalidasi (%)	Jumlah Peluang investasi yang telah divalidasi/jumlah peluang investasi x 100%	40	50	60	60
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terakses Publik (%)	Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terakses publik/jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan x 100%	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Nilai SAKIP Dinas Parpora	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Persentase partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (%)	(Jumlah pemuda yang berwirausaha/jumlah pemuda) x 100%	12,2	14,2	16,2	16,2
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota sawahlunto/jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota sawahlunto x 100%	4,15	4,22	4,27	4,27
Jumlah pemuda berprestasi (orang)	Jumlah pemuda yang berprestasi	16	17	18	18
Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	Jumlah pemuda berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional	16	17	18	18
Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah organisasi kepramukaan yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional/jumlah organisasi kepramukaan x 100%	75	77	79	79
Jumlah atlit yang berprestasi	Jumlah atlit yang berprestasi	148	155	160	160
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	180	185	190	190
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah OPD x 100 % (Permendagri 18/2020)	100	100	100	100
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah OPD x 100 % (Permendagri 18/2020)	100	100	100	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ketersediaan Data (ada/tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada
Ketersediaan Buku "Kota Sawahlunto Dalam Angka"	Ketersediaan Data (ada/tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada
Ketersediaan Buku " PDRB Kota Sawahlunto "	Ketersediaan Data (ada/tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x 100 % (Permendagri 18/2020)	32	35	40	40
Persentase titik yang diamankan dibandingkan dengan seluruh titik pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang ditetapkan (%)	Jumlah itik yang diamankan / Jumlah seluruh titik pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang ditetapkan x 100 % (Permendagri 18/2020)	60	65	70	70
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah / Jumlah Total Perangkat Daerah x 100 % (Permendagri 86/2017)	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Persentase pelestarian budaya tak benda (%)	(Jumlah Budaya Tak Benda Yang Lestari/ Jumlah Budaya Tak Benda) x 100%	76,92	77	77,2	77,2
Persentase Pemajuan Kebudayaan Yang Lestari (%)	(Jumlah pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/Total jumlah pemajuan kebudayaan) X100%	31,1	31,3	31,5	31,5
Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri (Kelompok)	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri	13,3	13,6	13,9	13,9
Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah (%)	(Jumlah kelompok masyarakat yang mengetahui sejarah / Jumlah kelompok masyarakat yang ada) X 100%	60	65	70	70
Persentase warisan Budaya Benda yang Lestari (%)	Jumlah warisan Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah warisan budaya benda x 100%	70,56	70,7	70,8	70,8
Persentase cagar Budaya Yang Lestari (%)	(Jumlah cagar budaya yang lestari / Total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) X 100%	63,92	65	67	67
Jumlah kunjungan museum (orang)	Jumlah kunjungan museum (orang)	33000	33500	34000	34000
Persentase Pelestarian warisan Budaya (%)	(Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/Jumlah warisan budaya) x 100%	69	74	78	78
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai survei terhadap 5% penduduk usia 15-69 tahun	51,0	51,2	51,4	51,4
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana	74,5	74,6	74,7	74,7

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
	belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat				
Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	(Jumlah Pengunjung Tahun n - jumlah pengunjung tahun n-1)*100%/Jumlah Pengunjung Tahun n-1	2	2	2	2
Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat (%)	Hasil survey terhadap 5% penduduk usia 15 s/d 69 tahun	52	52,2	52,4	52,5
Persentase perpustakaan aktif (%)	Jumlah pustaka aktif/ jumlah total pustaka x 100%	80	85	90	95
Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)	Jumlah naskah yang dinyatakan sebagai naskah kuno	1	1	1	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Kota (ANRI)	Nilai Pengawasan kearsipan kab/kota	C	CC	B	B
Tingkat ketersediaan arsip sbg bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah & pertanggungjawaban nasional (pasal 40 & pasal 59 UU no 43/2009 ttg kearsipan) (%)	T = (m+b+g+a+c+i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan & penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD Prov yg digabung dan/atau dibubarkan & pemekaran daerah kab/kota dg NSPK, a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis & arsip hasil alih media dengan NSPK, c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yg bersifat tertutup dg NSPK	50,57	50,58	50,60	50,60
Tingkat keberadaan & keutuhan arsip sbg bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa & bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat (%)	T=(a+i+s+j)/4 T = tingkat kearsipan, a = % arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip, i = % arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, s = % arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = % jumlah arsip	50,50	50,56	50,60	50,60
Persentase arsip yang diberi akses (%)	(Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan / Jumlah Arsip Yang diakses) * 100%	na	250 Lembar	300 Lembar	300 Lembar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Produksi Ikan (ton)	Jumlah produksi perairan umum dan budidaya	200	202	204	606
Tingkat Konsumsi Ikan (%)	Jumlah kg ikan yang dikonsumsi masyarakat indonesia selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan segar	39	39	39	39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	3,88	4,82	5,76	5,76

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
mancanegara per kebangsaan	/Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%				
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota sawahlunto	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)/Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%	62	64	66	66
Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual/Jumlah kamar yang tersedia x 100%	16,5	17	17,5	17,5
Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,26	2,3	2,34	2,34
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,65	4	4,35	4,35
Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (%)	Jumlah Industri Pariwisata yang berdaya saing (sudah memenuhi syarat)/ Jumlah total industri Pariwisata x 100%	3	4	5	5
Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)	Jumlah produk ekonomi kreatif yang bersertifkat HKI/jumlah total ekonomi kreatif x 100%	1	2	3	3
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang profresional/Jumlah total pelaku ekonomi kreatif x 100%	20	25	30	30
jumlah wisatawan (orang)	Jumlah wisatawan yang dihitung berdasarkan tiket masuk objek wisata	130000	150000	160000	440000
Tingkat kepuasan pengunjung (%)	Jumlah pengunjung yang mengatakan puas/jumlah seluruh pengunjung x 100%	70	75	80	80
Persentase Objek Wisata Unggul (%)	Jumlah Objek wisata unggul/jumlah objek total jumlah wisata x 100%	50	55	60	60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
Jumlah Produksi Padi (Ton)	Produktivitas x luas panen	15.800	15.850	15.900	47.550
Jumlah Produksi Karet (Ton)	Produktivitas x luas panen TM	1.730	1.735	1.740	5.205
Jumlah Produksi Kakao (Ton)	Produktivitas x luas panen TM	569	570	571	1710
Produksi Daging Sapi (Ton)	Pemotongan tercatat + 5% (pemotongan tercatat) x 173,5	319	320	321	960
Produksi Daging Ayam (Ton)	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	900,26	900,26	900,26	900,26
Produksi Telur (Ton)	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	135,86	135,86	135,86	135,86
Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	Luas serangan OPT/ Luas tanaman	01:10	01:10	01:10	01:10
Jumlah Ketenagaan Penyuluh yang berprestasi (orang)	Jumlah penyuluh yang memperoleh prestasi di tingkat prov/nasional	1	1	1	3
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)/ Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%	10	10	10	30

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
Persentase peningkatan usaha perdagangan (%)	Jml pasar yang beroperasi setiap hari/ Total x 100 %	100	100	100	100
Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	Jumlah pasar rakyat dengan minmal tipe C / jumlah pasar x 100%	14	14	14	14
Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)	Jumlah bahan pokok yang stabil/Total kebutuhan bahan pokok x 100%	237896	242653	247506	247506
Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	Jumlah produk unggulan yang diekspor/Jumlah Produk unggulan x 100%	50	50	50	50
Pesentase pasar tradisional tertib ukur (%)	Jumlah pasar tradisional tertib ukur/ jumlah pasar tradisional x 100%	28	28	42	42
Persentase produk dalam negeri yang dipromosikan (%)	Jumlah produk dalam negeri dipromosikan/Total Produk dalam negeri x100%	55	60	65	65
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan/Jumlah pelaku usaha diwilayah Kab/Kota x 100%	15	15	18	18
Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	Realisasi/ RDKK x 100%	80	82	83	83
Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan/jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang diwilayah kabupaten/kota x 100%	70	70	73	73
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu (IKM)	Jml produk IKM yang memiliki sertifikat halal, AKG tahun ini - tahun sebelumnya	5	5	5	5
Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri (IKM)	Jml IKM yang memanfaatkan teknologi industri tahun ini - tahun sebelumnya	40	50	60	150
Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	Jumlah IKM yang meningkat skala usahanya/ Total IKM x100%	2	2	2	6
Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai izin (%)	Jumlah Indsutri kecil menengah yang mempunyai izin/jumlah industri kecil dan menengah x 100%	35	40	45	45
Persentase IKM yang terpublis di SIINAS(%)	Jumlah IKM yang terpublis di SIINAS /jumlah IKM X 100%	35	40	45	45
	Jumlah data IKM yang diperbaharui dalam Sinas	200	200	200	800
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					
Nilai SAKIP SETDAKO	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Rasio Hafiz Qur'an terhadap santri rumah/pondok tahfiz (%)	(jumlah hafiz alquran/jumlah santri rumah hafiz x 100%	60	65	70	70
Persentase Peningkatan Zakat di Kota Sawahlunto (%)	(jumlah zakat tahun n - jumlah zakat tahun n-1)/jumlah zakat tahun n-1	6,12	6,54	6,78	6,78

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
Persentase Bantuan Hukum Yang Difasilitasi (%)	(jumlah bantuan hukum yang difasilitasi/jumlah permohonan bantuan hukum yang masuk)x 100%	100	100	100	100
Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	(Jumlah kerjasama yang ditindakanjuti/jumah kerjasama ynag direncanakan) x 100%	100	100	100	100
Jumlah Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto (Milyar)	jumlah zakat yang terkumpu pada tahun n pada BAZNAS Kota Sawahlunto	5,82	6,17	6,58	18,57
nilai kinerja Pemerintah dalam penerapan SPM	Penilaian kinerja Pemerintah daerah oleh Kementerian dalam negeri RI	94,55	94,60	94,65	94,65
Nilai Kinerja pemerintah berdasarkan hukum dan HAM (predikat)	Penilaian kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian Hukum dan HAM RI	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM
Laju Inflasi (%)		< 3,5	< 3,5	< 3,5	< 3,5
SEKRETARIAT DPRD					
Nilai SAKIP Sekretariat Dewan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Jumlah perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan (%)	Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %	100	100	100	100
PERENCANAAN					
Niai SAKIP Barenlitbangda	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	BB	A	A
Indeks Perencanaan Pembangunan	60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100%	100	100	100	100
Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD ke dalam RKPD (%)	Jumlah Program pada RKPD/ Jumlah Program pada RPJMD x 100%	100	100	100	100
Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	Jumlah Capaian Program/ Jumlah Target Program yang ada x 100%	100	100	100	100
Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Mitra (%)	60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100% (BIDANG MITRA)	100	100	100	100
KEUANGAN					
Nilai SAKIP BPKAD	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Opini Laporan Keuangan	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Penilaian terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	76	77	78	78
Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar aset tetap?	Ada	Ada	Ada	Ada
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	Ada	Ada	Ada	Ada
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	Ada	Ada	Ada	Ada
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	(Nilai PAD dibagi dengan total pendapatan)x 100%	11,74	12,35	12,43	12,43
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA/total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100%	0,69	0,650	0,60	0,60
KEPEGAWAIAN					

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	Ukuran Kepuasan terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100
Pemenuhan Penataan ASN (NSPK) Pemerintah Kota Sawahlunto	Nilai NSPK BKN	75	80	85	85
Indeks Merit Sistem ASN	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah (Penilaian dari KPK)	160	165	170	170
Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah	2,95	2,95	3,00	3,00
Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,39	0,40	0,40	0,40
Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,25	0,25	0,26	0,26
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan (%)	(Jumlah Penelitian yang Ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Penelitian) x 100%	100	100	100	100
Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%)	Jumlah data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan/perencanaan pembangunan/jumlah total data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan x 100%	100	100	100	100
INSPEKTORAT DAERAH					
Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
Persentase PD yang mendapat Nilai SAKIP BB	Persentase PD yang mendapat Nilai SAKIP BB	100	100	100	100
Persentase pengawasan terlaksana sesuai PKPT (%)	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan / Jumlah Rencana Pengawasan di PKPT x 100	100	100	100	100
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK					
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda/ Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda x 100%	60	65	70	70

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda/total jumlah dokumen yang telah dirinci x 100%	80	85	90	90
PENGADAAN					
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	(Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif/jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif) x100%	65	66	67	67
Persentase jumlah total proyek kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	(jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam tiga kuartal yang ditandatangani pada kuartal prertama tahun n/ jumlah kontrak keseluruhan tahun n) x 100%	0	0	0	0
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	(Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan/total belanja langsung) x 100%	0,35	0,36	0,37	0,37
UNSUR KEWILAYAHAN					
Nilai SAKIP Kecamatan Talawi	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Nilai SAKIP Kecamatan Barangin	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Nilai SAKIP Kecamatan Silungkang	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Nilai SAKIP Kecamatan Lembah Segar	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	(Jumlah LPM,PKK, RT/RW yang Aktif/Jumlah Total LPM,PKK, RT/RW) x 100 %	100	100	100	100
PEMERINTAHAN UMUM					
Nilai SAKIP Badan Kesbang	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
Persentase potensi konflik yang dapat teredam (%)	Jumlah potensi konflik yang dapat teredam /jumlah potensi konflik x 100%	100	100	100	100
Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	Jumlah Peserta yang meningkat pemahamannya/jumlah peserta x 100%	57	60	65	70
Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pemilu/Jumlah DPT x 100%	86,25	86,25	86,25	86,25
Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan kepala daerah (%)	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pilkada/Jumlah DPT x 100%	82,5	82,5	82,5	82,5
Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur (%)	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pilgub/Jumlah DPT x 100%	65,8	65,8	65,8	65,8
Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif di Kota Sawahlunto (%)	Jumlah organisasi yang terdaftar dan aktif/jumlah organisasi yang terdata x 100%	100	100	100	100
Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (%)	Pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100	100	100	100
Indeks Ketahanan Nasional	kondisi dinamis bangsa indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi	2,89	2,90	2,91	2,91

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target (Tahun)			Kondisi akhir
		2024	2025	2026	
	dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung				

BAB IX
PENUTUP

9.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran visi misi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025. Dalam mewujudkan sukses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPD sebagai berikut:

1. RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan Tahun 2024, serta penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2026;
2. Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto dilaksanakan setiap tahun;
3. Untuk menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 berpedoman pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5. Kepala Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara peroidik;
6. Walikota dalam hal ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPD dan RKPD secara periodik.

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan RPD Tahun 2024 – 2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan, untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan dan mengawal terwujudnya tujuan RPD tersebut.

9.2 TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Tahun 2024-2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. RPD Tahun 2024-2026 ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dijadikan pedoman perumusan dan penetapan Rencana strategis Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah;
2. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan RPD Tahun 2024 – 2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan, untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan dan mengawal terwujudnya tujuan RPD tersebut.

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Lampiran 1

Penyelarasan Target Indikator Makro pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR	TARGET NASIONAL DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024					TARGET PROVINSI DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024					TARGET PROVINSI DALAM RPJMD PROVINSI 2021-2026						RPD KOTA SAWAHLUNTO 2024-2026		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,4-5,7	5,7-6,0	6,0-6,3	6,2-6,5	5	5,5	5,8	6	6,1	3,44	3,4	4,57	4,6	4,7	4,84	4,48	4,73	4,98
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0	8,0-8,5	-	-	6,0-7,0	5,94	5,46	5,13	4,85	4,55	6,4	6,28	6,16	6,03	5,9	5,77	2,19	2,18	2,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8-5,0	4,8-5,0	-	-	3,4-4,3	5,5	5,3	5,2	4,7	4,4	6,7	6,6	6,45	6,31	5,94	4,38	4,92	4,83	4,72
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	73,26	-	-	75,54	-	-	-	-	-	72,56	72,74	73,23	73,6	74,16	74,6	76,01	77,14	78,29
5	Rasio Gini	0,375-0,380	0,375–0,379	-	-	0,360-0,370	-	-	-	-	-	0,299	0,298	0,296	0,293	0,289	0,284	0,289	0,285	0,280
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 2

Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Tahun 2020-2024

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI						RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan																			
		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US$/m³)	4	4,4	4,7	5,1	5,4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	46,87	51,72	52,45
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6					
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5					
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94	95,2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	86	86,5	87
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85					
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	86	86,5	87
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85					
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57	57	57	57	57	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	86	86,5	87
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2020	2021	2022	2023	2024	RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target 2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2024	2025	2026
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under[1]nourishment/PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	86	86,5	87
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85					
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	86	86,5	87
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85					
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)	21	22	24	27	28	30	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	6	6	6
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)	82	83	83,5	84	84,5	85	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	93	93	93
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	39	39	39
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)	15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742					
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)	39,27	40	40,5	41,6	42,4	44					
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Petani dan Petugas Pertanian (orang)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	1	1	1
										Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan (%)	20	20	20	20	20	100		Jumlah Ketenangan Penyuluh yang berprestasi	1	1	1
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)	<64	<64	<72	<76	?80	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan	200	202	204
										Peningkatan produksi	256.747	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										perikanan budidaya (ton)											
										Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)	5	20	40	60	80	100					
										Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)	17	17	17	19	19	19					
										Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)	52	67	72	79	85	93					
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)	60	60	63	65	67	69	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian (%)	77	77	77
																	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	50	58	66
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)	60	60	63	65	67	69					
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern (koperasi)	50	50	60	70	80	90	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya	0,04	0,07	0,11
																		Persentase pengelola UMKM yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya	52	52	52
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi (produk)	45	100	120	125	130	615	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat volume usahanya	4	4	5
																	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	47	47	47
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)	82	83	83,5	84	84,5	85	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi	15800	15850	15900
																		Jumlah Produksi Karet	1730	1735	1740
																		Jumlah Produksi Kakao	569	570	571
																		Jumlah Produksi :			
																		Daging Sapi	319	320	321
																		Daging Ayam	900,26	900,26	900,26
																		Telur	135,86	135,86	135,86

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI						RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
																		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	01:10	01:10	01:10
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2,5	2,5	2,5
										Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	90	90	90
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanam	100	100	100
										Peningkatan Prasarana Peternakan (%)	20	20	20	20	20	100					
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)	0,65	0,63	0,6	0,57	0,54	0,53	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	1	1	1
																		Jumlah Ketenangan Penyuluh yang berprestasi	1	1	1
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan	200	202	204
										Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	256.747	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934					
										Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)	5	20	40	60	80	100					
										Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)	17	17	17	19	19	19					
										Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)	52	67	72	79	85	93					
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	39	39	39
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)	15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742					
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)	39,27	40	40,5	41,6	42,4	44					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI						RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen)	5	5,5	6,5	7,5	8,1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)		20	20	25	25		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2	2	2
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI (%)		72	74	76	78		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai izin (%)	35	40	45
									PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri (unit usaha)		41.373	43.263	45.363	47.673		Program Pengelola Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terpublis di SIINAS(%)	35	40	45
			Kontribusi PDB pariwisata (Persen)	4,8	5	5,2	5,3	5,5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)	4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	50	55	60
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembanganny a (DTW)	11	19	19	19	19	19	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional (%)	20	25	30
																	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	50	55	60
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	70	75	80
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	3	4,5	6	7,5	9					
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)	3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29					
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)	1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88					
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439 - 1.452	1.564-1.570	1.689	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)	0	50	100	150	200	250	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)	1	2	3
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)	196	296	396	496	596	696	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	20	25	30
										Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	2	4	6	8	10	12					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target					RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI Target						RPD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPD KOTA SAWAHLUNTO INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPD KOTA SAWAHLUNTO		
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	NILAI REALISASI INVESTASI (MILYAR RUPIAH)	46	51	56
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat (dokumen pernyataan minat)	4	4	4	5	5	23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR (%)	27	29	31
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (Rp (triliun))	4,8	5,1	5,6	6,1	6,7	7,5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELUANG INVESTASI YANG TELAH DIVALIDASI (%)	40	50	60
									PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi (%)	15	20	40	60	80	100	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERAKSES PUBLIK (%)	100	100	100
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro (dokumen)	0	2	1	1	1	1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA (%)	100	100	100
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN YANG BERWIRAUSAHA (%)	5	7	9
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja (%)	31,77	35,52	36,01	36,5	36,99	37,97	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA (%)	23	25	27
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN YANG BERWIRAUSAHA (%)	5	7	9
			Kontribusi tenaga kerja industri (Persen)	14,2	14,6	15	15,2	15,7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)		20	20	25	25		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2	2	2
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)		20	20	25	25		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2	2	2
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang)	13	13,5	14	14,5	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)	4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	50	55	60
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan	11	19	19	19	19	19					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Provinsi yang diintervensi pengembanganny a (DTW)											
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	70	75	80
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	3	4,5	6	7,5	9					
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)	3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29					
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)	1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88					
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang	19	20	20	21	21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)	0	50	100	150	200	250	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)	1	2	3
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)	196	296	396	496	596	696	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	20	25	30
										Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	2	4	6	8	10	12					
			Nilai devisa pariwisata (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)	4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	50	55	60
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembanganny a (DTW)	11	19	19	19	19	19					
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	70	75	80
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	3	4,5	6	7,5	9					
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)	3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29					
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)	1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88					
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional	4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	50	55	60

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										kawasan gunung talang (kali)											
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembanganny a (DTW)	11	19	19	19	19	19					
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	70	75	80
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	3	4,5	6	7,5	9					
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)	3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29					
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)	1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88					
2		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan																			
		Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	0			0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi	15800	15850	15900
										Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68		Jumlah Produksi Karet	1730	1735	1740
																		Jumlah Produksi Kakao	569	570	571
																		Jumlah Produksi :			
																		Daging Sapi	319	320	321
																		Daging Ayam	900,26	900,26	900,26
																		Telur	135,86	135,86	135,86
																		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	01:10	01:10	01:10
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2,5	2,5	2,5
										Peningkatan Prasarana Peternakan (%)	20	20	20	20	20	100					
		Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	0			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan (%)	73,92	75	77	79	81	82	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	75,13	76,23	77,27
		Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	0			0												Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	95,03	95,21	95,94
		Memperkuat kemampuan	0			0			PROGRAM PENELITIAN	Persentase Pemanfaatan	42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	PROGRAM KOORDINASI	PERSENTASE KESESUAIAN	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI						RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
		SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah							DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Hasil penelitian dan pengkajian (%)							DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG MITRA (%)			
										Persentase SKPD yang terinovatif (%)	20	30	30	40	40	50	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%)	100	100	100
										Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)	2	10	10	10	12	12					
		Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.	0			0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %	110,25	111,21	111,4
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72		APM SD/MI/Paket A %	99,7	99,8	99,9
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	2,19	2,27	2,37
																		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	1,94	2,03	2,12
																		Tingkat partisipasi warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	100	100
																		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	100	100	100
																		Presentase Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 juz	30,5	40	40,5
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)	69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MEMENUHI STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI						RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap	78,6	79,6	81	83	85	87					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										(KNL) Sesuai Standar (%)											
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	99	99,5	100
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)	81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	92	92,25	92,97
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)	0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	92	93	94
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti (%)	77	79	81	83	85	87	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100
										Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	75	77	79	81	83	85					
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	100	100	100
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang terfasilitasi	100	100	100
										Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan		100	100	100	100	100					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										dasarnya di dalam panti (%)											
										Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100					
										Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100					
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)		100	100	100	100	100	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)	100	100	100
3		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																			
		Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	0			0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	26,66	40	50	60	70	80		Cakupan KTP (%)	99,6	99,8	99,9
										Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	97,16	97,75	98	98,25	98,5	99		Cakupan KK (%)	92,2	94	96
																	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	75	80	85
																		Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	85	90	95
																		Perekaman KTP elektronik (%)	99,6	99,8	99,9
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%)	91,47	94	95	96	97	98	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Akte kelahiran (%)	65	68	70
										Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100	100	100	100	100	100		Cakupan akte kematian (%)	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan (%)	100	100	100	100	100	100					
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data (inovasi)	3	6	9	12	15	18	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Validltas Data Kependudukan (%)	100	100	100
										Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah (%)	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1					
									PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun (dokumen)	3	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan (Buku)	3	3	3
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya (%)	80	80	85	90	90	90	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate /MCPR	66	68	70
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)	54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,2	12	11,6
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)	51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	86	87	88
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7		0		98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)		0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase TKSK yang berpatisipasi dalam penanganan PPKS (%)	100	100	100
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2		0		80	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)		0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang terfasilitasi	100	100	100
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkatan Anak (orang)		25	25	25	25	25	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Tersedianya Data Fakir Miskin yang valid (%)		100	100	100	100	100					
										Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif (persen)		30	35	40	50						
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI						RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)											
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori	4	4	6	6	8	8					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										WISTARA (kabupaten/kota)											
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi	100	100	100	100	100	100					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										kesehatan secara terintegrasi (%)											
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)	54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,2	12	11,6
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8	7,7	7,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)	54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,2	12	11,6
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)	54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,2	12	11,6
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)	51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	86	87	88
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	50	75	100
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19					
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	99	99,5	100
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)	81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	92	92,25	92,97
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)	1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	84	85	86
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang terfasilitasi	100	100	100
										Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100					
										Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100					
										Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100					
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	86	86,5	87
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat	82	82,5	83	84	84,5	85					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target							Target								
				2020	2021	2022	2023	2024	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2024	2025	2026
										Sumatera Barat (%)											
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)	21	22	24	27	28	30	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	6	6	6
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)	82	83	83,5	84	84,5	85	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	93	93	93
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri (Dasawisma)	10.800	11.300	11.800	12.300	12.800	13.300	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%)	100	100	100
										Jumlah KAN yang aktif (lembaga adat)	299	350	400	450	500	544					
										Jumlah LPM Mandiri (LPM)	0	7	15	25	37	50					
										Jumlah Posyandu Mandiri (Posyandu)	2.319	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800					
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)	51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	86	87	88
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	5	10	20	30	40	50	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95	95	95
																		Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota	100	100	100
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	39	39	39

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)	15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742					
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)	39,27	40	40,5	41,6	42,4	44					
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30		Jumlah Produksi Padi	15800	15850	15900
										Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Karet	1730	1735	1740
																		Jumlah Produksi Kakao	569	570	571
																		Jumlah Produksi :			
																		Daging Sapi	319	320	321
																		Daging Ayam	900,26	900,26	900,26
																		Telur	135,86	135,86	135,86
																		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	01:10	01:10	01:10
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)	0,65	0,63	0,6	0,57	0,54	0,53	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanam	100	100	100
									PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)		4	8	12	16		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Prestasi Hafizh Al quran terhadap jumlah santri rumah Tahfiz	10%	12%	15%
																		Peningkatan Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto (Milyar)	7,07	7,86	8,39
																		Persentase Ranperda yang difasilitasi (%)	100	100	100
																		Mou dengan pihak ketiga yang ditindaklanjuti (Dokumen)	1	1	1
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan		100	100	100	100		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD/RPD KEDALAM RKPD (%)	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi (%)											
																		PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (%)	100	100	100
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)											
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI						RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan	2	2	2	2	2	2					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										bergerak (PKB) (daerah)											
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9	8,9	8,8	8,7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
																		yang terakreditasi (%)			
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										penilaian akreditasi (%)											
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	50	75	100
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19					
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19					
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	50	75	100
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19					
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)											
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	50	75	100
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19					
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19					
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										18 tahun (kabupaten/kota)											
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: 1. Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,1; 2. 388,7; 3. 400,4	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,7; 2. 392,3; 3. 406,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %	110,25	111,21	111,4
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72		APM SD/MI/Paket A %	99,7	99,8	99,9
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	2,19	2,27	2,37
																		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	1,94	2,03	2,12
																		Tingkat partisipasi warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	100	100
																		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	100	100	100
																		Presentase Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 juz	30,5	40	40,5
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): 1.Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 34,4; 2. 46,6; 3. 49	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 35,6; 2. 47,4; 3. 51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %	110,25	111,21	111,4

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72		APM SD/MI/Paket A %	99,7	99,8	99,9
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	2,19	2,27	2,37
																		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	1,94	2,03	2,12
																		Tingkat partisipasi warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	100	100
																		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	100	100	100
																		Presentase Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 juz	30,5	40	40,5
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %	110,25	111,21	111,4
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72		APM SD/MI/Paket A %	99,7	99,8	99,9
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	2,19	2,27	2,37
																		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	1,94	2,03	2,12
																		Tingkat partisipasi warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	100	100
																		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	100	100	100
																		Presentase Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 juz	30,5	40	40,5
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %	110,25	111,21	111,4
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72		APM SD/MI/Paket A %	99,7	99,8	99,9
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Rata rata kemampuan	2,19	2,27	2,37

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI						RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
																		literasi SMP berdasarkan assesmen nasional			
																		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	1,94	2,03	2,12
																		Tingkat partisipasi warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	100	100
																		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	100	100	100
																		Presentase Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 juz	30,5	40	40,5
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen)	27	33	39	45	51	57	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PESENTASE KURIKULUM MUATAN LOKAL YANG DIKEMBANGKAN	100	100	100
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)	69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MEMENUHI STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100	100	100
									PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%)	6	21	36	51	66	81	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE REKOMENDASI PERIZINAN PENDIDIKAN YANG DISELENGARAKAN OLEH MASYARAKAT JENJANG PAUD/SD/SMP)	100	100	100
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)	2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan ramah anak (%)	100	100	100
																		Persentase sekolah ramah anak (%)	100	100	100
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)	81	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memproleh layanan sesuai (per 1000 anak (permil)	100	100	100
																		Persentase anak korban kekerasan	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI						RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
																		yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)			
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)	2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan ramah anak (%)	100	100	100
																		Persentase sekolah ramah anak (%)	100	100	100
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)	81	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memproleh layanan sesuai (per 1000 anak (permil)	100	100	100
																		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	100	100	100
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,212	91,278	91,279	91,335	91,386	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	20	20	20
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,245	73,501	73,741	73,966	74,177	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	20	20	20
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	20	20	20
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	81	84	88	92	96	100	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	20	20	20
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (indeks)	69,5	70	70,5	71	71,5	72	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)	14	15	16	17	18	20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	16	17	18
										Jumlah wirausaha muda baru (orang)	230	268	348	348	348	1890					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
		Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9		0		40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)		0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase TKSK yang berpatisipasi dalam penanganan PPKS (%)	100	100	100
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25,6		0		50	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)		0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase TKSK yang berpatisipasi dalam penanganan PPKS (%)	100	100	100
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	2E+06	2E+06	1E+06	1E+06	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26					
										Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)	20	20	20	20	20	20					
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
			Bidang tanah yang diredistribusi	750000		0		8E+06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti (%)	65	70	75	80	85	90	Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)	100	100	100
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6E+06		0		6E+07	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)	80	85	90	95	95	95					
									PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)	75	80	85	90	95	95	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota (%)	100	100	100
									PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan (%)	50	55	60	70	75	80	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)	81	82	83
		Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %	110,25	111,21	111,4
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72		APM SD/MI/Paket A %	99,7	99,8	99,9
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	2,19	2,27	2,37

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
																		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	1,94	2,03	2,12
																		Tingkat partisipasi warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	100	100
																		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	100	100	100
																		Presentase Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 juz	30,5	40	40,5
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN YANG BERWIRAUSAHA (%)	5	7	9
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University : 1. Top 200, 2. Top 300, 3. Top 500	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 1; 2. 2; 3. 3.													
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN YANG BERWIRAUSAHA (%)	5	7	9
4		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan																			
		Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	0			0			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi (nilai)	2,7	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	57	60	65
		Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan (Karya Budaya)		8	8	8	8		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Kebudayaan Yang Lestari (%)	31,1	31,3	31,5

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
									PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan (Kesenian Tradisional)		21	23	23	23		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri (Kelompok)	13,3	13,6	13,9
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan (Cagar Budaya)		11	16	21	26		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar Budaya Yang Lestari (%)	63,92	65	67
										Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (Cagar Budaya)		15	15	15	15						
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum (kali)		15	15	15	15		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	33000	33500	34000
										Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum (orang)		30000	35000	40000	45000					
		Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama			0			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)		4	8	12	16		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Prestasi Hafizh Al quran terhadap jumlah santri rumah Tahfiz	10%	12%	15%
																		Peningkatan Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto (Milyar)	7,07	7,86	8,39
																		Persentase Ranperda yang difasilitasi (%)	100	100	100
																		Mou dengan pihak ketiga yang ditindaklanjuti (Dokumen)	1	1	1
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	100	100	100
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun (dokumen)	N/A	3	6	9	12	15					
										Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah (Orang)	N/A	6	12	18	24	30					
									PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan		1,41	1,52	1,62	1,72		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	74,5	74,6	74,7

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2020	2021	2022	2023	2024	RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target 2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2024	2025	2026
										Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP (%)											
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)	42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%)	100	100	100
										Persentase SKPD yang terinovatif (%)	20	30	30	40	40	50					
										Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)	2	10	10	10	12	12					
5		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																			
		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)	0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	92	93	94
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)	0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	92	93	94
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)	75	80	85	90	95	95	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota (%)	100	100	100
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,1	3,3	3,6	4													
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)	81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	92	92,25	92,97
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)	1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	84	85	86
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan	5,95	4,46	2,98	1,49	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan		8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	50	75	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target					RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI Target						RPD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPD KOTA SAWAHLUNTO INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPD KOTA SAWAHLUNTO		
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
			buang air besar sembarangan (%)						BIDANG KESEHATAN	kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)							MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19					
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19					
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penanganan; 3.70% penguranggan	73.70% penanganan; 5.51% penguranggan	75.28% penanganan; 9.13% penguranggan	77.64% penanganan; 14.57% penguranggan	80% penanganan; 20% penguranggan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)	1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	84	85	86
									PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)	75	75	75	75	75	75	Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup(%)	100	100	100
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96					
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96					
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8					
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19					
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40					
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100					
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5					
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87					
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100					
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11					
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100					
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6					
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	50	75	100
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO			
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19					
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)	1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	84	85	86
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	99	99,5	100
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)	0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	92	93	94
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,502	55,181	57,06	58,105	58,499	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50,55	51,72	52,45
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6					
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5					
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50,55	51,72	52,45
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6					
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5					
			Luas lahan pertanian padi dan non[1]padi yang beringasi meningkat (Hektare)	45229	115943	116143	116343	116343	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50,55	51,72	52,45
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6					
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	100	100	100
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,433	11,433	11,433	11,433	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50,55	51,72	52,45
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6					
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5					
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)	39,07	40,27	41,51	42,17	43,65	44,81	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	100	100	100
										Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45					
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)			0			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tersusunnya Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi (dokumen)	1	1	1	1	1	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase sarana prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	90	95	100
		Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)	39,07	40,27	41,51	42,17	43,65	44,81	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	100	100	100
										Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45					
		Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5) (indeks)	3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan Publik) x 100%	86	87	88
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,5	4	3,5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	100	100	100
		Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8					
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi	15800	15850	15900

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68		Jumlah Produksi Karet	1730	1735	1740
																		Jumlah Produksi Kakao	569	570	571
																		Jumlah Produksi :			
																		Daging Sapi	319	320	321
																		Daging Ayam	900,26	900,26	900,26
																		Telur	135,86	135,86	135,86
																		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	01:10	01:10	01:10
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30		Jumlah Produksi Padi	15800	15850	15900
										Peningkatan Prasarana Peternakan (%)	20	20	20	20	20	100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Karet	1730	1735	1740
																		Jumlah Produksi Kakao	569	570	571
																		Jumlah Produksi :			
																		Daging Sapi	319	320	321
																		Daging Ayam	900,26	900,26	900,26
																		Telur	135,86	135,86	135,86
																		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	01:10	01:10	01:10
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	0,1	3,41	4,71	4,94	5,19	5,48	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	90	90	90
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)	0,65	0,63	0,6	0,57	0,54	0,53	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanam	100	100	100
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9	9,3	9,4	9,4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya pembangunan TPA Regional (lokasi)	2	2	3	3	3	3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang terkelola (%)	97	98	99
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)	81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	92	92,25	92,97
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya pengelolaan drainase kewenangan provinsi (Km)	1	2	10	15	25	36	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	47,78	48,66	49,26
									PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di		60	65	70	75		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang terkelola (%)	97	98	99

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target		
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
										Sumatera Barat (%)											
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2	2,3	2,5	2,6	2,9	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80	Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	78	79	80
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)	39,07	40,27	41,51	42,17	43,65	44,81	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	100	100	100
										Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45					
		Konsolidasi Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	75,3	75,35	75,4	75,45	75,5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (nilai)	3,26	3,27	3,28	3,29	3,3	3,31	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu	86,25	0	0
		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67										Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan kepala daerah	82,5	0	0
		Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas	70	75	80	85	85										Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur	65,8	0	0
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas	50	60	70	80	85	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk (%)	100	100	100	100	100	100					
										Penataan Jabatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100					
										Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis (Perangkat Daerah)	8	12	16	18	20	22					
										Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) (Perangkat Daerah)	7	8	10	12	14	16					
										Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik (Perangkat Daerah)	5	7	9	11	13	15					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
									PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (%)	65	70	75	80	85	90	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	3,7	3,75	3,8
																		Persentase Rekomendasi Kebijakan yang disusun (rekomendasi)	3	5	5
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas	30	35	45	55	70													
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,2													
			Global Terorism Index	04.44	04.39	04.34	04.29	04.24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	100	100	100
																		Desa Bersinar yang terbentuk	1	1	1
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase gejala konflik sosial yang dapat diselesaikan	100	100	100
																		Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis	100	100	100
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	100	100	100
																		Desa Bersinar yang terbentuk	1	1	1
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase gejala konflik sosial yang dapat diselesaikan	100	100	100
																		Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPD KOTA SAWAHLUNTO				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target		
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2024	2025	2026
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	100	100	100
																		Desa Bersinar yang terbentuk	1	1	1
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase gejala konflik sosial yang dapat diselesaikan	100	100	100
																		Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis	100	100	100

Lampiran 3

PERSANDINGAN RPJMN, RPJMD PROVINSI DAN RPJMD KOTA

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO					
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas																					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		dan Berkeadilan																							
		Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8									
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68,8	69,2	70,3	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8									
									PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9									
		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US$/m³)	4	4,4	4,7	5,1	5,4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)				46,87	51,72	52,45
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6									
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5									
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26									
										Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)	20	20	20	20	20	20									
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)	1	3	3	3	3	3									
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94	95,2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH				86	86,5	87
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85									
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4									
										Meningkatnya skor Pola Pangan	82	82,5	83	84	84,5	85									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)															
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57	57	57	57	57	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4								
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85								
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under[1]nourishment/PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4								
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85								
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4								
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85								
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)	21	22	24	27	28	30	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)				6	6	6
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)	82	83	83,5	84	84,5	85	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)				93	93	93
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Persentase peningkatan produksi ikan	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Tingkat Konsumsi Ikan				39	39	39

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target					RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI Target						RPJMD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PEMASARAN HASIL PERIKANAN	olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)							PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)	15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742								
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)	39,27	40	40,5	41,6	42,4	44								
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Petani dan Petugas Pertanian (orang)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000								
										Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan (%)	20	20	20	20	20	100								
		Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59								
										Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)	7	7	7	7	7	7								
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000								
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)	250	250	300	350	350	350								
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)	<64	<64	<72	<76	?80	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59								
										Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)	7	7	7	7	7	7								
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000								
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)	250	250	300	350	350	350								
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan				200	202	204

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	########	262.256	274.280	284.467	295.226	########								
										Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)	5	20	40	60	80	100								
										Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)	17	17	17	19	19	19								
										Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)	52	67	72	79	85	93								
									PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	80	82	84	86	90	92								
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11								
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)	15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742								
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)	39,27	40	40,5	41,6	42,4	44								
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)	60	60	63	65	67	69	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian (%)				77	77	77
																	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)				50	58	66
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)	60	60	63	65	67	69								
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern (koperasi)	50	50	60	70	80	90	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya				0,04	0,07	0,11
																		Persentase pengelola UMKM yang bersertifikat				52	52	52

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
																		sesuai dengan bidang usahanya						
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi (produk)	45	100	120	125	130	615	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat volume usahanya				4	4	5
																	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)				47	47	47
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)	82	83	83,5	84	84,5	85	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi				15800	15850	15900
																		Jumlah Produksi Karet				1730	1735	1740
																		Jumlah Produksi Kakao				569	570	571
																		Jumlah Produksi :						
																		Daging Sapi				319	320	321
																		Daging Ayam				900,26	900,26	900,26
																		Telur				135,86	135,86	135,86
																		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam				01:10	01:10	01:10
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				2,5	2,5	2,5
										Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis				90	90	90
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanam				100	100	100
										Peningkatan Prasarana Peternakan (%)	20	20	20	20	20	100								
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan	0,65	0,63	0,6	0,57	0,54	0,53	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi				1	1	1

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									BENCANA PERTANIAN	hortikultura dan perkebunan (%)															
																		Jumlah Ketenangan Penyuluh yang berprestasi				1	1	1
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17								
										Meningkatnya sarana prasaranan penangkapan ikan (unit)	1.400	1.423	1.590	1.739	1.768	1.800								
										Meningkatnya sarpras UPTD Pelabuhan Perikanan (unit)	3	3	3	3	3	3								
										Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (dokumen)	100	100	100	100	100	100								
										Meningkatanya Pro duksi Perikanan Tangkap (ton)	######	222.693	225.081	227.546	230.081	######								
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan				200	202	204
										Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	######	262.256	274.280	284.467	295.226	######								
										Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)	5	20	40	60	80	100								
										Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)	17	17	17	19	19	19								
										Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)	52	67	72	79	85	93								
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan				39	39	39
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)	15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742								
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)	39,27	40	40,5	41,6	42,4	44								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO								
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen)	5	5,5	6,5	7,5	8,1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)		20	20	25	25		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)				2	2	2		
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI (%)		72	74	76	78		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai izin (%)				35	40	45		
									PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri (unit usaha)		41.373	43.263	45.363	47.673		Program Pengelola Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terpublis di SIINAS(%)				35	40	45		
			Kontribusi PDB pariwisata (Persen)	4,8	5	5,2	5,3	5,5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)	4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)				50	55	60		
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangan nya (DTW)	11	19	19	19	19	19	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional (%)				20	25	30		
																	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)				50	55	60		
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)				70	75	80		
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	3	4,5	6	7,5	9										
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)	3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29										
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)	1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88										
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439 - 1.452	1.564-1.570	1.689	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)	0	50	100	150	200	250	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)				1	2	3		
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang	196	296	396	496	596	696	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional				20	25	30		

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	bersertifikat (Orang)							PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
										Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	2	4	6	8	10	12								
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	NILAI REALISASI INVESTASI (MILYAR RUPIAH)				46	51	56
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat (dokumen pernyataan minat)	4	4	4	5	5	23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR (%)				27	29	31
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (Rp (triliun))	4,8	5,1	5,6	6,1	6,7	7,5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELUANG INVESTASI YANG TELAH DIVALIDASI (%)				40	50	60
									PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi (%)	15	20	40	60	80	100	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERAKSES PUBLIK (%)				100	100	100
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro (dokumen)	0	2	1	1	1	1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA (%)				100	100	100
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN YANG BERWIRAUSAHA (%)				5	7	9
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja (%)	31,77	35,52	36,01	36,5	36,99	37,97	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA (%)				23	25	27
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN YANG BERWIRAUSAHA (%)				5	7	9

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KOTA SAWAHLUNTO									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			Kontribusi tenaga kerja industri (Persen)	14,2	14,6	15	15,2	15,7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)		20	20	25	25			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)				2	2	2			
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)		20	20	25	25			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)				2	2	2			
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang)	13	13,5	14	14,5	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)	4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)				50	55	60			
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)	11	19	19	19	19	19												
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)				70	75	80			
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	3	4,5	6	7,5	9												
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)	3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29												
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)	1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88												
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang	19	20	20	21	21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)	0	50	100	150	200	250	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)				1	2	3			
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)	196	296	396	496	596	696	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional				20	25	30			
										Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	2	4	6	8	10	12												
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (juta US$)		1.420,99	########	#########	1.507,97												

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Dalam Negeri (TKDN)																						
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1	3	7,5	15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi (%)		5,5	5,8	6,2	6,5									
									PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)		6	6	6	6									
			Nilai devisa pariwisata (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)	4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)				50	55	60
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)	11	19	19	19	19	19								
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)				70	75	80
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	3	4,5	6	7,5	9								
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)	3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29								
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)	1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88								
		Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4																
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18																
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)	4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)				50	55	60
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi	11	19	19	19	19	19								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KOTA SAWAHLUNTO									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
										pengembangan nya (DTW)																		
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)				70	75	80				
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	3	4,5	6	7,5	9												
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)	3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29												
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)	1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88												
2		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan																										
		Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	0			0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi				158 00	158 50	159 00				
										Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68			Jumlah Produksi Karet				173 0	173 5	174 0				
																				Jumlah Produksi Kakao				569	570	571				
																				Jumlah Produksi :										
																				Daging Sapi				319	320	321				
																				Daging Ayam				900, 26	900, 26	900, 26				
																				Telur				135, 86	135, 86	135, 86				
																				Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam				01:1 0	01:1 0	01:1 0				
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				2,5	2,5	2,5				
										Peningkatan Prasarana Peternakan (%)	20	20	20	20	20	100												
		Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	0			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan (%)	73,92	75	77	79	81	82	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)				75,13	76,23	77,27				
		Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	0			0														Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)				95,03	95,21	95,94				
		Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis	0			0			PROGRAM PENELITIAN DAN	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian	42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA				100	100	100				

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah							PENGEMBANGAN DAERAH	dan pengkajian (%)							PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG MITRA (%)						
										Persentase SKPD yang terinovatif (%)	20	30	30	40	40	50	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%)				100	100	100
										Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)	2	10	10	10	12	12								
		Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.	0			0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %				110,25	111,21	111,4
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72		APM SD/MI/Paket A %				99,7	99,8	99,9
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional				2,19	2,27	2,37
																		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional				1,94	2,03	2,12
																		Tingkat partisipasi warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				100	100	100
																		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)				100	100	100
																		Presentase Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 juz				30,5	40	40,5

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)	69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MEMENUHI STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96								
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96								
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2								
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8								
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19								
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan	34,4	35	37	38	39	40								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Nasional untuk PBI JK daerah (%)														
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100								
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5								
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87								
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100								
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)				99	99,5	100
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)	81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%				92	92,25	92,97
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban	0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)				92	93	94

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)															
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti (%)	77	79	81	83	85	87	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)				100	100	100
										Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	75	77	79	81	83	85								
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani				100	100	100
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang terfasilitasi				100	100	100
										Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100								
										Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100								
										Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100								
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)		100	100	100	100	100	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)				100	100	100
3		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																							
		Pengendalian penduduk dan penguatan	0			0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan	26,66	40	50	60	70	80	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan KTP (%)				99,6	99,8	99,9

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI												RPJMD KOTA SAWAHLUNTO											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target											
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		tata kelola kependudukan								Kartu Identitas Anak (KIA) (%)																							
										Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	97,16	97,75	98	98,25	98,5	99						Cakupan KK (%)				92,2	94	96					
																						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)				75	80	85					
																						Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)				85	90	95					
																						Perekaman KTP elektronik (%)				99,6	99,8	99,9					
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%)	91,47	94	95	96	97	98					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Akte kelahiran (%)				65	68	70					
										Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100	100	100	100	100	100						Cakupan akte kematian (%)				100	100	100					
										Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	100	100	100	100	100	100																	
										Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan (%)	100	100	100	100	100	100																	
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data (inovasi)	3	6	9	12	15	18					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Validltas Data Kependudukan (%)				100	100	100					
										Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah (%)	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1																	
									PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun (dokumen)	3	3	3	3	3	3					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan (Buku)				3	3	3					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target					RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI Target						RPJMD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya (%)	80	80	85	90	90	90	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate /MCPR				66	68	70
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)	54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)				12,2	12	11,6
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)	51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga				86	87	88
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7		0		98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)		0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase TKSK yang berpatispasi dalam penanganan PPKS (%)				100	100	100
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2		0		80	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)		0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang terfasilitasi				100	100	100
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkatan Anak (orang)		25	25	25	25	25	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)				100	100	100
										Tersedianya Data Fakir Miskin yang valid (%)		100	100	100	100	100								
										Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif (persen)		30	35	40	50									
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86								
										Indeks Kepuasan	92	92	93	94	95	96								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI												RPJMD KOTA SAWAHLUNTO											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target											
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026					
										Masyarakat (IKM) (%)																						
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190																
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96																
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2																
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8																
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19																
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40																
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100																
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5																
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87																
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100																
										Persentase Rumah sakit yang	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11																

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)														
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96								
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96								
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2								
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8								
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	17	17	18	18	18	19								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										(kabupaten/kota)														
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40								
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100								
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5								
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87								
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100								
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI											RPJMD KOTA SAWAHLUNTO										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026				
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90							Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100				
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86																		
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96																		
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190																		
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96																		
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2																		
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8																		
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19																		
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40																		
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100																		
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5																		
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL)	78,6	79,6	81	83	85	87																		

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target					RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI Target						RPJMD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Sesuai Standar (%)														
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100								
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)	54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)				12,2	12	11,6
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8	7,7	7,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)	54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)				12,2	12	11,6
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)	54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)				12,2	12	11,6
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)	51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga				86	87	88
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100
										Indeks Kepuasan	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Masyarakat (IKM) (%)															
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96								
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96								
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2								
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8								
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19								
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40								
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100								
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5								
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100								
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan				50	75	100
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19								
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19								
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)				99	99,5	100
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)	81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%				92	92,25	92,97
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana,	1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan	Persentase perumahan yang sudah				84	85	86

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									UTILITAS UMUM (PSU)	Sarana dan Utilitas (PSU) (%)							Utilitas Umum (PSU)	dilengkapi PSU (%)						
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang terfasilitasi				100	100	100
										Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100								
										Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100								
										Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100								
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH				86	86,5	87
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85								
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)	21	22	24	27	28	30	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)				6	6	6
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)	82	83	83,5	84	84,5	85	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)				93	93	93

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KOTA SAWAHLUNTO									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri (Dasawisma)	10.800	11.300	11.800	12.300	12.800	13.300	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%)				100	100	100						
										Jumlah KAN yang aktif (lembaga adat)	299	350	400	450	500	544												
										Jumlah LPM Mandiri (LPM)	0	7	15	25	37	50												
										Jumlah Posyandu Mandiri (Posyandu)	2.319	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800												
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)	51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga				86	87	88						
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	5	10	20	30	40	50	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				95	95	95						
																		Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota					100	100	100						
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan				39	39	39						
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)	15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742												
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)	39,27	40	40,5	41,6	42,4	44												

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO								
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30		Jumlah Produksi Padi				15800	15850	15900
										Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Karet				1730	1735	1740
																			Jumlah Produksi Kakao				569	570	571
																			Jumlah Produksi :						
																			Daging Sapi				319	320	321
																			Daging Ayam				900,26	900,26	900,26
																			Telur				135,86	135,86	135,86
																			Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam				01:10	01:10	01:10
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)	0,65	0,63	0,6	0,57	0,54	0,53	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanam				100	100	100
									PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)		4	8	12	16		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Prestasi Hafizh Al quran terhadap jumlah santri rumah Tahfiz				10%	12%	15%
																			Peningkatan Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto (Milyar)				7,07	7,86	8,39
																			Persentase Ranperda yang difasilitasi (%)				100	100	100
																			Mou dengan pihak ketiga yang ditindaklanjuti (Dokumen)				1	1	1
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD		100	100	100	100		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD/RPD KEDALAM RKPD (%)				100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KOTA SAWAHLUNTO											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target											
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026						
										provinsi dengan RKPD provinsi (%)																				
																		PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (%)				100	100	100						
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16						
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100						
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100						
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86														
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96														
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190														
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96														
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2														
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8														
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19														
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk	34,4	35	37	38	39	40														

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										PBI JK daerah (%)														
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100								
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5								
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87								
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100								
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI												RPJMD KOTA SAWAHLUNTO											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target											
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96																
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190																
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96																
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2																
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8																
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19																
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40																
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100																
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5																
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87																
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100																

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96								
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96								
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2								
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8								
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai	17	17	18	18	18	19								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										eliminasi malaria (kabupaten/kota)														
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40								
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100								
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5								
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87								
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100								
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI												RPJMD KOTA SAWAHLUNTO											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target											
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026					
										Masyarakat (IKM) (%)												yang terakreditasi (%)											
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90						Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100					
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86																	
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96																	
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190																	
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96																	
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2																	
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8																	
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19																	
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40																	
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100																	
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5																	
										Persentase Kunjungan Neonatal	78,6	79,6	81	83	85	87																	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)														
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100								
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96								
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96								
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2								
										Jumlah Kabupaten/kot	4	4	6	6	8	8								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										a sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)														
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19								
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40								
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100								
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5								
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87								
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100								
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
			Persentase merokok	9,1	9	8,9	8,8	8,7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap				0,16	0,16	0,16

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target					RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI Target						RPJMD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			penduduk usia 10-18 tahun						KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	jumlah Penduduk						
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96								
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96								
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2								
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8								
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19								
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40								
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100								
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)														
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87								
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100								
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan				50	75	100
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19								
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19								
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI												RPJMD KOTA SAWAHLUNTO											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target											
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96						Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100					
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90						Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100					
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86																	
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96																	
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190																	
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96																	
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2																	
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8																	
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19																	
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40																	
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100																	
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5																	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87								
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100								
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan				50	75	100
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19								
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19								
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI											RPJMD KOTA SAWAHLUNTO										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026				
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90							Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100				
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86																		
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96																		
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190																		
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96																		
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2																		
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8																		
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19																		
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40																		
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100																		
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5																		
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL)	78,6	79,6	81	83	85	87																		

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Sesuai Standar (%)														
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100								
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan				50	75	100
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19								
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19								
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI												RPJMD KOTA SAWAHLUNTO											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target											
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026					
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86																
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96																
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190																
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96																
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2																
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8																
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19																
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40																
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100																
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5																
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87																
										Persentase pencapaian standar sarana	100	100	100	100	100	100																

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										pelayanan kesehatan (%)														
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggarany a sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96								
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96								
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2								
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8								
										Jumlah Kabupaten/kot	17	17	18	18	18	19								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										a yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)														
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40								
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100								
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5								
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87								
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100								
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11								
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100								
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6								
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: 1. Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,1; 2. 388,7; 3. 400,4	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,7; 2. 392,3; 3. 406,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %				110,25	111,21	111,4
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72		APM SD/MI/Paket A %				99,7	99,8	99,9

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional				2,19	2,27	2,37
																		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional				1,94	2,03	2,12
																		Tingkat partisipasi warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				100	100	100
																		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)				100	100	100
																		Presentase Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 juz				30,5	40	40,5
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): 1.Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 34,4; 2. 46,6; 3. 49	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 35,6; 2. 47,4; 3. 51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %				110,25	111,21	111,4
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72		APM SD/MI/Paket A %				99,7	99,8	99,9
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional				2,19	2,27	2,37
																		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional				1,94	2,03	2,12
																		Tingkat partisipasi warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				100	100	100
																		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang				100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
																		berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)						
																		Presentase Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 juz				30,5	40	40,5
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %				110,25	111,21	111,4
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72		APM SD/MI/Paket A %				99,7	99,8	99,9
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional				2,19	2,27	2,37
																		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional				1,94	2,03	2,12
																		Tingkat partisipasi warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				100	100	100
																		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)				100	100	100
																		Presentase Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 juz				30,5	40	40,5
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %				110,25	111,21	111,4
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72		APM SD/MI/Paket A %				99,7	99,8	99,9
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional				2,19	2,27	2,37
																		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan				1,94	2,03	2,12

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
																			assesmen nasional						
																			Tingkat partisipasi warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				100	100	100
																			Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)				100	100	100
																			Presentase Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 juz				30,5	40	40,5
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen)	27	33	39	45	51	57	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PESENTASE KURIKULUM MUATAN LOKAL YANG DIKEMBANGKAN				100	100	100
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)	69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MEMENUHI STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				100	100	100
									PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%)	6	21	36	51	66	81	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE REKOMENDASI PERIZINAN PENDIDIKAN YANG DISELENGARAKAN OLEH MASYARAKAT JENJANG PAUD/SD/SMP)				100	100	100
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)	2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan ramah anak (%)				100	100	100
																			Persentase sekolah ramah anak (%)				100	100	100
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan	81	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memproleh layanan sesuai				100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										komprehensif (%)									(per 1000 anak (permil)							
																			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)				100	100	100
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)	2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan ramah anak (%)				100	100	100
																			Persentase sekolah ramah anak (%)				100	100	100
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)	81	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memproleh layanan sesuai (per 1000 anak (permil)				100	100	100
																			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)				100	100	100
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,212	91,278	91,279	91,335	91,386	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)				20	20	20
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,245	73,501	73,741	73,966	74,177	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)				20	20	20
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)				20	20	20
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	81	84	88	92	96	100	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)				20	20	20
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (indeks)	69,5	70	70,5	71	71,5	72	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase PKK aktif (%)				100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2020	2021	2022	2023	2024	RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target 2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target 2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)	14	15	16	17	18	20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)				16	17	18
										Jumlah wirausaha muda baru (orang)	230	268	348	348	348	1890								
		Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9		0		40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)		0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase TKSK yang berpatispasi dalam penanganan PPKS (%)				100	100	100
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25,6		0		50	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)		0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase TKSK yang berpatispasi dalam penanganan PPKS (%)				100	100	100
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	2E+06	2E+06	1E+06	1E+06	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26								
										Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)	20	20	20	20	20	20								
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000								
			Bidang tanah yang diredistribusi	750000		0		8E+06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti (%)	65	70	75	80	85	90	Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)				100	100	100
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6E+06		0		6E+07	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)	80	85	90	95	95	95								
									PROGRAM PENETAPAN	Persentase Luas Penetapan	75	80	85	90	95	95	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase penetapan tanah ulayat				100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target					RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI Target						RPJMD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									TANAH ULAYAT	Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)								yang lokasinya di dalam daerah kota (%)						
									PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan (%)	50	55	60	70	75	80	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)				81	82	83
		Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %				110,25	111,21	111,4
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72		APM SD/MI/Paket A %				99,7	99,8	99,9
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional				2,19	2,27	2,37
																		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional				1,94	2,03	2,12
																		Tingkat partisipasi warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				100	100	100
																		Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)				100	100	100
																		Presentase Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 juz				30,5	40	40,5
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN YANG BERWIRAUSAHA (%)				5	7	9
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University : 1. Top 200, 2. Top 300, 3. Top 500	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 1; 2. 2; 3. 3.																
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT	PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN YANG				5	7	9

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO								
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									S TENAGA KERJA									AS TENAGA KERJA	BERWIRAUSAHA (%)							
4		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan																								
		Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	0			0			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi (nilai)	2,7	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)				57	60	65	
		Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan (Karya Budaya)		8	8	8	8			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Kebudayaan Yang Lestari (%)				31,1	31,3	31,5	
									PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan (Kesenian Tradisional)		21	23	23	23			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri (Kelompok)				13,3	13,6	13,9	
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan (Cagar Budaya)		11	16	21	26			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar Budaya Yang Lestari (%)				63,92	65	67	
										Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (Cagar Budaya)		15	15	15	15											
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum (kali)		15	15	15	15			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)				33000	33500	34000	
										Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum (orang)		30000	35000	40000	45000											

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO								
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama			0			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)		4	8	12	16		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Prestasi Hafizh Al quran terhadap jumlah santri rumah Tahfiz				10%	12%	15%	
																			Peningkatan Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto (Milyar)				7,07	7,86	8,39	
																			Persentase Ranperda yang difasilitasi (%)				100	100	100	
																			Mou dengan pihak ketiga yang ditindaklanjuti (Dokumen)				1	1	1	
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama				100	100	100	
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun (dokumen)	N/A	3	6	9	12	15									
										Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah (Orang)	N/A	6	12	18	24	30									
									PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP (%)		1,41	1,52	1,62	1,72		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)				74,5	74,6	74,7	
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)	42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%)				100	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KOTA SAWAHLUNTO											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target											
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026						
										Persentase SKPD yang terinovatif (%)	20	30	30	40	40	50														
										Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)	2	10	10	10	12	12														
5		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																												
		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)	0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)				92	93	94						
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)	0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)				92	93	94						
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)	75	80	85	90	95	95	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota (%)				100	100	100						
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,1	3,3	3,6	4																							
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)	81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%				92	92,25	92,97						
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)	1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)				84	85	86						
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan				50	75	100						

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target					RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI Target						RPJMD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19								
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19								
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)	1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)				84	85	86
									PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)	75	75	75	75	75	75	Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup(%)				100	100	100
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk				0,16	0,16	0,16
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)				100	100	100
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90		Persentase Puskesmas terakreditasi				100	100	100
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96								
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190								
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96								
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan	2	2	2	2	2	2								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI												RPJMD KOTA SAWAHLUNTO											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target											
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026					
										pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)																							
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8																
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19																
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40																
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100																
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5																
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87																
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100																
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11																
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100																
										Prevalensi Stunting (Pendek dan	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6																

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)														
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan				50	75	100
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19								
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19								
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)	1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)				84	85	86
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)				99	99,5	100
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)	0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)				92	93	94
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,502	55,181	57,06	58,105	58,499	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)				50,55	51,72	52,45
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6								
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5								
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)				50,55	51,72	52,45

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6								
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5								
			Luas lahan pertanian padi dan non[1]padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229	115943	116143	116343	116343	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)				50,55	51,72	52,45
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6								
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5								
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani				100	100	100
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,433	11,433	11,433	11,433	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)				50,55	51,72	52,45
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6								
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5								
									PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi (lokasi)	1	10	10	10	10	10								
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)	39,07	40,27	41,51	42,17	43,65	44,81	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)				100	100	100
										Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45								
		Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)			0			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat	80	85	90	95	95	95								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target					RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI Target						RPJMD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)													
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)			0																	
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)			0																	
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)			0			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tersusunnya Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi (dokumen)	1	1	1	1	1	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase sarana prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)				90	95	100
		Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)	39,07	40,27	41,51	42,17	43,65	44,81	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)				100	100	100
										Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45								
		Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9								
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9								
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8								
		Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5) (indeks)	3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan Publik) x 100%				86	87	88
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3															
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100															
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon	70	72	73	74	75,7															

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			genggam (Persentase)																					
6		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim																						
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80								
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80								
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	59	59,5	60	60,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80								
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80								
									PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya (Kabupaten/Kota)	19	19	19	19	19	19								
		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1																
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0,34	0,59	0,81	1	1,15																
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,5	4	3,5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani				100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target					RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI Target						RPJMD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8								
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi				15800	15850	15900
										Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68		Jumlah Produksi Karet				1730	1735	1740
																			Jumlah Produksi Kakao				569	570	571
																			Jumlah Produksi :						
																			Daging Sapi				319	320	321
																			Daging Ayam				900,26	900,26	900,26
																			Telur				135,86	135,86	135,86
																			Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam				01:10	01:10	01:10
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi				15800	15850	15900
										Peningkatan Prasarana Peternakan (%)	20	20	20	20	20	100		Jumlah Produksi Karet				1730	1735	1740
																			Jumlah Produksi Kakao				569	570	571
																			Jumlah Produksi :						
																			Daging Sapi				319	320	321
																			Daging Ayam				900,26	900,26	900,26
																			Telur				135,86	135,86	135,86
																			Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam				01:10	01:10	01:10
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	0,1	3,41	4,71	4,94	5,19	5,48	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis				90	90	90
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)	0,65	0,63	0,6	0,57	0,54	0,53	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanam				100	100	100
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian (%)	3	5	7	8	10	12								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (%)	3	3	3	3	3	15								
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26								
										Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)	20	20	20	20	20	20								
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)	1	3	3	3	3	3								
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9	9,3	9,4	9,4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya pembangunan TPA Regional (lokasi)	2	2	3	3	3	3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang terkelola (%)				97	98	99
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)	81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%				92	92,25	92,97
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya pengelolaan drainase kewenangan provinsi (Km)	1	2	10	15	25	36	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)				47,78	48,66	49,26
									PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat (%)		60	65	70	75		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang terkelola (%)				97	98	99
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2	2,3	2,5	2,6	2,9	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80	Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan				78	79	80
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)	39,07	40,27	41,51	42,17	43,65	44,81	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)				100	100	100
										Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45								
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7	7,3	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KOTA SAWAHLUNTO							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										pulau pulau kecil (%)															
										Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)	7	7	7	7	7	7								
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000								
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)	250	250	300	350	350	350								
7		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik																							
		Konsolidasi Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	75,3	75,35	75,4	75,45	75,5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (nilai)	3,26	3,27	3,28	3,29	3,3	3,31	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu				86,25	0	0
		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67										Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan kepala daerah				82,5	0	0
		Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas	70	75	80	85	85										Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur				65,8	0	0
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas	50	60	70	80	85	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk (%)	100	100	100	100	100	100								
										Penataan Jabatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100								
										Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis (Perangkat Daerah)	8	12	16	18	20	22								
										Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	7	8	10	12	14	16								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2020	2021	2022	2023	2024	RPJMD PROVINSI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target 2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target 2021	2022	2023	2024	2025	2026
										(Perangkat Daerah)															
										Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik (Perangkat Daerah)	5	7	9	11	13	15									
									PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (%)	65	70	75	80	85	90	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)				3,7	3,75	3,8
																			Persentase Rekomendasi Kebijakan yang disusun (rekomendasi)				3	5	5
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas	30	35	45	55	70																
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,2																
			Global Terorism Index	04.44	04.39	04.34	04.29	04.24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama				100	100	100
																			Desa Bersinar yang terbentuk				1	1	1
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase gejala konflik sosial yang dapat diselesaikan				100	100	100
																			Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis				100	100	100
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama				100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KOTA SAWAHLUNTO									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
									SOSIAL, DAN BUDAYA									SOSIAL, DAN BUDAYA										
																			Desa Bersinar yang terbentuk								1	1	1
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase gejala konflik sosial yang dapat diselesaikan							100	100	100
																			Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis								100	100	100
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama							100	100	100
																			Desa Bersinar yang terbentuk								1	1	1
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase gejala konflik sosial yang dapat diselesaikan							100	100	100
																			Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis								100	100	100

BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

RPD

KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024 - 2026

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

Jl. Soekarno - Hatta No. 3 Lubang Panjang
Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27424
(0754) 61009, Fax (0754) 62200
barenlitbangda.sawahluntokota.go.id
bappedaswl@gmail.com